

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
2019

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. DASAR HUKUM	1
1.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Daerah	1
1.1.2. Dasar Hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah	1
1.2. DATA UMUM DAERAH	5
1.2.1. Kondisi Geografis, Batas Administratif Daerah, Luas Wilayah Dan Topografis	5
1.2.2. Kondisi Demografis	7
1.2.3. Kondisi Ekonomi	9
1.3. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH	23
1.3.1. Visi	23
1.3.2. Misi	24
1.3.3. Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah	26
1.3.4. Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2019	29
BAB II. PENJABARAN APBD	43
2.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	43
2.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan	43
2.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan	45
2.1.3. Permasalahan dan Solusi	58
2.2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH	60
2.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah	60
2.2.2. Target dan Realisasi Belanja	63
2.2.3. Permasalahan dan Solusi	67
2.3. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH	68
2.3.1. Kebijakan Anggaran Pembiayaan	68
2.3.2. Target dan Realisasi	68
2.3.3. Sisa Perhitungan Anggaran	70
BAB III. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH	71
3.1. Capaian Visi Misi Prioritas Daerah	71
3.1.1. Capaian Visi dan Misi Daerah Tahun 2019	71
3.1.2. Capaian Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019	95
3.2. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	106

3.2.1.	<i>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</i>	106
3.2.2.	<i>Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</i>	237
3.2.3.	<i>Urusan Pemerintahan Pilihan</i>	367
3.2.4.	<i>Penunjang Urusan Pemerintahan</i>	416
3.2.5.	<i>Pendukung Operasional Perangkat Daerah</i>	570
3.3.	<i>Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2018</i>	576
BAB IV.	<i>PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN</i>	585
4.1.	<i>TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA</i>	585
4.1.1.	<i>Dinas Pendidikan</i>	586
4.1.2.	<i>Dinperinaker</i>	588
4.1.3.	<i>Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman</i>	591
4.1.4.	<i>Dinas Kesehatan</i>	594
4.1.5.	<i>Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</i>	597
4.1.6.	<i>Dinas Pertanian dan Pangan</i>	599
4.2.	<i>TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN</i>	600
BAB V.	<i>PENUTUP</i>	601

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan.....	6
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015-2019.....	7
Tabel 1.3	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015-2019.....	8
Tabel 1.4	Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015-2019.....	8
Tabel 1.5	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 Menurut Kelompok Umur	9
Tabel 1.6	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Pekalongan Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2015–2019	11
Tabel 1.7	Sumber Pertumbuhan Kota Pekalongan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2019	12
Tabel 1.8	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Pekalongan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2015–2019.....	13
Tabel 1.9	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Pekalongan Tahun 2015-2019.....	15
Tabel 1.10	Perkembangan Inflasi Kota Pekalongan, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 (%).....	16
Tabel 1.11	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019 (%).....	17
Tabel 1.12	Nilai Ekspor Kota Pekalongan Tahun 2015-2019.....	17
Tabel 1.13	Garis Kemiskinan & Persentase Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2019.....	18
Tabel 1.14	Rasio TPAK, TKK, TPT Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2019.....	21
Tabel 1.15	Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2019	22
Tabel 1.16	Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Misi I.....	26
Tabel 1.17	Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Misi II.....	27
Tabel 1.18	Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Misi III	27
Tabel 1.19	Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Misi IV.....	28
Tabel 1.20	Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Misi V	28
Tabel 1.21	Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Misi VI.....	29
Tabel 1.22	Target Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019	33
Tabel 2.1	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2018	45
Tabel 2.2	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.....	46
Tabel 2.3	Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2018.....	46
Tabel 2.4	Target dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2018.....	48

Tabel 2.5	Target dan Realisasi Hasil Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2018.....	50
Tabel 2.6	Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2018	51
Tabel 2.7	Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2018	53
Tabel 2.8	Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2018	54
Tabel 2.9	Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2018	54
Tabel 2.10	Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2018.....	55
Tabel 2.11	Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2018	57
Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018	64
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018	69
Tabel 2.14	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018	70
Tabel 3.1	Rekapitulasi Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran pada Tahun 2019.....	71
Tabel 3.2	Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pada Misi I	72
Tabel 3.3	Angka Partisipasi Sekolah Kota Pekalongan	73
Tabel 3.4	Akreditasi Sekolah.....	73
Tabel 3.5	Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pada Misi II	74
Tabel 3.6	Perbandingan Angka Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2018 s.d. 2019	75
Tabel 3.7	Perbandingan Angka Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2018 s.d. 2019.....	75
Tabel 3.8	Hasil Penilaian SAKIP Kota Pekalongan	77
Tabel 3.9	Capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018-2019.....	80
Tabel 3.10	Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pada Misi III.....	81
Tabel 3.11	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.....	81
Tabel 3.12	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Pekalongan Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2018–2019	81
Tabel 3.13	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Sektor Perdagangan dan Jasa Kota Pekalongan Tahun 2018 dan 2019.....	83
Tabel 3.14	Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pada Misi IV	83
Tabel 3.15	Target Pembangunan Jalan.....	84
Tabel 3.16	Capaian Pembangunan Jalan.....	85
Tabel 3.17	Pemenuhan Ruang Publik Ramah Lingkungan	85
Tabel 3.18	Persandingan Cakupan Sarana Prasarana Permukiman Perkotaan Tahun 2018 dan 2019.....	87
Tabel 3.19	Penanganan Kumuh di Kota Pekalongan Tahun 2018 s.d 2019	87

Tabel 3.20	Data Hasil Survei VC Ratio Jalan Nasional Kota Pekalongan Tahun 2019.....	88
Tabel 3.21	Capaian IKLH Kota Pekalongan Tahun 2017-2019	89
Tabel 3.22	Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pada Misi V.....	90
Tabel 3.23	Teknologi Informasi yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan Komunitas.....	90
Tabel 3.24	Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pada Misi VI	92
Tabel 3.25	Daftar Penyelenggaraan Even Pentas Seni Budaya Pada Tahun 2019	93
Tabel 3.26	Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter Kota Pekalongan Tahun 2018 s.d. 2019.....	94
Tabel 3.27	Target dan Capaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019	96
Tabel 3.28	Target dan Capaian Indikator Program Pendidikan Anak Usia Dini	106
Tabel 3.29	Target dan Capaian Indikator Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.....	107
Tabel 3.30	Target dan Capaian Indikator Program Pendidikan Non Formal.....	107
Tabel 3.31	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	108
Tabel 3.32	Target dan Capaian Indikator Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.....	110
Tabel 3.33	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Akses Terhadap Layanan Pendidikan	110
Tabel 3.34	Target dan Capaian Indikator	110
Tabel 3.35	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Dasar.....	111
Tabel 3.36	Target dan Capaian Indikator Program Pembentukan Karakter Anak.....	111
Tabel 3.37	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PAUD dan PNF.....	112
Tabel 3.38	Target dan Capaian Indikator Program Pembentukan Karakter Siswa	112
Tabel 3.39	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pendidikan Anak Usia Dini.....	113
Tabel 3.40	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	114
Tabel 3.41	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pendidikan Non Formal	115
Tabel 3.42	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.....	116
Tabel 3.43	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	118
Tabel 3.44	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Akses Terhadap Layanan Pendidikan	119
Tabel 3.45	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan.....	120
Tabel 3.46	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Dasar.....	122

Tabel 3.47	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pembentukan Karakter Anak.....	123
Tabel 3.48	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PAUD dan PNF.....	124
Tabel 3.49	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pembentukan Karakter Siswa.....	125
Tabel 3.50	Target dan Capaian Indikator Program Pengawasan Obat Dan Makanan	130
Tabel 3.51	Target dan Capaian Indikator Program Perbaikan Gizi Masyarakat.....	131
Tabel 3.52	Target dan Capaian Indikator Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.....	131
Tabel 3.53	Target dan Capaian Indikator Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	132
Tabel 3.54	Target dan Capaian Indikator Program Pelayanan BLUD Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya	133
Tabel 3.55	Target dan Capaian Indikator Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga.....	133
Tabel 3.56	Target dan Capaian Indikator Program Kesehatan Keluarga.....	134
Tabel 3.57	Target dan Capaian Indikator Program Jaminan Kesehatan	135
Tabel 3.58	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Sarana Prasarana, Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan obat asli Indonesia.....	135
Tabel 3.59	Target dan Capaian Indikator Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan.....	136
Tabel 3.60	Target dan Capaian Indikator Program Manajemen Pelayanan Kesehatan.....	137
Tabel 3.61	Jumlah Tempat Tidur Ruang Perawatan pada RSUD Bendan	137
Tabel 3.62	Target dan Capaian Indikator Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	141
Tabel 3.63	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Pelayanan BLUD	141
Tabel 3.64	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak di Rumah Sakit.....	142
Tabel 3.65	Target dan Capaian Indikator Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan	143
Tabel 3.66	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan	143
Tabel 3.67	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengawasan Obat dan Makanan.....	144
Tabel 3.68	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Perbaikan Gizi Masyarakat.....	147
Tabel 3.69	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	149
Tabel 3.70	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	151
Tabel 3.71	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pelayanan BLUD Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya	155

Tabel 3.72	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga	155
Tabel 3.73	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Kesehatan Keluarga.....	158
Tabel 3.74	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Jaminan Kesehatan.....	161
Tabel 3.75	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Sarana Prasarana, Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan obat asli Indonesia.....	162
Tabel 3.76	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan.....	167
Tabel 3.77	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak	170
Tabel 3.78	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	172
Tabel 3.79	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Pelayanan BLUD	174
Tabel 3.80	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak di Rumah Sakit.....	174
Tabel 3.81	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan	175
Tabel 3.82	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan	176
Tabel 3.83	Target dan Capaian Indikator Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan.....	179
Tabel 3.84	Target dan Capaian Indikator Program Pengendalian Banjir	180
Tabel 3.85	Target dan Capaian Indikator Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	180
Tabel 3.86	Target dan Capaian Indikator Program Pemanfaatan Ruang.....	181
Tabel 3.87	Target dan Capaian Indikator Program peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.....	181
Tabel 3.88	Target dan Capaian Indikator Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi.....	182
Tabel 3.89	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Drainase	182
Tabel 3.90	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	183
Tabel 3.91	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengendalian Banjir.....	184
Tabel 3.92	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	186
Tabel 3.93	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pemanfaatan Ruang	189
Tabel 3.94	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	189
Tabel 3.95	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi.....	192

Tabel 3.96	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Drainase	192
Tabel 3.97	Target dan Capaian Indikator Program Pengembangan Perumahan.....	194
Tabel 3.98	Target dan Capaian Indikator Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman	195
Tabel 3.99	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Perumahan	195
Tabel 3.100	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman	197
Tabel 3.101	Target dan Capaian Indikator Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal.....	199
Tabel 3.102	Target dan Capaian Indikator Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT).....	200
Tabel 3.103	Target dan Capaian Indikator Program Pelayanan Kedaruratan Sipil.....	200
Tabel 3.104	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah	201
Tabel 3.105	Target dan Capaian Indikator Program Penanggulangan Bencana Alam.....	201
Tabel 3.106	Target dan Capaian Indikator Program Pendidikan Politik Masyarakat.....	202
Tabel 3.107	Target dan Capaian Indikator Program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	202
Tabel 3.108	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal.....	203
Tabel 3.109	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT).....	206
Tabel 3.110	Rekapitulasi Rokok Tanpa Pita Cukai Tahun 2019	207
Tabel 3.111	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pelayanan Kedaruratan Sipil.....	208
Tabel 3.112	Rekapitulasi Pemadaman Kebakaran Tahun 2019.....	210
Tabel 3.113	Rekapitulasi Evakuasi Hewan Liar Oleh Pemadam Kebakaran.....	211
Tabel 3.114	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah.....	215
Tabel 3.115	Rekapitulasi Penegakan Perda dan Keputusan Walikota	216
Tabel 3.116	Rekapitulasi Pelanggaran PK5 Tahun 2019	216
Tabel 3.117	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Penanggulangan Bencana Alam	219
Tabel 3.118	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pendidikan Politik Masyarakat.....	223
Tabel 3.119	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	224
Tabel 3.120	Target dan Capaian Indikator Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	230

Tabel 3.121	Target dan Capaian Indikator Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.....	230
Tabel 3.122	Data PMKS Tahun 2019	231
Tabel 3.123	Target dan Capaian Indikator Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.....	232
Tabel 3.124	Data PSKS Tahun 2019	233
Tabel 3.125	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	233
Tabel 3.126	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	234
Tabel 3.127	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.....	236
Tabel 3.128	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja.....	237
Tabel 3.129	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Kesempatan Kerja	238
Tabel 3.130	Target dan Capaian Indikator Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.....	238
Tabel 3.131	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja.....	240
Tabel 3.132	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kesempatan Kerja.....	243
Tabel 3.133	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.....	246
Tabel 3.134	Target dan Capaian Indikator Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak.....	252
Tabel 3.135	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.....	253
Tabel 3.136	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak.....	254
Tabel 3.137	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.....	258
Tabel 3.138	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Ketahanan Pangan.....	264
Tabel 3.139	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan.....	264
Tabel 3.140	Target dan Capaian Indikator Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah.....	269
Tabel 3.141	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	269
Tabel 3.142	Target dan Capaian Indikator Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.....	271
Tabel 3.143	Target dan Capaian Indikator Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	271
Tabel 3.144	Target dan Capaian Indikator Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	272

Tabel 3.145	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	272
Tabel 3.146	Target dan Capaian Indikator Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	273
Tabel 3.147	Target dan Capaian Indikator Program Pengawasan Dan Penataan Hukum Lingkungan.....	273
Tabel 3.148	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.....	274
Tabel 3.149	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	276
Tabel 3.150	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam.....	278
Tabel 3.151	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup.....	278
Tabel 3.152	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).....	281
Tabel 3.153	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengawasan Dan Penataan Hukum Lingkungan	281
Tabel 3.154	Jenis Pelayanan Dindukcapil Kota Pekalongan	283
Tabel 3.155	Target dan Capaian Indikator Program Penataan Administrasi Kependudukan.....	285
Tabel 3.156	Target dan Capaian Indikator Program Pendaftaran Penduduk.....	285
Tabel 3.157	Target dan Capaian Indikator Program Pencatatan Sipil.....	285
Tabel 3.158	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Penataan Administrasi Kependudukan	287
Tabel 3.159	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pendaftaran Penduduk	290
Tabel 3.160	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pencatatan Sipil	292
Tabel 3.161	Data LKK Kota Pekalongan	295
Tabel 3.162	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	296
Tabel 3.163	Target dan Capaian Indikator Program Pemberdayaan Masyarakat.....	296
Tabel 3.164	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	297
Tabel 3.165	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	297
Tabel 3.166	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pemberdayaan Masyarakat	303
Tabel 3.167	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	305
Tabel 3.168	Target dan Capaian Indikator Program Keluarga Berencana	309
Tabel 3.169	Target dan Capaian Indikator Program Keluarga Berencana	310
Tabel 3.170	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Keluarga Berencana	310
Tabel 3.171	Target dan Capaian Indikator Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	313

Tabel 3.172	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	313
Tabel 3.173	Target dan Capaian Indikator Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas.....	314
Tabel 3.174	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan.....	314
Tabel 3.175	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.....	317
Tabel 3.176	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas.....	319
Tabel 3.177	Target dan Capaian Indikator Program Pengembangan Infrastruktur TIK	323
Tabel 3.178	Target dan Capaian Indikator Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	323
Tabel 3.179	Target dan Capaian Indikator Program Pengelolaan Diseminasi Informasi, Kerjasama Media Dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik	324
Tabel 3.180	Target dan Capaian Indikator Program Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat dan Penguatan KIP	324
Tabel 3.181	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Infrastruktur TIK	325
Tabel 3.182	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	326
Tabel 3.183	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengelolaan Diseminasi Informasi, Kerjasama Media Dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik.....	329
Tabel 3.184	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat dan Penguatan KIP	330
Tabel 3.185	Persentase Koperasi Aktif Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019	332
Tabel 3.186	Jumlah UMKM Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019	332
Tabel 3.187	Target dan Capaian Indikator Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif.....	333
Tabel 3.188	Target dan Capaian Indikator Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	333
Tabel 3.189	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	334
Tabel 3.190	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	335
Tabel 3.191	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	336
Tabel 3.192	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	337
Tabel 3.193	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.....	340
Tabel 3.194	Target dan Capaian Indikator Program Pelaksanaan Dan Pengendalian Penanaman Modal.....	341
Tabel 3.195	Perusahaan dengan Nilai Investasi terbesar di Kota Pekalongan pada tahun 2019	341

Tabel 3.196	Target dan Capaian Indikator Program Pelayanan Perizinan.....	342
Tabel 3.197	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.....	342
Tabel 3.198	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pelaksanaan Dan Pengendalian Penanaman Modal.....	343
Tabel 3.199	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pelayanan Perizinan.....	344
Tabel 3.200	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.....	347
Tabel 3.201	Target dan Capaian Indikator Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	347
Tabel 3.202	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga.....	348
Tabel 3.203	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.....	348
Tabel 3.204	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	350
Tabel 3.205	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga.....	352
Tabel 3.206	Target dan Capaian Indikator Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.....	353
Tabel 3.207	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.....	354
Tabel 3.208	Target dan Capaian Indikator Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan	355
Tabel 3.209	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan	355
Tabel 3.210	Target dan Capaian Indikator Program Pengembangan Dan Pengelolaan Kekayaan Budaya	357
Tabel 3.211	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Dan Pengelolaan Kekayaan Budaya	358
Tabel 3.212	Target dan Capaian Indikator Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.....	361
Tabel 3.213	Target dan Capaian Kinerja Output Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	362
Tabel 3.214	Target dan Capaian Indikator Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan	364
Tabel 3.215	Target dan Capaian Indikator Program Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip.....	365
Tabel 3.216	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan	365
Tabel 3.217	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip.....	366
Tabel 3.218	Target dan Capaian Indikator Program Pengembangan Perikanan Tangkap	367
Tabel 3.219	Nilai Produksi Perikanan Tangkap di TPI Kota Pekalongan.....	368
Tabel 3.220	Realisasi PAD Bersumber dari TPI	368

Tabel 3.221	Target dan Capaian Indikator Program Pengembangan Agribisnis Budidaya Perikanan.....	368
Tabel 3.222	Realisasi Produksi Perikanan Budidaya.....	369
Tabel 3.223	ANgka Konsumsi Ikan Kota Pekalongan	369
Tabel 3.224	Target dan Capaian Indikator Program Pengembangan Technopark Perikanan	370
Tabel 3.225	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap	370
Tabel 3.226	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Agribisnis Budidaya Perikanan.....	371
Tabel 3.227	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Technopark Perikanan	373
Tabel 3.228	Target dan Capaian Indikator Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	376
Tabel 3.229	Target dan Capaian Indikator Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	376
Tabel 3.230	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	377
Tabel 3.231	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	378
Tabel 3.232	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.....	382
Tabel 3.233	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	383
Tabel 3.234	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian.....	383
Tabel 3.235	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Pelayanan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	383
Tabel 3.236	Pelayanan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan :.....	384
Tabel 3.237	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	385
Tabel 3.238	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian	387
Tabel 3.239	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian.....	388
Tabel 3.240	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Pelayanan Peternakan Dan Kesehatan Hewan.....	391
Tabel 3.241	Jenis Pasar dan Toko di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019	394
Tabel 3.242	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2015-2018.....	395
Tabel 3.243	Perkembangan Nilai Ekspor.....	395
Tabel 3.244	Target dan Capaian Indikator Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	396
Tabel 3.245	Target dan Capaian Indikator Program Pengembangan Ekspor	396
Tabel 3.246	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.....	397

Tabel 3.247	Target dan Capaian Indikator Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan.....	397
Tabel 3.248	Target dan Capaian Indikator Program Pengembangan Pasar Tradisional.....	398
Tabel 3.249	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan.....	398
Tabel 3.250	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Ekspor.....	400
Tabel 3.251	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.....	402
Tabel 3.252	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan	405
Tabel 3.253	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Pasar Tradisional.....	406
Tabel 3.254	Target dan Capaian Indikator Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah	410
Tabel 3.255	Target dan Capaian Indikator Program Penataan Struktur Industri.....	411
Tabel 3.256	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri.....	411
Tabel 3.257	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah.....	412
Tabel 3.258	Target dan Capaian Kinerja Output Program Penataan Struktur Industri.....	413
Tabel 3.259	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri.....	414
Tabel 3.260	Target dan Capaian Indikator Program Pengembangan Data/Informasi	417
Tabel 3.261	Target dan Capaian Indikator Program Perencanaan Pembangunan Daerah.....	417
Tabel 3.262	Target dan Capaian Indikator Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi.....	418
Tabel 3.263	Target dan Capaian Indikator Program Perencanaan Infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	418
Tabel 3.264	Target dan Capaian Indikator Program Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial Dan Budaya	418
Tabel 3.265	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Data/Informasi	419
Tabel 3.266	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah.....	420
Tabel 3.267	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	423
Tabel 3.268	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Perencanaan Infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman.....	425
Tabel 3.269	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial Dan Budaya.....	427
Tabel 3.270	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Pendapatan Daerah	432

Tabel 3.271	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	432
Tabel 3.272	Target dan Capaian Indikator Program Penyusunan APBD Dan Pengelolaan Hibah Bansos	433
Tabel 3.273	Target dan Capaian Indikator Program Pengelolaan Akuntansi Dan Pelaporan	433
Tabel 3.274	Target dan Capaian Indikator Program Penagihan Dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah	433
Tabel 3.275	Target dan Capaian Indikator Program Pengelolaan Perbendaharaan Dan Kas Daerah	433
Tabel 3.276	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Pendapatan Daerah.....	434
Tabel 3.277	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah.....	435
Tabel 3.278	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Penyusunan APBD Dan Pengelolaan Hibah Bansos.....	437
Tabel 3.279	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengelolaan Akuntansi Dan Pelaporan.....	438
Tabel 3.280	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Penagihan Dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah.....	439
Tabel 3.281	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengelolaan Perbendaharaan Dan Kas Daerah	440
Tabel 3.282	Target dan Capaian Indikator Program Penataan Dan Pengembangan Aparatur.....	445
Tabel 3.283	Perubahan SOTK Pada Setda dan Kecamatan.....	446
Tabel 3.284	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur.....	446
Tabel 3.285	Target dan Capaian Indikator Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian.....	446
Tabel 3.286	Target dan Capaian Indikator Program Pelayanan Informasi Kepegawaian.....	447
Tabel 3.287	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Penataan Dan Pengembangan Aparatur.....	447
Tabel 3.288	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	450
Tabel 3.289	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian	451
Tabel 3.290	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pelayanan Informasi Kepegawaian	453
Tabel 3.291	Target dan Capaian Indikator Program Pengkajian dan Penelitian	454
Tabel 3.292	Target dan Capaian Indikator Program Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah	455
Tabel 3.293	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengkajian dan Penelitian	455
Tabel 3.294	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah.....	457
Tabel 3.295	Pemenang dan Judul Inovasi Krenova Tahun 2019	458

Tabel 3.296	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan	460
Tabel 3.297	Target dan Capaian Indikator Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	461
Tabel 3.298	Target dan Capaian Indikator Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai (DBHCHT)	461
Tabel 3.299	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Hukum	461
Tabel 3.300	Target dan Capaian Indikator Program Penataan Ketatalaksanaan, Kelembagaan Dan Pendayagunaan Aparatur	462
Tabel 3.301	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	463
Tabel 3.302	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian.....	464
Tabel 3.303	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian	464
Tabel 3.304	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan.....	465
Tabel 3.305	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan Dan Sosial Kemasyarakatan.....	465
Tabel 3.306	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan.....	466
Tabel 3.307	Target dan Capaian Indikator Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media Dan Keprotokoleran	467
Tabel 3.308	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.....	467
Tabel 3.309	Target dan Capaian Indikator Program Pelayanan Penyusunan Dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan.....	468
Tabel 3.310	Target dan Capaian Indikator Program Pengawasan Internal Terhadap Penyelenggaraan Tupoksi PD dan Kasus Pengaduan.....	469
Tabel 3.311	Target dan Capaian Indikator Program Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	470
Tabel 3.312	Target dan Capaian Indikator Program Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Dan Pengawasan Reformasi Birokrasi.....	471
Tabel 3.313	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme Dan Layanan APIP	472
Tabel 3.314	Target dan Capaian Indikator Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF.....	473
Tabel 3.315	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Di Wilayah Utara.....	474
Tabel 3.316	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Di Wilayah Selatan	475
Tabel 3.317	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Di Wilayah Barat.....	475

Tabel 3.318	Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Di Wilayah Timur	476
Tabel 3.319	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan.....	476
Tabel 3.320	Target dan Capaian Kinerja Output Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	478
Tabel 3.321	Daftar Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019.....	479
Tabel 3.322	Target dan Capaian Kinerja Output Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai (DBHCHT)	482
Tabel 3.323	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Hukum	483
Tabel 3.324	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Penataan Ketatalaksanaan, Kelembagaan Dan Pendayagunaan Aparatur	484
Tabel 3.325	Daftar Persepsi Penilaian Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Kota Pekalongan Tahun 2019	486
Tabel 3.326	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.....	488
Tabel 3.327	Target dan Capaian Kinerja Output Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian.....	489
Tabel 3.328	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian	492
Tabel 3.329	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan.....	493
Tabel 3.330	Target dan Capaian Kinerja Output Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan Dan Sosial Kemasyarakatan.....	494
Tabel 3.331	Target dan Capaian Kinerja Output Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan	496
Tabel 3.332	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media Dan Keprotokoleran	497
Tabel 3.333	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.....	499
Tabel 3.334	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pelayanan Penyusunan Dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	502
Tabel 3.335	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengawasan Internal Terhadap Penyelenggaraan Tupoksi PD Dan Kasus Pengaduan	503
Tabel 3.336	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).....	505
Tabel 3.337	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Dan Pengawasan Reformasi Birokrasi.....	506
Tabel 3.338	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme Dan Layanan APIP	508
Tabel 3.339	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP	509

Tabel 3.340	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Di Wilayah Utara	510
Tabel 3.341	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Di Wilayah Selatan.....	522
Tabel 3.342	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Di Wilayah Barat.....	535
Tabel 3.343	Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Di Wilayah Timur	548
Tabel 3.344	Lokasi Walikota Goes To School Tahun 2019.....	581
Tabel 4.1	Kegiatan yang Bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.....	587
Tabel 4.2	Kegiatan yang Bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.....	589
Tabel 4.3	Kegiatan yang Bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.....	592
Tabel 4.4	Kegiatan yang Bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.....	595
Tabel 4.5	Kegiatan yang Bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019.....	598

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Administratif Kota Pekalongan.....	5
Gambar 1.2	Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan	6
Gambar 1.3	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 Berdasarkan Kecamatan (Jiwa)	7
Gambar 1.4	Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 Menurut Kelompok Umur	8
Gambar 1.5	Perkembangan Ekspor Kota Pekalongan Tahun 2018	10
Gambar 1.6	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 dan Perbandingannya dengan Tingkat Provinsi dan Nasional (%)	12
Gambar 1.7	Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kota Pekalongan Tahun 2019	14
Gambar 1.8	PDRB Perkapita Kota Pekalongan (Rp Juta) dan Pertumbuhannya (%) Tahun 2015-2019.....	15
Gambar 1.9	Perkembangan Inflasi Kota Pekalongan, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 (%).....	16
Gambar 1.10	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019 (%).....	17
Gambar 1.11	Jumlah Penduduk Miskin Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019 (000 Jiwa)	19
Gambar 1.12	Perbandingan Angka Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019 (%)	19
Gambar 1.13	Perbandingan Angka Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019 (%)	20
Gambar 1.14	Perbandingan Angka Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019 (%)	20
Gambar 1.15	Nilai IPM dan Pertumbuhannya di Kota Pekalongan, Tahun 2015 - 2019.....	22
Gambar 1.16	Ilustrasi Visi dan Misi.....	25
Gambar 1.17	Keterkaitan Visi, Indikator Visi dan Misi serta Target Tahun 2021	26
Gambar 1.18	Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2019.....	32
Gambar 2.1	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019*	45
Gambar 2.2	Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015-2019*	60
Gambar 3.1	Perbandingan Angka Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional	76
Gambar 3.2	Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2018	79
Gambar 3.3	Peta Genangan di Kota Pekalongan Tahun 2019.....	86
Gambar 3.4	Dokumentasi Kegiatan Urusan Pendidikan.....	127
Gambar 3.5	Penyerahan Piagam Pengelolaan Data Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah.....	128

Gambar 3.6	Layanan Poliklinik Eksekutif dan Cathlab.....	138
Gambar 3.7	Aplikasi Benda Mobile RSUD Benda.....	139
Gambar 3.8	Penghargaan-penghargaan yang diterima RSUD Benda di Tahun 2019.....	140
Gambar 3.9	Pemeriksaan Bahan Tambahan Berbahaya pada Makanan yang beredar di Pasar.....	145
Gambar 3.10	Pembinaan Pelayanan Farmasi di Apotek.....	145
Gambar 3.11	Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kadaluarsa/Rusak di Incinerator Plant PT. Jasa Medivest.....	146
Gambar 3.12	Pendistribusian PMT Balita di wilayah Puskesmas Tirto.....	147
Gambar 3.13	Kegiatan Pelayanan Rumah Singgah Gizi Puskesmas Kusuma Bangsa.....	148
Gambar 3.14	Kegiatan Minum Tablet Tambah Darah Bersama Di Sekolah.....	148
Gambar 3.15	Kegiatan Penilaian Reakreditasi di Puskesmas Dukuh.....	149
Gambar 3.16	Kegiatan Bimtek Penanggulangan Bencana.....	150
Gambar 3.17	Alat Kesehatan Co-Analyzer.....	151
Gambar 3.18	Pelaksanaan Fogging.....	153
Gambar 3.19	Rapat Koordinasi Program Filariasis.....	153
Gambar 3.20	Pelatihan Kader Posbindu.....	154
Gambar 3.21	Senam Bersama Dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-55.....	156
Gambar 3.22	Rockport Calon Jemaah Haji.....	156
Gambar 3.23	Pembinaan GP2SP di Perusahaan.....	156
Gambar 3.24	Deklarasi Kelurahan ODF Tahun 2019.....	157
Gambar 3.25	Lomba Kader Kesehatan Remaja.....	159
Gambar 3.26	Lomba Balita Sehat Tingkat Kota Pekalongan.....	159
Gambar 3.27	Wisuda Ibu Hamil.....	160
Gambar 3.28	Pelayanan Persalinan Menggunakan Fasilitas Jampersal.....	160
Gambar 3.29	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.....	164
Gambar 3.30	Rehabilitasi Puskesmas Pekalongan Selatan dan Puskesmas Tondano.....	164
Gambar 3.31	Rehabilitasi Labkesda.....	165
Gambar 3.32	Pengadaan Sepeda Motor PSC 119 dan Mobil Ambulans 119.....	165
Gambar 3.33	Proses Produksi di PSPJ.....	166
Gambar 3.34	Lomba Dokter Kecil.....	168
Gambar 3.35	Aksi Peduli Lingkungan FKS.....	168
Gambar 3.36	Penyerahan Pemenang Lomba PHBS Tingka Kota.....	169
Gambar 3.37	Pelantikan SBH (Saka Bakti Husada).....	169
Gambar 3.38	Peresmian Gedung Posyandu Kencana Wungu RW 9 Kelurahan Kandang Panjang.....	170
Gambar 3.39	Festival Kuliner Buah dan Sayur.....	171
Gambar 3.40	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun 2019.....	172
Gambar 3.41	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Bantuan Provinsi) Tahun 2019.....	173
Gambar 3.42	Frontage Road Jl. DR. Sutomo - Komodor Adi Sucipto.....	183

Gambar 3.43	Rumah Pompa Panjang Baru dan Klego.....	185
Gambar 3.44	Rumah Pompa Pasir Kraton Kramat.....	186
Gambar 3.45	PJU Tirto dan Panjang Baru.....	187
Gambar 3.46	Penataan Kawasan Rajawali, Cendrawasih dan Alun-alun.....	188
Gambar 3.47	Pemeliharaan Rutin/Berkala Makam Bong Cino dan Makam Kerkop.....	188
Gambar 3.48	Peningkatan Jalan Samanhudi dan Rehabilitasi Jembatan Kel. Jenggot.....	190
Gambar 3.49	Rehab Trotoar Depan TPI dan Saluran Pematius Jalan Barito.....	191
Gambar 3.50	Pengembangan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Rusun dan Pondok Boro serta Fasilitasi Peningkatan Kualitas RTLH.....	196
Gambar 3.51	Dokumentasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman.....	197
Gambar 3.52	Kegiatan Forkonkom.....	204
Gambar 3.53	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah.....	206
Gambar 3.54	Kegiatan Pengumpulan Infomasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai (DBHCHT).....	207
Gambar 3.55	Kegiatan Operasional Linmas & Pengamanan Wilayah pada Hari Besar Keagamaan.....	209
Gambar 3.56	Kegiatan Operasional Operasional Satpol PP.....	209
Gambar 3.57	Kegiatan Seksi Damkar.....	214
Gambar 3.58	Kegiatan Apel Siaga Menjelang Pemilihan Umum.....	214
Gambar 3.59	Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum.....	215
Gambar 3.60	Kegiatan Penegakan Perda.....	218
Gambar 3.61	Dokumentasi Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam.....	220
Gambar 3.62	Dokumentasi Penanggulangan Bencana.....	221
Gambar 3.63	Dokumentasi Pencegahan Bencana.....	221
Gambar 3.64	Dokumentasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan.....	225
Gambar 3.65	Dokumentasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.....	242
Gambar 3.66	Dokumentasi Peningkatan Kesempatan Kerja.....	245
Gambar 3.67	Dokumentasi Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.....	248
Gambar 3.68	Dokumentasi Penghargaan yang diperoleh pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	251
Gambar 3.69	Jumlah Penangan Kasus Kekerasan di LP-PAR.....	253
Gambar 3.70	Workshop KLA dengan Kelurahan dan OPD terkait.....	255
Gambar 3.71	Pelatihan Sekolah Ramah Anak.....	255
Gambar 3.72	Deklarasi Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 4 Kota Pekalongan.....	256
Gambar 3.73	Pelatihan KHA.....	256
Gambar 3.74	Road Show FA sebagai 2P.....	257
Gambar 3.75	Pelatihan Memasak dan Ketrampilan.....	259
Gambar 3.76	Pelatihan Ketrampilan bagi Kader UP2K PKK.....	260
Gambar 3.77	Dokumentasi Kegiatan Dinperpa.....	268
Gambar 3.78	Dokumentasi Pembebasan Tanah Kali Loji Krpyak.....	270

Gambar 3.79	Lurah Noyontaansari saat menerima Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo	280
Gambar 3.80	SMPN 6 Kota Pekalongan pada saat Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Madiri.....	280
Gambar 3.81	Piagam penghargaan Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik kategori “BAIK” Tahun 2019	284
Gambar 3.82	Dokumentasi Sosialisasi Adminduk.....	287
Gambar 3.83	Dokumentasi Pelayanan KTP.....	289
Gambar 3.84	Peningkatan Kapasitas Aparat	291
Gambar 3.85	Sosialisasi Perwal PAPKS-BM.....	298
Gambar 3.86	Pembekalan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat	299
Gambar 3.87	Monitoring Kegiatan PAPKS-BM	299
Gambar 3.88	Lokasi kegiatan Fisik TMMD Sengkuyung I di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan.....	300
Gambar 3.89	Sosialisasi Kegiatan Pendukung Tmmd Tahap I di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan	301
Gambar 3.90	Lokasi kegiatan Fisik TMMD Sengkuyung II di Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur	301
Gambar 3.91	Sosialisasi Kegiatan Pendukung Tmmd Tahap II di Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur	302
Gambar 3.92	Lokasi kegiatan Fisik TMMD Sengkuyung III di Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat	302
Gambar 3.93	Sosialisasi Kegiatan Pendukung Tmmd Tahap III di Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat	303
Gambar 3.94	Penghargaan sebagai Pelaksana Terbaik III Gotong Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah.....	306
Gambar 3.95	Gelar TTG Tingkat Nasional di Bengkulu.....	307
Gambar 3.96	Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Tahun 2019.....	312
Gambar 3.97	Pemasangan Lampu Flashing di Jl. Merdeka.....	315
Gambar 3.98	Pemasangan Guardrail di Kramat Sari dan Pasar Kuripan Baru	316
Gambar 3.99	Pengadaan APILL di Simpang Jl. Ampera dan Jl. Ir. Sutami.....	316
Gambar 3.100	Pembangunan Halte Bus Di SMP N I Pekalongan.....	318
Gambar 3.101	Forum LLAJ	321
Gambar 3.102	Dokumentasi Pekan Batik Tahun 2019	336
Gambar 3.103	Promosi dan Kerjasama Investasi	343
Gambar 3.104	Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Perizinan	344
Gambar 3.105	Penduduk Jenjang Usia Pemuda (16-30 Tahun).....	346
Gambar 3.106	Pekan Seni Pelajar	349
Gambar 3.107	Dokumentasi Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga.....	352
Gambar 3.108	Dokumentasi Kegiatan Persandian.....	356
Gambar 3.109	Dokumentasi Pengembangan Dan Pengelolaan Kekayaan Budaya.....	360
Gambar 3.110	Pameran Buku.....	363
Gambar 3.111	Penyerahan penghargaan dari ANRI	367
Gambar 3.112	Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	371

Gambar 3.113	Sertifikat Juara III Kategori Udang Pokdakan Sido Mulyo Krapyak.....	373
Gambar 3.114	IPAL di Kawasan Technopark Perikanan Kota Pekalongan.....	374
Gambar 3.115	Pavingisasi Gedung Tenant di Kawasan Technopark Perikanan Kota Pekalongan	374
Gambar 3.116	Dokumentasi Pengembangan Pemasaran pariwisata.....	378
Gambar 3.117	Dokumentasi Pengembangan Destinasi Wisata	380
Gambar 3.118	Bintek dan bantuan Hibah Budidaya Ayam Buras Di Kelompok Tani Santri Milenial (KSTM) 7 Pondok Pesantren Kota Pekalongan.....	382
Gambar 3.119	Penyerahan Serifikat Kelas Kelompok Tani oleh Walikota Pekalongan.....	382
Gambar 3.120	Pengobatan Hewan Masal Di Lokasi Usaha Peternakan	386
Gambar 3.121	Pemantauan Kesehatan Hewan Qurban Saat Idul Adha Di Seluruh Wilayah Kota Pekalongan	386
Gambar 3.122	Pelatihan Operator Alsintan.....	388
Gambar 3.123	Peningkatan Jaringan Irigasi DAK Pertanian Th 2019.....	389
Gambar 3.124	Pelatihan pembuatan Pestisida Nabati & POC di Kelompok Tani.....	390
Gambar 3.125	Sosialisasi Zoonosis	391
Gambar 3.126	Pengawasan Berkala Bahan Pangan Asal Hewan Di Pasar Modern.....	392
Gambar 3.127	Pembangunan RPH Kertoharjo Tahap I.....	393
Gambar 3.128	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa	399
Gambar 3.129	Tera/Tera Ulang Peralatan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya	400
Gambar 3.130	Pelatihan dan Bimbingan Regulasi Bisnis Internasional dan Fasilitasi Pameran Produk Ekspor.....	401
Gambar 3.131	Pendampingan Calon Ekspertir.....	402
Gambar 3.132	Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi.....	404
Gambar 3.133	Penyelenggaraan Batik Night Market	404
Gambar 3.134	Fasilitasi Promosi Produk UMKM Melalui E-Marketplace	405
Gambar 3.135	Pembangunan Senggol Baru di Kuripan	407
Gambar 3.136	Pembangunan Pusat Kuliner dan Fashion Sugihwaras	407
Gambar 3.137	Pembangunan Shelter Parkir Dan Pavingisasi Pasar Podosugih.....	408
Gambar 3.138	Pembangunan Kios Untuk Sepeda dan Pavingisasi Pasar Sayun Baru	408
Gambar 3.139	Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Sampah Di Pasar Tradisional	409
Gambar 3.140	Dokumentasi Kegiatan Pembangunan LIK	415
Gambar 3.141	Kegiatan Sosialisasi Juknis Penyusunan Profil Perangkat Daerah.....	420
Gambar 3.142	Kegiatan Pembekalan Penyusunan Background Study RPJMD.....	421
Gambar 3.143	Kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kota.....	422
Gambar 3.144	Kegiatan Desk Evaluasi RKPD Tahun 2019	422
Gambar 3.145	Rapat dan FGD Ekonomi Kreatif.....	424
Gambar 3.146	Kegiatan Rapat BKPRD Tahun 2019.....	426

Gambar 3.147	Koordinasi Bidang Sarpras.....	426
Gambar 3.148	Kegiatan KBP tahun 2019	428
Gambar 3.149	Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Anak (PPRA).....	428
Gambar 3.150	Pembahasan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB Dalam Rangka Koordinasi Pemerintahan Bidang Pemerintahan, Sosial Dan Budaya.....	429
Gambar 3.151	Bimtek Uji Kandungan Yodium pada Garam Konsumsi sebagai salah satu kegiatan yang menunjang Penanggulangan Masalah Gizi.....	429
Gambar 3.152	Kegiatan SDG's tahun 2019	430
Gambar 3.153	Penanggulangan Kemiskinan tahun 2019.....	430
Gambar 3.154	Pencapaian LKD Wajar Tanpa Perkecualian.....	442
Gambar 3.155	Dokumentasi Kegiatan Badan Keuangan Daerah.....	443
Gambar 3.156	Pelaksanaan Tes Assesment Bagi Eselon III.....	448
Gambar 3.157	Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Dan Pengawas Dilingkungan Merintah Kota Pekalongan	449
Gambar 3.158	Penyelenggaraan Diklat Dana Kelurahan.....	451
Gambar 3.159	Penganugerahan Satya Lancana Karya Satya Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019.....	452
Gambar 3.160	SIM Pengawasan dan Pengaduan Layanan Administrasi Kepegawaian	453
Gambar 3.161	Workshop Fasilitasi Riset bersama dan Jaringan Penelitian Pengembangan Kota Pekalongan.....	457
Gambar 3.162	Pameran Inovasi dan Pelatihan Inovasi Kewirausahaan.....	458
Gambar 3.163	Penghargaan Pada Anugerah IDSD Tingkat Provinsi Jawa Tengah.....	459
Gambar 3.164	Pembinaan Kepada Para Tenaga Pengajar TPQ dan MADIN se-Kota Pekalongan.	466
Gambar 3.165	Penghargaan SPIP Level 3	470
Gambar 3.166	Indeks Reformasi Birokrasi.....	472
Gambar 3.167	Indeks Reform Kapabilitas APIP Level 3.....	473
Gambar 3.168	Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan	481
Gambar 3.169	Sosialisasi Cukai Melalui Berbagai Media.....	483
Gambar 3.170	Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat, SIKP Kredit Ultra Mikro (UMi).....	490
Gambar 3.171	Pameran Pojok Branding.....	491
Gambar 3.172	Kegiatan Pasar Murah di 27 Kelurahan.....	492
Gambar 3.173	Dokumentasi Kegiatan DPRD	501
Gambar 3.174	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat.....	575
Gambar 4.1	Dokumentasi Diklat Pengembangan Profesi Guru.....	587
Gambar 4.2	Dokumentasi Sosialisasi Pendidikan Keluarga	588
Gambar 4.3	Dokumentasi Pelatihan di BLK	591
Gambar 4.4	Dokumentasi Pembangunan Tanggul Pengendali Banjir melalui Program KOTAKU.....	593

Gambar 4.5	Dokumentasi Pembangunan Jembatan, Plat deker dalam rangka Peningkatan Kualitas Drainase.....	593
Gambar 4.6	Dokumentasi Pembangunan Jalan Beton dalam rangka Peningkatan Jalan Lingkungan.....	593
Gambar 4.7	Pembangunan MCK.....	594
Gambar 4.8	Dokumentasi Sarana Air Bersih dalam rangka Peningkatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi.....	594
Gambar 4.9	Dokumentasi Pengadaan Gerobak Sampah.....	594
Gambar 4.10	Dokumentasi Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja.....	597
Gambar 4.11	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Beras.....	600

BAB I. PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pekalongan disusun sebagai pelaksanaan atas amanat Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pengertian yang sama, sesuai dengan Pasal 1 Nomor 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Materi yang disampaikan dalam LKPJ sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hasil penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Adapun ruang lingkup LKPJ yang diatur dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, mencakup Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

Selanjutnya dengan menimbang bahwa Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, maka LKPJ disusun berdasarkan capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan; kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran 2018.

1.1. DASAR HUKUM

1.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Daerah

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

1.1.2. Dasar Hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah

LKPJ Walikota Pekalongan Tahun 2019 disusun berdasarkan ketentuan dan pertimbangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52)
30. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9) ;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
 35. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pekalongan Kota Batik Sebagai Sesanti Masyarakat dan Pemerintah Tingkat Kotamadya Pekalongan dalam Membangun Masyarakat, Kota dan Lingkungannya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tahun 1992 Nomor Seri D Nomor 8);
 36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10);
 37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 30);
 38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2013 Nomor 19);
 39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 9);
 40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5);
 41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 19);
 42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 14);
 43. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah KotaPekalongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 Nomor 27);

1.2. DATA UMUM DAERAH

1.2.1. Kondisi Geografis, Batas Administratif Daerah, Luas Wilayah Dan Topografis

1. Kondisi Geografis

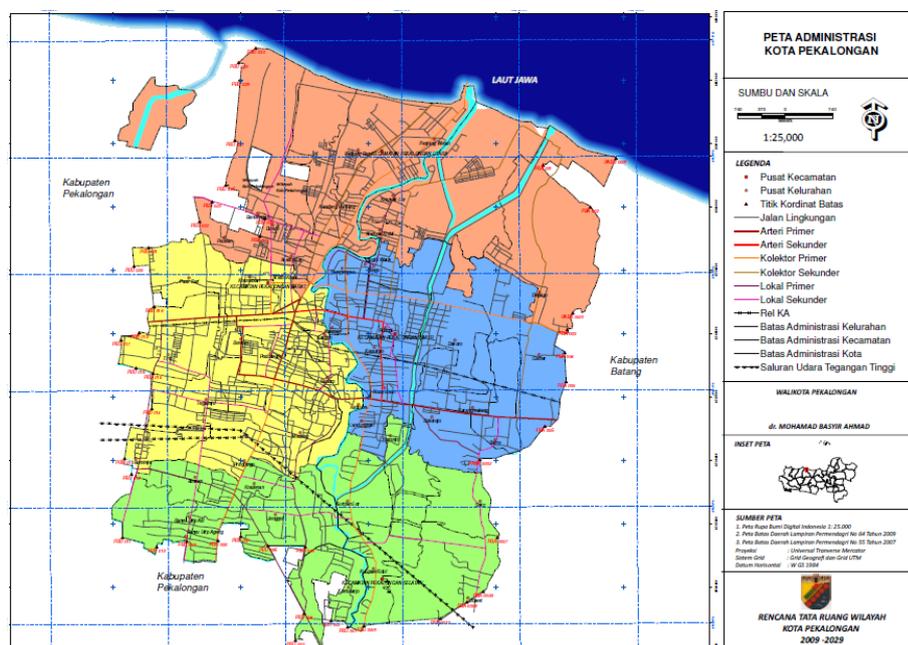
Kota Pekalongan merupakan salah satu kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, wilayah Kota Pekalongan terletak antara 6°50" 42" -6°55" 44" Lintang Selatan dan 109° 37" 55" - 109° 42" 19" Bujur Timur. Kota Pekalongan merupakan kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan merupakan salah satu simpul strategis jalur pantai Utara Pulau Jawa karena Kota Pekalongan terletak di pertengahan antara Jakarta dan Kota Surabaya. Jarak Kota Pekalongan ke Jakarta adalah 384 Km dan jarak Kota Pekalongan ke Kota Surabaya adalah 409 Km.

Kota Pekalongan merupakan daerah yang beriklim tropis dengan suhu terendah 24,7°C dan suhu tertinggi 33,38°C, dengan rata-rata kelembaban udara berkisar antara 70,20% sampai dengan 86,60% dan rata-rata curah hujan berkisar antara 15 mm - 144 mm perTahun.

2. Batas Administratif Daerah

Batas administratif Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Batang;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Batang dan Pekalongan; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan



Gambar 1.1 Peta Administratif Kota Pekalongan

Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

3. Luas Wilayah

Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.525 Ha atau 45,25 km². Jarak terjauh dari wilayah Utara ke wilayah Selatan ± 9 Km dan dari wilayah Barat ke wilayah Timur ± 7 Km. Secara administratif Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan. Keempat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Pekalongan Barat, Kecamatan Pekalongan

Timur, Kecamatan Pekalongan Selatan dan Kecamatan Pekalongan Utara. Wilayah terluas Kota Pekalongan adalah Kecamatan Pekalongan Utara dengan luas sebesar 14,88 km² atau 33% dari luas wilayah Kota Pekalongan.

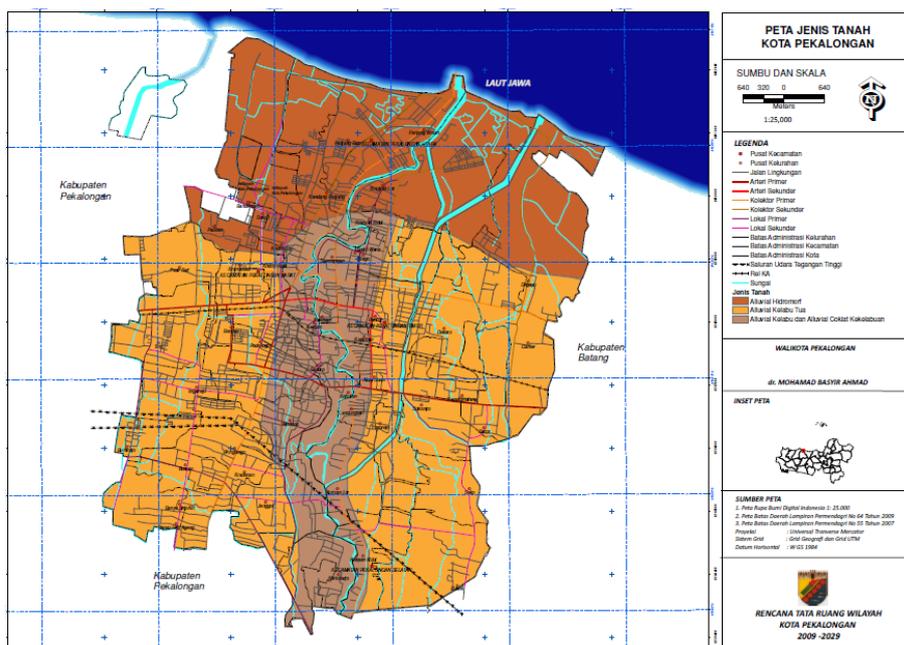
Tabel 1.1 Nama dan Luas Kecamatan di Kota Pekalongan

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase Luas (%)
1	Pekalongan Barat	10,05	22
2	Pekalongan Timur	9,52	21
3	Pekalongan Selatan	10,80	24
4	Pekalongan Utara	14,88	33
	Total	45,25	100

sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020

4. Kondisi Topografis

Secara topografis wilayah Kota Pekalongan terletak di dataran rendah pantai Utara Pulau Jawa dengan ketinggian lahan antara 0 - 6 meter dpl. Keseluruhan wilayah berada pada kemiringan lereng 0-8%. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa keseluruhan wilayah Kota Pekalongan sangat datar, beda tinggi yang sangat kecil dan bahkan di beberapa tempat tertentu telah teridentifikasi memiliki ketinggian di bawah permukaan air laut seperti di Kawasan Pabean Kelurahan Padukuhan Kraton Kecamatan Pekalongan Utara.



Gambar 1.2 Jenis Tanah di Wilayah Kota Pekalongan

Sumber : RTRW Kota Pekalongan 2009-2029

Terdapat 4 (empat) jenis tanah di wilayah Kota Pekalongan, yaitu alluvial hidromorf, alluvial kelabu tua serta alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan. Sebaran tanah alluvial hidromorf yaitu di kawasan Utara kota. Sebaran alluvial kelabu tua di wilayah Timur dan Barat kota serta sebaran tanah alluvial kelabu dan alluvial coklat kekelabuan terdapat di sepanjang koridor ke arah selatan kota

1.2.2. Kondisi Demografis

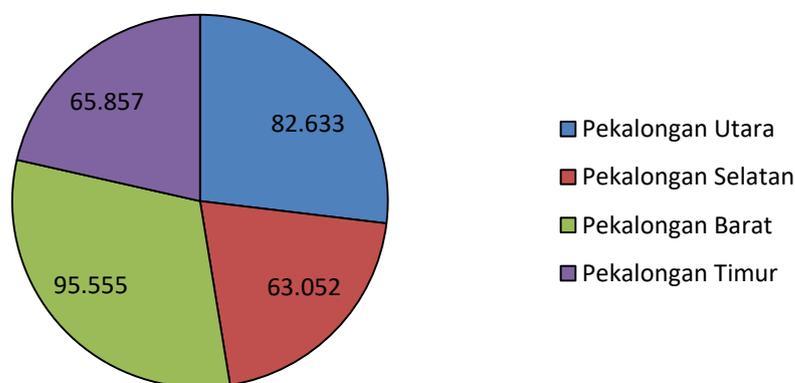
Berdasarkan proyeksi BPS jumlah penduduk Kota Pekalongan pada Tahun 2019 sebanyak 307.097 jiwa, terdiri dari 153.518 jiwa laki-laki dan 153.579 jiwa perempuan. Perkembangan selama lima Tahun terakhir, jumlah laki-laki hampir sama dengan jumlah perempuan. Hal ini terlihat pada angka sex rasio sebesar 99,96 yang berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99,96 penduduk laki-laki. Jumlah penduduk Kota Pekalongan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
2015	148.295	148.238	296.533
2016	149.623	149.599	299.222
2017	150.887	150.983	301.870
2018	152.202	152.275	304.477
2019	153.518	153.579	307.097

sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020

Berdasarkan penyebaran penduduk, pada Tahun 2019 jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pekalongan Barat sejumlah 95.555 jiwa, sedangkan di Kecamatan Pekalongan Utara sejumlah 82.633 jiwa, di Kecamatan Pekalongan Timur sejumlah 65.857 jiwa dan di Kecamatan Pekalongan Selatan sejumlah 63.052 jiwa. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.3 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 Berdasarkan Kecamatan (Jiwa)

sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020

Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan sepanjang Tahun 2015-2019 dalam kisaran 0,86% sampai 0,96%. Pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi pada Tahun 2015 dan 2018 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0,96%, sedangkan laju pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada Tahun 2019 sebesar 0,86%. Laju pertumbuhan penduduk Kota Pekalongan selama lima Tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Tahun	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
2015	0,96
2016	0,95
2017	0,94
2018	0,96
2019	0,86

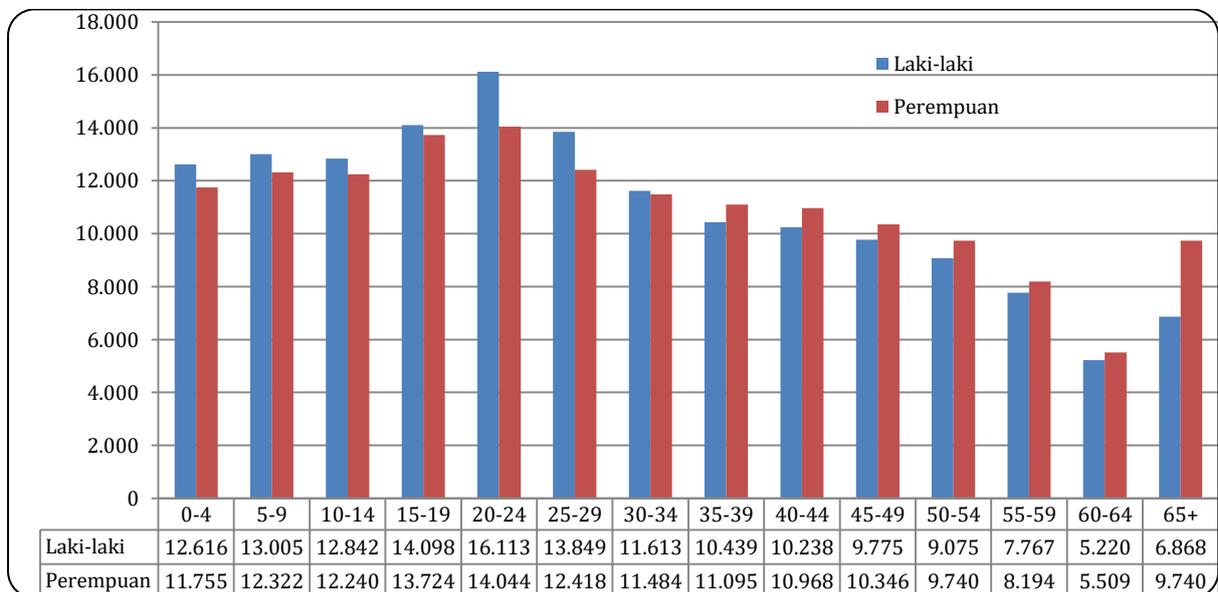
sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020

Kepadatan penduduk di Kota Pekalongan cenderung meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, Tahun 2015 sebesar 6.554 jiwa/km², Tahun 2019 meningkat menjadi 6.787 jiwa/km². Rasio ketergantungan Penduduk Kota Pekalongan tahun 2019 adalah 42,37%, lebih kecil dari Tahun 2018 yang mencapai 42,48%. Berikut disajikan tabel kepadatan penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015-2019.

Tabel 1.4 Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Tahun	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)
2015	6.554	43,77
2016	6.613	42,88
2017	6.672	42,64
2018	6.729	42,48
2019	6.787	42,37

sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020



Gambar 1.4 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 Menurut Kelompok Umur

sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2020

Gambar 1.4 menjelaskan bahwa berdasarkan kelompok usia, jumlah penduduk Kota Pekalongan terbanyak berada pada rentang usia 20-24 Tahun sejumlah 30.157 jiwa atau 9,82%, kemudian disusul pada kelompok usia 15-19 Tahun sejumlah 27.822 jiwa atau 9,06% dan

kelompok usia 25-29 Tahun sejumlah 26.267 jiwa atau 8,55%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2019 Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
	Laki-laki	Perempuan	
0-4	12.616	11.755	24.371
5-9	13.005	12.322	25.327
10-14	12.842	12.240	25.082
15-19	14.098	13.724	27.822
20-24	16.113	14.044	30.157
25-29	13.849	12.418	26.267
30-34	11.613	11.484	23.097
35-39	10.439	11.095	21.534
40-44	10.238	10.968	21.206
45-49	9.775	10.346	20.121
50-54	9.075	9.740	18.815
55-59	7.767	8.194	15.961
60-64	5.220	5.509	10.729
65+	6.868	9.740	16.608
Jumlah	153.518	153.579	307.097

sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

1.2.3. Kondisi Ekonomi

1. Potensi Unggulan Daerah

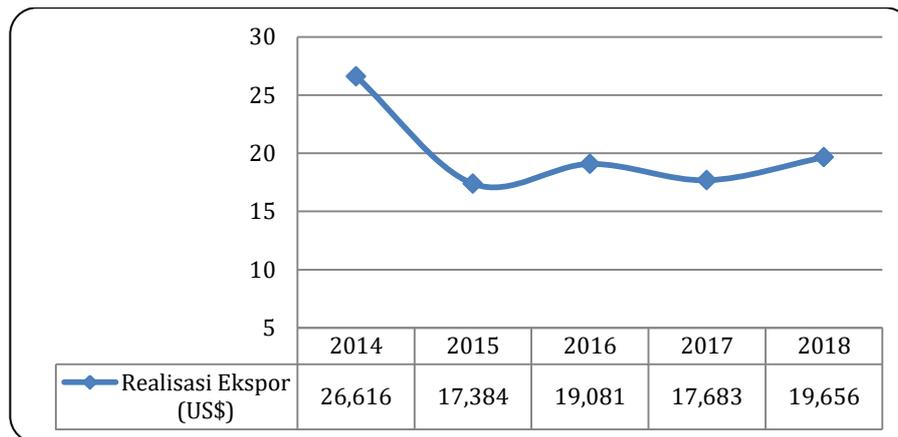
Dalam sistem pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah, RTRW Provinsi Jawa Tengah menetapkan Kota Pekalongan sebagai bagian dan simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong adalah kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya adalah pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan memiliki posisi yang sangat strategis.

Peranan terbesar pada struktur perekonomian Kota Pekalongan Tahun 2019 adalah pada Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yakni 21,79% dan ini meningkat dibandingkan Tahun 2018 yakni 21,76%, kemudian diikuti Kategori Industri Pengolahan sebesar 20,88% pada tahun 2019 dan ini menurun dibandingkan Tahun 2018 yakni sebesar 20,94% dan Kategori Konstruksi sebesar 14,63% pada tahun 2019 dan ini naik dibandingkan Tahun 2018 yakni 14,60%. Sementara peranan Kategori lainnya berkisar antara 0 – 6 persen.

Kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mewakili Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pekalongan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pekalongan cukup tinggi dan menunjukkan kenaikan secara signifikan. Pada Tahun 2016 nilai PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (atas dasar harga berlaku) Rp. 1,847 Triliun. Kondisi ini terus mengalami peningkatan sehingga pada Tahun 2019 menjadi sebesar Rp. 2,369 Triliun. Persentase kontribusi PDRB kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kota Pekalongan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kinerja sektor perdagangan dalam menunjang aktivitas perekonomian Kota Pekalongan. Geliat

aktivitas perdagangan di Kota Pekalongan di samping didominasi aktivitas perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat dan toko modern. Pasar rakyat terdiri dari sentra perdagangan batik, pasar tradisional, toko dan kios. Toko modern di Kota Pekalongan terdiri dari minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan perkulakan.

Penyelenggaraan pembangunan perdagangan mencakup perdagangan dalam negeri dan perdagangan antar negara (ekspor dan impor), serta penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen. Perkembangan ekspor bersih perdagangan ditunjukkan dalam Gambar 1.5.



Gambar 1.5 Perkembangan Ekspor Kota Pekalongan Tahun 2018

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

Kinerja perdagangan internasional terlihat dari kinerja ekspor Kota Pekalongan. Ekspor Kota Pekalongan cenderung mengalami fluktuasi dalam kurun waktu lima Tahun dari sebesar US\$ 26,616 Juta pada Tahun 2014 menjadi sebesar US\$ 19,656 Juta pada Tahun 2018.

Industri Pengolahan sebagai salah satu sektor unggulan dan penyumbang dalam perekonomian Kota Pekalongan. Industri pengolahan yang ada di Kota Pekalongan adalah Industri Kecil dengan jumlah 1.751 Unit di tahun 2018.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan Tahun yang bersangkutan terhadap Tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu seTahun.

Berdasarkan PDRB series Tahun 2010 atas dasar harga konstan, nilai PDRB mencapai 7,477 triliun rupiah. Angka tersebut meningkat dari 7,087 triliun rupiah pada Tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,50%, tumbuh melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Tahun sebelumnya dengan capaian 5,69%.

Delapan kategori yang mengalami pertumbuhan positif lebih dari lima persen antara lain: kategori Informasi dan Komunikasi sebesar 10,57%, Jasa Lainnya sebesar 8,47%, Jasa Perusahaan sebesar 8,31%, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,84%, Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,53%, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

6,76%, Real Estate sebesar 5,62%, dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,47%.

Sedangkan delapan kategori yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen adalah kategori Industri Pengolahan/*Manufacturing* sebesar 4,84%, Konstruksi sebesar 4,71%, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 4,63%, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,21%, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,82%, Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,76%, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 3,72% dan Jasa Pendidikan sebesar 2,63 persen

Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2018, rata-rata setiap kategori berfluktuatif laju pertumbuhannya. Namun, ada satu kategori yang mengalami perlambatan laju pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yang signifikan yaitu Jasa Pendidikan. Tahun 2018 pertumbuhan sebesar 7,59% dan pada tahun 2019 tumbuh melambat menjadi 2,63. Hal ini dikarenakan ada salah satu Universitas di Kota Pekalongan yang memindahkan dua fakultasnya ke Kabupaten Pekalongan dikarenakan *rob*.

Data Pertumbuhan Kota Pekalongan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Pekalongan Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2015–2019

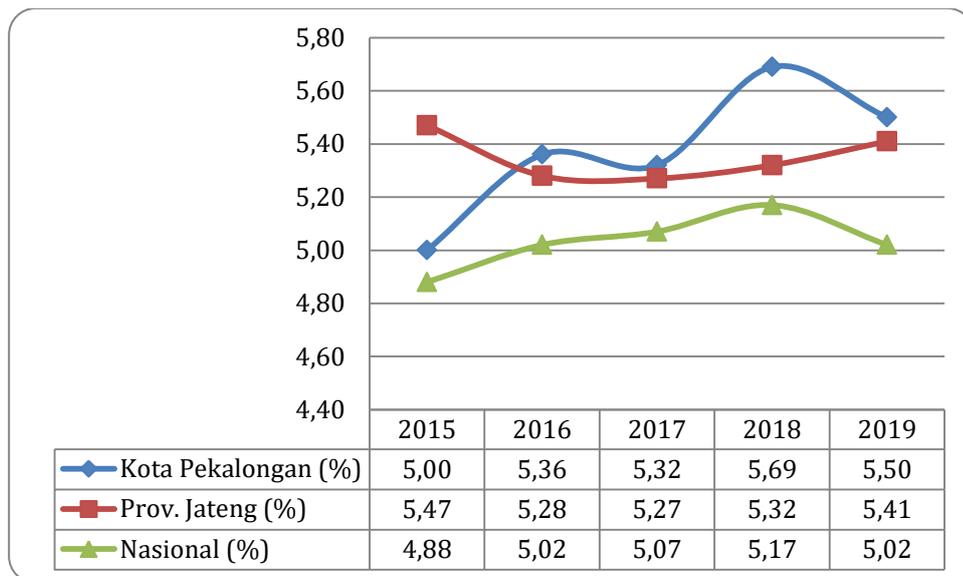
Kategori		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,09	3,98	-4,80	3,03	4,63
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	3,99	4,16	4,35	4,46	4,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,71	5,69	4,93	5,29	3,72
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,54	2,16	5,86	5,16	4,21
F	Konstruksi	5,64	4,52	5,51	5,59	4,71
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,62	4,86	5,71	5,53	5,47
H	Transportasi dan Pergudangan	5,45	5,16	5,84	7,07	7,53
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,78	7,94	5,92	5,88	6,76
J	Informasi dan Komunikasi	8,58	8,47	11,94	10,43	10,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,89	9,03	7,35	5,12	3,76
L	Real Estat	7,47	6,54	5,84	5,97	5,62
M,N	Jasa Perusahaan	8,94	10,28	7,85	7,95	8,31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,08	2,58	4,11	3,99	3,82
P	Jasa Pendidikan	4,78	7,49	6,43	7,59	2,63
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,10	9,65	7,74	7,93	7,84
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,20	7,23	8,09	9,02	8,47
Produk Domestik Regional Bruto		5,48	5,36	5,32	5,69	5,50

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

Keterangan:

* : Angka Sementara

** : Angka Sangat Sementara



Gambar 1.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Pekalongan Tahun 2015-2019 dan Perbandingannya dengan Tingkat Provinsi dan Nasional (%)

sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

3. Sumber Pertumbuhan PDRB

Sumber pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan Tahun 2019 dari sisi lapangan usaha disumbang oleh kategori Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,47% disusul dengan kategori Industri Pengolahan sebesar 4,84% serta kategori Konstruksi sebesar 4,71% terhadap total pertumbuhan ekonomi kota Pekalongan.

Tabel 1.7 Sumber Pertumbuhan Kota Pekalongan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2019

KATEGORI		PERSEN (%)		
		2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-4,80	3,03	4,63
2	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00
3	Industri Pengolahan	4,35	4,46	4,84
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,93	5,29	3,72
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,86	5,16	4,21
6	Konstruksi	5,51	5,59	4,71
7	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,71	5,53	5,47
8	Transportasi dan Pergudangan	5,84	7,07	7,53
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,92	5,88	6,76
10	Informasi dan Komunikasi	11,94	10,43	10,57
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,35	5,12	3,76
12	Real Estate	5,84	5,97	5,62
13	Jasa Perusahaan	7,85	7,95	8,31
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,75	3,99	3,82
15	Jasa Pendidikan	6,82	7,59	2,63
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,74	7,93	7,84
17	Jasa lainnya	8,09	9,02	8,47
	PDRB	5,32	5,69	5,50

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

4. Distribusi PDRB

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Selama lima Tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kota Pekalongan didominasi oleh 3 kategori lapangan usaha, yaitu kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, kategori Industri Pengolahan dan kategori Kontruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan.

Secara distribusi, dari total peranan seluruh kategori, yang terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Pekalongan pada Tahun 2019 adalah dihasilkan oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 21,79%. Selanjutnya lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu sebesar 20,88%, menurun dibanding Tahun 2018 mencapai 20,94%. Berikutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 14,63%, juga meningkat dari sebelumnya 14,60% di Tahun 2018.

Di antara ketiga kategori tersebut, Kontruksi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan dalam perekonomian. Sebaliknya, Industri Pengolahan peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun. Sementara itu, peranan kategori lainnya, masing-masing kurang dari 7%.

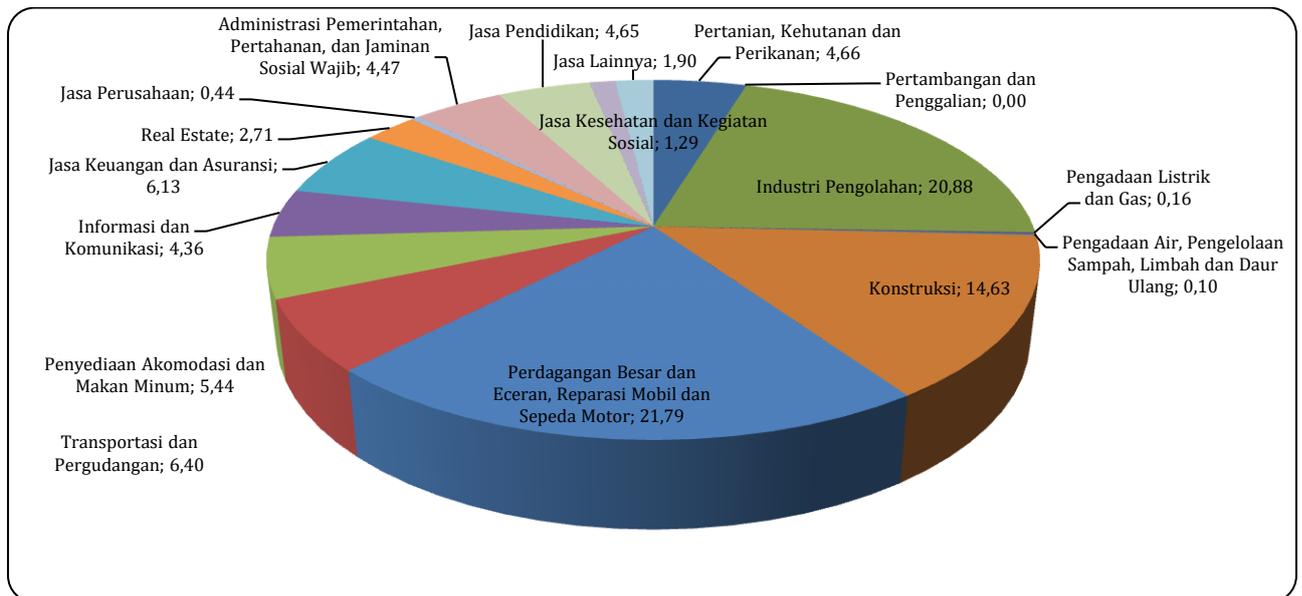
Salah satu penyebab menurunnya produksi Industri Pengolahan dalam beberapa tahun terakhir ini disebabkan oleh rob (air laut pasang naik) yang banyak menggenangi pusat-pusat industri pengolahan di Pekalongan. Melemahnya produksi industri pengolahan berimbang dengan perdagangan di Kota Pekalongan yang notabene sebagian besar berjualan hasil industri pengolahan. Lambatnya kenaikan harga produksi industri pengolahan juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Industri pengolahan.

Tabel 1.8 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kota Pekalongan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2015–2019

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,32	5,26	4,74	4,67	4,66
B	Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan	21,56	21,43	21,13	20,94	20,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
F	Konstruksi	14,33	14,36	14,39	14,60	14,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,87	21,72	21,78	21,76	21,79
H	Transportasi dan Pergudangan	6,23	6,05	6,32	6,28	6,40
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,28	5,42	5,39	5,42	5,44
J	Informasi dan Komunikasi	3,88	3,88	4,15	4,21	4,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,95	6,14	6,26	6,27	6,13
L	Real Estat/Real Estate Activities	2,66	2,68	2,68	2,71	2,71

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018*	2019**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,39	0,40	0,41	0,42	0,44
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,75	4,75	4,72	2,58	4,47
P	Jasa Pendidikan	4,52	4,58	4,67	4,75	4,65
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,22	1,25	1,25	1,26	1,29
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,77	1,82	1,84	1,87	1,90
Produk Domestik Regional Bruto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

sumber: BPS Kota Pekalongan, 2020



Gambar 1.7 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Kota Pekalongan Tahun 2019

sumber: BPS Kota Pekalongan, 2020

5. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

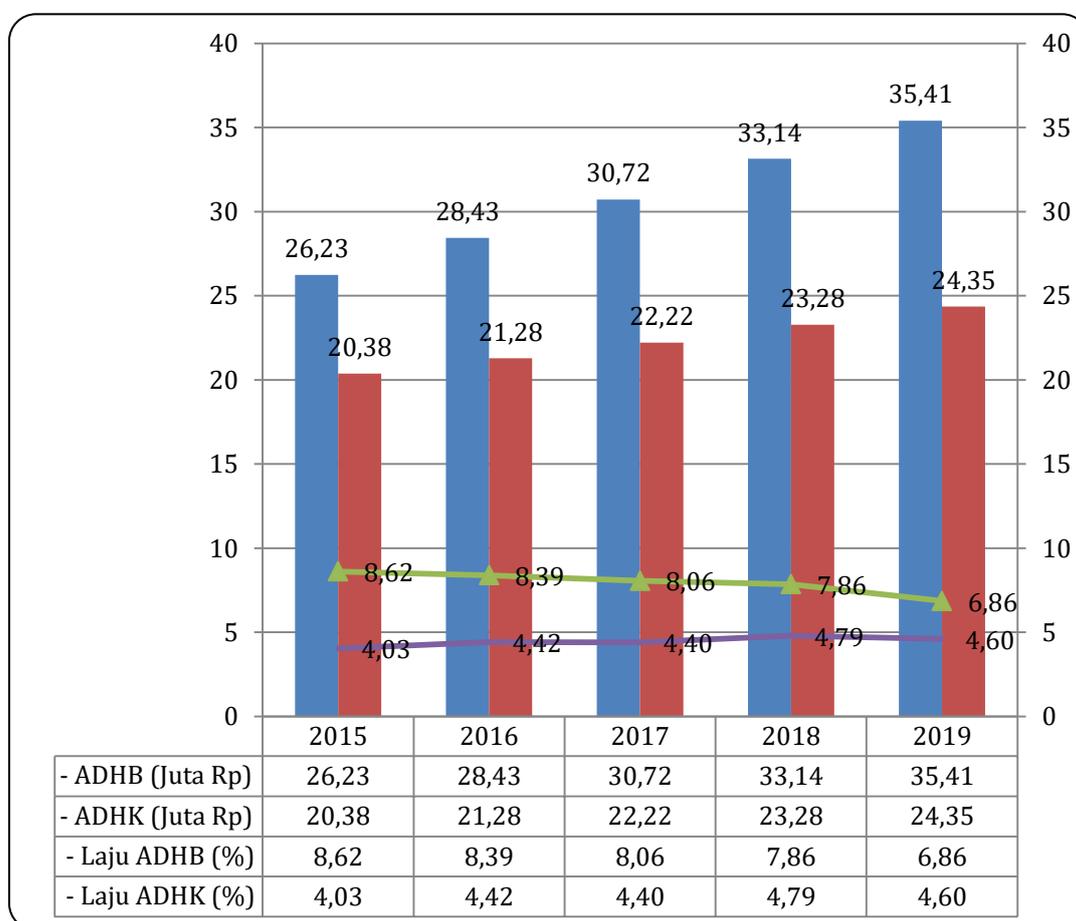
Nilai PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku sejak Tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 26,23 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2019 mencapai 35,41 juta rupiah (lihat tabel 1.9). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB per kapita Kota Pekalongan atas dasar harga berlaku pada Tahun 2019 sebesar Rp. 35,41 juta meningkat sebesar 6,86% dibanding PDRB per kapita Tahun 2018 sebesar Rp. 33,14 juta.

Tabel 1.9 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

Tahun	2015	2016	2017	2018*	2019**
Nilai PDRB					
- ADHB (Milyar Rp)	7.778,27	8.507,54	9.274,26	10.089,28	10.873,98
- ADHK (Milyar Rp)	6.043,10	6.367,27	6.706,27	7.087,92	7.477,43
PDRB per Kapita					
- ADHB (Juta Rp)	26,23	28,43	30,72	33,14	35,41
- ADHK (Juta Rp)	20,38	21,28	22,22	23,28	24,35
Pertumbuhan PDRB per Kapita					
- ADHB (%)	8,62	8,39	8,06	7,86	6,86
- ADHK (%)	4,03	4,42	4,40	4,79	4,60

sumber: BPS Kota Pekalongan, 2020



Gambar 1.8 PDRB Perkapita Kota Pekalongan (Rp Juta) dan Pertumbuhannya (%) Tahun 2015-2019

sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

6. Inflasi

Inflasi menjadi salah satu indikator makro ekonomi yang sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian inflasi yang terlalu tinggi akan mengganggu kestabilan perekonomian dan akan menurunkan nilai mata uang yang pada akhirnya menekan daya

beli masyarakat. Sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah merupakan indikator melemahnya daya beli masyarakat yang akan menekan laju pertumbuhan ekonomi.

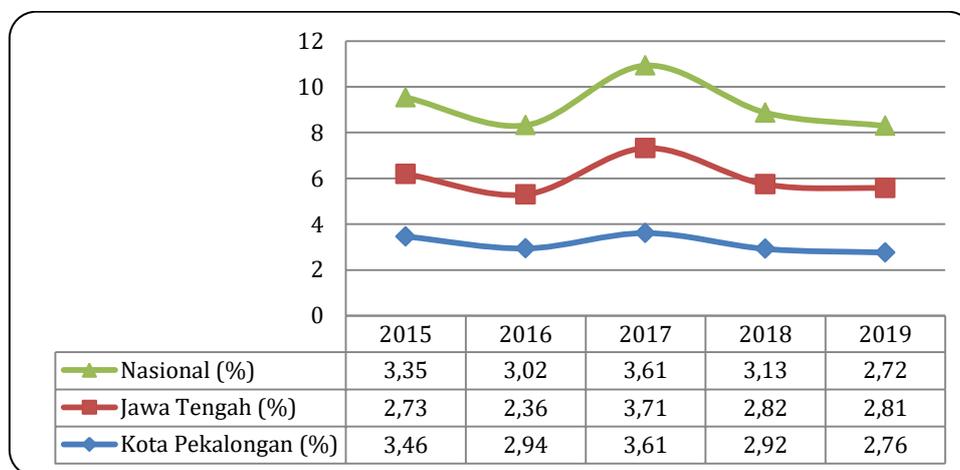
Indeks harga konsumen (IHK) digunakan sebagai indikator kenaikan harga barang dan jasa dari Tahun ke Tahun. Kota Pekalongan pada Tahun 2018, besarnya IHK mencapai 128,97% dengan tingkat inflasi sebesar 2,92% memburuk pada Tahun 2019 yaitu IHK 132,53% dengan inflasi sebesar 2,76%. Dibanding inflasi pada tingkat Jawa Tengah yang mencapai 2,81% dan tingkat Nasional mencapai 2,72%, maka inflasi yang terjadi di Kota Pekalongan pada Tahun 2019 lebih baik dibandingkan inflasi Jawa Tengah, tetapi lebih besar dibandingkan inflasi nasional meskipun masih dalam tahap terkendali. Inflasi sebesar 2,76% pada tahun 2019 disebabkan oleh komoditas bahan makanan, kesehatan dan pendidikan dengan andil inflasi bahan makanan sebesar 8,00, kesehatan sebesar 4,75% dan pendidikan sebesar 3,74%.

Perkembangan inflasi Kota Pekalongan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 1.10.

Tabel 1.10 Perkembangan Inflasi Kota Pekalongan, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 (%)

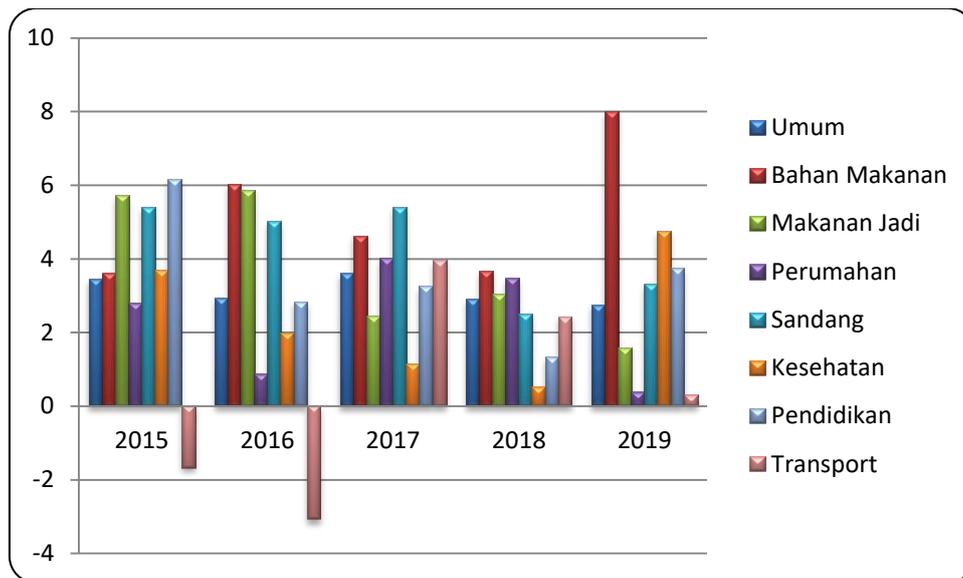
NO	TINGKAT WILAYAH	Inflasi (%)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kota Pekalongan	3,46	2,94	3,61	2,92	2,76
2	Jawa Tengah	2,73	2,36	3,71	2,82	2,81
3	Nasional	3,35	3,02	3,61	3,13	2,72

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2019, 2019



Gambar 1.9 Perkembangan Inflasi Kota Pekalongan, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2015-2019 (%)

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka 2020, 2020



Gambar 1.10 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019 (%)

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

Penyumbang inflasi terbesar adalah kelompok sandang, bahan makanan, perumahan, kemudian transportasi, pendidikan, komunikasi dan makanan jadi dapat dilihat pada Tabel 1.11

Tabel 1.11 Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019 (%)

Kelompok Pengeluaran	2015	2016	2017	2018	2019
Umum	3,46	2,94	3,61	2,92	2,76
Bahan Makanan	3,62	6,03	4,63	3,66	8,00
Makanan Jadi	5,73	5,85	2,46	3,05	1,60
Perumahan	2,79	0,88	4,02	3,47	0,40
Sandang	5,39	5,01	5,40	2,51	3,31
Kesehatan	3,70	1,99	1,15	0,54	4,75
Pendidikan	6,16	2,84	3,26	1,33	3,74
Transport	-1,66	-3,07	3,96	2,43	0,31

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

7. Ekspor

Selama Tahun 2019 nilai ekspor total Kota Pekalongan mencapai 22.926 ribu US\$ atau naik 16,64 % dibandingkan dengan Tahun 2018 yang nilainya 19.656 ribu US\$.

Tabel 1.12 Nilai Ekspor Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

	Tahun 2015 (Ribu US\$)	Tahun 2016 (Ribu US\$)	Tahun 2017 (Ribu US\$)	Tahun 2018 (Ribu US\$)	Tahun 2019 (Ribu US\$)
Ekspor	17.340	19.082	17.683	19.656	22.926

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka, 2019

Ekspor Kota Pekalongan didominasi oleh barang non migas dengan porsi 100% terhadap ekspor. Komoditas non migas utama yang mempunyai nilai ekspor tertinggi

antara lain Tekstil, Produk Tekstil dan Pengolahan Ikan, dengan negara tujuan utama yaitu: Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa dan ASEAN.

8. Penduduk Miskin dan Pengangguran

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks, baik faktor penyebabnya maupun dampaknya. Selain itu, kemiskinan menjadi salah satu indikator yang sangat diperhatikan oleh pemerintah karena menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Di Kota Pekalongan, pada Tahun 2018, garis kemiskinan sebesar Rp. 415.172,- per kapita per bulan dan Tahun 2019 meningkat menjadi Rp. 425.026,- per kapita per bulan atau naik sebesar 2,37%.

Persentase penduduk miskin Tahun 2018 sebesar 6,75% berkurang pada Tahun 2019 menjadi 6,60%. Demikian juga secara absolut, pada Tahun 2018 jumlah penduduk miskin mencapai 20,516 ribu jiwa dan pada Tahun 2019 berkurang menjadi 20,210 ribu jiwa. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyaluran bantuan, pelaksanaan dan penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.

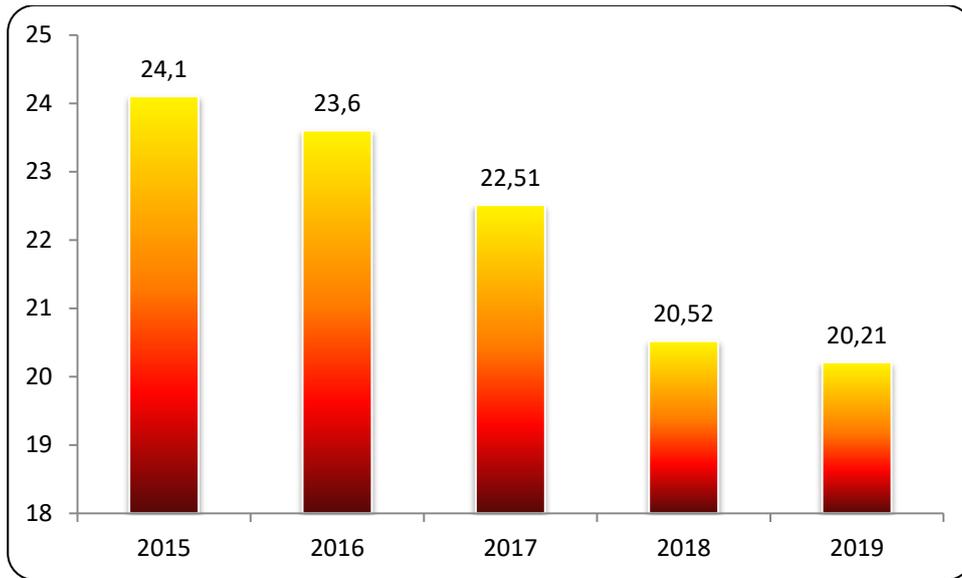
Seiring dengan jumlah dan persentase penduduk miskin yang terus berkurang, nilai kedalaman kemiskinan (P1) yang menggambarkan seberapa jauh pengeluaran orang miskin terhadap garis kemiskinan berbanding terbalik dengan persentase penduduk miskin. Begitu juga dengan nilai keparahan kemiskinan (P2) yang menggambarkan disparitas antar orang miskin juga mengalami peningkatan walaupun relatif rendah. Nilai P1 dan P2 di Kota Pekalongan menunjukkan adanya penurunan. Hal ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Penduduk miskin ini sangat perlu dibantu karena kemiskinannya yang akut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan kemiskinan di Kota Pekalongan diantaranya adanya program-program nasional seperti PKH, bantuan pangan non tunai, beasiswa untuk sisiwa miskin dan program pemerintah Kota Pekalongan antara lain bantuan Fasilitas Operasional Pendidikan (FOP) ke masyarakat. FOP bertujuan menekan beban pengeluaran non konsumsi rumah tangga di tengah-tengah masyarakat, meningkatkan pendapatan, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, pengembangan usaha kecil dan mikro, dan sinergitas serta peningkatan kerjasama penanganan lintas sektor, pelibatan swasta, perguruan tinggi, perbankan dan unsur masyarakat.

Tabel 1.13 Garis Kemiskinan & Persentase Penduduk Miskin di Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2019

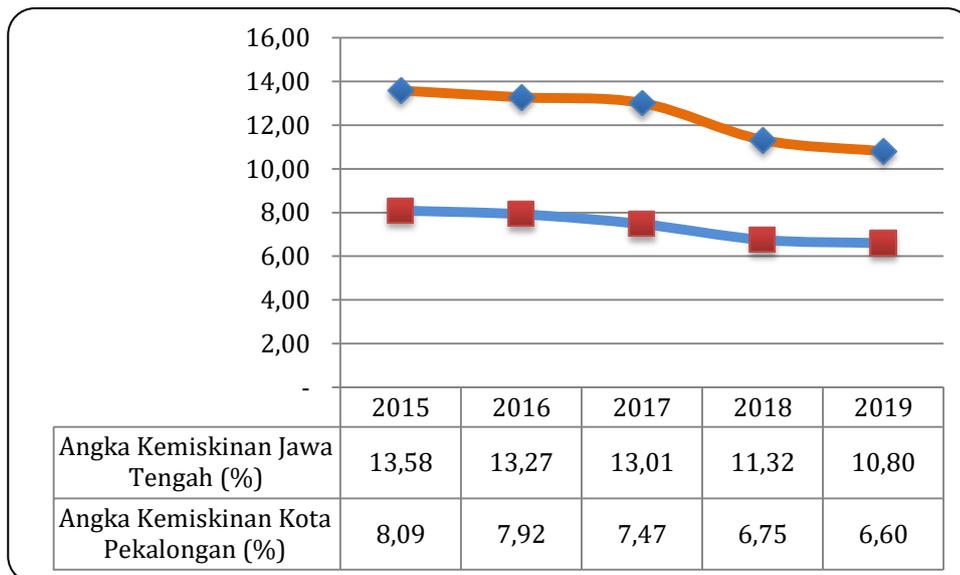
Uraian	2018	2019	Perubahan (%)
[1]	[2]	[3]	[4]
o Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)	415.172	425.026	2,37
o Jumlah Penduduk Miskin (000 jiwa)	20,516	20,210	-1,51
o Persentase Penduduk Miskin / Po (%)	6,75	6,60	-2,22
o Persentase Kedalaman Kemiskinan /P1 (%)	1,01	0,92	-8,91
o Persentase Keparahahan Kemiskinan /P2 (%)	0,22	0,18	-18,18

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020



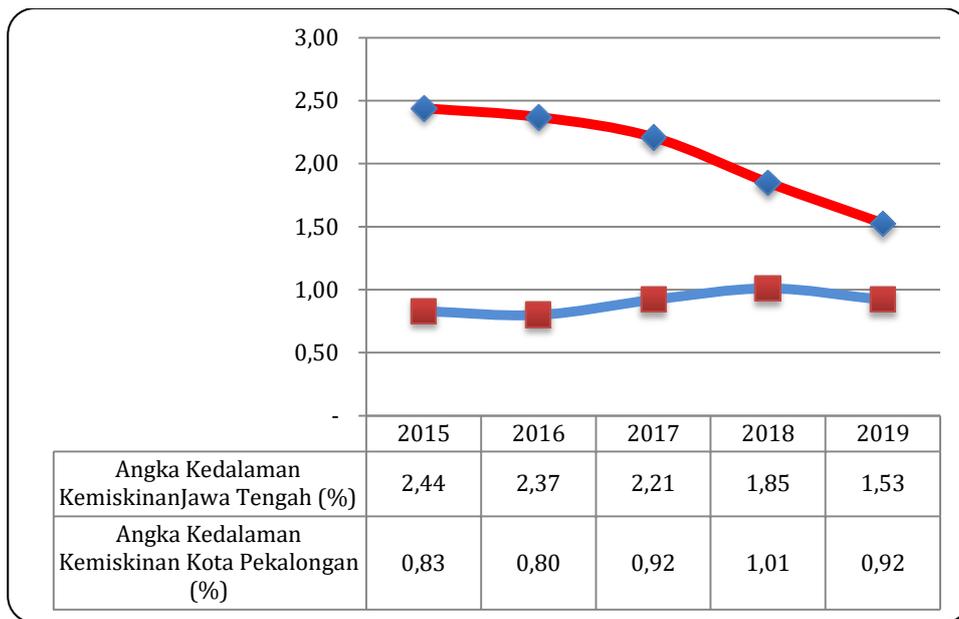
Gambar 1.11 Jumlah Penduduk Miskin Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019 (000 Jiwa)

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020



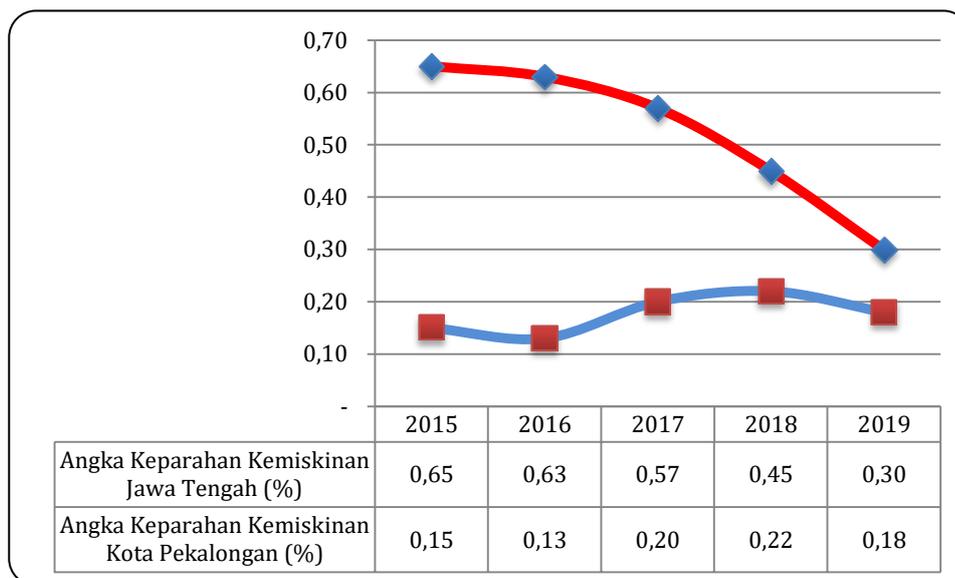
Gambar 1.12 Perbandingan Angka Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019 (%)

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020



Gambar 1.13 Perbandingan Angka Kedalaman Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019 (%)

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020



Gambar 1.14 Perbandingan Angka Keparahan Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 - 2019 (%)

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dilakukan dengan berbagai program perlindungan sosial diantaranya melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Jateng Sejahtera (KJS), jaminan kesehatan masyarakat, Kartu Tani dan Kartu Nelayan, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan subsidi listrik murah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dilakukan melalui intervensi pemberdayaan kepala rumah tangga produktif yang difokuskan pada sektor pertanian, pengolahan hasil, dan pemasaran produk dengan didukung peningkatan kesempatan perluasan serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dalam rangka

pengembangan usaha mikro kecil dilakukan dengan bantuan ekonomi produktif, peningkatan akses permodalan dengan bunga rendah, pendampingan usaha dan pemasaran, pengembangan kewirausahaan desa. Disamping itu, dilakukan pula pengembangan infrastruktur desa, peningkatan akses air minum, sanitasi lingkungan, dan stimulasi pemugaran RTLH. Adapun perbandingan persentase penduduk miskin Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Maret 2018 – 2019 dapat dilihat pada Grafik 1.12.

Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk yang berusia 15 Tahun ke atas di Kota Pekalongan Tahun 2019 tercatat sekitar 232.769 orang. Persentase angkatan kerja meningkat dari 70.21% menjadi 72.32% atau naik 2,11 poin pada Tahun 2019, hal ini menunjukkan rasio jumlah angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja (15 Tahun ke atas) meningkat. Sisanya, yaitu 27,68% adalah Bukan Angkatan Kerja, yaitu rasio penduduk berusia kerja yang bukan termasuk angkatan kerja dibandingkan dengan jumlah total penduduk berusia kerja. Peningkatan TPAK pada Tahun 2018 seiring dengan peningkatan jumlah penduduk usia kerja.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) di Kota Pekalongan cukup baik, hal ini dapat dilihat pada persentase penduduk yang termasuk angkatan kerja yang bekerja yang mencapai 94,23%. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,77%, artinya adalah pada setiap 100 orang yang termasuk angkatan kerja, maka ada 5-6 orang yang benar-benar menganggur. Nilai TPT mengalami peningkatan yang disebabkan meningkatnya jumlah kelulusan anak sekolah yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Beberapa musibah seperti kebakaran Pasar Banjarsari dan bencana banjir rob yang menggenangi wilayah industri di Kota Pekalongan juga mengurangi penyerapan tenaga kerja di sektor industri.

Upaya yang telah dilakukan antara lain: menarik investor yang padat karya dengan cara memberi kemudahan dalam proses perizinan, peningkatan kapasitas ketrampilan tenaga kerja di Balai Latihan Kerja, dan penyebarluasan informasi pasar kerja, serta pembinaan masyarakat penganggur melalui pengembangan kewirausahaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kota Pekalongan periode Februari 2018 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.14.

Tabel 1.14 Rasio TPAK, TKK, TPT Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2019

Uraian	2018	2019
[1]	[2]	[3]
TPAK	70,21	72,32
Bukan Angkatan Kerja	29,79	27,68
TKK	93,87	94,23
TPT	6,13	5,77

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

9. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Percepatan pembangunan manusia dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan manusia (IPM) yang secara umum dinilai sebagai capaian kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.



Gambar 1.15 Nilai IPM dan Pertumbuhannya di Kota Pekalongan, Tahun 2015 - 2019

Sumber : Statistik Daerah Kota Pekalongan 2019, IPM Jawa Tengah 2019, 2020

Berdasarkan hasil penghitungan BPS, IPM Kota Pekalongan Tahun 2019 sebesar 74,77. Capaian ini merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Pembangunan manusia di Kota Pekalongan memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan dari Tahun ke Tahun. Perkembangan IPM menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia secara umum di Kota Pekalongan. Dalam lima Tahun saja (2015 - 2019), terjadi kenaikan IPM hingga 2,08 poin.

Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Pertumbuhan IPM di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi setiap Tahunnya. Pada periode 2018 - 2019, pembangunan manusia di Kota Pekalongan berhasil tumbuh sebesar 0,70%.

Tabel 1.15 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan Tahun 2018 - 2019

Uraian	2018	2019	Perubahan (poin)
[1]	[2]	[3]	
- Angka Harapan Hidup (Tahun)	74,25	74,28	0,03
- Harapan Lama Sekolah (EYS)	12,79	12,83	0,04
- Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	8,57	8,71	0,14
- Pengeluaran per Kapita (Ribu Rp.) disesuaikan	12.312	12.680	368
- IPM Kota Pekalongan	74,24	74,77	0,53

Sumber : Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah, 2020

10. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Perkembangan IPG di Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019 terus mengalami peningkatan dari 94,88 menjadi 94,92 atau naik 0.04 poin. Pada komponen pembentuk IPG

yang masih jadi perhatian adalah capaian rata-rata lama sekolah perempuan dan Harapan Lama sekolah. Pencapaian IPG Kota Pekalongan masih berada diatas rata-rata Provinsi (91,89) dan rata-rata Nasional (91,07).

Demikian pula perkembangan IDG di Kota Pekalongan periode 2014 - 2018 juga mengalami peningkatan dari 63,88 menjadi 68,62 atau naik 4,74 poin. Berbeda halnya dengan capaian IPG di Kota Pekalongan, bahwa capaian IDG berada dibawah rata-rata Provinsi (74,03) dan rata-rata Nasional (72,10). Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif penduduk perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di Kota Pekalongan masih lebih rendah disbanding rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Data IDG yang disajikan hanya sampai tahun data 2018 karena data 2019 belum tersedia.

1.3. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAERAH

1.3.1. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan periode Tahun 2016-2021 yang telah dilantik pada tanggal 17 Pebruari 2016, maka Visi RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 adalah

“Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”

Dalam kerangka pemikiran sistem pemerintahan yang telah menetapkan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, dimana pada proses pemilihannya telah menyampaikan visi dan misinya kepada seluruh masyarakat maka visi tersebut pada dasarnya adalah visi yang telah disepakati untuk diwujudkan pada akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2021. Oleh karena itu, untuk membangun kesamaan pandangan dan juga komitmen dari seluruh pemangku kepentingan maka rumusan Visi tersebut perlu diberikan penjelasan.

Sejahtera

Dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang, Kota Pekalongan telah mendefinisikan **Kota Sejahtera** adalah Kota yang menunjukkan kemakmuran, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat (lahir dan batin) secara adil dan merata.

Dengan melihat definisi Sejahtera sebagaimana diuraikan di atas, maka indikator ketercapaian kesejahteraan pada akhir periode RPJMD Tahun 2021 adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Indeks Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Angka Partisipasi Sekolah, Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin, Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Mandiri

Mandiri mempunyai makna dalam keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dalam kerangka Pembangunan Jangka Panjang, Kota Pekalongan juga telah mendefinisikan **mandiri**, dalam arti bahwa kemandirian masih mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat. Guna membangun kemandirian, mutlak harus dibangun kemajuan ekonomi melalui daya saing yang menjadi kunci kemandirian. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik maupun sosial budaya dan ini tercermin dari ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan Kota Pekalongan; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur

penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemandirian dalam pembiayaan pembangunan daerah yang semakin kokoh serta kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokoknya.

Dengan melihat definisi Mandiri sebagaimana diuraikan di atas, maka indikator ketercapaian kemandirian pada akhir periode RPJMD Tahun 2021 adalah Rata-rata Lama Sekolah sebagai cerminan ketersediaan Sumber Daya yang berkualitas, Pertumbuhan Ekonomi sebagai cerminan kemandirian ekonomi, Nilai investasi dimana selain berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak positif bagi meningkatnya lapangan pekerjaan sehingga selain akan menurunkan angka pengangguran juga akan meningkatkan pendapatan per kapita, Persentase Pendapatan Asli Daerah dibandingkan APBD sebagai cerminan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya.

Berbudaya

Berbudaya memiliki arti memiliki budaya atau mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Budaya juga didefinisikan sebagai *keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar* (Koentjaraningrat: 1979). Dalam konsep pengertian seperti ini, maka tatanan masyarakat Kota Pekalongan yang dicita-citakan adalah masyarakat yang memiliki sistem gagasan, ide, dan kreativitas, baik dalam hidup maupun kehidupannya.

Selanjutnya, dari gagasan, ide, dan kreativitas tersebut, kemudian dituangkan ke dalam tindakan-tindakan yang mewujudkan atau menghasilkan hasil karya, baik hasil karya berbentuk benda ataupun tidak berbentuk benda. Oleh karena itu, indikator Kota Pekalongan berbudaya adalah pengakuan dunia terhadap seni dan budaya Kota Pekalongan.

Saat ini terdapat dua pengakuan dunia terhadap budaya Kota Pekalongan, yaitu : Pengakuan UNESCO atas Pelestarian Budaya Batik melalui kerja sama antara Museum Batik dengan Dunia Pendidikan serta Pengakuan UNESCO terhadap Kota Pekalongan sebagai Kota Kreatif Dunia untuk bidang Kerajinan dan Kesenian Rakyat. Target selama lima Tahun adalah mempertahankan kedua pengakuan tersebut melalui berbagai upaya pengembangan dan promosi melalui berbagai upaya pemenuhan infrastruktur, peran media promosi, peran pelestarian dan penyebar-luasan budaya.

Berbasis Nilai-Nilai Religiusitas

Pemerintah dan masyarakat Kota Pekalongan menyadari sepenuhnya bahwa hidup dan kehidupan yang dijalani tidak terlepas dari kuasa dan kehendak Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap usaha yang dilakukan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, mandiri dan berbudaya, senantiasa dibarengi dengan nilai-nilai keimanan dari setiap individu masyarakat sesuai dengan agama yang dipeluknya. Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan memberikan kesempatan dan kebebasan kepada umatnya untuk melaksanakan kegiatan peribadatan, melaksanakan kegiatan-kegiatan peringatan hari besar agama, melakukan berbagai upaya untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dari generasi ke generasi, menjalin hubungan yang harmonis antar umat berbagai agama. Dengan demikian, akan terbangun keseimbangan antara kemampuan umat beragama dalam berupaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya dengan kesadaran diri sebagai makhluk Sang Pencipta yang tidak memiliki kekuasaan apapun selain atas kehendak-Nya. Sehingga masyarakat yang tercipta adalah masyarakat yang benar-benar memiliki kesejahteraan lahir dan batin.

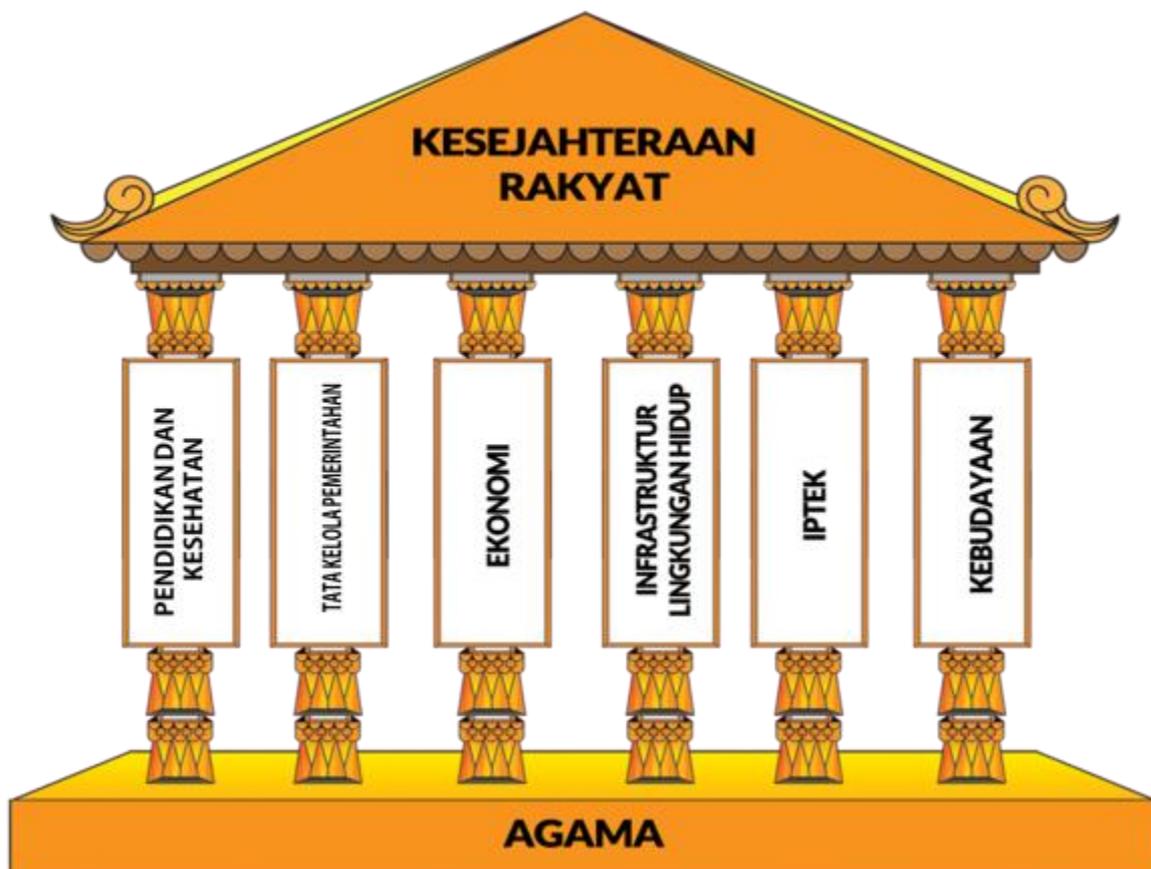
1.3.2. Misi

Untuk mewujudkan visi sebagaimana diuraikan di atas, maka dirumuskan misi yang harus diemban oleh Pemerintah bersama dengan Masyarakat Kota Pekalongan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan

2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat
3. Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan
5. Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas
6. Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah

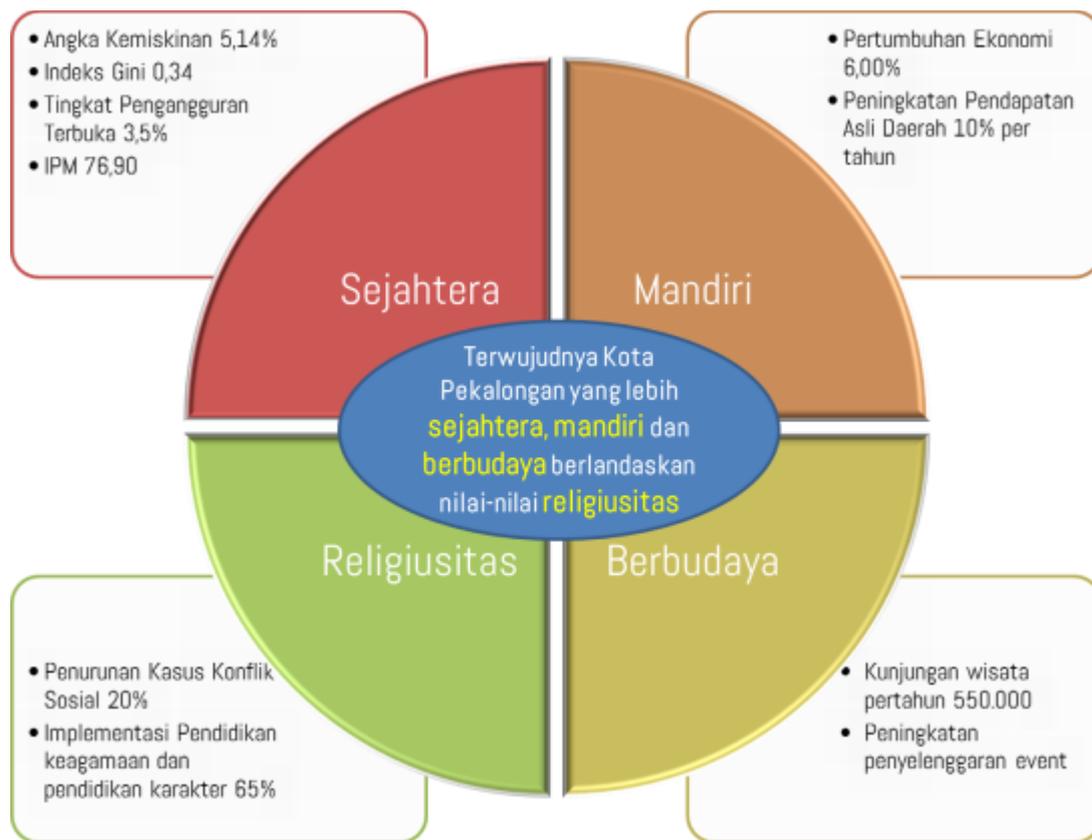
Sebagai gambaran atas uraian visi dan misi selanjutnya dapat dilihat dalam ilustrasi Gambar 1.16.



Gambar 1.16 Ilustrasi Visi dan Misi

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, 2018

Upaya untuk mewujudkan visi masyarakat Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas melalui keenam misi, pada dasarnya merupakan satu kesatuan rangkaian sistem pembangunan. Keenam misi berfungsi sebagai lokomotif pembangunan dari serangkaian jабaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama lima Tahun. Secara lengkap hubungan visi, indikator visi dan misi serta target Tahun 2021 ditunjukkan dalam Gambar 1.17. berikut



Gambar 1.17 Keterkaitan Visi, Indikator Visi dan Misi serta Target Tahun 2021

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, 2020

1.3.3. Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah Kota Pekalongan Tahun 2016 - 2021 memiliki tujuan, sasaran, arah kebijakan,, strategi dan indikator sasaran pada setiap misi

1.3.3.1. Misi I : Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan

Tabel 1.16 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Misi I

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan harapan untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi	Meningkatnya akses layanan pendidikan	Peningkatan derajat pendidikan masyarakat
Meningkatkan mutu pendidikan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	Peningkatan derajat pendidikan masyarakat

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, 2020

STRATEGI

- 1) Peningkatan kesadaran pemangku kepentingan tentang manfaat pendidikan dalam berbagai bidang kehidupan disertai dengan penurunan biaya pendidikan yang harus ditanggung keluarga miskin.
- 2) Peningkatan ketersediaan sarpras pendidikan, pengembangan kurikulum, peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, serta peningkatan minat baca.

1.3.3.2. Misi II : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.17 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Misi II

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
Menurunnya angka kemiskinan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	Penguatan kualitas tenaga kerja yang berkinerja tinggi serta penanaman nilai-nilai budaya masyarakat yang berkarakter.
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Tata kelola dan pelayanan publik.
	Meningkatnya profesionalisme ASN	
	Meningkatnya kualitas layanan publik	Tata kelola dan pelayanan publik.

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, 2020

STRATEGI

- 1) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat secara preventif, kuratif dan promotif, serta keluarga berencana.
- 2) Peningkatan ketrampilan angkatan kerja dan pencari kerja disertai perluasan kesempatan kerja.
- 3) Peningkatan pelayanan perlindungan, rehabilitasi, pemberdayaan dan jaminan sosial warga miskin dan PMKS serta peningkatan peran serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 4) Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, kualitas perencanaan, pengawasan, pengelolaan keuangan daerah dan profesionalitas ASN.
- 5) Peningkatan sistem pelayanan publik dan penguatan pengelolaan informasi dan komunikasi.

1.3.3.3. Misi III : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 1.18 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Misi III

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat berbasis sektor unggulan	Meningkatnya ekonomi sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa	Peningkatan pendapatan perkapita dengan menitikberatkan pada sektor-sektor ekonomi kreatif dan unggulan daerah;

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, 2020

STRATEGI

- 1) Peningkatan kualitas dan kuantitas produk UMKM, penguatan kelembagaan sentra dan kluster serta pengembangan sarana dan prasarana sektor industri.

- 2) Peningkatan kerjasama UMKM dengan koperasi, lembaga keuangan dan pembiayaan.
- 3) Peningkatan produksi dan produktifitas perikanan budidaya dan tangkap.
- 4) Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar dalam dan luar negeri.
- 5) Peningkatan kualitas, kuantitas dan promosi destinasi pariwisata daerah.
- 6) Peningkatan iklim penanaman modal yang berdaya saing dengan berbasis keunggulan daerah.

1.3.3.4. Misi IV : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan .

Tabel 1.19 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Misi IV

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas konektivitas pusat-pusat kegiatan strategis	Meningkatnya kualitas layanan jalan dan transportasi	Melanjutkan pembangunan infrastruktur penghubung jalur ekonomi regional.
Meningkatkan ruang publik yang ramah lingkungan	Meningkatnya ruang publik kreatif (taman bahagia)	Melanjutkan pembangunan infrastruktur kawasan strategis perkotaan di bidang sosial, budaya dan ekonomi.

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, 2020

STRATEGI

- 1) Peningkatan sarpras sistem drainase, pengendalian banjir dan rob, penanganan wilayah di sisi utara dan selatan tanggul untuk memberikan dampak positif secara optimal.
- 2) Penanganan kawasan kumuh dan pemenuhan sarana prasarana perkotaan.
- 3) Pengembangan dan peningkatan layanan jalan dan transportasi yang berkualitas dan merata serta dapat melayani warga kota yang berkebutuhan khusus.
- 4) Peningkatan ruang publik yang dapat mudah diakses oleh masyarakat dan dapat menumbuhkan kreatifitas.
- 5) Pengendalian pencemaran lingkungan yang bersumber dari air limbah industri, serta peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau.

1.3.3.5. Misi V : Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas.

Tabel 1.20 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Misi V

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kemampuan komunitas dalam pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu upaya pemberdayaan	Meningkatnya kemampuan komunitas dalam pemanfaatan teknologi informasi berbasis komunitas	Peningkatan ekonomi daerah yang didukung oleh penguatan sistem inovasi daerah dan iptek.

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, 2020

STRATEGI

- 1) Penguatan peran komunitas dalam pengembangan dan pemanfaatan TI serta mendorong inovasi-kreativitas.

1.3.3.6. Misi VI : Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah.

Tabel 1.21 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Misi VI

TUJUAN	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN
Melestarikan budaya dan kearifan lokal	Meningkatnya <i>event</i> budaya	Peningkatan kualitas tenaga kerja yang berkinerja tinggi serta penanaman nilai-nilai budaya masyarakat yang berkarakter.
Membentuk perilaku kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah	Menurunnya kasus konflik sosial	Penanaman nilai-nilai budaya masyarakat yang berkarakter;

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2016-2021, 2020

STRATEGI

- 1) Peningkatan dan pengembangan kegiatan kesenian dan pelestarian nilai-nilai budaya.
- 2) Peningkatan kerukunan umat beragama, pencegahan konflik sosial serta peningkatan implementasi pendidikan karakter dan keagamaan.

1.3.4. Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2019

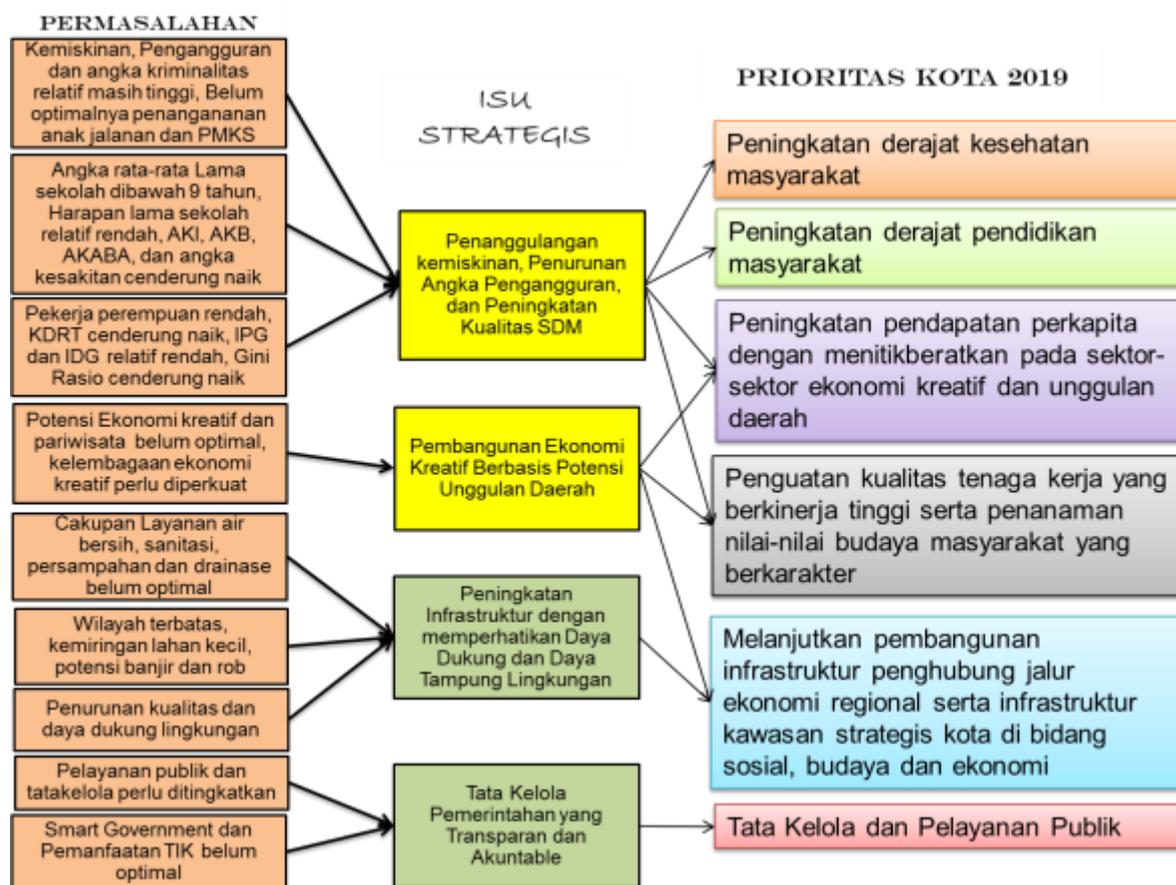
Berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan Provinsi Jawa Tengah, serta RPJMD Kota Pekalongan tahun 2016-2021, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan pada Tahun 2019 dilaksanakan dengan tema “Peningkatan Taraf Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat, Penanaman Pondasi Dasar Kemandirian, serta Pembangunan Karakter Masyarakat Berbudaya Berlandaskan Nilia-Nilai Religiusitas”, dengan prioritas :

1. Peningkatan pendapatan perkapita dengan menitikberatkan pada sektor-sektor ekonomi kreatif dan unggulan daerah, dengan fokus pada:
 - a. Fasilitasi akses terhadap permodalan, manajemen dan pasar ; peningkatan *start up* wirausaha baru; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita, menekan kesenjangan pendapatan (*gini ratio*) serta merupakan bagian dari upaya secara terus menerus menurunkan angka kemiskinan;
 - b. Perkuatan basis data terpadu sebagai dasar pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan swasta dan pihak lainnya dalam mengatasi kemiskinan;
 - c. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui: peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah; fasilitasi pemberian bibit, benih, alsintan; fasilitasi dan pengawasan subsidi pupuk; peningkatan prasarana irigasi; pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian; pengembangan jejaring pemasaran;
 - d. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui: peningkatan pemberdayaan nelayan; peningkatan pelayanan TPI, pengembangan dan peningkatan fungsi teknopark perikanan; serta pengembangan perikanan budidaya melalui pemberdayaan kelompok dan fasilitasi benih/pakan ikan;
 - e. Meningkatkan produksi dan produktivitas industri kecil dan menengah melalui: peningkatan nilai tambah diversifikasi produk; mengembangkan inovasi teknologi; memfasilitasi akses modal dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan; peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi dan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UMKM;

- f. Melanjutkan upaya peningkatan ekonomi kreatif khususnya kerajinan batik, tenun, kriya lainnya, fesyen, kuliner, fotografi dan seni pertunjukan;
 - g. Mendorong pariwisata berbasis ekonomi kreatif dan religi melalui: perbaikan prasarana dan sarana, serta manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata; meningkatkan promosi wisata; meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata; meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah daerah sekitar, serta meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata;
 - h. Perbaikan iklim investasi yang semakin kondusif melalui: pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan); perbaikan sistem dan layanan perijinan; pengembangan promosi investasi;
 - i. Melanjutkan upaya penguatan infrastruktur perdagangan sebagai basis ekonomi kerakyatan, termasuk keberlanjutan penataan LIK di Kuripan Yosorejo, peningkatan kualitas dan kapasitas pasar tradisional dan penataan pedagang kaki lima.
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dengan fokus pada:
 - a. Mendorong implementasi pencapaian target 12 SPM bidang kesehatan, terutama upaya penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan penurunan prevalensi penyakit menular dan tidak menular, peningkatan promotif dan preventif, upaya kuratif dan rehabilitatif, serta pemenuhan *Universal Health Coverage*;
 - b. Peningkatan sarana prasarana kesehatan dasar dan rujukan;
 - c. Peningkatan capaian wilayah *Open Defecation Free* (tidak buang air besar sembarangan);
 - d. Pengendalian jumlah penduduk dan keluarga berencana untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas.
 3. Peningkatan derajat pendidikan masyarakat dengan fokus:
 - a. mendorong dan memfasilitasi pemenuhan 8 standar nasional pendidikan dengan memprioritaskan pada peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah melalui keterjangkauan biaya pendidikan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, penguatan implementasi teknologi informasi, peningkatan minat baca, pengembangan pendidikan inklusi, berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah serta melakukan upaya-upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak usia sekolah.
 4. Penguatan kualitas tenaga kerja yang berkinerja tinggi serta penanaman nilai-nilai budaya masyarakat yang berkarakter, dengan fokus:
 - a. Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui: mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi); memperluas kesempatan kerja; dan mengembangkan budaya;
 - b. Penanganan dan pengelolaan anak jalanan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (*stake holder*);
 - c. Penyiapan pendidikan ketrampilan untuk menampung pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja sebagai akibat peningkatan kegiatan ekonomi berbasis teknologi informasi;
 - d. Perwujudan kota layak anak dengan mendorong peran serta masyarakat;
 - e. Perlindungan dan perwujudan pekerja perempuan sehat produktif.

5. Melanjutkan pembangunan infrastruktur penghubung jalur ekonomi regional serta infrastruktur kawasan strategis perkotaan di bidang sosial, budaya dan ekonomi, dengan fokus pada:
 - a. Pembangunan penanda batas kota;
 - b. Penguatan infrastruktur konektivitas melalui: peningkatan sarana prasarana simpul, pemaduan moda transportasi dan kualitas jaringan jalan dan jembatan;
 - c. Pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui penyediaan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan jaringan air minum layak dan sanitasi layak;
 - d. Mendorong pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa;
 - e. Mengoptimalkan potensi pesisir Kota Pekalongan untuk mendukung pengembangan industri perikanan, pariwisata dan konservasi;
 - f. Pembangunan infrastruktur di kawasan rawan bencana;
 - g. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui: pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan air tanah; pengelolaan wilayah pesisir dengan rehabilitasi kawasan mangrove, pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, pengelolaan limbah secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau;
 - h. Meningkatkan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana melalui efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.
6. Tata Kelola dan Pelayanan Publik, dengan fokus pada:
 - a. Peningkatan pelayanan publik melalui perluasan cakupan dan jenis pelayanan, kemudahan akses pelayanan, ketepatan waktu dan biaya, serta transparansi informasi pelayanan;
 - b. Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen berbasis kinerja melalui penguatan integrasi proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP; meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakan perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;
 - c. Penguatan partisipasi publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sebagai bagian dari *check and balancing*;

Prioritas pembangunan Kota Pekalongan tahun 2019 difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Pekalongan Tahun 2019. Keterkaitan antara permasalahan pembangunan daerah, isu strategis dan prioritas pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2019 ditunjukkan dalam Gambar 1.18 berikut.



Gambar 1.18 Keterkaitan Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2019

Sumber : RKPD Kota Pekalongan Tahun 2020, 2020

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan Tahun 2019, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan Rencana Program Prioritas Daerah Tahun 2019 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat serta lintas sektor dan lintas wilayah yang dapat dilihat pada Tabel 1.22 berikut

Tabel 1.22 Target Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD			PROGRAM PRIORITAS RPJMD
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2019	Keterangan	
1	2	3	4	5
1. Peningkatan pendapatan perkapita dengan menitikberatkan pada sektor-sektor ekonomi kreatif dan unggulan daerah, dengan fokus pada:				
a) Fasilitasi akses terhadap permodalan, manajemen dan pasar ; peningkatan <i>start up</i> wirausaha baru; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita, menekan kesenjangan pendapatan (<i>gini ratio</i>) serta merupakan bagian dari upaya secara terus menerus menurunkan angka kemiskinan;	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	4,70%		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
b) Perkuatan basis data terpadu sebagai dasar pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan swasta dan pihak lainnya dalam mengatasi kemiskinan;	Persentase Penurunan PMKS	8,78%		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
c) Meningkatkan produktivitas pertanian melalui: peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah; fasilitasi pemberian bibit, benih, alsintan; fasilitasi dan pengawasan subsidi pupuk; peningkatan prasarana irigasi; pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian; pengembangan jejaring pemasaran;	Usia Harapan Hidup UHH)	74,32		Program Peningkatan Ketahanan Pangan
d) Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui: peningkatan pemberdayaan nelayan; peningkatan pelayanan TPI, pengembangan dan peningkatan fungsi teknopark perikanan; serta pengembangan perikanan budidaya melalui pemberdayaan kelompok dan fasilitasi benih/pakan ikan	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	4,70%		Program Pengembangan Perikanan Tangkap

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD			PROGRAM PRIORITAS RPJMD
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2019	Keterangan	
1	2	3	4	5
e) Meningkatkan produksi dan produktivitas industri kecil dan menengah melalui: peningkatan nilai tambah diversifikasi produk; mengembangkan inovasi teknologi; memfasilitasi akses modal dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan; peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi dan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk UMKM;	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	4,70%		Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
	f) Melanjutkan upaya peningkatan ekonomi kreatif khususnya kerajinan batik, tenun, kriya lainnya, fesyen, kuliner, fotografi dan seni pertunjukan;	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	4,70%	
Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa		5,40%		Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengembangan pemasaran pariwisata
Persentase peningkatan penyelenggaraan event		70,97%		Program Pengembangan dan Pengelolaan Kekayaan Budaya
g) Mendorong pariwisata berbasis ekonomi kreatif dan religi melalui: perbaikan prasarana dan sarana, serta manajemen pengelolaan daerah wisata, dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata; meningkatkan promosi wisata; meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata; meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah daerah sekitar, serta meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata;	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	5,40%		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
				Program Pengembangan ekspor Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
h) Perbaiki iklim investasi yang semakin kondusif melalui: pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan); perbaiki sistem dan layanan perijinan; pengembangan promosi investasi;	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	5,40%		Program Pengembangan ekspor Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD			PROGRAM PRIORITAS RPJMD
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2019	Keterangan	
1	2	3	4	5
i) Melanjutkan upaya penguatan infrastruktur perdagangan sebagai basis ekonomi kerakyatan, termasuk keberlanjutan penataan LIK di Kuripan Yosorejo, peningkatan kualitas dan kapasitas pasar tradisional dan penataan pedagang kaki lima.	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	5,40%		Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dengan fokus pada:				
a) Mendorong implementasi pencapaian target 12 SPM bidang kesehatan, terutama upaya penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan penurunan prevalensi penyakit menular dan tidak menular, peningkatan promotif dan preventif, upaya kuratif dan rehabilitatif, serta pemenuhan <i>Universal Health Coverage</i> ;	Usia Harapan Hidup UHH)	74,32		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular
				Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga
				Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan
				Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Di Rumah Sakit
				Program Kesehatan Keluarga
b) Peningkatan sarana prasarana kesehatan dasar dan rujukan;	Usia Harapan Hidup UHH)	74,32		Program Peningkatan Sarana Prasarana, penyediaan obat, perbekalan kesehatan, dan Obat Asli Indonesia
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
c) Peningkatan capaian wilayah Open Defecation Free (tidak buang air besar sembarangan);	Usia Harapan Hidup UHH)	74,32		Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Kesehatan Olah Raga
d) Pengendalian jumlah penduduk dan keluarga berencana untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas.	Usia Harapan Hidup UHH)	74,32		Program Keluarga Berencana

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD			PROGRAM PRIORITAS RPJMD
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2019	Keterangan	
1	2	3	4	5
3. Peningkatan derajat pendidikan masyarakat dengan fokus:				
a) mendorong dan memfasilitasi pemenuhan 8 standar nasional pendidikan dengan memprioritaskan pada peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah melalui keterjangkauan biaya pendidikan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, penguatan implementasi teknologi informasi, peningkatan minat baca, pengembangan pendidikan inklusi, berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah serta melakukan upaya-upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak usia sekolah.	Angka Partisipasi Sekolah	97%		Program Pendidikan Anak Usia Dini
				Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
				Program Peningkatan Akses Terhadap Layanan Pendidikan
	Persentase penyelenggaraan pendidikan berakreditasi A	52%		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
				Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
				Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan
	Persentase implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter	55%		Program Pembentukan Karakter Siswa
				Program Pembentukan Karakter Anak
				Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan
4. Penguatan kualitas tenaga kerja yang berkinerja tinggi serta penanaman nilai-nilai budaya masyarakat yang berkarakter, dengan fokus:				
a) Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui: mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi); memperluas kesempatan kerja; dan mengembangkan budaya;	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,70%		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD			PROGRAM PRIORITAS RPJMD
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2019	Keterangan	
1	2	3	4	5
b) Penanganan dan pengelolaan anak jalanan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (<i>stake holder</i>);	Persentase penurunan PMKS	8,78%		Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
c) Penyiapan pendidikan ketrampilan untuk menampung pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja sebagai akibat peningkatan kegiatan ekonomi berbasis teknologi informasi;	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,70%		Program Peningkatan Kesempatan Kerja
	Cakupan komunitas yang berdaya dalam memanfaatkan TI	20		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
d) Perwujudan kota layak anak dengan mendorong peran serta masyarakat;	Persentase pemenuhan sarana prasarana pada ruang publik kreatif (taman bahagia).	71,40%		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
e) Perlindungan dan perwujudan pekerja perempuan sehat produktif.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,70%		Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
5. Melanjutkan pembangunan infrastruktur penghubung jalur ekonomi regional serta infrastruktur kawasan strategis perkotaan di bidang sosial, budaya dan ekonomi, dengan fokus pada:				
a) Pembangunan penanda batas kota;	Persentase pemenuhan sarana prasarana pada ruang publik kreatif (taman bahagia)	71,40%		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD			PROGRAM PRIORITAS RPJMD
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2019	Keterangan	
1	2	3	4	5
b) Penguatan infrastruktur konektivitas melalui: peningkatan sarana prasarana simpul, pepaduan moda transportasi dan kualitas jaringan jalan dan jembatan;	Rasio Kapasitas Jalan (VC Ratio)	0,84		Program pembangunan jalan dan jembatan
				Program Peningkatan Dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
				Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
c) Pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui penyediaan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan jaringan air minum layak dan sanitasi layak;	Persentase kawasan permukiman kumuh	1,03%		Program Pengembangan Perumahan
	Cakupan Layanan Sarpras Permukiman Perkotaan	87,88%		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman
d) Mendorong pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa;	Persentase pemenuhan sarana prasarana pada ruang publik kreatif (taman bahagia).	71,40%		Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
e) Mengoptimalkan potensi pesisir Kota Pekalongan untuk mendukung pengembangan industri perikanan, pariwisata dan konservasi;	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	4,70%		Program pengembangan perikanan tangkap
	Indeks kualitas lingkungan hidup	52,67		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
f) Pembangunan infrastruktur di kawasan rawan bencana;	Persentase luas wilayah genangan banjir dan rob	18,54%		Program Pengendalian Banjir
				Program Peningkatan & Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dan Drainase

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD			PROGRAM PRIORITAS RPJMD
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2019	Keterangan	
1	2	3	4	5
g) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui: pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan air tanah; pengelolaan wilayah pesisir dengan rehabilitasi kawasan mangrove, pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, pengelolaan limbah secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau;	Persentase luas wilayah genangan banjir dan rob	18,54%		Program Pengendalian Banjir
	Indeks kualitas lingkungan hidup	52,67		Program Peningkatan Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dan Drainase
h) Meningkatkan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana melalui efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.	Persentase luas wilayah genangan banjir dan rob	18,54%		Program Pengendalian Banjir
				Program Peningkatan Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dan Drainase
6. Tata Kelola dan Pelayanan Publik, dengan fokus pada:				
a) Peningkatan pelayanan publik melalui perluasan cakupan dan jenis pelayanan, kemudahan akses pelayanan, ketepatan waktu dan biaya, serta transparansi informasi pelayanan;	Persentase PD dengan IKM baik	93,55%		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Persentase OPD dengan nilai Keterbukaan Informasi Publik kategori baik (informatif)	50,00%		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
				Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD			PROGRAM PRIORITAS RPJMD
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2019	Keterangan	
1	2	3	4	5
b) Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen berbasis kinerja melalui penguatan integrasi proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP; meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakan perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;	Kategori evaluasi AKIP	B		Program Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Pengembangan Data/Informasi
				Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Tingkat kematangan implementasi SPIP	2,75		Program Pengawasan internal terhadap penyelenggaraan Tupoksi PD dan kasus pengaduan
				Program Peningkatan kapasitas, Profesionalisme dan Layanan APIP
	Opini BPK atas LKD	WTP		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
				Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah
				Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
				Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan
Indeks profesionalitas ASN	84		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
			Program Peningkatan SDM Aparatur	

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD			PROGRAM PRIORITAS RPJMD
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2019	Keterangan	
1	2	3	4	5
	Persentase penurunan kasus konflik sosial	14,29%		Program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
c. Penguatan partisipasi publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sebagai bagian dari <i>check and balancing</i> ;	Persentase PD dengan IKM baik	93,55%		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur
	Persentase OPD dengan nilai Keterbukaan Informasi Publik kategori baik (informatif)	50,00%		Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
				Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)

Sumber : RKPD Kota Pekalongan Tahun 2020, 2020

BAB II. PENJABARAN APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah hasil kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Pekalongan. APBD Kota Pekalongan tahun anggaran 2019 yang telah ditetapkan tepat waktu dengan Peraturan Daerah 19 Tahun 2018 dan dilakukan perubahan APBD 2019 dengan Peraturan Daerah 14 Tahun 2019, disusun dengan pendekatan kinerja sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah, dan ketersediaan pembiayaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara optimal untuk satu tahun tertentu. Dengan kata lain APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal yang berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus penyusunan APBD sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah. Pada bab ini akan dijabarkan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja dan pengelolaan pembiayaan.

2.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah merupakan seluruh hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Struktur pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Anggaran pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 apabila dibandingkan dengan Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 mengalami kenaikan.

2.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan

Peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan secara terencana sesuai dengan kondisi perekonomian dengan memperhatikan potensi yang ada guna tercapainya peningkatan kemandirian daerah serta mengurangi tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan.

Kebijakan pendapatan daerah Kota Pekalongan pada Tahun Anggaran 2019 dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah dilaksanakan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

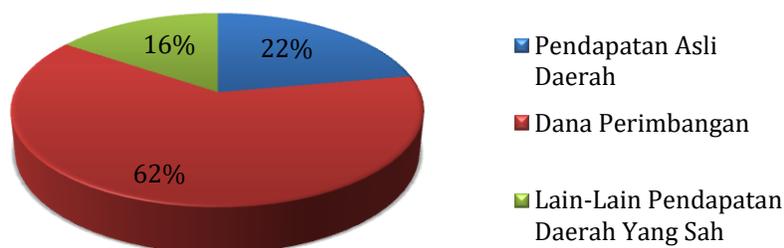
Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut;

- 1) E-monitoring pajak daerah merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti : *tapping box* dan sejenisnya. Tujuan e-Monitoring Pajak Daerah :
 - a. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak
 - b. Mempermudah Wajib Pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan
 - c. Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak
 - d. Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
 - e. Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak
 - f. Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak
- 2) Pemberian Reward dan Punishment
 - a. Pemberian *Reward*, seperti :
 - Penganugerahan Walikota Pekalongan *Regional Tax Award* setiap tahunnya diberikan kepada WP pembayar pajak daerah tertaat, terbesar, kooperatif didalam pemeriksaan pajak daerah.
 - Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum Jatuh Tempo Pembayaran.
 - Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan.
 - Pemberian *doorprize/souvenir* untuk Wajib Pajak yang taat pada *event- event* yang digelar oleh Pemkot Pekalongan, seperti Pameran Keterbukaan Informasi Publik dan Pekan Inovasi Daerah.
 - b. Pemberian *Punishment*, berupa :
 - Pemberian sanksi denda bagi WP yang terlambat bayar
 - Ancaman penerapan sanksi pidana bagi WP yang membandel setelah dilakukan upaya-upaya persuasif, hal ini akan dilakukan/diterapkan kepada WP yang membandel setelah dilakukan upaya-upaya persuasif.
- 3) Sosialisasi pajak daerah kepada WP melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
- 4) Membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan Pajak yang melibatkan OPD: BKD, DPU, DPMPTSP, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum)
- 5) Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara *offline* maupun *online*.
- 6) Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah.
- 7) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
- 8) Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah
- 9) Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah / simpatda untuk semua objek pajak daerah
- 10) Penyempurnaan regulasi mengenai pajak daerah

- 11) Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data simpatda di BKD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya.
- 12) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
- 13) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;
- 14) Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image;
- 15) Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;
- 16) Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam optimalisasi penerimaan dana perimbangan melalui koordinasi dengan DJPK, Provinsi dan KPP Pratama.

2.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2019 adalah sebesar Rp. 960.381.886.760,61 atau 98,75% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 972.541.579.000,-. Tidak tercapainya pendapatan daerah tahun 2019 dikarenakan tidak tercapainya Dana Perimbangan. Dana Perimbangan mempunyai kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Daerah seperti terlihat dalam gambar 2.1 dibawah ini :



Gambar 2.1 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019*

*) Sumber : BKD (Unaudited BPK RI)

Gambaran antara target dan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2019 serta pertumbuhannya apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2018

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Tahun 2019			Pertmbhn
		Target (Rp)	Realsiasi		
			Jumlah (Rp)	%	
PENDAPATAN	905.231.572.568	972.541.579.000	960.381.886.760,61	98,75%	6,09%
Pendapatan Asli Daerah	179.224.408.698	209.577.100.000	212.777.060.293,61	101,53%	18,72%
Dana Perimbangan	586.379.794.858	620.540.406.000	599.090.618.588,-	96,54%	2,17%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	139.627.369.012	142.424.073.000	148.514.207.879,-	104,28%	6,36%

Sumber : BKD (Unaudited BPK RI)

Dalam tabel 2.1 menunjukkan bahwa Kota Pekalongan mengalami kenaikan Pendapatan Daerah secara total sebesar 6,09%. Dari komponen Pendapatan Daerah yang mengalami kenaikan terbesar adalah Pendapatan Asli Daerah sebesar 18,72%. Kenaikakan PAD berkontribusi terhadap kenaikan kemandirian Kota Pekalongan dimana pada tahun 2018 pesentase PAD terhadap Pendapatan Daerah sebesar 19,80% sedangkan pada tahun 2019 naik menjadi 22,16% seperti terlihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah

Uraian	2018		2019	
	Realisasi (Rp)	Kontribusi %	Realisasi (Rp)	Kontribusi %
PENDAPATAN	905.231.572.568		960.381.886.760,61	
Pendapatan Asli Daerah	179.224.408.698	19,80%	212.777.060.293,61	22,16%
Dana Perimbangan	586.379.794.858	64,78%	599.090.618.588,-	62,38%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	139.627.369.012	15,46%	148.514.207.879,-	69,80%

Sumber : BKD (Unaudited BPK RI)

2.1.2.1 Target, Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

1). Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2019 dapat melampau target sebesar 108,93% atau Rp. 87.578.099.262,- dari target Rp. 80.400.000.000,-. Komponen pendapatan pajak daerah yang realisasi cukup tinggi adalah Pajak Air Tanah yaitu sebesar 239,48% atau Rp. 1.436.884.068,- dari target Rp. 600.000.000,-. Hal ini karena pemerintah Kota Pekalongan sudah menyesuaikan dasar tarif baru sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah. Tahun 2019 tarif baru untuk Pajak Air Tanah mulai berlaku secara bertahap dan berlaku penuh pada bulan Oktober 2019 setelah Perubahan APBD 2019 ditetapkan sehingga penyesuaian target dipasang belum sepenuhnya menggunakan perhitungan tarif baru. Dengan diberlakukannya tarif baru berdampak pada kenaikan pertumbuhan yang sangat tinggi apabila dibanding dengan tahun 2018 yaitu sebesar 320,77% seperti yang terlihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2018

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	2019			% Pertmbhn
		Target (Rp)	Realisasi		
			Rp	%	
Pendapatan Pajak Daerah	70.561.333.701	80.400.000.000	87.578.099.262	108,93%	24,12%
Pajak Hotel	6.734.560.722	7.000.000.000	7.437.962.444	106,26%	10,44%
Pajak Restoran	10.792.856.891	11.700.000.000	13.470.213.677	115,13%	24,81%
Pajak Hiburan	1.466.795.005	5.300.000.000	5.549.734.728	104,71%	278,36%
Pajak Reklame	1.603.942.781	2.200.000.000	2.263.030.846	102,87%	41,09%
Pajak Penerangan Jalan	20.851.300.929	21.600.000.000	21.840.421.391	101,11%	4,74%

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	2019			% Pertmbhn
		Target	Realisasi		
		(Rp)	Rp	%	
Pajak Parkir	878.220.669	1.500.000.000	1.874.020.896	124,93%	113,39%
Pajak Air Tanah	341.490.800	600.000.000	1.436.884.068	239,48%	320,77%
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan	12.977.362.631	14.500.000.000	14.212.332.279	98,02%	9,52%
Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan	14.914.803.273	16.000.000.000	19.493.498.933	121,83%	30,70%

Sumber : BKD (Unaudited BPK RI)

Secara total pendapatan pajak mengalami pertumbuhan sebesar 24,12%. Semua komponen pendapatan pajak daerah mengalami pertumbuhan. Selain pajak air tanah, pajak hiburan juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 278,36%. Hal ini terjadi karena mulai beroperasinya Bioskop XXI dan Taman Bermain Trans Studio Mini di Transmart Pekalongan pada Mei 2019. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang dapat melampaui target dan mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan karena faktor-faktor pendukung sebagai berikut :

- 1) Peningkatan basis data, penyusunan data potensi/pemutakhiran data dan peningkatan koordinasi sinergis antar PD pengelola pendapatan.
- 2) Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan daerah.
- 3) Peningkatan pelayanan dengan penerapan e-SPT dan penambahan fungsi pembayaran pada masing-masing payment point di kecamatan dan kantor kas.
- 4) Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (Simpatda) dan pemasangan alat perekam data transaksi para wajib pajak (*tapping box* atau sejenisnya).
- 5) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya melalui sosialisasi dan pemberian *reward and punishment*.
- 6) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah.
- 7) Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan Data objek dan subjek pajak yang valid.

Walaupun secara total target pendapatan daerah terealisasi dan semua komponen pendapatan pajak daerah mengalami pertumbuhan tetapi terdapat salah satu komponen pajak daerah yang tidak mencapai target yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan (PBB P2). Realisasi PBB P2 hanya sebesar 98,02% atau Rp. 14.212.332.279,- dari target Rp. 14.500.000.000,-. Tidak tercapai target PBB P2 karena hal-hal sebagai berikut :

- 1) Target PBB P2 tahun 2018 sebesar Rp. 12,5 Milyar sedangkan target tahun 2019 sebesar Rp. 14.500.000.000,- kenaikan targetnya sebesar Rp. 2 Milyar. Kenaikan target tidak seimbang dengan potensi yang ada sehingga Pemerintah Kota Pekalongan mengambil kebijakan menaikkan NJOP yang berdampak pada kenaikan ketetapan PBB P2. Banyak wajib pajak yang merasa keberatan karena alasan kesulitan ekonomi sehingga mengajukan keringan dan melakukan penundaan pembayaran.

- 2) Bencana banjir rob yang menggenangi banyak Objek PBB P2 di wilayah Pekalongan Utara yang digunakan sebagai tambak tidak lagi dapat beroperasi sehingga menurunkan kemampuan wajib pajak dalam membayar PBB P2.
- 3) Selain tambak, banyak juga perusahaan di wilayah Pekalongan Utara yang merupakan Wajib PBB P2 dengan nilai ketetapan besar terkena dampak banjir rob yang mempengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

2). Hasil Retribusi Daerah

Secara keseluruhan realisasi Hasil Retribusi Daerah sebesar 92,11% atau sebesar Rp. 16.667.656.492,- dari target Rp. 18.095.600.000,-. Pertumbuhan Hasil Retribusi Daerah secara total sebesar 4,27% apabila dibandingkan dengan tahun 2018. Retribusi Daerah terdiri dari tiga jenis Retribusi yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dari ketiga jenis Retribusi tersebut, yang mencapai target hanya Retribusi Perizinan Tertentu yaitu sebesar 107% atau Rp. 1.657.480.000,- dari target Rp. 1.549.000.000,-. Walau secara target melampaui tetapi secara pertumbuhan mengalami penurunan dari tahun 2018. Hal ini terjadi karena tahun 2018 terdapat pembangunan Transmart yang berdampak pada lonjakan realisasi retribusi IMB. Di tahun 2019 tidak ada IMB dengan skala besar.

Sementara untuk realisasi Retribusi Jasa Umum hanya tercapai sebesar 88,09% atau sebesar Rp. 10.591.350.400,- dari target Rp. 12.023.000.000,-. Sedangkan realisasi Retribusi Jasa Usaha hanya dapat mencapai 97,68% atau sebesar Rp. 4.418.826.092,- dari target Rp. 4.523.600.000,-. Walaupun Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha tidak tercapai targetnya tetapi mengalami pertumbuhan, dimana pertumbuhan untuk Retribusi Jasa Umum sebesar 12,10% dan pertumbuhan Retribusi Jasa Usaha sebesar 15,44%. Secara terperinci target dan realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2018 serta pertumbuhannya tersaji dalam tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4 Target dan Realisasi Hasil Retribusi Daerah Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2018

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	2019			% Pertmbhn
		Target	Realisasi		
		(Rp)	Rp	%	
Hasil Retribusi Daerah	15.985.706.343	18.095.600.000	16.667.656.492	92,11%	4,27%
Retribusi Jasa Umum	9.448.542.521	12.023.000.000	10.591.350.400	88,09%	12,10%
Pelayanan Kesehatan	186.970.500	215.000.000	183.282.000	85,25%	-1,97%
Pelayanan Persampahan / Kebersihan	466.674.000	850.000.000	692.966.000	81,53%	48,49%
Pelayanan Pemakaman & Pengabuan mayat	8.500.000	20.000.000	34.689.000	173,45%	308,11%
Parkir di tepi Jalan Umum	1.255.150.000	1.600.000.000	1.240.036.000	77,50%	-1,20%
Pelayanan Pasar	2.310.199.811	2.620.000.000	2.554.491.700	97,50%	10,57%
Pengujian Kendaraan Bermotor	463.220.500	638.000.000	494.418.400	77,50%	6,73%
Pelayanan TPI	4.704.340.710	6.000.000.000	5.326.851.300	88,78%	13,23%
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	53.487.000	80.000.000	64.616.000	80,77%	20,81%
Retribusi Jasa Usaha	4.092.521.822	4.523.600.000	4.418.826.092	97,68%	15,44%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/ Sewa Lahan Usaha	264.723.200	360.000.000	360.741.400	100,21%	100,00%

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	2019			% Pertmbhn
		Target	Realisasi		
		(Rp)	Rp	%	
Jasa/ Perdagangan/ Sewa Toko/ Kios Luar Pasar					
Retribusi Tempat Penginapan / Pesanggrahan / Villa	13.800.000	50.400.000	8.400.000	16,67%	-39,13%
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	53.315.000	100.000.000	21.635.000	21,64%	-59,42%
Retribusi Rumah Potong Hewan	112.344.000	90.000.000	90.007.500	100,01%	-19,88%
Retribusi Tempat Rekreasi dan OR	602.176.750	1.100.000.000	647.670.250	58,88%	7,55%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa Rumah Dinas	55.283.076	65.000.000	79.972.578	123,03%	44,66%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa Ruang / Bangunan / Gedung Pertemuan	18.000.000	25.000.000	20.700.000	82,80%	15,00%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa Alat Berat	293.325.000	243.700.000	210.850.000	86,52%	-28,12%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa Lahan Titik Strategis	235.195.000	250.000.000	263.177.800	105,27%	11,90%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa Tanah	190.239.958	175.000.000	251.995.498	144,00%	32,46%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa Garapan Tanah Eks Bengkulu	1.005.200.000	967.500.000	983.357.200	101,64%	-2,17%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa Alat-alat Laboratorium	101.375.000	120.000.000	182.150.000	151,79%	79,68%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah / Sewa Hunian Rusunawa	1.127.544.838	952.000.000	1.247.504.866	131,04%	10,64%
Retribusi Pemakaian Fasilitas/Sarana Prasarana Reklame	20.000.000	25.000.000	38.500.000	154,00%	92,50%
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Pengujian Laboratorium Lingkungan			12.164.000		100,00%
Retribusi Perizinan Tertentu	2.444.642.000	1.549.000.000	1.657.480.000	107,00%	-31,96%
Ijin Mendirikan Bangunan	2.399.435.500	1.500.000.000	1.607.129.600	107,14%	-33,02%
Ijin Trayek	8.612.900	4.000.000	4.454.400	111,36%	8,71%
Retribusi Perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	4.097.600	45.000.000	45.896.000	101,99%	41,24%

*) Sumber : BKD (Unaudited BPK RI)

Tidak tercapainya target dari Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha karena hal-hal sebagaimana berikut :

- 1) Belum adanya SIM Pendapatan untuk retribusi yang terintegrasi untuk semua jenis retribusi.
- 2) Pungutan retribusi masih belum sepenuhnya non tunai.
- 3) Target Retribusi Pelayanan TPI tidak terealisasi karena adanya pendangkalan muara sehingga kapal besar tidak dapat bersandar di TPI Kota Pekalongan dan adanya penurunan kualitas ikan.
- 4) Target Retribusi Pelayanan Pasar tidak terealisasi karena Pasar Banjarsari yang tersebar masih menempati pasar darurat di Lapangan Sorogeneng sehingga tidak dipungut retribusi, adanya proyek pembangunan Pasar Sugihwaras baru yang berdampak pada aktivitas pedagang yang belum direlokasi.
- 5) Target Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum tidak terealisasi karena ada *one prestasi* pada pengelolaan Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum pada beberapa titik yang di kelola pihak ketiga hanya bayar 3 bulan. Mulai September 2019 tidak lagi dikelolakan ke Pihak Ke 3.
- 6) Target Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak teralisasi karena ada beberapa alat yang mengalami kerusakan sehingga mengganggu pelayanan yang berdampak pada penurunan pendapatan.
- 7) Target Retribusi Tempat Rekreasi dan OR tidak terealisasi karena beberapa objek wisata pantai yang terendam banjir rob, minimnya sarana dan prasarana yang ada pada objek wisata, dan tidak bertambahnya koleksi batik pada musim batik.
- 8) Target Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan tidak tercapai karena ada beberapa wajib retribusi yang pengelolaan sampahnya tidak lewat Dinas Lingkungan Hidup.
- 9) Target Retribusi/ Penyediaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tidak terealisasi karena pelayanan sedot kakus, baru aktif di bulan Maret 2019, Kendaraan Sedot Tinja yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup daya sedotnya kecil hanya bisa sedot dengan ukuran 1-2 Meter².
- 10) Target Retribusi pemakaian kekayaan daerah / sewa ruangan / bangunan / gedung pertemuan tidak terealisasi karena Gedung wanita yang sebelumnya disewakan untuk kepentingan umum, saat ini tidak disewakan karena akan digunakan sebagai Kantor Imigrasi.

3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD. Pada tahun 2019 realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD dapat tercapai 100% Rp. 6.101.173.105,- dari target Rp. 6.101.000.000,-. Secara terperinci seperti yang tersaji pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5 Target dan Realisasi Hasil Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2018

Uraian	Realisasi2018 (Rp)	2019			%Pertmbhn
		Target	Realisasi		
		(Rp)	Rp	%	
Hasil Pengel.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.920.239.113	6.101.000.000	6.101.173.105	100,00%	3,06%

Uraian	Realisasi2018 (Rp)	2019			%Pertmbhn
		Target	Realisasi		
		(Rp)	Rp	%	
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pd Perusda/BUMD	5.920.239.113	6.101.000.000	6.101.173.105	100,00%	3,06%
PD. BPR Bank Pekalongan	479.548.458	575.000.000	575.000.000	100,00%	19,90%
PT. Bank Jateng	3.756.582.869	4.138.000.000	4.138.095.336	100,00%	10,16%
PD. BPR BKK Kota Pekalongan	57.138.091	122.500.000	122.505.501	100,00%	114,40%
PD.BPR BKK Pekalongan Utara	357.665.042	0	0		-100,00%
PDAM Kota Pekalongan	1.269.304.653	1.265.500.000	1.265.572.268	100,01%	-0,29%

*) Sumber : BKD (Unaudited BPK RI)

Secara total Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami kenaikan pertumbuhan sebesar 3,06%. Kenaikan pertumbuhan ini karena pada Tahun 2019 Pemerintah Kota Pekalongan melakukan penambahan penyertaan modalnya pada semua BUMD. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD. BPR BKK Kota Pekalongan mengalami kenaikan pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 114,40%. Disamping karena bertambahnya penyertaan modal pemerintah Kota Pekalongan pada PD. BPR BKK Kota Pekalongan, kenaikan pertumbuhan ini juga karena peningkatan kinerja PD. BPR BKK Kota Pekalongan.

Walaupun secara total mengalami kenaikan pertumbuhan tetapi Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD. BPR BKK Pekalongan Utara dan PDAM Kota Pekalongan mengalami penurunan pertumbuhan. Penurunan pertumbuhan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PD. BPR BKK Pekalongan Utara karena PD. BPR BKK Pekalongan Utara mengalami merger menjadi PD. BPR BKK. Perhitungan Laba/ Rugi hasil konsolidasi seJawa Tengah baru akan BEP tahun 2021 sehingga Bagian Laba Atas Penyertaan Modal baru akan diberikan pada tahun 2022. Sedangkan Penurunan pertumbuhan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada PDAM Kota Pekalongan karena pada tahun 2019 terdapat *force mayor* (dampak pembangunan infrastruktur di Kota Pekalongan dan biaya investasi jaringan yang belum teranggarkan) serta saat ini PDAM Kota Pekalongan belum menaikkan tarif dasar air minum padahal tarif dasar pajak air bawah tanah dan listrik sudah mengalami kenaikan. Hal ini yang menyebabkan berkurang laba pada PDAM Kota Pekalongan yang berdampak pada turun Bagian Laba Atas Penyertaan Modal yang diterima Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2019.

4). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Tabel 2.6 Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2018

Uraian	Realisasi2018 (Rp)	2019			%Pertm bhan
		Target	Realisasi		
		(Rp)	Rp	%	
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	86.757.129.541	104.980.500.000	102.430.131.435	97,57%	18,07%
Hasil Penjualan Aset Daerah yang tdk dipisahkan	2.670.169.647	276.000.000	279.230.774	101,17%	-89,54%
Penerimaan Jasa Giro	1.347.920.838	1.510.000.000	1.895.336.165	125,52%	40,61%
Penerimaan Bunga Deposito	6.742.255.884	8.000.000.000	8.241.036.971	103,01%	22,23%
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	14.100.000	15.000.000	7.100.000	47,33%	-49,65%
Pendapatan Denda	256.258.373	250.000.000	200.079.367	80,03%	-21,92%

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	2019			%Pertumbuhan
		Target	Realisasi		
		(Rp)	Rp	%	
Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan					
Pendapatan Denda Pajak	531.318.736	580.000.000	549.415.125	94,73%	3,41%
Pendapatan Denda Retribusi	900.000	1.500.000	-	0,00%	-100,00%
Pendapatan dari Pengembalian	1.657.421.519	1.020.000.000	1.527.506.719	149,76%	-7,84%
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	293.135.200	-	-		-100,00%
Pendapatan Hasil Sewa, Penyiaran, Sumbangan dan Lain-lain	472.392.301	715.000.000	824.348.471	115,29%	74,51%
Pendapatan BLUD	72.339.072.859	92.200.000.000	88.193.320.416	95,65%	21,92%
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Daerah	56.849.801.951	75.000.000.000	70.469.240.049,61	93,96%	23,96%
Pendapatan BLUD Puskesmas	14.790.257.794	16.300.000.000	16.904.880.594	103,71%	14,30%
Pendapatan BLUD BKPM (Balai Kesehatan Paru Masyarakat)	597.850.949	700.000.000	627.230.377	89,60%	4,91%
Pendapatan BLUD PSPJ (Pusat Saintifikasi Pelayanan Jamu)	101.162.165	200.000.000	191.969.395	95,98%	89,76%
Penerimaan bunga pinjaman dana bergulir	129.796.259	63.000.000	105.369.201	167,25%	-18,82%
Pendapatan Bunga Dana Cadangan	-	350.000.000	607.388.226	173,54%	100,86%

*) Sumber : BKD (Unaudited BPK RI)

Tabel 2.6 menunjukkan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 97,57% atau sebesar Rp. 102.430.131.435,- dari target sebesar Rp. 104.980.500.000,-. Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :

- 1) Pendapatan BLUD BKPM (Balai Kesehatan Paru Masyarakat) hanya terealisasi sebesar 89,60% atau sebesar Rp. 627.230.377,- dari target Rp. 700.000.000,-. Hal ini terjadi karena Balai Kesehatan Paru Masyarakat Kota Pekalongan yang terletak di jalan WR Supratman sering tergenang banjir rob sehingga menyebabkan tidak optimalnya pelayanan BKPM kepada masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pada tahun 2020 Pemerintah Kota Pekalongan melakukan merger antara BKPM dengan RSUD Bendan sehingga semua pelayanan terkait dengan kesehatan paru akan terpusat di RSUD Bendan.
- 2) Realisasi Pendapatan BLUD RSUD Bendan tercapai 93,96% atau sebesar Rp. 70.469 240 049,61 dari target Rp. 75.000.000.000,-. Tidak tercapainya pendapatan BLUD RSUD Bendan karena di atas 85% pasien RSUD bendan merupakan pasien BPJS. Realisasi pendapatan BLUD RSUD Bendan yang diterima di tahun 2019 atas klaim sampai dengan bulan Juli 2019. Sehingga masih terdapat piutang di BPJS untuk 4 bulan yaitu bulan Agustus – Desember 2019.

Walaupun Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak dapat mencapai target 100% tetapi untuk tahun 2019 pertumbuhannya mengalami kenaikan apabila

dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebesar 18,07%. Yang mempunyai kontribusi besar terhadap kenaikan pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Hasil Sewa, Penyiaran, Sumbangan dan Lain-lain sebesar 74,51%, penerimaan jasa giro sebesar 40,61% dan penerimaan bunga deposito sebesar 22,23%.

2.1.2.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari tiga komponen yaitu pertama, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak yang merupakan dana dengan sumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang kedua Dana Alokasi Umum (DAU), adalah Dana Perimbangan yang bersifat "Block Grant" yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Sedangkan komponen ketiga adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang merupakan Dana Perimbangan yang berasal dari APBN dan alokasikan kepada provinsi/kabupaten/kota dengan maksud untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Realisasi Dana Perimbangan pada tahun 2019 sebesar 96,54% atau Rp. 599.090.618.588,- dari target Rp. 620.540.406.000,-. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi Dana Perimbangan mengalami kenaikan sebesar 2,17% seperti tersaji pada tabel 2.7 berikut:

Tabel 2.7 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2018

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Tahun 2019			% Pertmbhn
		Target	Realisasi		
		(Rp)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6
DANAPERIMBANGAN	586.379.794.858	620.540.406.000	599.090.618.588	96,54%	2,17%
Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil BukanPajak	26.693.031.431	26.244.334.000	19.027.230.900	72,50%	- 28,72%
Dana Alokasi Umum	449.055.738.000	471.330.216.000	475.842.089.000	100,96%	5,97%
Dana Alokasi Khusus	110.631.025.427	122.965.856.000	104.221.298.688	84,76%	-5,79%

*) Sumber : BKD (Unaudited BPK RI)

1). Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu, untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH Bukan Pajak/ DBH Sumber Daya Alam (SDA). Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada tahun 2019 hanya sebesar 72,50% atau Rp.19.027.230.900,- dari target Rp.26.244.334.000,-. Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 28,72% seperti tersaji pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2018

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	2019			% Pertmbh
		Target	Realisasi		
		(Rp)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26.693.031.431	26.244.334.000	19.027.230.900	72,50%	-28,72%
Bagi Hasil Pajak	25.352.861.062	23.683.177.000	17.751.480.700	74,95%	-29,98%
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	4.900.003.808	4.795.280.000	3.725.854.500	77,70%	-23,96%
Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan	13.489.977.254	12.155.677.000	7.293.406.200	60,00%	-45,93%
Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau	6.962.880.000	6.732.220.000	6.732.220.000	100,00%	-3,31%
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	1.340.170.369	2.561.157.000	1.275.750.200	49,81%	-4,81%
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	282.138.205	234.494.000	140.696.400	60,00%	-50,13%
Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan	701.234.591	983.593.000	295.077.900	30,00%	-57,92%
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	36.346.929	69.000.000	95.052.100	137,76%	161,51%
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	291.237.025	936.340.000	419.934.900	44,85%	44,19%
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	26.570.761	42.534.000	29.773.800	70,00%	12,05%
Bagi Hasil dari Mineral dan Batu bara	2.642.858	196.000	137.200	70,00%	-94,81%

*) Sumber : BKD (Unaudited BPK RI)

Rendahnya realisasi dan pertumbuhan yang negatif pada Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak karena :

- a. Adanya potongan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang diterima di tahun 2019 karena terdapat lebih bayar penyaluran Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ditahun 2018. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang lebih bayar yaitu :
 - Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 1.269.912.261,00.
 - Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan Rp 147.154.524,00.
 - Bagi hasil pungutan pengusahaan perikanan Rp 99.184.671,00.
- b. Tidak tercapainya target penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) secara nasional sehingga mempengaruhi jumlah Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan yang disalurkan ke daerah.

2). Dana Alokasi Umum (DAU)

Tabel 2.9 Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2018

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Tahun 2019			% Pertmbh
		Target	Realisasi		
		(Rp)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6
Dana Alokasi Umum	449.055.738.000	471.330.216.000	475.842.089.000	100,96%	5,97%

*) Sumber : BKD (Unaudited BPK RI)

Penerimaan dana alokasi umum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi dana alokasi umum sebesar Rp471.330.216.000,-. Realisasi penerimaan DAU Tahun 2019 adalah sebesar Rp 475.842.089.000,- atau 100,96% seperti yang tersaji pada tabel 2.9. Realisasi tahun 2019 naik sebesar 5,97% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018. Hal ini karena berdasarkan PMK Nomor 166/PMK.07/2019 terdapat DAU tambahan bantuan pembayaran selisih perubahan iuran jaminan kesehatan penduduk sebesar Rp4.494.640.000,00 dan Rp. 17.233.000,00 untuk 47.312 tanggungan. PMK tersebut terbit setelah APBD P tahun 2019 ditetapkan, sehingga penganggaran penambahan DAU diwadahi dalam Peraturan Walikota Nomor 86A tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2019.

3). Dana Alokasi Khusus (DAK)

Masih berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, bahwa alokasi DAK dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu DAK Fisik dan Non Fisik. Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan alokasi DAK sebesar Rp 122.965.856.000,-, yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp 49.858.608.000,- dan DAK Non Fisik sebesar Rp 73.107.248.000,-.

Realisasi penerimaan DAK tahun 2019 adalah sebesar Rp115.463.501.048,- atau hanya sebesar 93,90%, yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp 49.033.606.513,- dan DAK Non Fisik sebesar Rp 66.429.894.535,-. Secara pertumbuhan DAK juga mengalami pertumbuhan sebesar 4,37%. Tabel 2.10 menyajikan secara detail realisasi DAK dan pertumbuhannya.

Tabel 2.10 Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2018

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Tahun 2019			% Pertmbhn
		Target	Realisasi		
		(Rp)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6
Dana Alokasi Khusus	110.631.025.427	122.965.856.000	115.463.501.048	93,90%	4,37%
Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler	41.768.518.285	49.858.608.000	49.033.606.513	98,35%	17,39%
DAK Bidang Perumahan	2.375.699.000	3.262.144.000	3.220.394.000	98,72%	35,56%
DAK bidang Pertanian	529.911.000	1.516.678.000	1.513.879.312	99,82%	185,69%
DAK Bidang Pariwisata		1.509.746.000	1.375.285.000	91,09%	100,00%
DAK bidang Air minum (Penugasan)	2.183.149.000	2.250.000.000	2.178.261.000	96,81%	-0,22%
DAK bidang Sanitasi (Penugasan)	2.381.000.000	1.800.000.000	1.369.400.000	76,08%	-42,49%
DAK Bidang Pasar	1.157.060.000	1.477.385.000	1.473.436.791	99,73%	27,34%
DAK bidang Pendidikan SD	5.598.926.700	6.014.644.000	5.924.221.700	98,50%	5,81%
DAK Bidang Pendidikan SMP	2.215.810.000	1.249.600.000	1.224.608.000	98,00%	-44,73%
DAK Bidang Pendidikan SKB		294.078.000	239.966.300	81,60%	100,00%
DAK bidang kesehatan sub bidang Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi	326.629.516			#DIV/0!	-100,00%
DAK bidang Kesehatan dan sub bidang pelayanan Dasar	5.627.626.000	5.494.499.000	5.219.774.050	95,00%	-7,25%
DAK bidang Kesehatan dan sub bidang pelayanan	4.431.903.419	8.009.999.000	7.609.499.050	95,00%	71,70%

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Tahun 2019			% Pertmbhn
		Target	Realisasi		
		(Rp)	Rp	%	
1	2	3	4	5	6
Rujukan					
DAK bidang Kesehatan dan sub bidang pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	2.313.986.390	1.776.049.000	1.729.370.510	97,37%	-25,26%
DAK bidang Kesehatan dan sub bidang KB	612.846.260	719.565.000	687.708.000	95,57%	12,22%
DAK Bidang Jalan Sub Bidang Pendukung Konektivitas		322.735.000	322.735.000	100,00%	100,00%
DAK bidang LH dan Kehutanan sub bidang Lingkungan Hidup		489.952.000	1.417.949.400	289,41%	100,00%
Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)	68.862.507.142	73.107.248.000	66.429.894.535	90,87%	-3,53%
Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (TPG PNSD)	50.787.953.600	51.228.423.000	47.276.119.900	92,28%	-6,91%
Tambahan Penghasilan Guru	109.800.000	167.450.000		0,00%	-100,00%
Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.180.595.000	6.892.200.000	6.445.567.573	93,52%	-10,24%
Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan		380.000.000	380.000.000	100,00%	100,00%
Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	764.311.813	988.244.000	872.658.155	88,30%	14,18%
Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)	811.136.750	916.963.000	868.425.978	94,71%	7,06%
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	7.184.078.979	8.435.368.000	8.801.822.929	104,34%	22,52%
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan		2.370.600.000	1.185.300.000	50,00%	100,00%
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum		600.000.000	600.000.000	100,00%	100,00%

*) Sumber : BKD (Unaudited BPK RI)

2.1.2.3 Target, Realisasi dan Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, Dana Insentif Daerah dan Bantuan Keuangan Provinsi, pada tahun 2019 terealisasi sebesar 104,28% atau sebesar Rp. 148.514.207.879,- dari target Rp. 142.424.073.000,-. Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang tidak mencapai target hanya Bagi Hasil Pajak Provinsi yaitu dengan realisasi sebesar 98,50% atau sebesar Rp. 72.167.436.245 dari target Rp.73.263.810.000,-. Hal ini karena terdapat kurang salur Bagi Hasil Pajak Provinsi atas realisasi atas pajak provinsi bulan Desember 2019, yang kemudian akan disalurkan pada Triwulan I tahun 2020. Secara terperinci terlihat pada tabel 2.11.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 6,36%. Kenaikan tersebut karena pada tahun 2019 terjadi Bantuan Keuangan dari Propinsi mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada komponen Bantuan Sarpras Daerah, Bantuan Pendidikan dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD). Bantuan keuangan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD) didapat karena *reward* atas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan dalam perencanaan yang memperoleh apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa penghargaan Anugrah Pangripta Abipraya tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.11 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2019 dan Realisasi Tahun 2018

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	2019			% Pertmbhan
		Target (Rp)	Realisasi		
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	139.627.369.012	142.424.073.000	148.514.207.879	104,28%	6,36%
Pendapatan Hibah	23.778.759.822	23.324.321.000	23.949.677.589	102,68%	0,72%
Pendapatan Hibah dari Pemerintah	2.250.000.000	2.250.000.000	1.692.000.000	75,20%	-24,80%
Pendapatan Hibah Dana BOS	21.528.759.822,-	21.074.321.000,-	22.257.677.589,-	105,62%	3,39%
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	75.273.768.190	73.263.810.000	72.167.436.245	98,50%	-4,13%
Dana Bagi hasil Pajak dari Propinsi	75.273.768.190	73.263.810.000	72.167.436.245	98,50%	-4,13%
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	21.731.714.363	19.708.015.000	21.423.169.984	108,70%	-1,42%
Bagi Hasil dari BBNKB	12.262.207.623	10.576.157.000	10.626.802.998	100,48%	-13,34%
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.258.178.027	20.167.786.000	18.684.042.078	92,64%	2,33%
Bagi Hasil dari Air Permukaan	3.507.410	2.898.000	3.360.123	115,95%	-4,20%
Bagi Hasil Pajak Rokok	23.018.160.767	22.808.954.000	21.430.061.062	93,95%	-6,90%
Dana Penyesuaian dan otonomi khusus	33.250.000.000	33.260.942.000	33.260.942.000	100,00%	0,03%
Dana Insentif Daerah	33.250.000.000,-	33.260.942.000,-	33.260.942.000,-	100,00%	0,03%
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemda Lainnya	7.324.841.000	12.575.000.000	19.136.152.045	152,18%	161,25%
Bantuan Keuangan dari Propinsi	7.324.841.000	12.575.000.000	19.136.152.045	152,18%	161,25%
Bantuan Kegiatan FEDEP	100.000.000				-100,00%
Bantuan TMMD	501.600.000	675.000.000	675.000.000	100,00%	34,57%
Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD)	50.000.000				-100,00%
Bantuan Sarpras Daerah	6.498.241.000	11.000.000.000	15.841.152.045	144,01%	143,78%
Bantuan Pendidikan	35.000.000	365.000.000	2.085.000.000	571,23%	5857,14%
Bantuan Pendidikan untuk	50.000.000				-100,00%

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	2019			% Pertmb han
		Target (Rp)	Realisasi		
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
semua					
TKPKD (Tim Koordinasi Pengendalian Kemiskinan Daerah)	50.000.000				-100,00%
Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY)	40.000.000				-100,00%
Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SPPD)		535.000.000	535.000.000	100,00%	100,00%

*) Sumber : BKD (Unaudited BPK RI)

2.1.3. Permasalahan dan Solusi

2.1.3.1 Pendapatan Asli Daerah

Permasalahan :

- Kurangnya Sumber Daya Aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas.
- Belum terintegrasi data Subjek Pajak dan Objek Pajak Restoran, Hotel, PBB, BPHTB, PPJ Non PLN, Pajak Air Tanah, Pajak Hiburan, Pajak Parkir, antara data simpatda di BKD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya.
- Pungutan retribusi masih belum sepenuhnya non tunai
- Belum optimalnya sinergi/kerjasama dengan APH dan pihak-pihak lain dalam rangka peningkatan realisasi PAD yang.
- Potensi PAD sebagai salah satu sumber dana pembangunan daerah yang belum digali secara optimal.
- Perda-perda atau Perwal yang belum menyesuaikan dengan perubahan perundangan dan kondisi terkini.
- SOP yang perlu dievaluasi
- Masih perlunya peningkatan kesadaran Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.
- Rendahnya capaian realisasi pendapatan BLUD RSUD
- Berkurangnya persentase penguasaan saham pemerintah Kota Pekalongan pada beberapa BUMD yang mengakibatkan Pemerintah Kota Pekalongan tidak lagi menjadi pemegang saham pengendali.
- Pemanfaatan aset pemerintah yang belum optimal

Solusi :

- Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dan Penambahan jumlah Aparatur yang membidangi pendapatan.
- Pembangunan SIM Pendapatan yang dapat mengakomodir semua jenis PAD dan terintegrasi dengan SIM Keuangan. Sehingga nantinya semua penerimaan PAD sudah sepenuhnya non tunai.

- Membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD yang melibatkan OPD: BKD, DPU, DPMPTSP, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).
- Penyusunan kajian potensi pajak dan retribusi daerah, pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak.
- Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan.
- Menyederhanakan SOP pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk meningkatkan pelayanan serta penerapan secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan daerah (Penerapan Pajak *Online*).
- Sosialisasi dan pemberian *reward and punishment* serta pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan RSUD.
- Upaya penambahan penyertaan modal kepada BUMD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah agar dapat menunjang rencana bisnis BUMD sehingga dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan retribusi kekayaan daerah.

2.1.3.2 Dana Perimbangan

Permasalahan

- Masih kurangnya koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Khusus

Solusi

- Meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam optimalisasi penerimaan dana perimbangan melalui koordinasi dengan DJPK, dan KPP Pratama.

2.1.3.3 Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Permasalahan

- Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak Provinsi yang belum optimal.
- Kategori dan tata cara penilaian alokasi DID berubah setiap tahunnya.

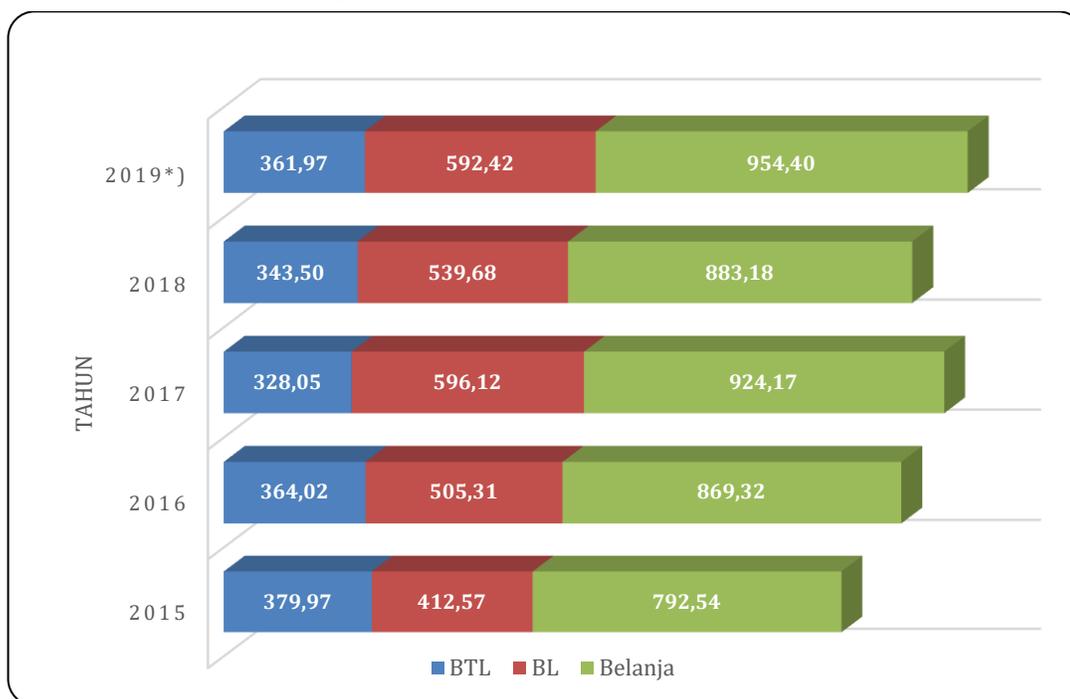
Solusi

- Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
- Upaya peningkatan perolehan realisasi DID fokus pada kategori yang selalu ada, seperti Kinerja Keuangan (peningkatan PAD dan penyerapan anggaran)

2.2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan *konkuren* yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada standar harga satuan regional. Selain itu belanja daerah digunakan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara garis besar, perkembangan realisasi belanja daerah Kota Pekalongan selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Gambar 2.2 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015-2019*

Sumber : BKD Kota Pekalongan
Keterangan : 2019*) data unaudited

2.2.1. Kebijakan Umum Keuangan Daerah

Kebijakan dan alokasi anggaran belanja diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi,

menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan. Selanjutnya kebijakan umum belanja daerah adalah sebagai berikut :

2.2.1.1 Belanja Tidak Langsung

Kebijakan Belanja Tidak Langsung terdiri dari kebijakan dalam penyusunan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga antara lain :

1) Belanja Pegawai

Beberapa kebijakan dalam penyusunan belanja pegawai antara lain :

- a) Asumsi penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14 beserta tunjangannya sebagaimana dialokasikan pada tahun 2018, perhitungan *accress* serta penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2019;
- b) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- c) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- e) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f) Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 melalui DAK Non Fisik yang dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.
- g) Peningkatan gaji bagi tenaga kontrak minimal sebesar Upah Minimum Kota serta penyediaan dana BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

- a) Implementasi pengaturan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 14 Tahun 2016 dimana didalamnya memberikan

definisi tersendiri penerima hibah kepada Lembaga dan Badan. Sedangkan persyaratan “berbadan hukum Indonesia” hanya untuk Organisasi Kemasyarakatan berbentuk yayasan dan/atau perkumpulan. Disamping itu, pengaturan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial juga mengacu pada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.

- b) Belanja Tidak Langsung khusus belanja hibah, belanja bantuan keuangan dianggarkan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang akan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah.

3) Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik dan rincian obyek nama partai politik penerima bantuan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja Tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2.1.2 Belanja Langsung

Kebijakan belanja langsung untuk perencanaan pembangunan yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Melanjutkan pengalokasian anggaran pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang meliputi Jenjang Pendidikan PAUD, TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs baik Negeri ataupun Swasta, diberikan melalui pemberian Fasilitas Operasional Pendidikan (FOP) dan pemberian beasiswa miskin, pengalokasian dana untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta pemberian bantuan kesra bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS baik pada Sekolah Negeri ataupun Sekolah/Madrasah Swasta.
- 2) Melanjutkan pemberian layanan kesehatan di Puskesmas sampai dengan pukul 21.00 WIB melalui penyediaan alat kesehatan dan penunjangnya serta tenaga kesehatan sesuai standar.
- 3) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan perkotaan serta kawasan strategis kota sesuai dengan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2016-2021 untuk meningkatkan kualitas dan daya dukung bagi daya tarik

wisatawan sehingga akan memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan secara bertahap dan berkelanjutan.

- 4) Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung upaya pencapaian target nasional 100-0-100 dalam penataan kawasan kumuh, yaitu 100% terpenuhinya akses air bersih, 0% bebas kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi sehat pada tahun 2019. Upaya ini antara lain diwujudkan melalui sinergi penyelenggaraan pembangunan masyarakat yang terpadu seperti Program NUSP (*Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project*) dan P2KKP (Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman) / KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh).
- 5) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka pelaksanaan percepatan pembangunan diupayakan melalui program Sistem Inovasi Daya Saing Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi, antara lain melalui pembangunan *e-development* Kota Pekalongan, penguatan integrasi SIM Perencanaan dan Keuangan, Pekalongan *Broadband City*, pengembangan SIM Keuangan Daerah Berbasis Akruar, Pengembangan SIM Barang Daerah (SIMBADA) dan SIM Rujukan terpadu.
- 6) Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan untuk mendorong majunya pasar tradisional sehingga akan menyentuh secara langsung sendi-sendi perekonomian masyarakat menengah ke bawah.
- 7) Mempertahankan dan meningkatkan prestasi olahraga melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana keolahragaan yang diawali dengan kajian secara menyeluruh terhadap sarana dan prasarana yang ada di Kota Pekalongan.
- 8) Melanjutkan penguatan manajemen aset daerah baik melalui penguatan SDM Pengelola Barang Daerah ataupun melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- 9) Penguatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan terus meningkatkan akses masyarakat dalam suatu perspektif *check and balance* dari kebijakan pembangunan daerah.
- 10) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkantoran berupa bangunan gedung, pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung, ataupun sarana mobilitas dalam upaya peningkatan kualitas layanan publik.
- 11) Dalam rangka pengendalian dan efektifitas penganggaran, kebijakan penganggaran perjalanan dinas dan belanja Alat Tulis Kantor tetap diarahkan pada pemusatan di kegiatan yang berada di bawah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- 12) Dalam upaya untuk lebih mengarahkan program dan kegiatan sesuai dengan output, *outcome*, ataupun sebagai tindak lanjut atas terbitnya peraturan perundang-undangan, maka akan dilakukan penyesuaian, baik dalam kerangka program dan kegiatan.
- 13) Penyusutan plafon belanja program kegiatan prioritas tambahan atau "*waiting list*" yang akan dipertimbangkan sebagai usulan plafon belanja tambahan.

2.2.2. Target dan Realisasi Belanja

Belanja Daerah Kota Pekalongan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dianggarkan sebesar Rp1.050.112.414.000,- (satu trilyun lima puluh milyar seratus dua belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah), dengan realisasi sebesar Rp954.397.012.827,- (sembilan ratus lima puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) atau sebesar 90,89%. Realisasi belanja tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp71.212.118.120,- (tujuh puluh satu miliar dua ratus dua belas juta seratus delapan belas ribu

seratus dua puluh rupiah) atau sebesar 8,06% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun anggaran 2018 sebesar Rp883.184.894.707,- (delapan ratus delapan puluh tiga miliar seratus delapan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).

Rincian lebih lanjut anggaran dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2019 dan Realisasi Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat pada tabel 2.12 dibawah ini :

Tabel 2.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Tahun 2019 ^{a)}			% Pertumbuhan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
BELANJA TIDAK LANGSUNG					
Belanja Pegawai	306.471.304.518,-	353.244.749.000,-	319.284.304.802,-	90,39	4,18
Belanja Bunga	0,-	0,-	6.803.500,-	100,00	100,00
Belanja Hibah	22.446.204.000,-	33.307.241.000,-	29.310.400.000,-	88,00	30,58
Belanja Bantuan Sosial	11.865.819.000,-	12.904.000.000,-	11.920.375.000,-	92,38	0,46
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	798.881.000,-	722.000.000,-	721.513.000,-	99,93	-9,68
Belanja Tidak Terduga	1.921.815.800,-	2.750.000.000,-	730.438.928,-	26,56	-61,99
Jumlah	343.504.024.318,-	402.927.990.000,-	361.973.835.230,-	89,84	5,38
BELANJA LANGSUNG					
Belanja Pegawai	46.060.060.537,-	76.269.434.000,-	71.614.035.173,-	93,90	55,48
Belanja Barang dan Jasa	347.238.216.376,-	368.868.065.000,-	338.655.157.845,-	91,81	-2,47
Belanja Modal	146.382.593.476,-	202.046.925.000,-	182.153.984.579,-	90,15	24,44
Jumlah	539.680.870.389,-	647.184.424.000,-	592.423.177.597,-	91,54	9,77
Total Belanja Daerah	883.184.894.707,-	1.050.112.414.000,-	954.397.012.827,-	90,89	8,06

Sumber : BKD Kota Pekalongan

Keterangan : 2019^{a)} Data Unaudited.

Komponen Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL), dengan penjelasan sebagai berikut :

2.2.2.1 Belanja Tidak Langsung (BTL)

Pada tahun anggaran 2019, Belanja Tidak Langsung (BTL) dianggarkan sebesar Rp402.927.990.000,- (empat ratus dua miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp361.973.853.230,- (tiga ratus enam puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh rupiah) atau sebesar 89,84%. Belanja Tidak Langsung dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi belanja gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH, biaya pemungutan pajak daerah, dan insentif pemungutan retribusi daerah, dan insentif pemungutan retribusi daerah. Realisasi belanja pegawai tahun 2019 adalah sebesar Rp319.284.304.802,- (tiga ratus sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat ribu delapan ratus dua rupiah) atau 90,39% dari pagu anggaran setelah perubahan sebesar Rp353.244.749.000,- (tiga ratus lima puluh tiga miliar dua ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Realisasi belanja pegawai tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp12.813.000.284,- (dua belas miliar delapan ratus tiga belas juta dua ratus delapan puluh empat rupiah) atau sebesar 4,18% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp306.471.304.518,- (tiga ratus enam miliar empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus empat ribu lima ratus delapan belas rupiah). Kenaikan realisasi belanja pegawai dikarenakan adanya kenaikan jumlah PNS Kota Pekalongan dari 3.117 orang pada tahun 2018 menjadi 3.195 orang pada tahun 2019 dan jumlah Anggota DPRD yang semula 30 orang menjadi 35 orang.

2) Belanja Bunga

Belanja Bunga merupakan pembayaran bunga atas pokok utang yang dilakukan oleh RSUD kepada lembaga keuangan. Belanja Bunga terealisasi sebesar Rp6.803.500,- (enam juta delapan ratus tiga ribu lima ratus rupiah).

3) Belanja Hibah

Belanja Hibah merupakan pengeluaran atau belanja yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang dan barang yang ditujukan kepada pemerintah, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan/atau badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ini bersifat bantuan yang peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan, tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus, dan memenuhi persyaratan penerima hibah serta harus digunakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah. Pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan. Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp29.310.400.000,- (dua puluh sembilan miliar tiga ratus sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) atau sebesar 88% dari anggaran sebesar Rp33.307.241.000,- (tiga puluh tiga miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah). Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp6.864.196.000,- (enam miliar delapan ratus enam puluh empat juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 30,58% jika dibandingkan dengan realisasi belanja hibah tahun anggaran 2018 sebesar Rp22.446.204.000,- (dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh enam juta dua ratus empat ribu rupiah).

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019 meliputi belanja bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga serta bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan. Belanja Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga meliputi bantuan sosial akibat resiko sosial bidang pendidikan, bantuan sosial uang duka bagi Anggota Linmas, Bantuan Sosial akibat bencana, bantuan sosial untuk biaya pembongkaran bangunan dan pindah bagi penghuni lahan milik pemerintah, bantuan sosial untuk Pahlawan/Putra Putri Pahlawan, Bantuan Sosial akibat resiko sosial bidang kemiskinan, santunan kematian bagi warga tidak mampu, Beasiswa Keluarga Tidak Mampu (BKTM) SMA/SMK/MA serta Bantuan Sosial penerima RTLH yang bersumber dari DAK. Sedangkan Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan merupakan bantuan sosial bagi penerima RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan yang dilaksanakan oleh LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) atau BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat). Realisasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp11.920.375.000,- (sebelas miliar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 92,38% dari anggaran sebesar 12.904.000.000,- (dua belas miliar sembilan ratus empat juta rupiah). Realisasi belanja hibah tahun anggaran 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp54.556.000,- (lima puluh empat juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau 0,46% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 sebesar Rp11.865.819.000,- (sebelas miliar delapan ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).

5) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan untuk belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik pemenang pemilu. Realisasi bantuan keuangan tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp721.513.000,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus dua belas ribu rupiah) atau 99,93% dari anggaran sebesar Rp722.000.000,- (tujuh ratus dua puluh dua juta rupiah).

6) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Realisasi belanja tidak terduga tahun 2019 sebesar Rp730.438.928,- (tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) atau 25,56% dari anggaran sebesar Rp2.750.000.000,- (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Realisasi belanja tidak terduga ini antara lain untuk :

- Penanganan tanggap darurat bencana banjir sebesar Rp725.938.928,- (tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah).
- Pengembalian (*restitusi*) BPHTB a/n. Any Restiani sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

2.2.2.2 Belanja Langsung

Realisasi belanja langsung pada tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp592.423.177.597,- (lima ratus sembilan puluh dua miliar empat ratus dua puluh tiga juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 91,54% dari anggaran sebesar Rp647.184.424.000,- (enam ratus empat puluh tujuh miliar seratus delapan puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah). Realisasi belanja langsung pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp52.742.307.208,- (lima puluh dua miliar tujuh ratus empat puluh dua juta tiga

ratus tujuh ribu dua ratus delapan rupiah) atau 9,77% jika dibandingkan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2018 sebesar Rp539.680.870.389,- (lima ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah). Belanja Langsung dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Langsung meliputi honorarium PNS dan Non PNS, honorarium pengelolaan dana BOS, dan belanja pegawai BLUD. Realisasi belanja pegawai pada kelompok belanja langsung tahun 2019 adalah sebesar Rp71.614.035.173,- (tujuh puluh satu miliar enam ratus empat belas juta tiga puluh lima ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) atau 93,90% dari anggaran sebesar Rp76.269.434.000,- (tujuh puluh enam miliar dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 terealisasi sebesar Rp338.655.157.845,- (tiga ratus tiga puluh delapan miliar enam ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) atau 91,81% dari anggaran sebesar Rp368.868.065.000,- (tiga ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh delapan juta enam puluh lima ribu rupiah). Belanja Barang dan Jasa termasuk belanja barang dan jasa yang bersumber dari BOS dan BLUD.

3) Belanja Modal

Belanja Modal tahun 2019 terealisasi sebesar Rp182.153.984.579,- (seratus delapan puluh dua miliar seratus lima puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau 90,15% dari anggaran sebesar Rp202.046.925.000,- (dua ratus dua miliar empat puluh enam juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Belanja modal ini termasuk belanja modal yang bersumber dari BOS dan BLUD.

2.2.3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi pada tahun anggaran 2019 dalam aspek belanja daerah adalah sebagai berikut :

1. Adanya kegiatan/pekerjaan yang terlambat memulai pelaksanaan, sehingga penyerapan dana terealisasi sebagian besar di akhir tahun anggaran;
2. Minimnya Sumber Daya Aparatur bidang keuangan baik secara kuantitas maupun kualitas;
3. Masih ada kegiatan yang tidak tercapainya realisasi belanja sesuai dengan yang ditargetkan;
4. Dana alokasi umum tambahan untuk program dana kelurahan dan regulasinya muncul setelah APBD ditetapkan;

Solusi untuk permasalahan-permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Diperintahkan kepada dinas/instansi agar mematuhi jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat di dalam DPA-SKPD;
2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan dan Penambahan jumlah Aparatur yang membidangi keuangan;
3. Monitoring dan pengendalian pelaksanaan APBD perlu tetap dilaksanakan secara intensif, serta diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dan sarana prasarana pendukung lainnya.
4. Menyusun regulasi berupa peraturan kepala daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan dana kelurahan dan pembinaan kepada SDM di kelurahan;

2.3. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Dalam struktur APBD, selain komponen pendapatan dan belanja daerah, terdapat juga pembiayaan daerah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan terdiri atas pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan dan pemberian pinjaman daerah.

2.3.1. Kebijakan Anggaran Pembiayaan

2.3.1.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan pada tahun 2019 diasumsikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kelebihan penerimaan (*over-target*). SiLPA ini juga mengasumsikan adanya efisiensi yang akan terjadi pada pelaksanaan APBD 2019 yaitu perkiraan selisih positif antara pengeluaran riil dengan anggaran yang disediakan. Selain SiLPA, dianggarkan pula komponen penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penerimaan kembali investasi pemerintah daerah.

2.3.1.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Untuk kebijakan pembiayaan pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 adalah pembentukan dana cadangan dan pembiayaan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah. Pembentukan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2020. Sedangkan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal dilakukan bagi perusahaan daerah Kota Pekalongan dan Bank Jateng, serta penyertaan modal dari penerusan hibah APBN Murni kepada PDAM. Penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah dan sesuai dengan kajian analisis keuangan Perusahaan Daerah.

2.3.2. Target dan Realisasi

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Rincian lebih lanjut anggaran dan realisasi pembiayaan daerah dapat disajikan pada tabel 2.13 dibawah ini.

Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018

Uraian	Realisasi 2018 (Rp)	Tahun 2019 ^{*)}			% Pertumbuhan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	78.568.368.646,-	87.928.207.000,-	87.928.207.176,-	100,00	11,91
Pencairan Dana Cadangan	0,-	300.000.000,-	300.000.000,-	100,00	100,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,-	0,-	1.800.000.000,-	100,00	100,00
Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	38.240.343,-	2.000.000.000,-	2.000.181.818,-	100,01	5.130,55
Jumlah	78.606.608.989,-	90.228.207.000,-	92.028.388.994,-	102,00	17,07
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan	4.302.387.924,-	4.350.000.000,-	4.350.000.000,-	100,00	1,11
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.400.000.000,-	8.300.000.000,-	7.742.000.000,-	93,28	-7,83
Pembayaran Pokok Utang	22.691.750,-	7.372.000,-	1.804.741.750,-	24.481,03	7.853,29
Jumlah	12.725.079.674,-	12.657.372.000,-	13.896.741.750,-	109,79	9,21
Pembiayaan Netto	65.881.529.315,-	77.570.835.000,-	78.131.647.244,-	100,72	18,59

Sumber : BKD Kota Pekalongan

Keterangan 2019^{*)} : data unaudited

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Pencairan Dana Cadangan, merupakan pencairan dana cadangan untuk tahapan persiapan Pemilihan Kepala Daerah kepada KPUD Kota Pekalongan.
- Penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah) merupakan pinjaman yang dilakukan oleh BLUD RSUD Benda kepada lembaga keuangan.
- Penerimaan kembali investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp2.000.181.818,- (dua miliar seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) merupakan penarikan dana KKP yang mengendap pada Bank Pekalongan.
- Pembentukan dana cadangan sebesar Rp4.350.000.000,- (empat miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) merupakan pembentukan dana cadangan untuk pendanaan Pilkada tahun 2020.
- Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah terealisasi sebesar Rp7.742.000.000,- (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh dua juta rupiah) atau 93,28% dari anggaran sebesar Rp8.300.000.000,- (delapan miliar tiga ratus juta rupiah). Hal ini dikarenakan hibah dari Pusat

terhadap PDAM hanya sebesar Rp1.692.000.000,- (satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta rupiah).

- f. Pembayaran pokok utang kepada Pihak Ketiga terealisasi sebesar Rp 1.804.741.750,- (satu miliar delapan ratus empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yang merupakan pembayaran pokok utang :
- Pembayaran pokok utang kepada pihak ketiga berupa utang atas pekerjaan yang sudah selesai di tahun 2018 tetapi belum terbayar sebesar Rp4.741.750,- (empat juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - Pembayaran pokok utang BLUD RSUD Bendan kepada lembaga keuangan sebesar Rp1.800.000.000,- (satu miliar delapan ratus juta rupiah).

2.3.3. Sisa Perhitungan Anggaran

Sisa perhitungan anggaran merupakan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) 31 Desember 2019, yang dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 2.14 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018

Uraian		TA. 2019*) Realisasi (Rp)	TA. 2018 Realisasi (Rp)
1	Pendapatan dan Belanja		
	a. Pendapatan	971.624.464.120,61	905.231.572.568,-
	b. Belanja	954.397.012.827,-	883.184.894.707,-
	Surplus (Defisit) Anggaran	17.227.451.293,61	22.046.677.861,-
2	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	92.028.388.994,-	78.606.608.989,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	13.896.741.750,-	12.725.079.674,-
	Pembiayaan Netto	78.131.647.244,-	65.881.529.315,-
3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	95.359.098.537,61	87.928.207.176,-

Sumber : BKD Kota Pekalongan

Keterangan 2019*) : data unaudited

BAB III. HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. CAPAIAN VISI MISI PRIORITAS DAERAH

3.1.1. Capaian Visi dan Misi Daerah Tahun 2019

Capaian misi yang harus diemban oleh pemerintah bersama masyarakat Kota Pekalongan pada Tahun 2019 diukur berdasarkan tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Secara umum capaian tujuan dan sasaran pada Tahun 2019 cukup baik, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Rekapitulasi Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran pada Tahun 2019

Uraian	Indikator Tujuan							Indikator Sasaran						
	Jml	Tercapai		Tidak Tercapai		Data Tidak Tersedia		Jml	Tercapai		Tidak Tercapai		Data Tidak Tersedia	
		Jml	%	Jml	%	Jml	%		Jml	%	Jml	%	Jml	%
Misi I	2	1	50,00	-	-	1	50,00	2	1	50,00	1	50,00	-	-
Misi II	2	-	-	1	50,00	1	50,00	9	5	55,55	3	33,33	1	11,11
Misi III	1	-	-	1	100,00	-	-	2	2	100,00	-	-	-	-
Misi IV	4	2	50,00	2	50,00	-	-	6	5	83,33	1	16,67	-	-
Misi V	1	1	100,00	-	-	-	-	1	1	100,00	-	-	-	-
Misi VI	2	1	50,00	1	50,00	-	-	3	3	100,00	-	-	-	-
Jumlah	12	5	41,67	5	41,67	2	16,67	23	17	73,91	5	21,74	1	4,35

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Adapun capaian tujuan dan sasaran per misi dapat dilihat pada sub bagian berikut.

3.1.1.1. Misi I : Meningkatkan Akses Dan Mutu Pendidikan

Dalam rangka pencapaian misi 1 yang diukur dengan 2 (dua) indikator tujuan dan 2 (dua) indikator sasaran. Pada Tahun 2019 terdapat 1 (Satu) indikator Tujuan tidak tercapai (50,00%), 1 indikator Tujuan yang belum tersedia data (50,00%), 1 (satu) indikator sasaran tercapai (50 %) dan 1 (satu) indikator sasaran tidak tercapai (50%). Data capaian indikator tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pada Misi I

No	Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Target 2019	Realisasi		Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan 2018-2019
			2018	2019		
A.	Harapan Lama Sekolah	13,00	12,79	12,83	Tidak tercapai	▲
	1 Angka partisipasi sekolah	97,00%	99,40	97,13	Tercapai	▼
B.	Persentase Sekolah Menuju Level 4 Standar Nasional Pendidikan	44%	90,60	N/A	Belum tersedia data	Indikator baru
	2 Persentase penyelenggaraan pendidikan berakreditasi A	52,00	43,10	49,16	Tidak Tercapai	▲

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Penjelasan Capaian Indikator Tujuan

1. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah merupakan lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Indikator ini diukur oleh Badan Pusat Statistik secara nasional sebagai bagian dari pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2019 belum mencapai target yang ditetapkan di RPJMD untuk tahun 2019, namun capaiannya meningkat sebanyak 0,04 poin dibandingkan capaian di tahun 2018.

Hal ini menunjukkan sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk Kota Pekalongan yang bersekolah dengan capaian kelas lebih tinggi. Dengan nilai Harapan Lama Sekolah sebesar 12,83 pada Tahun 2019 artinya anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus SMA atau D1. Capaian Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan tersebut lebih tinggi dari capaian Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah yakni 12,68

2. Persentase Sekolah Menuju Level 4 Standar Nasional Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan merupakan acuan utama yang mengatur tentang standar minimal yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sekolah oleh segenap penyelenggara sekolah, yaitu guru dan kepala sekolah. Pada Tahun 2019 ini, targetnya adalah 44 % Sekolah masuk dalam Menuju Standar Nasional Pendidikan Level 4. Pencapaian atas target tersebut sampai dengan Bulan Februari 2020 ini belum dapat diketahui karena belum ada rilis resmi dari Kemendikbud. Rilis resmi dijadwalkan pada Bulan Juli 2020.

Namun demikian berdasarkan rilis atas capaian tahun 2018, jumlah sekolah SD dan SMP yang telah mencapai SNP Menuju Level 4 adalah sejumlah 88 SD dan 24 SMP. Dengan jumlah total sekolah yang meliputi 99 SD dan 26 SMP, maka persentase capaian sekolah yang telah mencapai standar SNP Menuju Level 4 adalah 88,89 % (SD) dan 92,31 (SMP) atau 90,60 (Rata-rata persentase SD dan SMP) pada tahun 2018.

Berdasarkan data capaian tahun 2018 diatas, walaupun data Kemendikbud Tahun 2019 belum rilis, Pemerintah Kota Pekalongan optimis bahwa target sebesar 44 % di Tahun 2019 akan tercapai.

Penjelasan indikator sasaran

1. Angka Partisipasi Sekolah

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Indikator APS untuk mencapai sasaran meningkatnya akses layanan pendidikan di Kota Pekalongan pada tingkat TK, SD, SMP, Paket A, Paket B, RA, MI, MTs. Angka Partisipasi Sekolah diukur dengan jumlah anak sekolah pada jenjang dimaksud di Tahun 2019 (57.650 siswa) dibagi dengan Jumlah penduduk umur 5-15 tahun Tahun 2019 (59.352 orang) dikali X 100.

Secara *series*, Angka Partisipasi Sekolah di jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 ditunjukkan oleh tabel berikut :

Tabel 3.3 Angka Partisipasi Sekolah Kota Pekalongan

Uraian	2017	2018	2019
Angka Partisipasi Sekolah	96,32	99,40	97,13

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2020

2. Persentase Penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A

Penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan akreditasi oleh pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang. untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang kepada Standar Nasional Pendidikan.

Sampai dengan tahun 2019 sejumlah sekolah dari jenjang TK/ RA sampai dengan SMP/ MTs telah terakreditasi, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.4 Akreditasi Sekolah

NO	JENJANG	AKREDITASI				JUMLAH SEKOLAH
		A	B	C	BELUM	
1	TK	8	57	0	19	84
2	SD	67	32	1	2	102
3	SMP	21	6	0	1	28
4	RA	10	16	0	0	26
5	MI	35	11	0	1	47
6	MTs	5	5	0	0	10
	Juml Sekl per Akreditasi	146	127	1	23	297
	Persentase (jml sekl per akreditasi/ jumlah sekolah all*100%	49,16	40,07	0,34	13,13	100

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2020

Berdasarkan data tersebut diatas, target penyelenggaraan Pendidikan Berakreditasi A sebesar 52 % belum tercapai. Hal ini disebabkan kuota dan prioritas dari lembaga akreditasi

Badan Akreditasi Sekolah (BAS) dan Badan Akreditasi Madrasah (BAM) hanya untuk sekolah dan madrasah yang telah kadaluarsa akreditasinya. Pada Tahun 2019 jumlah sekolah/madrasah yang memperoleh akreditasi sebanyak sekolah/madrasah yang kadaluarsa yaitu 21 sekolah/madrasah. Dengan demikian Kota Pekalongan tidak dapat menambah kuota untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD.

3.1.1.2. Misi II : Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat

Pencapaian misi 2 diukur dengan 2 (dua) indikator tujuan dan 9 (Sembilan) indikator sasaran. Pencapaian indikator tujuan pada Tahun 2019 adalah 1 (satu) indikator tidak tercapai (50,00%) dan 1 (satu) indikator belum tersedia datanya (50,00%). Adapun pencapaian indikator sasaran pada Tahun 2019 adalah 5 (lima) indikator yang tercapai (55,55 %), 3 (tiga) indikator yang tidak tercapai (33,33%) dan 1 (satu) indikator yang belum tersedia data (11,11%). Data capaian indikator tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pada Misi II

No	Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Target 2019	Realisasi		Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan 2018-2019
			2018	2019		
A	Angka Kemiskinan	6,28	6,75	6,6	Tidak tercapai	Angka ▼ semakin baik
	1 Usia Harapan Hidup	74,32	74,25	74,28	Tidak tercapai	▲
	2 Tingkat Pengangguran Terbuka	3,70	6,13	5,77	Tidak tercapai	Angka ▼ semakin baik
	3 Persentase Penurunan PMKS	8,78	10,40	12,83	tercapai	▲
B	Indeks Reformasi Birokrasi	70	66,44	N/A	Belum tersedia data	n/a
	4 Kategori Evaluasi AKIP	B	BB	BB	tercapai	●
	5 Tingkat kematangan implementasi SPIP	2,75	3,02	3,02	tercapai	▲
	6 Opini BPK atas LKD	WTP	WTP	N/A	Belum tersedia data	n/a
	7 Indeks Profesionalitas ASN	84,00	82,26	60,54	Tidak tercapai	▼
	8 Persentase PD dengan IKM baik	93,55	43,94	93,94	Tercapai	▲
	9 Persentase OPD dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik kategori baik (informatif)	50,00	74,19	67,74	Tercapai	▼

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Penjelasan Capaian Indikator Tujuan

1. Angka Kemiskinan

Capaian angka kemiskinan tidak memenuhi target RPJMD, namun demikian Angka Kemiskinan atau Persentase Penduduk Miskin di Kota Pekalongan menunjukkan penurunan angka dari sebesar 6,75% (Tahun 2018) menjadi 6,6 % (Tahun 2019). Angka Kemiskinan Kota

Pekalongan paling kecil diantara Kabupaten/Kota se eks Karesidenan Pekalongan. Selain itu, angka kemiskinan Kota Pekalongan juga tergolong cukup baik diantara 6 Kota lainnya di Jawa Tengah, yaitu lebih baik dari Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Tegal, dan Provinsi Jawa Tengah, namun masih kalah dengan Kota Semarang dan Kota Salatiga.

Tabel 3.6 Perbandingan Angka Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Sekitar Tahun 2018 s.d. 2019

Wilayah Jateng	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)		Persentase Penduduk Miskin (persen)	
	2018	2019	2018	2019
Kota Pekalongan	20.5	20.2	6.75	6.6
Kota Tegal	19.4	18.6	7.81	7.47
Kabupaten Batang	66.1	64.1	8.69	8.35
Kabupaten Pekalongan	89.5	87	10.06	9.71
Kabupaten Pemasang	208.3	200.7	16.04	15.41
Kabupaten Tegal	114.1	109.9	7.94	7.64
Kabupaten Brebes	309.2	293.2	17.17	16.22

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

Dan berikut adalah perbandingan angka kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah setara di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.7 Perbandingan Angka Kemiskinan Kota Pekalongan dengan Daerah Setara Tahun 2018 s.d. 2019

Wilayah Jateng	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)		Persentase Penduduk Miskin (persen)	
	2018	2019	2018	2019
Kota Semarang	73.6	72	4.14	3.98
Kota Salatiga	9.2	9.2	4.84	4.76
Kota Pekalongan	20.5	20.2	6.75	6.6
Kota Magelang	9.6	9.1	7.87	7.46
Kota Tegal	19.4	18.6	7.81	7.47
Kota Surakarta	47	45.2	9.08	8.7
PROVINSI JAWA TENGAH	3897.2	3743.23	11.32	10.8

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

2. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan tata cara dan mekanisme penilaian pada 8 (delapan) area perubahan yang terdiri dari: (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; (3) Penataan dan Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tata Laksana; (5) Penataan Sistem Manajemen SDM; (6) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (7) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; (8) Penguatan Pengawasan. Indeks Reformasi Birokrasi ini dinilai oleh Kemenpan RB RI, dan sampai saat ini belum ada rilis resmi dari Kemenpan RB.

Penjelasan Capaian Indikator Sasaran

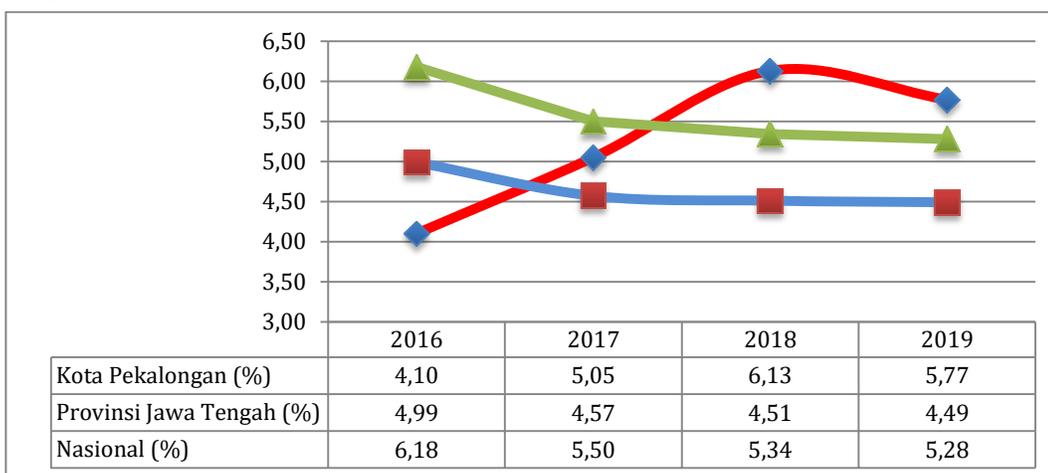
1. Usia Harapan Hidup

Indikator usia harapan hidup (UHH) merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Indikator tersebut dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada setiap tahun sebagai bagian dari Komponen Indeks Pembangunan Manusia. Angka Usia

Harapan Hidup sedikit lebih rendah dari target RPJMD tahun 2019 sebesar 74,32. UHH Kota Pekalongan tahun 2019 sebesar 74,28 mengalami peningkatan sebesar 0,03 dibandingkan capaian di Tahun 2018.

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Pekalongan mengalami penurunan sebesar 0,36% dari angka 6,13% di tahun 2018 menjadi 5,77% di tahun 2019. Hal ini menunjukkan upaya pengurangan pengangguran terbuka telah menunjukan arah yang positif. Namun demikian, mengingat angka tersebut masih belum mencapai target di Tahun 2019 yakni sebesar 3,70% dan nilai tersebut masih cukup tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, maka masih perlu usaha yang lebih maksimal untuk mengatasi pengangguran di Kota Pekalongan.



Gambar 3.1 Perbandingan Angka Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

3. Persentase Penurunan PMKS

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan istilah yang dipakai untuk orang-orang yang memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan material, spiritual dan sosial untuk hidup layak. Persentase penurunan PMKS Tahun 2019 adalah negatif (-) dari jumlah PMKS tahun 2019 (5.376) dikurangi jumlah PMKS tahun 2018 (6.167) dibagi jumlah PMKS Tahun 2018 (6.167) atau terjadi penurunan sebesar 12,83 %.

Persentase Penurunan PMKS pada tahun 2019 ini yang lebih banyak dibandingkan persentase di Tahun 2018 menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan memberikan kontribusi yang positif terhadap pencapaian target tersebut.

4. Kategori Evaluasi AKIP

Berdasarkan surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/680/AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019, Kota Pekalongan memperoleh nilai 72,59 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya,

kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil yang sangat baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8 Hasil Penilaian SAKIP Kota Pekalongan

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2018	2019
1	Perencanaan Kinerja	30	24,42	24,53
2	Pengukuran Kinerja	25	17,07	17,54
3	Pelaporan Kinerja	15	10,46	11,09
4	Evaluasi Internal	10	7,24	7,29
5	Capaian kinerja	20	11,69	12,14
	Hasil Evaluasi	100	70,88	72,59
	Predikat		BB	BB

Sumber : Kemenpan-RB, 2020

5. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP

Pencapaian target indikator kinerja Tingkat Maturitas implementasi SPIP pada Level 3 dengan skor 3,022, atau pada tingkat maturitas “terdefinisi”, menunjukkan Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan praktik pengendalian *intern* dan terdokumentasi dengan baik serta semakin efektifnya pelaksanaan rancangan pengendalian *intern* yang ada di masing-masing SKPD dan rancangan pengendalian *intern* di Pemerintah Kota Pekalongan.

Capaian target sasaran strategis Tingkat Maturitas implementasi SPIP Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2019 tercapai sebesar 110% atau kategori Sangat Baik, diukur dari capaian Indikator Kinerja Utama “Level Maturitas SPIP” yaitu dengan membandingkan target yang ingin dicapai yaitu Level 3 Dengan Catatan (DC) dengan *score* 2,5 dan berdasarkan hasil *Quality Assurance* (QA) BPKP yang menjamin hasil Penilaian Mandiri (*Self Assessment*) oleh APIP Inspektorat Kota Pekalongan dengan nilai 3,02 atau pada level Maturitas SPIP Level 3 Penuh.

Keberhasilan pencapaian target tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mendukung sebagai berikut :

- Pembinaan kepada OPD juga dengan menyusun regulasi/pedoman/SOP penyelenggaraan SPIP di tingkat kota maupun OPD, antara lain Pedoman Pemantauan Perkembangan/Maturitas SPIP, Pedoman Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP Tk. OPD, Pedoman Penyusunan RTP dan Penilaian Risiko.
- Pembinaan dalam bentuk sosialisasi maupun bimbingan teknis yang berkaitan dengan SPIP pada tahun 2019, pelaksanaan bimbingan teknis kepada Satuan Tugas SPIP pada setiap Perangkat Daerah dengan bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
- Monitoring implementasi SPIP pada OPD melalui Pemeriksaan Reguler (Komprehensif) yang dilakukan oleh APIP Inspektorat Kota Pekalongan kepada PD.
- Upaya Pemerintah Kota Pekalongan dengan menyediakan anggaran khusus untuk pembangunan SPIP dan melalui Inspektorat dalam melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah kepada OPD di lingkungan Pemerintah

6. Opini BPK Atas LKD

Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Seluruh rangkaian proses pengelolaan (sosialisasi, rekonsiliasi, asistensi dan lain-lain) keuangan dan *asset* daerah yang dilaksanakan sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Proses ini disajikan dalam Laporan Keuangan Daerah yang disusun sampai dengan 31 Maret 2020 oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, yang dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI dan akhirnya hasil penilaian kinerja tersebut dirilis Kementerian Keuangan pada Bulan Juli 2020.

Merujuk pada serangkaian proses tersebut, Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah pada Tahun 2019 belum dapat tersedia data (N/A) sampai dengan rilis Kementerian Keuangan RI terbit.

Namun demikian, Pemerintah Kota Pekalongan cukup optimis dapat memperoleh predikat WTP dalam Opini BPK tentang LKD di tahun 2019 ini. Hal ini didasarkan seluruh usaha dan proses perencanaan-penganggaran yang telah dilakukan Pemerintah Kota Pekalongan secara maksimal dan akuntabel melalui :

- a. komitmen dari semua elemen dari Kepala Daerah hingga staf penyusun LK OPD.
- b. *reward and punishment* yang tegas.
- c. rekonsiliasi pengelolaan keuangan dan *asset* daerah yang dilaksanakan tiap 3 (tiga) bulan sekali.
- d. Sosialisasi pengelolaan keuangan dan *asset* daerah kepada pejabat penatausahaan keuangan daerah.
- e. asistensi penyusunan RKA APBD yang melibatkan unsur perencanaan dalam rangka sinkronisasi perencanaan anggaran.
- f. Penyusunan LKD tepat waktu
- g. Kualitas laporan sesuai standart
- h. SIMKEU dan SIMBADA tidak ada kendala dan memadai
- i. SDM yang kompeten
- j. Data Laporan Neraca Aset Tetap OPD dikirim tepat waktu

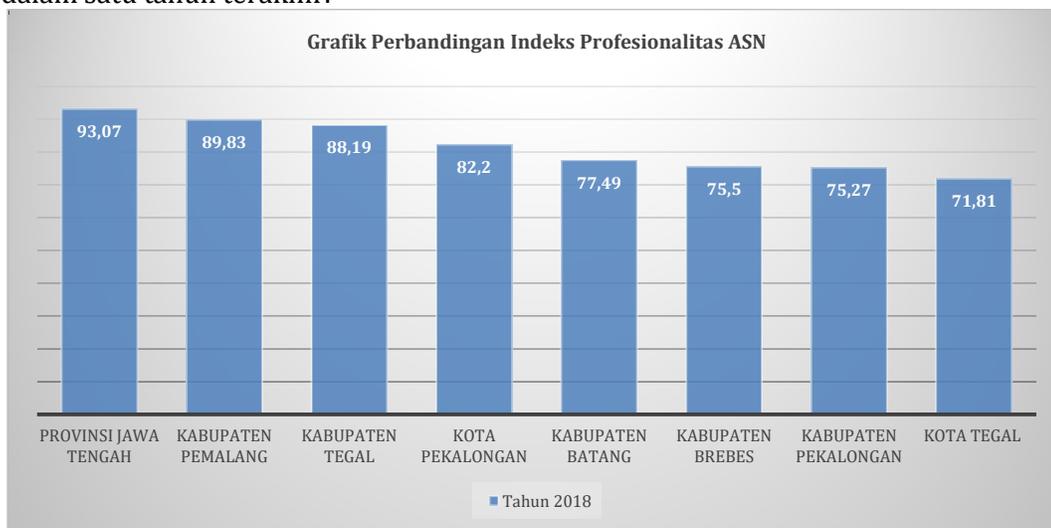
7. Indeks Profesionalitas ASN

Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, yang dimaksud dengan Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN tahun 2018 sebesar 82.26, dan pada tahun 2019 turun signifikan menjadi 60.54. Hal ini disebabkan karena :

- a. Penggunaan parameter penilaian yang berubah. Pada saat pentargetan RPJMD menggunakan parameter pejabat struktural, namun pengukuran pada tahun 2019, Kemenpan RB RI melakukan penilaian untuk seluruh ASN;

- b. Kualifikasi Pendidikan mempengaruhi hasil nilai Indeks Profesionalitas ASN, karena di Pemerintah Kota Pekalongan masih ada yang berpendidikan rendah (SD, SMP);
- c. Penghitungan Indeks Profesionalitas ASN, menggunakan indikator diklat yang diikuti ASN dalam satu tahun terakhir.



Gambar 3.2 Perbandingan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2018

Sumber : BKPPD Kota Pekalongan, 2020

Dilihat dari Gambar diatas, bahwa Indeks Profesionalitas ASN Kota Pekalongan masih di bawah Provinsi Jawa Tengah, akan tetapi apabila dibandingkan dengan daerah se Eks Karesidenan Pekalongan Indeks Profesionalitas ASN Kota Pekalongan ada pada urutan ke - 3 dari 7 Kabupaten/ Kota.

Di tahun-tahun mendatang, upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan Indeks Profesionalitas ASN di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- Mengikuti sertakan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengikuti diklat.
- Memberikan kesempatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan untuk melanjutkan Pendidikan ke jenjang S-1.

8. Persentase PD Dengan IKM Baik

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, maka dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Penilaian kualitas pelayanan publik dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal satu tahun sekali. Adapun unsur yang dinilai meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana dan penanganan pengaduan.

Pada tahun 2019, dilakukan survei kepuasan masyarakat secara mandiri pada 66 (enam puluh enam) OPD/ Unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Hasil pengukuran terdapat 7 (tujuh) OPD/ Unit Kerja dengan kategori "Sangat Baik", 55 (lima puluh

lima) OPD/ Unit Kerja dengan kategori "Baik" dan 6 (enam) OPD/ Unit Kerja dengan kategori "Kurang Baik", dengan rata-rata nilai IKM Kota Pekalongan sebesar 82,21.

Dari data hasil survei kepuasan masyarakat diatas, dapat disimpulkan bahwa dari 66 (enam puluh enam) OPD/ Unit Kerja yang disurvei , sebanyak 62 (enam puluh dua) OPD/ Unit Kerja mendapatkan kategori minimal "Baik", sehingga persentase Perangkat Daerah/ Unit Kerja dengan minimal kategori baik adalah sebesar 93.94%.

9. Persentase OPD Dengan Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kategori Baik (informatif)

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas.

Sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinkominfo telah memberikan layanan akses keterbukaan informasi publik pada OPD secara bertahap. Seluruh OPD telah melakukan publikasi dokumen-dokumen yang berisi informasi publik melalui web ppid.pekalongankota.go.id. Harapannya seluruh OPD nantinya akan memperoleh predikat minimal "baik/informatif" atas layanan keterbukaan informasi public di Tahun 2021.

- Pada tahun 2018, dari 31 OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, sebanyak 8 OPD (25,81 %) telah memperoleh predikat "sangat baik" dan 15 OPD (38,39 %) memperoleh predikat baik, sehingga capaiannya Nilai KIP minimal baik adalah sejumlah 74,19 %.
- Pada tahun 2019, dari 31 OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, sebanyak 9 (29,03%) OPD telah memperoleh predikat "sangat baik" dan 12 (38,71%) memperoleh predikat baik, sehingga capaiannya Nilai KIP minimal baik adalah sejumlah 67,74 %.

Tabel 3.9 Capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018-2019

Kategori KIP	Tahun 2018		Tahun 2019	
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Sangat Baik	8	25,81%	9	29,03%
Baik	15	48,39%	12	38,71%
Cukup Baik	7	22,58%	7	22,58%
Kurang Baik	1	3,23%	3	9,68%

Sumber : Dinkominfo Kota Pekalongan, 2020

3.1.1.3. Misi III : Memberdayakan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal berdasarkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan

Pencapaian misi 3 diukur dengan 1 (satu) indikator tujuan dan 2 (Dua) indikator sasaran. Pada Tahun 2019, target Indikator Tujuan tidak tercapai namun demikian target 2 (dua) indikator sasaran tercapai 100%. Data capaian indikator tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pada Misi III

No	Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Target 2019	Realisasi		Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan 2018-2019
			2018	2019		
A	Pertumbuhan Ekonomi	5,75	5,69	5,5	Tidak tercapai	▼
1	Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	4,70	4,46	4,84	tercapai	▲
2	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	5,40	5,82	5,72	tercapai	▼

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

Penjelasan Capaian Indikator Tujuan

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tahun 2019 cenderung melambat dibanding Tahun 2018, yakni sebesar 5.5%. Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan masih cukup baik, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional tetapi di bawah Provinsi Jawa Tengah. Secara umum, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 memang mengalami perlambatan karena kondisi ekonomi makro yang kurang positif perkembangannya.

Tabel 3.11 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

Wilayah PDRB	Perbandingan Laju PDRB/PDB Kota Pekalongan Jawa Tengah, Indonesia	
	2018	2019
Kota Pekalongan	5.69	5.5
Jawa Tengah	5.31	5.41
Indonesia	5.17	5.02

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

Tabel 3.12 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kota Pekalongan Menurut Lapangan Usaha (persen), Tahun 2018–2019

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	
	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.03	4.63
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-
C. Industri Pengolahan	4.46	4.84

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	
	2018	2019
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5.29	3.72
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5.16	4.21
F. Konstruksi	5.59	4.71
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.53	5.47
H. Transportasi dan Pergudangan	7.07	7.53
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.88	6.76
J. Informasi dan Komunikasi	10.43	10.57
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	5.12	3.76
L. Real Estate	5.97	5.62
M, N. Jasa Perusahaan	7.95	8.31
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.99	3.82
P. Jasa Pendidikan	7.59	2.63
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.93	7.84
R, S, T U. Jasa Lainnya	9.02	8.47
PDRB	5.69	5.5

Sumber : BPS Kota Pekalongan, 2020

Target pertumbuhan sektor unggulan, yaitu industri pengolahan, perdagangan dan jasa tumbuh sesuai dengan target dalam RPJMD, namun terjadi perlambatan pada jasa pendidikan, dimana pada tahun 2018 sektor ini tumbuh 7,59%, dan pada tahun 2019 melambat meskipun tetap tumbuh pada angka 2,63%. Kondisi ini dipengaruhi oleh berpindahnya sebagian aktivitas perguruan tinggi ke Kabupaten Pekalongan, yaitu IAIN dan POLBAT PUSMANU.

Penjelasan Capaian Indikator Sasaran

1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan

Salah satu penyumbang PDRB Kota Pekalongan adalah sektor industri pengolahan. Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Berdasarkan rilis BPS (28 Februari, 2020), Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan Tahun 2019 tumbuh sebesar 4,84 % (naik dari laju di tahun 2018 sebesar 4,46 %). Capaian tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan RPJMD untuk pertumbuhan PDRB Sektor industri Pengolahan Tahun 2019.

2. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa

Pertumbuhan Sektor perdagangan dan jasa terdiri dari pertumbuhan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ditambah pertumbuhan sektor Jasa Lainnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan Tahun 2018 dan 2019, dapat diketahui data PDRB dan pertumbuhan kedua sektor tersebut sebagai berikut :

**Tabel 3.13 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Sektor Perdagangan dan Jasa Kota Pekalongan
Tahun 2018 dan 2019**

Kategori	Nilai PDRB 2017 (Juta rupiah)	Nilai PDRB 2018 (Juta Rupiah)	Nilai PDRB 2019 (Juta Rupiah)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2018 (%)	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2019 (%)
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.407.425,41	1.487.771,72	1.570.073,03	5.53	5.47
RSTU. Jasa Lainnya	123.313,75	133.293,88	145.310,96	9.02	8.47
Jumlah Perdagangan dan Jasa	1.530.738,75	1.621.065,60	1.715.383,99	5.82	5.72

Sumber data : Badan Pusat Statistik (diolah), 2020

3.1.1.4. Misi IV : Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan yang ramah lingkungan

Pencapaian misi 4 diukur dengan 4 (empat) indikator tujuan dan 6 (enam) indikator sasaran, dengan realisasi pada Tahun 2019 adalah 2 (dua) indikator tujuan tercapai (50,00%) dan 2 (dua) indikator tujuan tidak tercapai (50,00%). Adapun capaian indikator sasaran pada Tahun 2019 terdapat 5 (lima) indikator sasaran yang tercapai (83,33%) dan 1 (satu) indikator sasaran yang tidak tercapai (16,67%). Data capaian indikator tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pada Misi IV

No	Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Target 2019	Realisasi		Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan 2018-2019
			2018	2019		
A	Persentase Penurunan Luas Genangan	34,40		24.01	Tidak tercapai	Indikator baru
1	Persentase luas wilayah genangan banjir dan rob	18,54	29.56	23,36	Tidak tercapai	▲
B	Persentase Lingkungan Permukiman yang berkualitas	98,97		99.31	tercapai	Indikator baru
2	Cakupan layanan sarpras permukiman perkotaan	87,88	86,75	88.17	tercapai	▲
3	Persentase kawasan permukiman kumuh	1,03	1.9	0.69	tercapai	Angka ▼ semakin baik
C	Persentase Terhubungnya Pusat-Pusat Kegiatan	97,49	95.89	96.64	Tidak tercapai	
4	Rasio kapasitas jalan (VC Ratio)	0,84	0.39	0,45	tercapai	▲
D	Persentase Pemenuhan Ruang Publik yang Ramah Lingkungan	63,64		63.64	tercapai	Indikator Baru

No	Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Target 2019	Realisasi		Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan 2018-2019
			2018	2019		
5	Persentase pemenuhan sarana prasarana pada ruang publik kreatif (taman bahagia)	71,40	62.86	71,43	tercapai	▲
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,67	52.85	52,92	tercapai	▲

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Penjelasan Capaian Indikator Tujuan

1. Persentase Penurunan Luas Genangan

Usaha penanganan rob dengan berbagai program pusat, provinsi dan daerah telah berhasil mengurangi genangan seluas 0,334 hektar, dari semula 1,391 hektar menjadi 1,057 hektar (23,36% dari luas wilayah Kota Pekalongan) sehingga terwujud penurunan luas genangan sebesar 24,01 %. Namun demikian, usaha tersebut belum dapat memenuhi target yang ditetapkan RPJMD pada Tahun 2019, yaitu luas genangan seluas 18,54%. Hal ini dikarenakan belum selesainya secara tuntas pembangunan tanggul rob baik di Sungai Bremsi dan Meduri serta sungai Kupang/Loji yang baru mulai dilakukan sepanjang ± 250 meter pada tahun 2019

2. Persentase Lingkungan Permukiman yang berkualitas

Indikator ini menunjukkan lingkungan permukiman yang berkualitas dalam artian bukan merupakan permukiman kumuh diluar Luasan kawasan kumuh berdasarkan SK Walikota Pekalongan Nomor 601/ 213 Tahun 2018. Persentase Lingkungan Permukiman merupakan pengurangan dari seluruh permukiman dengan luasan permukiman kumuh. Berdasarkan data penanganan permukiman kumuh atas SK Walikota tersebut, persentase permukiman kumuh yang tersisa dari target penanganannya adalah 0,69 %, sehingga persentase lingkungan permukiman yang berkualitas adalah 99,31.

3. Persentase Terhubungnya Pusat-Pusat Kegiatan

Indikator ini menjelaskan keterhubungan pusat-pusat kegiatan di Kota Pekalongan didasarkan pada Data Teknis Jalan yang sudah diverifikasi tanggal 3 Mei 2018 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dimana tingkat keterhubungan per tahun 2017 adalah 95,25 %.

Berdasarkan target yang ditetapkan pada akhir tahun 2017, akan dilaksanakan pembangunan jalan sepanjang 7.653 km pada lokasi sebagaimana dijelaskan dalam Tabel berikut.

Tabel 3.15 Target Pembangunan Jalan

Ruas Jalan yang direncanakan	Target Panjang Jalan
Jalan tembus Bandengan-pj.Baru	2.588 km
Jalan tembus dr.Sutomo- Adi Sucipto (akses tol)	3.36 km

Ruas Jalan yang direncanakan	Target Panjang Jalan
jalan tembus samudera - Bandengan	0.83 km
Jalan tembus Yudistira - Bandengan	0.875 km

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2020

Namun berdasarkan pelaksanaan pembangunan jalan yang dilaksanakan di Tahun 2018 dan 2019, maka persentase keterhubungan pusat-pusat kegiatan baru meningkat sebesar 95,89 % di Tahun 2018 dan sebesar 96.64 % di Tahun 2019 (data dalam tabel 3.16). Berdasarkan capaian tersebut, maka target persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan sebesar 97,49 % di tahun 2019, belum dapat tercapai.

Tabel 3.16 Capaian Pembangunan Jalan

Tahun	Lokasi Pembangunan Jalan	Panjang Jalan Yang Dibangun	Persentase Terhubungnya Pusat-Pusat Kegiatan
2018	Jalan tembus dr.Sutomo- Adi Sucipto (akses tol) (DAK dan Bankeu)	1.335 km	95,89 %
2019	Jalan tembus dr.Sutomo- Adi Sucipto (akses tol) (DAK)	1.15 km	96.64 %

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2020

Persentase Terhubungnya Pusat-Pusat Kegiatan belum memenuhi target RPJMD karena beberapa jalan sesuai SK Walikota belum bisa dibangun karena pada perencanaan awal (tahun 2017), perencanaan ruas jalan (jalan tembus Samudera-Bandengan dan Yudistira-Bandengan) dilakukan untuk mendukung pembangunan Jalan Lingkar Utara. Namun karena pelaksanaan pembangunan Jalan Lingkar Utara terhambat sehingga pembangunan jalan tersebut ditangguhkan untuk sementara waktu.

4. Persentase Pemenuhan Ruang Publik yang Ramah Lingkungan

Definisi Ruang Publik yang ramah lingkungan dalam indikator ini adalah ruang publik yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan ekologis namun juga memenuhi kebutuhan kenyamanan pengunjung taman tersebut. Hal ini diterjemahkan dengan terpenuhinya ruang publik yang ramah *diffabel* dan ramah anak, mempertimbangkan kebutuhan *gender* dan lansia serta tersedianya *Wifi/CCTV*. Pada Tahun 2019, ditargetkan 63,64 % ruang publik yang dapat memenuhi kriteria tersebut.

Berdasarkan pelaksanaan pekerjaan terkait pemenuhan ruang publik, Kota Pekalongan telah berhasil memenuhi target 63,64 % ruang publik yang ramah lingkungan atau memenuhi target 7 dari 11 ruang publik ramah lingkungan telah terpenuhi.

Tabel 3.17 Pemenuhan Ruang Publik Ramah Lingkungan

Tahun	Ruang Publik yang dipenuhi kriteria ramah lingkungan
2016	Taman Wilis
2017	Kawasan Pecinan dan Kawasan Kampung Arab
2018	Taman Monumen dan Taman Mataram
2019	Taman Tugu Batas Kota dan Taman Tirto

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2020

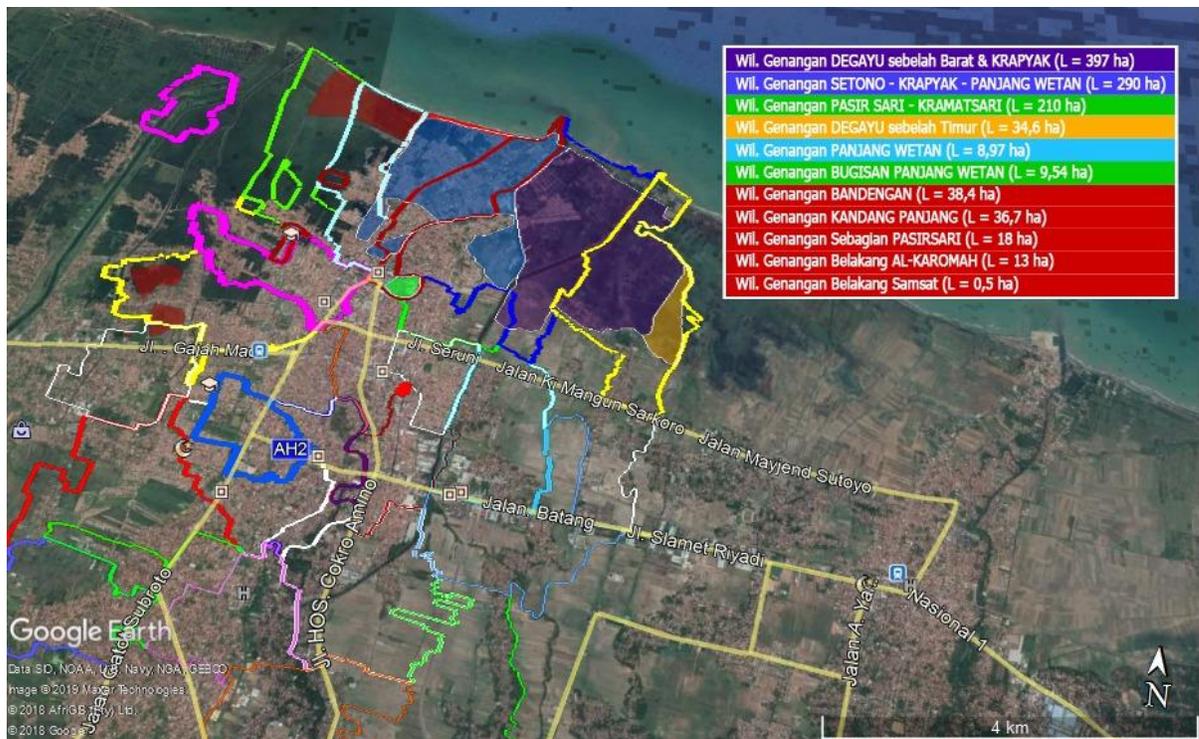
Penjelasan capaian indikator sasaran

1. Persentase Luas Wilayah Genangan Banjir dan Rob

Indikator Persentase luas Kawasan terdampak rob dan banjir adalah indikator yang menggambarkan usaha yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengurangi kawasan yang terdampak banjir dan rob. Indikator ini dihitung berdasarkan data sebagai berikut :

- Luas wilayah Kota Pekalongan adalah 4.525 hektar.
- Kondisi awal luas genangan rob 1.920 hektar.
- Pada tahun 2019 luas genangan yang tersisa adalah 1.057 hektar
- Realisasi capaian kinerjanya adalah $(1.057/4.525)*100\% = 23.36\%$

Adapun wilayah yang masih terdampak genangan banjir dan rob dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar 3.3 Peta Genangan di Kota Pekalongan Tahun 2019

Sumber : DPUPR Kota Pekalongan, 2020

2. Cakupan Layanan Sarpras Permukiman Perkotaan

Cakupan Sarpras Permukiman Perkotaan adalah rata-rata dari Cakupan Layanan Persampahan, Rasio Akses Air Minum terhadap Jumlah Penduduk, Cakupan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Cakupan Jalan dan Jembatan Permukiman. Berikut ini adalah capaian sarana prasarana permukiman perkotaan di Kota Pekalongan Tahun 2018 dan 2019.

Tabel 3.18 Persandingan Cakupan Sarana Prasarana Permukiman Perkotaan Tahun 2018 dan 2019.

No	Cakupan Sarpras Permukiman Perkotaan	2018	2019
1	Cakupan Layanan Sampah	86,27	86,30
2	Cakupan Akses Air Minum terhadap Jmlh Penduduk	88,5	88,24
3	Cakupan Layanan pengelolaan Limbah Domestik	97,82	99,32
4	Cakupan Jalan dan Jembatan Permukiman dalam kondisi baik	74,40	78,85
	Cakupan layanan Sarpras Permukiman Perkotaan	86.75	88.17

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2020

3. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh

Luasan kawasan kumuh berdasarkan SK Walikota Pekalongan Nomor 601/ 213 Tahun 2018 adalah sebesar 155,82. Pada tahun 2018, luas kawasan kumuh yang tertangani sebesar 68,33 hektar sehingga sisa luasan kawasan kumuh pada akhir tahun 2018 adalah sebesar 87,49 hektar (sumber : LKPJ Tahun 2018). Adapun penanganan kawasan kumuh pada Tahun 2019 adalah seluas 56,36 hektar, dengan rincian sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel berikut.

Tabel 3.19 Penanganan Kumuh di Kota Pekalongan Tahun 2018 s.d 2019

Kelurahan	Sisa Kumuh 2018 (Ha). .Sk Nomor 601/ 213 tahun 2018	Capaian Pengurangan Kumuh Sampai Dengan 2018 (Ha)	Kondisi Akhir Kumuh Sampai Dengan 2018 (Ha)	Capaian Pengurangan Kumuh Sampai Dengan 2019 (Ha)	Kondisi Akhir Kumuh Sampai Dengan 2019 (Ha)
Tirto	20.19	1.00	2.22	0.71	1.51
Pasirkratonkramat	20.36	13.09	5.99	0.00	5.99
Jenggot	22.03	0.51	0.29	0.00	0.29
Banyurip	33.47	5.67	0.56	0.00	0.56
Klego	11.04	1.89	0.00	0.00	0.00
Poncol	19.08	5.13	1.87	1.87	0.00
Bandengan	3.22	3.12	17.07	12.86	4.21
Degayu	7.00	0.17	0.00	0.00	0.00
Kandang Panjang	1.89	7.01	13.35	12.44	0.91
Panjang Wetan	10.34	8.19	2.85	0.96	1.89
Panjang Baru	6.23	7.65	25.82	12.50	13.32
Padukuhan Kraton	0.80	6.00	16.03	14.28	1.75
Krapyak	0.17	8.90	1.44	0.74	0.70
Grand Total	155.82	68.33	87.49	56.36	31.13

Sumber : Dinperkim Kota Pekalongan, 2020

Secara ringkas, perhitungan persentase capaian kinerja indikator ini adalah sebagai berikut :

- Luasan kawasan kumuh adalah 155,82 hektar
- Persentase luasan kawasan kumuh = $(155,82 - 68,33 - 56,36) / 4525 * 100\% = 0,69\%$

4. Rasio Kapasitas Jalan (VC Ratio)

VC Ratio adalah jumlah kendaraan pada satu segmen jalan dalam satu waktu dibandingkan dengan kapasitas jalan raya tersebut, nilai *v/c ratio* ditentukan dalam desimal misal 0,8 atau 1,2 jika nilai *v/c ratio* kurang dari 1 berarti jalan tersebut lalu lintasnya lancar , jika sama dengan 1 berarti lalu lintas pada jalan tersebut sesuai dengan kapasitasnya ,dan jika lebih dari 1 berarti lalu lintasnya padat atau macet. Secara umum dikatakan adalah rasio atau perbandingan antara volume dengan kapasitas suatu jalan raya, semakin kecil VC Ratio maka semakin bagus tingkat pelayanan jalan.

Tabel 3.20 Data Hasil Survei VC Ratio Jalan Nasional Kota Pekalongan Tahun 2019

No	Nama Jalan	Panjang (M)	Kapasitas	Volume	V/C	Tingkat Pelayanan
1	Jl. Dr. Setia Budi	176	3784	3216	0,85	C
2	Jl. Dr. Sutomo	2446	5702	1978	0,35	B
3	Jl. Gajah Mada	2485	5246	2250	0,43	B
4	Jl. Jendral Sudirman	1522	4128	2270	0,55	B
5	Jl. KH. Mas. Mansyur	1080	4309	2028	0,47	B
6	Jl. Merdeka	500	3653	2105	0,58	B
7	Jl. Pemuda	210	3430	2108	0,61	C
8	Jl. Slamet	997	2323	629	0,27	B
9	Jl. Sriwijaya	719	3183	748	0,23	B
10	Jl. Wilis	593	4234	727	0,17	A
V/C Ratio rata-rata		0,45				

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, 2020

Nilai *v/c ratio* ditentukan dalam desimal, nilai *v/c ratio* kurang dari 1 berarti jalan tersebut lalu lintasnya lancar , jika sama dengan 1 berarti lalu lintas pada jalan tersebut sesuai dengan kapasitasnya ,dan jika lebih dari 1 berarti lalu lintasnya padat atau macet.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Memaksimalkan Fungsi ATCS (*Area Traffic Control System*).
- Beroperasinya ruas tol Pemalang – Pekalongan – Batang - Semarang.

5. Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Pada Ruang Publik Kreatif (Taman Bahagia)

Jumlah Komponen Sarana Prasarana yang dipenuhi pada 6 lokasi pada sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 35 komponen. Pada tahun 2016 telah dibangun 5 komponen, tahun 2017 sebanyak 10 komponen, tahun 2018 sebanyak 7 komponen dan tahun 2019 sebanyak 3 komponen. Komponen Sarana Prasarana yang telah dipenuhi pada tahun 2019 adalah :

- Pembangunan Sarana Prasarana *Diffable* di taman Jetayu.
- Pembangunan Sarana Prasarana WC di taman Jetayu.
- Pembangunan Sarana Prasarana WC di taman Alun-alun.

Sehingga total komponen sarana dan prasarana ruang publik kreatif yang telah dibangun sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 25 komponen. Faktor pendukung pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kawasan strategis perkotaan yang terbangun (taman bahagia) sebagai berikut :

- Penataan kawasan strategis yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Pekalongan.
- Adanya koordinasi antara SKPD terkait dalam penataan strategis taman bahagia.
- Selain itu juga didukung program, kegiatan serta anggaran

6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas lingkungan Hidup (IKLH) adalah suatu kebijakan yang diambil untuk mengetahui kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah. IKLH adalah salah satu cara untuk mereduksi banyaknya data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup, hal ini sebagai tindaklanjut dalam upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Metode perhitungan IKLH yang digunakan adalah sebagaimana yang dijelaskan pada Buku Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menggunakan formula sebagai berikut : $IKLH = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITH \times 40\%)$

IPA = indeks pencemaran air

IPU = indeks pencemaran udara

ITH = indeks tutupan hutan

Adapun capaian IKLH Kota Pekalongan dari Tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21 Capaian IKLH Kota Pekalongan Tahun 2017-2019

Tahun	Indeks Pencemaran Air	Indeks Pencemaran Udara	Indeks Tutupan Lahan	IKLH
2017	44.67	99.29	23.5	52,59
2018	46.00	98.82	23.5	52.85
2019	46.00	99.05	23,5	52.92

Sumber : DLH Kota Pekalongan, 2020

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat peningkatan nilai IKLH setiap tahunnya, sehingga dapat dilihat bahwa kondisi kualitas udara dan kualitas air sudah mulai ada penurunan beban pencemaran karena adanya upaya penanganan dan penanggulangan.

Faktor pendukung keberhasilan, sebagai berikut :

- Sosialisasi regulasi perizinan lingkungan kepada pengusaha yang berdampak positif terhadap peningkatan kesadaran pengusaha untuk patuh terhadap hukum lingkungan.
- Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap industri-industri yang berpotensi menghasilkan limbah sehingga dengan masukan dan saran dari Dinas Lingkungan Hidup sebagian pengusaha membangun IPAL (sarana pengolahan limbah).
- Pengoperasian IPAL Komunal di Kelurahan Buaran Kradenan sehingga beban pencemaran limbah di daerah aliran sungai menjadi menurun.
- Pembinaan terhadap perusahaan yang dalam proses produksinya masih menghasilkan asap untuk memasang cerobong asap sesuai ukuran standar dan dilengkapi alat penurun pencemar pada asap.

- e. Penggalakan kegiatan sekolah adiwiyata sehingga kepedulian dan pengetahuan warga sekolah terhadap lingkungan meningkat yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pola hidup di masing-masing rumah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup.
- f. Peningkatan kerjasama dengan komunitas lingkungan melaksanakan aksi-aksi peduli lingkungan seperti penanaman pohon, aksi pungut sampah dll.

3.1.1.5. Misi V : Mengembangkan Teknologi Informasi berbasis komunitas

Pencapaian misi 5 RPJMD diukur dengan 1 (Satu) indikator tujuan dan 1 (satu) indikator sasaran. Data capaian indikator tujuan dan sasaran pada Tahun 2019 adalah tercapai 100% dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 3.22 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pada Misi V

No	Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Target 2019	Realisasi		Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan 2018-2019
			2018	2019		
A	Persentase Teknologi Informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh komunitas	100 %		100 %	tercapai	Indikator baru
1	Cakupan komunitas yang berdaya dan memanfaatkan teknologi informasi	20,00	15	21	tercapai	▲

Sumber : Dinkominfo Kota Pekalongan, 2020

Penjelasan Capaian Indikator Tujuan

1. Persentase Teknologi Informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh komunitas

Indikator ini untuk mengukur sejauhmana teknologi informasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan akan bermanfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan komunitas. Berdasarkan data dalam Tabel 3.23 jumlah teknologi informasi bagi komunitas yang selalu update dan dikembangkan adalah 12 teknologi informasi, dimana secara keseluruhan bermanfaat bagi komunitas terkait. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa capaian indikator ini adalah 100 %.

Tabel 3.23 Teknologi Informasi yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan Komunitas

No	Teknologi Informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan komunitas	TI yang telah dikembangkan sebelumnya dan tetap update	TI yang dikembangkan atas kebutuhan komunitas	Komunitas yang dimanfaatkan	Terakhir Di Update
1	explore.Pekalongankota.go.id	√		Masyarakat pecinta Pekalongan	21 Januari 2020
2	ppid.Pekalongankota.go.id	√		Masyarakat pengguna data pemerintah	31 Desember 2019
3	e-kliping.Pekalongankota.go.id	√		Masyarakat	12 Maret

No	Teknologi Informasi yang dikembangkan dan dimanfaatkan komunitas	TI yang telah dikembangkan sebelumnya dan tetap update	TI yang dikembangkan atas kebutuhan komunitas	Komunitas yang dimanfaatkan	Terakhir Di Update
				pecinta kliping kota Pekalongan	2020
4	lawanhoax.Pekalongankota.go.id			komunitas Hoax	21 Juni 2017
5	pkk.Pekalongankota.go.id			Komunitas PKK	14 Desember 2018
6	wadulo	√		Komunitas penerima curhatan layanan kota	playstore
7	tourism.Pekalongankota.go.id	√		website promosi wisata	16 Juni 2019
8	Pekalonganmall.go.id		√	komunitas bisnis	playstore
9	pasarbatik.Pekalongankota.go.id		√	komunitas bisnis batik	playstore
10	internetaman.Pekalongankota.go.id		√	Komunitas Dewan TIK	9 Maret 2018
11	smartcity.Pekalongankota.go.id		√	semua komunitas tergabung (klaster ini)	playstore
12	sipekan.Pekalongankota.go.id		√	Komunitas nelayan	playstore

Sumber : Dinkominfo Kota Pekalongan, 2020

Penjelasan Capaian Indikator Sasaran

1. Cakupan Komunitas Yang Berdaya Dan Memanfaatkan Teknologi Informasi

Indikator diatas merupakan indikator mandiri Kota Pekalongan yang merupakan salah satu program unggulan Walikota Pekalongan, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi. Pada tahun 2019, jumlah komunitas yang mampu menggunakan aplikasi sesuai kebutuhan dengan baik sebanyak 21 kelompok, sebagai berikut :

- | | | | |
|------------------|--|---------------------------------------|--|
| 1) Caturpilar | 8) Relawan TIK | 14) Fotografer | 19) Formaci : Forum Masyarakat Anti |
| 2) RW Net | 9) <i>Open Source Software</i> (Tidak Aktif) | 15) Animator | Hoax Cinta NKRI |
| 3) BKR | 10) Himpaudi | 16) Film | 20) ARAH : Asosiasi Rakyat Anti Hoax |
| 4) PKK | 11) MGMP | 17) Ikatan Wanita Pengusaha Muslim | 21) RAPI : Radio Amatir Penduduk Indonesia |
| 5) Karang Taruna | 12) Pecinta Domain | 18) IWODI : Ikatan Wanita Digital Ind | |
| 6) LPPAR | 13) Blogger | | |
| 7) Dewan TIK | | | |

3.1.1.6. Misi VI : Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlakul karimah

Pencapaian misi 6 RPJMD diukur dengan 2 (dua) indikator tujuan dan 3 (tiga) indikator sasaran. Data capaian indikator tujuan pada Tahun 2019 adalah 1 (satu) indikator tercapai (50,00%) dan 1 (satu) indikator tidak tercapai (50,00%). Adapun capaian indikator sasaran pada Tahun 2019 adalah 3 (tiga) indikator tercapai (100,00%). Data capaian indikator tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.24 Capaian Indikator Tujuan dan Sasaran Pada Misi VI

No	Indikator Kinerja Tujuan/sasaran	Target 2019	Realisasi		Ketercapaian realisasi terhadap target	Pergerakan 2018-2019
			2018	2019		
A	Persentase Seni Budaya Yang Dilestarikan	100 %	100%	100 %	tercapai	●
	1 Persentase peningkatan penyelenggaraan event	70,97	129,03	138,70	tercapai	▲
B	Konflik Sosial	0	2	1	Tidak tercapai	▼
	2 Persentase penurunan kasus konflik sosial	14,29	(100)	50	tercapai	▲
	3 Persentase implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter	55,00	73,91	83,67	tercapai	▲

Sumber : Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

Penjelasan Capaian Indikator Tujuan

1. Persentase Seni Budaya yang dilestarikan

Indikator persentase seni budaya yang dilestarikan digunakan untuk menjaga kelestarian seni budaya di Kota Pekalongan. Jumlah seni budaya di Kota Pekalongan adalah 25 seni dan telah 100 % dilestarikan dengan selalu mendukung penyelenggaraan seni budaya tersebut secara langsung ataupun tidak langsung.

2. Konflik Sosial

Pada tahun 2019 terjadi 1 (satu) konflik di Kota Pekalongan yaitu pembangunan gedung serba guna oleh pengurus Yayasan Al Aiman yang berlokasi di Krapyak Gg.7 Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara. Konflik terjadi karena Gedung yang semula dibangun sebagai Gedung serba guna dialihfungsikan menjadi masjid yang tidak disetujui (ditolak) oleh masyarakat sekitar. Namun kasus tersebut telah dimediasi oleh Pemerintah Kota Pekalongan dengan melarang alih fungsi tersebut melalui tidak menyetujui Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sehingga konflik sosial ini sudah dapat diredam.

Penjelasan Capaian Indikator Sasaran

1. Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Event

Indikator ini mengukur peningkatan event pada setiap tahun pelaksanaan RPJMD sehingga pada akhir tahun 2021, target penyelenggaraan event adalah 100 % atau 31 event. Target penyelenggaraan event di Tahun 2019 adalah 70,97 % dimana target event yang

diselenggarakan adalah sejumlah 22 event. Pada tahun 2019 telah diselenggarakan 42 event sehingga persentase capaiannya adalah $(43/31) \times 100\%$ atau sebesar 138,70 %. Persentase ini meningkat dari Tahun 2018 yang semula sejumlah 40 event (129,03%).

Tabel 3. 25 Daftar Penyelenggaraan Even Pentas Seni Budaya Pada Tahun 2019

NO.	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT
1	Festival Pekawis	Mar 2019	Kota Pekalongan
2	Pentas Kampung Budaya Landungsari	18 Mar 19	Kota Pekalongan
3	Jetayu Car Free Night	23 MAR 19	Kota Pekalongan
4	Pentas Kampung Budaya Setono	27-Mar-19	Kota Pekalongan
5	Pentas Seni Kecamatan	31-Mar-19	Kota Pekalongan
6	Festival Sarung	1-Apr-19	Kota Pekalongan
7	Kirab Hari Jadi Kota Pekalongan	1-Apr-19	Kota Pekalongan
8	Lomba Pgdk	3-Apr-19	Kota Pekalongan
9	Lomba Volksong	4-Apr-19	Kota Pekalongan
10	Lomba Anekdote	6-Apr-19	Kota Pekalongan
11	Sarasehan Bahasa Kalongan	6-Apr-19	Kota Pekalongan
12	Pentas Seni Ppid	4-7 APRIL 19	Kota Pekalongan
13	Jetayu Car Free Night	4-May-19	Kota Pekalongan
14	Pekchun	7-Jun-19	Kota Pekalongan
15	Festival Jlamprang Kultur	11-Jun-19	Kota Pekalongan
16	Syawalan Krapyak	12-Jun-19	Kota Pekalongan
17	Jetayu Car Free Night	13-Jul-19	Kota Pekalongan
18	Paf (Pekalongan Art Festival)	15-20 JUL 19	Kota Pekalongan
19	Pentas Tari Batik Kejati	17-Jul-19	Kota Pekalongan
20	Jetayu Car Free Night	17 AGS 19	Kota Pekalongan
21	Pentas Resepsi Hut Ri	18 AGS 19	Kota Pekalongan
22	Pentas Seni Pameran Museum	26-27 AGS 19	Kota Pekalongan
23	Peresmian Kampung Budaya	27 AGS 19	Kota Pekalongan
24	Pentas Seni Pameran Inovasi	5-8 SEPT 19	Kota Pekalongan
25	Pentas Seni Grumungan Wong Batik	30-Sep-19	Kota Pekalongan
26	Upacara Hari Batik	2-Oct-19	Kota Pekalongan
27	Karnaval Pekan Batik	6-Oct-19	Kota Pekalongan
28	Pentas Seni Pekan Batik	4-8 OKT 19	Kota Pekalongan
29	Komunitas Sepeda Onthel	6-Oct-19	Kota Pekalongan
30	Jetayu Car Free Night	12-Oct-19	Kota Pekalongan
31	Pentas Seni Sarasehan Seni Budaya	12-Oct-19	Kota Pekalongan
32	Sarasehan Pitutur Bijak	17-Oct-19	Kota Pekalongan
33	Pentas Seni Sarasehan Seni Budaya	19-Oct-19	Kota Pekalongan
34	Sedekah Laut Nelayan	24-Oct-19	Kota Pekalongan

NO.	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT
35	Lomba Perahu Hias	25-Oct-19	Kota Pekalongan
36	Kauman Art	28-Oct-19	Kota Pekalongan
37	Peringatan Sumpah Pemuda (Pentas Seni)	28-Oct-19	Kota Pekalongan
38	Ikhtiar Penguat Literasi Lokal	31-Oct-19	Kota Pekalongan
39	Penetapan Tacb	14-16 NOV 19	Kota Pekalongan
40	Pagelaran Wayang Dalam Rangka Hari Wayang Nasional	14 NOV 19	Kota Pekalongan
41	Festival Marawis	15 NOV 19	Kota Pekalongan
42	Sarasehan Budaya	20 NOV 19	Kota Pekalongan
43	Festival Kampung Budaya	22 NOV 19	Kota Pekalongan

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2020

2. Persentase Penurunan Kasus Konflik Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konflik adalah percekocokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik sosial adalah pertentangan antar anggota masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan.

Pada tahun 2019 terjadi 1 (satu) konflik di Kota Pekalongan yaitu pembangunan gedung serba guna oleh pengurus Yayasan Al Aiman. Jumlah ini menurun dibandingkan kasus konflik sosial di tahun 2018 dengan jumlah kasus konflik sebanyak 2 kasus.

3. Persentase Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter

Persentase Implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter di Kota Pekalongan diukur berdasarkan rata-rata persentase implementasi pendidikan keagamaan dan implementasi pendidikan karakter. Pendidikan keagamaan di Kota Pekalongan telah diimplementasikan di seluruh jenjang mulai Usia Dini sampai dengan Pendidikan Dasar (PAUD, SD dan SMP). Sedangkan pendidikan karakter diukur berdasarkan jumlah sekolah yang telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 (K-13)

Tabel 3. 26 Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Pendidikan Karakter Kota Pekalongan Tahun 2018 s.d. 2019

	2018		2019	
	Jmlh	%	Jmlh	%
Sekolah yang mengimplementasi pendidikan keagamaan	297	100	297	100
Sekolah yang mengimplementasi pendidikan karakter	142	47,81	200	67,34
Rata-rata	73,90		83,67	

Sumber : Dindik Kota Pekalongan (diolah), 2020

Realisasi kinerja indikator persentase penyelenggaraan pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter pada tahun 2019 melebihi target yang ditetapkan RPJMD.

3.1.2. Capaian Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

Berdasarkan target prioritas pembangunan daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada sub bab 1.3.4, capaian prioritas pembangunan daerah Kota Pekalongan Tahun 2019 ditunjukkan dalam tabel 3.27 berikut :

Tabel 3.27 Target dan Capaian Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD				PROGRAM PRIORITAS RPJMD
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2019	Capaian Tahun 2019	Keterangan	
1	2	3	4	5	6
1. Peningkatan pendapatan perkapita dengan menitikberatkan pada sektor-sektor ekonomi kreatif dan unggulan daerah, dengan fokus pada:					
a) Fasilitasi akses terhadap permodalan, manajemen dan pasar ; peningkatan <i>start up</i> wirausaha baru; peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja; serta pemberdayaan ekonomi masyarakat yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita, menekan kesenjangan pendapatan (<i>gini ratio</i>) serta merupakan bagian dari upaya secara terus menerus menurunkan angka kemiskinan;	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	4,70%	5,47%	Tercapai	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
b) Perkuatan basis data terpadu sebagai dasar pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan swasta dan pihak lainnya dalam mengatasi kemiskinan;	Persentase Penurunan PMKS	8,78%	12,83%	Tercapai	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Program pembinaan panti asuhan /panti jompo
c) Meningkatkan produktivitas pertanian melalui: peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk untuk meningkatkan nilai tambah; fasilitasi pemberian bibit, benih, alsintan; fasilitasi dan pengawasan subsidi pupuk; peningkatan prasarana irigasi; pengembangan teknologi tepat guna di bidang pertanian; pengembangan jejaring pemasaran;	Usia Harapan Hidup UHH)	74,32	74,28	Tidak Tercapai	Program Peningkatan Ketahanan Pangan

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD				PROGRAM PRIORITAS RPJMD
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2019	Capaian Tahun 2019	Keterangan	
1	2	3	4	5	6
d) Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui: peningkatan pemberdayaan nelayan; peningkatan pelayanan TPI, pengembangan dan peningkatan fungsi teknopark perikanan; serta pengembangan perikanan budidaya melalui pemberdayaan kelompok dan fasilitasi benih/pakan ikan	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	4,70%	5,47%	Tercapai	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
e) Meningkatkan produksi dan produktivitas industri kecil dan menengah melalui: peningkatan nilai tambah diversifikasi produk; mengembangkan inovasi teknologi; memfasilitasi akses modal dari perbankan dan lembaga keuangan non perbankan; peningkatan akses pasar dengan mengembangkan digital ekonomi dan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk UMKM;	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	4,70%	5,47%	Tercapai	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
					Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
f) Melanjutkan upaya peningkatan ekonomi kreatif khususnya kerajinan batik, tenun, kriya lainnya, fesyen, kuliner, fotografi dan seni pertunjukan;	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	4,70%	5,47%	Tercapai	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	5,40%	5,72%	Tercapai	Program pengembangan destinasi pariwisata
					Program pengembangan pemasaran pariwisata
Persentase peningkatan penyelenggaraan event	70,97%	183,87%	Tercapai	Program Pengembangan dan Pengelolaan Kekayaan Budaya	
g) Mendorong pariwisata berbasis ekonomi kreatif dan religi melalui: perbaikan prasarana dan sarana, serta manajemen pengelolaan daerah wisata, dan	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	5,40%	5,72%	Tercapai	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
					Program Pengembangan

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD				PROGRAM PRIORITAS RPJMD
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2019	Capaian Tahun 2019	Keterangan	
1	2	3	4	5	6
meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata; meningkatkan promosi wisata; meningkatkan kerjasama dengan pelaku wisata; meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah daerah sekitar, serta meningkatkan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata;					Pemasaran Pariwisata
h) Perbaiki iklim investasi yang semakin kondusif melalui: pemberian kemudahan perijinan investasi (perijinan satu pintu, waktu perijinan, dan prosedur perijinan); perbaiki sistem dan layanan perijinan; pengembangan promosi investasi;	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	5,40%	5,72%	Tercapai	Program Pengembangan ekspor Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
i) Melanjutkan upaya penguatan infrastruktur perdagangan sebagai basis ekonomi kerakyatan, termasuk keberlanjutan penataan LIK di Kuripan Yosorejo, peningkatan kualitas dan kapasitas pasar tradisional dan penataan pedagang kaki lima.	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa	5,40%	5,72%	Tercapai	Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dengan fokus pada:					
a) Mendorong implementasi pencapaian target 12 SPM bidang kesehatan, terutama upaya penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan penurunan prevalensi penyakit menular dan tidak menular, peningkatan promotif dan preventif, upaya kuratif dan rehabilitatif, serta pemenuhan <i>Universal Health Coverage</i> ;	Usia Harapan Hidup (UHH)	74,32	74,28	Tidak Tercapai	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD				PROGRAM PRIORITAS RPJMD
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2019	Capaian Tahun 2019	Keterangan	
1	2	3	4	5	6
					Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak Di Rumah Sakit
					Program Kesehatan Keluarga
b) Peningkatan sarana prasarana kesehatan dasar dan rujukan;	Usia Harapan Hidup UHH)	74,32	74,28	Tidak Tercapai	Program Peningkatan Sarana Prasarana, penyediaan obat, perbekalan kesehatan, dan Obat Asli Indonesia
					Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
c) Peningkatan capaian wilayah Open Defecation Free (tidak buang air besar sembarangan);	Usia Harapan Hidup UHH)	74,32	74,28	Tidak Tercapai	Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja Dan Kesehatan Olah Raga
d) Pengendalian jumlah penduduk dan keluarga berencana untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera dan berkualitas.	Usia Harapan Hidup UHH)	74,32	74,28	Tidak Tercapai	Program Keluarga Berencana
3. Peningkatan derajat pendidikan masyarakat dengan fokus:					
a) mendorong dan memfasilitasi pemenuhan 8 standar nasional pendidikan dengan memprioritaskan pada peningkatan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah melalui keterjangkauan biaya pendidikan, peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, penguatan implementasi teknologi informasi, peningkatan minat baca, pengembangan	Angka Partisipasi Sekolah	97%	97,13%	Tercapai	Program Pendidikan Anak Usia Dini
					Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD				PROGRAM PRIORITAS RPJMD
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2019	Capaian Tahun 2019	Keterangan	
1	2	3	4	5	6
pendidikan inklusi, berkoordinasi dan bekerjasama dengan pemerintah provinsi dalam rangka meningkatkan angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan menengah serta melakukan upaya-upaya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak usia sekolah.					Program Peningkatan Akses Terhadap Layanan Pendidikan
	Persentase penyelenggaraan pendidikan berakreditasi A	52%	49,16%	Tidak Tercapai	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
					Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
					Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan
	Persentase implementasi pendidikan keagamaan dan pendidikan karakter	55%	83,67%	Tercapai	Program Pembentukan Karakter Siswa
					Program Pembentukan Karakter Anak
					Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan
4. Penguatan kualitas tenaga kerja yang berkinerja tinggi serta penanaman nilai-nilai budaya masyarakat yang berkarakter, dengan fokus:					
a) Mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi melalui: mendorong peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja berbasis kompetensi (standar, pelatihan, sertifikasi); memperluas kesempatan kerja; dan mengembangkan budaya;	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,70%	5,77%	Tidak Tercapai	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD				PROGRAM PRIORITAS RPJMD
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2019	Capaian Tahun 2019	Keterangan	
1	2	3	4	5	6
b) Penanganan dan pengelolaan anak jalanan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (<i>stake holder</i>);	Persentase penurunan PMKS	8,78%	12,83%	Tercapai	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
c) Penyiapan pendidikan ketrampilan untuk menampung pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja sebagai akibat peningkatan kegiatan ekonomi berbasis teknologi informasi;	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,70%	5,77%	Tidak Tercapai	Program Peningkatan Kesempatan Kerja
	Cakupan komunitas yang berdaya dalam memanfaatkan TI	20	21	Tercapai	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
d) Perwujudan kota layak anak dengan mendorong peran serta masyarakat;	Persentase pemenuhan sarana prasarana pada ruang publik kreatif (taman bahagia).	71,40%	71,43%	Tercapai	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
e) Perlindungan dan perwujudan pekerja perempuan sehat produktif.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,70%	5,77%	Tidak Tercapai	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
5. Melanjutkan pembangunan infrastruktur penghubung jalur ekonomi regional serta infrastruktur kawasan strategis perkotaan di bidang 101ocial, budaya dan ekonomi, dengan fokus pada:					
a) Pembangunan penanda batas kota;	Persentase pemenuhan sarana prasarana pada ruang publik kreatif (taman bahagia)	71,40%	71,43%	Tercapai	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD				PROGRAM PRIORITAS RPJMD
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2019	Capaian Tahun 2019	Keterangan	
1	2	3	4	5	6
b) Penguatan infrastruktur konektivitas melalui peningkatan sarana prasarana simpul, pepaduan moda transportasi dan kualitas jaringan jalan dan jembatan;	Rasio Kapasitas Jalan (VC Ratio)	0,84	0,45	Tercapai	Program pembangunan jalan dan jembatan
					Program Peningkatan Dan Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
					Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
c) Pemerataan prasarana sarana dasar dan ekonomi melalui penyediaan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, peningkatan jaringan air minum layak dan sanitasi layak;	Persentase kawasan permukiman kumuh	1,03%	0,69%	Tercapai	Program Pengembangan Perumahan
	Cakupan Layanan Sarpras Permukiman Perkotaan	87,88%	88,17%	Tercapai	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
					Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman
d) Mendorong pengembangan kawasan strategis untuk kepentingan ekonomi berbasis perdagangan dan jasa;	Persentase pemenuhan sarana prasarana pada ruang publik kreatif (taman bahagia).	71,40%	71,43%	Tercapai	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
e) Mengoptimalkan potensi pesisir Kota Pekalongan untuk mendukung pengembangan industri perikanan, pariwisata dan konservasi;	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	4,70%	5,47%	Tercapai	Program pengembangan perikanan tangkap
	Indeks kualitas lingkungan hidup	52,67	52,92	Tercapai	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
f) Pembangunan infrastruktur di kawasan rawan bencana;	Persentase luas wilayah genangan	18,54%	23,36%	Tidak Tercapai	Program Pengendalian Banjir

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD				PROGRAM PRIORITAS RPJMD
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2019	Capaian Tahun 2019	Keterangan	
1	2	3	4	5	6
	banjir dan rob				Program Peningkatan Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dan Drainase
g) Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui: pengendalian banjir, pengendalian pemanfaatan air tanah; pengelolaan wilayah pesisir dengan rehabilitasi kawasan mangrove, pengelolaan lingkungan dengan pengendalian pencemaran air, pengelolaan limbah secara komunal berbasis kawasan dan masyarakat, serta peningkatan Ruang Terbuka Hijau;	Persentase luas wilayah genangan banjir dan rob	18,54%	23,36%	Tidak Tercapai	Program Pengendalian Banjir Program Peningkatan Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dan Drainase
	Indeks kualitas lingkungan hidup	52,67	52,92	Tercapai	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
h) Meningkatkan penanggulangan bencana berbasis pengurangan risiko bencana melalui efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, memperkuat kesiapsiagaan dan penanganan darurat, serta mengembangkan sistem rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.	Persentase luas wilayah genangan banjir dan rob	18,54%	23,36%	Tidak Tercapai	Program Pengendalian Banjir Program Peningkatan Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dan Drainase
6. Tata Kelola dan Pelayanan Publik, dengan fokus pada:					
a) Peningkatan pelayanan publik melalui perluasan cakupan dan jenis pelayanan, kemudahan akses pelayanan, ketepatan waktu dan biaya, serta transparansi informasi pelayanan;	Persentase PD dengan IKM baik	93,55%	93,94%	Tercapai	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur
	Persentase OPD dengan nilai Keterbukaan Informasi Publik kategori baik (informatif)	50,00%	67,74%	Tercapai	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Program Peningkatan

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD				PROGRAM PRIORITAS RPJMD	
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2019	Capaian Tahun 2019	Keterangan		
1	2	3	4	5	6	
					Pelayanan Masyarakat (PPPM)	
b) Perwujudan pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi; membangun sistem manajemen berbasis kinerja melalui penguatan integrasi proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah; meningkatkan pengawasan melalui perkuatan kapabilitas APIP dan perkuatan SPIP; meningkatkan pengendalian produk hukum, dan penegakan perda; meningkatkan profesionalisme ASN melalui peningkatan kinerja, kompetensi, disiplin, dan penataan ASN;	Kategori evaluasi AKIP	B	BB	Tercapai	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Program Pengembangan Data/Informasi	
						Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Tingkat kematangan implementasi SPIP	2,75	3,02	Tercapai	Program Pengawasan internal terhadap penyelenggaraan Tupoksi PD dan kasus pengaduan	
						Program Peningkatan kapasitas, Profesionalisme dan Layanan APIP
	Opini BPK atas LKD	WTP	NA	Tercapai	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Program Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	

PRIORITAS DAN FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD				PROGRAM PRIORITAS RPJMD
	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN 2019	Capaian Tahun 2019	Keterangan	
1	2	3	4	5	6
					Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
					Program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan
	Indeks profesionalitas ASN	84	60,54	Tidak Tercapai	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
					Program Peningkatan SDM Aparatur
	Persentase penurunan kasus konflik sosial	14,29%	50%	Tercapai	Program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
c. Penguatan partisipasi publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sebagai bagian dari <i>check and balancing</i> ;	Persentase PD dengan IKM baik	93,55%	93,94%	Tercapai	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur
	Persentase OPD dengan nilai Keterbukaan Informasi Publik kategori baik (informatif)	50,00%	67,74%	Tercapai	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
					Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan (diolah), 2020

3.2. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Urusan Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan terdiri dari 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib bukan pelayanan dasar, 6 urusan pilihan, 5 fungsi penunjang pemerintahan dan pendukung operasional OPD (rutin).

3.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

3.2.1.1. Pendidikan

Untuk memudahkan dalam mengukur dan mengevaluasi 2 (dua) Indikator Kinerja Tujuan dan 2 (dua) Indikator Kinerja Sasaran (IKU) dalam urusan Pendidikan, yang meliputi :

1. Harapan Lama Sekolah (HLS);
2. Angka Partisipasi Sekolah (APS);
3. Persentase Penyelenggaraan Pendidikan berakreditasi A;
4. Persentase Implementasi Pendidikan Keagamaan dan Penguatan Karakter;

Dinas Pendidikan sebagai pelaksana urusan pendidikan dilaksanakan 11 (sebelas) program yakni Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Non Formal, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Dasar, Program Pembentukan Karakter Anak, Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PAUD dan PNF dan Program Pembentukan Karakter Siswa.

Realisasi Indikator Kinerja Program

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program ini diukur dengan 6 (enam) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.28 Target dan Capaian Indikator Program Pendidikan Anak Usia Dini

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	APS 3-6 tahun	67,50	persen	-	91,44
2	APK PAUD	61,50	persen	62,9	69,64
3	APM PAUD	60,00	persen	-	64,10
4	Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun	75,00	persen	-	99,16
5	Angka Partisipasi Kasar TK/RA	76,00	persen	-	81,16
6	Angka Partisipasi Murni TK/RA	75,00	persen	-	34,49

Sumber: Dapodik dan Kemenag diolah, 2020

Capaian indikator APS 5-6 tahun adalah 99,16% sudah melampaui target 75%, demikian juga dengan indikator lainnya juga sudah melampaui target, akan tetapi APM TK/RA capaiannya hanya 34,49%, sehingga dapat disimpulkan banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya pada jenjang TK/RA dibawah usia 5 tahun dan menyekolahkan anaknya yang belum berusia 7 tahun pada jenjang SD/MI.

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program ini diukur dengan 6 (enam) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.29 Target dan Capaian Indikator
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 -12 Tahun	100,00	persen	106,26	98,67
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Setara	100,00	persen	110,6	98,32
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI / Setara	94,50	persen	97,2	79,03
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15 Tahun	100,00	persen	102,89	97,69
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Setara	100,00	persen	104,2	106,27
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Setara	77,50	persen	76,1	61,14

Sumber: Dapodik dan Kemenag diolah, 2020

Capaian indikator APS 7-12 Tahun dan APS 13-15 Tahun tidak mencapai target tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang selalu diatas 100%, demikian pula dengan Indikator APK SD/MI, APM SD/MI, SMP/Mts capaiannya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan adanya Kebijakan Zonasi yang mulai diterapkan ditahun ajaran 2018/2019. Selain itu, sebagian besar orang tua menyekolahkan anaknya di usia yang lebih muda daripada yang ketentuan yang berlaku menjadi faktor penurunan capaian target ini.

Pola Penduduk Kota Pekalongan bersekolah di luar kota sebagian besar adalah *mondok/boarding* sedangkan pola penduduk luar kota sekolah di Kota Pekalongan sebagian besar adalah laju, Kebijakan Zonasi tidak membatasi *boarding* tapi membatasi laju, sehingga Kebijakan Zonasi tidak mempengaruhi secara signifikan penduduk Kota Pekalongan bersekolah di luar kota tetapi sebaliknya secara signifikan mengurangi jumlah penduduk luar kota bersekolah di Kota Pekalongan. Data juga menunjukkan Tahun 2019 sejumlah 2346 anak usia 7-18 tahun bersekolah diluar kota serta ada 6051 anak yang usianya dibawah 7 th sudah bersekolah pada jenjang SD/MI dan 5195 anak berusia dibawah 16 tahun sudah bersekolah dijenjang pendidikan menengah. Hal ini dapat menunjukkan bahwa ketidak-tercapaian target-target Indikator pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun bukan karena keterbatasan ketersediaan dan aksesibilitas layanan pendidikan dasar yang ada di Kota Pekalongan.

3. Program Pendidikan Non Formal

Program ini diukur dengan 6 (enam) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.30 Target dan Capaian Indikator
Program Pendidikan Non Formal**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Angka Partisipasi PNF (non PAUD)	21,00	persen	-	306,69
2	Angka Partisipasi Kesetaraan	36,00	persen	-	239,63
3	Rasio Partisipasi ATS pada Pendidikan Kesetaraan	80,00	persen	-	3,67
4	Angka Partisipasi LKP	20,00	persen	-	Na

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
5	Angka Partisipasi PKBM	7,00	persen	-	Na
6	Angka Melek Huruf	98,50	persen	-	99,98

Sumber: Dinas Pendidikan (diolah), 2020

Capaian Angka Melek Huruf 99,98 % melebihi target 98,5% hal ini tidak terlepas dari upaya sungguh –sungguh dan keterlibatan masyarakat utamanya guru menjadi “Relawan Melek Huruf” yang bersedia bahu-membahu bersama-sama pemerintah mengentaskan masyarakat yang masih buta aksara. Walaupun secara persentasi belum 100% pada tahun 2019 Kemendikbud RI sudah mendeklarasikan Kota Pekalongan Bebas Buta Aksara karena memang sisa 0,02% yang masih buta aksara (karena keterbatasan mereka) tidak dapat diintervensi agar melek huruf.

Capaian Angka Partisipasi Kesetaraan dan Angka Partisipasi Pendidikan Non Formal (non PAUD) yang sangat tinggi melebihi target. Namun demikian, Capaian Rasio Partisipasi ATS (Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah) yang sangat rendah jauh dari target. Hal ini merupakan anomali yang mengindikasikan ke kurang-tepatan pelaksanaan program. Pada awal tahun 2018 telah dilakukan deteksi, sehingga dilakukan perubahan metode pelaksanaan kegiatan dan indikator outputnya untuk tahun Anggaran 2019. Anggaran Kegiatan Fasilitas Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, dan C yang semula digunakan untuk honor tutor dan perhitungannya sesuai indek dikali jumlah tutor diganti perhitungannya sesuai Indek dikali peserta didik (penduduk Kota Pekalongan).

Selain itu untuk mengurangi jumlah ATS tahun 2019 sebanyak 545 orang setelah dilakukan langkah konkret pendekatan *door-to-door* sehingga 20 ATS sudah aktif mengikuti pendidikan kesetaraan, sebanyak 126 ATS sudah melakukan pendaftaran di Pendidikan Kesetaraan (dengan fasilitas pemerintah), sedangkan sisanya akan kembali dilakukan pendampingan di tahun 2020 agar bersedia kembali ke Sekolah atau mengikuti Pendidikan Kesetaraan.

Indikator Partisipasi PKBM dihitung dengan Formula Jumlah Peserta Didik PKBM dibagi Penduduk ATS ditambah Penduduk usia 16-21 tahun yang menganggur, Jumlah Peserta Didik PKBM tahun 2019 = 2678 dan jumlah ATS tahun 2019 = 545 sedangkan jumlah penduduk usia 16-21 yang menganggur tidak tersedia datanya.

Indikator Partisipasi LKP dihitung dengan Formula Jumlah Peserta Didik LKP dibagi Penduduk usia 16-21 tahun yang belum bekerja, Jumlah Peserta Didik LKP tahun 2019 = 1118 sedangkan jumlah penduduk usia 16-21 yang belum bekerja tidak tersedia datanya.

4. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Program ini diukur dengan 10 (sepuluh) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.31 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Rasio Ketercukupan Guru (sekolah negeri dan swasta) SD	58,00	persen	-	90,81
2	Rasio Ketercukupan Guru (sekolah negeri dan swasta) SMP	95,00	persen	-	86,41

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
	swasta) SMP				
3	Rasio Ketercukupan Guru (sekolah negeri dan swasta) TK	100,00	persen	-	104,97
4	Rasio Ketercukupan Tenaga Kependidikan (sekolah negeri) SD	20,00	persen	-	3,76
5	Rasio Ketercukupan Tenaga Kependidikan (sekolah negeri) SMP	67,50	persen	-	57,35
6	Rasio Ketercukupan Tenaga Kependidikan (sekolah negeri) TK	37,50	persen	-	0
7	Persentase pendidik/guru jenjang TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs berijazah S1/DIV	89,50	persen	-	91,2
8	Persentase pendidikan/guru bersertifikat profesi pendidik	59,00	persen	-	52,71
9	Rasio kepala sekolah yang memenuhi kualifikasi	25,00	persen	-	42,76
10	Rasio tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi	20,00	persen	-	71,01

Sumber: Dinas Pendidikan (diolah), 2020

Rasio Ketercukupan Guru dihitung berdasarkan jumlah Guru PNS untuk Sekolah Negeri dan jumlah Guru Tetap Yayasan untuk Sekolah Swasta dibagi kebutuhan guru berdasarkan jumlah Rombongan Belajar.

Untuk Jenjang Sekolah Dasar (SD/MI) capaian yang jauh melebihi target dikarenakan banyaknya GTT yayasan yang sudah berubah menjadi GTY hal ini disebabkan banyak bantuan terkait kesejahteraan Guru maupun terkait bantuan kelembagaan dipersyaratkan status Guru dalam Yayasan, sedangkan untuk sekolah negeri rasionya justru turun karena adanya Guru PNS pensiun pada 2019 51 orang sedangkan pengangkatan Guru PNS Tahun 2019 = 158 orang

Capaian Indikator rasio ketercukupan guru SMP/MTs tidak memenuhi target lebih dikarenakan adanya perubahan standar maksimal siswa per rombongan belajar yang semula 36 siswa menjadi 32 siswa. Perubahan ini otomatis membuat jumlah rombel membengkak sehingga kebutuhan Gurunya pun ikut bertambah.

Walaupun rasio ketercukupan Guru baik pada jenjang SD/MI maupun SMP/MTs belum 100%, tidak ada kelas yang tidak ada gurunya karena kekurangan itu diisi oleh GTT.

Rasio ketercukupan tenaga kependidikan pada sekolah negeri tidak memenuhi target dan jauh dari ideal karena adanya moratorium PNS. Tenaga yang ada sekarang pun masih banyak yang belum memenuhi standar, sehingga banyak guru yang mendapatkan tugas diluar tugas pokoknya sebagai guru padahal disisi lain jumlah guru juga masih kurang.

Indikator persentase guru bersertifikat profesi capaiannya tidak memenuhi target karena kuota jumlah peserta sertifikasi profesi guru yang diberikan oleh pemerintah pusat hanya sejumlah guru bersertifikasi yang pensiun yaitu 51 orang.

5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.32 Target dan Capaian Indikator Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Persentase ketersediaan data dan informasi pendidikan yang dibutuhkan	100,00	persen	-	100
2	Persentase satuan pendidikan yang terfasilitasi peningkatan kapasitas manajemen	100,00	persen	-	100

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

6. Program Peningkatan Akses Terhadap Layanan Pendidikan

Program ini diukur dengan 4 (empat) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.33 Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Akses Terhadap Layanan Pendidikan

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,05	persen	0,07	0,12
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,10	persen	0,15	0,46
3	Persentase Lulusan SD/MI yang melanjutkan ke SMP/MTs	100,00	persen	-	104,78
4	Persentase Lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA	100,00	persen	116,00	101,25

Sumber: Dindik dan Kemenag (diolah), 2020

Angka putus sekolah SD/MI tidak dapat mencapai target yang diharapkan. Namun demikian, jika dilihat berdasarkan penelusuran data kondisinya tidak terlalu mengkhawatirkan mengingat dari 40 anak putus sekolah jenjang sekolah dasar (5 anak berasal dari SD dan 35 anak berasal dari MI), tidak ada anak yang putus sekolah karena ketidakmampuan dalam membayar biaya pendidikan, namun lebih karena kurangnya motivasi anak dan keluarga atau pindah sekolah keluar kota, sehingga tidak dihitung sebagai data. Demikian pula yang terjadi pada Angka putus sekolah SMP/MTs yang tidak tercapai dengan penyebab yang sama.

7. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan

Program ini diukur dengan 5 (lima) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.34 Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Rasio Pertumbuhan Daya Tampung Dikdas dan PAUD formal	100,00	persen	-	870,73
2	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas TK/RA	65,00	persen	-	62,77
3	Rasio Ketersediaan Ruang Kelas Dikdas	100,00	persen	-	107,49
4	Rata-rata Kelengkapan Jumlah sarana dan prasarana pembelajaran dan pendukung	65,00	persen	-	65,44

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
5	Rasio Kondisi sarana dan prasarana layak pakai	70,00	persen	-	85,86

Sumber: Dindik dan Kemena (diolah), 2020

Indikator rasio ketersediaan ruang kelas TK/RA, capaiannya dibawah target karena terbatasnya lahan yang dimiliki oleh TK/RA sehingga menghambat dalam pemenuhan sarpras pembelajaran beserta pendukungnya.

8. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Dasar

Program ini diukur dengan 6 (enam) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.35 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Dasar**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Angka Lulus Jenjang Dikdas	100,00	persen	-	100
2	Nilai Rata-rata UN SD/MI	76,00	nilai	72,64	69,69
3	Nilai Rata-rata UN SMP/MTs	60,00	nilai	57,36	59,02
4	Persentase Sekolah Jenjang dikdas yang terfasilitasi Penilaian Akreditasi	100,00	persen	-	100
5	Angka sekolah Jenjang Dikdas penyelenggara pendidikan Inklusi	3,30	indeks	-	2,67
6	Persentase sekolah Jenjang Dikdas yang terfasilitasi pembinaan oleh pengawas	100,00	persen	-	100

Sumber: Dindik (diolah), 2020

Capaian indikator nilai rata-rata UN SD/MI dan SMP/MTs tidak mencapai target dikarenakan sudah diterapkannya penggunaan soal-soal yang berjenis *High Order Thinking Skill (HOTS)* atau soal-soal yang membutuhkan daya nalar tinggi padahal soal-soal dalam *Try-out* belum menerapkan itu.

Capaian indikator Angka sekolah Jenjang Dikdas penyelenggara pendidikan Inklusi tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan jumlah anak berkebutuhan khusus tidak banyak, sehingga jika diselenggarakan pada sekolah yang ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusi hal tersebut menjadi tidak efisien. Untuk itu, langkah yang ditempuh oleh Dinas Pendidikan adalah menyarankan anak berkebutuhan khusus tersebut untuk bersekolah di sekolah yang telah memiliki fasilitas pendidikan inklusif.

9. Program Pembentukan Karakter Anak

Program ini diukur dengan 4 (empat) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.36 Target dan Capaian Indikator
Program Pembentukan Karakter Anak**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Persentase Sekolah Jenjang PAUD yang menerapkan model Pendidikan Agama Islam	100,00	persen	-	100
2	Persentase Sekolah Jenjang PAUD yang	80,00	persen	-	100

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
	menerapkan model pembentukan karakter yang melibatkan peran aktif wali murid				
3	Rasio Siswa Jenjang PAUD yang mengikuti pembelajaran di TPQ/madin	100,00	persen	-	NA
4	Persentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD yang terfasilitasi dalam Kegiatan Lomba dan Apresiasi	20,00	persen	-	100

Sumber: Dinas Pendidikan (diolah), 2020

Capaian rasio siswa jenjang PAUD yang mengikuti pembelajaran di TPQ/Madin tidak tersedia datanya dikarenakan data peserta didik di TPQ/Madin tidak ada NIK-nya sehingga tidak bisa diolah secara sistem dengan Dapodik dan Emis.

10. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PAUD dan PNF

Program ini diukur dengan 4 (empat) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.37 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PAUD dan PNF**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Persentase Satuan Pendidikan PAUD&PNF yang terfasilitasi penilaian akreditasi	100,00	persen	-	100
2	Persentase satuan pendidikan PAUD & PNF yang terfasilitasi pembinaan oleh Pengawas/penilik	92,00	persen	-	100
3	Persentase organisasi mitra PAUD & PNF yang terfasilitasi pemberdayaan	100,00	persen	-	100
4	Persentase Satuan Pendidikan PAUD & PNF yang terfasilitasi lomba dan apresiasi	100,00	persen	-	100

Sumber: Dinas Pendidikan (diolah), 2020

11. Program Pembentukan Karakter Siswa

Program ini diukur dengan 6 (enam) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.38 Target dan Capaian Indikator
Program Program Pembentukan Karakter Siswa**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Persentase Siswa Muslim Kelas VI SD yang berijazah BTQ	100,00	persen	-	71,87
2	Persentase Sekolah Jenjang Dikdas yang menerapkan model Pendidikan Keagamaan	25,00	persen	-	100
3	Persentase Sekolah Jenjang Dikdas yang menerapkan model pembentukan karakter yang melibatkan peran aktif wali murid	10,00	persen	-	48,13
4	Rasio Siswa Jenjang Dikdas yang mengikuti pembelajaran di TPQ/Madin	50,00	persen	-	N A

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
5	Persentase Sekolah Jenjang Dikdas yang terfasilitasi dalam kegiatan lomba dan apresiasi bagi siswa	100,00	persen	-	100
6	Rasio siswa jenjang Dikdas yang terfasilitasi kegiatan kepramukaan	100,00	persen	-	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2020

Kegiatan Peningkatan Pembelajaran BTQ merupakan mulok unggulan Pemerintah Kota Pekalongan, dimana siswa SD/MI dan SMP/MTs sebelum kegiatan belajar mengajar, dimulai dengan pembelajaran BTQ dan diharapkan semua siswa memiliki kemampuan yang baik dalam baca tulis Al-Qur'an bagi yang beragama islam disamping kegiatan pembelajaran pendidikan agama yang ada di kurikulum.

Ketidaktercapaian indikator Persentase Siswa Muslim Kelas VI SD yang berijazah BTQ pada program Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pendidikan Keagamaan disebabkan pembelajaran BTQ selama ini belum mengacu pada kurikulum yang jelas dan baku sehingga kemampuan peserta BTQ belum bisa diukur secara pasti. Disisi lain, banyak siswa yang mengikuti TPQ di lingkungan sekitar tempat tinggal telah memiliki syahadah sebelum kelas VI SD/MI.

Capaian rasio siswa jenjang Dikdas yang mengikuti pembelajaran di TPQ/Madin tidak tersedia datanya dikarenakan data peserta didik di TPQ/Madin tidak ada NIK-nya sehingga tidak bisa diolah secara sistem dengan Dapodik dan Emis.

Berdasarkan data capaian 59 indikator program, 37 Indikator *Outcome* capaiannya melebihi atau sama dengan target dan sebanyak 18 indikator tidak mencapai/kurang, sedangkan 4 indikator tidak tersedia datanya, dikarenakan data yang terkait bukan kewenangan Dinas Pendidikan.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 531.600.000,- dan realisasi Rp. 491.279.946,-(*unaudited*)melalui 5 (lima) kegiatan dengan indikator output sebanyak 7 indikator melalui kegiatan di Dinas Pendidikan. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 7 indikator tercapai dan 0 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.39 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.39 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pendidikan Anak Usia Dini

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah peserta sosialisasi Program PAUD	orang	400	400	400
2	Fasilitasi Operasional pendidikan (FOP) TK/RA swasta	Jumlah TK swasta peserta desk penggunaan dana BOP	lembaga	78	78	78

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
3	Fasilitasi Operasional kelembagaan PAUD	Jumlah PAUD peserta desk penggunaan dana BOP	lembaga	210	210	210
4	Fasilitasi Operasional pendidikan TK negeri dan TK Pembina	Jumlah TK Negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya	lembaga	4	4	4
5	Biaya operasional penyelenggaraan PAUD (DAK)	Jumlah TK Negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya	lembaga	4	4	4
		Jumlah PAUD Negeri yang terfasilitasi operasional pendidikannya	lembaga	3	3	3

Sumber: Dinas Pendidikan (diolah), 2020

2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 28.750.539.000,- dan realisasi Rp. 6.686.116.052,- (*unaudited*) melalui 6 (enam) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 8 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 8 indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.40 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.40 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Persentase jumlah sekolah penerima dana BOS	persen	100	100	100
2	Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD	Jumlah SD penerima dana BOS	sekolah	71	71	71
3	Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP	Jumlah SMP penerima dana BOS	sekolah	17	17	17
4	Fasilitasi penerimaan peserta didik baru pendidikan dasar	Jumlah sekolah peserta PPDB Online	sekolah	30	30	30
5	Fasilitasi Operasional Pendidikan SD	Jumlah SD negeri penerima dana FOP	SDN	71	71	71
		Jumlah peserta pelatihan batik	siswa	3.000	3.000	3.000
6	Fasilitasi Operasional Pendidikan SMP	Jumlah SMP negeri penerima dana FOP	SMPN	17	17	17

Sumber: Dinas Pendidikan (diolah), 2020

Target Indikator Output pada Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun tercapai seluruhnya, dan bahkan pada Kegiatan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terdapat dua output tambahan yaitu jumlah SD swasta penerima dana BOS dan jumlah SMP Negeri Swasta penerima dana BOS yang mencapai 102 SD dan 28 SMP.

3. Program Pendidikan Non Formal

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 786.675.000,- dan realisasi Rp. 702.958.100,-(*unaudited*) melalui 5 (lima) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 9 indikator, sebanyak 9 indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.41 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.41 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pendidikan Non Formal

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pengembangan pendidikan keaksaraan	jumlah penduduk buta aksara lanjutan dan fasilitasi life skill	warga belajar	50	50	50
		Jumlah validasi warga belajar di dalam dapodik	persen	100	100	100
2	Fasilitasi penyelenggaraan ujian kesetaraan	Jumlah lembaga yang melaksanakan ujian kesetaraan sekolah	kegiatan	17	17	17
		Jumlah mata pelajaran ujian yang berkualitas	mata pelajaran	13	13	13
3	Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan paket A, B dan C	jumlah fasilitasi pembelajaran dan bantuan operasional siswa paket A,B,C	siswa	1.600	1.600	1600
		terciptanya data warga belajar yang valid	dokumen	1	1	1
4	Penanggulangan siswa putus sekolah/tidak sekolah	jumlah anak putus sekolah yang didampingi agar kembali ke sekolah	anak	50	50	50
		jumlah Pendampingan anak putus sekolah mendapatkan fasilitasi pendidikan lainnya	anak	50	50	50
5	Try out ujian nasional pendidikan kesetaraan	Jumlah lembaga kejar paket yang mengikuti ujicoba UNPK	lembaga	17	17	17

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

Target Indikator Output pada Pendidikan Non Formal tercapai seluruhnya dan pada Kegiatan Pengembangan Pendidikan Keaksaraan dapat memfasilitasi pembelajaran bagi penduduk buta aksara dasar sebanyak 102 warga belajar.

4. Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 18.573.222.000,- dan realisasi Rp. 18.219.100.400,-(*unaudited*) melalui 13 (tiga belas) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 27 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 27 indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.42 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.42 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah pelaksanaan desk pendataan & pemetaan PTK	kegiatan	2	2	2
		Jumlah dokumen bezetting PTK yang tersusun	dokumen	1	1	1
2	Fasilitasi peningkatan kinerja dan kesejahteraan GTT/PTT	Jumlah SMP/MTs swasta penerima bantuan Jasa Kinerja	SMP/MTs	20	20	20
		Jumlah SD/MI swasta penerima bantuan Jasa Kinerja	SD/MI	76	76	76
		jumlah PTK Non PNS penerima bantuan Harlindung	orang	1.870	1.870	1.880
3	Fasilitasi Pengembangan Profesi Guru	Jumlah pencetakan jurnal kependidikan	eksemplar	500	500	500
		Jumlah peserta sosialisasi jurnal kependidikan	orang	150	150	150
		Jumlah penerima bantuan bimbingan PTK/ PTBK	orang	15	15	15
4	Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi	Jumlah PTK PNS Dan Non PNS Penerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi S 2	orang	3	3	3
		Jumlah PTK PNS Dan Non PNS Penerima Bantuan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan S 1	orang	130	130	130
5	Fasilitasi peningkatan profesionalitas kepala sekolah	Jumlah kegiatan bintek peningkatan kualitas penerapan MBS di sekolah yang diadakan	kegiatan	1	1	1
6	Fasilitasi penilaian angka kredit guru dan tenaga kependidikan	Jumlah bulan fasilitasi PAK Pendidik dan Tenaga Kependidikan	bulan	12	12	12
7	Fasilitasi pemberdayaan organisasi / Kelompok PTK	Jumlah kegiatan fasilitasi MGMP mapel PAI dan PKN (pendidikan karakter) yang diselenggarakan	kegiatan	1	1	1
		Jumlah Kelompok Pemberdayaan Guru/PTK	Kelompok	3	3	3

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		yang terfasilitasi				
8	Fasilitasi seleksi calon kepala sekolah, pengawas sekolah, dan penilik	Jumlah kegiatan seleksi calon kepala sekolah/ pengawas/penilik	kegiatan	3	3	3
9	Pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk memenuhi standar kompetensi	Jumlah Peserta Bintek PTK	orang	100	100	100
		Jumlah Bimtek PTK yang diadakan	bimtek	2	2	2
10	Penyelenggaraan pemilihan pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi	jumlah cabang lomba PTK yang dipertandingkan	cabang lomba	8	8	8
		jumlah cabang lomba PTK ditingkat provinsi yang diikuti	cabang lomba	8	8	8
11	Penilaian kinerja kepala sekolah dan induksi guru pemula	Jumlah peserta sosialisasi Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	orang	50	50	50
		Jumlah peserta Pembekalan Induksi Guru Pemula	orang	151	151	151
12	Penyelenggaraan pembinaan disiplin PTK PNS	Jumlah peserta sosialisasi disiplin PTK	orang	107	107	107
13	Pelaksanaan sertifikasi dan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan sertifikasi pendidik	kegiatan	1	1	1
		Jumlah kegiatan sosialisasi dapodik	kegiatan	1	1	1
		Jumlah kegiatan sosialisasi pencairan TPG	kegiatan	1	1	1
		Jumlah pelaksanaan kegiatan desk sertifikasi	kegiatan	2	2	2

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

Pelaksanaan pada Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhasil dengan baik. Hal tersebut, dapat dilihat pada target Indikator Output yang tercapai.

5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 958.436.000,- dan realisasi Rp. 940.748.000,- (*unaudited*) melalui 8 (delapan) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 8 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 8 indikator telah tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.43 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.43 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana pembantuan	Jumlah aplikasi APBS yang dikembangkan	aplikasi	1	1	1
2	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Jumlah kegiatan penerapan sistem informasi manajemen pendidikan dan integrasi data	aplikasi	1	1	1
3	Penerbitan Tabloid Pendidikan	Jumlah penerbitan Majalah Pendidikan	edisi	2	2	2
4	Gebyar Kreasi dan Inovasi Pendidikan	Jumlah kegiatan gelar kreasi dan inovasi pendidikan	kegiatan	2	2	2
5	Fasilitasi Manajemen Pendataan Pendidikan (Dapodik)	Jumlah sekolah yang terfasilitasi pendataan pendidikan	sekolah	389	389	389
6	Fasilitasi Manajemen Pendataan Pendidikan (Dapodik) (Bantuan Provinsi)	jumlah sekolah yang difasilitasi pendataan pendidikan	sekolah	189	189	189
7	Fasilitasi penghitungan capaian standar pelayanan oendidikan dasar	Jumlah kegiatan Penghitungan capaian SPM yang difasilitasi	kegiatan	1	1	1
8	Fasilitasi penyusunan APBS	Jumlah SD dan SMP Negeri yang difasilitasi dalam menyusun APBS	sekolah	128	128	128

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

Target Indikator Output pada Program Manajemen Pelayanan Pendidikan tercapai seluruhnya. Selain itu, adanya Bantuan Provinsi pada Kegiatan fasilitasi manajemen pendataan pendidikan (Dapodik) dapat memfasilitasi pendataan profil sebanyak 189 sekolah.

6. Program Peningkatan Akses Terhadap Layanan Pendidikan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 136.000.000,- dan realisasi Rp. 123.068.750,-(*unaudited*) melalui 3 (tiga) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 4 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 3 indikator telah tercapai dan 1 indikator belum tercapai

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.44 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.44 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Akses Terhadap Layanan Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD	Jumlah SD penyedia layanan inklusi yang terfasilitasi	SD	4	4	4
2	Fasilitasi Pendidikan Inklusi SMP	jumlah SMP penyedia layanan inklusi yang terfasilitasi	SMP	2	2	1
3	Fasilitasi penyediaan beasiswa bagi siswa tidak mampu dan atau berprestasi	Jumlah siswa miskin di SD/MI yang belum masuk PIP yang mendapat beasiswa	persen	2	2	0
		Jumlah siswa miskin di SMP/MTs yang belum masuk PIP yang mendapat beasiswa	persen	2	2	0

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

Capaian Output jumlah SMP penyedia layanan Inklusi yang terfasilitasi belum mencapai target yaitu 1 sekolah dari 2 sekolah yang ditargetkan. Hal tersebut disebabkan belum selesainya proses perencanaan kebutuhan untuk sekolah penyedia layanan antara lain tenaga pengajar dan kesiapan sarana prasarannya. Direncanakan pada tahun 2020 target tersebut bisa terwujud.

Kegiatan Fasilitasi Penyediaan Beasiswa bagi Siswa tidak Mampu dan atau Berprestasi pada Tahun 2019 difokuskan pada capaian jumlah siswa berprestasi jenjang Dikdas penerima beasiswa sebanyak 3 orang dan jumlah dokumen daftar penerima beasiswa jenjang Dikmen sejumlah 1 dokumen. Sedangkan untuk indikator siswa miskin di SD atau MI yang belum masuk PIP yang mendapat beasiswa tidak ada, karena biaya pendidikan jenjang SD atau MI dan SPM/MTs seharusnya sudah digratiskan karena pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pendidikan sudah menyalurkan Dana Fasilitasi Operasional Sekolah (FOP) bagi sekolah negeri dan jasa kinerja (Jaskin) bagi sekolah swasta. Penyaluran jasa kinerja (Jaskin) kepada sekolah swasta disertai keharusan bagi sekolah tersebut untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin.

7. Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 22.757.917.000,- dan realisasi Rp. 22.519.792.789,- (*unaudited*) melalui 15 (lima belas) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 53 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 34 indikator telah tercapai dan 19 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.45 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.45 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pemenuhan kebutuhan ruang kelas Baru SD/MI	Jumlah Pembangunan Ruang Kelas SD	ruang	14	14	10
2	Pemenuhan Kebutuhan Ruang kelas Baru PAUD	Jumlah Pembangunan Ruang Kelas PAUD	ruang	7	7	7
3	Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung SD/MI	Jumlah Pembangunan Pagar SD Negeri	pekerjaan	8	8	8
		Jumlah Peninggian Halaman SD Negeri	pekerjaan	8	8	8
4	Pemenuhan Kelengkapan Sarana SMP/MTs	Jumlah Pengadaan Mebelair SMP Negeri	set	5	5	5
5	Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung SMP/MTs	Jumlah Pembangunan Kamar Mandi / WC SMP Negeri	Unit	2	2	2
		Jumlah Pembangunan Ruang Ketrampilan SMP Negeri	ruang	1	1	1
		Jumlah Rehab musholla SMP Negeri	ruang	1	1	1
		Jumlah pengadaan teralis SMP Negeri	ruang	1	1	0
		Jumlah Pembangunan Pagar SMP Negeri	pekerjaan	2	2	1
6	Pemenuhan Kelengkapan Sarana PAUD	Jumlah Pengadaan sarana dan Prasarana PAUD	paket	4	4	4
7	Pemenuhan kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung Sekolah PAUD	Jumlah Peninggian halaman PAUD	pekerjaan	2	2	2
		Jumlah Pembangunan Kamar Mandi / WC PAUD	Unit	2	2	2
		Jumlah Pembangunan Pagar PAUD	pekerjaan	2	2	2
8	Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah SD/MI	Jumlah Rehab Musholla SD Negeri	Unit	2	2	2
		Jumlah Rehab Ruang Kelas	ruang	11	11	15
		Jumlah Rehab Kamar Mandi / WC	Unit	2	2	20
		Jumlah Rehab Ruang Penunjang	ruang	2	2	1
9	Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah SMP/MTs	Jumlah taman SMP yang dibangun	pekerjaan	1	1	0
		Jumlah Rehab Musholla SMP Negeri	ruang	1	1	1
		Jumlah Rehab Ruang Pennjang SMP Negeri	ruang	3	1	1
		Jumlah Rehab Laboratorium SMP Negeri	ruang	2	2	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		Jumlah Rehab Pagar SMP Negeri	pekerjaan	1	1	1
10	Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah PAUD	Jumlah Rehab Ruang Belajar PAUD	pekerjaan	22	22	22
		Jumlah Rehab Bangunan PAUD	pekerjaan	0	0	0
		Jumlah Peninggian halaman PAUD	pekerjaan	0	0	0
11	Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar SD (DAK)	Jumlah Rehab Ruang Penunjang	ruang	2	2	3
		Jumlah Rehab Ruang Kelas	ruang	81	81	81
		Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru	ruang	24	0	0
		Jumlah Rehab Kamar Mandi / WC	Unit	48	48	51
12	Peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar SMP (DAK)	Jumlah Rehab Ruang Kelas SMP	ruang	11	11	4
		Jumlah Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP	ruang	4	4	2
		Jumlah Rehab Kamar Mandi / WC SMP	Unit	36	36	9
13	Peningkatan Kondisi sarana dan Prasarana Sekolah SD/MI (Bantuan Provinsi)	Jumlah ruang kelas yang direhab	ruang	6	6	4
14	Peningkatan sarana prasarana SKB/PAUD (DAK)	Jumlah PAUD/TK yang diadakan buku koleksi	PAUD/TK	3	3	0
		Jumlah ruang kelas yang direhab	Unit	3	3	2
		Jumlah APE PAUD/TK yang diadakan	set	3	3	0
15	Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung SD/MI (Bantuan Provinsi)	Jumlah kelengkapan alat TIK pembelajaran yang diadakan	Unit	15	15	15
		Jumlah laptop yang diadakan	Unit		76	72
		Jumlah printer yang diadakan	Unit		3	3
		Jumlah LCD yang diadakan	Unit		41	39
16	Pemenuhan Kelengkapan Prasarana Pembelajaran dan Pendukung SMP/MTs (Bantuan Provinsi)	Jumlah laptop yang diadakan	Unit		50	30
		Jumlah printer yang diadakan	Unit		10	6
		Jumlah LCD yang diadakan	Unit		40	24

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat sebanyak 22 indikator output tercapai 4 (empat) indikator output melebihi target dan sebanyak 17 (tujuh belas) target output tidak tercapai

karena adanya sekolah yang menerima bantuan dari dua sumber yang berbeda sehingga harus memilih salah satunya, dan adanya alokasi Bantuan Provinsi pada APBD 2019 yang ditetapkan pada akhir 2019, sehingga tidak cukup waktu untuk dilaksanakan 100%. Namun demikian, dalam rangka mendukung capaian indikator program dilakukan penambahan output yaitu 49 unit laptop, 1 unit, dan printer 1 unit. Selain itu pada Kegiatan pemenuhan kelengkapan prasarana pembelajaran dan pendukung SMP/MTs juga digunakan untuk pembangunan laboratorium sebanyak 1 ruang, rehab ruang guru 1 ruang, rehab ruang kelas 1 ruang, pavingisasi 1 pekerjaan dan pengadaan mebeulair 1 set.

8. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Dasar

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.115.000.000,- dan realisasi Rp. 1.056.948.100,- (*unaudited*) melalui 6 (enam) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 16 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 15 indikator telah tercapai dan 1 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.46 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.46 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pendidikan Dasar

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	Jumlah kegiatan sosialisasi akreditasi	kegiatan	1	1	1
		Jumlah kegiatan pemantapan hasil akreditasi	kegiatan	1	1	1
		Jumlah kegiatan monitoring akreditasi	kegiatan	1	1	1
2	Try out Ujian Nasional SD/MI/MTs/SMP	Jumlah kegiatan penyusunan kisi-kisi try out yang difasilitasi	kegiatan	1	1	1
		Jumlah kegiatan penyusunan soal try out yang difasilitasi	kegiatan	1	1	1
		Jumlah kegiatan try out yang difasilitasi	kegiatan	1	1	1
		Jumlah kegiatan koreksi LJK try out	kegiatan	1	1	1
3	Fasilitasi Penyelenggaraan UAS SD (Negeri/Swasta)	Jumlah kegiatan penyusunan kisi-kisi soal US yang difasilitasi	kegiatan	1	1	1
		Jumlah kegiatan penyusunan soal US yang difasilitasi	kegiatan	1	1	1
		Jumlah kegiatan pemindaian LJK US yang difasilitasi	kegiatan	1	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		Jumlah SD/MI penyelenggara US yang difasilitasi	SD/MI	146	146	146
4	Fasilitasi Penyelenggaraan UAS SMP (Negeri/Swasta)	Jumlah kegiatan penyusunan kisi-kisi soal US yang difasilitasi	kegiatan	1	1	1
		Jumlah kegiatan penyusunan soal US yang difasilitasi	kegiatan	1	1	1
		Jumlah SMP/MTs penyelenggara US yang difasilitasi	SMP/MTs	37	37	37
5	Penyelenggaraan UN dan US	Jumlah kegiatan UN dan UNPK yang difasilitasi	kegiatan	1	1	1
6	Optimalisasi komite sekolah	Jumlah sekolah peserta sosialisasi optimalisasi peran komite sekolah	sekolah	214	214	88

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

Indikator kegiatan optimalisasi komite sekolah tidak mencapai target karena mempertimbangkan efektifitas kegiatan sehingga diputuskan untuk mengurangi jumlah peserta hanya dari sekolah negeri.

9. Program Pembentukan Karakter Anak

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 800.000.000,- dan realisasi Rp. 788.176.784,- (*unaudited*) melalui 4 (empat) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 8 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 8 indikator telah tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.47 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.47 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pembentukan Karakter Anak

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan anak usia dini	jumlah PAUD yang menerapkan Kurikulum	Lembaga	25	25	25
2	Penyelenggaraan Lomba dan Apresiasi Jenjang PAUD	jumlah lomba gebyar kreasi anak	lomba	10	10	10
		lomba sekolah sehat	Lembaga	4	4	4
		jumlah lomba gugus paud	gugus	4	4	4
3	Fasilitasi penerapan model pendidikan karakter jenjang PAUD	Jumlah penerapan model karakter perwal ke lembaga	lembaga	50	50	0
		buku panduan paud	juklak	1	1	0

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
4	Fasilitasi keikutsertaan Lomba dan Apresiasi Jenjang PAUD	fasilitasi lomba tingkat provinsi pendidik berprestasi	orang	4	4	4
		fasilitasi lomba tingkat provinsi organisasi mitra	organisasi mitra	1	1	1

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

Indikator jumlah penerapan model karakter perwal ke lembaga dan buku panduan PAUD tidak mencapai target karena penyusunan Perwal tentang model pendidikan karakter masih dalam proses, sehingga belum bisa diterapkan. Akan tetapi, pada kegiatan fasilitasi penerapan model pendidikan karakter jenjang PAUD telah memfasilitasi layanan konseling pendidikan pada 92 sekolah dan penerapan model sekolah sahabat keluarga pada 4 TK Negeri.

10. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PAUD dan PNF

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 391.500.000,- dan realisasi Rp. 383.933.000,- (*unaudited*) melalui 5 (lima) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 8 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 8 indikator telah tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.48 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.48 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan PAUD dan PNF

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Penguatan kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah PAUD yang terfasilitasi	Lembaga	60	60	60
2	Pengembangan model PAUD Holistik Integratif	Jumlah lembaga yang terfasilitasi pengembangan PAUD Holistik Integratif	peserta	50	50	50
		Jumlah PAUD Inklusi yang terfasilitasi	Lembaga	4	4	4
3	Fasilitasi penguatan organisasi mitra PAUD	Jumlah terfasilitasinya organisasi mitra PAUD dan PNF	Lembaga	4	4	4
4	Penyelegaraan Akreditasi PAUD	Jumlah PAUD yang difasilitasi proses akreditasinya	Lembaga	60	60	60
		Jumlah PAUD peserta sosialisasi akreditasi	Lembaga	60	60	60
5	Penguatan kelembagaan pendidikan non formal	Jumlah link and match lulusan PNF dengan perusahaan	perusahaan	10	10	0
		fasilitasi promosi kelembagaan PNF pada masyarakat	lembaga	15	15	0

Sumber: Dinas Pendidikan, 2019

Terdapat dua indikator output pada kapasitas kelembagaan PAUD dan PNF yang belum mencapai target karena tidak dilaksanakan. Output tersebut tidak dilaksanakan karena menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Namun demikian, untuk mendukung capaian outcome program, maka Kegiatan Penguatan Pendidikan Non Formal diarahkan pada sosialisasi akreditasi LKP dengan peserta 15 lembaga dan sosialisasi kurikulum 13 pendidikan kesetaraan dengan peserta 10 PKBM.

11. Program Pembentukan Karakter Siswa

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 3.582.165.000,- dan realisasi Rp. 3.507.939.387,- (*unaudited*) melalui 5 (lima) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 9 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 9 indikator telah tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.49 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.49 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pembentukan Karakter Siswa

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Peningkatan Pembelajaran BTQ	Jumlah Siswa SD/MI yang berijazah BTQ	orang	3.100	3.100	3.100
		jumlah penerima bantuan transport	orang	1.200	1.200	1200
2	Penyusunan Kurikulum Muatan/Budaya Lokal Dikdas	Jumlah sekolah yang mendapatkan bantuan peralatan batik	buah	4	4	4
3	Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni	Jumlah jenis kompetisi jenjang SD/SMP Tk. Kecamatan yang difasilitasi	jenis kompetisi	5	5	5
		Jumlah jenis kompetisi jenjang SD/SMP Tk. Kota yang difasilitasi	jenis kompetisi	5	5	5
4	Fasilitasi keikutsertaan Lomba dan Apresiasi Siswa Dikdas	Fasilitasi lomba tingkat propinsi organisasi mitra	jenis kompetisi	5	5	5
		Fasilitasi lomba tingkat propinsi peserta berprestasi	jenis kompetisi	5	5	5
5	Fasilitasi kegiatan kepramukaan	Jumlah lomba dalam kegiatan pesta siaga tingkat kecamatan	lomba	7	7	7
		Jumlah lomba dalam kegiatan pesta siaga tingkat kota	lomba	7	7	7

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Masih adanya kesalahan penginputan indikator beserta targetnya sehingga hasil akhir yang didapat berbeda dengan indikator maupun targetnya.
- Belum digunakannya renstra sebagai dasar dalam merencanakan kegiatan.
- Adanya tambahan alokasi bantuan provinsi pada APBD perubahan di akhir tahun anggaran 2019 sehingga waktu yang tersedia untuk pelaksanaannya tidak cukup.

2. Solusi

- Dilakukan perumusan ulang untuk indikator-indikator yang sulit dihitung.
- Dilakukan proses verifikasi secara berjenjang pada saat penginputan indikator beserta targetnya.
- Menggunakan Renstra sebagai acuan dalam merencanakan kegiatan.
- Mengajukan usulan kepada pemerintah provinsi untuk percepatan penetapan APBD.
- Update informasi dan selalu mengecek perubahan pada aplikasi apabila mengajukan usulan perubahan.

3. Peluang

- Komitmen eksekutif dan legislatif dalam menggunakan dokumen perencanaan sebagai dasar dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan diharapkan mampu mewujudkan tercapaiannya tujuan pembangunan yang telah tercantum di dalam RPJMD.
- Pengembangan dan perbaikan secara terus menerus aplikasi e-simral diharapkan dapat mempermudah Pemerintah Kota Pekalongan dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan agar lebih terarah.



Rehab Pagar



Pengadaan Alat TIK Bankeu

Pengadaan Alat Pembelajaran PAUD

Supervisi satuan Pendidikan PAUD

Bintek Pendidikan Keluarga

Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Urusan Pendidikan

Sumber: Dinas Pendidikan, 2020

3.2.1.2. Kesehatan

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adanya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi Negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi Pembangunan Negara. Untuk itu setiap upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan kesehatan dalam arti pembangunan Nasional harus memperhatikan kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah, salah satunya dapat dilihat dari pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), di mana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain pendidikan dan pendapatan per kapita. Untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan UUD 1945 dan Undang- Undang

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pembangunan Kesehatan secara umum bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan indikator meningkatnya sumber daya manusia, meningkatnya kualitas hidup masyarakat, memperpanjang umur harapan hidup, meningkatnya kesejahteraan keluarga dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.

Visi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan yang telah diamanatkan oleh Walikota Pekalongan yaitu “Terwujudnya Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya berlandaskan nilai-nilai religiusitas”. Adapun misi dari Walikota Pekalongan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Pekalongan adalah “Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat”. Untuk melaksanakan visi dan misi di bidang Kesehatan yang diamanatkan oleh Pemerintah Kota Kota Pekalongan dan menjadi harapan masyarakat bukanlah hal yang mudah dan tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja, akan tetapi juga menjadi kewajiban seluruh masyarakat Kota Pekalongan dalam bentuk peran serta aktif dan konstruktif dalam pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kondisi kesehatan yang lebih baik.

Strategi yang ditempuh Kota Pekalongan dalam melaksanakan pembangunan kesehatan yaitu melalui peningkatan akses dan jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Guna meningkatkan jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, saat ini terdapat 14 Puskesmas (4 Puskesmas Rawat Inap dan 10 Puskesmas Rawat Jalan) , 27 Puskesmas Pembantu, 1 BKPM, 1 RSUD dan 8 RS Swasta.

Seiring dengan peningkatan akses dan jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, guna meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dilakukan penilaian Akreditasi Puskesmas. Sampai tahun 2019 sudah semua Puskesmas terakreditasi dengan Puskesmas terakreditasi Madya sebanyak 8 Puskesmas yaitu Puskesmas Kusuma Bangsa, Tirto, Tondano, Sokorejo, Pekalongan Selatan, Noyontaan, Buaran, Medono dan Puskesmas terakreditasi Utama sebanyak 6 Puskesmas yaitu Puskesmas Bendan, Kramatsari, Dukuh, Krapyak Kidul, Klego, Jenggot. Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD juga telah diterapkan di semua puskesmas mulai bulan Januari 2014 sehingga puskesmas lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan guna memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Prestasi yang diraih Dinas Kesehatan Kota Pekalongan pada tahun 2019 yaitu Juara III Pengelolaan Data Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 3.5 Penyerahan Piagam Pengelolaan Data Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Dengan pengelolaan data sumber daya manusia kesehatan yang baik, diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat.

Beberapa kegiatan inovasi atau unggulan Dinas Kesehatan pada tahun 2019 di antaranya :

- a. “Halo Lansia”, merupakan program inovasi Puskesmas Bendan yang bertujuan untuk memfasilitasi lansia dalam melakukan pendaftaran dan konsultasi gratis oleh dokter melalui SMS.
- b. “Duta Sanitasi”, merupakan program inovasi Puskesmas Tirto yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi lingkungan, dengan menugaskan duta sanitasi ke masyarakat.
- c. “Skreening Rajal”, merupakan program inovasi Puskesmas Kusuma Bangsa yang bertujuan untuk mengkategorikan gejala penyakit pasien apakah digolongkan ke dalam kegawat daruratan, keterbatasan fisik, atau penyakit yang mudah menular sehingga pasien harus diberikan masker, dengan mengisi ceklist pada lembar kriteria yang telah disediakan.
- d. “Pastu”(Prolanis Satu Pintu) adalah pelayanan *pasca prolanis* yang dimulai dari pendaftaran sampai dengan pemeriksaan di dalam satu tempat.
- e. “Bolo Sehat”, merupakan program inovasi Puskesmas Pekalongan Selatan, menggunakan *scan barcode* sebagai media digital untuk mengetahui dan menganalisa data kepuasan pelanggan.
- f. “Kejar Diskon”, merupakan program inovasi Puskesmas Jenggot, yaitu diskusi dan konsultasi masalah kesehatan yang akan dijawab langsung oleh dokter, bidan dan petugas kesehatan yang terkait melalui media *WhatsApp* (Wa).
- g. “Gernis (Gerakan Nikah Sehat)”, yaitu pemeriksaan calon pengantin sehat untuk mempersiapkan keluarga sehat (Test pemeriksaan kehamilan, Imunisasi TT dan penyuluhan) dan Gregek Berkat Terpadu (Gerakan Bersama Kader dan Gerakan Bersama Masyarakat mencari penderita TB Paru), yaitu kegiatan deteksi dini TBC oleh kader pemberian pot dahak pada terduga Tuberkulosis dan dilakukan pemeriksaan laboratorium di Puskesmas. Dua-duanya merupakan program inovasi Puskesmas Dukuh.
- h. “Inovasi Jogo Aseg” (Ojo Ngrok Awak Seger)”, merupakan program inovasi Puskesmas Sokorejo, inovasi di bidang UKM (pembuatan media promosi dan penyuluhan tentang bahaya merokok) dan UKP (Klinik Berhenti Merokok).
- i. “Gerthak Chinta” (Gerakan Serentak Cegah Hipertensi Kita), merupakan program inovasi Puskesmas Tondano, yang melibatkan semua elemen karyawan, masyarakat dan lintas sektor Puskesmas Tondano untuk pencegahan penyakit hipertensi melalui sosialisasi, membentuk kelas hipertensi melalui posyandu lansia dan monitoring tensi melalui KMS hipertensi.
- j. Inovasi “Timun Susu Tilang”, merupakan program inovasi Puskesmas Klego, yaitu pencarian suspek yang dilakukan di luar gedung dengan cara bekerja sama dengan pokja lain dan jejaring dan jaringan Puskesmas Klego.
- k. Inovasi “KPK” (Konsultasi Pernikahan dan Kehamilan), “Serasi” (Sertifikat ASI Eksklusif), “Kepo-In Bumil” (Kelompok Interaktif Ibu Hamil), “Ini Tumbeng Baba” (Interaksi Informasi Pertumbuhan dan Perkembangan Bayi Batita), “Gebbrak TB” (Gerakan Bersama Berantas Penyakit *Tuberculosis*), merupakan program-program inovasi Puskesmas Buaran.

- l. Google Map Puskesmas Krapyak Kidul, berisi informasi hasil pendataan PIS-PK berupa data IKS per RW, strata kesehatan, dan penanggung jawab per RW yang merupakan petugas Puskesmas Krapyak Kidul, , dapat diakses melalui bit.ly/petapispkkrapyak.
- m. “Jaga Paru-paru”, merupakan program inovasi Puskesmas Kramatsari, yaitu Penjaringan Keluarga dengan Resiko Penyakit Paru-paru.
- n. “Gemes Asik” (Gerakan Medono Sadar ASI Eksklusif), merupakan program inovasi Puskesmas Medono, dijadwalkan setiap hari Rabu di ruang laktasi.

Realisasi Indikator Kinerja Program

Penyelenggaraan urusan kesehatan di Kota Pekalongan dilaksanakan 11 (sebelas) program yakni Program Program Pengawasan Obat dan Makanan, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular, Program Pelayanan BLUD Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya, Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga, Program Kesehatan Keluarga, Program Jaminan Kesehatan, Program Peningkatan Sarana Prasarana, Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan obat asli Indonesia, Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan dan Program Manajemen Pelayanan Kesehatan, yang terdistribusi dalam 41 Indikator Kinerja Program, dengan realisasi sebanyak 24 indikator yang mencapai target, 17 indikator belum mencapai target.

RSUD Bendan melaksanakan 5 program, yaitu : Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata, Program Peningkatan Pelayanan BLUD, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak di Rumah Sakit, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan. Program-program tersebut terdistribusi dalam 9 Indikator Kinerja Program, dengan realisasi sebanyak 7 indikator yang mencapai target dan 2 indikator belum mencapai target.

1. Program Pengawasan Obat Dan Makanan

Program Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu program di Dinas Kesehatan Kota Pekalongan yang berfungsi untuk:

- a. Meningkatkan mutu dan pengawasan pelayanan kefarmasian
- b. Mewujudkan pangan yang aman, bebas dari cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta menjamin kualitas mutu dan gizi produk pangan tersebut

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.50 Target dan Capaian Indikator Program Pengawasan Obat Dan Makanan

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar	90,00	persen	75	88,70
2	Persentase temuan makanan berbahaya	4,00	persen	16,59	4,56

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Dari dua indikator Program Pengawasan Obat dan Makanan ada satu indikator yang belum memenuhi target RPJMD yaitu indikator Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang memenuhi standar. Hal ini dikarenakan masih ada sarana pelayanan kefarmasian yang belum memenuhi standar pelayanan kefarmasian, sehingga perlu adanya peningkatan pengawasan, pembinaan dan sosialisasi di sarana pelayanan kefarmasian agar sesuai standar.

2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan status gizi masyarakat secara optimal, sehingga dapat meningkatkan intelektualitas dan produktivitas sumber daya manusia.

Program ini diukur dengan 3 (tiga) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.51 Target dan Capaian Indikator Program Perbaikan Gizi Masyarakat

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Persentase kasus balita gizi buruk	0,05	persen	0,08	0,05
2	Persentase ibu hamil KEK	13,60	persen	14,14	13,33
3	Persentase bayi usia < 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif	45,00	persen	51,55	57,20

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

3. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan bertujuan merupakan upaya untuk mencukupi dan meningkatkan kualitas sarana prasarana kesehatan maupun penunjangnya baik melalui pengadaan maupun pemeliharaan agar sesuai standar. Program ini diukur dengan 3 (tiga) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.52 Target dan Capaian Indikator Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Persentase puskesmas yang terakreditasi minimal utama	35,00	persen	14,2	42,86
2	Persentase RS yang terakreditasi minimal utama	75,00	persen	37,5	55,56

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Dari dua indikator Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan ada satu indikator yang belum memenuhi target RPJMD yaitu indikator Persentase RS yang terakreditasi minimal utama. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa RS yang sarana dan prasarana belum memenuhi standar (Permenkes No. 30 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi dan Perizinan Rumah Sakit). Adapun Rumah Sakit yang telah terakreditasi minimal utama adalah RSUD Bendan, RS Siti Khodijah, RS Anugerah, RS Budi Rahayu, RS HA ZakyDjunaid.

4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular bertujuan untuk mencegah berjangkitnya penyakit, menurunkan angka kesakitan dan

angka kematian serta mengurangi dampak atau akibat buruk penyakit, baik menular maupun tidak menular dengan prioritas utama diberikan kepada bayi, anak balita dan ibu-ibu serta kelompok usia kerja.

Program ini diukur dengan 8 (delapan) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.53 Target dan Capaian Indikator Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Angka Kesakitan DBD per 10.000 penduduk	-2,00	indeks	1,12	1,82
2	Cakupan pelayanan penderita TB (SPM)	100,00	persen	100,00	100,00
3	Cakupan pelayanan penderita HIV AIDS (SPM)	100,00	persen	113,81	100,00
4	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi	97,00	persen	93,83	93,89
5	Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi (SPM)	100,00	persen	100,00	29,91
6	Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif (SPM)	100,00	persen	89,24	16,69
7	Cakupan pelayanan kesehatan Diabetes Melitus (SPM)	100,00	persen	100,00	96,34
8	Cakupan pelayanan Kesehatan Jiwa (SPM)	100,00	persen	100,00	69,68

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Dari delapan indikator Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular ada enam indikator yang belum memenuhi target RPJMD yaitu :

1. Indikator Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada bayi belum memenuhi target RPJMD dikarenakan masih adanya orang tua yang menolak anaknya untuk diimunisasi dan ada beberapa vaksin yang sering kosong dari pusatnya berupa vaksin Ipv dan polio, sehingga mengakibatkan belum tercapainya target cakupan imunisasi dasar lengkap.
2. Indikator Cakupan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi (SPM) belum memenuhi target RPJMD dikarenakan ada perubahan penghitungan estimasi penderita hipertensi yang ditentukan dari Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil prevalensi hipertensi Riskesdas tahun 2013, yang semula 6% dikalikan jumlah penduduk ≥ 15 th menjadi 32,2% dikalikan jumlah penduduk ≥ 15 th sehingga menyebabkan sasarannya terlalu tinggi.
3. Penentuan estimasi sasaran sudah ditentukan dari Pusat berdasarkan Indikator Cakupan pelayanan kesehatan usia produktif (SPM) belum memenuhi target RPJMD dikarenakan bahan Pemeriksaan untuk usia produktif terutama untuk test gula darah belum mencukupi dengan sasaran yang ditargetkan.
4. Indikator Cakupan pelayanan kesehatan Diabetes Mellitus (SPM) belum memenuhi target RPJMD dikarenakan ada perubahan penghitungan estimasi penderita Diabetes Mellitus yang ditentukan dari Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil prevalensi hipertensi Riskesdas tahun 2013, yang semula 2,1% dikalikan jumlah penduduk ≥ 15 th menjadi 2,7% dikalikan jumlah penduduk ≥ 15 th.
5. Indikator Cakupan pelayanan Kesehatan Jiwa (SPM) belum memenuhi target RPJMD dikarenakan ada perubahan penghitungan sasaran Pelayanan Kesehatan ODGJ yang ditentukan dari Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil prevalensi hipertensi Riskesdas

tahun 2013, yang semula jumlah penderita ODGJ yang ditemukan menjadi 8,51/1.000 dikalikan jumlah KK sehingga menyebabkan sasarannya terlalu tinggi.

5. Program Pelayanan BLUD Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya

Program Pelayanan BLUD Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya merupakan upaya agar puskesmas lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan guna memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Program ini diukur dengan 3 (tiga) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.54 Target dan Capaian Indikator
Program Pelayanan BLUD Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Tingkat kemandirian BLUD Puskesmas	43,00	persen	99,50	103,32
2	Tingkat kemandirian BLUD BKPM	25,00	persen	91,90	97,43
3	Tingkat kemandirian BLUD PSPJ	18,00	persen	168,22	99,47

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Dengan adanya pencapaian tingkat kemandirian BLUD Puskesmas yang lebih dari 100%, artinya BLUD Puskesmas sudah mandiri untuk membiayai belanja operasional Puskesmas sendiri, jadi subsidi APBD II sudah tidak diperlukan lagi, bisa dialihkan untuk program kegiatan lainnya terutama untuk pencapaian SPM.

6. Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga

Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan pekerja baik yang bekerja di sektor formal maupun non formal serta untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan lingkungan.

Program ini diukur dengan 5 (lima) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.55 Target dan Capaian Indikator
Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Cakupan Kelurahan Open Defecation Free (ODF)	51,58	persen	48,15	77,78
2	Persentase kualitas air minum di penyelenggaraan air minum	79,00	persen	65,52	82,99
3	Persentase Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan	94,00	persen	90,69	92,10
4	Persentase Pembinaan kesehatan kerja pada pekerja sektor formal dan informal	35,00	persen	30,00	41,37
5	Persentase pembinaan kesehatan olah raga pada anak SD	30,00	persen	-	33,33

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Dari lima indikator Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga ada satu indikator yang belum memenuhi target RPJMD yaitu Indikator Persentase

Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan. Hal ini dikarenakan belum semua Tempat Pengolahan Makanan (TPM) memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi. Untuk TPM yang sudah memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi ada. 606 TPM dan yang belum sebanyak 52 TPM.

Untuk cakupan Kelurahan *Open Defecation Free* (ODF) tahun 2018 sebanyak 13 Kelurahan di antaranya Medono, Podosugih, Kauman, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Noyontaansari, Poncol, Klego, Kandang Panjang, Kuripan Kertoharjo, Banyurip, Buaran Kradenan, Kuripan Yosorejo dan tahun 2019 sebanyak 7 kelurahan meliputi Tirto, Pringrejo, Pasirkratonkramat, Kalibaros, Panjang Baru, Bandengan, Jenggot, Sokoduwet. Adapun kelurahan yang belum mencapai ODF adalah sebanyak 6 kelurahan yaitu Panjang Wetan, Krapyak, Degayu, Padukuhan Kraton, Gamer dan Setono. Harapannya program ODF bisa dituntaskan di tahun 2020.

Untuk indikator persentase pembinaan kesehatan olah raga pada anak SD tahun 2018 belum bisa dihitung dikarenakan kegiatan ini baru dilaksanakan di tahun 2019.

7. Program Kesehatan Keluarga

Program Kesehatan Kerja bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan pada ibu, anak, balita, remaja dan lansia.

Program ini diukur dengan 5 (lima) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.56 Target dan Capaian Indikator Program Kesehatan Keluarga

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	100,00	Persen	97,83	97,73
2	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin (SPM)	100,00	Persen	100,00	100,00
3	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM)	100,00	Persen	99,04	99,88
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita (SPM)	100,00	Persen	95,40	94,81
5	Cakupan pelayanan kesehatan pada remaja	100,00	Persen	100,00	100,00
6	Cakupan pelayanan kesehatan lansia (SPM)	100,00	Persen	100,00	100,00

Sumber: Dinas kesehatan, 2020

Dari enam indikator Program Kesehatan Keluarga ada tiga indikator yang belum memenuhi target RPJMD yaitu :

- a. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM) belum memenuhi target RPJMD maupuntarget SPM dikarenakan :
 - Ada beberapa ibu hamil yang pindah domisili ke luar Kota Pekalongan
 - Ada beberapa ibu hamil yang mengalami persalinan premature
 - Ada beberapa ibu hamil yang mengalami keguguran
- b. Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (SPM) belum memenuhi target RPJMD maupuntarget SPM dikarenakan adanya kematian bayi

- c. Cakupan pelayanan kesehatan balita (SPM) belum memenuhi target RPJMD maupun target SPM dikarenakan adanya kematian balita dan ada beberapa balita yang pindah domisili ke luar Kota Pekalongan

8. Program Jaminan Kesehatan

Program Jaminan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.57 Target dan Capaian Indikator Program Jaminan Kesehatan

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Cakupan penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan	90	persen	79,47	80,08

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Jumlah penduduk Kota Pekalongan yang memiliki Jaminan Kesehatan sampai akhir tahun 2019 baru mencapai 80,08 % atau 250.865 jiwa, yang terdiri dari PBI APBN sebanyak 79.933 jiwa, PBI APBD sebanyak 70.863 jiwa, Pekerja Penerima Upah sebanyak 56,424 jiwa, Pekerja Mandiri sebanyak 36.360 jiwa dan Bukan Pekerja sebanyak 7.285 jiwa. Indikator Program Jaminan Kesehatan belum memenuhi target RPJMD dikarenakan masih kurangnya kesadaran penduduk Kota Pekalongan untuk mendaftarkan dirinya sebagai peserta program JKN-KIS mandiri.

9. Program Peningkatan Sarana Prasarana, Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan obat asli Indonesia

Program Peningkatan Sarana Prasarana, Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan obat asli Indonesia bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat termasuk Obat Asli Indonesia dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, Obat Asli Indonesia, makanan dan perbekalan kesehatan.

Program ini diukur dengan 4 (empat) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.58 Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Sarana Prasarana, Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan obat asli Indonesia

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Persentase prasarana puskesmas yang memenuhi standar puskesmas	90,00	persen	100,00	100,00
2	Persentase ketersediaan obat di Puskesmas dan BKPM	100,00	persen	100,00	94,61
3	Persentase peningkatan jumlah produksi Obat Asli Indonesia	14,00	persen	14,00	27,00
4	Persentase peningkatan jumlah varian produk obat asli Indonesia	14,00	persen	14,00	15,56

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Dari empat indikator Program Peningkatan Sarana Prasarana, Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan obat asli Indonesia ada satu indikator yang belum memenuhi target RPJMD yaitu Persentase ketersediaan obat di Puskesmas dan BKPM. Hal ini dikarenakan jumlah pengadaan beberapa item obat tidak sesuai dengan rekap kebutuhan seluruh Puskesmas.

10. Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan

Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan bertujuan untuk meningkatkan upaya promosi kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media penyuluhan, meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Program ini diukur dengan 4 (empat) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.59 Target dan Capaian Indikator
Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Cakupan posyandu strata mandiri	28,00	persen	22,98	24,33
2	Cakupan Kelurahan siaga aktif strata mandiri	22,22	kelurahan	18,52	29,63
3	Cakupan rumah tangga sehat	95,00	persen	96,34	94,60
4	Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (SPM)	100,00	persen	100,00	99,29

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Dari empat indikator Program Kesehatan Keluarga, Indikator cakupan kelurahan siaga aktif strata mandiri telah memenuhi target yang ditetapkan RPMJD, dengan terpenuhinya 8 dari 27 kelurahan telah menjadi kelurahan siaga aktif strata mandiri, antara lain :

- a. Kelurahan Tirto
- b. Kelurahan Sapuro Kebulen
- c. Kelurahan Kandang Panjang
- d. Kelurahan Gamer
- e. Kelurahan Setono
- f. Kelurahan Kalibaros
- g. Kelurahan Kauman
- h. Kelurahan Pasir Kraton Kramat

Adapun tiga indikator lainnya belum memenuhi target RPJMD yaitu :

- a. Indikator Cakupan posyandu strata mandiri belum mencapai target RPJMD dikarenakan
 - Ada Posyandu yang belum tertib administrasinya
 - Ada Posyandu yang sarana dan prasarananya kurang
 - Partisipasi masyarakat untuk membawa balitanya ke Posyandu masih kurang
- b. Indikator Cakupan rumah tangga sehat belum mencapai target RPJMD dikarenakan banyak syarat rumah tangga sehat yang belum terpenuhinya misalnya kurangnya cakupan ASI Eksklusif, adanya pola hidup tidak sehat seperti kebiasaan merokok.

- c. Indikator Cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar (SPM) belum mencapai target RPJMD dikarenakan pada saat pemeriksaan kesehatan pada usia Pendidikan Dasar ada siswa yang tidak masuk sekolah. Langkah upaya yang sudah dilaksanakan Dinas Kesehatan adalah dengan melaksanakan kunjungan ulang/sweeping.

11. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan

Program Manajemen Pelayanan Kesehatan merupakan meningkatkan sistem administrasi kesehatan (SIK) yang akurat, tepat waktu, lengkap dan sesuai kebutuhan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan, penggerakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program kesehatan di semua tingkat administrasi kesehatan.

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.60 Target dan Capaian Indikator Program Manajemen Pelayanan Kesehatan

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan yang dibutuhkan	100,00	Persen	100,00	100,00
2	Persentase satuan kesehatan yang terfasilitasi peningkatan kapasitas manajemen	100,00	persen	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kesehatan, 2020

Selain meliputi pelayanan kesehatan dasar Pemerintah Kota Pekalongan juga menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Tugas Dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Rumah Sakit Umum Daerah Benda Kota Pekalongan adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

RSUD Benda Kota Pekalongan adalah rumah sakit milik Pemerintah Kota Pekalongan Provinsi Jawa Tengah Tipe C berdasarkan Kepmenkes Nomor 534/MENKES/SK/V/2010 yang memiliki misi memberikan pelayanan rujukan yang bermutu dan terjangkau sesuai standar profesi. Sumber daya manusia (SDM) yang ada di RSUD Benda berjumlah 603 orang terdiri dari tenaga medis, paramedis, dan non medis dengan status kepegawaian PNS dan Non PNS (Tenaga BLUD).

Pelayanan yang diberikan di RSUD Benda meliputi IGD dan PONEK, pelayanan rawat inap yang terdiri dari ruang Jlamprang untuk kelas III penyakit bedah, Buketan untuk kelas III penyakit dalam, Truntum untuk kelas I, Sekar Jagad untuk kelas I, II, dan III anak, Terang Bulan untuk VIP, ICU/ICCU/PICU/NICU, Nifas, dan Perinatologi.

Tabel 3.61 Jumlah Tempat Tidur Ruang Perawatan pada RSUD Benda

No	Nama Ruang	Jumlah Tempat Tidur					
		VVIP	VIP	I	II	III	Khusus
1.	Terang Bulan	1	10	-	-	-	-
2.	Truntum	-	-	29	-	-	1
3.	Sekarjagad	-	-	8	8	30	3
4.	Jlamprang	-	-	-	16	24	9
5.	Buketan	-	-	-	6	42	-

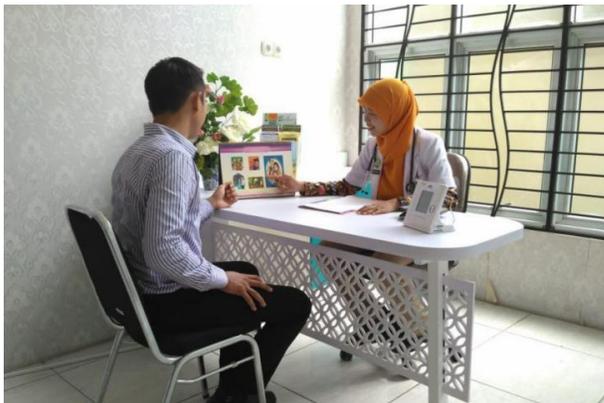
No	Nama Ruang	Jumlah Tempat Tidur					
		VVIP	VIP	I	II	III	Khusus
6.	Nifas	-	1	2	4	11	-
7.	ICU/ICCU	6					
8.	PICU	2					
9.	NICU	2					
10.	Perinatologi	18					
Total		233					

Sumber: RSUD Bendan Kota Pekalongan, 2020

Pelayanan rawat jalan meliputi pelayanan Poliklinik Spesialis/Sub-Spesialis yang terdiri dari Klinik Spesialis Anak, Bedah Umum, Bedah Orthopedi, Bedah Syaraf, Bedah Digestive, Bedah Mulut, Penyakit Dalam, Kebidanan & Kandungan, Mata, Syaraf, THT, Kesehatan Jiwa, Jantung, Kulit dan Kelamin, serta VCT DOTS. Sedangkan pelayanan lainnya meliputi pelayanan Instalasi Bedah Sentral (IBS), Laboratorium, BDRS, Radiologi, Cathlab, Hemodialisa, Rekam Medik, Rehabilitasi Medik, Pelayanan Psikologi, Farmasi 24 jam, Gizi, CSSD, IPSRS, Pelayanan Ambulans dan Pelayanan Pemulasaraan Jenazah.

Pelayanan unggulan di RSUD Bendan di antaranya adalah Klinik Spesialis Mata, Orthopedi, Rehab Medik dan Jantung. Sedangkan pelayanan yang dirujuk meliputi pelayanan rawat inap pasien dengan gangguan jiwa dan pasien penyalahgunaan narkoba.

Pada tahun 2019 RSUD Bendan menambahkan beberapa layanan untuk semakin meningkatkan pelayanan rujukan, di antaranya adalah Poliklinik Eksekutif Parikesit, *Medical Check Up* (MCU), Klinik Spesialis Kulit dan Kelamin, layanan sore hari untuk Klinik Spesialis Kebidanan dan Kandungan, laboratorium TCM serta kateterisasi jantung (*Cathlab*). Poliklinik Eksekutif Parikesit disediakan bagi pasien yang membutuhkan layanan rawat jalan lebih.



Gambar 3.6 Layanan Poliklinik Eksekutif dan *Cathlab*

Sumber: RSUD Bendan Kota Pekalongan, 2020

MCU merupakan layanan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu dengan pelayanan. Paket MCU terdiri dari paket Surat Keterangan Sehat, MCU umum, dan MCU untuk calon pekerja perusahaan, pegawai/karyawan perusahaan swasta maupun kedinasan, calon jamaah haji/umroh, TKHI dan lainnya.

Klinik Kulit dan Kelamin dibuka kembali di tahun 2019 setelah sebelumnya kosong dikarenakan dokter yang menangani mutasi ke daerah lain. Sedangkan pelayanan Klinik Kebidanan dan Kandungan di sore hari disediakan untuk mempermudah akses pelayanan.

TCM dilakukan untuk mempermudah dalam penegakan diagnosis cepat kasus TBC dan TB-MDR, menggantikan prosedur sebelumnya. Sedangkan *Cathlab* merupakan sarana untuk penegakan diagnosis dan tindakan pada penyakit jantung koroner.

Penambahan layanan di atas didukung pula dengan perbaikan dan pengembangan sistem layanan yang semakin mempermudah pasien dalam mengakses pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Bendan. Setelah di tahun 2018 dikeluarkan Pendaftaran *On Line* (Pentol) dan Anjungan Pendaftaran Mandiri (Apem), di tahun 2019 sistem layanan dilengkapi dengan munculnya Anjungan Cetak SEP Mandiri (ASEP), Bendan *Mobile* (Bemo) dan Sistem Integrasi Pembayaran untuk Pelayanan (Si Ipul).

ASEP akan mempersingkat proses pendaftaran rawat jalan melalui Pentol. Si Ipul memudahkan pasien untuk melakukan berbagai macam pembayaran seperti iuran BPJS dan pembayaran lainnya. Aplikasi Bendan Mobile merupakan aplikasi android yang dapat diunduh melalui *playstore*. Pasien yang sudah memiliki nomer rekam medis dapat melakukan aktivasi Bendan *Mobile*. Tersedia fitur pendaftaran, riwayat berobat, jadwal dokter, dan fitur-fitur lain yang memudahkan pasien mengakses layanan-layanan yang ada di RSUD Bendan.



Gambar 3.7 Aplikasi Bendan Mobile RSUD Bendan

Sumber: RSUD Bendan Kota Pekalongan, 2020

Peningkatan dan perbaikan pelayanan di RSUD Bendan bisa ditunjukkan dengan dianugerahkannya beberapa penghargaan di tahun 2019. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara memberikan 2 penghargaan yaitu “Top 10 Unit Pelaksana Pelayanan” dan “*Role Model* Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan Kategori Sangat Baik (A-)”. Selain itu BPJS juga memberikan 2 penghargaan kepada RSUD, yaitu sebagai “Rumah Sakit dengan Komitmen Tinggi dalam Memberikan Pelayanan Terbaik Bagi Peserta JKN KIS Kategori Kelas C” dan “Rumah Sakit Terinovasi dalam Pelayanan”.

Di tingkat Kota Pekalongan RSUD Bendan mendapat penghargaan dari Walikota Pekalongan dalam Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan

predikat terbaik Memuaskan (A), Juara I Lomba PPID (Pameran dan Pekan Informasi Daerah), Juara I stan terbaik pada Pameran Inovasi dan Kreativitas Kota Pekalongan.



Gambar 3.8 Penghargaan-penghargaan yang diterima RSUD Bendan di Tahun 2019

Sumber: RSUD Bendan Kota Pekalongan, 2020

12. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata ditujukan untuk pemenuhan sarana prasarana pelayanan kesehatan rujukan yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit. Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Berdasarkan peraturan tersebut, sarana prasarana yang harus dipenuhi oleh rumah sakit kelas C antara lain :

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Bangunan/Ruang Gawat Darurat | Sarana Prasarana |
| 2. Bangunan/Ruang Rawat Jalan | 13. Bangunan/Ruang Pengelolaan Limbah |
| 3. Bangunan/Ruang Rawat Inap | 14. Ruang Sterilisasi |
| 4. Bangunan/Ruang Bedah | 15. Bangunan/Ruang Laundry |
| 5. Bangunan/Ruang Rawat Intensif | 16. Bangunan/Ruang Pemulasaraan Jenazah |
| 6. Bangunan/Ruang Isolasi | 17. Bangunan/Ruang Administrasi |
| 7. Bangunan/Ruang Radiologi | 18. Bangunan/Ruang Gudang |
| 8. Bangunan/Ruang Laboratorium Klinik | 19. Bangunan/Ruang Sanitasi |
| 9. Bangunan/Ruang Farmasi | 20. Bangunan/Rumah Dinas Asrama |
| 10. Bangunan/Ruang Gizi | 21. Ambulans |
| 11. Bangunan/Ruang Rehabilitasi Medik | 22. Ruang Komite Medis |
| 12. Bangunan/Ruang Pemeliharaan | 23. Ruang PKMRS |

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 24. Ruang Pertemuan | 29. Limbah Cair |
| 25. Sistem Informasi Rumah Sakit | 30. Limbah Padat |
| 26. Listrik | 31. Penanganan Kebakaran |
| 27. Air | 32. Perangkat Komunikasi (24 Jam) |
| 28. Gas Medis | 33. Tempat Tidur |

Di tahun 2019 sarana prasarana pelayanan kesehatan di RSUD Bendan sudah memenuhi 32 dari 33 yang dipersyaratkan, atau mencapai 96,97 %. Di antara sarana dan prasarana yang belum tersedia yaitu bangunan/rumah dinas asrama. Pembangunan gedung asrama kesehatan sudah dilaksanakan pada tahun 2019, hanya saja prasarana lainnya belum dilengkapi. Rencananya akan dilengkapi dan difungsikan di awal tahun 2020. Walaupun demikian jika dibandingkan dengan target indikator program sebesar 95%, capaian di tahun 2019 sudah memenuhi target.

**Tabel 3.62 Target dan Capaian Indikator
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
RSUD Bendan					
1	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan RS	95	Persen	90,70	96,97

Sumber: RSUD Bendan Kota Pekalongan 2020

13. Program Peningkatan Pelayanan BLUD

RSUD Bendan Kota Pekalongan menerapkan sistem BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dalam pengelolaan keuangannya. Berbeda dengan OPD pada umumnya, pola pengelolaan keuangan BLUD memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.63 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Pelayanan BLUD**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
RSUD Bendan					
1	Rata-rata waktu tunggu pelayanan obat jadi kurang dari sama dengan 30 menit	≤30	menit	29	28,38
2	Rata-rata waktu tunggu pelayanan obat racikan kurang dari sama dengan 60 menit	≤60	menit	49	48,39

Sumber: RSUD Bendan Kota Pekalongan 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa capaian indikator Program Peningkatan Pelayanan BLUD meliputi :

1. Rata-rata waktu tunggu pelayanan obat jadi, kurang dari atau sama dengan 30 menit. Pada tahun 2019 capaiannya adalah 28,38 menit, hal tersebut dapat diartikan bahwa capaian indikator melebihi target 2019 yang telah ditetapkan.
2. Rata-rata waktu tunggu pelayanan obat racikan, kurang dari atau sama dengan 60 menit. Di tahun 2019 capaian RSUD Bendan sebesar 48,39 menit, angka tersebut menunjukkan bahwa capaian indikator melebihi target.

Diharapkan dengan terpenuhinya target program peningkatan pelayanan BLUD ini, akan lebih meningkatkan kompetensi tenaga kefarmasian di RSUD Bendan Kota Pekalongan.

14. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak di Rumah Sakit

Program ini diharapkan dapat turut serta dalam upaya pemerintah menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Bayi (AKB). Secara teknis di RSUD Bendan dilaksanakan oleh Unit PONEK. Untuk mendukung upaya meminimalkan kematian ibu dan bayi baru lahir, RSUD Bendan telah bergabung dalam Program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS).

Program ini diukur dengan 4 (empat) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.64 Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak di Rumah Sakit

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
RSUD Bendan					
1	Persentase penanganan BBLR 1500 gr - 2500 gr	98	persen	94,28	93,18
2	persentase kematian ibu bersalin yang disebabkan oleh pendarahan kurang dari	≤ 1	persen	0	4,29
3	persentase kematian ibu bersalin yang disebabkan oleh pre eklampsia kurang dari	≤ 30	persen	0	0,5
4	persentase kematian ibu bersalin yang disebabkan oleh sepsis kurang dari	≤ 0,2	persen	0	0

Sumber: RSUD Bendan Kota Pekalongan 2020

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari 4 indikator program yang dijalankan 2 diantaranya tidak mencapai target yang telah ditetapkan di tahun 2019, yaitu :

1. Persentase penanganan BBLR 1500-2500 gr

Di tahun 2019 RSUD Bendan menangani 220 pasien BBLR, 205 (93,18% dari target 98%) dapat tertangani dengan baik, sedangkan 15 (6,82%) meninggal dunia. BBLR yang meninggal dunia disebabkan oleh usia gestasi terlalu muda (27-30 minggu), bayi rujukan saat masuk kondisi terlalu buruk, diagnosa dengan asfiksia berat, kelainan kongenital, dan adanya diagnosa tambahan yang memperburuk kondisi. Dengan peralatan NICU yang lebih lengkap dibandingkan rumah sakit sekitar, RSUD Bendan menjadi rujukan pasien BBLR berat di wilayah Pekalongan.

2. Persentase kematian ibu bersalin yang disebabkan oleh perdarahan

Selama tahun 2019 RSUD Bendan menangani 70 pasien perdarahan, 67 pasien (95,72%) dapat tertangani dengan baik. Sedangkan 3 (4,28% dari target $\leq 1\%$) meninggal dunia. Kematian tersebut disebabkan oleh gangguan pembekuan darah (1 pasien), plasenta previa totalis dengan bekas sectio caesaria 2 kali (1 pasien), dan 1 kasus disebabkan pendarahan *post partum ec atonia sekunder, ec laserasi portio dan vagina syok hipovolemik grade IV*. Walaupun telah dilakukan penanganan pasien sesuai SPO, tetap tidak tertolong.

15. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.65 Target dan Capaian Indikator Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
RSUD Bendan					
1	Skor Akreditasi RS	terakreditasi SNARS	skor	terakreditasi	terakreditasi SNARS

Sumber: RSUD Bendan Kota Pekalongan, 2020

Pada bulan Juli 2019 telah dilaksanakan resurvei akreditasi oleh KARS pada. Hasil dari resurvei tersebut, RSUD Bendan berhasil mempertahankan predikat akreditasi “Paripurna”.

16. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan

Pelayanan keperawatan merupakan ujung tombak utama pelayanan kesehatan di rumah sakit dan merupakan cermin utama dari keberhasilan pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Pelayanan keperawatan yang bermutu tinggi harus dilaksanakan oleh tenaga keperawatan professional dengan cara yang professional juga. Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.66 Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
RSUD					
1	Persentase perawat yang bersertifikasi BTCLS (basic trauma cardiac life saving) dan bidan yang bersertifikasi PPGDON (penanganan penderita gawat darurat obstetry	100	persen	100	100

Sumber: RSUD Bendan Kota Pekalongan, 2020

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa di tahun 2019 RSUD Bendan telah 100% mencapai target, hal tersebut diharapkan bahwa tenaga perawat maupun bidan seluruhnya di RSUD Bendan mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan di RSUD Bendan pada khususnya sehingga tercipta pelayanan rumah sakit yang semakin baik pada umumnya.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengawasan Obat dan Makanan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 331.000.000,- dan realisasi Rp. 307.009.872,- (92,75%) melalui 2 Kegiatan dengan indikator output sebanyak 3 indikator melalui kegiatan di Dinas Kesehatan. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 2 indikator tercapai dan 1 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai adalah indikator Jumlah toko, supermarket, pasar dan sekolah tingkat lanjut yang dilakukan pengawasan makanan minuman, hal ini dikarenakan terdapat keterlambatan pengadaan bahan untuk pemeriksaan sampel sehingga belum semua lokasi yang ditargetkan dapat dilakukan pemeriksaan bahan berbahaya.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.67 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.67 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengawasan Obat dan Makanan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya	Jumlah toko,supermarket, pasar dan sekolah tingkat lanjut yang dilakukan pengawasan makanan minuman	lokasi	488	488	455
2	Peningkatan mutu pelayanan farmasi	Jumlah kegiatan pemusnahan obat yang dilaksanakan	Pekerjaan	0	1	1
		Jumlah sarana pelayanan kesehatan dilakukan pembinaan	lokasi	85	85	85

Sumber:Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

Program Pengawasan Obat dan Makanan terdiri dari

1. Kegiatan Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pengawasan keamanan pangan khususnya jajanan anak sekolah dan jajan makanan takjil dengan melakukan pengujian terhadap kandungan bahan dilarang (Rhodamin B, Methanil Yellow, Formalin dan Boraks) secara random sampling di TPQ, SD/MI, SMP dan SMA Se-Kota Pekalongan.
 - b. Mensosialisasikan hasil pemeriksaan dan keamanan pangan kepada siswa, pihak sekolah, dan pengelola kantin sekolah.
 - c. Meningkatkan pengetahuan pengusaha pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) sehingga mampu menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu.
 - d. Menumbuhkan kesadaran dan motivasi produsen dan karyawan tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis dan bertanggung jawab terhadap keselamatan konsumen.

- e. Untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan/ ketentuan.



Gambar 3.9 Pemeriksaan Bahan Tambah Berbahaya pada Makanan yang beredar di Pasar

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

2. Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi

Kegiatan ini bertujuan agar sarana pelayanan kesehatan dapat melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar peraturan perundangan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kunjungan ke sarana pelayanan farmasi seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Apotek, Toko Obat, Klinik dan BP yang dilaksanakan dua kali dalam satu tahun oleh petugas dari seksi kefarmasian dan alat kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan dan Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang telah Kadaluarsa/Rusak



Gambar 3.10 Pembinaan Pelayanan Farmasi di Apotek

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020



Gambar 3.11 Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kadaluarsa/Rusak di Incinerator Plant PT. Jasa Medivest

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.435.735.000,- dan realisasi Rp. 1.264.120.255,- (88,05%) melalui 3 Kegiatan dengan indikator output sebanyak 6 indikator melalui kegiatan di Dinas Kesehatan.

Sampai dengan akhir Tahun 2019, semua indikator kinerja output sudah tercapai. Pada kegiatan fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin terdapat perubahan indikator output yang semula jumlah balita gizi kurang mendapat PMT dengan target sebelum perubahan sebanyak 1.319 anak, setelah perubahan diubah menjadi jumlah balita gizi kurang yang diberikan PMT dengan target yang sama yaitu 1.319 anak.

Pada kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya terdapat perubahan indikator output yang semula jumlah balita gizi buruk yang diberikan PMT dengan target sebelum perubahan sebanyak 15 anak, setelah perubahan diubah jumlah balita gizi buruk mendapat PMT dengan target yang sama yaitu 15 anak.

Kegiatan fasilitasi penurunan stunting (DAK), terdapat perubahan indikator yang semula jumlah penyediaan obat gizi dengan target 880.100, pada Perubahan Anggaran dirubah menjadi 2 indikator yaitu jumlah tablet tambah darah yang diadakan dengan target 827.100 dan jumlah vitamin A yang diadakan sebanyak 53.000.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.68 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.68 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Perbaikan Gizi Masyarakat

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin	Jumlah balita gizi kurang yang diberikan PMT	anak	1.319	1.319	1319
		Jumlah balita gizi kurang mendapat PMT	anak	0	0	0
2	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	Jumlah anak usia 6-24 bulan mendapat MP-ASI	anak	435	435	435
		Jumlah bumil KEK mendapat PMT	bumil	419	419	419
		Jumlah balita gizi buruk yang diberikan PMT	anak	15	15	0
		Jumlah balita Gizi Buruk mendapat PMT	anak	0	-	15
3	Fasilitasi penurunan stunting (DAK)	Jumlah tablet tambah darah yang diadakan	tablet	0	827.100	827.100
		Jumlah vitamin A yang diadakan	kapsul	0	53.000	53.000
		Jumlah penyediaan obat gizi	buah	880.100	0	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdiri dari :

1. Kegiatan Fasilitasi pemberian tambahan makanan dan vitamin bertujuan untuk meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat. Adapun kegiatannya berupa pengadaan PMT balita beserta pendistribusian PMT ke balita yang menjadi sasaran.



Gambar 3.12 Pendistribusian PMT Balita di wilayah Puskesmas Tirto

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

2. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya bertujuan meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat yang di dalamnya diantaranya mencakup pemberian MP-ASI anak usia 6-24 bulan, PMT bumil KEK, PMT Balita Gizi Buruk.



Gambar 3.13 Kegiatan Pelayanan Rumah Singgah Gizi Puskesmas Kusuma Bangsa

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

3. Fasilitasi penurunan stunting (DAK) bertujuan untuk untuk menurunkan prevalensi anemia pada ibu hamil dan remaja putri serta meningkatkan cakupan pemberian kapsul vitamin A di Kota Pekalongan. Adapun kegiatannya berupa pengadaan tablet tambah darah dan kapsul vitamin A.



Gambar 3.14 Kegiatan Minum Tablet Tambah Darah Bersama Di Sekolah

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

3. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 928.000.000,- dan realisasi Rp. 856.262.835,- (92,27%) melalui 3 Kegiatan dengan indikator output sebanyak 4 indikator melalui kegiatan di Dinas Kesehatan. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 3 indikator tercapai dan 1 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai adalah indikator jumlah bimtek SDM yang dilaksanakan, hal ini dikarenakan targetnya seharusnya 4 kali, namun di perubahan anggaran targetnya tercantum 6, sedangkan realisasinya adalah 5.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.69 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.69 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Akreditasi Puskesmas (DAK)	Jumlah puskesmas terakreditasi	puskesmas	5	5	5
2	Peningkatan SDM kesehatan	Jumlah bimtek SDM yang dilaksanakan	paket	4	6	5
3	Pengembangan standar pelayanan kesehatan	Jumlah lokasi untuk survey kepuasan pelanggan di Puskesmas dan BKPM	lokasi	15	15	15
		Jumlah pertemuan Workshop PIS PK	kali	1	1	1

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

1. Kegiatan Akreditasi Puskesmas (DAK) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan standar pelayanan kesehatan di Puskesmas dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Sampai tahun 2019 sudah semua Puskesmas terakreditasi dengan Puskesmas terakreditasi Madya sebanyak 8 Puskesmas yaitu Puskesmas Kusuma Bangsa, Tirto, Tondano, Sokorejo, Pekalongan Selatan, Noyontaan, Buaran, Medono dan Puskesmas terakreditasi Utama sebanyak 6 Puskesmas yaitu Puskesmas Bendan, Kramatsari, Dukuh, Krapyak Kidul, Klego, Jenggot.



Gambar 3.15 Kegiatan Penilaian Reakreditasi di Puskesmas Dukuh

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

2. Kegiatan Peningkatan SDM kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan melalui peningkatan mutu SDM. Adapun kegiatannya berupa jumlah bimtek SDM yang dilaksanakan, penyusunan Data Profil SDM Kes, Lomba Tenaga Kesehatan Teladan, Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan



Gambar 3.16 Kegiatan Bimtek Penanggulangan Bencana

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

3. Kegiatan Pengembangan standar pelayanan kesehatan bertujuan untuk tercapainya pelayanan kesehatan yang bermutu di semua sarana pelayanan kesehatan di Kota Pekalongan. Adapun kegiatannya berupa Survey IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), perizinan sarana pelayanan kesehatan, monev ke sarana pelayanan kesehatan.
4. **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular**

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.900.443.000,- dan realisasi Rp. 1.689.070.965,- (88,88%) melalui 6 Kegiatan dengan indikator output sebanyak 14 indikator melalui kegiatan di Dinas Kesehatan. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 13 indikator tercapai dan 1 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai adalah indikator jumlah kegiatan penyemprotan fogging focus di wilayah kota Pekalongan, hal ini dikarenakan penyemprotan/*fogging* sudah dilakukan sesuai dengan kejadian atau kasus yang ada.

Pada kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular ada perubahan indikator output kegiatan yaitu sebelum perubahan anggaran ada 6 indikator, setelah perubahan anggaran menjadi 4 indikator. Pada kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular ada perubahan indikator output kegiatan sebelum dan sesudah perubahan anggaran yaitu 2 indikator kegiatan.

Pada kegiatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular (DAK), dilaksanakan pengadaan Bahan Habis Pakai untuk pemeriksaan HIV dan Belanja Alat Kesehatan berupa *Co-Analyzer* sebanyak 6 unit dan Posbindu Kit sebanyak 14 unit, namun indikator output tidak dicantumkan dalam dokumen RKPd maupun dokumen APBD.



Gambar 3.17 Alat Kesehatan Co-Analyzer

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.70 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.70 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	Jumlah kegiatan penyemprotan fogging focus diwilayah kota Pekalongan	kali	50	50	44
2	Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Jumlah pertemuan jejaring internal program TB	lokasi	0	0	0
		Jumlah pertemuan sosialisasi HIV	lokasi	0	0	0
		Jumlah pertemuan peningkatan kapasitas petugas tentang Kusta	lokasi	0	0	0
		Jumlah pertemuan sosialisasi survei darah jari (SDJ) filariasis	lokasi	0	0	0
		Jumlah pertemuan monitoring evaluasi program diare dan ISPA	lokasi	0	0	0

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		Jumlah kegiatan jejaring program TB yang dilaksanakan	kali	6	-	0
		Jumlah sosialisasi HIV yang dilaksanakan	kali	3	3	3
		Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas petugas tentang Kusta yang dilaksanakan	kali	1	1	1
		Jumlah kegiatan sosialisasi survei darah jari (SDJ) filariasis yang dilaksanakan	kali	1	1	1
		Jumlah pertemuan kegiatan evaluasi program diare dan ISPA yang dilaksanakan	kali	4	4	4
3	Peningkatan imunisasi	Jumlah Pertemuan PWS Imunisasi	kali	4	4	4
		Jumlah sasaran kelas 1 SD/MI sederajat dilaksanakan BIAS MR	kelas	213	213	213
		Jumlah sasaran kelas 2 SD/MI sederajat dilaksanakan BIAS Td	kelas	255	255	255
4	Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	Jumlah kunjungan surveilans epidemiologi ke rumah Sakit	kali	52	52	52
5	Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular	Jumlah pertemuan peningkatan kapasitas penatalaksanaan penyakit tidak menular	kali	3	3	3
		Jumlah peserta sosialisasi dan deteksi dini (IVA Test)	orang	100	400	400
		Jumlah pertemuan refreshing kader posbindu	kali	0	-	0
		Jumlah pemeriksaan dan pengendalian faktor risiko KLL	kali	0	-	0
		Jumlah kegiatan refreshing kader posbindu yang dilaksanakan	kali	2	2	2
		jumlah pemeriksaan dan pengendalian faktor risiko	kali	2	2	2

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		KLL yang dilaksanakan				
6	Fasilitasi Pengendalian penyakit menular dan tidak menular (DAK)		0	-	-	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular terdiri dari :

1. Kegiatan Penyemprotan/*fogging* sarang nyamuk bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan angka kematian serta mengurangi dampak atau akibat buruk penyakit menular maupun tidak menular.



Gambar 3.18 Pelaksanaan Fogging

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

2. Kegiatan Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular bertujuan untuk mencegah berjangkitnya penyakit, menurunkan angka kesakitan dan angka kematian serta mengurangi dampak atau akibat buruk penyakit, baik menular maupun tidak menular dengan prioritas utama diberikan kepada bayi, anak balita dan ibu-ibu serta kelompok usia kerja. Adapun kegiatannya diantaranya pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular seperti filariasis, TBC, HIV, Kusta, Diare, ISPA



Gambar 3.19 Rapat Koordinasi Program Filariasis

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

3. Kegiatan Peningkatan imunisasi bertujuan untuk meningkatkan cakupan imunisasi pada bayi, balita dan anak sekolah sebagai upaya pencegahan penyakit PD3I.
4. Kegiatan Peningkatan *Surveyllance Epidemiologi* dan penanggulangan wabah bertujuan untuk meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
5. Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi kasus - kasus penyakit menular yang ada di Kota Pekalongan serta menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular. Adapun kegiatannya diantaranya sosialisasi dan deteksi dini (IVA Test), pemeriksaan dan pengendalian faktor risiko KLL yang dilaksanakan, pelatihan kader Posbindu, Screening Kesehatan untuk Penyakit Tidak Menular (PTM)



Gambar 3.20 Pelatihan Kader Posbindu

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

6. Kegiatan Fasilitasi Pengendalian penyakit menular dan tidak menular (DAK) meliputi pengadaan bahan medis habis pakai pemeriksaan HIV, pengadaan Co Analyzer, pengadaan Posbindu kit.

5. Program Pelayanan BLUD Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 17.828.913.000,- dan realisasi Rp. 17.197.831.361,- (96,46%) melalui 1 Kegiatan dengan indikator output sebanyak 1 indikator melalui kegiatan di Dinas Kesehatan. Sampai dengan akhir Tahun 2019 semua indikator telah tercapai.

Program Pelayanan BLUD Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya terdiri dari 1 kegiatan yaitu Kegiatan Pelayanan BLUD yang di dalamnya mencakup biaya operasional dan penunjang di puskesmas, BKPM dan PSPJ.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.71 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.71 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pelayanan BLUD Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lainnya

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pelayanan BLUD	Jumlah bulan penyediaan biaya operasional dan penunjang di puskesmas, BKPM dan PSPJ	bulan	12	12	12

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

6. Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 395.000.000,- dan realisasi Rp. 378.878.000,- (95,92%) melalui 2 Kegiatan dengan indikator output sebanyak 7 indikator melalui kegiatan di Dinas Kesehatan. Sampai dengan akhir Tahun 2019, semua indikator output sudah mencapai target.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.72 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.72 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Peningkatan kesehatan kerja dan olah raga	Jumlah peserta Tes Kebugaran Jasmani (Rockport) Dinkes	orang	90	90	90
		Jumlah peserta Tes Kebugaran Jasmani (Rockport) Haji	orang	500	500	500
		Jumlah Pertemuan Pelaksanaan GP2SPPerusahaan	kali	2	2	2
		Jumlah pertemuan Refreshing pos UKK	kali	1	1	1
2	Pengkajian pengembangan lingkungan sehat	Jumlah pertemuan sosialisasi hygiene sanitasi	kali	2	2	2
		Jumlah kegiatan pengendalian lalat di TPA	kali	4	4	4
		Jumlah lokasi pendataan/validasi STBM	lokasi	347	347	347

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

Program Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olah Raga terdiri dari

1. Kegiatan Peningkatan kesehatan kerja dan olah ragameliputi senam bersama, test kebugaran jasmani (Rockport) Dinas Kesehatan dan Calon Jemaah Haji, pembinaan GP2SP Perusahaan, pertemuan refreshing pos UKK.



Gambar 3.21 Senam Bersama Dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional (HKN) Ke-55

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020



Gambar 3.22 Rockport Calon Jemaah Haji

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020



Gambar 3.23 Pembinaan GP2SP di Perusahaan

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

2. Kegiatan Pengkajian pengembangan lingkungan sehat di dalamnya diantaranya mencakup pendataan/validasi STBM, Deklarasi ODF, sosialisasi hygiene sanitasi, pembinaan TTU dan TPM sehat, Studi EHRA, pembinaan Pos UKK

Deklarasi ODF (*Open Defecation Free*) dilaksanakan tgl 24 November 2019 di mana kegiatan tersebut merupakan deklarasi bersama dari 8 Kelurahan di Kota Pekalongan yang dinyatakan lulus sebagai kelurahan stop BABS (buang air besar sembarangan) yaitu suatu kondisi di mana setiap komunitas/masyarakat dalam suatu wilayah Kelurahan tersebut tidak ada yang buang air besar sembarangan.

Adapun peserta dari Deklarasi ODF adalah 8 Kelurahan yang dinyatakan lulus sebagai kelurahan stop BABS yaitu

- a. Tirto
- b. Kalibaros
- c. Panjang Baru
- d. Bandengan
- e. Pasirkratonkramat
- f. Pringrejo
- g. Sokoduwet
- h. Jenggot

Sampai dengan tahun 2019 sudah ada 21 Kelurahan ODF yaitu Kelurahan Podosugih, Medono, Kauman, Sapuro Kebulen, Bendan Kergon, Noyontaansari, Poncol, Klego, Kandang panjang, Kuripan Kertoharjo, Kuripan Yosorejo, Banyurip, Buaran Kradenan, Tirto, Kalibaros, Panjang Baru, Bandengan, Pasirkratonkramat, Pringrejo, Sokoduwet, Jenggot.



Gambar 3.24 Deklarasi Kelurahan ODF Tahun 2019

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

7. Program Kesehatan Keluarga

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 962.490.000,- dan realisasi Rp. 897.500.662,- (93,25%) melalui 5 Kegiatan dengan indikator output sebanyak 11 indikator melalui kegiatan di Dinas Kesehatan. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 9 indikator

tercapai dan 2 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai adalah indikator jumlah kunjungan bumil/ bulin/bufas ke Puskesmas PONEK dan RS PONEK dan indikator Jumlah pelayanan medis yang dilaksanakan, hal ini dikarenakan sebagian masyarakat sudah memiliki jaminan persalinan yaitu BPJS sehingga tidak semuanya menggunakan fasilitas Jampersal.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.73 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.73 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Kesehatan Keluarga

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah pertemuan pembinaan remaja (konselor sebaya)	kali	2	2	2
2	Peningkatan kesehatan anak balita	Jumlah Lomba Balita Sehat di Kota Pekalongan	kali	2	2	2
		Jumlah Pelatihan konselor ASI	kali	1	1	1
		Jumlah Pertemuan MTBS Masyarakat, MTBS SDIDTK	kali	3	3	3
		Jumlah Pelaksanaan audit neonatal	kali	1	1	1
3	Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia	Jumlah pertemuan pembinaan petugas dan kelompok lansia	kali	3	3	3
4	Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak	Jumlah kegiatan AMP, kelas ibu hamil, kunjungan ibu hamil dan bufas resti dan pembahasan bufas resti ibu hamil	kegiatan	5	5	5
5	Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK)	Jumlah jasa pelayanan medis bagi ibu hamil, bufas, bulin	jenis	5	5	5
		Jumlah kunjungan bumil/ bulin/bufas ke Puskesmas PONEK dan RS PONEK	orang	-	703	677
		Jumlah pelayanan medis yang dilaksanakan	ok	-	188	143
		Jumlah rakor jampersal yang dilaksanakan	kali	-	2	2

Sumber: RKPD, 2019

Program Kesehatan Keluarga terdiri dari :

1. Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja bertujuan untuk meningkatnya pengetahuan petugas kesehatan dan mengembangkan pengetahuan kelompok remaja untuk menjadi sumber informasi dan motivator tentang kesehatan remaja



Gambar 3.25 Lomba Kader Kesehatan Remaja

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

2. Kegiatan Peningkatan kesehatan anak balita bertujuan untuk meningkatnya Pelayanan Kesehatan terhadap bayi dan balita. Salah satu kegiatannya adalah Lomba Balita Sehat.

Lomba Balita Sehat merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Pekalongan untuk :

- a. Meningkatkan peran aktif keluarga utamanya orang tua dalam membina kelangsungan hidup anak, pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal
- b. Meningkatkan motivasi masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan kesehatan serta kesejahteraan balita.

Lomba Balita Sehat Tingkat Kota dibagi dalam 2 kategori yaitu :

- a. Kelompok Umur 6-24 bulan
- b. Kelompok Umur 2-5 tahun



Gambar 3.26 Lomba Balita Sehat Tingkat Kota Pekalongan

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

3. Kegiatan Pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia bertujuan untuk meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lansia. Adapun kegiatannya diantaranya pertemuan pembinaan petugas dan kelompok lansia .
4. Kegiatan Pemeliharaan Kesehatan Ibu Hamil dan Anak bertujuan untuk meningkatnya keselamatan ibu melahirkan dan anak. Adapun kegiatannya diantaranya wisuda ibu hamil, kegiatan AMP, kelas ibu hamil, kunjungan bumil dan bufas resti dan pembahasan kasus resti ibu hamil.



Gambar 3.27 Wisuda Ibu Hamil

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

5. Kegiatan Fasilitasi Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK) untuk meningkatnya Pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan ibu bersalin



Gambar 3.28 Pelayanan Persalinan Menggunakan Fasilitas Jampersal

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

8. Program Jaminan Kesehatan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 16.368.000.000,- dan realisasi Rp. 15.270.441.435,- (93,29%) melalui 2 Kegiatan dengan indikator output sebanyak 4 indikator melalui kegiatan di Dinas Kesehatan. Sampai dengan akhir Tahun 2019, semua indikator kinerja output sudah tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.74 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.74 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Jaminan Kesehatan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Fasilitasi JPKMM	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi JKN Tk. Kota dan Koordinasi Tim Jamkesda	kali	6	6	6
2	Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin (JAMKESDA)	jumlah bulan penyediaan premi asuransi BPJS PBI	bulan	12	12	12
		jumlah bulan penyediaan biaya jasa pelayanan medik rawat jalan dan inap bagi masyarakat tidak mampu	bulan	12	12	12
		jumlah bulan penyediaan biaya jasa rujukan ke RS, biaya livingcost bagi masyarakat tidak mampu	bulan	12	12	12

Sumber : Dinas Kesehatan, 2020

Program Jaminan Kesehatan terdiri dari :

1. Kegiatan Fasilitasi JPKMM yang di dalamnya mencakup pertemuan koordinasi pelayanan kesehatan bagi warga miskin Kota Pekalongan, monev program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke Puskesmas, Distribusi kartu JKN-KIS ke Kelurahan.
2. Kegiatan Fasilitasi Pelayanan rawat inap dan rawat jalan bagi keluarga miskin (JAMKESDA) yang mencakup penyediaan premi asuransi BPJS PBI, penyediaan biaya jasa pelayanan medik rawat jalan dan inap bagi masyarakat tidak mampu, penyediaan biaya jasa rujukan ke RS, biaya livingcost bagi masyarakat tidak mampu. Dalam tahun 2019, jumlah peserta PBI yang dibiayai premi asuransi BPJS Kesehatan sebanyak 41.310 jiwa. Adapun jumlah masyarakat yang memanfaatkan biaya jasa medik rawat jalan dan inap, penyediaan jasa rujukan ke RS, biaya *living cost* bagi masyarakat tidak mampu selama tahun 2019 adalah sebanyak 425.949 jiwa.

9. Program Peningkatan Sarana Prasarana, Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan obat asli Indonesia

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.13.810.957.000,- dan realisasi Rp. 13.319.215.804,- (96,44%) melalui 9 Kegiatan dengan indikator output sebanyak 11 indikator melalui kegiatan di Dinas Kesehatan. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 10 indikator tercapai dan 1 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai adalah

indikator jumlah pengadaan Alkes, di mana hal ini dikarenakan terdapat perubahan rincian jenis alkes disesuaikan dengan kebutuhan puskesmas semula 63 unit menjadi 59 unit.

Pada kegiatan Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK), semula ada pengadaan mobil distribusi dilengkapi pendingin, namun setelah perubahan anggaran ditiadakan. Untuk indikator output sebelum perubahan anggaran jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan, setelah perubahan anggaran indikator output berubah menjadi menjadi obat, reagen dan perbekalan kesehatan yang diadakan.

Pada kegiatan Fasilitasi Pelayanan Dasar (DAK), semula ada indikator pengadaan sistem informasi PSC 119, namun pada perubahan anggaran ditiadakan. Indikator output jumlah pengadaan alat-alat angkutan darat (Ambulans PSC 119, sepeda motor PSC 119) sebelum perubahan anggaran targetnya 0, setelah perubahan anggaran indikator outputnya berubah menjadi jumlah alat-alat angkutan darat (Ambulans PSC 119, sepeda motor PSC 119) yang diadakan dengan target 0, jumlah ambulans PSC 119 yang diadakan dengan target 1 dan jumlah sepeda motor PSC 119 yang diadakan dengan target 1, dan realisasinya sesuai yaitu jumlah ambulans PSC 119 1 unit dan jumlah sepeda motor PSC 119 1 unit. Indikator output jumlah pengadaan tablet dan jumlah pengadaan alat kesehatan, pada perubahan anggaran ditiadakan. Untuk indikator output sebelum perubahan anggaran jumlah rehabilitasi puskesmas (Pekalongan Selatan, Tondano, Jenggot, Dukuh) dan Labkesda, setelah perubahan anggaran indikator outputnya berubah menjadi jumlah puskesmas dan Labkesda yang direhabilitasi.

Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana BKPM (DBHCHT), sebelum perubahan ada indikator output jumlah Pengadaan Alkes dan jumlah Pengadaan DR Rountgen, namun setelah perubahan kegiatan ini ditiadakan karena pelayanan di BKPM mulai tahun 2020 digabung dengan RSUD Bendan, sehingga kegiatan pengadaan sarana prasarana BKPM dialihkan untuk kegiatan pengadaan sarana prasarana Puskesmas.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.75 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.75 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Sarana Prasarana, Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan obat asli Indonesia

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan	jenis	130	130	130
2	Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK)	Jumlah pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan	paket	0	-	0
		Jumlah Pengadaan mobil distribusi dilengkapi pendingin	Unit	1	0	0
		Jumlah obat, reagen, dan pembekalan kesehatan yang diadakan	paket	1	2	2

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian
3	Fasilitasi pelayanan dasar (DAK)	Pengadaan sistem informasi PSC 119	pekerjaan	1	0	0
		Jumlah pengadaan alat-alat angkutan darat (Ambulans PSC 119, sepeda motor PSC 119)	Unit	0	0	0
		Jumlah Pengadaan tablet	Unit	0	0	0
		Jumlah Pengadaan Alat Kesehatan	pekerjaan	0	0	0
		Jumlah rehabilitasi puskesmas (Pekalongan Selatan, Tondano, Jenggol, Dukuh) dan Labkesda	lokasi	0	0	0
		Jumlah alat-alat angkutan darat (Ambulans PSC 119, sepeda motor PSC 119) yang diadakan	unit	2	-	0
		Jumlah ambulans PSC 119 yang diadakan	unit	-	1	1
		Jumlah sepeda motor PSC 119 yang diadakan	unit	-	1	1
		Jumlah puskesmas dan Labkesda yang direhabilitasi	lokasi	3	3	3
		4	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas	Jumlah alat kesehatan yang diservice dan kalibrasi di puskesmas	jenis	31
5	Pengadaan Sarana Prasarana BKPM (DBHCHT)	Jumlah Pengadaan Alkes	jenis	10	-	0
		Jumlah Pengadaan DR Rountgen	unit	1	-	0
6	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BKPM	Jumlah jenis alat kesehatan yang diService dan dikalibrasi di BKPM	jenis	17	17	46
7	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Jumlah pengadaan Alkes	jenis	9	63	59
8	Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan sarana kesehatan lainnya	Jumlah rehabilitasi Puskesmas (Tirto, Dukuh, Krapyak)	lokasi	2	2	3
		Jumlah rehabilitasi Puskesmas Pembantu (Salamanis, Kebulen, Soko)	lokasi	2	2	3
		Jumlah pekerjaan Pengurukan tanah	Pekerjaan	0	1	1
9	Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)	Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan di PSPJ	bulan	12	12	12

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

Program Peningkatan Sarana Prasarana, Penyediaan Obat, Perbekalan Kesehatan dan obat asli Indonesia terdiri dari :

1. Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan meliputi pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan menggunakan dana APBD.
2. Kegiatan Fasilitasi pelayanan kefarmasian (DAK) meliputi pengadaan obat, reagen dan perbekalan kesehatan menggunakan dana APBN.



Gambar 3.29 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

3. Kegiatan Fasilitasi pelayanan dasar (DAK) meliputi Rehabilitasi Puskesmas Pekalongan Selatan, Rehabilitasi Puskesmas Tondano, Rehabilitasi Labkesda, Pengadaan Ambulans PSC 119, Pengadaan Sepeda Motor PSC 119



Gambar 3.30 Rehabilitasi Puskesmas Pekalongan Selatan dan Puskesmas Tondano

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020



Gambar 3.31 Rehabilitasi Labkesda

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020



Gambar 3.32 Pengadaan Sepeda Motor PSC 119 dan Mobil Ambulans 119

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana puskesmas meliputi kegiatan service dan kalibrasi alat kesehatan di Puskesmas
5. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana BKPM (DBHCHT) tidak dilaksanakan dikarenakan BKPM tutup dan dimarger dengan RSUD Bendan.
6. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana BKPM tidak dilaksanakan dikarenakan BKPM tutup dan dimarger dengan RSUD Bendan.
7. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas meliputi pengadaan Alat Kesehatan
8. Kegiatan Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan sarana kesehatan lainnya meliputi Rehabilitasi Puskesmas Dukuh, Rehabilitasi puskesmas Tirto, Rehabilitasi Puskesmas Krapyak Kidul, Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Salamanis, Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Kebulen, Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Soko.
9. Kegiatan Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO)
Pelaksanaan kegiatan Pembangunan, Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) ditujukan untuk mencapai target indikator program yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia terdiri dari kegiatan Pembangunan,

Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) yang di dalamnya mencakup biaya operasional kegiatan di PSPJ.

Kegiatan operasional dalam PSPJ terdiri dari 3 unit layanan yaitu :

- a. Klinik Sainifikasi Jamu merupakan pelayanan konsultasi dan pemeriksaan kesehatan oleh dokter Sainifikasi Jamu dan peracikan bahan baku obat (simplisia) oleh Apoteker Sainifikasi Jamu untuk proses terapi.
- b. Laboratorium Sainifikasi Jamu terdiri dari :
 - Pemeriksaan kadar air bahan baku jamu (misal Jahe, Kunyit, temulawak, kumis kucing dll) agar sesuai baku mutu (< 10%)
 - Pelayanan Jasa rotary evaporator yaitu pelayanan untuk mendapatkan zat aktif dari tanaman obat, sebagai contoh Temulawak dengan zat aktif berupa Curcumin yang bermanfaat untuk menjaga fungsi hati
 - Pelayanan Jasa Ekstraksi yaitu pelayanan untuk menghasilkan ekstrak tanaman obat (dalam bentuk ekstrak kental atau ekstrak serbuk)
- c. Pusat Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat (P4TO) dan Pusat Ekstrak Daerah (PED) terdiri dari :
 - Proses pengolahan tanaman obat menjadi bahan baku obat (simplisia)
 - Pembuatan produk inovasi jamu (contoh : es krim jahe, bir plethok, jahe instan dll)

Penyediaan bahan baku untuk PSPJ diambil dari hasil kebun PSPJ sendiri dan petani di sekitar Kota Pekalongan (Doro, Bandar, Wonotunggal dll)

Produk-produk PSPJ dipasarkan oleh tenaga marketing melalui Instansi – Instansi Pemerintah , pameran-pameran di Kota Pekalongan dan sekitarnya, di titipkan di Apotek-Apotek di Kota Pekalongan, sosial media (facebook : sehat bersama pspj, Instagram : sehatbersamapsj)



Gambar 3.33 Proses Produksi di PSPJ

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

10. Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.205.000.000,- dan realisasi Rp. 1.140.492.822,- (94,65%) melalui 6 Kegiatan dengan indikator output

sebanyak 10 indikator melalui kegiatan di Dinas Kesehatan. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 9 indikator tercapai dan 1 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai adalah indikator jumlah pelaksanaan pembinaan SBH, di mana hal ini disebabkan oleh kegiatan latihan rutin pembinaan ada yang tidak dilaksanakan dikarenakan persiapan Pertihusada Tingkat Nasional di Banyumas.

Pada kegiatan kampanye kesehatan tentang kawasan tanpa rokok dan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, indikator output sebelum perubahan anggaran jumlah kegiatan penegakan perda KTR, setelah perubahan anggaran indikator output ini ditiadakan. Indikator output jumlah lokasi monitoring implementasi perda, setelah perubahan anggaran berubah menjadi jumlah lokasi kegiatan monitoring implementasi perda yang dilaksanakan.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.76 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.76 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah sekolah dilakukan penjangkaran kesehatan siswa kelas 1 SD/MI sederajat	sekolah	150	150	150
2	Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui forum kota sehat	Jumlah penyediaan biaya operasional untuk kegiatan FKS	bulan	12	12	12
3	Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	Jumlah pelaksanaan kegiatan lomba PHBS tingkat Kecamatan dan Tk Kota	kali	5	5	5
4	Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah pelaksanaan pembinaan SBH	kali	44	44	38
		Jumlah pelaksanaan LCC Kader Posyandu dan Pemilihan Kader Teladan Tk. Kota	kali	2	2	2
5	Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat	Jumlah kegiatan jambore kader kesehatan yang dilaksanakan	Kali	-	1	1
		Jumlah kegiatan penegakan perda KTR;	kali	7	0	0
		Jumlah kampanye HTTS;	kali	1	1	1
		Jumlah lomba senam cuci tangan untuk siswa SMP;	kali	1	1	1
		Jumlah lokasi monitoring implementasi perda	lokasi	0	0	0
		Jumlah lokasi kegiatan	lokasi	400	400	400

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian
		monitoring implementasi perda yang dilaksanakan				
6	Pengadaan sarana dan prasarana posyandu	Jumlah pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)	Unit	50	50	50

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

Program Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan terdiri dari :

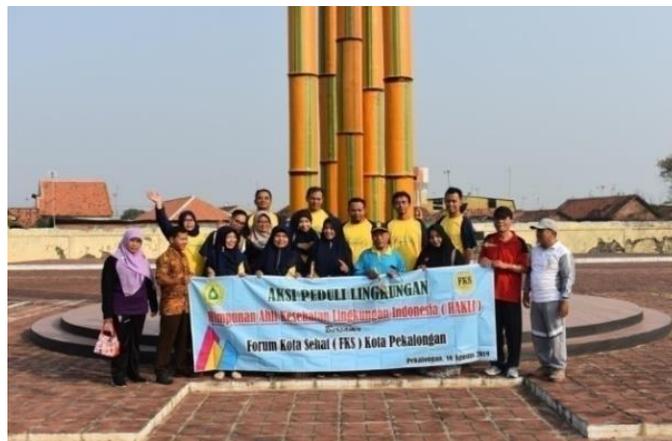
1. Kegiatan Peningkatan kesehatan masyarakat mencakup Lomba LCC Dokter Kecil, penjangkaran kesehatan siswa kelas 1 SD/MI sederajat, pembinaan guru UKS



Gambar 3.34 Lomba Dokter Kecil

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

2. Kegiatan Pelatihan, penyuluhan dan peningkatan kesehatan masyarakat melalui forum kota sehat meliputi penyediaan biaya operasional untuk kegiatan FKS



Gambar 3.35 Aksi Peduli Lingkungan FKS

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

3. Kegiatan Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat mencakup lomba PHBS, Kampanye Hari AIDS Sedunia



Gambar 3.36 Penyerahan Pemenang Lomba PHBS Tingka Kota

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

4. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat mencakup pembinaan SBH, pelaksanaan LCC Kader Posyandu dan Pemilihan Kader Teladan Tk. Kota, Pelantikan SBH



Gambar 3.37 Pelantikan SBH (Saka Bakti Husada)

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

5. Kegiatan Kampanye Kesehatan tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat meliputi Lomba Senam Cuci Tangan, kampanye HTTS, implementasi perda KTR
6. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana posyandu meliputi Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) Posyandu, pembangunan Posyandu di RW 9 Kelurahan Kandang Panjang.



Gambar 3.38 Peresmian Gedung Posyandu Kencana Wungu RW 9 Kelurahan Kandang Panjang

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

11. Program Manajemen Pelayanan Kesehatan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 11.238.768.000,- dan realisasi Rp. 10.408.804.110,- (92,62%) melalui 3 (tiga) kegiatan dengan indikator output sebanyak 5 indikator melalui kegiatan di Dinas Kesehatan. Sampai dengan akhir Tahun 2019, semua indikator telah tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.77 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.77 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Bantuan operasional kesehatan	Jumlah bulan penyediaan biaya distribusi obat dan logistik ke puskesmas	bulan	12	12	12
		Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan UKM Puskesmas	bulan	12	12	12
		Jumlah bulan penyediaan biaya operasional kegiatan UKM Kota	bulan	12	12	12
2	Revitalisasi sistem kesehatan	Jumlah bulan kegiatan pemeliharaan jaringan SIMKES di Puskesmas, BKPM	bulan	12	12	12
3	Peningkatan kualitas layanan sarana kesehatan	Jumlah penyediaan belanja operasional puskesmas, Labkesda dan BKPM	bulan	12	12	12

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

Pelaksanaan kegiatan pada Program Manajemen Pelayanan kesehatan ditujukan untuk mencapai target indikator program yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD. Program Manajemen Pelayanan kesehatan terdiri dari :

1. Kegiatan Bantuan operasional kesehatan yang diantaranya mencakup tentang biaya kegiatan UKM di Puskesmas (Pertemuan Penguatan P4K, Deteksi/Pemantauan Risti Bumil, Pelaksanaan Kelas Ibu hamil, Lomba Balita Sehat Tk. Puskesmas dll), biaya kegiatan UKM di Dinas Kesehatan (Pelaksanaan Rockport jemaah haji, Rakor HIV/AIDS, Pelaksanaan Ketuk Pintu TB oleh Kader dll), biaya distribusi obat dan logistik ke puskesmas dan Festival Kuliner Buah dan Sayur.

Festival Kuliner Buah dan Sayur diikuti oleh semua elemen mulai dari Dinas Kesehatan, Puskesmas, BKPM, PSPJ, Rumah Sakit, Akademisi, Organisasi Profesi dalam Kota Pekalongan Kelurahan serta mitra kesehatan yang dilaksanakan pada tanggal 24 November 2019.

Festival Kuliner Buah dan Sayur bertujuan memasyarakatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.



Gambar 3.39 Festival Kuliner Buah dan Sayur

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

2. Kegiatan Revitalisasi sistem kesehatan bertujuan untuk membantu pemeliharaan jaringan SIMKES di Puskesmas, BKPM
 3. Kegiatan Peningkatan kualitas layanan sarana kesehatan bertujuan untuk membantu kelancaran kegiatan operasional di Dinas Kesehatan, BKPM, labkesda dan Pusdal
- 12. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata**

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp 19.919.899.000,- dan realisasi Rp 19.347.233.945,- (*unaudited*) melalui 4 kegiatan dengan indikator output sebanyak 6 indikator. Sampai dengan akhir tahun 2019, 6 indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.78 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.78 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
RSUD Bendan						
1	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	Jumlah peralatan kesehatan rumah sakit yang diadakan	Unit alat kesehatan	8	8	8
2	Peningkatan sarana dan prasarana RSUD Bendan	finishing Asrama	unit	1	1	1
		jumlah alkes Home Care	unit	16	16	16
		Revitalisasi gedung eks-BLK menjadi klinik Paru	unit	1	1	1
3	Pembangunan sarana prasarana RSUD Bendan (DAK)	Jumlah gedung IGD yang dibangun	unit	1	1	1
4	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (Bantuan Provinsi)	Jumlah alat kesehatan yang diadakan	unit	-	17	17

Sumber: RSUD Bendan Kota Pekalongan 2020

Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit bersumber APBD berupa 8 unit alat kesehatan untuk memenuhi pelayanan di instalasi radiologi, rehabilitasi medik, IGD, rawat inap dan laundry, yaitu *x-ray*, *Short Wave Diathermy (SWD)*, ambulance stretcher, sterilisator ruangan, *examination table* dan *linen hamper carriage*. Jumlah anggaran adalah sebesar Rp 1.000.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp 961.532.400,- atau sebesar 96,15%.



Gambar 3.40 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit Tahun 2019

Sumber: RSUD Bendan Kota Pekalongan, 2020

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana RSUD Bendan terbagi dalam 3 pekerjaan yaitu finishing asrama, pengadaan alat kesehatan home care, dan rehab gedung eks-BLK

menjadi klinik paru. Pekerjaan *finishing* asrama dilaksanakan tahun 2019 setelah sebelumnya dibangun pada tahun 2015, alat kesehatan *home care* digunakan untuk pelayanan *home care* sebanyak 16 unit terdiri dari *mobile physiotherapy* 1 unit, set perawatan luka 3 set, lampu kepala 3 unit, stetoskop 3 unit, tensimeter 3 unit dan termometer 3 unit. Kegiatan Pembangunan sarana prasarana RSUD Bendan bersumber DAK yaitu berupa pembangunan gedung IGD dengan pagu anggaran Rp 8.009.999.000,- dan realisasi Rp 7.503.000.000,- atau sebesar 93.67%

Kegiatan Pengadaan alat-alat kesehatan Rumah sakit bersumber dana bantuan provinsi ini dengan anggaran Rp 10.000.000.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 9.998.394.045,- atau sebesar 99,98%. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menggantikan alat kesehatan yang telah rusak, memenuhi sarana prasarana alat kesehatan sesuai dengan standar, dan mempercepat proses pelayanan kesehatan rujukan terutama kegawatdaruratan dan ruang rawat kelas 3 sehingga dapat menunjang pencapaian SPM.



Gambar 3.41 Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Bantuan Provinsi) Tahun 2019

Sumber: RSUD Bendan Kota Pekalongan, 2020

Keluaran dari kegiatan ini adalah 17 alat kesehatan untuk IGD, IBS, ICU/ICCU/PICU/NICU dan perawatan kelas 3, yaitu 2 unit vena viewer, 1 unit AED, 1 unit meja operasi, 1 unit lampu operasi, 1 unit mesin anestesi, 1 unit *ultrasonic surgical aspirator system*, 1 unit *hepa filter*, 1 unit *steam sterilizer*, 1 unit *ventilator*, 6 unit *patient monitor* dan 1 unit *bedpan washer*.

13. Program Peningkatan Pelayanan BLUD

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp 81.412.740.000,- dan realisasi Rp 67.130.248.803,- (*unaudited*) melalui 1 kegiatan dengan indikator output sebanyak 1 indikator melalui kegiatan di RSUD Bendan dan 24 sub kegiatan. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 1 indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.79 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.79 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Pelayanan BLUD

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
RSUD Bendan						
1	Pelayanan BLUD	Jumlah bulan tersedianya biaya operasional BLUD Rumah Sakit	bulan	12	3	12

Sumber: RSUD Bendan Kota Pekalongan 2020

Pendapatan BLUD Tahun 2019 naik jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2018 dan 2017. Kenaikan ini disebabkan karena di tahun 2019 RSUD Bendan menambah pelayanan-pelayanan baru di antaranya di Poliklinik Eksekutif Parikesit, layanan MCU, pembukaan klinik spesialis kulit dan kelamin sehingga jumlah pasien pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang signifikan yang berdampak pada kenaikan pendapatan.

Kebijakan rujukan berjenjang turut serta dalam faktor yang menaikkan kunjungan pasien ke rumah sakit tipe C.

14. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak di Rumah Sakit

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp 126.000.000,- dan realisasi Rp 85.276.000,- (*unaudited*) melalui 1 kegiatan dengan 1 indikator output di RSUD Bendan. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 1 indikator tersebut tercapai.

Tabel 3.80 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak di Rumah Sakit

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
RSUD Bendan						
1	Perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi	Terlaksananya Audit Maternal Perinatal Level 1 sampai 3	kali	3	3	6

Sumber: RSUD Bendan Kota Pekalongan 2020

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.80 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi dengan alokasi anggaran Rp 126.000.000,- dan capaian output seperti tergambar pada tabel di atas.

Audit *maternal perinatal* (AMP) dimaksudkan untuk menelusuri kembali sebab kesakitan dan kematian ibu dan perinatal dengan tujuan untuk mencari penyebab terjadinya kasus untuk dipelajari dan dicarikan upaya pencegahannya agar kasus tersebut tidak terulang kembali. Pada saat ada kasus kematian ibu dan bayi, rumah sakit melakukan audit kematian level 1 kurang dari 24 jam setelah kematian dilanjutkan dengan audit kematian level 2 pada tingkat manajemen.

AMP yang telah dilaksanakan di RSUD Bendan pada tahun 2019 dilaksanakan pada bulan Juli 2019 meliputi AMP Level 1 sebanyak 1 kali yang diberikan bagi petugas yang berjaga dan berkaitan meliputi petugas jaga, dokter umum, dan DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) yang dilaksanakan 1x24 jam saat pasien meninggal. Sedangkan AMP Level 2 sebanyak 1 kali pada bulan November 2019 yang diberikan kepada petugas yang berjaga dan berkaitan meliputi petugas jaga, dokter umum, dan DPJP serta manajemen rumah sakit dan dilaksanakan sebagai lanjutan dari AMP level 1.

15. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp 572.750.000,- dan realisasi Rp 525.331.100,- (*unaudited*) melalui 3 kegiatan dengan indikator output sebanyak 3 indikator. Sampai dengan akhir tahun 2019, 3 indikator tersebut tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.81 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.81 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Rujukan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
RSUD Bendan						
1	Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan RSUD	Jumlah pelaksanaan kajian indeks kepuasan masyarakat	kali	2	2	2
2	Akreditasi RSUD Bendan Kota Pekalongan	terakreditasinya RSUD Bendan Kota Pekalongan	kali	1	1	1
3	Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis	Jumlah dokter WKDS yang difasilitasi	orang	1	1	1

Sumber: RSUD Bendan Kota Pekalongan 2020

Pelaksanaan kajian indeks kepuasan masyarakat RSUD Bendan Kota Pekalongan pada tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 2 kali. Pada semester I dengan hasil 79.25 tergolong Baik (B) dan semester II dengan hasil penilaian menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan RSUD bendan tergolong Baik (B) dengan nilai IKM sebesar 83.28. Capaian

IKM RSUD Bendan tersebut mengalami peningkatan dari periode-periode sebelumnya. Hasil perhitungan keseluruhan untuk rawat inap di RSUD Bendan menunjukkan kategori Baik dengan nilai IKM 3,35 jika dikonversikan sebesar 83.75 dan untuk rawat jalan di RSUD Bendan menunjukkan kategori Baik dengan nilai IKM 3,32 dengan nilai konversi 82.90. Capaian tersebut juga mengalami peningkatan dibandingkan periode - periode sebelumnya.

Kegiatan Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis dilaksanakan untuk menunjang pelayanan yang ada di RSUD Bendan agar lebih optimal. Bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, melalui kegiatan ini tersedia dokter WKDS. Pada tahun 2019 RSUD Bendan menerima 1 (satu) orang dokter WKDS spesialis *obstetri* dan *ginekologi*.

16. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp 102.000.000,- dan realisasi Rp 98.355.000,- (*unaudited*) melalui 2 kegiatan dengan 2 indikator output sebanyak 2 indikator. Sampai dengan akhir tahun 2019, kedua indikator tersebut tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.82 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.82 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keperawatan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
RSUD Bendan						
1	Kegiatan Pengembangan Kompetensi Perawat dan Bidan	Jumlah perawat dan bidan yang mengikuti diklat/pelatihan/seminar/workshop/IHT pengembangan kompetensi	orang	40	40	122
2	Kegiatan Kredensialing Perawat dan Bidan	Jumlah alat phantom kredensial yang diadakan	set	1	1	1

Sumber: RSUD Bendan Kota Pekalongan 2020

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Perawat dan Bidan yang dilaksanakan dengan mengadakan pelatihan/diklat/seminar/workshop/IHT pengembangan kompetensi. Selama tahun 2019 perawat dan bidan yang telah mengikuti diklat/ pelatihan/seminar sebanyak 122 orang, hal tersebut telah melampaui target anggaran sebanyak 40 orang terlaksana dengan realisasi anggaran sejumlah Rp 76.967.500 dari target anggaran Rp 80.000.000,-

Sedangkan Kegiatan Kredensialing Perawat dan Bidan dilaksanakan dengan pengadaan *phantom* untuk menunjang kegiatan kredensialing perawat dan bidan, dengan realisasi anggaran Rp 21.137.500,- (96,07%) dari pagu Rp 22.000.000,-.

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

a. Pelayanan Kesehatan Dasar

- Meningkatnya jumlah peserta JKN KIS PBI yang disebabkan adanya kenaikan premi sehingga peserta mandiri banyak yang beralih ke PBI
- Masih kurangnya kesadaran tenaga kesehatan untuk mengurus ijin/SIP sehingga belum semua tenaga kesehatan di Kota Pekalongan memiliki ijin/SIP.
- Masih terbatasnya jumlah tenaga kesehatan tertentu yang menyebabkan beberapa fasilitas pelayanan kesehatan tidak memiliki SDM kesehatan yang sesuai dengan standar
- Masih tingginya angka kematian ibu, bayi dan balita
- Masih ditemukan kasus stunting di Kota Pekalongan
- Masih tingginya kasus anemi gizi besi pada ibu hamil dan remaja putri
- Jumlah posyandu mandiri menurut perhitungan strata secara kuantitatif meningkat dibandingkan tahun 2018, akan tetapi secara kuantitatif perlu dioptimalkan
- Sarana dan prasarana posyandu cukup memadai, akan tetapi belum semua posyandu memiliki tempat yang permanen (baru 10 dari 411 posyandu yang memiliki gedung posyandu sendiri)
- Belum terbentuknya Sekretariat SBH di Tingkat Kwartir Ranting atau Kecamatan
- Rumah Tangga Sehat di Kota Pekalongan belum mencapai 100%
- Belum semua Kelurahan di Kota Pekalongan mampu ODF (*Open Defecation Free*) atau bebas buang air besar sembarangan
- Belum semua masyarakat memiliki jamban keluarga dan mau mengakses jamban umum untuk kebutuhan BAB
- Masih banyak penduduk usia produktif (umur 15-59 tahun) belum mendapatkan pelayanan skrining kesehatan dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran penduduk usia produktif untuk melakukan cek kesehatan secara dini dan ketersediaan strip gula darah yang masih kurang
- Keberadaan posbindu belum merata di setiap RW
- Meningkatnya kasus TB (Tuberkulosis) di masyarakat
- Kepatuhan dalam minum obat TB masih kurang

b. Pelayanan Kesehatan Rujukan

Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Bantuan Provinsi) ditetapkan setelah perubahan anggaran dengan anggaran yang besar. Hal ini berpotensi terjadinya kegagalan dalam proses pengadaannya, sehingga mempengaruhi capaian output maupun outcome yang telah ditetapkan.

2. Solusi

a. Pelayanan Kesehatan Dasar

- Melakukan validasi data kepesertaan JKN KIS PBI

- Melakukan advokasi kepada badan/usaha pemberi kerja agar dapat mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN dengan ikut membayarkan iuran sesuai dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 pasal 11 ayat (1)
- Melakukan himbauan kepada fasyankes di Kota Pekalongan agar mewajibkan memiliki ijin/SIP bagi semua tenaga kesehatan yang ada di wilayah kerjanya
- Mengoptimalkan kinerja SDM kesehatan yang ada
- Meningkatkan kapasitas TIM PONED yang ada di puskesmas
- Membentuk Tim E-PPGBM (Elektronik – Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) di setiap puskesmas dengan Penanggung Jawab Kepala Puskesmas
- Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi Tablet Tambah Darah di Sekolah
- Melakukan bimbingan teknis kepada petugas puskesmas tentang tata cara pemeriksaan dan pembacaan hasil pemeriksaan Hb agar tidak terjadi subyektifitas dalam konversi kategori anemi
- Melakukan monev pemberdayaan dan Bimtek kepada petugas Promkes puskesmas
- Melakukan Bimtek dan pembinaan adminstrasi posyandu kepada kader posyandu
- Mengusulkan kegiatan pembentukan Sekretariat SBH di Tingkat Kwartir Ranting atau Kecamatan melalui dana BOK
- Melakukan identifikasi kebutuhan dan pemanfaatan sarana dan prasarana posyandu di masing – masing wilayah puskesmas
- Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam upaya pemberdayaan masyarakat agar dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
- Melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat
- Melakukan kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama serta lintas sektor terkait dalam rangka mendukung penerapan ODF di semua Kelurahan
- Mendorong masyarakat untuk melakukan swadaya dalam pembangunan jamban keluarga maupun jamban umum di wilayah kelurahan masing - masing
- Mendorong masyarakat untuk melakukan upaya mandiri dalam pemenuhan kebutuhan strip pemeriksaan gula darah
- Mengoptimalkan keberadaan posbindu yang sudah ada dikarenakan keterbatasan tenaga pemeriksa di puskesmas yang hanya 5 orang untuk setiap posbindu
- Peningkatan deteksi dini TB dengan pendekatan keluarga
- Memberikan motivasi/stimulan kepada penderita agar mau minum obat dan melakukan pengobatan sampai sembuh

b. Pelayanan Kesehatan Rujukan

- Melakukan perencanaan secara matang dan melibatkan semua stake holder dalam Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Bantuan Provinsi).
- Pengadaan barang dan jasa pada Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit (Bantuan Provinsi) semuanya dilaksanakan melalui *e-purchasing*, sehingga mempermudah dan mempercepat dalam prosesnya.

3. Peluang

a. Pelayanan Kesehatan Dasar

Beberapa peluang di bidang kesehatan yang bisa dilaksanakan untuk mencapai target RPJMD Tahun 2016-2021 di antaranya melalui lima Program Prioritas Nasional :

- Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Neonatus (AKN)
- Program Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis
- Peningkatan Cakupan dan Mutu Imunisasi
- Pencegahan dan Penurunan Stunting
- Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Faktor Resikonya

b. Pelayanan Kesehatan Rujukan

Adanya e-katalog dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah memudahkan pengadaan barang dan jasa melalui proses *e-purchasing*.

3.2.1.3. Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Pekalongan dilaksanakan 7 (tujuh) program yakni Program pembangunan jalan dan jembatan, Program Pengendalian Banjir, Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, Program Pemanfaatan Ruang, Program peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi, Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Drainase terdistribusi dalam 13 (Tiga Belas) Indikator Kinerja Program, dengan realisasi sebanyak 9 (Sembilan) indikator yang mencapai target, 4 (Empat) indikator belum mencapai target.

1. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.83 Target dan Capaian Indikator
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	persentase progres tahapan pembangunan Jalan akses ke jalan tol	90	persen	80,49	91,42

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2020

Indikator Persentase progres tahapan pembangunan jalan akses ke jalan tol untuk capaian pada tahun 2019 sebesar 91,42 atau naik sebesar 10,93 dibandingkan capaian pada tahun 2018 yaitu sebesar 80,49. Adapun angka 91,42 didapat dari formulasi sebagai berikut progres pembangunan jalan dan jembatan (237,7 km) dibandingkan dengan rencana pembangunan jalan dan jembatan (260 km).

2. Program Pengendalian Banjir

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.84 Target dan Capaian Indikator
Program Pengendalian Banjir**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Persentase sarpras pengendali banjir dalam kondisi baik	88,00	persen	-	90

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2020

Persentase sarpras pengendali banjir telah tercapai sebesar 90% pada tahun 2019. Capaian ini diperoleh dari jumlah sarpras dalam kondisi baik yang berjumlah 18 dibandingkan jumlah total sarpras pada tahun 2019 yang berjumlah 20. Sarpras ini merupakan jumlah stasiun pompa skala wilayah yang terbangun, sedangkan kondisi rusak ada di lokasi Widoro dan Kandang Panjang.

3. Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Program ini diukur dengan 3 (tiga) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.85 Target dan Capaian Indikator
Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	persentase titik lampu yang telah bermeterisasi dan LED	33,00	persen	-	33,23
2	Komponen ruang publik kreatif (taman bahagia) yang ditingkatkan sarana prasarananya	33,00	persen	-	71,43
3	Peningkatan sarpras lokasi makam	33,00	persen	-	33,33

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2020

1. Persentase titik lampu yang telah bermeterisasi dan led untuk tahun 2019 mencapai 33,23% atau bisa dikatakan tercapai dari target yang diharapkan pada tahun 2019 sebesar 33%. Adapun perhitungannya didapatkan dari jumlah titik lampu yang diganti led (1986 titik) berbanding dengan jumlah titik lampu pju di kota (5976 titik).
2. Komponen ruang publik kreatif (taman bahagia) yang ditingkatkan sarana prasarananya telah mencapai 71,43% atau tercapai dari target yang diharapkan sebesar 33%. Formulasinya didapat dari jumlah penataan kawasan di tahun n (25) dibandingkan dengan total penataan kawasan (35). Penjabaran dari angka 25 diatas antara lain Realisasi pada tahun 2016 sebanyak 5 pekerjaan (mainan sorogenen, diffable sorogenen, ram lansia sorogenen, wc lansia sorogenen, mainan taman wilis), realisasi pada tahun 2017 sebanyak 7 antara lain (mainan Kuripan, wc/km Mataram-gender, wc/km Mataram-lansia, fitnes Mataram-anak, ram Monumen, diffable Monumen, trotoar Mataram-diffable, cctv Mataram, ram Kuripan, diffable Kuripan), realisasi tahun 2018 sebanyak 7 (Alun-alun difable, Alun-alun lansia, Alun-alun anak, wc Monumen, diffable Tirto, ram lansia Tirto, aminan anak) dan terakhir tahun 2019 telah tercapai 6.
3. Peningkatan sarpras lokasi makam untuk tahun 2019 telah berhasil tercapai 33,33% dari target sebesar 33%. Penghitungannya sebagai berikut sarparas makam yang tertata tahun berjalan (3) dibandingkan dengan total sarpras yang ditata (6). Penataan ini

meliputi pada makam Bong Cino pembuatan saluran dan paving sedangkan pada makam Merkop ada pekerjaan paving.

4. Program Pemanfaatan Ruang

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.86 Target dan Capaian Indikator Program Pemanfaatan Ruang

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	persentase peningkatan jumlah bangunan ber-IMB	80,00	persen	-	92,76

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2020

Persentase peningkatan jumlah bangunan ber IMB pada tahun 2019 telah mencapai 92,76% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Angka tersebut didapat dari jumlah IMB yang diterbitkan (589) dibandingkan dengan jumlah permohonan IMB (635). Alasan pemohon IMB tidak dapat diterbitkan IMB dikarenakan ada ketentuan teknis bangunan yang tidak terpenuhi (misalnya GSB).

5. Program peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

Program ini diukur dengan 3 (tiga) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.87 Target dan Capaian Indikator Program peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Persentase jembatan dalam kondisi baik	92,21	persen	-	89,31
2	Persentase Trotoir dalam kondisi baik	86,00	persen	-	12,02
3	Persentase Saluran Pematul Jalan dalam kondisi baik	42,29	persen	-	42,37

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2020

1. Persentase jembatan dalam kondisi baik untuk capaian tahun 2019 sebesar 89,31% atau tidak dapat memenuhi target yang mencapai 92,21%. Penghitungan didapat dari panjang jembatan kota dalam kondisi baik (1236 m) dibandingkan dengan total panjang jembatan Kota Pekalongan (1384 m);

Pada tahun 2019 indikator di Persentase jembatan dalam kondisi baik tidak tercapai dikarenakan pekerjaan pemeliharaan jembatan pada tahun 2019 mengerjakan beberapa pekerjaan deker (deker Jl. Manunggal dan deker Jl. Kalimantan) serta pembangunan Jembatan Jenggot, pekerjaan tersebut belum masuk ke dalam SK Jembatan Kota. Sedangkan dasar perhitungan capaian berdasarkan dari SK yang ada, sehingga berdampak pada pekerjaan tersebut di atas tidak berpengaruh pada capaian indikator yang diharapkan.

- Persentase trotoir dalam kondisi baik yang pada tahun 2019 telah tercapai 12,02% atau memenuhi target yang diharapkan yaitu sebesar 11,86%. Formulasinya sebagai berikut panjang trotoar kota dalam kondisi baik (36866 km) dibandingkan dengan total panjang trotoar kota Pekalongan (306824 km)
- Persentase saluran pematus jalan dalam kondisi baik sebesar 42,37% untuk tahun 2019 atau bisa dikatakan memenuhi target yang sebesar 42,29%. angka tersebut didapat dari panjang saluran pematus jalan kota (129.999 km) berbading dengan total panjang saluran pematus jalan sekota (306.824 km)

6. Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.88 Target dan Capaian Indikator
Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Fasilitasi perencanaan bangunan gedung	100,00	persen	-	60
2	Fasilitasi pembangunan bangunan gedung	100,00	persen	-	100

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2020

- Fasilitasi perencanaan bangunan gedung baru tercapai 60% pada tahun 2019 dari 100% target yang diharapkan. Rumus perhitungannya sebagai berikut jumlah perencanaan bangunan gedung yang terealisasi pada tahun berjalan (3 dokumen) dibandingkan dengan total perencanaan bangunan gedung pada tahun berjalan (5 dokumen). 2 dokumen yang tidak realisasi adalah DE Gedung PIBB lanjutan dan DE pengurangan Pasar Banjarsari baru.
- Fasilitasi pembangunan bangunan gedung telah tercapai 100% dari target yang diharapkan. Formulasinya sebagai berikut jumlah gedung yang dibangun tahun n (3) berbandng dengan total gedung yang terbangun (3).

7. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Drainase

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.89 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Drainase**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	persentase jaringan irigasi yang dipelihara	76,73	persen	-	0
2	Persentase drainase primer dalam kondisi baik	60,00	persen	-	58,90

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2020

- Persentase jaringan irigasi yang dipelihara 0% pada tahun 2019 dari targetnya sebesar 76,73%. angka tersebut didapat dari panjang saluran irigasi dalam kondisi baik (0%) berbanding dengan panjang saluran irigasi (0%), hal ini dikarenakan kewenangan irigasi ada PUSDATARU pada pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- Persentase drainase primer dalam kondisi baik capaiannya 58,90% tidak memenuhi target untuk tahun 2019 sebesar 60%, penghitungannya dari panjang drainase dalam kondisi baik (19.440,86) berbanding dengan total panjang drainase (33.007) dikarenakan inventirisasi data drainase.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran 13.293.069.000,- dan realisasi Rp. 13.105.411.000,- (*unaudited*) melalui 2 (dua) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 2 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 2 (dua) indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.90 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.90 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pembangunan Jalan (DAK)	Jumlah pengadaan konstruksi jalan (DAK)	lokasi	1	1	1
2	Perencanaan pembangunan Jalan dan Jembatan	Jumlah dokumen perencanaan (DED) Pembangunan jalan yang tersusun	Dokumen	10	10	10

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2020

Program pembangunan Jalan dan Jembatan bertujuan untuk peningkatan kualitas jalan dan jembatan dalam rangka mengurangi biaya transportasi dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi masyarakat.

1. Pembangunan Jalan (DAK)

Indikator output pembangunan jalan (DAK) untuk capaian 2019 yaitu 1 pekerjaan sesuai dengan target yang diharapkan yaitu Pembangunan jalan tembus DR. Sutomo - Komodor adi sucipto (frontage road) tahap II



Gambar 3.42 Frontage Road Jl. DR. Sutomo - Komodor Adi Sucipto

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2020

2. Perencanaan pembangunan Jalan dan Jembatan

Indikator output perencanaan pembangunan jalan dan jembatan untuk tahun 2019 adalah tercapai 12 dokumen dari 10 dokumen yang ditargetkan. Dokumen tersebut antara lain : perencanaan jalan tahun 2020, pekerjaan survey kondisi jalan, Penyusunan DED perencanaan penataan trotoar dan saluran Jl. HOS Cokroaminoto, Perencanaan DE DAK tahun 2021, pembuatan aplikasi sistem informasi data base jalan, Perencanaan review DED DAK (Peningkatan Jl. Dharma Bhakti, Peningkatan Jl. Karya Bhakti, Peningkatan Jl. Angkatan 66, Peningkatan Jl Pattimura dan Jl. Terminal, Peningkatan Jl. Tondano).

2. Program Pengendalian Banjir

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp 12.291.805.000,- dan realisasi Rp. 11.029.075.848,- (*unaudited*) melalui 6 (enam) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 10 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 10 indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.91 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.91 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengendalian Banjir

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pembangunan reservoir pengendali banjir	Jumlah Pengadaan pompa skala lingkungan;	unit	8	8	10
		Jumlah stasiun pompa pengendali banjir yang dibangun termasuk penyambungan daya listrik	lokasi	4	4	7
2	Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir	Jumlah bulan rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir	bulan	12	12	12
3	Pembangunan Sarana Pengendali Banjir	Jumlah Pagar Pengaman Kolam Retensi yang dibangun	unit	1	1	2
		Jumlah lokasi stasiun pompa pengendali banjir yang dibangun	lokasi	3	3	2
4	Pembangunan Sarana Pengendali Banjir (Bantuan Provinsi)	Jumlah pengadaan konstruksi reservoir	lokasi	2	2	2
5	Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir	Jumlah bulan rehabilitasi / pemeliharaan sarana pengendali banjir	bulan	12	12	12

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
6	Pemeliharaan turap/talud/bronjong	Jumlah lokasi konstruksi reservoir yang diadakan	lokasi	4	4	4
		Jumlah lokasi tanggul yang dibangun	lokasi	4	4	5
		Jumlah lokasi Geotube/SandBag yang diperbaiki	lokasi	1	1	1

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2020

1. Indikator output pembanguna reservoir pengendali banjir telah tercapai 10 pengadaan pompa skala lingkungan dari target sebanyak 8 pompa, hal ini karena harga per unit lebih murah pada saat pembelian dibandingkan dengan DPA namun spesifikasi teknis yang sama.
2. Indikator output untuk kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir pengendali banjir telah tercapai 12 bulan sesuai dengan target yang diharapkan.

Indikator output pembangunan sarana pengendali banjir belum mencapai target sebagaimana tertera dalam DPA, namun demikian, hal ini sudah memenuhi kebutuhan dalam perencanaan pembangunan sarana pengendali banjir. Pembangunan stasiun pompa pengendali banjir dilakukan di Stasiun Panjang Baru dan Klego. Sedangkan untuk indikator output jumlah kolam retensi yang dibangun telah sesuai target yang diharapkan yaitu 1 lokasi di krapyak.



Gambar 3.43 Rumah Pompa Panjang Baru dan Klego

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2020

4. Indikator output pada kegiatan Pembangunan sarana pengendali banjir (Bantuan Propinsi) telah tercapai 2 lokasi dari target yang diharapkan yaitu Stasiun Pompa Degayu, Pengendali Pompa Pasir Kraton Kramat.



Gambar 3.44 Rumah Pompa Pasir Kraton Kramat

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2020

5. Indikator output rehabilitasi dan pemeliharaan sarana pengendali banjir capainya sudah sesuai target yaitu 12 bulan.
6. Indikator output pemeliharaan turap/talud bronjong masing-masing telah sesuai dengan target karena terdapat 3 indikator yaitu ada 4 jumlah konstruksi yang diadakan (4 kecamatan), jumlah lokasi tanggul yang dibangun tercapai 5 dari 4 lokasi yang ditargetkan yaitu tanggul pengaman pantai Jalan Samudra, tanggul pengaman pantai Bandengan - Kandang Panjang, tanggul darurat Krapyak, tanggul darurat saluran pompa Randujajar dan tanggul darurat Meduri dan Jumlah lokasi *geotube/sandbag* yang diperbaiki adalah 1 lokasi tambal sulam *geotube/sandbag*.

3. Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 13.721.000.000,- dan realisasi Rp. 12.871.423.510,- (*unaudited*) melalui 6 (enam) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 8 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, (8 indikator) tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.92 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

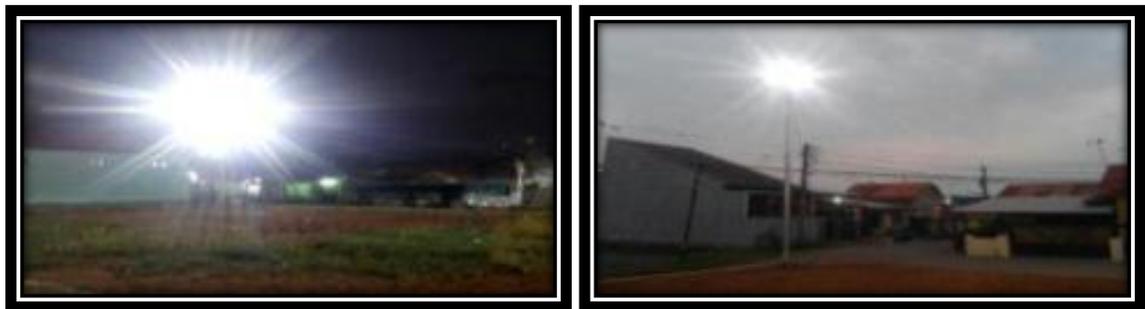
Tabel 3.92 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Rehabilitasi dan Penataan Lampu Penerangan Jalan dengan Sistem Meterisasi	Jumlah lampu PJU bermeterisasi yang direhabilitasi dan ditata	unit	353	353	467
		Jumlah lokasi penataan lampu PJU bermeterisasi	lokasi	2	2	3
2	Pemeliharaan rutin/ berkala penerangan jalan umum	Jumlah bulan pemeliharaan rutin/ berkala penerangan jalan umum	bulan	12	12	12

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (PJU)	Jumlah bulan fasilitasi monitoring, evaluasi dan pelaporan	bulan	12	12	12
4	Penataan Kawasan Kota	Jumlah lokasi Konstruksi Taman Kota yang diadakan	lokasi	7	7	8
		Jumlah Bangunan Konstruksi yang dibangun	unit	1	1	1
5	Pemeliharaan Rutin /Berkala Taman Kota	Jumlah lokasi pemeliharaan rutin/berkala taman kota	lokasi	71	71	72
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Makam	Jumlah lokasi Pemeliharaan Rutin/Berkala Makam	lokasi	2	2	6

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2020

1. Indikator output rehabilitasi dan penataan lampu penerangan jalan dengan sistem meterisasi telah mencapai 467 unit lampu dari 353 lampu yang ditargetkan. Memaksimalkan pengadaan lampu dari DPA yang ada tanpa mengurangi spesifikasi dan kualitas yang ada. Sedangkan untuk indikator output kedua yaitu jumlah lokasi penataan lampu PJU bermeterisasi telah melampaui dari target yang diharapkan yaitu 3 lokasi dari 2 lokasi yang ditargetkan yang berlokasi di wilayah Tirto, Panjang Baru dan Medono.



Gambar 3.45 PJU Tirto dan Panjang Baru

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2020

2. Indikator rutin/berkala penerangan jalan umum telah tercapai 12 bulan sesuai dengan target yang ditetapkan.
3. Indikator Monitoring, evaluasi dan pelaporan (pju) juga telah tercapai 12 bulan dari jumlah bulan fasilitasi monitoring evaluasi dan pelaporan
4. Indikator penatan kawasan kota telah melampaui target yang ditetapkan yaitu 8 bangunan taman dari 7 bangunan taman yang ditargetkan, antara lain Tugu Batas Kota Timur, penataan kawasan Jetayu (Cendrawasih), Gapura masuk Jl. Ir Sutami, penataan taman trotoar Jl. Hayamwuruk, penataan kawasan Lapangan Tirto, penataan kawasan Alun-alun, penatan kawasan Jetayu (Rajawali), pembangunan Gapura Batas Kota Soko

Duwet. Serta 1 bangunan kontruksi yang terbangun juga telah sesuai target yaitu pembangun Mushola Sorogenen.



Gambar 3.46 Penataan Kawasan Rajawali, Cendrawasih dan Alun-alun

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2020

5. Indikator output pemeliharaan rutin/berkala taman kota ada 72 lokasi dari 71 lokasi yang ditargetkan antara lain 50 lokasi taman kota, 17 taman dan Lapangan serta 5 Signage
6. Indikator output pemeliharaan rutin berkala makam telah sesuai target yaitu 2 lokasi pemakaman yang bertempat di Makam Bong Cino kuripan serta Makam Kerkop.



Gambar 3.47 Pemeliharaan Rutin/Berkala Makam Bong Cino dan Makam Kerkop

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2020

4. Program Pemanfaatan Ruang

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 120.000.000,- dan realisasi Rp. 79.581.460,- (*unaudited*) melalui 3 (tiga) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 4 Indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 4 indikator tercapai dan 0 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.93 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.93 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pemanfaatan Ruang

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	Jumlah sosialisasi Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang	kali	2	2	2
2	Pendataan bangunan ber-IMB	Jumlah dokumen data bangunan ber-IMB	dokumen	2	2	2
		Jumlah kegiatan fasilitasi Tim TABG	kali	1	1	1
3	Monitoring, evaluasi dan pelaporan (IMB)	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	laporan	1	1	1

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2020

1. Indikator kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang telah tercapai 2 kali yaitu Talk Show di Radio dan juga pemasangan Jingle iklan pemanfaatan ruang di Radio sehingga telah sesuai dengan target yang ditetapkan.
2. Indikator output dari kegiatan Pendataan bangunan ber-IMB juga telah mencapai target dengan selesainya 2 dokumen hasil pendataan serta fasilitasi TABG yang telah 1 kali dilaksanakan.
3. Indikator output monitoring evaluasi dan pelaporan (IMB) juga telah mencapai target dengan telah diselesaikannya 1 laporan monitoring IMB yang tersusun.

5. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 13.289.441.000,- dan realisasi Rp 12.658.614.199,- (*unaudited*) melalui 6 (enam) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 10 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 10 indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.94 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.94 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Peningkatan jalan	jumlah lokasi peningkatan konstruksi jalan	lokasi	7	7	7
		Jumlah lokasi jalan yang ditingkatkan	lokasi	0	0	0
2	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	bulan	12	12	12

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
3	Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan	Jumlah bulan rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan	bulan	12	12	12
		Jumlah jembatan yang dilebarkan	unit	1	1	3
4	Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir	jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan trotoir	bulan	12	12	12
		Jumlah lokasi trotoir yang direhabilitasi	lokasi	2	2	9
5	Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematul jalan	Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan saluran pematul jalan	bulan	12	12	12
		Jumlah lokasi saluran pematul jalan yang direhabilitasi	lokasi	2	2	9
6	Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat	Jumlah unit alat berat yang dipelihara	unit	10	10	12

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2020

- Indikator output peningkatan jalan telah tercapai 7 lokasi dari 7 lokasi yang ditargetkan yaitu :
 - Peningkatan Jl. Seruni SMP 10
 - Peningkatan Jl. Samanhudi
 - Peningkatan Jl. Jlamparang
 - Peningkatan Jl. Pelita III
 - Peningkatan Jl. Pramuka
 - Peningkatan Jl. Darkat
 - Penigkatan Jl. Darkat I
- Indikator Jumlah Lokasi yang di tingkatkan tidak ada pekerjaan.
- Indikator output rehabilitasi /pemeliharaan jalan telah mencapai target yaitu 12 bulan pemeliharaan jalan



Gambar 3.48 Peningkatan Jalan Samanhudi dan Rehabilitasi Jembatan Kel. Jenggot

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2020

4. Indikator output rehabilitasi /pemeliharaan jembatan telah mencapai target yaitu 12 bulan pemeliharaan jembatan serta tercapai 3 rehabilitasi jembatan dari 1 jembatan yang ditargetkan yaitu Jembatan di Kelurahan Jenggot serta pelebaran Jembatan Mataram dan Jembatan Seruni Utara.
5. Indikator Rehabilitasi/pemeliharaan trotoar telah tercapai 12 bulan pemeliharaan trotor serta 9 lokasi rehabilitasi trotoar dari 9 lokasi rehabilitasi trotoar yang ditargetkan, meliputi :
 - a) Trotoar Majapahit
 - b) Trotoar Veteran
 - c) Trotoar Tentara Pelajar
 - d) Trotoar Kemakmuran
 - e) Trotoar Dr. Cipto
 - f) Trotoar WR Supratman
 - g) Trotoar depan TPI
 - h) Trotoar depan Taman makam Pahlawan
 - i) Trotoar Tentara Pelajar sisi timur
6. Indikator output rehabilitasi/ pemeliharaan saluran pematius jalan telah tercapai 12 bulan pemeliharaan saluran Pematius Jalan serta 9 lokasi pematius jalan yang direhabilitasi sesuai dengan jumlah targetnya yaitu 9 lokasi yang berada di lokasi :
 - a) Saluran pematius jalan Urip Sumoharjo (lanjutan)
 - b) Saluran pematius jalan Barito
 - c) Saluran pematius jalan Kenanga
 - d) Saluran pematius jalan Jetayu
 - e) Saluran pematius jalan A. Yani
 - f) Saluran pematius jalan Sabrawi
 - g) Saluran pematius jalan Akses tolSaluran
 - h) Saluran pematius jalan Jlamprang
 - i) Saluran pematius jalan Kusumabangsa



Gambar 3.49 Rehab Trotoar Depan TPI dan Saluran Pematius Jalan Barito

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2020

6. Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 125.000.000,- dan realisasi Rp. 96.758.000,- (*unaudited*) melalui 2 (dua) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 2 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 2 indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.95 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.95 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pembinaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Penyusunan Analisa Standar Belanja Bangunan	Jumlah dokumen Analisa Standar Belanja Bangunan	dokumen	2	2	2
2	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Jumlah Sosialisasi Jasa Konstruksi	kali	1	1	2

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2020

1. Indikator output penyusunan analisa standar belanja bangunan adalah telah tercapai 2 dokumen analisa standar belanja bangunan sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Indikator Output pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH target hanya 1 kali tapi bisa dilaksanakan 2 kali karena yang satu kali merupakan kegiatan sertifikasi tukang yang bekerjasama dengan program KOTAKU.

7. Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Drainase

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 3.215.800.000,- dan realisasi Rp. 2.799.323.400,- (*unaudited*) melalui 2 (dua) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 4 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 4 indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.96 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.96 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Drainase

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	Jumlah bulan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	bulan	12	12	12
		Jumlah lokasi saluran irigasi yang direhabilitasi/dinormalisasi	lokasi	3	3	3
2	Rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer	Jumlah bulan rehabilitasi / pemeliharaan drainase primer	bulan	12	12	12

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		Jumlah lokasi saluran drainase yang direhabilitasi	lokasi	1	1	8

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan, 2020

1. Indikator output rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi untuk pelaksanaan telah sesuai dengan target yaitu 12 bulan pemeliharaan jaringan irigasi serta 3 lokasi saluran irigasi yang dinormalkan yaitu Saluran Irigasi Podo Timur, Irigasi Asem Binatur ke Hilir juga Saluran Irigasi Baros
2. Indikator output dari kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan drainase primer telah tercapai 12 bulan pemeliharaan drainase primer sesuai dengan targetnya, selain itu juga ada 8 lokasi yang telah direhabilitasi dari 1 lokasi yang ditargetkan antara lain
 - a) Drainase Panjang Wetan
 - b) Drainase Kramat Sari/Teuku Umar
 - c) Peninggian dan penambahan urugan dinding saluran Jl. Amd Kramatsari
 - d) Kurasan kandang Ayam Pesindon ke hilir
 - e) Saluran Drainase Tegalrejo
 - f) Perbaikan deker Pantaisari dan Jl Cemara
 - g) Rehab saluran Kandang Ayam Kebulen
 - h) Rehab dan pemeliharaan saluran Jl. Slamet

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Meningkatnya ancaman terhadap berkelanjutannya daya dukung sumber daya air, makin meluasnya abrasi pantai serta penurunan air muka tanah terhadap lautan akibat *Global Warming*
- b. Lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang sehingga masih didapatkan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai tata ruang
- c. Kondisi dari beberapa jalan yang umur kontruksinya tidak sesuai perencanaan awal dikarenakan ruas jalan yang tergenang rob ataupun banjir.
- d. Kesadaran masyarakat masih minim akan keberadaan dan fungsi taman kota, sehingga seringkali membawa masalah baru tentang kebersihan, pedagang kakilima hingga masalah asusila dan kriminalitas.

2. Solusi

- a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan, pengelolaan, dan konservasi sungai dan sumber air lainnya
- b. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang melalui pengawasan, penerapan sanksi demi efektifitas penegakan hukum serta mengaktifkan pengaktifan masyarakat dalam penyelenggaraan penatan ruang
- c. Merekonstruksi jalan dengan perkerasan kaku (betonisasi) yang lebih tahan dari dampak genangan air serta pemeliharaan rutin terhadap saluran pematas jalan sehingga genangan lebih cepat surut

- d. Pemberian fasilitas yang memadai baik untuk untuk tempat pembuangan sampah, penerangan taman yang memadai serta fasilitas pendukung lainnya yang dapat menarik minat masyarakat untuk dapat menikmati dan mudah mengakses taman kota.

3. Peluang

- a. Peluang mengajukan kegiatan pembangunan jalan maupun sumber daya air baik itu dari Pusat melalui mekanisme DAK maupun propinsi dengan Bankeu
- b. Tersedianya Aplikasi Simtaru yang dapat di akses oleh semua orang melalui wensite DPUPR sebagai sarana yang telah dikembangkan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan ruang
- c. Melibatkan pihak Swasta melalui CSR untuk bekerjasama membangun Taman melalui pemasangan iklan atau reklame selama tidak fungsi taman dan kenyamanan pengunjung.

3.2.1.4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Pekalongan dilaksanakan 2 (dua) program yakni Program Pengembangan Perumahan dan Program pengembangan infrastruktur permukiman, yang terdistribusi dalam 6 Indikator Kinerja Program, dengan realisasi sebanyak 3 indikator yang mencapai target dan 3 indikator belum mencapai target.

1. Program Pengembangan Perumahan

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.97 Target dan Capaian Indikator Program Pengembangan Perumahan

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	saatuan		
1	Rasio Rumah Tidak Layak Huni (Rumah Tidak Layak Huni Dibandingkan Seluruh Rumah)	4,05	persen	4,45	3,07
2	Persentase Perumahan MBR yang menyediakan fasum fasos dibandingkan jumlah perumahan MBR	50,00	persen	-	14

Sumber: Dinperkim Kota Pekalongan, 2020

Indikator Program Persentase Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang menyediakan fasum fasos dibandingkan jumlah perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah target tahun 2019 adalah 50,00 dalam pelaksanaan kegiatan belum tercapai yaitu 14 % dan data yang dihitung hanya Fasilitas Umum .

2. Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Program ini diukur dengan 4 (empat) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.98 Target dan Capaian Indikator
Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	saatuan		
1	Rasio panjang jalan lingkungan yang terlayani drainase	78,85	persen	-	53,59 %
2	Cakupan jalan dan jembatan permukiman dalam kondisi baik	46,85	persen	-	69,56 %
3	Persentase penduduk yang mengakses air bersih dengan perpipaan	91,99	persen	88,26 %	83,83 %
4	Cakupan akses sanitasi	94,65	persen	97,82 %	99,32 %

Sumber: Dinperkim Kota Pekalongan, 2020

Indikator Rasio Panjang Jalan Lingkungan yang terlayani Drainase Target 2019 adalah 78,85 % dalam capaian pada tahun 2019 hanya 53,59 % Kendala yang ada dilapangan adalah dikarenakan jumlah jalan lingkungan di Kota Pekalongan yang sangat banyak dan kebutuhan SDM yang belum memadai serta kebutuhan waktu untuk dalam pelaksanaan pembangunan jalan lingkungan yang terlayani drainase belum tercukupi.

Indikator Persentase Penduduk yang mengakses air bersih dengan perpipaan Target Tahun 2019 adalah 91,99 % dalam capaian tahun 2019 belum memenuhi target/ belum tercapai hanya 83,83 % dikarenakan Jumlah Penduduk yang mengakses Air Bersih dengan perpipaan belum semua terjangkau dan masih banyak yang menggunakan sumur-sumur tradisional dan sumur bor di rumah tangga masing.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Perumahan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 676.543.000,- dan realisasi Rp. 453.656.900,- (*unaudited*) melalui 6 (enam) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 9 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 6 indikator tercapai dan 3 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.99 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

**Tabel 3.99 Target dan Capaian Kinerja Output pada
Program Pengembangan Perumahan**

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan, Strategi dan Program Perumahan (Dokumen RP3KP Tahap II)	Dokumen	1	1	1
2	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/badan usaha	Jumlah Bulan Koordinasi Pembangunan dengan Lembaga/Badan Usaha	bulan	12	0	0
		Jumlah rakor yang diselenggarakan	kali	0	13	13

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		Jumlah kegiatan koordinasi bidang perumahan rakyat	kali	0	20	13
		Jumlah kegiatan validasi data RTLH	kali	0	25	12
		Jumlah kegiatan monitoring Pokja	kali	0	10	14
3	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Jumlah Bulan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	bulan	12	12	12
4	Kegiatan DAK Bidang Perumahan dan Permukiman (DAK)	Jumlah RTLH yang dipugar	Unit	180	180	180
5	Pembangunan sarana dan prasarana rusunawa	Pembangunan Pagar Rusunawa (lanjutan)	meter	0	0	0
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pagar Rusunawa	Dokumen	1	1	1
6	Fasilitasi fasilitas umum dan fasilitas sosial	Jumlah Perumahan yang diidentifikasi dan diinventarisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial	perumahan	10	10	2

Sumber: Dinperkim Kota Pekalongan, 2020

Indikator Output Jumlah Kegiatan Koordinasi Bidang Perumahan Rakyat APBD target 20 Kegiatan dalam pelaksanaan hanya terlaksana 13 kegiatan koordinasi dikarenakan keterbatasan waktu dan Tenaga SDM dalam pelaksanaan kegiatan. Indikator Output Jumlah Kegiatan Validasi Data RTLH APBD target 25 Kegiatan dalam pelaksanaan hanya terlaksana 12 kegiatan dikarenakan keterbatasan waktu dan Tenaga SDM dalam pelaksanaan kegiatan pendataan Validasi RTLH. Indikator Output Jumlah Perumahan yang diidentifikasi dan diinventarisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial target 10 perumahan dalam pelaksanaan hanya terlaksana 2 kegiatan dikarenakan data yang tersedia hanya data fasilitas umum.



Gambar 3.50 Pengembangan, Pengelolaan dan Pemeliharaan Rusun dan Pondok Boro serta Fasilitasi Peningkatan Kualitas RTLH

Sumber: Dinperkim Kota Pekalongan, 2020

2. Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 43.166.268.000,- dan realisasi Rp. 40.720.423.637,- (*unaudited*) melalui 5 (lima) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 5 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 5 indikator tercapai dan tidak ada indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.100 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.100 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Infrastruktur Permukiman

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan lingkungan permukiman	Panjang Jalan dan Jembatan lingkungan permukiman yang ditingkatkan kualitasnya	meter	20.000	20.000	21.727
2	Fasilitasi kegiatan SANIMAS (DAK)	Jumlah Pembangunan MCK Komunal dan MCK Mix	Lokasi	4	4	4
3	Pembangunan sarana air bersih (DAK)	Jumlah Sambungan Rumah (SR) yang terbangun	SR	458	458	458
4	Revitalisasi sarana dan prasarana air bersih	Jumlah Revitalisasi Sarana dan Prasarana Air Bersih	Lokasi	4	4	4
5	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Panjang Saluran Drainase/gorong-gorong yang dibangun	meter	2.400	2.400	2.400

Sumber: Dinperkim Kota Pekalongan, 2020



Gambar 3.51 Dokumentasi Pengembangan Infrastruktur Permukiman

Sumber: Dinperkim Kota Pekalongan, 2020

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Keterbatasan jumlah SDM dalam pelaksanaan kegiatan pada urusan perumahan dan permukiman
- b. Kesulitan dalam pengadaan lahan pada kegiatan fasilitasi SANIMAS DAK.

2. Solusi

Perencanaan terkait program dan kegiatan dilakukan secara lebih optimal dan mempertimbangkan kapasitas sumber daya.

3.2.1.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur. Sedangkan Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Oleh sebab itu dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kehidupannya.

Berdasarkan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 salah satu urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten / kota adalah Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Karena merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar maka dengan kata lain tugas dan fungsi dinas ini setara dengan urusan Wajib lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, serta sosial. Untuk membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan wajib tersebut, maka setiap daerah otonom memerlukan unsur pelaksana pemerintah daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Kesatuan Bangsa dan Politik, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- a. Satpol PP merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran. Sesuai Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 84 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri memiliki tujuan menjaga keutuhan bangsa, mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh NKRI, meningkatkan kehidupan demokrasi, dan melindungi masyarakat dari ancaman keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum. Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri memiliki peran dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan nilai – nilai kebangsaan, penanganan konflik sosial, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, partisipasi politik, pendidikan politik, pengembangan budaya politik, membina keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Penyelenggaraan urusan

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri mempunyai pengaruh terhadap perilaku dan karakter bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kehidupan masyarakat yang dinamis dan mengglobal membutuhkan penanganan yang intensif oleh pemerintah agar arah perkembangan sesuai dengan arah dan tujuan negara.

- c. Sesuai Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, kegiatan Penanggulangan Bencana di Pemerintah Kota Pekalongan secara teknis ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan merupakan Lembaga Teknis Daerah yang dipimpin Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota yang mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, pembina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat di Kota Pekalongan dilaksanakan 7 (tujuh) program yakni Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT), Program pelayanan kedaruratan sipil, Program peningkatan kepatuhan aparat, badan usaha/hukum dan masyarakat pada produk hukum daerah, Program Penanggulangan Bencana Alam, Program pendidikan politik masyarakat, Program kemitraan dan pengembangan wawasan kebangsaan yang terdistribusi dalam 10 indikator Kinerja Program, dengan realisasi sebanyak 6 indikator yang mencapai target dan 4 indikator belum mencapai target.

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.101 Target dan Capaian Indikator
Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
Satpol PP					
1	Cakupan Kelompok Sasaran Tibum yang dibina	50,00	persen	-	44,44

Sumber: Satpol PP Kota Pekalongan, 2020

Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dilaksanakan melalui sosialisasi/sarasehan di kelompok sasaran tibum yang dalam hal ini ditargetkan pada 50% jumlah Kelurahan se-Kota Pekalongan. Namun pada pelaksanaannya anggaran sosialisasi dialihkan untuk pelaksanaan sosialisasi penertiban pedagang di Jl. Pelita II sehingga target indikator belum dapat terpenuhi.

2. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.102 Target dan Capaian Indikator
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
Satpol PP					
1	Persentase Informasi Barang Cukai Ilegal yang dikoordinasikan untuk ditangani	100,00	Persen	-	100

Sumber: Satpol PP Kota Pekalongan, 2020

Pelaksanaan Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT) oleh Satpol PP Kota Pekalongan didampingi petugas dari Bea Cukai dan perangkat daerah lainnya dilaksanakan secara rutin setiap minggu dengan razia ke tempat-tempat peredaran dan penjualan eceran di sekitar Kota Pekalongan, serta memberikan sosialisasi dan pengarahan kepada masyarakat dan penjual untuk tidak mendistribusikan lagi rokok ilegal yang tidak dilekati pita cukai. Sampai akhir Tahun 2019, Satpol PP berhasil mendata 541 bungkus rokok ilegal dan mengkoordinasikannya kepada Bea Cukai untuk ditangani. Hal ini menunjukkan keberhasilan Satpol PP dalam memberikan sosialisasi dan pengarahan kepada masyarakat karena jumlah bungkus rokok ilegal yang menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 570 bungkus.

3. Program Pelayanan Kedaruratan Sipil

Program Kedaruratan Sipil merupakan program yang mengampu kegiatan yang berkaitan dengan kedaruratan sipil yaitu pemadam kebakaran dan Satlinmas. Tak lepas dari peran Satpol PP menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung siap siaga bencana dan pertolongan pada bahaya kebakaran serta non kebakaran.

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.103 Target dan Capaian Indikator
Program Pelayanan Kedaruratan Sipil**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
Satpol PP					
1	Persentase Penanganan Kedaruratan Sipil Non Kebakaran	100,00	Persen	-	100,00
2	Persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM	100,00	persen	-	100,00

Sumber: Satpol PP Kota Pekalongan, 2020

Satpol PP melalui Program Kedaruratan Sipil selalu siap siaga mengerahkan petugas pemadam kebakaran dalam menangani bahaya kebakaran dan menangani bantuan kepada masyarakat seperti penanganan sarang tawon dan ular serta petugas Satlinmas dalam penjagaan posko bencana alam dan pengamanan wilayah.

Indikator persentase penanganan kedaruratan sipil non kebakaran tahun 2019 tercapai 100% dengan tertanganinya semua laporan kedaruratan non kebakaran sebanyak 83 laporan. Sedangkan indikator persentase penanganan bencana kebakaran sesuai dengan SPM yang

pada tahun 2018 tidak tercapai, pada tahun 2019 tercapai 100% dengan tertanganinya semua laporan kebakaran sebanyak 49 kebakaran.

4. Program Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah

Program peningkatan kepatuhan aparatur, badan usaha/hukum dan masyarakat pada produk hukum daerah bertujuan untuk menegakan Peraturan Daerah di Kota Pekalongan, sehingga terwujud masyarakat yang patuh perda.

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.104 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum
dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
Satpol PP					
1	Persentase penyelesaian pelanggaran perda yang dilaporkan	100,00	Persen	98,81	98,63

Sumber: Satpol PP Kota Pekalongan, 2020

Satpol PP telah berupaya menegakkan Peraturan Daerah dengan dilaksanakannya patroli rutin serta operasi rutin yaitu operasi Pekat (Penyakit Masyarakat), Operasi Reklame, Operasi PGOT, serta sarasehan penegakan Perda. Target kinerja program penyelesaian persentase penyelesaian pelanggaran Perda tidak tercapai 100%, ketercapaian indikator 98,63%. Penyelesaian pelanggaran Perda dari jumlah laporan sebanyak 1382 telah ditindak lanjuti sebanyak 1363 kasus. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaannya sering pelanggaran perda sudah tidak ada dilokasi atau kabur (anak punk, ODGJ, dll).

5. Program Penanggulangan Bencana Alam

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.105 Target dan Capaian Indikator
Program Penanggulangan Bencana Alam**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
BPBD					
1	persentase korban bencana alam yang ditangani	75,00	Persen	90,48	100
2	peningkatan peran serta lembaga masyarakat/komunitas masyarakat tanggap bencana	33,33	Persen	-	83,33

Sumber: BPBD Kota Pekalongan, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 2 (dua) indikator Program yang ditetapkan, sampai dengan akhir tahun 2019 semua indikator tersebut dapat mencapai target.

Selama tahun 2019 jumlah korban bencana alam yang tertangani sebanyak 2.964 jiwa dari jumlah korban bencana sebanyak 2.964 jiwa. Sehingga persentase korban bencana yang ditangani tercapai 100%.

Pada tahun 2019 ini BPBD Kota Pekalongan telah menjalin mitra dengan 11 (sebelas) kelompok komunitas relawan yaitu Pekalongan Resque, Sotong resque, Mancing mania, Java resque, One resque, Batik resque, Jogo Samudro , MDMC, RAPI, LPBI-NU dan Bagana. Dimana hal tersebut mengalami peningkatan daripada tahun 2016 yang masih terdapat 6 (enam) komunitas.

6. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.106 Target dan Capaian Indikator
Program Pendidikan Politik Masyarakat**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
Kesbangpol					
1	persentase pemilih pemula yang terdidik politik	34,96	Persen	113,56	17,47

Sumber: Kesbangpol Kota Pekalongan, 2020

Dalam pelaksanaan program Pendidikan politik masyarakat pada tahun 2019 dengan target 34, 96 % tidak tercapai, disebabkan jumlah pemilih pemula terdidik sebesar 697 orang dibandingkan dengan jumlah pemilih pemula sebesar 3.989 orang (data KPU Kota Pekalongan 2019) sehingga perhitungan sangat rendah sebesar 17,47 %. Hal ini dikarenakan antara lain beberapa pemilih pemula bersekolah di luar kota tetapi daerah pemilihan di kota Pekalongan . Dibandingkan capaian tahun 2018 jumlah pemilih pemula terdidik sebesar 1.750 orang dibanding dengan jumlah pemilih pemula sebesar 1.541 orang (data KPU Kota Pekalongan 2018) sehingga perhitungannya sebesar 113,56 %. Hal ini dikarenakan antara lain terdapat pemilih pemula terdidik berasal dari luar kota bersekolah dan mengikuti sosialisasi pendidikan politik yang diadakan di Kota Pekalongan.

Dengan dilaksanakannya pendidikan politik pada pemilih pemula dapat meningkatkan hasil capaian tingkat partisipasi politik masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 dari target 77, 50 % tercapai 85, 88 % (Data KPU) atau melebihi target yang ditetapkan.

7. Program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Kemitraan dan pengembangan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat yang harmonis dalam kemajemukan sehingga terwujudnya situasi sosial yang kondusif.

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.107 Target dan Capaian Indikator
Program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
Kesbangpol					
1	Persentase Penanganan kerawanan/konflik sosial	100,00	Persen	100,00	100,00
2	Persentase penurunan kasus narkoba	19,05	Persen	42,86	12,00

Sumber: Kesbangpol Kota Pekalongan, 2020

Pelaksanaan Program Kemitraan dan pengembangan wawasan kebangsaan yang diukur dengan indikator persentase penanganan kerawanan/konflik sosial tahun 2019 tercapai 100 %, sedangkan indikator penurunan kasus narkoba belum mencapai target yang ditetapkan, tetapi telah dapat menurunkan kasus narkoba sebesar 12, 00 % dari tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat tercapai melalui beberapa kegiatan yang melibatkan dinas/instansi terkait, sekolah dan masyarakat serta kerjasama dengan unsur BNN dari luar daerah .

Dengan dilaksanakannya program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan diharapkan dapat meningkatkan pembinaan potensi kerawanan sosial.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 223.000.000,- dan realisasi Rp. 221.279.000,- (*unaudited*) melalui 2 (tiga) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 3 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 2 indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.108 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.108 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Satpol PP						
1	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Jumlah pelaksanaan kegiatan upacara peringatan HUT Pol PP, Jambore, Forkomkon antar aparat trantib, dan Bimbingan Kader Siaga Trantib (KST)	kegiatan	0	0	0
		Jumlah Pelaksanaan kegiatan upacara peringatan HUT Pol PP, Jambore, Forkomkon, Pelatihan Fisik dan Pelatihan PHH	kali/ kegiatan	13	13	13
2	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah kegiatan pelaksanaan pembinaan dan pelatihan SDM Satpol PP	Kegiatan	9	9	9

Sumber: Satpol PP Kota Pekalongan, 2020

Untuk melaksanakan program ini terdapat 2 (dua) kegiatan, yaitu :

a. Kegiatan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja

Kegiatan ini meliputi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelatihan dan evaluasi bagi anggota Satpol PP bertujuan untuk menjaga performa tugas anggota Satpol PP dan instansi Satpol PP itu sendiri.

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada kegiatan ini adalah kegiatan Forkomkon yang bertujuan sebagai sarana/forum komunikasi dan koordinasi antara Satpol PP dengan instansi terkait atau dengan masyarakat seperti pedagang kaki lima. Dari kegiatan ini Satpol PP bisa saling berkomunikasi dengan masyarakat sehingga dapat melaksanakan pencegahan tindak kriminal. Pada tahun 2019 forkonkom dilaksanakan dengan tema “Sinergitas Pemangku Kepentingan di Bidang Tibum Tranmas dalam rangka Penanganan PMKS di Kota Pekalongan”. Peserta kegiatan adalah Camat dan Lurah sekota Pekalongan beserta Kasi Trantib yang ada di Kecamatan dan Kelurahan, Dinas Sosial P2KB, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Kepala RPSBM Kota Pekalongan. Tujuan dari pelaksanaan forkonkom ini adalah:

1. Menyamakan persepsi pentingnya kerjasama yang baik dalam penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial : Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, Anak Punk, WTS, Narkoba, Miras dan Pengamen, Penyakit masyarakat lainnya).
2. Pemangku kepentingan terkait PMKS di Kota Pekalongan dapat lebih saling bersinergi dalam menciptakan Kota Pekalongan yang aman, nyaman dan tertib dari PMKS.
3. Stake Holder dapat mengambil langkah yang efektif dalam penanganan PMKS.



Gambar 3.52 Kegiatan Forkonkom

Sumber: Satpol PP Kota Pekalongan, 2020

b. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah

Kegiatan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan Siskamswakarsa meliputi Kesamaptaan Anggota Satpol yang diadakan di Gedug Diklat Kota Pekalongan dan Lapangan Mataram Kota Pekalongan pada 22-23 November 2019 dengan tujuan melihat dan menilai kesiapan tenaga bantu kegiatan Satpol PP baik secara fisik maupun lainnya untuk menerima tugas di tahun selanjutnya. Kegiatan Kesamaptaan terdiri dari Test Tertulis, Wawancara, Kesehatan dan Kesamaptaan.

Kegiatan Bintek Penyuluhan Undang-Undang juga telah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2019 di ruang amarta Setda Kota Pekalongan dengan tema penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Kota Pekalongan dan peserta adalah seluruh anggota Satpol PP. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempererat dan mensinergitaskan pemangku kepentingan di bidang tibum tranmas terkait PMKS di Kota Pekalongan serta membekali Anggota dengan pengetahuan terkait dasar hukum dan penyelesaian persoalan di lapangan. Tujuan kegiatan ini dilaksanakan yaitu :

1. Menyamakan persepsi pentingnya kerjasama yang baik dalam penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial : Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar, Anak Punk, WTS, Narkoba, Miras dan Pengamen, Penyakit masyarakat lainnya).
2. Anggota Satpol PP lebih memahami dan mengerti dasar hukum dan batasan terkait tugas dan fungsinya.
3. Anggota Satpol PP Kota Pekalongan dapat lebih cepat dan tanggap dalam melihat dan menyelesaikan permasalahan di lapangan.

Melalui kegiatan ini, Satpol PP juga turut berpartisipasi pada Lomba Defile dalam rangka peringatan HUT Satpol PP Tk. Provinsi Jawa Tengah th. Satpol PP berhasil menorehkan prestasi dengan meraih Juara II Lomba Defile ini.

Kegiatan Gelar Pasukan dan lomba dalam rangka HUT Satpol PP TiProvinsi Jawa Tengah Tahun 2019 ini dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 Februari 2019 bertempat di Stadion Hoegeng Kota Pekalongan dan diikuti oleh Kabupaten dan Kota se Jawa Tengah. Adapun pemenang lomba adalah sebagai berikut :

1. Lomba Defile Satpol PP :

- Juara 1 : Kota Semarang
- Juara 2 : Kota Pekalongan
- Juara 3 : Kabupaten Magelang
- Juara Harapan I : Kota Salatiga
- Juara Harapan II : Kabupaten Pekalongan
- Juara Harapan III : Kabupaten Semarang



Gambar 3.53 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah

Sumber: Satpol PP Kota Pekalongan, 2020

2. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)

Program ini dilaksanakan di Satpol PP dengan alokasi anggaran Rp. 150.000.000,- dan realisasi Rp. 149.650.000,- (*unaudited*) melalui 1 (tiga) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 1 indikator yang telah tercapai sesuai target.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.109 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.109 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT)

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Satpol PP						
1	Pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai (DBHCHT)	Jumlah razia pelaksanaan kegiatan pengumpulan informasi hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai di peredaran atau tempat penjualan eceran	Razia	48	48	48

Sumber: Satpol PP Kota Pekalongan, 2020

Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT) terdiri dari 1 kegiatan, yaitu: Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai (DBHCHT).

Satpol PP melalui kegiatan ini melaksanakan tugas pengumpulan data mengenai rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai. Operasi razia pengumpulan data ini dilaksanakan dengan melibatkan instansi lain diantaranya: Bagian Hukum, Dindakop, Kejaksaan, Kepolisian, Kodim,

Bagian Perekonomian, dll. Target pengumpulan data dan informasi ini adalah toko-toko penjual rokok yang ada di Kota Pekalongan. Selain melakukan pengumpulan data, Satpol PP juga turut mensosialisasikan kepada toko-toko yang didatangi mengenai larangan peredaran rokok tanpa pita cukai dengan menempel stiker dan membagikan brosur.

Hasil pengumpulan data dan informasi ini kemudian dilaporkan untuk dikoordinasikan dengan Bea Cukai untuk segera ditindaklanjuti. Berikut hasil rekapitulasi pengumpulan data dan informasi rokok tanpa pita cukai tahun 2019 :

Tabel 3.110 Rekapitulasi Rokok Tanpa Pita Cukai Tahun 2019

NO.	BULAN	BATANG	BUNGKUS
1	Januari	-	-
2	Februari	1500	75
3	Maret	27	1
4	April	-	-
5	Mei	-	-
6	Juni	3680	184
7	Juli	887	44
8	Agustus	-	-
9	September	3040	152
10	Oktober	-	-
11	November	1700	85
12	Desember	-	-

Sumber: Satpol PP Kota Pekalongan, 2020



Gambar 3.54 Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai (DBHCHT)

Sumber: Satpol PP Kota Pekalongan, 2020

3. Program Pelayanan Kedaruratan Sipil

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi Rp. 3.449.940.000,- dan realisasi 3.377.692.736,- (*unaudited*) melalui 4 (empat) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 7 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 6 indikator yang seluruhnya tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.111 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran Matriks II tentang Persandingan Target dan Realisasi Indikator dan Anggaran RKPD-APBD.

Tabel 3.111 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pelayanan Kedaruratan Sipil

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Satpol PP						
1	Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah kegiatan pelaksanaan pengamanan wilayah dalam rangka hari besar keagamaan, natal dan tahun baru serta kegiatan operasional Linmas	Kegiatan	47	47	50
		Jumlah kegiatan PAM piket rumah	kali	270	270	270
		Jumlah hari piket posko PBA	hari	90	90	90
2	Pengendalian keamanan lingkungan	Jumlah pelaksanaan kegiatan sarasehan kantrantibmas dan Kader Siaga Trantib (KST) dalam rangka komunikasi dan pemberdayaan masyarakat	Kegiatan	0	0	17
		Jumlah kegiatan pengendalian keamanan yang dilaksanakan	Kegiatan	90	90	101
3	Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Jumlah aduan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran yang tertangani	Kejadian	25	25	49
4	Pengamanan Pemilihan Umum	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan pengamanan Pemilihan Presiden dan Legislatif yang kondusif, aman dan tertib	bulan	6	6	6

Sumber: Satpol PP Kota Pekalongan, 2020

Program Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan terdiri dari 4 kegiatan yaitu :

a. Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Kegiatan penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan (LINMAS) yang telah dilaksanakan pada Tahun 2019 meliputi Posko Penanggulangan Bencana Alam (PBA), Pengamanan pada hari-hari besar keagamaan seperti Hari Raya Idul Fitri, Syawal dan Natal serta pengamanan pada saat Tahun baru sehingga tercipta peningkatan situasi yang aman dan kondusif. Terciptanya kerukunan antar umat beragama serta keamanan dan kenyamanan lingkungan di wilayah Kota Pekalongan juga menjadi tujuan dari kegiatan ini.

Kegiatan Linmas juga berkaitan dengan pelatihan petugas Linmas di Kota Pekalongan antara lain Pelaksanaan Kegiatan Kesamaptaan di Agrowisata Pagilaran Kabupaten Batang dan diikuti Linmas Ton Inti sebanyak 35 orang dengan materi Pembinaan Kelinmasan, Peran Satlinmas dalam Pertahanan Negara dan Penanganan Pertama pada Korban Bencana.



Gambar 3.55 Kegiatan Operasional Linmas & Pengamanan Wilayah pada Hari Besar Keagamaan

Sumber: Satpol PP Kota Pekalongan, 2020

b. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan

Kegiatan pengendalian keamanan lingkungan meliputi pelaksanaan kegiatan sarasehan yang bertujuan sebagai sarana komunikasi antara Satpol PP dengan masyarakat sehingga pengelolaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat secara efektif terlaksana dengan tepat sasaran. Kegiatan ini dilaksanakan secara bergilir di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Pekalongan dengan peserta adalah perangkat daerah kelurahan serta masyarakat sekitar dalam rangka komunikasi dan pemberdayaan masyarakat.



Gambar 3.56 Kegiatan Operasional Operasional Satpol PP

Sumber: Satpol PP Kota Pekalongan, 2020

c. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Kegiatan ini meliputi kegiatan operasional Damkar, seperti penanganan kebakaran yang terjadi di dalam dan sekitar wilayah Kota Pekalongan. Tidak hanya menangani kebakaran yang terjadi, anggota Damkar Kota Pekalongan juga selalu siap siaga dalam menanggapi laporan warga terkait permohonan bantuan bencana alam lain seperti penanganan sarang tawon, penaklukan ular di lingkungan warga dan laporan-laporan lain.

Pencegahan bahaya kebakaran juga selalu menjadi prioritas Damkar Kota Pekalongan dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara menghindari bahaya kebakaran sampai dengan cara penanggulangannya.

Tabel 3.112 Rekapitulasi Pemadaman Kebakaran Tahun 2019

NO	HARI/ TANGGAL	TEMPAT KEBAKARAN/ ALAMAT	TERBAKAR	PENYEBAB KEBAKARAN
1	Jum'at, 25 Jan 2019	Kelurahan Banyurip	Rumah	Api Kompor
2	Senin, 25 Feb 2019	Depan TK Batik Setono	Gerobak	Api Kompor
3	Rabu, 13 Maret 2019	BPJS Ketenagakerjaan	Saklar	Saklar meledak
4	Kamis, 14 Maret 2019	Jl. Kebon Sari, Karang Malang	Gudang Kapuk	Arus Pendek Listrik
5	Minggu, 21 April 2019	Kelurahan Soko Duwet Rt 01/02 (Kab. Pekalongan)	Dapur Home Industri	Tungku
6	Selasa, 23 April 2019	Simbang Kulon Gg. Kartiko Rt 24/ Rw 09 (Kab. Pekalongan)	Rumah	Kompor Cap Batikan
7	Jum'at, 26 April 2019	Simbang Kulon Raya	Dapur	Arus Pendek Listrik
8	Minggu, 12 Mei 2019	Jl. Ahmad Yani	Lahan Kosong	Anak Mainan Petasan
9	Rabu, 15 Mei 2019	Jl. Sultan Agung	Kios Buah	Obat Nyamuk Bakar
10	Sabtu, 18 Mei 2019	Mall Ramayana	1 Unit Gudang genset	Konsleting
11	Minggu, 26 Mei 2019	Jalan Tol Pekalongan - Pemalang	Truk Muatan	Tangki Bensin Bocor
12	Sabtu, 1 Juni 2019	PG. Sragi PTPN X Nusantara	Pabrik	Percikan Api
13	Minggu, 2 Juni 2019	Pabrik Dupantex Tirto	Pabrik	Arus Pendek Listrik
14	Senin, 10 Juni 2019	Ruko Batik Kuntul Mas	Ruko	Puntung Rokok
15	Jum'at, 28 Juni 2019	Ruko Jl. Kusuma Bangsa No. 25	Ruko	Kompor Gas
16	Senin, 2 Juli 2019	TPA Degayu	TPA	Cuaca Panas
17	Rabu, 10 Juli 2019	Jl. Gatot Subroto Kios Ayam Bakar	Kios Buah	Kompor Gas
18	Jum'at, 19 Juli 2019	Jl. RE Martadinata (Kab. Batang)	Rumah	Kompor Gas
19	Selasa, 23 Juli 2019	Perum Swadaya Kandang Panjang	Rumah	Arus Pendek Listrik
20	Rabu, 24 Juli 2019	Sebelah Rusunawa Panjang	Lahan Kosong	Bakar-Bakar Sampah
21	Rabu, 7 Agustus 2019	Home Industri Gondo, Jl. Letnan Suprpto	Home Industri	Gondo Meluap
22	Kamis, 8 Agustus 2019	TPA Degayu	TPA	Cuaca Panas
23	Jum'at, 9 Agustus 2019	Jl. Garuda gg. Delima No. 41 (Kab. Pekalongan)	Rumah	Arus Pendek Listrik
24	Rabu, 14 Agustus 2019	Simbang Wetan Rt 08/ Rw. 03 Buaran (Kab. Pekalongan)	Rumah	Arus Pendek Listrik

NO	HARI/ TANGGAL	TEMPAT KEBAKARAN/ ALAMAT	TERBAKAR	PENYEBAB KEBAKARAN
25	Selasa,27 Agustus 2019	Bong Cino Belakang BLK Kuripan	Alang-alang Bong Cino	Bakar-Bakar Sampah
26	Kamis, 29 Agustus 2019	PT. Sinar Amarel Batang, Tulis (Batang)	Pabrik	Arus Pendek Listrik
27	Jum'at, 30 Agustus 2019	Jl. WR. Supratman (Along Jaya)	Kapal	Bakar-Bakar Sampah
28	Jum'at, 30 Agustus 2019	Lap. Tembak Mako Brimob Kalibanger	Lahan Kosong	Bakar Sampah Ban
29	Jum'at, 6 September 2019	SD Panjang Wetan 04	Lahan Kosong	Bakar Sampah
30	Minggu, 8 September 2019	Jl. Diponegoro	Sampan	Bakar-Bakar Sampah
31	Senin, 10 September 2019	Perum. Podosugih	Lahan Kosong	Bakar Sampah
32	Selasa, 11 September 2019	Jl. Patimura Kel. Gamer	Bahu Persawahan Lahan Kosong	Bakar Jerami
33	Kamis, 12 September 2019	Wonoyoso Gg. 1 (Kab. Pekalongan)	Rumah	Arus Pendek Listrik
34	Sabtu, 14 September 2019	Rumah Kos Jl. Kusuma Bangsa	Rumah Kos	Obat Nyamuk Bakar
35	Selasa, 24 September 2019	BLK Kuripan	Alang-alang Halaman BLK	Bakar- Bakar Lahan
36	Minggu. 29 September 2019	Kauman Gg. 3 No. 4	Rumah Kos	Konsleting Listrik
37	Jum'at, 4 Oktober 2019	Pisang Sari Kel. Panjang Wetan	Rumah	Konsleting Listrik
38	Senin, 7 Oktober 2019	Jl. Keputran Gg. A	Rumah	Konsleting Listrik
39	Kamis, 24 Oktober 2019	Kuripan Kidul Gg. 2	Lahan Kosong	Bakar - Bakar Sampah

Sumber: BPBD Kota Pekalongan, 2020

Tabel 3.113 Rekapitulasi Evakuasi Hewan Liar Oleh Pemadam Kebakaran

NO	HARI/ TANGGAL	JENIS HEWAN	TEMPAT EVAKUASI	KORBAN
1	Jum'at, 4 Januari 2019	Tawon Liar	Alun-Alun Kota Pekalongan	NIHIL
2	Sabtu, 5 Januari 2019	Tawon Liar	Alun-Alun depan bank Mandiri	NIHIL
3	Rabu, 9 Januari 2019	Tawon Liar	Jl. Trikora Gg. 1 Kel. Yosorejo	NIHIL
4	Rabu, 9 Januari 2019	Tawon Liar	Soko Duwet Gg. 19	NIHIL
5	Rabu, 9 Januari 2019	Tawon Liar	Jl. Trikora No. 73 Kel. Yosorejo	NIHIL
6	Rabu, 9 Januari 2019	Tawon Liar	Yosorejo RT. 03/06 Kuripan Yosorejo	NIHIL
7	Jum'at, 11 Januari 2019	Tawon Liar	Jl. Oto Iskandardinata No.3	NIHIL
8	Jum'at, 11 Januari 2019	Tawon Liar	Noyontaan Gg. 16 B No.3	NIHIL
9	Senin, 14 Januari 2019	Biawak	Perum. Beringin	NIHIL
10	Kamis, 17 Januari 2019	Tawon Liar	Noyontaan Gg. 12 A	NIHIL
11	Jum'at, 18 Januari 2019	Tawon Liar	Kradenan Gg.1 Buaran	NIHIL

NO	HARI/ TANGGAL	JENIS HEWAN	TEMPAT EVAKUASI	KORBAN
12	Jum'at, 18 Januari 2019	Biawak	Perum. Villa Atria Blok No.2	NIHIL
13	Jum'at, 18 Januari 2019	Tawon Liar	Dinas Pendidikan	NIHIL
14	Minggu, 20 Januari 2019	Tawon Liar	Keputran Gg. 7	NIHIL
15	Sabtu, 2 Februari 2019	Tawon Liar	Jl. Kh Ahmad Dahlan Rt 03/ 07	NIHIL
16	Senin, 4 Februari 2019	Tawon Liar	Jl. Jawa	NIHIL
17	Sabtu, 16 Februari 2019	Tawon Liar	Jl. Oto Iskandardinata Rt 03/01	NIHIL
18	Senin, 11 Maret 2019	Tawon Liar	Jl. Oto Iskandardinata Rt 01/04	NIHIL
19	Jum'at, 15 Maret 2019	Tawon Liar	Aspol Kraton	NIHIL
20	Rabu, 20 Maret 2019	Tawon Liar	Jl. Dr. Wahidin Gg.2 No.34	NIHIL
21	Minggu, 24 Maret 2019	Tawon Liar	TK Mahad Islam	NIHIL
22	Jum'at, 29 Maret 2019	Tawon Liar	Kraton Gg. 1 B No.3	NIHIL
23	Jum'at, 29 Maret 2019	Tawon Liar	Jl. Karya Bakti Gg. Sunan Giri	NIHIL
24	Selasa, 2 April 2019	Tawon Liar	Jl. Karang Malng	NIHIL
25	Jum'at, 26 April 2019	Tawon Liar	Jl. Kalimantan	NIHIL
26	Minggu, 28 April 2019	Tawon Liar	Jl. Sulawesi	NIHIL
27	Selasa, 7 Mei 2019	Tawon Liar	Jl. Asem Binatur	NIHIL
28	Rabu, 8 Mei 2019	Tawon Liar	Taman Wilis Sebelah Selatan	NIHIL
29	Kamis, 16 Mei 2019	Tawon Liar	Jl. Nusa Indah No. 10	NIHIL
30	Kamis, 11 Juli 2019	Tawon Liar	Jl. Blimbing No.60-62 Rt03/04	NIHIL
31	Minggu, 9 Juni 2019	Ular	Jl. Pringlangu Gg. 1 Kel. Pringrejo	NIHIL
32	Senin, 15 Juli 2019	Tawon Liar	Hotel Shantika	NIHIL
33	Jum'at, 26 Juli 2019	Anjing	Perum. Binagriya Jl. Elok Baru	NIHIL
34	Rabu, 31 Juli 2019	Tawon Liar	Jl. Irian Gg. 4 Sapuro Kebulen	NIHIL
35	Selasa, 13 Agustus 2019	Tawon Liar	Kuripan Lor Gg. 14	NIHIL
36	Selasa, 10 September 2019	Tawon Liar	Jl. Sumatra Gg.9	NIHIL
37	Rabu, 11 September 2019	Tawon Liar	Jl. Madura Gg. 1 Kebulen	NIHIL
38	Selasa, 17 September 2019	Tawon Liar	Jl. Prisma Raya Perum. Linmas	NIHIL
39	Jum'at, 20 Septemebr 2019	Tawon Liar	Perum GTA	NIHIL
40	Rabu, 25 September 2019	Biawak	Setono GG. V No. 55	NIHIL
41	Minggu, 29 September 2019	Tawon Liar	Jl. Kanfer Perum. Slamaran	NIHIL
42	Jum'at, 4 Oktober 2019	Tawon Liar	BPJS Kesehatan	NIHIL
43	Sabtu, 5 Oktober 2019	Kucing terjepit	Jl. WR. Supratman Pisang Sari gg. Lemuru No.36	NIHIL
44	Rabu, 16 Oktober 2019	Tawon Liar	Klego Gg.8	NIHIL
45	Sabtu, 26 Oktober 2019	Tawon Liar	Duwet RT 02 RW 02	NIHIL
46	Senin, 4 November 2019	Tawon Liar	Jl. Perintis Kemerdekaan, Kraton	NIHIL
47	Kamis, 7 November 2019	Tawon Liar	Jl. Pembangunan	NIHIL
48	Sabtu, 9 November 2019	Tawon Liar	Kramatsari Gg. 19	NIHIL
49	Minggu, 17 November 2019	Tawon Liar	Kel. Tegal Rejo RT 04/ RW 09	NIHIL
50	Senin, 18 November 2019	Tawon Liar	Jl. Gajah Mada Tirto gg 1 Rt 03 RW 01	NIHIL
51	Selasa, 19 November 2019	Tawon Liar	Noyontaan Rt 02 Rw 06	NIHIL

NO	HARI/ TANGGAL	JENIS HEWAN	TEMPAT EVAKUASI	KORBAN
52	Kamis, 21 November 2019	Tawon Liar	Jl. Untung Suropati Gg. Kyai Adnan No. 32	NIHIL
53	Rabu, 27 November 2019	Tawon Liar	Kantor BAPPEDA	NIHIL
54	Rabu, 27 November 2019	Tawon Liar	Jl. Tentara Pelajar	NIHIL
55	Rabu, 27 November 2019	Tawon Liar	Kraton Kidul	NIHIL
56	Kamis, 28 November 2019	Tawon Liar	Jl. Patriot No. 29	NIHIL
57	Kamis, 28 November 2019	Tawon Liar	Jl. Agus Salim	NIHIL
58	Jum'at, 29 November 2019	Tawon Liar	Klego	NIHIL
59	Jum'at, 29 November 2019	Tawon Liar	Jl. Kayu Manis	NIHIL
60	Sabtu, 30 November 2019	Tawon Liar	Jl. Parang Garuda	NIHIL
61	Sabtu, 30 November 2019	Tawon Liar	Jl. Jendral Sudirman	NIHIL
62	Sabtu, 30 November 2019	Tawon Liar	Jl. Pringgosari	NIHIL
63	Sabtu, 30 November 2019	Tawon Liar	Jl. Buaran Gg. 2	NIHIL
64	Minggu, 1 Desember 2019	Tawon Liar	Jl. Pagerung Bendan Kergon	NIHIL
65	Selasa, 3 Desember 2019	Tawon Liar	Perum. BRD	NIHIL
66	Rabu, 4 Desember 2019	Tawon Liar	Kantor Dishub	NIHIL
67	Rabu, 4 Desember 2019	Tawon Liar	Kel. Klego	NIHIL
68	Rabu, 4 Desember 2019	Tawon Liar	Jl. Cendrawasih	NIHIL
69	Kamis, 5 Desember 2019	Tawon Liar	Jl. Rajawali Utara	NIHIL
70	Kamis, 5 Desember 2019	Tawon Liar	Poncol	NIHIL
71	Jum'at, 6 Desember 2019	Tawon Liar	SMP N 05	NIHIL
72	Jum'at, 6 Desember 2019	Tawon Liar	Puskesmas Noyontaan	NIHIL
73	Jum'at, 6 Desember 2019	Tawon Liar	Setono Gg. 6	NIHIL
74	Jum'at, 6 Desember 2019	Tawon Liar	Bendan Kergon	NIHIL
75	Jum'at, 6 Desember 2019	Tawon Liar	Jl. Untung Suropati	NIHIL
76	Sabtu, 7 Desember 2019	Tawon Liar	Jl. Irian	NIHIL
77	Sabtu, 7 Desember 2019	Tawon Liar	Jl. Kapita Patimura	NIHIL
78	Minggu, 8 Desember 2019	Tawon Liar	Jl. Rajawali Selatan	NIHIL
79	Jum'at, 13 Desember 2019	Tawon Liar	EXTREM Futsal	NIHIL
80	Jum'at, 13 Desember 2019	Tawon Liar	Jl. H. Agus Salim	NIHIL
81	Kamis, 19 Desember 2019	Tawon Liar	Mushola instansi KPKNL	NIHIL
82	Kamis, 19 Desember 2019	Tawon Liar	Banyurip Alit	NIHIL
83	Kamis, 19 Desember 2019	Tawon Liar	Jl. Otto Iskandardinata	NIHIL
84	Sabtu, 21 Desember 2019	ULAR	Karanganyar Gg. XI	NIHIL
85	Minggu, 22 Desember 2019	Tawon Liar	Soko	NIHIL

Sumber: BPBD Kota Pekalongan, 2020



Gambar 3.57 Kegiatan Seksi Damkar

Sumber: BPBD Kota Pekalongan, 2020

d. Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum

Pada Tahun 2019 dilaksanakan Pemilihan serentak Presiden dan legislatif, kegiatan ini bertujuan guna menciptakan situasi yang kondusif, aman dan tertib selama pelaksanaan Pemilu. Pengamanan dilaksanakan mulai dari Apel Siaga oleh petugas Satpol PP, Linmas dan Dishub bertempat di Lapangan Mataram. Pengamanan pada saat Pemilu berlangsung yang dilaksanakan di Kelurahan, Kecamatan, Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan patroli wilayah di Kota Pekalongan.

Satpol PP Kota Pekalongan mengerahkan regu *full team* yang dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP mulai dari kegiatan apel siaga, pembersihan *attribute* pemilu, pengamanan pra pemilu dan pasca pemilu sehingga berlangsung lancar dan sukses.



Gambar 3.58 Kegiatan Apel Siaga Menjelang Pemilihan Umum

Sumber: Satpol PP Kota Pekalongan, 2020



Gambar 3.59 Kegiatan Pengamanan Pemilihan Umum

Sumber: Satpol PP Kota Pekalongan, 2020

4. Program Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 3.428.080.000,- dan realisasi 3.335.052.400,- (*unaudited*) melalui 1 (satu) Kegiatan, dengan indikator output sebanyak 1 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 1 indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.114 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.114 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Satpol PP						
1	Penegakan Perda dan Keputusan Walikota	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan operasi penegakan perda dan perwal di wilayah Kota Pekalongan	bulan	12	0	0
		Jumlah pelaksanaan kegiatan operasi pekat, PGOT, reklame, dan sarasehan serta pengumpulan data dan informasi	kali	252	252	252

Sumber: Satpol PP Kota Pekalongan, 2020

Program Peningkatan kepatuhan aparatur, badan usaha/hukum dan masyarakat pada produk hukum daerah terdiri dari 1 kegiatan yaitu **Penegakan Perda dan Keputusan Walikota**.

a. Kegiatan Penegakan Perda dan Keputusan Walikota

Program Peningkatan kepatuhan aparat, badan usaha/hukum dan masyarakat pada produk hukum daerah terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penegakan Perda dan Keputusan Walikota. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan program kerja inti dan senantiasa dilaksanakan secara konsisten oleh Satpol PP Kota Pekalongan. Kegiatan ini meliputi Operasi Penyakit Masyarakat (Miras, Narkoba, PSK, Judi, Anak Punk), Operasi PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar), Operasi Reklame, Patroli Wilayah, Pengamanan Rumah Dinas dan Aset Daerah, Sosialisasi Perda ke Aparat dan Masyarakat. Satpol PP juga senantiasa bekerja sama dengan SKPD lain dalam upaya penegakan Perda yaitu BPPT (ijin usaha, HO, warnet), Dindagkop-UKM (operasi makanan kadaluarsa, pasar tiban), BKD, Inspektorat dan Bagian Hukum (Disiplin Pegawai), TNI/POLRI (pengamanan wilayah dan kegiatan).

Dari hasil operasi rutin yang dilakukan serta tindak penertiban yang dilaksanakan setelah melalui tahapan-tahapan sesuai SOP yang ada, berikut hasil rekapitulasi kegiatan penegakan Perda dan Keputusan Walikota :

Tabel 3.115 Rekapitulasi Penegakan Perda dan Keputusan Walikota

NO	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH
1	Pasangan Asusila	22
2	Peminum Minuman Keras	199
3	Penjual Miras	2
4	Anak Jalanan	155
5	Pelajar Bolos	25
6	PGOT	185
7	Bangunan Tidak ada IMB	19
8	Reklame tidak tertib	1068

Sumber: Satpol PP Kota Pekalongan, 2020

Selain melakukan patroli rutin, Satpol PP Kota Pekalongan juga rajin memberikan sosialisasi kepada pedagang kaki lima. Sesuai SOP yang ada, sebelum melakukan penertiban pihak Satpol PP memberikan peringatan kepada pedagang agar lebih tertib, setelah peringatan yang diberikan tidak ditindaklanjuti, penertiban baru akan dilaksanakan. Selama tahun 2019, berikut rekapitulasi hasil penertiban pedagang kaki lima :

Tabel 3.116 Rekapitulasi Pelanggaran PK5 Tahun 2019

No	Nama Pedagang	Lokasi Jualan	Jenis Pelanggaran	Bulan Penertiban
1	Ahmad M	Alun-alun	Di atas Trotoar	03-Jan-19
2	Soraji	Pasir Sari	Di atas Trotoar	03-Jan-19
3	Ahmad Rifai	Sorogenen	Di atas Trotoar	05-Jan-19
4	Amat Sodikin	Jl. Gajahmada	Di atas Trotoar	08-Jan-19
5	Imam	Jl. Progo	Di atas Trotoar	09-Jan-19
6	Cahyo Lukman	Jl. Progo	Di atas Trotoar	09-Jan-19
7	Diah Pitaloka Safitri	Jetayu	Di atas Trotoar	14-Jan-19
8	Jubiyah	Jl. Sultan Agung	Lokasi larangan PK5	14-Jan-19

No	Nama Pedagang	Lokasi Jualan	Jenis Pelanggaran	Bulan Penertiban
9	Achan	Jl. Progo	Di atas Trotoar	15-Jan-19
10	Wasdui	Jl. Sultan Agung	Di atas Trotoar	14-Jan-19
11	Puji Lestari	Jetayu	Di atas Trotoar	13-Feb-19
12	Sutirah	Sorogenen	Di atas Trotoar	04-Mar-19
13	Donny Agustin	Stadium Hoegeng	Di atas Trotoar	04-Mar-19
14	Torah	Alun-alun	Di atas Trotoar	03-Mei-19
15	Sumirah	Depan Gereja	Di atas Trotoar	04-Mei-19
16	Komariyah	Alun-alun	Di atas Trotoar	06-Mei-19
17	M. Haqqul Hana	Depan Hotel Asia	Di atas Trotoar	06-Mei-19
18	M. Arif Rahman	Jl. Wahid Hasyim	Di atas Trotoar	09-Mei-19
19	Nur Hidayat	Alun-alun Sisi Selatan	Di atas Trotoar	13-Mei-19
20	M. Hatta	Lap. Mataram	Barang ditinggal	14-Mei-19
21	Sobirin	Lap. Mataram	Barang ditinggal	20-Mei-19
22	Teguh Harmoko	Jl. Dr. Cipto	Di atas Trotoar	22-Mei-19
23	Adi Susanto	Jl.Dr.Sutomo	Di atas Trotoar	07-Jul-19
24	Mujiyono	Jl Kurinci	Di atas Trotoar	16-Jul-19
25	Eni Astuti	Lap. Mataram	Barang ditinggal	16-Jul-19
26	Robiman	Lap. Mataram	Di atas Trotoar	16-Jul-19
27	Sulisriyono	Jl Binagriya	Di atas Trotoar	17-Jul-19
28	Mardiyanto	Jl Binagriya	Di atas Trotoar	17-Jul-19
29	Nuryanto	Jl Dr.Wahidin	Di atas Trotoar	23-Jul-19
30	Setia Ningsih	Depan Hotel Namira	Di atas Trotoar	30-Jul-19
31	Eko Mulyo	Jl Urip Sumoharjo	Di atas Trotoar	29-Jul-19
32	M Risqi Darmawan	Jl Dr.Cipto	Di atas Trotoar	30-Jul-19
33	Muslikhun	Baros	Di atas Trotoar	02-Agust-19
34	Rasidin	Jl Hasyim Ashari	Di atas Trotoar	06-Agust-19
35	Bambang Supriyanto	Jl Dr.Cipto	Di atas Trotoar	12-Agust-19
36	Muslimin	Jl Veteran	Di atas Trotoar	22-Agust-19
37	Amrozi	Depan Asrama Brimob	Di atas Trotoar	16-Agust-19
38	Yunan Helmi	Depan SD Kraton	Di atas Trotoar	22-Agust-19
39	Ummu Siba Shidqiyah	Sorogenen	Di atas Trotoar	23-Agust-19
40	Shobirin	Jl Urip Sumoharjo	Di atas Trotoar	11-Sep-19
41	M Arif Budiman	Jl Semarang	Di atas Trotoar	13-Sep-19
42	Fathia Wati	Depan SD Kraton	Di atas Trotoar	19-Sep-19
43	Sobirin	Sebelah Transmart	Lapak di tinggal	22-Okt-19
44	Solehudin	Sebelah Transmart	Lapak di tinggal	22-Okt-19
45	M Tohiri	Jl Urip Sumoharjo	Lapak di tinggal	22-Okt-19
46	M Trikhamdanil	Depan Hotel Dafam	Lapak di tinggal	22-Okt-19
47	Ahmad Farozi	Jl Urip Sumoharjo	Lapak di tinggal	22-Okt-19
48	Abdul Gani	Jl Urip Sumoharjo	Lapak di tinggal	22-Okt-19
49	Rohmat	Jl Urip Sumoharjo	Lapak di tinggal	22-Okt-19
50	Nurul Anam	Jl Urip Sumoharjo	Lapak di tinggal	22-Okt-19
51	Nirwan Gerdiawan	Jl.Urip Sumoharjo	Lapak Di Tinggal	22-Okt-19
52	Daroji	Jl.Urip Sumoharjo	Lapak Di Tinggal	22-Okt-19

No	Nama Pedagang	Lokasi Jualan	Jenis Pelanggaran	Bulan Penertiban
53	Sriono Budi Santoso	Jl.Karang Malang	Lapak Di Tinggal	29-Nop-19
54	Roziqin	Jl.Bina Griya no 70	Lapak Di Tinggal	19-Nop-19
55	Setiawan B	Depan Pengadilan	Diatas Troatoar	06-Nop-19
56	Rozali	Jl. Bina Griya Raya	Lapak Di Tinggal	18-Nop-19
57	Rudiyem	Pringlangu	Diatas Troatoar	22-Nop-19
58	Saiful	Pasar Banyurip	Diatas Troatoar	19-Nop-19
59	Fauzi	Jl.Pelita II	Lapak Di Tinggal	02-Des-19
60	Kartinah	Perempatan Kauman	Di Pos Polisi	16-Des-19
61	Mustaqim	Jl,Sultan Agung	Diatas Troatoar	13-Des-19
62	Rohmat	Lapangan Bumirejo	Lapak Di Tinggal	26-Des-19
63	Slamet R	Jl.Wilis	Lapak Di Tinggal	23-Des-19
64	Kusnen	Pasar Banyurip	Lapak Di Tinggal	19-Des-19

Sumber: Satpol PP Kota Pekalongan, 2020



Gambar 3.60 Kegiatan Penegakan Perda

Sumber: Satpol PP Kota Pekalongan, 2020

5. Program Penanggulangan Bencana Alam

Program ini dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.439.850.000,- dan realisasi Rp. 1.229.312.360,- (*unaudited*) melalui 6 (enam) kegiatan dengan indikator output sebanyak 12 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 11 indikator tercapai dan 1 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.117 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran Matriks II tentang Persandingan Target dan Realisasi Indikator dan Anggaran RKPD-APBD.

Tabel 3.117 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Penanggulangan Bencana Alam

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
BPBD						
1	Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Jumlah jenis media informasi tentang bencana (leaflet, spanduk, dan pos)	jenis	3	3	3
		Jumlah kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan	kali	4	4	4
		Jumlah kegiatan apel siaga yang difasilitasi	kali	2	2	0
2	Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	jumlah dokumen penanggulangan bencana yang tersusun	dokumen	1	1	1
		Papan penunjuk arah kebencanaan	buah	0	0	0
3	Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban	jumlah kejadian bencana alam yang difasilitasi bantuan	kejadian	5	5	1
		jumlah bulan ketersediaan logistik	bulan	12	12	12
4	Fasilitasi tanggap darurat	Jumlah pelaksanaan kebersihan kelurahan yang dilewati sungai Pekalongan	kelurahan	9	9	9
		Jumlah kegiatan evakuasi bangkai kapal yang dilaksanakan	kegiatan	1	1	1
		Jumlah bulan penanggulangan bencana yang difasilitasi	bulan	12	12	12
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kebencanaan	jumlah peralatan dan perlengkapan Kebencanaan yang diadakan	unit	26	26	26

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian
			orang	200	200	
6	Peningkatan ketrampilan pencegahan dan penanggulangan bencana	jumlah personil/ relawan/ pokmas/ pelajar yang mendapatkan keterampilan pencegahan dan penanggulangan bencana				200

Sumber: BPBD Kota Pekalongan, 2020

Berdasarkan tabel di atas, kegiatan yang menunjang program Penanggulangan Bencana Alam yaitu :

1. Kegiatan Pemantauan dan penyebaran informasi potensi bencana alam

Pada kegiatan ini, terdapat 3 (tiga) indikator yang dilaksanakan, yaitu pemasangan spanduk, pembuatan leaflet dan pendirian posko; penyelenggaraan sosialisasi; dan penyelenggaraan apel siaga.

Pemasangan spanduk, pembuatan leaflet dan pendirian posko sebagai sarana pemantauan dan penyebaran informasi kebencanaan bagi masyarakat.

Selain itu penyebaran informasi juga dilakukan melalui media sosial seperti instagram, twitter dan facebook.

Kegiatan Sosialisasi Kebencanaan selama tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan lokasi di Kecamatan Pekalongan Barat, RSUD Bendan, SMKN 2 Pekalongan dan SMPN 12 Pekalongan dengan melibatkan peserta sebanyak 400 orang dari pelajar dan aparatur kecamatan, anggota PKK, RSUD Bendan. Narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain dari PMI, TNI. Output yang dihasilkan adalah 100%.



Gambar 3.61 Dokumentasi Penyebaran Informasi Potensi Bencana Alam

Sumber: BPBD Kota Pekalongan, 2020

Akan tetapi, pada tahun 2019, sub kegiatan apel siaga tidak dapat terealisasi. Hal tersebut dikarenakan adanya kegiatan yang saling berbenturan dan banyaknya permintaan sosialisasi/ simulasi baik dari kelurahan terkait dana kelurahan/ instansi/ lembaga masyarakat, serta terbatasnya waktu dan kurangnya koordinasi guna pelaksanaan kegiatan.

2. Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam

Pada kegiatan ini dilaksanakan kegiatan penyusunan dokumen SOP Kontijensi Banjir. SOP Kontijensi Banjir ini diperlukan sebagai langkah kesiapsiagaan dalam menghadapi kemungkinan bencana/ kedaruratan, termasuk kesiapsiagaan masyarakat. SOP Kontijensi Banjir dibuat sebagai dasar dan pedoman bagi Pemerintah Kota Pekalongan dan para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas Penanggulangan Bencana yang terjadi.

3. Kegiatan Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi korban

Pada kegiatan ini dilaksanakan pembelian logistik dan obat-obatan bagi korban yang disalurkan saat terjadi bencana.

Di Kota Pekalongan tahun 2019 terdapat 1 kejadian bencana yaitu pada tanggal 26 Januari 2019 terjadi banjir di hampir 70% wilayah kota Pekalongan yang mengakibatkan 2.964 jiwa mengungsi.

4. Kegiatan Fasilitas Tanggap Darurat

Pada Kegiatan Fasilitas Tanggap Darurat selain untuk honor tenaga kegiatan (Satgas PB dan Pekarya), juga digunakan untuk memfasilitasi kegiatan evakuasi-evakuasi saat terjadi bencana, pembuatan tanggul darurat, evakuasi bangkai kapal dan juga bersih sungai massal. Ketercapaian output Kegiatan ini adalah sebesar 100%.



Gambar 3.62 Dokumentasi Penanggulangan Bencana

Sumber: BPBD Kota Pekalongan, 2020



Gambar 3.63 Dokumentasi Pencegahan Bencana

Sumber: BPBD Kota Pekalongan, 2020

5. Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempersiapkan dan menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Pekalongan agar memiliki kompetensi (pengetahuan, keterampilan, dan sikap) dalam penanggulangan bencana sehingga diharapkan akan semakin meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam penanggulangan bencana sehingga penanganan terhadap bencana dapat lebih cepat, tepat, dan dapat meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan oleh bencana.

Pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yang diikuti oleh 200 orang peserta dari unsur relawan, pelajar/ mahasiswa, aparat kelurahan/ kecamatan. Narasumber kegiatan dari BPBD Prov. Jateng, BASARNAS, TNI, POLRI/BRIMOB,. Pada kegiatan ini output yang dihasilkan adalah 100%

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, untuk membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam melaksanakan monitoring daerah rawan bencana, kaji cepat bencana dan dampak bencana dibentuk Satuan Tugas Penanggulangan Bencana (Satgas PB) yang diatur tersendiri dalam Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 360.05/018 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan.

Satuan Tugas Penanggulangan Bencana mempunyai tugas antara lain :

- a. melakukan monitoring lapangan dan proses penanganan dan penanggulangan bencana di Kota Pekalongan;
- b. memberikan masukan dan mengidentifikasi daerah rawan bencana sesuai kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan terhadap usaha penanganan dan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan merata;
- c. melakukan patroli rutin dan koordinasi penanganan pada obyek tertentu yang berdampak dan mengakibatkan potensi rawan bencana (daerah genangan akibat intensitas hujan tinggi, sungai, pantai, longsor, pohon tumbang yang mengganggu kenyamanan masyarakat dll) di Kota Pekalongan;
- d. melaksanakan evakuasi serta tindakan yang diperlukan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi lapangan dalam upaya penanganan terhadap kejadian bencana;
- e. melaporkan secara lisan atau tertulis sehubungan dengan tugas monitoring, patroli dan identifikasi daerah rawan bencana;
- f. melaksanakan kesiapsiagaan penggunaan maupun perawatan atas peralatan/ perlengkapan kebencanaan;
- g. melaksanakan kelancaran distribusi logistik/ bantuan terhadap korban bencana baik secara administrasi maupun koordinasi lapangan;
- h. menyiapkan shelter dan tempat pengungsian sementara apabila dianggap perlu;
- i. mendirikan pelayanan dapur umum.

Dalam rangka pelayanan masyarakat, masyarakat dapat menghubungi nomor telepon BPBD Kota Pekalongan secara langsung di (0285) 4151508 yang siaga 24 jam. Selain itu , untuk mendukung layanan kepada masyarakat juga disediakan melalui media sosial seperti

instagram (@bpbdkotaPekalongan), twitter (@pkl_bpbd) dan juga facebook @Satuan Tugas Penanggulangan Bencana(BPBD Kota Pekalongan).

Adapun layanan yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Pekalongan disamping layanan terkait kebencanaan, juga melayani aduan masyarakat seperti adanya sarang tawon, ular, dan lain-lain.

6. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program ini dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Poltik (Kesbangpol). Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 343.650.000,- dan realisasi Rp. 235.909.000,- (*unaudited*) melalui 4 (empat) Kegiatan dengan indikator output sebanyak 4 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 4 indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.118 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.118 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pendidikan Politik Masyarakat

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Kesbangpol						
1	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikan politik	orang	400	400	400
2	Sosialisasi pertanggungjawaban parpol	Jumlah peserta sosialisasi yang diikuti oleh 8 partai politik	orang	16	16	20
3	Sosialisasi Pemilihan Umum	Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pendidikan politik	orang	697	697	697
4	Fasilitasi Pengamanan Pemilihan	Jumlah pelaksanaan pengamanan pemilihan yang terlaksana	kali	240	240	240

Sumber: Kesbangpol Kota Pekalongan, 2020

7. Program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Pelaksanaan kegiatan pada program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.385.060.000,- dan realisasi Rp. 1.266.409.500,- (*unaudited*) melalui 11 (sebelas) kegiatan, dengan 12 indikator output. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 12 indikator tercapai. Dari 12 indikator yang tercapai terdapat 1(satu) indikator yang melebihi target yaitu indikator Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi dan sidak test urine bahaya penyalahgunaan narkoba karena adanya permintaan tambahan jumlah peserta dari sekolah (SMP dan SMA/ SMK).

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.119 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.119 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Kemitraan dan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Kesbangpol						
1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	orang	135	135	135
2	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Pelajar dan Mahasiswa	Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur	orang	100	100	100
3	Pembinaan Karakter dan Penguatan Wawasan Kebangsaan bagi Aparatur	Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pembinaan karakter dan penguatan wawasan kebangsaan bagi aparatur	orang	100	100	100
4	Penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi muda	Jumlah peserta yang mendapatkan sosialisasi dan sidak test urine bahaya penyalahgunaan narkoba	orang	1.665	1.665	3.780
5	Pembinaan Generasi Muda Pengibar Bendera	Jumlah anggota paskibra Kota Pekalongan yang terbina	orang	71	71	71
6	Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah	Jumlah bulan pelaksanaan pembinaan korps musik	bulan	12	12	12
7	Fasilitasi upacara bendera tingkat kota	terlaksananya Upacara Bendera di Tingkat Kota	upacara	0	13	14
8	Pengawasan Orang Asing	Jumlah dokumen pelaporan pengawasan orang asing	dokumen	4	4	4
9	Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah Peserta Sosialisasi yang mendapatkan pembinaan penanaman dan pematapan	orang	1.360	1.360	1.360
10	Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen kajian potensi konflik Kota Pekalongan yang disusun	dokumen	1	1	1
		jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman penanganan konflik sosial yang dilaksanakan	orang	80	80	80

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
11	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah peserta sosialisasi yang mendapatkan pemahaman kewaspadaan dini	orang	100	100	100

Sumber: Kesbangpol Kota Pekalongan, 2020

Untuk indikator terlaksananya upacara bendera di tingkat kota dihitung dalam jumlah pelaksanaan upacara bendera di tingkat kota dengan capaian 14 kali.



Gambar 3.64 Dokumentasi Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Sumber: Kesbangpol Kota Pekalongan, 2020

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

a. Kebencanaan

Tingkat kerawanan bencana di Kota Pekalongan yang termasuk dalam kategori tinggi, dengan skor 148, hal tersebut tertuang dalam buku Indeks Resiko Bencana BNPB Tahun 2013. Letak geografis dan topografi Kota Pekalongan potensial terhadap terjadinya bencana alam terutama banjir, rob, kebakaran, kekeringan, angin ribut/ angin puting beliung, wabah penyakit dan konflik sosial. Terdapat 5 kelurahan di Kecamatan Pekalongan Utara yang berada di bibir pantai. Yaitu kelurahan Panjang Wetan, Panjang baru, Kandang Panjang, Krapyak, dan Bandengan. Cuaca ekstrem dengan curah hujan tinggi disertai angin kencang menjadikan daerah tersebut berpotensi terjadinya bencana banjir, rob dan angin ribut atau bahkan puting beliung. Ketinggian air rob bisa mencapai 25 sampai 40 cm.

Permasalahan/ kendala dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana secara garis besar adalah sebagai berikut :

- a. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana dikarenakan kurangnya SDM yang berkompeten sesuai bidang dan tanggungjawab pekerjaan, serta personil teknis yang dapat menganalisa dan membuat perencanaan terhadap pengurangan resiko bencana;
- b. Adanya keterbatasan sarana prasarana kantor maupun sarana prasarana penanggulangan bencana;

- c. Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk menyimpan bahan logistik bencana maupun peralatan sesuai standar penyimpanan barang/logistik secara *representative*, yang berdampak pada rusaknya stok logistik ataupun berkurangnya umur ekonomis sarpras PB bahkan hilang;
- d. Minimnya data rawan bencana dan basis data bidang penanggulangan bencana belum tertata secara rapi dan tertib;
- e. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
- f. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan yang cukup tinggi, akan tetapi belum adanya standarisasi terutama bagi relawan;
- g. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk Penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana

b. Kasus Narkoba

Makin maraknya kasus narkoba dan jaringan narkoba yang sangat luas dan kuat akan mempercepat perkembangan kasus narkoba di daerah. Kota Pekalongan adalah termasuk wilayah yang tinggi tingkat kasus narkoba di tingkat provinsi Jawa Tengah. Kasus narkoba merupakan fenomena gunung es yang sulit untuk diketahui jumlah dan keberadaannya, apabila tidak ditangani dengan serius akan semakin berkembang pesat .

c. Penegakan perda dan ketertiban umum

Permasalahan yang dihadapi dalam menegakkan Perda dan menjaga ketertiban umum antara lain :

- a. Rendahnya kepatuhan hukum dan pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berlaku;
- b. Faktor Ekonomi dengan adanya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) yang membuat masyarakat beralih menjadi pedagang pasar tiban/PK5;
- c. Terbatasnya lahan tempat berjualan bagi pedagang pasar tiban/PK5;
- d. Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- e. Belum optimalnya koordinasi internal antar seksi;
- f. Masih adanya pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- g. Belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h. Belum optimalnya peran PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dalam melaksanakan tupoksinya;
- i. Belum optimalnya koordinasi antar Aparat Penegak Hukum dan stakeholder terkait (SATPOL PP, POLRI, TNI, Kejaksaan, Bag.Hukum, Kesbangpol, Bea Cukai).

2. Solusi

- a. Dalam rangka efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana alam dilakukan dengan memaksimalkan segala potensi dan SDM yang ada guna

tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, walaupun banyak kendala dan hambatan terutama sarana prasarana yang kurang.

- b. Melibatkan BNN Kabupaten Batang dalam kegiatan sosialisasi dan koordinasi penanganan kasus narkoba.
- c. Melakukan Tes urine pada pelajar/mahasiswa/pemuda yang memiliki resiko tinggi dalam penggunaan narkoba.
- d. Peningkatan pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan secara terpadu dan terus menerus melalui berbagai kegiatan dengan melibatkan berbagai unsur.

1) Penegakan perda dan ketertiban umum

- Meningkatkan konsistensi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya dengan rutin mengadakan sosialisasi, forum diskusi, monitoring evaluasi, pembinaan, penyuluhan maupun operasi Penegakan Perda secara kontinyu.
- Meningkatkan pencitraan eksistensi Satpol PP melalui pemberitaan- pemberitaan yang positif dari media massa (koran, radio, *website*) dan pendekatan persuasif humanis kepada masyarakat.
- Menambah jumlah personel Satpol PP setiap Tahunnya.

2) Penanganan Kebakaran

- Pembinaan SDM Satpol PP, Linmas dan Damkar secara berkelanjutan.
- Inspeksi dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama para pengusaha batik yang dalam menjalankan usahanya rentan terhadap bahaya kebakaran serta kantor – kantor baik swasta maupun pemerintah.
- Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan seperti alat pemadam kebakaran yang memadai, bangunan kantor, alat transportasi, alat pendukung operasional.
- Pemanfaatan IT dan Media Sosial (*Facebook, Twitter, WhatsApp*) untuk mendukung kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

3) Penanganan kerawanan sosial

Mengintensifkan koordinasi antar instansi/lembaga terkait dalam permasalahan yang akan terjadi maupun yang timbul permasalahan/gesekan dalam masyarakat sehingga tidak terjadi konflik sosial.

4) Penanganan Bencana

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada BPBD, maka pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan memaksimalkan segala potensi dan SDM yang ada guna tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, walaupun banyak kendala dan hambatan terutama kurangnya dukungan dana yang memadai serta sarana prasarana yang kurang

3. Peluang

a. Penanggulangan Bencana Alam

Sejak diterbitkannya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor

17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka tugas pokok dan fungsi kebencanaan melekat pada BPBD Kota Pekalongan.

Akan tetapi, peran BPBD Kota Pekalongan dalam penanggulangan bencana tidak secara serta merta mengambil alih pekerjaan teknis dari SKPD lain dalam penanggulangan bencananya. Sesuai dengan UU dan Peraturan Walikota Pekalongan, maka BPBD Kota Pekalongan mempunyai 3 (tiga) fungsi utama Penanggulangan Bencana yaitu pelaksana, koordinasi dan komando.

- a. Sebagai pelaksana, BPBD memiliki peran untuk memberikan perlindungan masyarakat melalui upaya penanggulangan dan pengurangan risiko bencana baik pra, saat maupun pasca bencana.
- b. BPBD berfungsi sebagai leading sector dan mengkoordinasikan dengan SKPD Teknis, seperti Badan Lingkungan Hidup, Dinsosnakertrans, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan yang terkait dalam bidang pekerjaan teknis lainnya. BPBD mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana baik pra, saat maupun pascabencana yang dilakukan oleh SKPD teknis. SKPD tersebut dalam struktur organisasi BPBD termasuk dalam SKPD unsur pengarah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penanggulangan bencana dilaksanakan oleh masing-masing SKPD namun berkoordinasi secara efektif dengan BPBD sehingga saling menunjang antara pembangunan fisik/infrastruktur dan aman berdasarkan pada aspek kebencanaan.
- c. Fungsi komando melekat pada BPBD untuk memberikan komando kepada para pemangku kepentingan untuk memobilisasi sumberdaya untuk penanggulangan bencana, terutama pada saat darurat bencana. Dengan peran sebagai incident commander, BPBD memberikan komando untuk melakukan evakuasi, penyelamatan dan pada saat yang bersamaan SKPD teknis melakukan perbaikan dan rehabilitasi sarana dan prasarana penting dan vital dengan segera.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peluang yang dapat disiasati untuk mendukung program penanggulangan bencana di Kota Pekalongan antara lain :

- a. Terbitnya UU No. 24 Tahun 2007 beserta peraturan pemerintah pendukungnya termasuk peraturan daerah kota Pekalongan nomor 3 tahun 2015 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, menjadikan peluang penyelenggaraan penanggulangan bencana semakin luas, tidak terbatas pada pemerintah tetapi juga dari peran masyarakat dan dunia usaha;
- b. Makin pesatnya perkembangan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
- c. Makin berperannya lembaga legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat
- d. Terbukanya pengembangan kapasitas BPBD melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga nasional maupun internasional
- e. Makin terbukanya komunikasi dan koordinasi antar BPBD Kota Pekalongan dengan masyarakat.

- f. Adanya peran serta masyarakat, LSM dalam penanggulangan bencana.
- g. Adanya dukungan peningkatan sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui kementerian / lembaga teknis;
- h. Adanya kesempatan pengembangan ketrampilan melalui diklat maupun bintek bagi personil BPBD;
- i. Bimbingan dan pelatihan teknis untuk relawan dan masyarakat peduli bencana;
- j. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah (pusat, propinsi, kabupaten, kecamatan dan desa);
- k. Mekanisme penganggaran di APBD melalui dana belanja tidak terduga dan peluang belanja (dana alokai Khusus bencana) oleh pemerintah pusat dan komitmen pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bencana dari APBD;
- l. Pendanaan dalam penanggulangan bencana dari berbagai sumber masih sangat terbuka dan banyak, yaitu selain pendanaan dari pemerintah dapat pula berasal dari pendanaan masyarakat, lembaga maupun dunia usaha.
- m. Perlunya pengarusutamaan paradigma pengurangan risiko bencana kepada pemangku kepentingan agar kesiapan menghadapi bencana dilakukan pada tahap pra bencana

b. Penanganan kerawanan sosial

Mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan, perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini.

c. Penanganan Kasus Narkoba

Adanya peluang untuk bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional di Batang dan atau mendorong berdirinya Badan Narkotika Nasional di Kota Pekalongan untuk mengurangi penggunaan Narkoba.

3.2.1.6. Sosial

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan sosial untuk membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Kota Pekalongan dalam penyelenggaraan Pemerintahan pada urusan sosial Dinsos P2KB Kota Pekalongan melalui program-program yang dilaksanakan mempunyai tugas dan diberikan target dalam pemberdayaan keluarga miskin, pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial serta pengaktifan kelembagaan kesejahteraan sosial di Kota Pekalongan.

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Sosial di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pekalongan dilaksanakan 3 (lima) program yakni Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, yang terdistribusi dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Program dengan realisasi sebanyak 2 (dua) indikator yang mencapai target dan 1 (satu) indikator belum tercapai.

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya yang dilaksanakan oleh Dinsos P2KB ini adalah program dalam memberikan dampingan dan memberdayakan kelompok KUBE (Keluarga Usaha Bersama) dan program dalam pendataan fakir miskin yang teraplikasi dalam program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan program pendataan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.120 Target dan Capaian Indikator
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase keluarga miskin yang diberdayakan	1,33	Persen	1,17	1,30

Sumber: Dinsos P2KB Kota Pekalongan 2020

Capaian Indikator Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan pada Tahun 2019 belum tercapai. Capaian indikator ini dihitung dari Keluarga Miskin yang diberdayakan (Jumlah KUBE aktif) dibagi jumlah Keluarga Miskin (50% dari Data siks-NG) x 100%, jumlah KUBE aktif adalah 217 kelompok sedang data jumlah keluarga miskin dalam siks-NG yang menjadi penyebut adalah 33.282, sehingga diperoleh hasil Persentase Keluarga Miskin yang diberdayakan adalah $(217 / (33282 / 2)) \times 100 = 1,30 \%$. Hal ini dikarenakan target dalam pembentukan KUBE baru dapat terealisasi, namun adanya peserta KUBE yang sebelumnya aktif menjadi tidak aktif, sehingga mengurangi jumlah KUBE aktif.

2. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial ini adalah program yang mendukung terhadap capaian IKD Kota Pekalongan sekaligus mendukung SPM urusan Sosial sesuai amanat PP No.2 tahun 2018 tentang SPM Sosial.

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.121 Target dan Capaian Indikator
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Persentase PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial	23,41	Persen	32,06	39,35
2.	Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	100	Persen	100	100

Sumber: Dinsosp2kb Kota Pekalongan 2020

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa capaian 2 (dua) indikator program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial sudah tercapai, adapun penghitungan dari capaian 2 (dua) indikator tersebut adalah sebagai berikut :

1. Capaian Indikator yang pertama diukur dari perbandingan antara jumlah PMKS non fakir miskin yang ditangani oleh Dinsosp2kb Kota Pekalongan sampai dengan tahun n dengan PMKS non Fakir Miskin pada tahun awal RKPD Kota Pekalongan yaitu sebanyak 8.795, dengan rincian jumlah PMKS non fakir miskin yang ditangani sampai dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 2.628 PMKS ditambah PMKS yang ditangani pada tahun 2019 sebanyak 515 PMKS, dibagi PMKS non Fakir Miskin pada tahun awal RKPD Kota Pekalongan yaitu sebanyak 8.795 dikali 100 %, sehingga dapat dicantumkan dalam rumus penghitungan sebagai berikut :

PMKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi , perlindungan dan jaminan sosial = $(2.628 + 515) / 8.795 \times 100 = 39,35$

2. Capaian indikator yang kedua diukur dari perbandingan jumlah korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial pada tahun n yaitu sebanyak 3.800 jiwa dengan jumlah seluruh Korban bencana yang seharusnya mendapat perlindungan dan jaminan sosial pada tahun n yaitu sebanyak 3.800 jiwa, sehingga dapat diketahui dalam rumus perhitungan sebagai berikut :

Persentase korban bencana pada saat dan setelah tanggap darurat bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial = $(3.800 / 3.800) \times 100 = 100 \%$

Indikator target dapat dicapai dengan maksimal dikarenakan adanya komitmen dari Pimpinan Daerah dan dukungan anggaran yang memadai serta peran aktif dari masyarakat di Kota Pekalongan.

Tabel 3.122 Data PMKS Tahun 2019

No	Jenis PMKS	Jumlah		Total
		L	P	
1.	Anak Balita Terlantar	-	-	-
2.	Anak terlantar	-	-	-
3.	Anak yang Mengalami Masalah Hukum (AMH)	1		1
4.	Anak Jalanan	60	41	101
5.	Anak Dengan Kedisabilitasan	-	-	-
	A. Anak dengan kedisabilitas Fisik	-	-	-
	1. Tubuh (Tuna Daksa)	17	11	28
	2. Mata (Tuna Netra)	-	-	-
	3. Rungu / Wicara (Bisu Tuli)	4	4	8
	B. anak dengan kedisabilitas Mental	-	-	-
	1. Mental Retardasi(Tuna Grahita)	5	1	6
	2. Mental Eks Psikotik(Tuna Laras)		1	1
	C. Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	3	4	7
6.	Anak yang menjadi Korban tindak kekerasan	-	-	-
7.	Anak yang memerlukan perlindungan fisik	-	-	-
8.	Lanjut Usia Terlantar	65	99	164
9.	Penyandang Disabilitas	-	-	-
	a. Disabilitas Fisik	-	-	-
	1. Tubuh (Tuna Daksa)	102	77	179

No	Jenis PMKS	Jumlah		Total
		L	P	
	2. Mata (Tuna Netra)	57	46	103
	3. Rungu/Wicara (Bisu Tuli)	47	28	75
	b. Disabilitas Mental			
	1. Mental Retardasi (Tuna Grahita)	46	36	82
	2. Mental Eks Psikotik (Tuna Laras)	156	100	256
	c. Disabilitas Fisik dan mental (ganda)	306	146	452
10.	Tuna Susila	-	-	-
11.	Gelandangan	-	-	-
12.	Pengemis	2	1	3
13.	Pemulung	2	-	-
14.	Kelompok Minoritas/Waria	-	-	-
15.	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat (BWBLP)	3	-	3
16.	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	64	33	97
17.	Korban Penyalahgunaan NAPZA	-	-	-
18.	Korban Trafficking	-	-	-
19.	Korban Tindak Kekerasan	-	-	-
20.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	-	-	-
21.	Korban Bencana Alam	-	-	3800
22.	Korban Bencana Sosial	-	-	
23.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi		8	8
24.	Fakir Miskin	18635	4051	22686
25.	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	-	-	-
26.	Komunitas Adat Terpencil	-	-	-
	TOTAL	19.575	4.687	28.062

Sumber : Dinsosp2kb Kota Pekalongan, 2019

3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial ini adalah program yang mengampu urusan pemberdayaan Kelembagaan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) sebagai dukungan dalam penanganan PMKS di Kota Pekalongan.

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.123 Target dan Capaian Indikator
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif	58,33	Persen	75,00	75,00

Sumber: Dinsosp2kb Kota Pekalongan 2020

Capaian Indikator ini dihitung dari persentase kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif dibagi dengan jumlah kesejahteraan sosial /PSKS yang seharusnya ada, pada tahun 2019 ini di kelembagaan kesejahteraan sosial yang aktif di Kota Pekalongan sebanyak 9 lembaga dari 12 lembaga yang seharusnya ada

Tabel 3.124 Data PSKS Tahun 2019

NO	Jenis PSKS	Jumlah
1.	Pekerja Sosial Profesional (PSP)	1
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	53
3.	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	22
4.	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	9
5.	Karang Taruna (KT)	32
6.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	3
7.	Keluarga Pioner	-
8.	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM)	-
9.	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	5
10.	Penyuluh Sosial	-
11.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	4
12.	Dunia Usaha	349

Sumber: Dinsosp2kb Kota Pekalongan, 2020

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 880.000.000,- dan realisasi Rp. 866.683.000,- (*unaudited*) melalui 2 (dua) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 5 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 5 (lima) indikator tercapai dan tidak ada indikator yang tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.125 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.125 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Fasilitasi koordinasi penanggulangan kemiskinan	Jumlah bulan Pelayanan SLRT	bulan	12	12	12
		jumlah bulan fasilitasi TKPK	bulan	12	12	12
		Jumlah bulan fasilitasi BPNT	bulan	12	12	12
		Dokumen database kemiskinan yang disusun	dokumen	1	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian
			bulan	12	12	
2	Optimalisasi Pendampingan Program KUBE	Jumlah bulan pendampingan KUBE		12	12	12

Sumber: Dinsosp2kb Kota Pekalongan 2020

Pada Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan mempunyai 4 (empat) Indikator salah satunya adalah Jumlah Pelayanan SLRT, SLRT ini merupakan singkatan dari (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu). Pelayanan pada SLRT ini adalah pemberian Rekomendasi Miskin kepada warga Miskin yang mengajukan rekomendasi baik untuk pengajuan KIS, KIP ataupun layanan Pemerintah yang lain, dengan di survey oleh para fasilitator dari 27 Kelurahan di Kota Pekalongan.

2. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 2.815.900.000,- dan realisasi Rp. 2.476.426.100,- (*unaudited*) melalui 9 (sembilan) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 17 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 16 (Enam Belas) indikator tercapai dan 1 (satu) indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.126 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.126 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Fasilitasi pelayanan kesejahteraan sosial Anggota Veteran, Lansia dan Penyandang Cacat	jumlah anggota veteran yang mendapat bantuan sembako dan seragam	orang	87	0	0
		jumlah lansia disabilitas yang mendapat bantuan sembako	orang	600	0	0
		jumlah Disabilitas yang mendapat Sembako	orang	220	220	220
		jumlah anggota veteran dan ahli waris pejuang 3 okt yang mendapat bantuan sembako	orang	100	100	100
		jumlah lansia yang mendapat bantuan sembako	orang	-	600	600
2	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	jumlah PMKS yang mendapat alat bantu	orang	60	60	60
		jumlah remaja rawan sosial ekonomi yang mendapat pelatihan	orang	20	20	20
		jumlah Ex Penyandang penyakit sosial yang mendapat pelatihan	orang	20	20	20

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		Jumlah keluarga rawan sosial yang mendapat pelatihan	orang	20	20	20
3	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	jumlah fasilitasi kegiatan bantuan untuk korban bencana alam	kegiatan	1	1	1
4	Fasilitas Kelayan	Jumlah kelayan yang dilayani	orang	160	160	141
5	Fasilitasi Peringatan Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca)	Jumlah keikutsertaan dalam kegiatan HDI (Hari Disabilitas Internasional)	kali	1	1	1
6	Komisi daerah lanjut usia	Jumlah lansia yang berpartisipasi dalam HARLUN	orang	0	0	0
		Jumlah Fasilitasi kegiatan dalam peringatan HARLUN	kegiatan	0	1	1
7	Fasilitasi Nikah Masal	jumlah warga miskin yang difasilitasi nikah masal	pasang	10	10	10
8	Fasilitasi Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah KPM PKH yang mendapat sosialisasi	orang	200	200	200
		Jumlah Dhuafa yang mendapat bantuan sembako	orang	1.800	1.800	1.800
9	Rehabilitasi pelayanan sosial dan kelembagaan sosial di RPSBM (Rumah Perlindungan Sosial Berbasis Masyarakat)	Jumlah bulan pelayanan PMKS di RPSBM	bulan	12	12	12

Sumber: Dinsosp2kb Kota Pekalongan 2020

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa 14 indikator kegiatan pada program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial tercapai namun ada 1 (satu) kegiatan yang tidak tercapai yaitu kegiatan Fasilitas kelayan hal ini dikarenakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan kondisional yaitu fasilitasi orang-orang yang kehabisan bekal/kehilangan bekal perjalanan untuk kembali ke kampung asal, sehingga output dari kegiatan tersebut sesuai jumlah orang yang kehabisan bekal yang dilayani dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, sedangkan kegiatan dengan target 0 (nol) merupakan target setelah perubahan APBD.

3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 923.571.000,- dan realisasi Rp. 893.698.000,- (*unaudited*) melalui 4 (empat) kegiatan dengan indikator output sebanyak 4 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 4 (empat) indikator tercapai dan tidak ada indikator yang tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.127 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.127 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pemeliharaan Rutin Berkala Taman Makam Pahlawan	Jumlah bulan pemeliharaan TMP	bulan	12	12	12
2	Penyediaan Jasa Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	jumlah bulan fasilitasi operasional TKSK	bulan	12	12	12
3	Pembinaan dan Fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Jumlah kegiatan Fasilitasi pembinaan PSKS yang dilaksanakan	kegiatan	3	3	3
4	Rehab taman makam pahlawan	Jumlah rehab Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan	TMP	1	1	1

Sumber: Dinsosp2kb Kota Pekalongan 2020

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa keempat Indikator tersebut dapat tercapai, untuk kegiatan pembinaan dan fasilitasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dengan target 3 kegiatan yaitu kegiatan rakor PSKS, kegiatan pengusulan Hoegeng sebagai Pahlawan Nasional dan kegiatan penelusuran nama-nama Pahlawan 3 Oktober 1945 yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Prawiro Reksa Negara Kota Pekalongan, sedangkan kegiatan Rehab Taman Makam Pahlawan yaitu kegiatan fisik dengan pengerjaan peninggian area makam sebelah Utara, Pembuatan papan tugu nama Pahlawan, dan pembangunan Mushola.

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Mental dan perilaku sebagian penduduk yang secara ekonomi termasuk warga mampu namun merasa miskin atau ingin digolongkan sebagai penduduk miskin agar tetap mendapatkan program penanggulangan kemiskinan
- Masih adanya *exclusion error* (kekeliruan yang terjadi karena orang yang berhak menerima manfaat tidak masuk di database sebagai penerima manfaat) dan *inclusion error* (warga yang tidak berhak menerima manfaat tetapi terdaftar di database kemiskinan sehingga masih menerima program penanggulangan kemiskinan).
- Wilayah Kota Pekalongan yang berada pada daerah pesisir pantai dan struktur tanah yang rendah sehingga rawan bencana banjir pada saat musim hujan ataupun pada saat air laut pasang.

2. Solusi

- Diperlukannya komitmen Pemerintah dan masyarakat dalam validasi data PMKS di Kota Pekalongan sehingga data PMKS betul betul valid dan dapat di update secara periodik.
- Diperlukannya petugas validasi yang profesional, sehingga dalam verifikasi validasi penduduk miskin benar benar valid, sehingga program penanggulangan kemiskinan benar-benar tepat sasaran.

- Sudah ada SOP Penanganan Bencana banjir di Kota Pekalongan.

3. Peluang

- Peran aktif fasilitator/ petugas verifikasi validasi tingkat Kelurahan.
- Peningkatan Peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS.
- Sinergitas KSB, Tagana, dan *stakeholder* yang lain dalam tanggap darurat bencana.

3.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

3.2.2.1. Tenaga Kerja

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Tenaga kerja di Kota Pekalongan dilaksanakan 3 (Tiga) program yakni Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan yang terdistribusi dalam 8 Indikator Kinerja Program, dengan realisasi sebanyak 7 indikator yang mencapai target dan 1 indikator belum mencapai target.

1. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.128 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Cakupan tenaga kerja yang berkompeten	800	orang	816	1.200
2	Persentase Wirausaha yang mandiri dan produktif yang masih melanjutkan usaha	40	persen	65	82,93

Sumber: *Dinperinaker(diolah), 2020*

Untuk capaian Indikator Program Cakupan tenaga kerja yang berkompeten dengan formulasi Calon tenaga kerja yang dilatih dan bersertifikat, indikator ini mempunyai target sebesar 800 orang dan telah tercapai melebihi target sebesar 1.200 orang atau 150%. Adapun angka perolehan 1.200 orang diperoleh dari sebagai berikut :

1. Jumlah siswa pelatihan yang telah dilatih di BLK (dari dana APBD) sejumlah 224 orang;
2. Jumlah siswa pelatihan yang telah dilatih di BLK (dari dana APBN) sejumlah 832 orang;
3. Jumlah siswa pelatihan yang telah dilatih di LPKS (dari dana APBD) sejumlah 144 orang.

Capaian Indikator Persentase Wirausaha yang mandiri dan produktif yang masih melanjutkan usaha dengan formulasi Jumlah tenant yang masih melanjutkan usahanya dibagi total tenant yang dibina, indikator ini mempunyai target sebesar 40% dan telah tercapai melebihi target sebesar 82,93%, angka tersebut diperoleh dari jumlah tenant yang masih melanjutkan usaha sebanyak 34 orang dibagi dari jumlah tenant yang dibina sebanyak 41 orang dikali 100% menjadi 82,93%.

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.129 Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Kesempatan Kerja

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan	65,00	Persen	816 org	66,25
2	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	65,00	persen	-	65

Sumber: *Dinperinaker(diolah), 2020*

Capaian Indikator Program Persentase tenaga siap pakai yang ditempatkan dengan formulasi tenaga siap pakai yang bekerja dibagi tenaga siap pakai dikalikan 100 %, indikator ini mempunyai target sebesar 65% dan telah tercapai melebihi target yaitu sebesar 66,25%. Adapun angka perolehan 66,25% diperoleh diantaranya dari hasil monitoring alumni pelatihan yang sudah bekerja sebanyak 296 orang, *On The Job Training (OJT)* sebanyak 97 orang hasil magang ke Jepang 7 orang, penempatan Bursa Kerja Khusus (BKK) sebanyak 240 orang, penempatan pasca *Job Fair* 45 orang dan penempatan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 110 orang, sehingga jumlah keseluruhan menjadi 795 orang dibagi jumlah seluruh peserta pelatihan sebanyak 1.200 orang kali 100 menjadi 66,25%.

Capaian Indikator Program Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dengan formulasi Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja x 100%. Indikator ini mempunyai target sebesar 65% dan telah tercapai sesuai target sebesar 65%. Adapun angka perolehan 65% diperoleh dari hasil peserta *Job Fair* yang mendapatkan kerja/penempatan sejumlah 585 orang dibagi jumlah seluruh peserta yang mengikuti *Job Fair* sejumlah 900 orang.

3. Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program ini diukur dengan 4 (empat) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.130 Target dan Capaian Indikator Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	54,00	persen	60	75
2	Rasio kenaikan upah minimum	8,72	persen	-	8,03
3	Rasio jumlah sarana hubungan industrial LKS Bipartit yang terbentuk di perusahaan	46,00	persen	-	47,8
4	Rasio jumlah sarana hubungan industrial peraturan Perusahaan / perjanjian kerja bersama yang dibuat perusahaan	45,00	persen	-	46

Sumber: *Dinperinaker (diolah), 2020*

Capaian Indikator Program persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama dengan formulasi Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan dengan perjanjian bersama dibagi dengan kasus yang dicatatkan. Indikator ini mempunyai target sebesar 54% dan telah tercapai melebihi target sebesar 75%. Adapun angka perolehan 75% diperoleh dari kasus yang dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama sebanyak 3 kasus dibagi dengan seluruh jumlah kasus yang tercatat sebanyak 4 kasus dikali 100.

Capaian Indikator Program Rasio kenaikan upah minimum dengan formulasi Kenaikan Upah Minimum tahun berjalan dibanding dengan Upah Minimum tahun sebelumnya. Indikator ini mempunyai target sebesar 8,72% dan realisasinya tercapai kurang dari target sebesar 8,03%. Realisasi ini diperoleh dari Kenaikan Upah Minimum tahun 2019 sebesar Rp.1.906.922,47 dibanding dengan Upah Minimum tahun 2018 sebesar Rp.1.765.863.

Penetapan Upah Minimum berdasarkan pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Perhitungan Upah Minimum dengan menggunakan formula yaitu :

$$UM_n = UM_t + (UM_t \times (Inflasi_t + \% PDB_t))$$

Keterangan :

UM_n : Upah Minimum yang akan ditetapkan

UM_t : Upah Minimum tahun berjalan

Inflasi : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.

PDB_t : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan II tahun berjalan.

Penetapan Upah Minimum juga didasari/dipengaruhi oleh Surat dari BPS RI Nomor : B-218/BPS/1000/10/2018 tanggal 4 Oktober 2018 inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai berikut :

a. Inflasi Nasional sebesar 2,88% (dua koma delapan puluh delapan persen)

b. Pertumbuhan ekonomi nasional (pertumbuhan PDB) sebesar 5,15%

Berdasarkan hal tersebut maka kenaikan UMK tahun 2019 sebesar 8,03%.

Capaian Indikator Program Rasio jumlah sarana hubungan industrial LKS Bipartit yang terbentuk di perusahaan dengan formulasi Persentase perusahaan yang membentuk LKS Bipartit dengan perusahaan yang wajib membentuk LKS Bipartit. Indikator ini mempunyai target sebesar 46% dan telah tercapai melebihi target sebesar 47,8%. Target ini diperoleh dari Jumlah perusahaan yang membentuk LKS Bipartit sebanyak 44 perusahaan dibagi dengan jumlah perusahaan yang wajib membentuk LKS Bipartit sebanyak 92 perusahaan dikali 100%.

Capaian Indikator Program Rasio jumlah sarana hubungan industrial Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat perusahaan dengan formulasi Persentase perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama dengan perusahaan yang wajib membuat Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama. Indikator ini mempunyai target sebesar 45% dan telah tercapai melebihi target sebesar 46%. Target ini diperoleh dari Jumlah perusahaan yang membuat Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja

Bersama sebanyak 104 perusahaan dibagi dengan jumlah perusahaan yang wajib membuat Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama sebanyak 225 perusahaan dikali 100%.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.819.500.000,- dan realisasi Rp. 1.749.526.494,- (*unaudited*) melalui 7 (tujuh) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 7 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 7 indikator tersebut tercapai seluruhnya.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.131 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKP-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.131 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan	orang	224	224	224
2	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana pendidikan balai latihan kerja (BLK)	Jumlah kegiatan peralatan pelatihan/perbengkelan yang didata untuk dirawat	kegiatan	1	1	1
3	Penyuluhan Lembaga Sertifikasi Profesi	Jumlah peserta penyuluhan LPS	orang	15	15	15
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan alumni siswa pasca pelatihan	Jumlah alumni siswa pelatihan di BLK/LPKS yang dimonitoring	orang	400	400	400
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja (DBHCHT)	Jumlah kejuruan yang difasilitasi sarana dan prasarana yang diadakan	kejuruan	7	7	7
6	Pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitas bagi pengangguran/putus sekolah di lingkungan masyarakat industri hasil tembakau	Jumlah masyarakat pengangguran/putus sekolah yang mengikuti pelatihan ketrampilan	orang	144	144	144
7	Fasilitasi Pengembangan Unit Inkubator Bisnis dan Teknologi	Jumlah tenant yang terfasilitasi	tenant	6	6	6

Sumber: Dinperinaker (diolah), 2020

Untuk capaian kinerja dari kegiatan Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja dengan Indikator outputnya Jumlah pencari kerja yang mengikuti pelatihan ketrampilan, mempunyai target sebesar 224 orang dan telah tercapai semuanya dengan persentase 100%.

Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di UPTD BLK dimana merupakan salah satu kegiatan unggulan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kota Pekalongan. Hal ini dikarenakan pada kegiatan pelatihan tersebut ditindak lanjuti dengan kegiatan yang lain, yaitu kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan alumni siswa pasca pelatihan, dimana berdasarkan monitoring akan diketahui keadaan lebih lanjut alumni siswa pelatihan setelah mengikuti pelatihan, apakah sudah bekerja atau belum. Dalam kegiatan pelatihan ini juga memberi kesempatan bagi para siswa untuk mengikuti program pemagangan ditempat kerja dengan menempatkan para alumni siswa pelatihan ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam hal ini disesuaikan dengan ketrampilan siswa dengan kejuruan yang diambilnya. Selain kegiatan pelatihan yang dilaksanakan di UPTD BLK juga ada kegiatan pelatihan yang dilaksanakan diluar UPTD BLK yakni pelatihan yang dilaksanakan di LPKS-LPKS di wilayah Kota Pekalongan. Kegiatan ini masuk dalam kegiatan Pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitas bagi pengangguran/putus sekolah, hal ini berkaitan pula dengan peran Dinperinaker sebagai Pembina LPKS-LPKS di wilayah Kota Pekalongan. Adapun kegiatan tersebut masuk dalam kegiatan Penyuluhan Lembaga Sertifikasi Profesi, sebagai wujud dari aktifitas pembinaan terhadap LPKS-LPKS di wilayah Kota Pekalongan agar lebih profesional dalam melaksanakan pelatihan kepada masyarakat, salah satu wujudnya adalah dengan melaksanakan uji kompetensi.

Capaian indikator output dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas ikut membantu menurunkan angka pengangguran baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagaimana diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada awal tahun 2019 berada pada angka 6,13% dan pada akhir tahun 2019 menurun menjadi 5,77%.



Pelaksanaan pelatihan kejuruan Desain Grafis



Pelaksanaan pelatihan kejuruan Prosesing Hasil Pertanian (Boga)



Pelaksanaan pelatihan kejuruan Tehnisi HP



Pelaksanaan pelatihan kejuruan Tata Rias Pengantin



Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan peningkatan ketrampilan dan produktifitas bagi pengangguran/putus sekolah di lingkungan masyarakat industri hasil tembakau



Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Unit Inkubator Bisnis dan Teknologi

Gambar 3.65 Dokumentasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Sumber: Dinperinaker (diolah), 2020

2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.169.000.000,- dan realisasi 1.082.294.517,- (*unaudited*) melalui 7 (tujuh) kegiatan, dengan indikator output

sebanyak 9 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 8 (delapan) indikator tercapai dan 1 (satu) indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.131 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPd-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.132 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kesempatan Kerja

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			angka	RKPD	APBD	
1	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah perusahaan yang mengikuti job fair	Perusahaan	50	50	58
		jumlah pelaksanaan ISO 2015 tentang peempatan dan penggunaan AK 1 sampai AK 5	kali	1	1	1
		jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui job fair	orang	585	585	585
2	Penyiapan tenaga kerja siap pakai	Jumlah sisiwa yang mengikuti persiapan seleksi magang ke jepang	orang	15	15	15
3	Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1	Jumlah bulan penyelenggaraan layanan KIOS 3in1	bulan	12	12	12
4	Sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	kali	2	2	2
5	Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja padat karya infrastruktur	Jumlah lokasi padat karya yang dikerjakan	lokasi	5	5	5
6	Penyuluhan, Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja ke luar daerah	Warga yang mengikuti transmigrasi	KK	4	3	3
7	Pemagangan bagi Lulusan Lembaga Pelatihan Pasca Pelatihan	Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pemagangan	orang	130	130	118

Sumber: Dinperinaker (diolah), 2020

Capaian kinerja dari kegiatan Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja yang mempunyai 3 Indikator outputnya yaitu yang pertama Jumlah perusahaan yang mengikuti *job fair* dengan target 50 perusahaan yang mengikuti kegiatan *Job Fair* telah tercapai melebihi target sebanyak 58 perusahaan atau tercapai 116%. Hal ini terjadi karena banyaknya antusias perusahaan untuk mengikuti kegiatan *Job Fair*. Untuk indikator yang kedua yaitu jumlah pelaksanaan *ISO 2015* tentang penempatan dan penggunaan AK 1 sampai AK 5, dimana bentuk dari kegiatan ini adalah pelaksanaan *audit eksternal* dan *internal ISO 2015* oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, dan pada tahun 2019 ini Dinperinaker berhasil mempertahankan pelaksanaan implementasi ISO diantaranya perbaikan pelayanan publik AK 1-AK 5. Sehingga bisa dikatakan bahwa Audit Eksternal dan internal tersebut adalah dalam rangka mempertahankan pelaksanaan ISO. Kemudian indikator yang ketiga jumlah pencari

kerja yang ditempatkan melalui *job fair* yang mempunyai target 585 orang dan tercapai sesuai target sebanyak 585 orang atau tercapai 100%.

Capaian kinerja dari kegiatan Penyiapan tenaga kerja siap pakai dengan indikator outputnya Jumlah siswa yang mengikuti persiapan seleksi magang ke Jepang yang mempunyai target sebanyak 15 orang dan tercapai 100%. Bentuk dari kegiatan ini adalah berupa pelatihan persiapan untuk mengikuti seleksi magang ke Jepang. Dan pada akhirnya peserta akan diseleksi dan yang berhasil lolos akan berangkat magang ke Jepang.

Capaian kinerja dari kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1 dengan indikator outputnya jumlah bulan penyelenggaraan layanan KIOS 3in1, kegiatan ini mempunyai target 12 bulan dan tercapai 100%. Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kios 3 in 1 ini mempunyai tugas pelayanan berupa pencatatan baik secara manual maupun online bagi para pencari kerja yang berminat untuk mengikuti pelatihan di UPTD BLK. Pelayanan pencatatan tersebut dilaksanakan dari mulai saat pendaftaran pelatihan, pengumuman hasil test seleksi pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan hasil mengikuti pelatihan serta diterbitkannya sertifikat pelatihan bagi pencari kerja yang telah lulus pelatihan. Selain itu setelah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus, alumni siswa bisa mengikuti *On The Job Training* (OJT) ke perusahaan-perusahaan atau dunia industri yang telah melakukan kerjasama (MOU) dengan UPTD BLK.

Capaian kinerja dari kegiatan Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja padat karya infrastruktur dengan indikator outputnya Jumlah lokasi padat karya yang dikerjakan, indikator ini mempunyai target 5 (lima) lokasi dan tercapai 100%. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud memberikan kesempatan pekerjaan kepada para penganggur musiman (misal para nelayan yang tidak bisa berangkat kelaut karena faktor cuaca yang tidak memungkinkan). Adapun lokasi kegiatan padat karya ini adalah sebagai berikut :

- a. Kelurahan Krapyak, dengan bentuk padat karyanya pavingisasi dengan peserta 48 orang;
- b. Kelurahan Baros, dengan bentuk pekerjaannya normalisasi sungai sebelah barat masjid alfairus ke utara sepanjang 1200 meter dengan peserta 59 orang;
- c. Kelurahan Tirto, normalisasi Sungai Bremsi, Sungai Klidin;
- d. Kelurahan Pringrejo, normalisasi sungai belakang kelurahan pringrejo;
- e. Kelurahan Bendan, normalisasi sungai jl slamet depan eks BLK hingga Sungai Bremsi dengan peserta 180 orang.

Capaian kinerja dari kegiatan Pemagangan bagi Lulusan Lembaga Pelatihan Pasca Pelatihan dengan indikator outputnya Jumlah peserta yang terdaftar untuk mengikuti pemagangan, indikator ini mempunyai target 130 orang tetapi hanya tercapai 118 orang atau 90,77%. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pelatihan dimana alumni siswa pelatihan yang sudah dinyatakan lulus/selesai mengikuti pelatihan diberi kesempatan untuk mengikuti pemagangan di perusahaan-perusahaan sesuai dengan keahlian/kejuruan yang diikuti. Ketidaktercapaian target tersebut diantaranya disebabkan karena tidak semua alumni siswa bersedia untuk mengikuti kegiatan pemagangan dengan alasan mereka sudah ada rencana/keinginan untuk membuka usaha sendiri (wirausaha) ataupun sudah bekerja ditempat yang lain.

Capaian kinerja dari kegiatan Penyuluhan, Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja ke luar daerah dengan indikator outputnya Warga yang mengikuti transmigrasi. Indikator ini mempunyai target 3 KK dan tercapai 100%. Kegiatan ini merupakan serangkaian dari pelaksanaan transmigrasi yang dimulai dari sosialisasi sampai dengan persiapan, pembekalan

dan pemberangkatan dari daerah asal ke daerah tujuan lokasi transmigrasi. Peserta transmigrasi untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Fudhola (KK) dengan 3 anggota keluarga dari Kelurahan Padukuhan Kraton;
2. Chairon Achmad (KK) dengan 3 anggota keluarga dari Kelurahan Sapuro Kebulen;
3. Muhammad Bahrudin (KK) dengan 2 anggota keluarga dari Kelurahan Setono.



Pelaksanaan Kegiatan Job Fair



Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi penempatan tenaga kerja Indonesia



Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan tenaga kerja siap pakai (Pelatihan persiapan magang ke Jepang)



Pelaksanaan Kegiatan Pemagangan bagi Lulusan Lembaga Pelatihan Pasca Pelatihan



Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan, Pembekalan dan Penempatan Tenaga Kerja ke luar daerah (Transmigrasi)



Pelaksanaan Kegiatan Perluasan dan pengembangan kesempatan kerja padat karya infrastruktur

Gambar 3.66 Dokumentasi Peningkatan Kesempatan Kerja

Sumber: Dinperinaker (diolah), 2020

3. Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 450.000.000,- dan realisasi Rp. 419.544.000,- (*unaudited*) melalui 9 (sembeilan) kegiatan, dengan indikator

output sebanyak 11 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 11 indikator tersebut tercapai semua.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.132 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.133 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			angka	RKPD	APBD	
1	Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah kasus PHI di perusahaan	kasus PHI	28	28	28
2	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan	Jumlah peserta yang didata untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan	orang	100	100	100
3	Pembinaan Perusahaan Tentang Pengupahan	Jumlah perusahaan yang terdaftar yang mengikuti pembinaan perusahaan	orang	50	50	50
		Jumlah karyawan perusahaan yang mengikuti workshop skala upah	orang	70	70	70
4	Pemberdayaan Dewan Pengupahan	Jumlah rapat Anggota Dewan Pengupahan	rekomendasi /kali	11	11	11
5	Pembinaan LKS BIPARTIT	Jumlah peserta yang didata mengikuti pembinaan LKS Bipartit	perusahaan/orang	50	50	50
6	Pemberdayaan LKS TRIPARTIT	Jumlah sidang/rapat LKS Tripartit	sidang	9	9	9
		Jumlah siaran Pemberdayaan LKS Tripartit di TV dan Radio	kali	4	4	4
7	Pembinaan Perusahaan tentang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama	perusahaan	50	50	50
8	Porseni Tripartit	Jumlah orang yang mengikuti Porseni Tripartit Kota Pekalongan tahun 2019	orang	1.000	1.000	1000
9	Pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha	Jumlah pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh/ Pengusaha/Manajemen Perusahaan, dan Organisasi Pengusaha yang didata untuk mengikuti pembinaan	perusahaan	130	130	130

Sumber: Dinperinaker (diolah), 2020

Capaian kinerja dari kegiatan Fasilitasi dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial dengan indikator outputnya Jumlah kasus PHI di perusahaan, dengan target 28 kasus dan tercapai 100%. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mencegah dan memfasilitasi terjadinya perselisihan hubungan industrial antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Dengan harapan apabila hal tersebut terjadi dapat diselesaikan dengan secara musyawarah mufakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat dihindari.

Capaian kinerja dari kegiatan Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang ketenagakerjaan dengan indikator outputnya Jumlah peserta yang didata untuk mengikuti Sosialisasi Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan target 100 orang dan dapat tercapai 100%.

Capaian kinerja dari kegiatan Pembinaan Perusahaan Tentang Pengupahan, kegiatan ini mempunyai 2 indikator output yaitu Jumlah perusahaan yang terdaftar yang mengikuti pembinaan perusahaan dengan target 50 orang dan tercapai 100%, dan Jumlah karyawan perusahaan yang mengikuti workshop struktur dan skala upah dengan target 70 orang dan tercapai 100%.

Capaian kinerja dari kegiatan Pemberdayaan Dewan Pengupahan, kegiatan ini mempunyai indikator output yaitu Jumlah rapat Anggota Dewan Pengupahan dengan target 11 kali rapat dengan hasil 1 rekomendasi dan tercapai 100%.

Capaian kinerja dari kegiatan Pembinaan LKS BIPARTIT dengan indikator outputnya yaitu Jumlah peserta yang didata mengikuti pembinaan LKS Bipartit dengan target 50 orang/perusahaan dan tercapai 100%.

Capaian kinerja dari kegiatan Pemberdayaan LKS TRIPARTIT, kegiatan ini mempunyai 2 indikator output yaitu Jumlah sidang/rapat LKS Tripartit dengan target 9 kali sidang dan tercapai 100%, dan Jumlah siaran Pemberdayaan LKS Tripartit di TV dan Radio dengan target 4 kali dan tercapai 100%.

Capaian kinerja dari kegiatan Pembinaan Perusahaan tentang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama dengan indikator outputnya yaitu Jumlah perusahaan yang didata mengikuti pembinaan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan target 50 perusahaan dan tercapai 100%.

Capaian kinerja dari kegiatan Porseni Tripartit dengan indikator outputnya yaitu Jumlah orang yang mengikuti Porseni Tripartit Kota Pekalongan tahun 2019 dengan target 1000 orang dan tercapai 100%. Kegiatan ini dilaksanakan bersamaan dengan acara Hari Buruh 1 Mei (*May Day*), hal ini dimaksudkan untuk memberikan media bagi pekerja untuk melakukan kegiatan yang positif guna menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya kegiatan demonstrasi pekerja yang dapat memicu perbuatan anarkis. Kegiatan tersebut diisi dengan berbagai kegiatan seperti lomba-lomba olahraga, kesenian, dan jalan sehat bersama, yang diikuti oleh para pekerja dan pengusaha di wilayah Kota Pekalongan.

Capaian kinerja dari kegiatan Pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha dengan indikator outputnya yaitu Jumlah pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Pengusaha/Manajemen Perusahaan, dan Organisasi Pengusaha yang didata untuk mengikuti pembinaan dengan target 130 perusahaan dan dapat tercapai 100%.



Gambar 3.67 Dokumentasi Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Sumber: Dinperinaker (diolah), 2020

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

- a. Latar belakang tingkat pendidikan peserta pelatihan beragam (SD,SMP,SLTA,Kejar Paket), sehingga dibutuhkan profesionalisme instruktur dalam transfer skill.
- b. Program pelatihan di BLK masih relatif kurang matching dengan kebutuhan dunia industri.
- c. Belum optimalnya perusahaan di Kota Pekalongan yang bisa diajak kerjasama dalam penempatan lulusan pelatihan.
- d. Sebagian masyarakat Kota Pekalongan (yang mengikuti pelatihan) belum memiliki karakter yang kuat untuk bekerja diluar kota/ menjadi perantau.
- e. Belum optimalnya pembinaan perusahaan dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh, sehingga perlu ditingkatkan.
- f. Kurang aktifnya perusahaan dalam melaporkan lowongan dan penempatan kerja, perlu adanya dukungan guna informasi tenaga kerja.
- g. Target dan sasaran kegiatan terlalu banyak.

2. Solusi

Solusi yang dapat dilaksanakan adalah antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kapasitas SDM Instruktur melalui Diklat Teknis, Diklat Soft Skill, Up Grading, dll;
- b. Meningkatkan pemahaman Peraturan Ketenagakerjaan kepada calon investor perusahaan dan tenaga kerja;
- c. Peningkatan pemahaman dan pengetahuan pencari kerja tentang pekerja imigran guna meminimalisir adanya TKI Ilegal.

3. Peluang

Peluang yang ada antara lain sebagai berikut :

- a. Tersedianya Instruktur yang kompeten dibidangnya.
- b. Peningkatan sarana prasarana pelatihan secara kontinue sehingga sarana prasarana yang ada secara bertahap dimodernisasi sesuai kebutuhan.
- c. Beragamnya jenis pelatihan di UPTD BLK mampu memberikan pilihan alternatif bagi pencari kerja untuk mengakses pelatihan sesuai minta dan kebutuhannya.
- d. Banyaknya industri yang berpotensi bisa menyerap tenaga kerja /lulusan pelatihan.
- e. Adanya regulasi yang mengatur Wajib Laport Lowongan Pekerjaan bagi dunia usaha dan dunia industri.
- f. Adanya system online yang mampu membantu mengurangi TKI Ilegal.

3.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPMPPA Kota Pekalongan menetapkan kebijakan, antara lain :

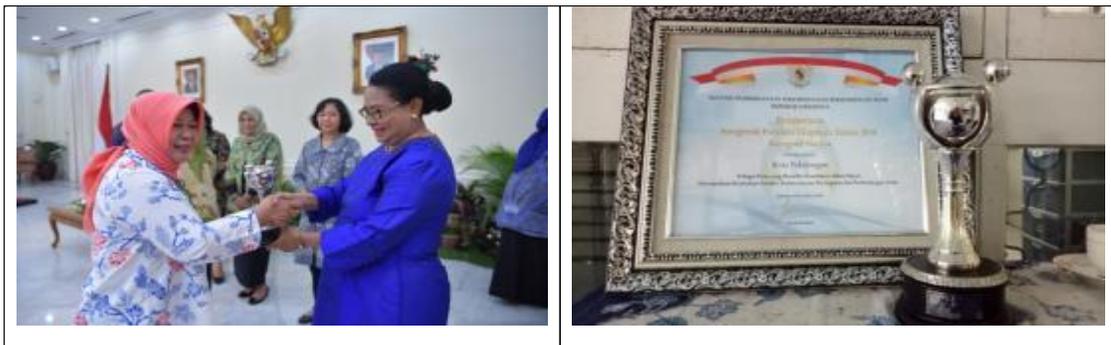
- Peningkatan kesempatan perempuan untuk berperan aktif dalam pembangunan, memperoleh kesempatan berusaha, memperoleh pendidikan, serta berbagai sumber daya kehidupan
- Pengintegrasian dan pengimplementasian pengarusutamaan gender (PUG) kedalam dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi program dan kegiatan pembangunan yang berkelanjutan.
- Peningkatan kerjasama dan promosi dengan berbagai pihak dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dan menciptakan lingkungan ramah anak

Penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah diapresiasi baik oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, antara lain berupa :

- Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Penghargaan Pembina Forum Anak Daerah Terbaik se Indonesia dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Penghargaan *United Nation Publik Service Award (UNPSA) Kategori Gender Responsive Promoting Publik Service To Achieve The SDGs* dari Kemenpan dan RB
- Penghargaan Juara I UP2K PKK Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan
- Penghargaan Juara II Tertib Administrasi PKK Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat
- Juara II Lomba Posyandu Tingkat Provinsi Jawa Tengah, Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur.



Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Madya dari Kementerian PPPA RI



Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Madya dari Kementerian PPPA RI



Penghargaan Pembina Forum Anak Daerah Terbaik, dari Kementerian PPPA RI

LP-PAR Kota Pekalongan menerima Penghargaan UNSPA dari Kemenpan RB

Gambar 3.68 Dokumentasi Penghargaan yang diperoleh pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan, 2020

Realisasi Indikator Kinerja Program

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan melalui 2 (dua) program yakni Program Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dan Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terdistribusi dalam 3 indikator Kinerja Program, dengan realisasi sebanyak 2 (dua) indikator yang mencapai target dan 1 (satu) indikator melebihi target.

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.134 Target dan Capaian Indikator
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender	51,61	Persen	-	96,77
2	Persentase kampung layak anak	25,00	Persen	-	25

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan (diolah), 2020

Indikator persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender adalah indikator yang diukur dengan membandingkan Jumlah Perangkat Daerah yang sudah responsif gender (sejak penetapan target) dengan jumlah seluruh Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Capaian indikator persentase kegiatan perangkat daerah yang sudah responsif gender adalah 96,77% atau 30 OPD melebihi target yang ditetapkan 51,61% atau 16 OPD. Pencapaian target tersebut dikarenakan adanya percepatan implementasi PUG melalui Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang dibentuk berdasarkan Surat Walikota Nomor : 050.05/149 tahun 2010 diperbaharui dengan Surat keputusan Walikota Nomor : 050.05/74 tahun 2018. Dalam melaksanakan tugasnya kelompok kerja PUG dibantu oleh tim teknis ARG yang pembentukannya dilakukan oleh Kepala Bappeda selaku Ketua Kelompok Kerja. Kemudian di setiap OPD dibentuk focal point PUG dengan surat keputusan kepala OPD.

Sedangkan indikator Persentase kampung layak anak diukur dengan membandingkan Jumlah rintisan RW layak anak (sejak penetapan target) dengan target akhir 2021 (4 RW) yang ada. Tahun 2019 ditargetkan 1 RW yaitu RW 13 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat. Tahun 2019 merupakan tahun pertama capaian kedua indikator tersebut.

Capaian tersebut berdampak positif :

- Kota Pekalongan memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Kategori Madya, dan anugerah ini sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pemangku jabatan terhadap PUG
- Membentuk kesetaraan dan keadilan gender, menghilangkan GAP, memberikan kesempatan gender untuk berkembang antara laki-laki dan perempuan
- Pembentukan karakter anak, sebagai figur keteladanan anak terkait norma-norma yang berlaku di masyarakat
- Anak menjadi agent of change, artinya mampu mentransfer atau menularkan pemahaman tentang nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.135 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak**

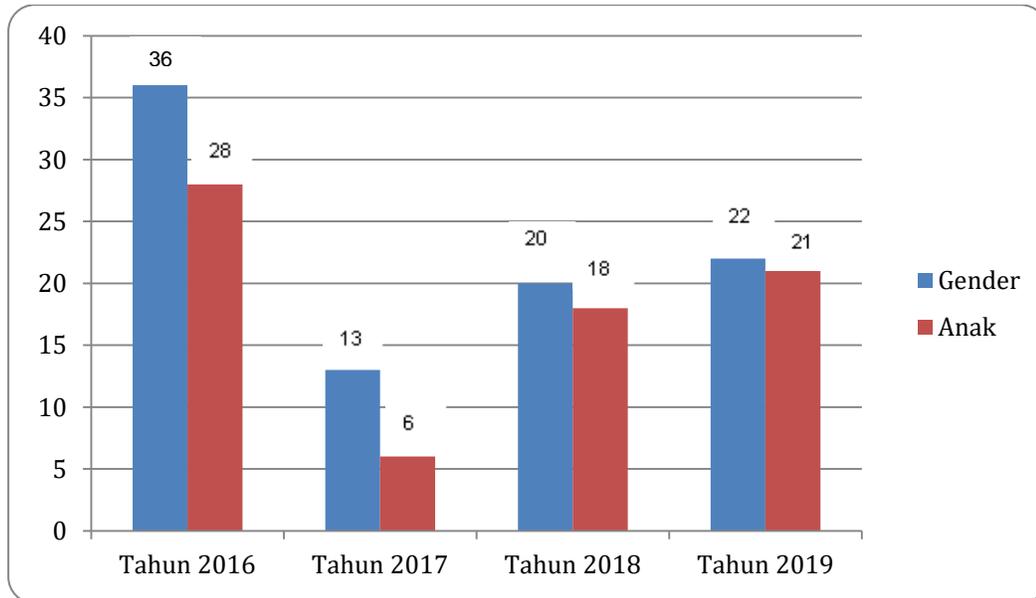
No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Cakupan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak	100,00	persen	-	100,00

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan (diolah), 2020

Indikator cakupan penanganan korban kekerasan berbasis gender dan anak diukur dengan membandingkan Jumlah kasus yang tertangani dengan jumlah kasus yang dilaporkan.

Bedasarkan Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 411.2/1162 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja Kota Pekalongan, sebagai upaya Pemerintah Kota Pekalongan mewujudkan kesetaraan dan keadilan perlakuan bagi perempuan, anak dan remaja guna mempercepat tercapainya keluarga berkualitas, maka di Kota Pekalongan telah dibentuk Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP-PAR).

Dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja (LP-PAR), penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Pekalongan telah menunjukkan peningkatan yang signifikan, dimana seluruh kasus pengaduan dapat tertangani 100 %.



Gambar 3.69 Jumlah Penangan Kasus Kekerasan di LP-PAR

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan (diolah), 2020

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 303.250.000,- dan realisasi Rp. 275.939.000,- (*unaudited*) melalui 2 (dua) kegiatan, dengan 2 indikator output. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 2 (dua) indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.136 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.136 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			Satuan	RKPD	APBD	
1	Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Kota Layak Anak dan pembinaan generasi muda	orang	349	349	349
2	Penguatan kelembagaan Forum Anak	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan forum anak	anak	250	250	250

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan (diolah), 2020

a. Kegiatan Fasilitasi Menuju Kota Layak Anak

Sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Untuk mempercepat pemenuhan hak-hak anak telah disusun kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) dan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kab/Kota Layak Anak (KLA).

Sebagai bentuk komitmen Kota Pekalongan untuk mewujudkan Pekalongan Kota Layak Anak, tahun 2019 Kota Pekalongan memperoleh penghargaan Kota Layak Anak Kategori Madya oleh Kementeterian KPPA RI.

Untuk mendukung terwujudnya Pekalongan Kota Layak Anak, telah melaksanakan berbagai terobosan, antara lain:

1. Koordinasi dan sinergitas dengan stakeholder dan OPD terkait
2. Workshop KRA dengan peserta dari Kelurahan se Kota Pekalongan dan OPD terkait
3. Pelatihan SRA dengan peserta perwakilan dari SMP, MTs, SD, MI
4. Deklarasi Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 4 Kota Pekalongan
5. Pelatihan KHA dengan peserta dari OPD, LPM dan Masyarakat
6. Pemberian APE untuk perlengkapan sanggar kampung ramah anak di 3 kelurahan yaitu:

- RW 13 RT 05 Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat berupa APE Prosotan, pengelola KRA Farid Hasan Fuad (Koordinator KRA)
- RW 09 Kelurahan Panjang Wetan Kecamatan Pekalongan Utara berupa APE Bola Dunia, pengelola KRA Joko Setiawan (Ketua RW)
- RW 09 RT 02 Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan berupa APE jungkitan, pengelola KRA Harun Rosyid (Ketua RW)



Gambar 3.70 Workshop KLA dengan Kelurahan dan OPD terkait

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan (diolah), 2020



Gambar 3.71 Pelatihan Sekolah Ramah Anak

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan (diolah), 2020



Gambar 3.72 Deklarasi Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 4 Kota Pekalongan

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan (diolah), 2020



Gambar 3.73 Pelatihan KHA

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan (diolah), 2020

b. Kegiatan Penguatan kelembagaan Forum Anak

Forum Anak (FA) adalah wadah partisipasi anak di Indonesia. Cakupan forum anak mulai dari forum anak kelurahan, forum anak kecamatan, forum anak kota, forum anak provinsi dan forum anak nasional. Berdasarkan UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi Forum Anak sangat di perlukan sebagai wadah partisipasi anak di Indonesia, Forum Anak juga berperan aktif dalam pembangunan daerah mulai dari mengikuti beberapa

acara pemerintahan bahkan mengikuti Musrenbang mulai tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota, Wilayah Karesidenan dan Provinsi.

Sebagai bentuk upaya Pemerintah Kota Pekalongan memenuhi hak-hak anak telah membentuk forum anak tingkat kelurahan, kecamatan dan kota yang seluruhnya berjumlah 32 kelompok forum anak.

Untuk membentuk karakter anak dan pemahaman anak tentang hak-hak anak melalui **Kegiatan Penguatan Kelembagaan Forum Anak** dalam bentuk pelatihan forum anak, fasilitasi rakor dengan pembina dan pihak terkait, mengikutsertakan FA rakor ke tingkat Karesidenan, Provinsi dan Nasional secara rutin.

Pelatihan ini dimaksud agar anak-anak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam sebagai **pelopor dan pelapor (2P)**. **Pelopor** berarti menjadi Agen Perubahan. Terlibat Aktif memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan positif, bermanfaat dan bisa menginspirasi banyak orang sehingga banyak yang ikut terlibat melakukan perubahan yang lebih baik lagi. **Pelapor** berarti terlibat aktif menyampaikan pendapat/pandangan ketika mengalami, atau melihat atau merasakan tidak terpenuhinya hak perlindungan anak di sekitar, dengan melaporkan kepada badan yang menangani permasalahan perlindungan anak.

Bentuk konkrit peran FA dalam pembangunan sebagai agen perubahan adalah:

- Keikutsertaan FA dalam musrenbang mulai dari Tingkat Kelurahan sampai dengan Tingkat Kota.
- Road show FA, mengedukasi dan mengadvokasi teman sebayanya di tingkat kelurahan



Gambar 3.74 Road Show FA sebagai 2P

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan (diolah), 2020

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 799.480.000,- dan realisasi Rp. 759.578.648,- (*unaudited*) melalui 5 (lima) kegiatan, dengan 6 indikator output. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 6 (enam) indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.137 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.137 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			Satuan	RKPD	APBD	
1	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Persentase kasus yang ditangani	persen	0	0	0
		Jumlah bulan penyelesaian kasus yang ditangani LP-PAR	Bulan	12	12	12
2	Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan bagi Kelompok Mitra P2MBG	orang	50	50	50
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan advokasi PUG	orang	45	45	45
3	Pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan UEP	orang	100	100	200
4	Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK	Jumlah TP PKK yang mendapat fasilitasi	TP PKK	32	32	32
5	Fasilitasi peningkatan ketrampilan kinerja dharma wanita	Jumlah bulan terfasilitasinya kegiatan dharma wanita	bulan	12	12	12

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan (diolah), 2020

a. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Lembaga Perlindungan Perempuan Anak dan Remaja (LP PAR) merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Pekalongan sebagai pusat pelayanan terpadu bagi korban kekerasan berbasis gender dan anak dalam penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak.

Tujuan penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak meliputi:

- a. pencegahan;
- b. pelayanan dan pendampingan;
- c. reunifikasi; dan
- d. pemberdayaan.

Perlindungan terhadap anak diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Nomor: 11 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang kemudian di rubah dengan Peraturan Daerah Nomor : 13 tahun 2019, sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kota Pekalongan menciptakan Pekalongan Kota Layak Anak.

LP-PAR di tahun 2018 mendapatkan penghargaan UNSPA (United Nation Service Publik Awards) dari Kementerian PAN RB atas Inovasi Pelayanan Publik LP-PAR.

b. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga menuju kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan melalui kegiatan lintas bidang pembangunan di Kota Pekalongan, maka Pemerintah Kota Pekalongan melaksanakan program terpadu Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender (P2MBG) dan Advokasi PUG.

P2MBG dilaksanakan dalam upaya penanganan kemiskinan dengan fokus peningkatan kondisi, status, kedudukan dan partisipasi perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, pengetahuan dan ketrampilan.

Tahun 2019, lokus P2MBG di Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat dengan sasaran 50 warga mitra yang dibagi dalam 5 kelompok, berupa pelatihan ketrampilan membuat souvenir hantaran dan memasak beraneka macam kue kering.



Gambar 3.75 Pelatihan Memasak dan Ketrampilan

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan (diolah), 2020

c. Pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga

Kegiatan pengembangan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam bentuk pendampingan dan pembinaan bagi usaha ekonomi produktif UP2K. Pendampingan dan pembinaan bagi usaha ekonomi produktif UP2K diperlukan untuk memperkuat kelembagaan kelompok UP2K dalam segi organisasi Sumberdaya Manusia, keterampilan berwirausaha.

Dalam upaya pendampingan dan pembinaan bagi kelompok UP2K PKK, dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Pelatihan tertib administrasi UP2K PKK
2. Pelatihan memasak aneka kue kering dan ketrampilan dari bahan akrilik di gelas, tempat air kemasan, tempat tisu dan vas bunga.
3. Monitorig, pembinaan dan evaluasi UP2K-PKK
4. Penilaian UP2K-PKK, dengan hasil penilaian sebagai berikut:
 - Juara I, Kelompok UP2K PKK Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan
 - Juara II, Kelompok UP2K PKK Kelurahan Podosugih Kecamatan Pekalongan Barat
 - Juara III, Kelompok UP2K PKK Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat
 - Juara Harapan I, Kelompok UP2K PKK Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara.



Gambar 3.76 Pelatihan Ketrampilan bagi Kader UP2K PKK

Sumber: DPMPPA Kota Pekalongan (diolah), 2020

d. Fasilitasi peningkatan ketrampilan dan kinerja PKK

Gerakan PKK merupakan Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat. Pemberdayaan Keluarga meliputi segala upaya Bimbingan, Pembinaan dan Pemberdayaan agar keluarga dapat hidup sejahtera, maju dan mandiri. Tim Penggerak PKK adalah Mitra Kerja Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing – masing jenjang demi terlaksananya program PKK. Tim Penggerak PKK adalah warga masyarakat, baik laki – laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan, parpol, lembaga, atau instansi, dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali gerakan PKK

Sesuai amanat Permendagri Nomor 5 Tahun 2007, PKK merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan. Desa dan Kelurahan merupakan mitra pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. PKK mempunyai peran untuk membantu pemerintah Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang berbudaya, sejahtera, maju, mandiri dan harmonis serta mempunyai peran dalam

menumbuhkembangkan potensi dan peran perempuan dalam meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, peran PKK sebagai penggali, pengembang potensi masyarakat khususnya keluarga, pembina, motivator serta penggerak prakarsa, gotong royong dan swadaya perempuan dalam pembangunan sebagai bagian integral dalam mewujudkan pembangunan partisipatif.

Tujuan PKK

Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan

Sasaran PKK

Sasaran gerakan PKK adalah keluarga, baik di perdesaan maupun perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya, dalam bidang :

- Mental spiritual meliputi sikap dan perilaku sebagai Insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara yang dinamis serta bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Fisik material meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan

Program PKK

Program PKK adalah 10 Program Pokok PKK yaitu :

1. Penghayatan dan pengalaman pancasila
2. Gotong royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga
6. Pendidikan dan keterampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan kehidupan berkoperasi
9. Kelestarian lingkungan hidup
10. Perencanaan sehat

Dalam pelaksanaan 10 Program PKK, telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

- Pembinaan tertib administrasi PKK di 8 kelurahan binaan, yaitu: Kelurahan Medono, Kelurahan Pasirkratonkramat, Kelurahan Panjang Baru, Kelurahan Panjang Wetan, Kelurahan Kauman, Kelurahan Gamer, Kelurahan Jenggot, Kelurahan Kuripan Kertoharjo.
- Sosialisasi Hasil RAKERNAS VIII Tahun 2015, perencanaan dan evaluasi program dan kegiatan Kepada TP PKK Kecamatan Dan TP PKK Kelurahan, melalui rapat koordinasi TP PKK dengan OPD Pembina, rapat pengurus inti, rapat pleno dan rapat pokja.

- Pemantapan peranan dan fungsi TP PKK Kecamatan , TP PKK Kelurahan, Kelompok PKK RW, RT dan Dawis, dilaksanakan melalui Lomba Administrasi Kelurahan Binaan tahun 2019, Lomba Kelurahan Sinergi dengan DPMPPA, Mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas dari OPD Pembina (DPMPPA Kota Pekalongan) bagi Pengurus TP PKK Kota, Ketua TP PKK Kecamatan dan Ketua TP PKK Kelurahan se Kota Pekalongan di Hotel Graha Persada Yogyakarta, dan Meningkatkan pengetahuan dan wawasan kader TP PKK, dengan mengirimkan kader TP PKK pada kegiatan Temu Kader PKK se Jateng dan jambore Kader Nasional.
- Pelaksanaan program Penghayatan dan pengalaman pancasila dan Gotong royong oleh Pokja I TP PKK, melalui kegiatan, antara lain Lomba beberoan PAAR dengan peserta 8 Kelurahan Binaan tahun 2019, Lomba simulasi PAAR peserta Kelurahan Binaan PKK tahun 2018.
- Sinergi program dengan Dinsos P2KB Kota Pekalongan, melalui **Lomba BKL (Bina Keluarga Lansia), Lomba BKR (Bina Keluarga Remaja), Lomba PIK – R.**
- Lomba Kadarkum, dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Pekalongan Ke 113 sinergi dengan Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan.
- Lomba Gotong Royong Masyarakat, sinergi program dengan DPMPPA Kota Pekalongan.
- Sosialisasi bahaya narkoba sinergi dengan Kesbangpol Kota Pekalongan
- Pelaksanaan program Pendidikan dan Ketrampilan dan Pengembangan Kehidupan Berkoperasi oleh Pokja II TP PKK, melalui lomba Bisnis Plan bagi Kelompok UP2K di Tingkat Provinsi Jateng, Sinergi program dan kegiatan dengan Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, melalui Lomba Bunda PAUD, Sosialisasi tentang PAUD Holistic Intergratif.
- Sinergi program dan kegiatan dengan Dinsos P2KB, melalui Lomba BKB.
- Sinergi program dan kegiatan dengan DPMPPA Kota Pekalongan mengadakan lomba UP2K PKK.
- Lomba One Village One Produk.
- Pelaksanaan program pangan, sandang, dan Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga oleh Pokja III TP PKK, melalui kegiatan Pelatihan recycle green dress bagi pokja III se Kota Pekalongan, Sinergi program dan kegiatan dengan Dinperpa Kota Pekalongan melalui Lomba Cipta Menu B2SA, Lomba Cipta Kudapan:
- Kegiatan GEMAYUR dan Minum Susu bagi siswa SD Se Kota Pekalongan
- Lomba KRPL Sinergi program dan kegiatan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan melalui:
 - Lomba Masak Ikan,
 - Kegiatan GEMARIKAN bagi siswa SD/Mi se Kota Pekalongan
 - Lomba Recycle Green Drees pada acara Pameran Inovasi dan Kreatifitas
 - Lomba HATINYA PKK, Pelaksanaan program kesehatan, kelestarian lingkungan dan perencanaan sehat oleh Pokja IV TP PKK, melalui kegiatan, antara lain:
 - Sosialisasi IVA Test bagi Kader Pokja IV TP PKK Kelurahan dan Gabungan Organisasi Wanita Kota Pekalongan
 - Sosialisasi Stunting di 4 Kecamatan, sinergi program dan kegiatan dengan Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, melalui Lomba Cerdas Cermat Kader Posyandu , Lomba Balita Sehat Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Belum semua OPD memiliki komitmen dan pemahaman yang sama untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG)
- Belum semua OPD memahami pentingnya ketersediaan data pilah gender sebagai prasyarat utama dilaksanakannya strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) sehingga dengan tidak tersedianya data pilah menjadi kendala dalam melakukan analisis gender.
- Belum semua *Focal Point Gender* dan Perencana di OPD memiliki kemampuan analisis gender
- Kurangnya pendampingan terhadap warga binaan
- Kurangnya fasilitas umum yang ramah anak dan disabilitas
- Kurangnya sosialisasi, publikasi, dan edukasi tentang KLA
- Belum adanya fasilitas sekretariat dan SDM pendampingan forum anak
- Kurangnya sinkronisasi di layanan-layanan penanganan pengaduan kasus
- Belum memiliki PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga)

2. Solusi

- Peningkatan pemahaman dan komitmen pelaksanaan PUG pada eksekutif dan legislatif, khususnya di tingkat pengambilan keputusan
- Fasilitasi penyusunan data pilah gender bagi OPD
- Penguatan kapasitas Pokja PUG dan Focal Point Gender melalui pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan dalam penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- Peningkatan jumlah binaan warga mitra P2MBG yang baru dan memberikan pendampingan pasca pelatihan di tahun sebelumnya
- Penambahan fasilitas untuk percepatan KLA
- Komitmen dan kebijakan kepala daerah untuk percepatan KLA melalui sinergitas antar OPD
- Pemenuhan fasilitas baik fisik maupun non fisik serta pendampingan bagi forum anak
- Sinkronisasi program dan peningkatan sinergitas antar layanan sehingga menghasilkan data yang valid (*one data*)
- Mengakomodir usulan anak dalam musrenbang
- Harus membuat PUSPAGA baik fisik maupun penyediaan SDM

3. Peluang

- Bekerja sama dengan lembaga masyarakat, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang peduli pada anak dan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Menginisiasi pembentukan APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia)
- Pemanfaatan sebagian pendapatan daerah berasal dari retribusi atau pajak untuk penguatan kelembagaan perempuan dan anak
- LP-PAR sebagai mentor dalam masyarakat bidang perlindungan anak dan gender

3.2.2.3. Pangan

Kebijakan di bidang urusan pangan adalah Peningkatan Ketersediaan Pangan dengan penganeekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal dan sinergi pemantauan pangan. Kondisi umum ketersediaan pangan di kota Pekalongan, mengingat kota Pekalongan bukan wilayah produksi pangan, sehingga perlu meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup di seluruh rumah tangga.

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Pangan di Kota Pekalongan dilaksanakan 1 (satu) program yakni Program Peningkatan Ketahanan Pangan yang terdistribusi dalam 1 indikator Kinerja Program, dengan realisasi yang mencapai target sekaligus melampaui target yang ditetapkan.

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.138 Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Ketahanan Pangan

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Indeks capaian skor pola pangan harapan ketersediaan pangan	91,30	Skor	90,63	100

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2020

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 589.500.000,- dan realisasi Rp. 526.404.900,- melalui 9 (sembilan) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 28 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 8 (delapan) indikator tercapai dan 1 (satu) indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.139 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.139 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	terlaksananya penyusunan pola konsumsi pangan wilayah kota Pekalongan	kali	0	1	1
		Jumlah kegiatan penyusunan pola konsumsi pangan wilayah Kota Pekalongan yang dilaksanakan	kali	1	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
2	Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	terlaksananya lomba KRPL tingkat Kota Pekalongan	kali	0	-	0
		terlaksananya sosialisasi optimalisasi kemanfaatan pekarangan	orang	0	-	0
		jumlah pelaksanaan lomba KRPL tingkat Kota Pekalongan	kali	1	1	1
		Jumlah sosialisasi optimalisasi kemanfaatan pekarangan yang dilaksanakan	kali	1	1	1
3	Pemantauan dan analisis harga pangan pokok	terlaksananya survey harga pangan pokok	dokumen	0	-	0
		Jumlah dokumen harga pangan pokok yang disusun	dokumen	1	1	1
4	Peningkatan mutu dan keamanan pangan	terlaksananya sosialisasi Sistem Keamanan Pangan Terpadu (SKPT)	orang	0	0	0
		terlaksananya pemantauan keamanan pangan	kali	0	0	0
		Jumlah Pelaksanaan Rakor Sistem Keamanan Pangan Terpadu	kali	2	2	2
		Jumlah Pelaksanaan Pemantauan Keamanan Pangan	kali	2	2	2
		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi Keamanan Pangan	kali	1	-	0
5	Pengembangan Pangan Lokal	terlaksananya lomba cipta menu tingkat Kota Pekalongan	kali	0	0	0
		terlaksananya keikutsertaan lomba cipta menu tingkat Propinsi	kali	0	0	0
		terlaksananya sosialisasi makanan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman	orang	0	0	0
		Jumlah Pelaksanaan Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Kota Pekalongan	kali	1	1	1
		Jumlah Keikutsertaan Lomba makanan khas daerah Tingkat Provinsi	kali	1	1	1
		Jumlah Keikutsertaan Lomba makanan khas daerah di TMII	kali	1	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		Jumlah Pelaksanaan pelatihan olahan pangan	kali	1	1	1
		Jumlah Pelaksanaan sosialisasi makanan beragam, bergizi seimbang dan aman	kali	1	1	1
6	Revitalisasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	tersusunnya peta dokumen kerawanan pangan Kota Pekalongan	dokumen	0	0	0
		Jumlah Dokumen Kerawanan Pangan Kota Pekalongan yang disusun	dokumen	1	1	1
7	Sosialisasi Peningkatan Konsumsi Pangan	terlaksananya Gerakan Makan Sayur dan Gerakan Minum Susu	kali	0	0	0
		Jumlah Pelaksanaan gerakan makan sayur dan gerakan minum susu	Kali	1	1	1
8	Pemantauan dan Analisis Ketersediaan Pangan	jumlah dokumen neraca bahan makanan	dokumen	1	1	1
9	Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan	Terlaksananya Dewan Ketahanan Pangan	kegiatan	0	0	0
		Jumlah Rakor Dewan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan	Kali	1	1	1

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2020



Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan



Pemantauan Harga



Pemantauan Ketersediaan Bahan Pangan Menjelang HBKN



Sosialisasi Keamanan Pangan



Sidak Keamanan Pangan



Pelatihan Olahan Pangan



Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dan Lomba Cipta Kudapan Tingkat Kota Pekalongan



Sosialisasi B2SA



Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi Jawa Tengah



Lomba Makanan Khas Daerah



Gambar 3.77 Dokumentasi Kegiatan Dinperpa

Sumber: Dinas Pertanian dan Pangan, 2020

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- a. Indeks capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan belum mencapai target, karena Kota Pekalongan bukan kota produsen. pada Tahun 2019 produksi beras Kota Pekalongan baru mampu memenuhi sekitar 17,73% dari total pasokan yang dibutuhkan setiap tahun, sehingga untuk memenuhi total pasokan, Kota Pekalongan masih harus mendatangkan beras dari luar wilayah dalam jumlah yang cukup besar ;
- b. Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk olahan pangan variasi ;
- c. Faktor alam berupa banjir hujan/air pasang (rob).

2. Solusi

- a. Melakukan perbaikan dan peningkatan skor pola pangan harapan ketersediaan pangan di kota Pekalongan ;
- b. Meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk olahan pangan variasi melalui sosialisasi dan pelatihan.

3.2.2.4. Pertanian

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Pertanian di Kota Pekalongan dilaksanakan melalui 1 (satu) program yakni Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, yang terdistribusi dalam 1 indikator Kinerja Program mencapai target.

1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.140 Target dan Capaian Indikator
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	persentase kepemilikan sertifikat tanah Pemerintah Kota	75,00	persen	37,70	79,6

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan 2019

Persentase kepemilikan sertifikat tanah Pemerintah Kota baru tercapai 79,6% dari angka 75% yang ditargetkan. Penghitungannya sebagai berikut jumlah tanah Pemkot yang sudah berserfikat (437) berbanding dengan jumlah seluruh tanah Pemkot (549)

Pada Tahun 2016 Interchange Tol Jl. Ampera Sutami Soetomo dibebaskan sebanyak 122 Bidang/ sertifikat tanah Pemkot, pada Tahun 2017-2018 Interchange Tol Jl. Ampera Adi Sucipto dibebaskan sebanyak 128 Bidang/ sertifikat Tanah Pemkot, pada Tahun 2018 Interchange tol Jl. Ampera Sutami Sutomo dibebaskan sebanyak 122 Bidang/sertifikat tanah Pemkot, Tanggul penahan Rob Bandengan -Kandang Panjang dibebaskan sebanyak 31 bidang/ sertifikat tanah Pemkot, pada tahun 2019 Pembebasan Sempadan Sungai kali loji sebanyak 30 bidang/sertifikat tanah pemkot, dan pembebasan Parapet Jl. Kunti Kandang Panjang sebanyak 4 Bidang/ sertifikat tanah Pemkot. Total selama 2016 sampai dengan 2019 pembebasan sebanyak 437 bidang/sertifikat tanah Pemkot.

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, khususnya yang terkait dengan kegiatan pensertifikatan terhadap tanah hasil pengadaan tanah pembangunan infrastruktur terkendala kelengkapan dokumen administrasi tanah yang dimiliki oleh para pemilik tanah dan proses pengukuran bidang tanah yang membutuhkan waktu dan ketelitian dalam penggambaran bidang tanah untuk mengatasi hal tersebut pemerintah kota melaksanakan koordinasi secara lebih intensif dengan pihak-pihak terkait, terutama para pemilik tanah, kelurahan dan BPN.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 6.400.000.000,- dan realisasi Rp. 3.969.960.860,- (*unaudited*) melalui melalui 2 (dua) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 2 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 2 indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.141 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

**Tabel 3.141 Target dan Capaian Kinerja Output pada
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah**

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
DPU-PR						
1	Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah	Jumlah lokasi tanah bangunan pengairan yang diadakan	lokasi	2	2	2

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
2	Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah	Jumlah dokumen proses legalisasi pengadaan tanah	sertifikat	36	36	24

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan 2020

Indikator kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah adalah 2 lokasi dari 2 lokasi yang ditargetkan yaitu pengadaan tanah untuk tanggul Jl Kunti dan pengadaan tanah untuk Sempadan Sungai Kali Loji di Krapyak.

Indikator output kegiatan penyerahan hasil pengadaan tanah tidak bisa mancapai target yaitu 34 sertifikat dari 36 sertifikat yang ditargetkan, sehingga ada 2 sertifikat yang tidak tercapai karena adanya perubahan nama kelurahan sehingga BPN harus mencari ulang berkas tahun 2016, selain itu juga untuk penandatanganan sertifikat pembebasan tanggul rob kandang panjang belum ditandatangani oleh Kepala BPN yang telah pensiun. Dari total pembebasan tanah pada tahun 2019 yang berada di Sempadan Kali Loji Kelurahan Krapyak sebanyak 30 bidang/sertifikat Tanah dan Parapet Jalan Kunti Kandang Panjang sebanyak 4 bidang/sertifikat tanah



Gambar 3.78 Dokumentasi Pembebasan Tanah Kali Loji Krapyak

Sumber: DPUPR Kota Pekalongan 2020

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Permintaan ganti rugi atas pembebasan lahan diatas harga yang telah ditetapkan appraisal
- Kelengkapan dokumen untuk pembebasan lahan yang masih kurang lengkap dan memadai

2. Solusi

- Koordinasi dengan pihak –pihak terkait, terutama kelurahan untuk menelusuri dokumen dan peta induk tanah di kelurahan dan BPN Kota Pekalongan untuk menelusuri dokumen tanah bagi tanah yang sudah bersertifikat.
- Melaksanakan negosiasi secara terus-menerus dengan pemilik tanah

3. Peluang

- *Land banking* atau tabungan tanah milik Pemerintah harus mulai di kembangkan sebagai bentuk antisipasi bila sewaktu-waktu dibutuhkan tanah untuk pembangunan

- Masyarakat Kota Pekalongan secara umum memiliki karakter ramah, mudah diajak berkomunikasi.

3.2.2.5. Lingkungan Hidup

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Lingkungan Hidup di Kota Pekalongan dilaksanakan 6 (enam) program yakni Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Program Pengawasan Dan Penataan Hukum Lingkungan yang terdistribusi dalam 12 indikator Kinerja Program, dengan realisasi sebanyak 8 (delapan) indikator yang mencapai target dan 4 (empat) indikator belum mencapai target.

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.142 Target dan Capaian Indikator
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase sampah terangkut ke TPA	61,00	persen	73,3	79,15
2	Persentase sampah terkelola di TPS3R	39,00	persen	26,7	20,85

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (diolah), 2020

Indikator Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan tidak mencapai target yang telah ditetapkan, semakin kecil realisasi persentase sampah terkelola di TPS3R akan menyebabkan realisasi persentase sampah terangkut ke TPA naik, ini menyebabkan beban dari TPA Degayu makin berat karena pada saat ini kapasitas TPA Degayu sudah melebihi batas (*overload*). Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan pengolahan sampah dari sumbernya (TPS3R). Indikator program persentase sampah terkeloladi TPS3R tidak tercapai karena beberapa faktor, antara lain: rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah, belum mandirinya pengelolaan sampah di TPS3R serta rusaknya beberapa sarana dan prasarana di TPS3R.

2. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program ini diukur dengan 3 (tiga) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.143 Target dan Capaian Indikator
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase capaian target 801 usaha dan/atau kegiatan terolah limbahnya	75,00	persen	-	75

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (diolah), 2020

Dari tabel di atas terlihat bahwa capaian indikator program ini sudah memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil terpenting dari pelaksanaan program ini adalah menurunnya beban pencemaran buangan limbah cair pada badan air sungai yang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat khususnya dunia usaha untuk ikut berperan serta dalam pengendalian pencemaran air sungai.

3. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.144 Target dan Capaian Indikator
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase capaian target jumlah ABT yang terawasi	71,43	persen	-	72
2	Persentase target capaian kampung iklim di Tahun 2021	50,00	persen	-	74
3	Cakupan pemantauan kualitas udara di perumahan, industri dan fasilitas umum	66,60	persen	-	66,67

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (diolah), 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pada tahun 2019 capaian ketiga indikator semuanya melebihi target yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan sangat konsen melindungi dan melakukan konservasi terhadap sumber daya alam yang dimilikinya.

4. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.145 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam
Dan Lingkungan Hidup**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	persentase kenaikan jenis informasi publik tentang Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	80,00	Persen	30,00	80
2	Persentase peningkatan pemberdayaan komunitas yang dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup	89,00	Persen	-	90

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (diolah), 2020

Indikator ini baru ditetapkan untuk tahun 2019. Sedangkan untuk indikator persentase kenaikan jenis informasi publik tentang Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ada kenaikan target yang sangat signifikan, hal ini karena ada perubahan formulasi perhitungan. Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2019 capaian indikator program ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Pekalongan melalui DLH

berusaha untuk meningkatkan kualitas informasi publik tentang informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh *stakeholder* yang berkepentingan terhadap data dan informasi mengenai informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Selain itu, pemerintah Kota Pekalongan juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pemberdayaan komunitas dan fasilitasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas.

5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.146 Target dan Capaian Indikator
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	persentase peningkatan jumlah ruang terbuka hijau (RTH)	0,10	persen	0,10	0
2	persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	18,80	persen	18,60	8,23

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (diolah), 2020

Pada tahun 2019 capaian indikator persentase peningkatan jumlah ruang terbuka hijau (RTH) adalah 0% hal ini disebabkan adanya penambahan RTH melalui penanaman pohon di sempadan jalan exit tol diikuti dengan pengurangan luas hutan kota karena alih fungsi yaitu Hutan Kota Sriwijaya beralih fungsi menjadi Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan. Adapun capaian indikator persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau pada hanya sebesar 8,23%, ini karena berdasarkan Studi Potensi Pemenuhan RTH Perkotaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 ada koreksi terhadap luasan RTH Kota Pekalongan yaitu menjadi 8,23%. Koreksi tersebut antara lain karena adanya koreksi identifikasi RTH Perkotaan berupa: koreksi identifikasi batasan perkotaan luas perkotaan dan koreksi identifikasi RTH karena beberapa RTH privat dimasukkan dalam RTH Publik.

6. Program Pengawasan Dan Penaatan Hukum Lingkungan

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.147 Target dan Capaian Indikator
Program Pengawasan Dan Penaatan Hukum Lingkungan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase usaha / kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis aspek lingkungan	60,00	Persen	-	65
2	Persentase pengaduan masyarakat yang telah terselesaikan	80,00	Persen	-	80

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (diolah), 2020

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2019 capaian kedua indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Pemerintah Kota Pekalongan melalui DLH dan stakeholder terkait

berusaha melakukan pengawasan agar usaha / kegiatan yang ada di Pekalongan mentaati persyaratan administratif dan teknis aspek lingkungan yang telah dibuat. Selain itu Pemerintah Kota Pekalongan aktif untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait masalah lingkungan.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 8.287.791.000,- dan realisasi Rp. 7.667.192.867,- (*unaudited*) melalui 12 (dua belas) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 46 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 38 indikator tercapai dan 8 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.148 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.148 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Jumlah dumptruck yang terbeli	unit	1	1	1
		Jumlah Gerobak sampah yang terbeli	unit	50	50	50
		Jumlah kendaraan roda 3 yang terbeli	unit	1	1	1
2	Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	Jumlah dumptruck terpelihara	unit	16	16	16
		Jumlah armroll terpelihara	unit	7	7	7
		Jumlah excavator terpelihara	unit	3	3	3
		Jumlah mobil tinja terpelihara	unit	2	2	1
		Jumlah kijang, L300 dan Carry terpelihara	unit	3	3	3
		Jumlah kontainer terpelihara	unit	25	25	25
		Jumlah urinoir terpelihara	unit	2	2	2
		Jumlah kend roda 3 terpelihara	unit	3	3	3
		Jumlah perahu sampah yang diadakan	unit	1	1	0
3	Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Jumlah frekuensi sosialisasi	kali	9	9	9
		Jumlah peserta sosialisasi	orang	660	660	650
4	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah pembiayaan operasional bank sampah	bulan	12	12	12

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
5	Peningkatan Kebersihan Kota	Jumlah bulan peningkatan kebersihan dan keindahan kota	bulan	12	12	12
		Jumlah bulan pembayaran tenaga kebersihan	bulan	12	12	12
		Jumlah bulan pembayaran tenaga administrasi	bulan	12	12	12
6	Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah	Jumlah TPS yang direvitalisasi	unit	1	1	1
		Jumlah TPS-3R yang direvitalisasi	unit	2	2	2
		jumlah urugan tanah di TPA	m3	2.000	2.000	600
		Jumlah DED TPA Degayu yang disusun	dokumen	1	1	0
7	Pembuatan Profil Adipura	Dokumen Profil Adipura yang tersusun	dok	1	1	0
8	Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor (DAK)	Jumlah pengadaan dumptruck	unit	1	1	1
		Jumlah pengadaan Arm roll	unit	1	1	1
9	Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan	Jumlah Sapu yang terbeli	buah	3.600	0	-
		Jumlah sabit yang terbeli	buah	15	0	-
		Jumlah gancu yang terbeli	buah	55	0	-
		jumlah cangkul yang terbeli	buah	55	0	-
		jumlah scrub yang terbeli	buah	150	0	-
		jumlah serok sampah terbeli	buah	300	0	-
		jumlah karung plastik terbeli	buah	450	0	-
		jumlah obat pematirumput terbeli	buah	50	0	-
		jumlah semprotan pematirumput terbeli	buah	150	0	-
		jumlah keranjang bambu terbeli	buah	150	0	-
		jumlah keranjang basket yang terbeli	buah	150	0	-
		jumlah sekop yang terbeli	buah	10	0	-
		jumlah tong sampah jalan raya yang terbeli	buah	30	0	40
		Jumlah masker, sarung tangan dan jas hujan yang diadakan	buah	825	825	825

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		Jumlah peralatan dan bahan kebersihan yang diadakan	buah	5.281	5.281	5.281
		Jumlah perahu sampah yang diadakan	unit	11	11	0
10	Koordinasi dan pembinaan TPS 3R	Jumlah bulan pembiayaan Operasional TPS-3R	bulan	12	12	12
		Frekuensi pembinaan pengelola TPS-3R	kali	4	4	8
11	Pembangunan sarana prasarana TPA	jumlah Pembangunan Saluran Drainase TPA	meter	740	740	740
12	Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi kebersihan dan persampahan	Jumlah sosialisasi retribusi yang terselenggara	kali	12	12	12
		dokumen potensi wajib retribusi yang terupdate	dok	1	1	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (diolah), 2020

Pada kegiatan peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dan pengadaan sarana prasarana kebersihan terdapat indikator jumlah perahu sampah yang diadakan, pada perubahan APBD Tahun 2019 indikator ini dialihkan pada kegiatan koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih. Untuk indikator Jumlah DED TPA Degayu yang disusun pada kegiatan revitalisasi tempat pengolahan sampah tidak tercapai karena gagal lelang. Adapun indikator dokumen Profil Adipura yang tersusun pada kegiatan Pembuatan Profil Adipura tidak tercapai karena Kota Pekalongan tidak masuk nominasi kota penerima adipura sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun dokumen Profil Adipura. Indikator output kegiatan pengadaan sarana prasarana kebersihan pada perubahan APBD 2019 disederhanakan menjadi 3 (tiga) indikator.

2. Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.383.283.000,- dan realisasi Rp. 1.231.762.817,- (*unaudited*) melalui 5 (lima) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 17 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 15 indikator tercapai dan 2 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.149 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.149 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pemantauan kualitas lingkungan	Jumlah buku yang disusun (Pemantauan kualitas air)	buah	10	10	10
		Jumlah cerobong asap yang di pantau, monitoring dan	lokasi	2	2	2

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		pengawasan kualitas air sungai				
2	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	Tersosialisasinya industri penghasil air limbah B3	kali	4	0	0
		Jumlah sosialisasi industri penghasil air limbah B3 yang dilaksanakan	kali	4	4	6
		Jumlah industri yang terbina	perusahaan	15	15	55
3	Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih	Frekuensi dan panjang sungai yang dibersihkan	sungai	5	5	5
		Jumlah tandon air yang diadakan	unit		1	1
		Jumlah kapal motor yang diadakan	unit		11	11
		Jumlah kendaraan roda 3 yang diadakan	unit		2	2
4	Pengelolaan laboratorium lingkungan	Jumlah bulan diselenggarakannya operasional laboratorium lingkungan hidup	bulan	12	12	12
		Jumlah bulan diselenggarakannya pengujian air	bulan	12	12	12
		Jumlah dokumen DE IPAL Laboratorium yang disusun	dokumen	1	1	1
		Jumlah sarana dan prasarana laboratorium lingkungan hidup yang dipenuhi	unit	12	12	12
5	Pengelolaan IPAL	Jumlah bulan operasional pemeliharaan IPAL Kauman dan IPAL Jenggot	bulan	12	12	12
		Jumlah limbah industri yang terkelola di IPAL Jenggot	m3	420	420	420
		Jumlah limbah industri yang terkelola di IPAL Kauman	m3	80	80	80

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (diolah), 2020

Pada kegiatan pengelolaan B3 dan limbah B3 pada APBD Perubahan Tahun 2019 terjadi perubahan indikator output, indikator tersosialisasinya industri penghasil air limbah B3 targetnya menjadi 0. Untuk indikator jumlah industri yang terbina realisasinya menjadi 55 dari target 15 karena Dinas Lingkungan Hidup pada acara sosialisasi pengelolaan B3 dan limbah B3, selain menghadirkan pelaku industri juga menghadirkan pengelola fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Rumah Sakit yang ada di Kota Pekalongan.

3. Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 102.000.000,- dan realisasi Rp. 99.036.085,- (*unaudited*) melalui 3 (tiga) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 5 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 3 (tiga) indikator tercapai semua.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.150 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.150 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Jumlah sarana pemanenan air hujan dan sumur resapan yang dibangun	unit	3	3	8
2	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	jumlah kampung iklim yang dibentuk	lokasi	5	5	5
3	Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA	Pengawasan terhadap kegiatan pemanfaatan air tanah di Kota Pekalongan, Terawasinya perusahaan pengguna ABT	titik	40	40	50

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (diolah), 2020

Indikator Jumlah sarana pemanenan air hujan dan sumur resapan yang dibangun pada kegiatan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air melebihi target karena efisiensi biaya sehingga dari target yang ditetapkan 3 dapat terbangun 8 unit.

4. Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 849.822.000,- dan realisasi Rp. 383.773.000,- (*unaudited*) melalui 5 (lima) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 11 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 10 indikator tercapai dan 1 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.151 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.151 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di	Jumlah iklan layanan masyarakat tentang	tahun	1	1	8

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
	bidang lingkungan	pengelolaan lingkungan hidup				
		Jumlah fasilitasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan bagi komunitas dan siswamas	kegiatan	10	10	10
2	Pengembangan data dan informasi lingkungan	Data IKLH, SPM, IKPLHD yang disusun	dokumen	3	3	3
		Jumlah dokumen AMDAL Pasar Banjarsari yang disusun	dokumen	1	1	0
3	Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA	Jumlah saka kalpataru (pramuka) yang dibina	orang	100	100	100
4	Gerakan Peduli Lingkungan Hidup Perkotaan	Jumlah lomba peduli lingkungan hidup yang diselenggarakan	lomba	4	4	4
		Jumlah kegiatan aksi penanaman pohon yang diselenggarakan	kegiatan	1	1	1
		Jumlah fasilitasi lomba LBS tingkat Prov. Jateng yang dilaksanakan	kegiatan	1	1	1
5	Adiwiyata Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi Adiwiyata Daerah	orang	50	50	50
		Jumlah lomba Adiwiyata yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah kegiatan pendampingan Persiapan Penilaian Adiwiyata Provinsi, Nasional dan Adiwiyata Mandiri yang dilaksanakan	kali	1	1	1

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (diolah), 2020

Realisasi capaian indikator Jumlah dokumen AMDAL Pasar Banjarsari yang disusun pada kegiatan Pengembangan data dan informasi lingkungan pada tahun 2019 tidak tercapai karena gagal lelang. Pada kegiatan gerakan peduli lingkungan hidup perkotaan dengan indikator jumlah fasilitasi lomba LBS tingkat Prov. Jateng yang dilaksanakan Kota Pekalongan yang diwakili oleh Kelurahan Noyontaansari berhasil meraih peringkat 1 tingkat Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 3.79 Lurah Noyontaansari saat menerima Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (diolah), 2020

Untuk kegiatan adipura dengan indikator output Jumlah kegiatan pendampingan Persiapan Penilaian Adiwiyata Provinsi, Nasional dan Adiwiyata Mandiri yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pekalongan melalui SMPN 6 Pekalongan berhasil memperoleh predikat Sekolah Adiwiyata Nasional.



Gambar 3.80 SMPN 6 Kota Pekalongan pada saat Penyerahan Penghargaan Adiwiyata Nasional dan Adiwiyata Mandiri

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (diolah), 2020

5. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 618.656.000,- dan realisasi Rp. 600.010.481,- (*unaudited*) melalui 3 (tiga) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 3 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 2 (dua) indikator tercapai dan 1 (satu) indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.152 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.152 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Penataan RTH	jumlah prasana dan sarana konservasi terhadap tanaman mangrove	unit	4	4	12
2	Pemeliharaan RTH	jumlah bulan terpeliharanya pohon di pinggir jalan	bulan	12	12	12
3	Pemeliharaan dan Perawatan Taman Hutan Rakyat (TAHURA)	jumlah hutan kota yang terpelihara sarana dan prasarannya	tahura	7	7	6

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (diolah), 2020

Indikator kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Taman Hutan Rakyat (TAHURA) yaitu jumlah hutan kota yang terpelihara sarana dan prasarannya pada tahun 2019 hanya terealisasi 6 Tahura, karena Tahura Sriwijaya beraling fungsi untuk perluasan kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan.

6. Program Pengawasan Dan Penaatan Hukum Lingkungan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 143.908.000,- dan realisasi Rp. 125.275.000,- (*unaudited*) melalui 3 (tiga) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 3. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 3 (tiga) indikator tercapai seluruhnya.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.153 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.153 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengawasan Dan Penaatan Hukum Lingkungan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper)	Jumlah pembinaan, sosialisasi pelaku industri dalam pelaksanaan	kali	10	10	10
2	Penerapan pengembangan manajemen pengelolaan limbah yang mengacu pada dokumen lingkungan	jumlah perusahaan yang taat administrasi	perusahaan	5	5	8
3	Koordinasi penertiban pencemaran dan pengrusakan lingkungan	Jumlah pembinaan, dan sosialisasi pelaku industri dalam pelaksanaan	kali	14	14	14

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2020

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- TPA Gegayu yang sudah overload
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan persampahan terutama pengelolaan sampah pada sumbernya, sehingga mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan.
- Belum optimalnya kepedulian masyarakat yang lingkungan hidup.
- Masih banyaknya pemilik kegiatan/usaha yang belum taat melaksanakan ketentuan dalam peraturan bidang lingkungan hidup, sehingga berpotensi melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- pemahaman standar pelayanan minimal (SPM) untuk penyediaan RTH masih kurang
- Kemampuan peraturan untuk mengatur implementasi yang berkaitan dengan pemenuhan standart luasan minimal RTH Publik dipertanian masih rendah.

2. Solusi

- Memaksimalkan fungsi TPS3R
- Sosialisasi pengelolaan persampahan serta pelaksanaan kegiatan kerja bakti dengan melibatkan stakeholder dan masyarakat untuk memberikan pemahaman dalam meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Sehingga akan membentuk karakter pribadi masyarakat yang sadar akan kebersihan lingkungan dan akan berdampak kepada pola hidup bermasyarakat yang sadar lingkungan;
- Dilakukan pendampingan terhadap masyarakat baik berupa sosialisasi/penyuluhan/pelatihan untuk merubah budaya masyarakat terhadap lingkungan hidup.
- Perlu diadakan sosialisasi kepada usaha/kegiatan akan hak dan kewajiban pengusaha dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Bekerjasama dengan institusi penegak 282okum lainnya untuk shock terapi pada usaha/kegiatan yang tidak mungkin lagi dilakukan pembinaan.
- Peningkatan pemahaman SPM (RTH baik jenis dan proporsi)) dan tata cara penetapan deliniasi perkotaan dalam perencanaanmelalui sosialisai dan pelatihan.
- Penetapan dan penerapan standart minimal RTH (lingkungan) dalam mekanisme perizinan pengembangan perumahan di perkotaan minimal mengikuti pedoman/kriteria teknis pengediaan RTH di tingkat lingkungan sesuai dengan peraturan menteri PU No. 5/2008 tahun 2008.
- Peningkatan keakuratan dan kelengkapan inventarisasi Data Base RTH Publik di tingkat lingkungan, desa/kelurahan, kecamatan dengan memanfaatkan teknologi.

3. Peluang

- Pembangunan TPA regional di wilayah Kabupaten Pekalongan.
- Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan oleh pelaku usaha dan masyarakat (proper, adipura, adiwiyata, kalpataru, menuju kota hijau, kampung iklim).
- Adanya kebutuhan kerjasama lintas daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

- Adanya tuntutan global terhap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan.
- Isu RTH perlu dinaikkan nilai kepentingan politisnya, sehingga ada porsi lebih tinggi dalam penyediaan.

3.2.2.6. Administrasi Kependudukan Dan Catatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga tahun 2019 ini telah melaksanakan perekaman KTP-el mencapai 225.252 jiwa (97,76%) dan kepemilikan KTP-el telah mencapai 225.252 jiwa (97,76%) dari target wajib KTP-el sebesar 230.411 jiwa.

Sejak tanggal 1 Januari 2015 KTP-el sudah dicetak di daerah Kota/Kabupaten. Namun untuk pengadaan blangko KTP-el tetap dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Penjelasan pada pasal 5 huruf f.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 79 A yang berbunyi : Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya. Yang ditindak lanjuti dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 470/327/SJ tentang Perubahan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan nomor 8 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pasal 77 yang berbunyi : Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya. Perda tersebut dilaksanakan mulai tanggal 15 Oktober 2015. Dengan demikian sejak tanggal 15 Oktober 2015 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan tidak memungut biaya retribusi atas pelayanan penerbitan Administrasi Kependudukan (KK, KTP, Akta-Akta Catatan Sipil dan lain-lain), namun tetap memberlakukan denda atas keterlambatan pelaporan pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sanksi administratif tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pada tahun 2019 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan melakukan Perjanjian Kerjasama dengan RSUD Bendan, RS Budi Rahayu, RS Siti Khodijah, RS. H.A. Zaky Djunaid, RS Karomah Holistic Pekalongan, RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan, RS Bhakti Waluyo Kota Pekalongan dan Puskesmas BLUD (4 Puskesmas) Kota Pekalongan untuk jemput bola bagi kelahiran baru, serta dengan PKK Kota Pekalongan, Serikat PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) untuk penerbitan akta kelahiran terlambat. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan cakupan Akta Kelahiran.

Tabel 2.154 Jenis Pelayanan Dindikcapil Kota Pekalongan

NO	Jenis Pelayanan	Waktu Penyelesaian
1.	Kartu Keluarga (KK)	7 Hari Kerja
2.	KTP-el	7 Hari Kerja
3.	Surat Keterangan Pindah WNI	7 Hari Kerja
4.	Akta Kelahiran	10 Hari Kerja
5.	Akta Kematian	10 Hari Kerja
6.	Akta Perkawinan	13 Hari Kerja

NO	Jenis Pelayanan	Waktu Penyelesaian
7.	Akta Perceraian	10 Hari Kerja
8.	Kutipan Kedua Akta-akta Catatan Sipil	10 Hari Kerja
9.	Legalisir Dokumen Kependudukan	60 Menit

Sumber : SK KADISDUKCAPIL Nomor 067/2295/2019, Tentang Penetapan Standar Pelayanan Di Dindikcapil Kota Pekalongan, 2020

Dalam pelayanan administrasi kependudukan Di Kota Pekalongan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah meraih penghargaan Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik kategori “BAIK” Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Jakarta.



Gambar 3.81 Piagam penghargaan Role Model Penyelenggara Pelayanan Publik kategori “BAIK” Tahun 2019

Dindikcapil Kota Pekalongan, 2020

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Pekalongan dilaksanakan 3 (tiga) program yakni Program Penataan Administrasi Kependudukan, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil yang terdistribusi dalam 6 indikator Kinerja Program yaitu: OPD yang memanfaatkan data kependudukan, Stakeholder yang berkoordinasi dalam pemanfaatan data kependudukan, Cakupan penerbitan KTP, Cakupan penerbitan KK, Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran, Cakupan penerbitan kutipan akta kematian, dengan realisasi sebanyak 3 indikator yang mencapai target (Stakeholder yang berkoordinasi dalam pemanfaatan data kependudukan, Cakupan penerbitan KTP, Cakupan penerbitan kutipan akta kematian) dan 3 indikator belum mencapai target (OPD yang memanfaatkan data kependudukan, Cakupan penerbitan KK, Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran).

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.155 Target dan Capaian Indikator
Program Penataan Administrasi Kependudukan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	OPD yang memanfaatkan data kependudukan	9,00	OPD	-	1
2	Stakeholder yang berkoordinasi dalam pemanfaatan data kependudukan	26,00	pemangku kepentingan	-	26

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2020

Indikator Program Penataan Administrasi Kependudukan yang tidak tercapai adalah : OPD yang memanfaatkan data kependudukan, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari OPD di Pemkot Pekalongan untuk dapat bekerjasama dan menggunakan serta memanfaatkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.

2. Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.156 Target dan Capaian Indikator
Program Pendaftaran Penduduk**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Cakupan penerbitan KTP	93,00	Persen	96,75	97,76
2	Cakupan penerbitan KK	97,00	persen	93,86	91,27

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2020

Indikator Program Pendaftaran Penduduk yang tidak tercapai adalah : Cakupan penerbitan KK, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran penduduk di Kota Pekalongan akan pentingnya dokumen kependudukan.

3. Program Pencatatan Sipil

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.157 Target dan Capaian Indikator
Program Pencatatan Sipil**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	73,00	Persen	49,85	52,14
2	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	70,00	persen	69,02	75,94

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2020

Indikator Program Pencatatan Sipil yang tidak tercapai adalah : Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran, hal ini dikarenakan kesadaran yang masih rendah dari penduduk di Kota Pekalongan akan pentingnya dokumen kependudukan.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.215.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. Rp. 189.212.200,- (*unaudited*) melalui 3 (tiga) kegiatan dengan indikator output sebanyak 7 indikator yaitu : Jumlah bulan pelayanan pengaduan administrasi kependudukan, Jumlah monev serta koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan, Jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan), Jumlah arsip permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan), Jumlah arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjilidannya, jumlah arsip dokumen akta catatan sipil yang dibersihkan dan ditata kembali, Jumlah peserta sosialisasi yang ditingkatkan pemahamannya akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Sampai dengan akhir Tahun 2019, sebanyak 4 indikator yang tercapai dan 3 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai adalah : Jumlah monev serta koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan, Jumlah arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjilidannya, Jumlah peserta sosialisasi yang ditingkatkan pemahamannya akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan. Program ini terdiri dari Kegiatan :

a. Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan

Kegiatan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan merupakan kegiatan yang menampung pengaduan masyarakat kota Pekalongan berkaitan dengan pelayanan Adminduk dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Pada Indikator Jumlah monev serta koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan tidak dapat memenuhi target, hal ini dikarenakan monitoring dan pelayanan tergantung kondisi di lapangan, misalnya : ada instruksi dari pusat atau ada aturan baru yang harus segera dilaksanakan sehingga butuh koordinasi dengan pihak terkait; koordinasi dalam melaksanakan pencatatan perkawinan bagi warga non muslim..

b. Pemeliharaan Data Kependudukan

Kegiatan Pemeliharaan Data Kependudukan merupakan kegiatan pemeliharaan arsip Adminduk khususnya arsip Akta Catatan Sipil. Yang berupa penjilidan arsip register akta catatan sipil, arsip permohonan akta catatan sipil, dan perbaikan jilidan arsip yang rusak karena termakan waktu, serta pembersihan dan penataan arsip-arsip pencatatan sipil.

c. Sosialisasi/ Penyuluhan Administrasi Kependudukan

Kegiatan Sosialisasi/ Penyuluhan Administrasi Kependudukan merupakan kegiatan tatap muka dengan masyarakat kota Pekalongan, yang merupakan perwakilan dari sekolah-sekolah, pondok pesantren, LPM, BKM, LSM, Ormas.



Gambar 3.82 Dokumentasi Sosialisasi Adminduk

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2020

Pelaksanaan kegiatan ini berlangsung dengan baik, namun demikian Indikator Jumlah peserta sosialisasi yang ditingkatkan pemahamannya akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan tidak tercapai targetnya, hal ini dikarenakan peserta sosialisasi yang diundang tidak semua hadir.

d. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

Kegiatan ini geser ke Program Pencatatan Sipil. Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.158 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPd-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.158 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Penataan Administrasi Kependudukan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Jumlah bulan pelayanan pengaduan administrasi kependudukan	bulan	12	12	12

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		Jumlah monev serta koordinasi dalam daerah yang dilaksanakan	kali	525	525	232
2	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	Jumlah petugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang ditingkatkan kompetensinya	orang	46	0	Kegiatan bergeser ke Program Pencatatan Sipil
3	Pemeliharaan Data Kependudukan	Jumlah arsip register akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan)	buku	150	150	167
		Jumlah arsip permohonan akta catatan sipil yang dipelihara (berupa penjilidan)	berkas	7.500	7.500	8.350
		Jumlah arsip register akta catatan sipil yang diperbaiki penjilidannya	buku	100	100	80
		jumlah arsip dokumen akta catatan sipil yang dibersihkan dan ditata kembali	buku	5.250	5.250	5.250
4	Sosialisasi/Penyuluhan Administrasi Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi yang ditingkatkan pemahamannya akan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan	orang	200	200	169

Sumber : Dindikcapil Kota Pekalongan, 2020

2. Program Pendaftaran Penduduk

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 581.222.000,- dan realisasi Rp. 555.710.000,- (*unaudited*) melalui 3 (tiga) Kegiatan dengan indikator output sebanyak 4 indikator yaitu : Jumlah petugas yang mengelola laporan kependudukan, Jumlah kepemilikan KTP-el, Jumlah Kepemilikan KK, Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Sampai dengan akhir Tahun 2019, 1 indikator tercapai dan 3 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai adalah : Jumlah kepemilikan KTP-el, Jumlah Kepemilikan KK, Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA). Program ini terdiri dari Kegiatan :

a. Kelembagaan Pengelola Sistim Informasi Kependudukan

Kegiatan Kelembagaan Pengelola Sistim Informasi Kependudukan merupakan kegiatan koordinasi antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan petugas yang mengelola laporan kependudukan di Kelurahan dan Kecamatan se Kota Pekalongan.

b. Penerapan KTP-el dan Kartu Keluarga

Kegiatan Penerapan KTP-el dan Kartu Keluarga merupakan tindak lanjut instruksi dari Pemerintah Pusat berupa perekaman data penduduk Kota Pekalongan dalam program KTP Elektronik. Perekaman data berupa pengambilan iris mata, sidik jari, foto diri dan tanda tangan. Dimana pencetakan KTP-el sejak tahun 2015 dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Cakupan Penerbitan KTP dihitung dari Jumlah KTP-el yang diterbitkan sebanyak 225.252 KTP dibandingkan dengan jumlah wajib KTP sebanyak 230.411, sehingga capaiannya 97,76%. Kegiatan ini merupakan indikator kinerja pelayanan administrasi kependudukan yang dihitung sampai dengan tahun 2019 dengan pencapaiannya sebagai berikut :

- Jumlah kepemilikan KTP-el : 225.252 KTP.
- Jumlah Kepemilikan KK: 90.925 KK.



Gambar 3.83 Dokumentasi Pelayanan KTP

Sumber : Dindukcapil Kota Pekalongan, 2020

Namun demikian, sejumlah indikator tersebut belum dapat memenuhi target. Hal ini disebabkan :

- Indikator Jumlah kepemilikan KTP-el tidak tercapai, hal ini dikarenakan wajib KTP berhubungan dengan mutasi penduduk, dimana terjadi mobilitas pindah datang setiap saat.
- Indikator Jumlah Kepemilikan KK tidak tercapai, hal ini dikarenakan Jumlah Kepala Keluarga berhubungan dengan mutasi penduduk, dimana terjadi mobilitas pindah datang setiap saat.

c. Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA)

Kegiatan Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan tindak lanjut instruksi dari Pemerintah Pusat sejak Tahun 2017. Dimana pada tahun 2017 Kota Pekalongan mendapatkan Reward sebagai pelaksana Penerapan KIA Tahun 2017, berdasarkan Keputusan Kemendagri No.471.13-112 DUKCAPIL Th. 2017 tanggal 13 Januari 2017 atas prestasi Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran anak (0-18 Tahun) di Kota Pekalongan yang

telah melebihi target Nasional (77,5%) yaitu sebesar 84,69% di Tahun 2016. Sampai dengan tahun 2019 telah tercapai : Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) : 32.902 KIA

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.159 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.159 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pendaftaran Penduduk

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Kelembagaan pengelola sistim informasi kependudukan	Jumlah petugas yang mengelola laporan kependudukan	orang	120	120	120
2	Penerapan KTP-el dan Kartu Keluarga	Jumlah kepemilikan KTP-el	KTP	249.427	249.427	225.252
		Jumlah Kepemilikan KK	KK	97.594	97.594	90.925
3	Penerapan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	KIA	86.627	86.627	32.902

Sumber : Dindikcapil Kota Pekalongan, 2020

3. Program Pencatatan Sipil

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 248.078.000,- dan realisasi Rp. 242.228.500,- (*unaudited*) melalui 2 (dua) Kegiatan dengan indikator output sebanyak 3 indikator yaitu : Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran, Jumlah kepemilikan Kutipan Akta Kematian, Jumlah petugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang ditingkatkan kompetensinya. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 0 indikator tercapai dan 3 indikator tidak tercapai. Jadi semua indikatornya tidak tercapai, namun untuk indikator ketiga yaitu : Jumlah petugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang ditingkatkan kompetensinya, yang mana ini merupakan indikator kegiatan yang berupa bimtek internal dan peserta adalah seluruh karyawan dindikcapil Kota Pekalongan baik yang ASN maupun non ASN apabila realisasi dibandingkan target memang tidak memenuhi target namun hal ini dikarenakan adanya pegawai pada DINDUKCAPIL Kota Pekalongan yang pensiun dan hingga pelaksanaan kegiatan belum ada gantinya. Jadi pesertanya sudah meliputi seluruh karyawan pada DINDUKCAPIL Kota Pekalongan. Program ini terdiri dari Kegiatan :

a. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) berupa pemberian layanan bagi pemohon Pelayanan Catatan Sipil. Disamping itu juga monitoring pelaksanaan pelayanan yang ada di kecamatan yang meliputi proses pelayanan, updating data SIAK dan pemantauan peralatan yang ada di kecamatan. Kegiatan ini mempunyai indikator kinerja pelayanan administrasi kependudukan yang dihitung sampai dengan tahun 2019 dengan pencapaiannya sebagai berikut :

- Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran : 163.719 Akta Kelahiran.
- Jumlah kepemilikan Kutipan Akta Kematian : 9.495 Akta Kematian.

Pada kegiatan ini, 2(dua) indikator belum tercapai targetnya, yakni :

- Indikator Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran tidak tercapai, hal ini dikarenakan Penduduk kurang pro aktif dalam mendaftarkan peristiwa Kelahirannya untuk mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran, terutama bagi penduduk usia dewasa.
- Indikator Jumlah kepemilikan Kutipan Akta Kematian tidak tercapai, hal ini dikarenakan kesulitan dalam memprediksi kematian orang disamping itu juga banyak penduduk yang kurang pro aktif dalam mendaftarkan anggota keluarganya yang telah meninggal untuk mendapatkan kutipan akta kematian.

b. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Dan Catatan Sipil

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan Dan Catatan Sipil merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas seluruh karyawan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, yang diikuti oleh semua karyawan Dindikcapil Kota Pekalongan sejumlah 45 orang baik PNS maupun Non PNS. Merupakan kegiatan pindahan dari Program Penataan Administrasi Kependudukan.



Gambar 3.84 Peningkatan Kapasitas Aparat

Sumber : Dindikcapil Kota Pekalongan, 2020

Indikator Jumlah petugas pelayanan Administrasi Kependudukan yang ditingkatkan kompetensinya tidak mencapai target secara angka, tapi pada dasarnya mencapai target, hal ini dikarenakan kegiatan ini adalah kegiatan pembinaan untuk peningkatan kompetensi

bagi seluruh karyawan/karyawati Dindikcapil Kota Pekalongan, dikarenakan ada beberapa pegawai yang pensiun pada tahun 2019, maka target peserta tidak dapat terpenuhi secara angka, walaupun sebenarnya seluruh karyawan/karyawati Dindikcapil Kota Pekalongan sudah menghadiri kegiatan pembinaan tersebut.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.160 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.160 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pencatatan Sipil

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Jumlah Kepemilikan Kutipan Akta Kelahiran	Akta Kelahiran	313.365	313.365	163.719
		Jumlah kepemilikan Kutipan Akta Kematian	Akta Kematian	11.081	11.081	9.495
2	Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil	Jumlah petugas pelayanan Administrasi Kependudukan	orang	-	46	45

Sumber : Dindikcapil Kota Pekalongan, 2020

Ketiga program tersebut mendukung #GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk) melalui inovasi-inovasi, sebagai berikut:

- 1) Program Paket pelayanan Adminduk
 - Paket 1 (Akta Kelahiran, KK, Kartu Identitas Anak (KIA))
 - Paket 2 (Akta Kematian, KK, KTP bagi pasangan)
 - Paket 3 (Akta Perkawinan, KTP, KK)
 - Paket 4 (Akta Perceraian, KTP, KK)
 - Paket 5 (Pindah, KK)
- 2) Kerjasama dengan RS dan BLUD Puskesmas Rawat inap untuk Pelaporan Akta Kelahiran Baru
- 3) Kerjasama dengan TP PKK dan SERIKAT PEKKA (PEREMPUAN KEPALA KELUARGA) untuk Pelaporan Akta Kelahiran terlambat
- 4) Kerjasama dengan PT POSINDO (Persero) untuk pengiriman Surat pemberitahuan Perekaman KTP-el bagi wajib KTP pemula
- 5) Jemput Bola perekaman KTP-el di Sekolah, Kelurahan, penduduk/ Difabel/orang sakit/ Lansia, Rutan dan Lapas.
- 6) Program "JARUM" (KTP-el Jadi Antar Rumah)
- 7) Layanan Akta Kematian antar kerumah melalui Kelurahan
- 8) Pelayanan Hari Sabtu
- 9) Digitalisasi Arsip Register Akta Pencatatan Sipil
- 10) Aplikasi SIMP4S (Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil)
- 11) Aplikasi SP3D-LK (Sistem Pelayanan Pelaporan Pindah Datang Luar Kota)

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- Kurang pengetahuan masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan sehingga berakibat kurang antusiasnya masyarakat untuk melakukan pengurusan dokumen kependudukan.
- Ketergantungan blangko KTP-el dari Ditjen Dukcapil.
- Masih kurangnya sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan yang menangani pelayanan dan administrasi, baik dari jumlah maupun kualitas.
- Jaringan komunikasi data dan aplikasi KTP-el yang kurang lancar sehingga pemrosesan data dari pusat terhambat.
- Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan data pada dokumen yang dimiliki (status kawin, pendidikan terakhir, pekerjaan)

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

- Masih kurangnya sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan yang menangani pelayanan dan administrasi, baik dari jumlah maupun kualitas.
- Kurang pengetahuan masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan sehingga berakibat kurang antusiasnya masyarakat untuk melakukan pengurusan akta-akta pencatatan sipil, terutama yang usia diatas 18 tahun.
- Masyarakat tidak memiliki waktu untuk mengurus dokumen kependudukan pada jam kerja.

Bidang Pemanfaatan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

- Belum adanya Data Dokumentasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan yang memadai tentang Kependudukan dan Catatan Sipil
- Jaringan SIAK yang terkoneksi dengan Ditjen Dukcapil.
- Belum optimalnya koordinasi lintas sektor pelayanan dokumen kependudukan.
- Belum optimalnya komitmen berbagai pihak untuk pemanfaatan data base kependudukan dalam perencanaan pembangunan dan program perlindungan sosial.
- Arsip register dan permohonan akta catatan sipil yang jumlahnya semakin bertambah dan harus dijaga keutuhannya.

2. Solusi

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- Perlu ditambahkan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan melalui media cetak, elektronik dan tatap muka dengan stake holder.
- Mengadakan koordinasi dengan petugas registrasi dan Lurah se kota Pekalongan.

- Membuka pelayanan hari Sabtu dimana memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukannya.
- Melakukan perekaman jemput bola ke sekolah-sekolah (SMA dan SMK, Ponpes, Penyandang disabilitas, Sakit permanen)
- Mengadakan koordinasi dengan ketua RT se-kota Pekalongan untuk Validasi data yang belum rekam
- Melaksanakan koordinasi dengan BKPPD Kota Pekalongan tentang kurangnya tenaga teknis dan tenaga operator yang mengaplikasikan sistem administrasi kependudukan.
- Merencanakan kegiatan pengadaan untuk memenuhi sarana prasarana ruang pelayanan KTP – KK di Kecamatan
- Melaksanakan koordinasi dengan Ditjen Dukcapil terkait pengiriman Blangko KTP-el dari pusat ke daerah.
- Pencanaan program #GISA (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk) di Kota Pekalongan

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

- Pelaksanaan SIAK Capil sudah online.
- Mengadakan kerjasama dengan Dindikpora dan Tim Penggerak PKK serta Serikat PEKKA (Perempuan Kepala Keluarga) untuk masalah Akta Kelahiran.
- Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan RSUD Bendan, BLUD Puskesmas Rawat Inap, RS Siti Khodijah, RS Budi Rahayu, RS H.A Zaky Djunaid, RS. Karomah Holistic Pekalongan, RS. Bhakti Waluyo, dan RSUD Kraton Kab. Pekalongan, yang ada di Kota Pekalongan guna jemput bola pengurusan Akta Kelahiran Baru.
- Membagikan blangko permohonan Akta Kematian bagi RT se Kota Pekalongan.
- Membangun aplikasi di Kelurahan untuk kemudahan permohonan dokumen kependudukan.
- Melaksanakan koordinasi dengan BKPPD Kota Pekalongan tentang kurangnya tenaga teknis dan tenaga operator yang mengaplikasikan sistem administrasi kependudukan.
- Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait.
- Membuka pelayanan hari Sabtu dimana memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukannya.

Bidang Pemanfaatan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

- Pelaksanaan SIAK Capil sudah online.
- Melakukan kegiatan Pemutakhiran Data Kependudukan (updating data) atas kepemilikan dokumen kependudukan.
- Meningkatkan adanya kegiatan pembersihan dan penataan arsip.
- Adanya kegiatan penambahan sarana dan prasarana untuk arsip.
- Melakukan digitalisasi arsip sebagai bentuk alih media.
- Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan LPPL Radio Kota Batik Pekalongan dan LPPL TV Batik Pekalongan untuk melaksanakan sosialisasi melalui media massa elektronik, serta Harian RADAR Kota Pekalongan untuk melaksanakan sosialisasi melalui media massa non elektronik.

- Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan Dindik Kota Pekalongan dan Dinkominfo Kota Pekalongan untuk melaksanakan Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Pelayanan Pendidikan.
- Melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan PT POS Indonesia (Persero) untuk melaksanakan Pengiriman Surat Pemberitahuan Perekaman KTP-el bagi wajib KTP Pemula sebagai salah satu bentuk sosialisasi bagi masyarakat.
- Membangun SIMP4S dengan kelurahan-kelurahan untuk memudahkan pembuatan surat pengantar permohonan dokumen Kependudukan.
- Membangun SIM pindah datang bekerjasama dengan Diskominfo

3. Peluang

- Adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online berstandar nasional dan link data sehingga dapat mengakses data seluruh penduduk untuk mempermudah pelayanan dan menghindari data kependudukan ganda.
- Jaminan validitas data kependudukan untuk keperluan lintas sektor.
- Tuntutan regulasi terkait Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

3.2.2.7. Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekalongan (DPMPPA).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, DPMPPA Kota Pekalongan menetapkan kebijakan, antara lain :

- Peningkatan kemandirian lembaga kemasyarakatan kelurahan (RT, RW, LPM, BKM, PKK, Karang Taruna)
- Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan
- Peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan

Data Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Kota Pekalongan dalam tabel berikut:

Tabel 4.161 Data LKK Kota Pekalongan

NO	LKK	2017	2018	2019
1	RT	1635	1646	1660
2	RW	337	339	340
3	PKK	32	32	32
4	LPM	32	32	27
5	BKM	32	32	27
6	Karang Taruna	32	32	32
Jumlah		2100	2113	2118

Sumber DPMPPA Kota Pekalongan, 2020

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya DPMPPA Kota Pekalongan terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, melalui 3 (tiga) program yakni Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, Program Pemberdayaan Masyarakat, Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang terdistribusi dalam 3 indikator Kinerja Program dengan realisasi sebanyak 3 (tiga) indikator yang mencapai target.

1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.162 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase kelurahan yang terfasilitasi kegiatan pemberdayaan	100,00	Persen	-	100

Sumber DPMPPA Kota Pekalongan (diolah), 2020

Indikator persentase kelurahan yang terfasilitasi kegiatan pemberdayaan adalah indikator yang diukur dengan membandingkan Kelurahan yang terfasilitasi kegiatan pemberdayaan minimal 3 kegiatan dalam 1 tahun dengan seluruh kelurahan. Fasilitas kegiatan pemberdayaan yang dimaksud adalah fasilitas kegiatan PAKSMB, PDPM, Sanimas, Pamsimas, PLPBK dan Kotaku. Capaian tersebut berdampak positif pada peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.163 Target dan Capaian Indikator
Program Pemberdayaan Masyarakat**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase peningkatan keberdayaan masyarakat	33,33	Persen	-	33,33

Sumber DPMPPA Kota Pekalongan (diolah), 2020

Indikator persentase peningkatan keberdayaan masyarakat adalah indikator yang diukur dengan membandingkan Jumlah LKK yang dilatih sejak penetapan target dengan jumlah seluruh LKK (2.106 LKK). Tahun 2019 sebanyak 702 LKK yang telah mendapatkan pelatihan. LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan) di Kota Pekalongan adalah LPM, BKM, RW, RT, PKK dan Karang Taruna. Capaian tersebut berdampak positif :

- Peningkatan pemahaman akan tugas dan fungsi kelembagaan LKK
- Peningkatan kualitas sumber daya LKK
- Tertib organisasi dan kelembagaan, serta tertib administrasi

3. Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.164 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	persentase kinerja kelembagaan masyarakat	100,00	persen	-	100

Sumber DPMPPA Kota Pekalongan (diolah), 2020

Indikator persentase kinerja kelembagaan masyarakat adalah indikator yang diukur dengan membandingkan Jumlah LKK yang aktif dengan jumlah seluruh LKK di Kota Pekalongan. LKK (Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan) di Kota Pekalongan adalah LPM, BKM, RW, RT, PKK dan Karang Taruna. Capaian tersebut berdampak positif pada peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.379.000.000,- dan realisasi Rp. 1.303.246.800,- (*unaudited*) melalui 3 (tiga) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 3 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 3 (tiga) indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.165 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

**Tabel 3.165 Target dan Capaian Kinerja Output pada
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa**

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman	Jumlah bulan terfasilitasinya program PLPBK, Kotaku, Sanimas, Pamsimas, PDPM	bulan	12	12	12
2	Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitasi kegiatan PPKSBM di Kota Pekalongan	Kecamatan	4	4	4
3	Fasilitasi Kegiatan TMMD (Bantuan Provinsi)	Jumlah kelurahan yang terfasilitasi kegiatan TMMD	kelurahan	3	3	3

Sumber DPMPPA Kota Pekalongan (diolah), 2020

a. Kegiatan fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman

Kegiatan fasilitasi program peningkatan kualitas kawasan permukiman Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas kehidupan serta penghidupan masyarakat melalui pendampingan program PLPBK, Kotaku, Sanimas, Pamsimas dan PDPM.

Pendampingan tersebut berupa :

- Rapat koordinasi PLPBK, Kotaku, Sanimas, Pamsimas dan PDPM dengan OPD terkait dan kelompok penerima manfaat
- Pemeliharaan lokasi PLPBK
- Monitoring dan evaluasi PLPBK, Kotaku, Sanimas, Pamsimas dan PDPM
- Fasilitasi Program Akselerasi Pembangunan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan

Pemerintah Kota Pekalongan berkomitmen untuk mewujudkan visi dan misinya melalui Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) Tahun 2019.



Gambar 3.85 Sosialisasi Perwal PAPKS-BM

Sumber DPMPPA Kota Pekalongan, 2020

Sebagai upaya meningkatkan kapasitas fasilitator maka pada tahun 2019 dilaksanakan Pembekalan bagi Tenaga Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat sehingga faskel memahami tugas dan fungsinya dalam pendampingan kegiatan PAPKS-BM. Dalam perkembangannya di samping mendampingi kegiatan PAPKS-BM fasilitator difungsikan untuk pendampingan PDPM dan Program Bantuan Stimulan Pugar Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Dana Kelurahan Tahun 2019.



Gambar 3.86 Pembekalan Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat

Sumber DPMPPA Kota Pekalongan, 2020

Kegiatan PAKS-BM merupakan hibah kepada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang pengelolannya langsung diserahkan kepada masyarakat, sehingga untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pemanfaatan anggaran dan pelaksanaan serta partisipasi masyarakat di wilayah kelurahan maka dilakukan Monitoring dan evaluasi sebagai bentuk kontrol dan pengawasan DPMPPA atas kegiatan hibah tersebut.



Gambar 3.87 Monitoring Kegiatan PAKS-BM

Sumber DPMPPA Kota Pekalongan, 2020

b. Fasilitas Kegiatan TMMD (Bantuan Provinsi)

Program TMMD merupakan bagian dari komitmen TNI Angkatan Darat untuk ikut membangun bangsa dan negara bersama Pemerintah Daerah dan komponen bangsa lainnya secara sinergi dan berkesinambungan. Program ini berupa akselerasi kegiatan pembangunan di daerah, khususnya daerah yang tergolong tertinggal, terisolasi, perbatasan, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena dampak akibat bencana.

Adapun tujuannya adalah :

- Menyediakan akses jalan yang layak untuk mobilitas dan mendukung kegiatan perekonomian masyarakat sekitar.
- Menyediakan sarana prasarana penunjang permukiman berupa jalan.
- Mempermudah akses jalan ke pelayanan pendidikan dan pusat pelayanan masyarakat lainnya.

Kegiatan TMMD berupa kegiatan fisik TMMD melalui hibah dan fasilitasi kegiatan TMMD, yang bersumber pada anggaran Bantuan Provinsi dan APBD Kota Pekalongan. Tahun 2019, kegiatan fisik TMMD Sengkuyung dilaksanakan dalam 3 tahap, sebagai berikut:

a. Kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap I

Dilaksanakan pada tanggal 26 Februari s/d 27 Maret 2019 di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan, Kegiatan **fisik** berupa pekerjaan peninggian dan pengecoran/betonisasi jalan.

Untuk kegiatan **non fisik** berupa sosialisasi, tentang :

- Deredikalisasi Keagamaan
- Wawasan Kebangsaan
- Parenting Pengaruh Pendidikan Orang Tua terhadap Anak Usia Dini (PAUD)
- Pemahaman terhadap Keluarga Berencana bagi Usia Subur
- Pencegahan dan Penanggulangan Narkoba bagi Generasi Muda
- Kesiapsiagaan dan penanganan terhadap bencana



Gambar 3.88 Lokasi kegiatan Fisik TMMD Sengkuyung I di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan

Sumber DPMPPA Kota Pekalongan, 2020



Gambar 3.89 Sosialisasi Kegiatan Pendukung Tmmd Tahap I di Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan

Sumber DPMPPA Kota Pekalongan, 2020

b. Kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap II

Dilaksanakan pada 11 Juli s/d 9 Agustus 2019 di Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur. Kegiatan **fisik** berupa pekerjaan peninggian dan pengecoran/betonisasi jalan.

Untuk kegiatan **non fisik** berupa sosialisasi, tentang :

- Deredikalisasi Keagamaan
- Wawasan Kebangsaan
- Kesiapsiagaan dan penanganan terhadap bencana
- Administrasi kependudukan
- Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Penyakit Menular di Masyarakat (Endemis)



Gambar 3.90 Lokasi kegiatan Fisik TMMD Sengkuyung II di Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur

Sumber DPMPPA Kota Pekalongan, 2020



Gambar 3.91 Sosialisasi Kegiatan Pendukung Tmmd Tahap II di Kelurahan Klego Kecamatan Pekalongan Timur

Sumber DPMPPA Kota Pekalongan, 2020

c. Kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap III

Dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 31 Oktober 2019 di Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat, Kegiatan **fisik** berupa pekerjaan peninggian dan pengecoran/betonisasi jalan.

Untuk kegiatan **non fisik** berupa sosialisasi, tentang :

- Deredikalisasi Keagamaan
- Wawasan Kebangsaan
- Kesiapsiagaan dan penanganan terhadap bencana
- Pemahaman Disiplin berlalu lintas di jalan bagi masyarakat
- Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Penyakit Tidak Menular di Masyarakat.



Gambar 3.92 Lokasi kegiatan Fisik TMMD Sengkuyung III di Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat

Sumber DPMPPA Kota Pekalongan, 2020



Gambar 3.93 Sosialisasi Kegiatan Pendukung Tmmd Tahap III di Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat

Sumber DPMPPA Kota Pekalongan, 2020

2. Program Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 435.100.000,- dan realisasi Rp. 386.070.000,- (*unaudited*) melalui 2 (dua) kegiatan dengan indikator output sebanyak 3 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 3 (tiga) indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.166 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.166 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pemberdayaan Masyarakat

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Fasilitasi Penyelenggaran Lomba Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah kelurahan yang terpilih mendapat penghargaan lomba kelurahan	kelurahan	3	3	3
2	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas LKK	orang	702	702	702
		Peningkatan Kapasitas LKK	LKK	1	1	1

Sumber DPMPPA Kota Pekalongan, 2020

a. Fasilitasi Penyelenggaran Lomba Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Permendagri No. 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kota Pekalongan diselenggarakan dalam bentuk lomba pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2019.

Ruang lingkup evaluasi perkembangan kelurahan meliputi pemantauan dan penilaian tingkat perkembangan kelurahan. Penilaian tingkat perkembangan kelurahan dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yaitu :

- a. Evaluasi diri di tingkat Kelurahan
- b. Penilaian di tingkat Kecamatan
- c. Analisis, validasi, peninjauan, klarifikasi, dan pemeringkatan di tingkat Pusat, Provinsi, Kota, dan Kecamatan.

Evaluasi perkembangan kelurahan berupa :

- a. Evaluasi bidang pemerintahan kelurahan, meliputi aspek : pemerintahan, kinerja, inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat, kelurahan berbasis teknologi informasi/*E-Goverment*, pelestarian adat dan budaya.
- b. Evaluasi bidang kewilayahan kelurahan meliputi aspek : Identitas, batas, inovasi, tanggap dan siaga bencana, pengaturan investasi.
- c. Evaluasi bidang kemasyarakatan kelurahan meliputi aspek : partisipasi masyarakat, lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, keamanan dan ketertiban, pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kapasitas masyarakat.

Hasil evaluasi perkembangan kelurahan/lomba kelurahan tahun 2019, sebagai berikut :

- Terbaik I, Kelurahan Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan
- Terbaik II, Kelurahan Kalibaros Kecamatan Pekalongan Timur
- Terbaik III, Kelurahan Medono Kecamatan Pekalongan Barat

b. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan

Kegiatan pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan merupakan salah satu kegiatan dalam upaya peningkatan kemandirian dan kapasitas LKK, melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas LKK Kota Pekalongan.

Kegiatan tersebut bertujuan, untuk :

- Meningkatkan kemandirian dan kapasitas lembaga kemasyarakatan kelurahan.
- Membekali SDM pengurus LKK untuk dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan dengan baik demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungannya masing-masing.
- Memberikan kesempatan yang lebih baik kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan kelurahan.

Pelatihan peningkatan kapasitas LKK yang diikuti oleh LKK se Kota Pekalongan sebanyak 702 orang yang dilaksanakan melalui 3 angkatan pada tanggal 12, 19 dan 26 Februari 2019, dengan narasumber dari Komisi C, Sekda, Asisten II, DPMPPA, Disdukcapil, Bag. Tapem, BKD, Koordinator Kota (Korkot BKM), TP PKK Kota dan pelaku usaha (Pengelola Bank Sampah).

Sedangkan Peningkatan Kapasitas LKK dilaksanakan dari tanggal 29, 30 dan 31 Oktober 2019 di Yogyakarta yang diikuti oleh Ketua TP PKK Kelurahan, Ketua TP PKK Kecamatan dan Sekretaris dan Pengurus TP PKK Kota yang bekerjasama dengan Pilar dan

dibuka oleh Walikota Pekalongan dengan materi Narasumber tingkat nasional dari Pilar, Asisten II dan DPMPPA.

3. Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 286.500.000,- dan realisasi Rp. 275.803.000,- (*unaudited*) melalui 3 (tiga) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 4 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 4 (empat) indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.167 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.167 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah kelompok masyarakat/LKK se Kota Pekalongan yang mendapat pembinaan	LKK	32	32	32
2	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah lokasi kerja bakti gotong royong di Kota Pekalongan	lokasi	94	94	94
		Jumlah kelurahan yang terpilih menjadi pelaksana terbaik gotong royong masyarakat	kelurahan	3	3	3
3	Fasilitasi Teknologi Tepat Guna	Jumlah inovator TTG	inovator	3	3	3

Sumber DPMPPA Kota Pekalongan, 2020

a. Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat

Berdasarkan Permendagri Nomor 42 tahun 2005 tentang Pedoman penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat dan Surat dari Dispermadesdukcapil Jawa Tengah Nomor 411.7/1989 tanggal 6 Maret 2019 perihal pelaksanaan kegiatan BBGRM tahun 2019, Kegiatan Gotong Royong masyarakat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dan memotivasi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya lokal, serta membangkitkan semangat gotong royong dan keswadayaan masyarakat di Kota Pekalongan untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur, untuk bersama – sama menggiatkan kembali dan membudayakan gerakan GOTONG – ROYONG dengan harapan terjadi peningkatan partisipasi seluruh warga masyarakat dalam keswadayaan dan kepeduliannya terhadap kelestarian lingkungan.

Maksud dan tujuan diselenggarakan Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XVI, HKG PKK ke 47 adalah :

- Menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia.
- Meningkatkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan,

- Meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan.
- Menciptakan kesadaran kepada masyarakat terhadap kegiatan gotong royong masyarakat

Tahapan BBGRM :

- 1) Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat ini diawali di Tingkat Provinsi dengan pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong yang diselenggarakan di Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang dan dihadiri 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dengan dimeriahkan dengan bursa Pemberdayaan masyarakat, sekaligus Kelurahan Noyontaansari Kota Pekalongan menerima penghargaan sebagai Pelaksana Terbaik III Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 3.94 Penghargaan sebagai Pelaksana Terbaik III Gotong Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah

Sumber DPMPPA Kota Pekalongan, 2020

- 2) Kegiatan peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kota Pekalongan dilaksanakan tanggal 28 Juni 2019 di pusatkan di Kelurahan Pringrejo dan dibuka oleh Bapak Walikota Pekalongan sekaligus temu wicara dengan Tokoh Masyarakat,
- 3) Kegiatan Lomba Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat tingkat Kota Pekalongan berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, selanjutnya Juara I dari masing-masing kecamatan diajukan di tingkat Kota untuk dinilai dan dievaluasi yang pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan evaluasi perkembangan kelurahan/lomba kelurahan. Lomba Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat menghasilkan 3 (tiga) peringkat terbaik yaitu :
 - Pelaksana Terbaik I Gotong Royong Masyarakat, Kelurahan Tirto Kecamatan Pekalongan Barat
 - Pelaksana Terbaik II Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Kauman Kecamatan Pekalongan Timur
 - Pelaksana Terbaik III Gotong Royong Masyarakat Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara

b. Fasilitasi Teknologi Tepat Guna

Gelar Teknologi Tepat Guna adalah merupakan gelar Teknologi Tepat Guna yang mempromosikan potensi daerah baik tingkat Provinsi maupun Kota untuk mengekspose teknologi masyarakat yang selama ini belum dikenal luas.

Kota Pekalongan merupakan salah satu kota yang dianggap terbaik dalam pemberdayaan teknologi tepat guna, sehingga gelar tingkat Nasional merupakan ajang dalam hal meraih penghargaan dalam bidang pemberdayaan untuk mengembangkan Teknologi Tepat Guna yang dimulai dari masyarakat langsung melalui tahapan gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Kota untuk menjangring pemenang TTG di tingkat Kota dilanjutkan ditingkat nasional.

Dalam Gelar Pameran TTG Tingkat Nasional Kota Pekalongan sebagai partisipasi aktif dengan mengikutsertakan Inovator Terbaik I Tahun 2018 dan produk unggulan Kota Pekalongan, bertempat di Bengkulu Provinsi Bengkulu, tanggal 22 s.d 25 September 2019.



Gambar 3.95 Gelar TTG Tingkat Nasional di Bengkulu

Sumber DPMPPA Kota Pekalongan, 2020

Kegiatan TTG Kota Pekalongan tahun 2019 yang diselenggarakan pada tanggal 5 sampai dengan 8 September 2019 bertepatan dengan Hari Kebangkitan teknologi Nasional (Harteknas) ke 24 melalui Pameran Inovasi dan Kreatifitas Kota Pekalongan bertempat di GOR Jetayu, dalam ajang tersebut menghasilkan 3 (tiga) Inovator terbaik yaitu:

- 1) Inovator Terbaik I, TTG berupa ***“Implementasi Internet Of Thing (IoT) dalam penghematan Energi Listrik di Era Industri 4.0”*** karya BUDI UTOMO dari Kelurahan Krapyak Kecamatan Pekalongan Utara.
- 2) Inovator Terbaik II, TTG berupa ***“Mesin Pembuat Popcorn”*** Karya SAFRUDIN dari Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur.
- 3) Inovator Terbaik III, TTG berupa ***“Setrika Uap dari Barang bekas”*** Karya ACHADI CAHYADI dari Kelurahan Buaran Kradenan Kecamatan Pekalongan Selatan.

Disamping Lomba Inovasi TTG juga dilaksanakan penilaian Stand terbaik, yaitu :

- 1) Stand Terbaik I, Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur
- 2) Stand Terbaik II, Kelurahan Sapuro Kebulen Kecamatan Pekalongan Barat
- 3) Stand Terbaik III, Kelurahan Kandang Panjang Kecamatan Pekalongan Utara

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dilingkungannya
- Kurangnya SDM dalam organisasi kelembagaan
- Kelembagaan masyarakat (LKK) belum melaksanakan tertib administrasi
- Kurangnya kapasitas SDM pengelola/pengurus Posyantek
- Antusiasme peserta kegiatan kemasyarakatan seringkali membludak di salah satu kegiatan namun terkadang pada kegiatan yang lain kurang peserta.
- Lunturnya budaya gotong royong di masyarakat perkotaan.

2. Solusi

- Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan LKK yang berkesinambungan
- Perlu adanya fasilitasi anggaran operasional bagi LKK
- Pembinaan LKK melalui regulasi yang selaras dengan kebijakan pusat
- Perlunya persiapan yang lebih matang dan pemahaman terhadap kebutuhan kegiatan masyarakat yang perlu difasilitasi
- Menanamkan jiwa gotong royong mulai dari usia dini

3. Peluang

- Kerjasama dengan dunia usaha untuk partisipasi/swadaya kegiatan masyarakat
- Study komparatif ke luar daerah sebagai pembanding ataupun inovasi terkait pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan.
- Produk perwal untuk memperjelas tugas dan fungsi maupun pedoman pelaksanaan kegiatan LKK
- Fasilitasi Kegiatan kemasyarakatan merupakan upaya menggali potensi masyarakat yang dapat dikembangkan lebih jauh lagi
- Menanamkan gerakan dan sosialisasi gotong royong mulai dari usia dini.

3.2.2.8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana Kota Pekalongan mempunyai tugas selain menyelenggarakan urusan sosial dalam rangka membantu Walikota pada penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Pekalongan juga mendapat wewenang dalam urusan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana.

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Pekalongan, DINSOSP2KB Kota Pekalongan melaksanakan 1 (satu) yaitu Program Keluarga Berencana yang terdistribusi dalam 2 (dua) indikator Kinerja Program, namun demikian realisasi ke 2 (dua) indikator program tersebut belum mencapai target.

1. Program Keluarga Berencana

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.168 Target dan Capaian Indikator Program Keluarga Berencana

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase kepesertaan KB MKJP berdasarkan pemutakhiran basis data keluarga Indonesia	24,00	Persen	19.91	20,51
2	Persentase capaian target penurunan kasus perkawinan dibawah umur 20 th menjadi 250 kasus	70,67	Persen	89.11	69.33

Sumber DPMPPA Kota Pekalongan, 2020

Dari table diatas dapat dilihat bahwa ke 2 (dua) indikator Program Keluarga berencana tersebut tidak tercapai hal ini dikarenakan pada indikator kepesertaan MKJP masih adanya peserta KB MKJP dengan sistem ganti cara sehingga tidak mempengaruhi penambahan peserta KB MKJP dan peserta MKJP aktif yang sudah memasuki masa manopoesse mengurangi peserta MKJP Aktif. Kemudian pada Indikator kedua yaitu target penurunan kasus perkawinan belum tercapai dikarenakan adanya beberapa permasalahan diantaranya yaitu pemberian dispensasi surat nikah yang masih longgar, masih kurangnya pengetahuan orang tua, perangkat kelurahan perihal dampak negative nikah dini serta masih kurangnya sosialisasi PIK-R pada kelompok remaja baik PIK Sekolah maupun PIK Masyarakat.

Meskipun Indikator pada program tidak tercapai namun demikian angka akseptor KB di Kota Pekalongan cukup tinggi hal ini dapat kita ketahui dari table capaian Peserta Aktif berikut :

**Tabel 3.169 Target dan Capaian Indikator
Program Keluarga Berencana**

NO	Kecamatan	MIX Kontrasepsi							Jumlah	PUS	%
		IUD	MOW	MOP	Kondom	Implant	Suntik	Pil			
1	Pekalongan Barat	1,043	413	65	818	683	5,853	1,210	10,085	14,450	69.79
2	Pekalongan Timur	479	230	18	197	493	3,561	619	5,597	9,548	58.62
3	Pekalongan Utara	527	261	37	288	315	4,522	821	6,771	11,109	60.95
4	Pekalongan Selatan	426	839	14	253	383	5,134	850	7,899	11,545	68.42
KOTA		2,475	1,743	134	1,556	1,874	19,070	3,500	30,352	46,652	65.06

Sumber Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2020

Dari table diatas dapat diketahui bahwa jumlah PUS di Kota Pekalongan adalah 46.652, sedang PUS yang ikut KB aktif berjumlah 30.352 atau 65.06 % dari Jumlah Total PUS di Kota Pekalongan

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Keluarga Berencana

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 2.633.437.000,- dan realisasi Rp. 2.470.928.796,- (*unaudited*) melalui 7 (tujuh) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 10 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 10 indikator tercapai dan tidak ada indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.170 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPDP-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

**Tabel 3.170 Target dan Capaian Kinerja Output pada
Program Keluarga Berencana**

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Penyediaan pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin	Jumlah PUS dari keluarga miskin yang mendapat pelayanan KB dan alat kontrasepsi	orang	800	800	800
2	Pelayanan KIE	Jumlah media informasi Pelayanan KIE	media	3	3	3
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan konselor bagi PIK KRR	PIK	51	51	51
3	Pendataan Keluarga Sejahtera	Jumlah dokumen pendataan keluarga sejahtera	dokumen	1	1	1
4	Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas	Jumlah Kegiatan fasilitasi PPKBD, KKB dan KKB pembantu	kegiatan	3	0	0
		Jumlah Kegiatan fasilitasi PPKBD, Fapsedu,	kegiatan	5	5	5

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		Kualifikasi Kependudukan, Klinik Keluarga Berencana (KKB), Tim Jaga Mutu yang dilaksanakan				
5	Penguatan program Keluarga Berencana/KB (DAK)	Jumlah pengadaan sarana prasarana pelayanan KB pada kelompok kegiatan	unit	133	133	133
6	Penyusunan informasi kependudukan dan keluarga	Jumlah dokumen informasi kependudukan dan keluarga yang disusun	dokumen	14	14	14
		Jumlah dokumen informasi kependudukan dan keluarga	dokumen	0	0	0
7	Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK)	jumlah bulan operasional Balai Penyuluhan KB	bulan	12	12	12

Sumber Dinsos P2KB Kota Pekalongan, 2020

Dari table tersebut ada beberapa Indikator dengan target RKPD ada, kemudian pada target APBD dan realisasi tidak ada (0), dan target RKPD tidak ada (0) namun pada target APBD dan realisasi ada, hal ini dikarenakan pada saat penyusunan Perubahan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran indikator awal dirubah disesuaikan dengan output dari masing-masing kegiatan setelah anggaran perubahan final.

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Masih adanya peserta KB MKJP dengan system ganti cara sehingga tidak mempengaruhi penambahan MKJP
- Peserta MKJP Aktif yang sudah memasuki masa manopese mengurangi jumlah peserta MKJP Aktif
- Kurang Reward bagi peserta KB MKJP
- Pemberian Dispensasi surat nikah yang masih longgar
- Masih kurangnya pengetahuan orang tua, perangkat kelurahan perihal dampak negative nikah dini
- Masih kurangnya sosialisasi PIK-R pada kelompok remaja, baik oleh PIK sekolah maupun PIK masyarakat.

2. Solusi

- Meningkatkan jangkauan pelayanan KB MKJP pada semua Faskes KKB
- Memberikan reward / penghargaan bagi peserta KB MKJP
- Sosialisasi dampak nikah dini dan UU Perkawinan tahun 2019, kepada perangkat kelurahan, tokoh masyarakat dan petugas KUA

- Meningkatkan kegiatan sosialisasi PIK-R kepada murid SLTP/SLTA dan remaja di masyarakat

3. Peluang

- Mengembangkan Kampung KB
- Kegiatan kemitraan dengan organisasi remaja (remaja masjid, karang taruna, IPNU/IPPNU, Forum Anak)

3.2.2.9. Perhubungan

Sektor transportasi merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Hal tersebut terkait dengan kelancaran distribusi angkutan orang dan barang. Kota Pekalongan merupakan salah satu kota yang dilalui oleh jalur distribusi nasional (jalur pantura) sehingga mempunyai fungsi strategis. Oleh karenanya kelancaran dan keselamatan lalu-lintas menjadi prioritas penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.

Pada tahun 2019 Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dengan dana APBD telah melakukan kegiatan baik pengadaan, perbaikan ataupun perawatan dan melakukan monitoring terhadap fasilitas lalu-lintas dan angkutan jalan yang ada di Kota Pekalongan yang diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan, menekan angka kecelakaan serta meningkatkan disiplin berlalu-lintas baik di jalan ataupun di persimpangan jalan.

Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perhubungan Kota Pekalongan pada tahun 2019 kembali menerima penghargaan nasional Wahana Tata Nugraha (WTN) dari Kementerian Perhubungan RI, untuk kali ke-empat Kota Pekalongan memperoleh Piala Wahana Tata Nugraha predikat penataan transportasi terbaik. Penghargaan diterima untuk kategori kota sedang sehingga Kota Pekalongan sejajar dengan kota-kota sedang lainnya yang melakukan penataan transportasi, administrasi, maupun pelaksanaan yang menyangkut produk hukum daerah seperti retribusi, pelayanan parkir, pengujian kendaraan, manajemen rekayasa lalu lintas, pelayanan angkutan dan pemenuhan sarana dan prasarana lalu lintas.



Gambar 3.96 Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN) Tahun 2019

Sumber Dishub Kota Pekalongan, 2020

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Perhubungan di Kota Pekalongan dilaksanakan melalui 3 (tiga) program yakni Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan, Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dan Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas, yang terdistribusi dalam 4 indikator Kinerja Program, dengan realisasi sebanyak 2 indikator yang mencapai target dan 2 indikator yang belum mencapai target.

1. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.171 Target dan Capaian Indikator
Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase peningkatan fasilitas LLAJ	79,43	Persen	88,45	95,41

Sumber Dishub Kota Pekalongan, 2020

Dengan tercapainya target program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan berarti bertambahnya kelengkapan prasarana dan fasilitas perhubungan sehingga diharapkan dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan , menekan angka kecelakaan serta meningkatkan disiplin berlalu lintas baik di jalan maupun di persimpangan.

2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.172 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Ketersediaan angkutan umum	19,90	Persen	-	17,97
2	Persentase kendaraan wajib uji yang melakukan uji berkala	92,22	persen	83,73	84,52

Sumber Dishub Kota Pekalongan, 2020

Di tahun 2018 target program ketersediaan angkutan umum tidak ada, karena target tersebut ada setelah perubahan Renstra Dinas Perhubungan. Target Program Peningkatan Pelayanan Angkutan tidak tercapai di Tahun 2019, hal ini disebabkan karena peralihan trend pengguna angkutan umum yang semula menggunakan angkutan umum konvensional beralih menggunakan kendaraan pribadi ataupun angkutan berbasis online, yang berakibat menurunnya jumlah penumpang angkutan kota. Dengan belum adanya aturan dan ketentuan yang mengatur tentang perijinan dan uji kendaraan untuk angkutan berbasis online menyebabkan Dinas Perhubungan mengalami kesulitan dalam hal pendataan dan pembinaan. Indikator persentase kendaraan wajib uji yang melakukan uji berkala belum tercapai hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain dengan pemberlakuan system smart card kendaraan yang numpang uji menjadi berkurang, banyaknya mobil Kota Pekalongan yang

berdomisili di luar kota dan banyaknya mobil tua yang sudah berhenti beroperasi tetapi masih terdata sebagai potensi.

3. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.173 Target dan Capaian Indikator
Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase peningkatan kasawan tertib lalulintas (KTL)	77,78	Persen	55,56	100

Sumber Dishub Kota Pekalongan, 2020

Dengan tercapainya target program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas, pengaturan lalulintas khususnya di ruas – ruas jalan utama perkotaan menjadi semakin maksimal sehingga dengan semakin banyaknya penataan dan penertiban jalan diharapkan mampu mengurangi tingkat kemacetan di Kota Pekalongan.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.728.050.000,- dengan realisasi 1.711.278.800,- (*unaudited*) melalui 9 (sembilan) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 9 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, seluruh indikator (9 indikator) tercapai sesuai target.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.174 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

**Tabel 3.174 Target dan Capaian Kinerja Output pada
Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan**

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pembangunan Tempat Parkir Khusus	tempat parkir khusus yang dibangun	lokasi	1	1	1
		Terbangunnya tempat parkir khusus	lokasi	0	-	-
2	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu yang terpasang	buah	90	90	90
3	Pengadaan lampu flashing	Jumlah warning light yang diadakan	buah	8	8	8
	Pengadaan guardrail	Jumlah guardrail yang terpasang	beam	40	40	40
4	Pengadaan marka jalan dan zebra cross	Panjang marka jalan yang terpasang	meter	8.160	8.160	8.160

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian
5	Rehab sedang/berat rambu-rambu lalu lintas	Jumlah traffic light yang dilakukan reinstalasi kabel dan lampu LED	simpang	1	1	2
6	Rehabilitasi/pemeliharaan Instalasi dan Rambu-rambu Lalu Lintas	Reinstalasi kabel traffic light dan penggantian lampu LED	simpang	0	-	-
		Jumlah bulan pelaksanaan pemeliharaan instalasi dan rambu-rambu lalu lintas	bulan	12	12	12
7	Pengadaan Barigade Lalu Lintas	Jumlah barigade yang diadakan	unit	124	124	124
8	Pengadaan APILL	Jumlah traffic light simpang yang diadakan	unit	2	2	2
		Traffic light manual simpang 4	simpang	0	-	-
9	Pembangunan Tempat Parkir Khusus	tempat parkir khusus yang dibangun	lokasi	1	1	1
		Terbangunnya tempat parkir khusus	lokasi	0	-	-

Sumber: Dishub Kota Pekalongan, 2020

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan diantaranya yaitu :

- a. Pengadaan Rambu- Rambu lalulintas terdiri dari 90 unit papan nama jalan yang terpasang di 90 ruas jalan di Kota Pekalongan. Nilai pagu kegiatan Rp. 182.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 181.152.500,-. Berupa papan nama jalan dengan disain yang menarik di tempatkan di jalan – jalan utama Kota Pekalongan sebagai petunjuk sekaligus sebagai penghias jalan.
- b. Pengadaan lampu flashing , sebanyak 8 unit yang terpasang di 8 lokasi yaitu Jl. Manunggal, Jl. Veteran, Jl. Truntum, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Supriyadi, Jl. KH. Ahmad Dahlan – Jl. Untung Suropati, Jl. Hos Cokroaminoto dan Jl. Merdeka. Diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan di lokasi yang rawan kecelakaan.



Gambar 3.97 Pemasangan Lampu Flashing di Jl. Merdeka

Sumber: Dishub Kota Pekalongan, 2020

- c. Pengadaan guardrail. Pengadaan guardrail sebanyak 40 beam (1 beam = 4meter) yang ditempatkan di sekitar Pasar Kuripab Baru , sekitar Jl. Perum BRD dan Kramat Sari Kota Pekalongan. Pembangunan Guardrail tahun 2019 ditujukan sebagai upaya peningkatan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, berupa pagar besi pembatas jalan dengan saluran irigasi / sungai yang rawan kecelakaan, khususnya di malam hari.



Gambar 3.98 Pemasangan Guardrail di Kramat Sari dan Pasar Kuripan Baru

Sumber: Dishub Kota Pekalongan, 2020

- d. Pengadaan APILL /Alat Pengendali Isyarat Lalulintas (Traffic Light), untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan khususnya dampak dari dibangunnya Exit Toll Setono pada tahun 2019 Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perhubungan memasang 2 unit Apill yang berlokasi di 2 simpang yang bersinggungan dengan exit tol tersebut yaitu Simpang Jl. Ampera dan Simpang Jl. Ir. Sutami.



Gambar 3.99 Pengadaan APILL di Simpang Jl. Ampera dan Jl. Ir. Sutami

Sumber: Dishub Kota Pekalongan, 2020

2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 651.633.000,- dengan penyerapan anggaran Rp. 636.176.000,- (*unaudited*) melalui 6 (lima) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 10 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 10 indikator tercapai dan 0 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.175 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.175 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Rehabilitasi/pemeliharaan halte bus	Jumlah halte bus yang terpelihara dan terawat	unit	12	5	5
		Pemeliharaan dan perbaikan halte bus	unit	10	-	-
2	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Jumlah Halte yang dibangun	unit	2	1	1
3	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	Jumlah awak angkutan umum yang diseleksi	orang	20	20	20
4	Posko Lebaran/Natal dan Tahun Baru	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengamanan lebaran, natal dan tahun baru	kegiatan	3	3	3
		Jumlah tenda posko yang dilakukan pemeliharaan	Unit	-	2	2
		Terlaksananya pengamanan lebaran Natal dan Tahun Baru	Unit	0	-	-
5	Fasilitasi dan Pembinaan Angkutan Kendaraan Tidak Bermotor	Jumlah pengemudi becak yang diberikan pembinaan	orang	300	240	245
		Jumlah armada becak yang difasilitasi pengecatan	unit	300	240	245
		Sosialisasi, pembinaan kepada pengemudi becak dan pengecatan becak	unit	0	-	-
6	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah aplikasi yang diadakan	aplikasi	-	1	2
		Jumlah peralatan display yang diadakan	unit	-	8	8
		Jumlah alat uji kendaraan yang dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi	unit	-	9	9
		Pemeliharaan dan kalibrasi alat uji	Bulan	12	-	-

Sumber: Dishub Kota Pekalongan, 2020

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini antara lain :

- a. Kegiatan penataan tempat – tempat pemberhentian angkutan umum, digunakan untuk pembangunan 1 (satu) unit halte yang terletak di depan SMP N I Jl. WR. Supratman Kota Pekalongan sebagai upaya memberikan pelayanan terhadap pengguna jalan khususnya pengguna angkutan umum, pada kegiatan ini terjadi perubahan rencana pekerjaan yang semula 2 unit halte menjadi 1 unit halte karena perubahan disain dan penyesuaian anggaran untuk menyeragamkan halte yang ada di Kota Pekalongan.



**Gambar 3.100 Pembangunan Halte Bus
Di SMP N I Pekalongan**

- b. Posko Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun saat perayaan Lebaran, Natal dan tahun baru, yaitu dengan pembuatan posko arus mudik dan penempatan personil di titik – titik strategis dan rawan kecelakaan. Posko Induk Dinas Perhubungan Kota Pekalongan pada saat arus mudik dan arus balik lebaran juga melaksanakan penghitungan arus lalu lintas (Traffic Counting) dari H-7 sampai dengan H+7 Lebaran selama 24 jam penuh, sehingga Posko Induk Dishub Kota Pekalongan seringkali di jadikan sebagai sumber data pemantauan arus mudik baik dari media cetak maupun elektronik.
- c. Fasilitasi dan pembinaan angkutan kendaraan tidak bermotor, berupa pembinaan kepada pengemudi becak tentang perlunya tertib lalu lintas serta pengecatan becak sehingga becak yang ada di Kota Pekalongan terlihat lebih rapi dan seragam.
- d. Rehabilitasi / pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor, kegiatan ini digunakan untuk pemeliharaan alat uji , kalibrasi juga penambahan aplikasi dan display hasil pengujian kendaraan bermotor. Dengan kegiatan ini diharapkan hasil uji kendaraan bermotor mempunyai tingkat akurasi yang tinggi untuk menjamin kelaikan operasional kendaraan bermotor wajib uji.

3. Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 2.787.325.000,- dengan penyerapan anggaran Rp. 2.769.079.100,- (*unaudited*) melalui 9 (sembilan) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 16 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 15 indikator tercapai dan 1 indikator tidak tercapai. Indikator jumlah pengawasan yang

dilaksanakan, terlaksana 18 kali dengan target sebanyak 27 kali pengawalan, hal ini karena menyesuaikan tingkat kebutuhan pengawalan dilapangan.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.176 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.176 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah kegiatan pengamanan event yang dilaksanakan	kali	0	90	92
		Jumlah kegiatan pengamanan insidental yang dilaksanakan	kali	0	40	41
		Jumlah kegiatan pengawalan yang dilaksanakan	kali	0	27	18
		Pengamanan rutin, pengamanan event Kota Pekalongan dan pengamanan insidental	bulan	12	0	0
2	Pembinaan dan fasilitasi juru parkir	Jumlah kegiatan penagihan retribusi parkir yang dilaksanakan	kali	0	180	180
		Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan juru parkir yang dilaksanakan	kali	0	40	40
		Sosialisasi dan pembinaan kepada juru parkir	bulan	12	0	0
3	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	jumlah peserta penyuluhan ketertiban lalu lintas	orang	0	100	100
		Sosialisasi dan pembinaan lalulintas kepada pelajar dan masyarakat	kegiatan	1	0	0
4	Survei Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah dokumen survey lalulintas yang disusun untuk mengetahui kinerja jalan dan tingkat kemacetan	dokumen	1	1	1
		Jumlah dokumen amdalalin pasar Banjarsari yang disusun	dokumen	0	1	1
		Data volume dan kapasitas jalan di Pekalongan	kegiatan	1	0	0

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
5	Fasilitasi perlintasan sebidang	Jumlah perlintasan sebidang yang terjaga dan terpelihara	perlintasan	4	4	4
		Jumlah bulan operasional perlintasan sebidang	bulan	12	12	12
		Operasional dan pemeliharaan perlintasan sebidang	bulan	0	0	0
6	Fasilitasi Operasional ATCS (Area Traffic Control System)	Jumlah traffic light ATCS yang dilakukan pemeliharaan	unit	15	15	15
		Jumlah Bulan Operasional ATCS	Bulan	12	12	12
		Jumlah alat studio ATCS yang diadakan	unit	18	-	-
		Operasional dan pemeliharaan ATCS	bulan	12	-	-
7	Operasi laik jalan	Jumlah kegiatan operasi laik jalan yang dilaksanakan	kali	48	48	48
		Penindakan dan penegakan hukum terhadap kendaraan wajib uji terkait persyaratan teknis dan laik jalan	bulan	12	-	-
8	Fasilitasi Forum LLAJ	Jumlah pelaksanaan Kegiatan forum LLAJ	kegiatan	8	8	8
9	Pengkajian potensi parkir	Jumlah dokumen kajian potensi parkir	dokumen	1	1	1
		Jumlah aplikasi SIM Parkir	aplikasi	1	1	1

Sumber: Dishub Kota Pekalongan, 2020

Pelaksanaan kegiatan pada Program Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas ditujukan untuk mencapai target indikator program yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD. Pada program ini dilaksanakan dengan beberapa kegiatan, antara lain :

- a. Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas. Kegiatan ini berupa pengamanan rutin anak sekolah, pengamanan dan pengaturan lalulintas pada kegiatan-kegiatan rutin Pemerintah Kota, adat istiadat maupun kegiatan keagamaan yang ada di Kota Pekalongan misalnya : kegiatan gema Muharrom, peringatan 3 Oktober, acara syawalan, pawai pajang jimat, maulid Nabi, Hari Jadi Kota Pekalongan dan lain - lain, termasuk pengamanan kegiatan yang bersifat insidental dan pengamanan pejabat negara yang datang di Kota Pekalongan.
- b. Pembinaan dan Fasilitasi Juru Parkir, meliputi tim gabungan intensifikasi dan monitoring parkir yang terdiri dari unsur Dishub, Polres Pekalongan Kota, sub Denpom, Kejaksaan dan Satpol PP kota Pekalongan;

- c. Sosialisasi / penyuluhan ketertiban lalulintas dan angkutan, merupakan kegiatan sosialisasi tentang keselamatan lalulintas yang ditujukan kepada generasi muda khususnya anak sekolah sekaligus ajang pemilihan sebagai pemuda pelopor lalulintas.
- d. Fasilitasi perlintasan sebidang, kegiatan ini digunakan untuk operasional 4 perlintasan sebidang yang dikelola Dinas Perhubungan dari total 10 perlintasan sebidang yang ada di wilayah Kota Pekalongan yaitu pos Gamer, pos Dekoro, pos Pusri dan pos Tirto Gang.I.
- e. Operasi laik jalan, merupakan kegiatan operasi rutin laik jalan yang dilaksanakan bersama instansi terkait Polres Pekalongan Kota dan Sub Denpom Pekalongan dengan sasaran kendaraan wajib uji yaitu mobil barang dan mobil penumpang, terkait dengan persyaratan teknis dan laik jalan. Kegiatan ini sebagai upaya penegakan hukum dan menekan angka kecelakaan yang disebabkan karena persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
- f. Fasilitasi Forum LLAJ, meliputi tim gabungan penentu kebijakan yang terkait dengan lalulintas dan angkutan jalan yang terdiri dari unsur Dishub, Polres Pekalongan Kota, sub Denpom, Kejaksaan dan Satpol PP kota Pekalongan serta stake holder dan unsur masyarakat yang terkait;



Gambar 3.101 Forum LLAJ

Sumber: Dishub Kota Pekalongan, 2020

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi dalam urusan perhubungan di Kota Pekalongan adalah sebagai berikut :

- Menurunnya jumlah pengguna angkutan umum;
- Masih kurangnya fasilitas perhubungan dan keselamatan jalan;
- Belum seluruhnya penataan tempat parkir di tepi jalan umum;
- Perlunya penyediaan kantong-kantong parkir di pusat-pusat kegiatan;
- Perlunya pengembangan pelayanan Perhubungan berbasis I.T ;
- Perlunya penggantian alat uji yang sudah tidak memenuhi syarat.

- Masih rendahnya tingkat kedisiplinan pengguna jalan;
- Potensi kemacetan lalu lintas yang cukup besar dengan tidak adanya jalur lingkar dan jalur utama pantura yang terpotong jalur ganda kereta api (double track);
- Tingkat keselamatan pengguna jalan yang cukup rendah, karena bercampurnya seluruh jenis kendaraan dalam satu ruas jalan (mix traffic);

2. Solusi

Untuk mengatasi permasalahan – permasalahan tersebut , dilakukan dengan upaya atau solusi sebagai berikut:

- Subsidi kepada angkutan umum untuk menghidupkan kembali angkutan umum dan meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum.
- Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat melalui kegiatan pembinaan lalu lintas Dishub Kota Pekalongan
- Pemenuhan fasilitas perhubungan dan keselamatan jalan.
- Pembuatan kajian pembangunan taman parkir dan penataan parkir di Kota Pekalongan.
- Memaksimalkan penggunaan dan pengembangan Area Traffic Control System (ATCS)
- Peningkatan layanan berbasis Teknologi Informasi (I.T).
- Secara bertahap pengusulan penggantian alat uji kendaraan bermotor.

3. Peluang

- Terdapat 15 simpang di jalur utama dengan traffic light yang sudah terintegrasi dengan ATCS.
- Sarana dan prasarana perbaikan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas yang sudah cukup memadai.
- Dukungan Instansi vertikal terhadap pengembangan layanan berbasis teknologi informasi.
- Dukungan dari stake holder dan Instansi terkait dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan Dishub Kota Pekalongan.
- Tercukupinya Sumber Daya Manusia yang potensial untuk menunjang pelaksanaan program dan Kegiatan Dishub Kota Pekalongan.

3.2.2.10. Komunikasi Dan Informatika

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Pekalongan dilaksanakan 4 (empat) program yakni Program Pengembangan Infrastruktur Tik, Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi, Program Pengelolaan Diseminasi Informasi, Kerjasama Media Dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik, Program Pengelolaan Pengaduan Dan Aspirasi Masyarakat Dan Penguatan Kip yang terdistribusi dalam 9 indikator Kinerja Program, dengan realisasi sebanyak 6 indikator yang mencapai target dan 3 indikator belum mencapai target.

1. Program Pengembangan Infrastruktur TIK

Program ini diukur dengan 3 (tiga) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.177 Target dan Capaian Indikator
Program Pengembangan Infrastruktur TIK**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase OPD, Kelurahan dan Kecamatan dalam layanan infrastruktur dan Jaringan TIK/ Fiber Optik (FO)	93,33	Persen	-	93,24
2	Persentase Cakupan dalam layanan infrastruktur dan Jaringan TIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Kesehatan (Puskesmas, RS, Pustu dll)	33,33	Persen	-	65,91
3	Persentase Cakupan layanan infrastruktur dan Jaringan TIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Pendidikan (Sekolah negeri, smp, sd, tk)	21,65	Persen	-	20,00

Sumber: Dinkominfo Kota Pekalongan, 2020

Pada program Pengembangan infrastruktur TIK, hanya 1 indikator kinerja program yang tercapai yaitu Indikator Persentase Cakupan dalam layanan infrastruktur dan Jaringan TIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Kesehatan (Puskesmas, RS, Pustu dll). Untuk indikator Persentase OPD, Kelurahan dan Kecamatan dalam layanan infrastruktur dan Jaringan TIK/ Fiber Optik (FO) tidak tercapai karena seiring dengan pembangunan jaringan FO (Fiber Optic) yang sedianya digunakan untuk menyambungkan OPD dan Kelurahan yang belum tersambung, dialihkan untuk OPD, Kelurahan dan Kecamatan yang pindah lokasi kantor. Sehingga target yang seharusnya bisa dicapai menjadi tertunda karena ada pengalihan tersebut.

Untuk indikator persentase Cakupan layanan infrastruktur dan Jaringan TIK/ Fiber Optik (FO) Klaster Pendidikan (Sekolah Negeri, Smp, SD, TK) tidak tercapai karena sebagian alokasi anggaran difokuskan untuk pembangunan jaringan FO (Fiber Optic) bagi OPD yang pindah lokasi kantor.

2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.178 Target dan Capaian Indikator
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase OPD yang menjalankan layanannya dengan menggunakan Aplikasi/ Sistem Informasi	87,10	Persen	-	87,10
2	Persentase kelompok masyarakat mendapatkan capacity building TIK untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi	67,00	persen	-	41,84

Sumber: Dinkominfo Kota Pekalongan, 2020

Pada program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi terdapat 1 indikator program yang tercapai yaitu indikator Persentase OPD yang menjalankan layanannya dengan menggunakan aplikasi/sistem informasi. Untuk indikator Persentase Kelompok masyarakat mendapatkan capacity building Tik untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi tidak tercapai karena kebutuhan pelaksanaan peserta capacity building TIK sudah mencukupi.

3. Program Pengelolaan Diseminasi Informasi, Kerjasama Media Dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.179 Target dan Capaian Indikator
Program Pengelolaan Diseminasi Informasi, Kerjasama Media
Dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase OPD / Urusan Pemerintahan/ Sektor Pembangunan yang tercakup dalam layanan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	79,09	persen	-	100
2	Persentase Kelurahan yang memiliki / mengembangkan Sumber Daya Komunikasi Publik Sebagai Jejaring Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik.	59,26	persen	-	71,43

Sumber: Dinkominfo Kota Pekalongan, 2020

Pada program Pengelolaamn Desiminasi Informasi, Kerjasama Media dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik terdapat 2 indikator dan keduanya tercapai dengan hasil yang signifikan. Untuk indikator Persentase OPD / Urusan Pemerintahan/ Sektor Pembangunan yang tercakup dalam layanan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik telah tercapai seiring dengan perkembangan media sosial yang sangat pesat. Untuk indikator Persentase Kelurahan yang memiliki / mengembangkan Sumber Daya Komunikasi Publik Sebagai Jejaring Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik telah tercapai dari target 28 KIM (Kelompok Informasi Masyarakat) di Kota Pekalongan tercapai 20 KIM sehingga didapat 71,43%.

4. Program Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat dan Penguatan KIP

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.180 Target dan Capaian Indikator
Program Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat dan Penguatan KIP**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "Cukup Informatid/ Baik"	21,43	persen	-	NA
2	Persentase OPD yang melakukan Pengelolaan Pengaduan / Aspirasi Masyarakat	100,00	persen	-	100

Sumber: Dinkominfo Kota Pekalongan, 2020

Pada program Pengelolaan pengaduan dan aspirasi masyarakat dan penguatan KIP terdapat 2 indikator yakni indikator Persentase OPD Menerapkan KIP dengan Kategori "Cukup Informatid/ Baik" capaiannya masih NA (Nol tanpa Angka) dikarenakan ada komponen nilai yang belum masuk dalam penyelenggaraan festival Keterbukaan iNformasi Publik (Pameran KIP) yang dilaksanakan pada bulan April 2020 sedangkan indikator Persentase OPD yang melakukan Pengelolaan Pengaduan / Aspirasi Masyarakat sudah tercapai 100% dikarenakan sudah adanya Layanan aduan Call Center 112.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Infrastruktur TIK

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.891.600.000,- dan realisasi Rp. 1.734.802.289,- (*unaudited*) melalui 5 (lima) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 9 indikator. Sampai dengan akhir tahun 2019, 8 indikator tercapai dan 1 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.181 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.181 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Infrastruktur TIK

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Fasilitasi Pembangunan Pekalongan Smart City	Jumlah fasilitas pembangunan Pekalongan smartcity	unit	1	1	1
2	Pembinaan jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah penyelenggaraan capacity building tehnik penanganan jaringan dan server	kali	5	5	4
3	Pengembangan jaringan SIMDA	Jumlah Kapasitas bandwidth internet untuk layanan Batik.Net	Mbps	1.137	1.200	1.200
		Jumlah titik jaringan FO klaster kesehatan yang dibangun	titik	0	1	1
		Jumlah titik jaringan FO klaster pendidikan yang dibangun	titik	0	2	2
		Jumlah titik jaringan FO klaster OPD yang dibangun	titik	0	2	2
4	Pengadaan sarana pengelolaan jaringan	Jumlah bulan diselenggarakannya monitoring jaringan Batik.Net se Kota Pekalongan	Bulan	12	12	12
		Jumlah bulan diselenggarakannya pemeliharaan jaringan Batik.Net se Kota Pekalongan	Bulan	0	12	12
5	Pengembangan database indikator TIK	Jumlah dokumen database indikator TIK yang tersusun	Dokumen	1	1	1

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika 2019

Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Pekalongan Smart City terdiri dari pembayaran sms LBA yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada pengguna seluler yang masuk area exit tol Kota Pekalongan dan jasa sewa aplikasi smartcity dan bayar belanja modal terdapat 1 unit pengadaan peralatan jaringan komputer.

Kegiatan Pembinaan jaringan komunikasi dan informasi dengan indikator pelaksanaan capacity building tehnik penangan jaringan dan server terlaksana 4 kali dari target 5 kali sehingga belum tercapai.

Kegiatan Pengembangan jaringan SIMDA terdapat 4 indikator keluaran tercapai 4 indikator yaitu Kapasitas bandwidth internet untuk layanan Batik.Net sebesar 1.282 Mbps dari target 1200 Mbps, indikator keluaran Jumlah titik jaringan FO klaster Kesehatan yang dibangun tercapai 1 titik dari target 1 titik sehingga total tercapai 29 titik dari target 44 titik(, indikator keluaran Jumlah titik jaringan FO klaster pendidikan yang dibangun tercapai 2 titik dari target 2 titik sehingga total tercapai 20 titik dari target 100 titik, Indikator keluaran Jumlah titik jaringan FO klaster OPD yang dibangun tercapai 2 titik dari target 2 titik sehingga total tercapai 69 titik (23 Kelurahan+ 33 OPD+ 13 lembaga lain) sedangkan targetnya 74 titik (27 Kelurahan+ 34 opd +13 lembaga lain).

Pada kegiatan Pengadaan sarana pengelolaan jaringan terdapat 2 indikator kegiatan yang tercapai dari 2 target indikator kegiatan yakni indikator Jumlah bulan diselenggarakannya monitoring jaringan Batik.Net se Kota Pekalongan dan indikator Jumlah bulan diselenggarakannya monitoring jaringan Batik.Net se Kota Pekalongan.

Pada Kegiatan Pengembangan database indikator TIK terdapat 1 indikator kegiatan yang tercapai dari target 1 indikator yaitu Jumlah dokumen database indikator TIK yang tersusun tercapai 1 dokumen.

2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.504.500.000,- dan realisasi Rp. 963.357.900,- (*unaudited*) melalui 15 (lima belas) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 17 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 14 indikator tercapai dan 3 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.182 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.182 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Fasilitasi perencanaan dan pengelolaan integrasi dan pertukaran Database SIM e-Government	Jumlah database yang terintegrasi	Aplikasi	2	2	2
		Jumlah dokumen SPBE yang disusun	dokumen	0	1	1
2	Pengembangan e-government pemerintah daerah	Jumlah aplikasi / SIM yang terpelihara	aplikasi/sim	55	55	55
		Jumlah aplikasi yang dibangun	aplikasi	0	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
3	Penyediaan informasi kedinasan	Terkelolanya Aplikasi paperless/surat elektronik dalam perawatan dan pengembangan	aplikasi	1	1	1
4	Fasilitasi penerapan legal software berbasis FOSS	Jumlah penyelenggaraan Capacity building/ Workshop pemanfaatan TIK berbasis FOSS untuk mendorong ekonomi kreatif.	kali	2	2	2
5	Fasilitasi Layanan SIM Rujukan Terpadu	Jumlah Aplikasi yang dilakukan pemeliharaan dan pengelolaan	aplikasi	1	1	1
6	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Bidang Komunikasi dan Informatika	Persentase telecenter yang pengelolanya mendapatkan capacity building.	persen	100	100	100
7	Pengelolaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian	Persentase penyelenggaraan pelatihan/ workshop Implementasi SIMPEG/ SIM e-presensi (Finger print) di OPD dan Sekolah	persen	100	100	100
8	Pengelolaan aplikasi SIMPATIKK	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang mengimplementasikan dan memanfaatkan aplikasi SIMPATIKK	opd	31	31	31
9	Pengelolaan konten dan update layanan informasi website / Subdomain Perangkat Daerah	Jumlah Unit Kerja/ Lembaga yang terfasilitasi SIM/ aplikasi/desain website Sub Domain	UK	6	0	6
		Jumlah penyelenggaraan lomba konten kreatif digital/animasi	kali	4	0	0
10	Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan SIM perencanaan pembangunan daerah	Jumlah bulan dalam pemeliharaan aplikasi dan server esimral.Pekalongankota.g o.id, simkeu.Pekalongankota.g o.id	Kali	3	0	0
		Jumlah bulan dalam pemeliharaan aplikasi dan server esimral.Pekalongankota.g o.id,	Bulan	0	12	12

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		simkeu.Pekalongankota.go.id				
11	Pengembangan Konten Kreatif Digital Berbasis Komunitas	Jumlah Lomba Konten Kreatif Digital/Anima-si/Film Umum/Film Pelajar yang diselenggarakan	lomba	0	4	3
		Terselenggaranya Lomba Konten Kreatif Digital / Animasi	kali	1	0	0
12	Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi	Jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan profesionalisme SDM masyarakat dan aparatur	kali	10	10	10
13	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	Jumlah layanan internet keliling dalam setahun	kali	144	144	96
14	Fasilitasi dewan TIK	Jumlah bulan pendampingan Dewan TIK	bulan	12	12	12
		Jumlah dokumen kajian rekomendasi	dokumen	2	0	0
15	Pemberdayaan Komunitas dan Relawan TIK	Jumlah bulan pendampingan Relawan dan Komunitas TIK	komunitas	1	0	0
		Jumlah bulan pendampingan Relawan dan Komunitas TIK	bulan	0	12	12

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

Dari program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi informasi terdapat 15 kegiatan dengan 17 indikator kegiatan dan 16 indikator tercapai yaitu indikator Jumlah database yang terintegrasi, indikator Jumlah dokumen SPBE yang disusun, indikator Jumlah aplikasi yang dibangun, indikator jumlah aplikasi/SIM yang terpelihara/ terkelolanya Aplikasi paperless/surat elektronik dalam perawatan dan pengembangan, indikator umlah penyelenggaraan Capacity building/ Workshop pemanfaatan TIK berbasis FOSS untuk mendorong ekonomi kreatif, indikator Jumlah Aplikasi yang dilakukan pemeliharaan dan pengelolaan, indikator Persentase telecenter yang pengelolanya mendapatkan capacity building, indikator Persentase penyelenggaraan pelatihan/ workshop Implementasi SIMPEG/ SIM e-presensi (Finger print) di OPD dan Sekolah, indikator Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang mengimplementasikan dan memanfaatkan aplikasi SIMPATIKK, indikator Jumlah Unit Kerja/ Lembaga yang terfasilitasi SIM/ aplikasi/desain website Sub Domain, indikator Jumlah bulan dalam pemeliharaan aplikasi dan server e-simral.Pekalongankota.go.id, simkeu.Pekalongankota.go.id, indikator jumlah penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan e-literacy masyarakat dan profesionalisme SDM masyarakat dan aparatur, indikator Jumlah layanan internet keliling dalam setahun, indikator Jumlah bulan pendampingan Dewan TIK, indikator Jumlah bulan pendampingan Relawan dan Komunitas TIK. Dan ada 1 indikator yang belum tercapai pada indikator kegiatan indikator Jumlah Lomba

Konten Kreatif Digital / Animasi/ Film Umum/Film Pelajar yang diselenggarakan karena peserta animasi untuk klaster umum sangat sulit ditemukan mereka banyak berkarya di luar Pekalongan.

3. Program Pengelolaan Diseminasi Informasi, Kerjasama Media Dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.3.449.525.000,- dan realisasi Rp.3.257.113.702,- (*unaudited*) melalui 7 (tujuh) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 10 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 10 indikator tercapai dan 0 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.183 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.183 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengelolaan Diseminasi Informasi, Kerjasama Media Dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pelayanan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Kebijakan Perencanaan Pusat dan Daerah (Operasional Mobil Pustika)	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan layanan penyelenggaraan siaran keliling/pemutaran film melalui Mobil M-Pustika	kelurahan	27	27	27
2	Identifikasi dan Analisis Teknologi Masyarakat (SIDa)	Jumlah Buku Cetakan Dokumentasi inovasi / Event Strategis Kota Pekalongan	Buku	1	1	1
3	Penyelenggaraan LPP Radio Kota Batik	Jumlah jam siaran rkb dalam sehari	jam	18	18	18
4	Penyelenggaraan LPP Batik TV	Jumlah jam tayang Batik TV dalm sehari	jam	9	9	9
		Pembangunan menara Batik TV	unit	0	1	1
		Jumlah perangkat penyiaran TV yang diadakan	unit	0	1	1
5	Pembinaan dan pengembangan kelembagaan komunikasi dan informasi masyarakat	Jumlah Sosialisasi dan Workshop Kelompok Informasi Masyarakat yang diselenggarakan	kali	1	12	12
		Jumlah jenis buletin KIM yang dicetak	jenis	0	1	1
6	Pembinaan dan pemberdayaan forum komunikasi mitra (media tradisional)	Jumlah terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan media tradisional	kali	4	4	4
7	Penyebarluasan informasi terhadap layanan publik	Jumlah bulan dalam penyelenggaraan updating	Bulan	12	12	12

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian
		informasi melalui website: Pekalongankota.go.id selama setahun.				

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

Dari program Pengelolaan Diseminasi Informasi, Kerjasama Media Dan Penguatan Sumber Daya Komunikasi Publik terdapat 7 kegiatan dengan 10 indikator kegiatan yang tercapai dari 10 target indikator kegiatan yaitu indikator Jumlah Kelurahan yang mendapatkan layanan penyelenggaraan siaran keliling/pemtaran film melalui Mobil M-Pustaka, indikator Jumlah Buku Cetakan Dokumentasi inovasi / Event Strategis Kota Pekalongan, indikator Jumlah jam siaran rkb dalam sehari, indikator Jumlah jam tayang Batik TV dalam sehari, indikator Pembangunan menara Batik TV, indikator Jumlah perangkat penyiaran TV yang diadakan, indikator Jumlah Sosialisasi dan Workshop Kelompok Informasi Masyarakat yang diselenggarakan, indikator Jumlah jenis buletin KIM yang dicetak, indikator Jumlah terselenggaranya pembinaan dan pemberdayaan media tradisional, indikator Jumlah bulan dalam penyelenggaraan updating informasi melalui website: Pekalongankota.go.id selama setahun.

4. Program Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat dan Penguatan KIP a

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 678.000.000,- dan realisasi Rp. 663.070.800,- (*unaudited*) melalui 3 (tiga) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 14 indikator. Sampai dengan akhir tahun 2019, 14 indikator tercapai dan 0 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.184 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.184 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat dan Penguatan KIP

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah Workshop/ Capacity Building KIP	kali	2	2	2
		Penyelenggaraan pameran KIP (Pekan Informasi Daerah)	kali	1	1	1
		Jumlah kegiatan pelatihan SP4N yang diselenggarakan	kegiatan	0	1	1
		Jumlah sosialisasi SP4N yang diselenggarakan	kali	0	1	1
		Jumlah bulan pengelolaan SP4N	bulan	0	1	1
2	Forum Badan Koordinasi Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Antar Organisasi (BAKODIKPASI)	Jumlah Sinkronisasi dan Koordinasi Antar Lembaga dalam setahun	kali	10	0	10
		Jumlah kegiatan Sinkronisasi dan	kali	-	8	0

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		Koordinasi Antar Lembaga yang dilaksanakan				
3	Pengelolaan Call Center 112	Jumlah bulan yang tercakup dalam penyelenggaraan layanan Call Center dalam 1 tahun	bulan	12	0	0
		Jumlah rakor yang diselenggarakan	kali	0	3	3
		Jumlah pelatihan operator yang diselenggarakan	kali	0	3	3
		Jumlah FGD yang diselenggarakan	kali	0	4	2
		Jumlah sosialisasi yang diselenggarakan	kali	0	1	1
		Jumlah aplikasi call center yang disewa	aplikasi	0	3	3
		Jumlah sarpras call center 112 yang diadakan	unit	0	11	11

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2020

Pada program Pengelolaan Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat dan Penguatan KIP terdapat 3 kegiatan dengan 12 indikator kegiatan tercapai dari target 12 indikator kegiatan.

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kominfo, sehubungan dengan tidak ketercapaian program diantaranya :

- Target yang dipasang berdasarkan jumlah OPD sedangkan layanan OPD yang diutamakan sesuai dengan permohonan fasilitasi jaringan sehingga pengembangan jaringan Batik Net sudah melebihi target, akan tetapi sesuai dengan target OPD belum terpenuhi dikarenakan adanya pembangunan gedung kantor, perbaikan gedung pindah lokasi kantor sehingga ada beberapa OPD/Kecamatan/Kelurahan yang terfasilitasi layanan pembangunan jaringan melebihi 1 kali.
- Proses penyusunan aplikasi merupakan kemudahan layanan, dipenuhi atas dasar surat permohonan fasilitasi aplikasi/sim sehingga terkadang 1 OPD bisa menggunakan aplikasi lebih dari satu aplikasi dan ada OPD yang belum perlu menggunakan aplikasi memang kondisinya banyak dilapangan.
- Ada beberapa lembaga lain yang minta difasilitasi aplikasi/sim dikarenakan untuk pelayanan publik seperti Baznas, PKK, dll hanya saja ada beberapa lembaga yang tidak konsekuen dalam kelangsungan penggunaan aplikasi sehingga tidak terupdate.
- Keanggotaan komunitas menjadi pudar apabila tidak ada regenerasi sebagai aktifitas tujuan komunitas dan seseorang terkadang menjadi lebih dari 1 keanggota Komunitas

2. Solusi

- infrastruktur Jaringan TIK/ Fiber Optik (FO) Klaster sekiolah sudah terkoneksi dan tersedia jaringan bukan Batik.Net

- Monitoring pendataan aplikasi/sim pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
- Mengadakan lomba/kompetisi dalam meningkatkan keaktifan kelangsungan kinerja komunitas.

3.2.2.11. Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Upaya pemberdayaan Koperasi & UMKM diharapkan untuk mewujudkan Koperasi dan UMKM yang tangguh dan mandiri dengan mendorong penguatan kelembagaan kelompok masyarakat menjadi koperasi, pembinaan terhadap koperasi tidak aktif menjadi koperasi aktif, meningkatkan kualitas koperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta meningkatkan citra koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian Indonesia dan lembaga ekonomi kerakyatan.

Jumlah Koperasi aktif di Kota Pekalongan terus mengalami peningkatan dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Akan tetapi persentase koperasi aktif di tahun 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016, hal ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah total koperasi yang berasal dari pembentukan dan pendirian koperasi baru, akan tetapi tidak diikuti dengan pengurangan jumlah koperasi yang tidak aktif.

Tabel 3.185 Persentase Koperasi Aktif Kota Pekalongan Tahun 2015 – 2019

Tahun	Jumlah Koperasi Aktif	Jumlah Seluruh Koperasi	Persentase Koperasi Aktif
2015	235	273	86,08
2016	238	276	86,23
2017	235	280	83,93
2018	236	281	83,99
2019	243	288	84,38

Sumber : Dindagkop dan UKM, 2020

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) binaan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Pekalongan terdiri dari sektor perdagangan, koperasi, UMKM dan pedagang pasar-PK5. Jumlah UMKM di Kota Pekalongan selama kurun waktu 2015-2019 mengalami kenaikan sampai tahun 2016 namun turun pada tahun 2017. Jika pada tahun 2018 jumlah UMKM adalah 21.905, maka pada tahun 2019 jumlah UMKM meningkat menjadi 22.368. Peningkatan jumlah UMKM ini dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.186 Jumlah UMKM Kota Pekalongan Tahun 2015 - 2019

Tahun	Komponen UMKM				Jumlah
	Perdagangan (SIUP)	Industri Kecil Menengah	Pedagang Pasar	Pedagang KakiLima	
2015	9.243	6.319	6.311	920	22.793
2016	9.722	6.469	6.480	1.010	23.681
2017	7.840	4.570	6.400	1.010	19.820
2018	9.115	6.152	6.610	914	22.791
2019	9.115	6.344	6.610	914	22.983

Sumber : Dindagkop dan UKM, 2020

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Pekalongan dilaksanakan 3 (tiga) program yakni Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif, Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah dan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Dan UMKM yang terdistribusi dalam 5 indikator Kinerja Program, dengan realisasi sebanyak 2 indikator yang mencapai target dan 3 indikator belum mencapai target.

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.187 Target dan Capaian Indikator
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	UMKM penerima KUP / KUR (Kredit Usaha Produktif / Kredit Usaha Rakyat) dan jenis pembiayaan lainnya	13.000	UMKM	16.271	22.653
2	UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha dan jaringan kemitraan	130	UMKM	140	130

Sumber : Dindagkop dan UKM, 2020

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil menengah yang Kondusif memberikan dampak yang positif bagi pelaku usaha di Kota Pekalongan yaitu :

- Salah satu aspek usaha Usaha Mikro Kecil Menengah, sumber daya manusia sebagai penggerak suatu usaha. Salah satu pengembangan yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada UMKM yang merupakan tempat untuk mengembangkan motivasi dan kreatifitas yang sudah dimiliki baik oleh wirausaha pemula maupun bukan.
- Memberikan pendampingan usaha kepada UMKM dalam memperluas jaringan pemasaran, pengembangan skala usaha melalui kemitraan peningkatan akses teknologi dan memperbesar kapasitas usaha.
- Membantu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program ini diukur dengan 1 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.188 Target dan Capaian Indikator
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
Usaha Kecil Menengah**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Kenaikan jumlah UMKM	23.398	UMKM	21.905	22.983

Sumber : Dindagkop dan UKM, 2020

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah memberikan dampak yang positif bagi keberadaan sentra-sentra UMKM sektor ekonomi kreatif di Kota Pekalongan, dengan menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru yang inovatif dan kreatif serta mampu mengidentifikasi peluang usaha.

Adapun ketidaktercapaian indikator kenaikan jumlah UMKM, hal tersebut disebabkan karena ketidakmampuan UMKM dalam memaksimalkan peluang dan potensi sebagai salah satu alasan UMKM tumbuh stagnan. Kendala yang menyebabkan UMKM sulit maju adalah permasalahan permodalan, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, teknologi dan pemasaran.

3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

Program ini diukur dengan 1 (satu) indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.189 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Persentase koperasi/unit simpan pinjam/ syariah yang sehat dan cukup sehat	93,33	persen	86,67	79,29
2	Persentase koperasi aktif	98,34	Persen	83,99	84,38

Sumber : Dindagkop dan UKM, 2020

Pelaksanaan program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan pengelolaan kegiatan simpan pinjam sebagai salah satu unit usaha koperasi, berdasarkan prinsip koperasi secara profesional, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

Pada tahun 2019, capaian atas hasil penilaian kesehatan Koperasi yang berpredikat Sehat dan Cukup Sehat ditargetkan sebesar 93,33% tetapi hanya tercapai sebesar 79,29%. Hal ini dikarenakan terdapat penurunan performa laporan keuangan koperasi yang tidak menunjang hasil penilaian kesehatan koperasi. Capaian atas indikator persentase koperasi aktif yang ditarget sebesar 98,34 % hanya tercapai sebesar 84,38 %. Hal ini dikarenakan banyaknya koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sehingga digolongkan menjadi koperasi tidak aktif.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 851.680.000,- dan realisasi Rp. 632.119.100,- (*unaudited*) melalui 2 (dua) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 3 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 3 indikator telah tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.190 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.190 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM	Jumlah UMKM yang difasilitasi pengembangan usaha	UMKM	40	40	40
		Jumlah UMKM yang didata	UMKM	700	700	700
2	Penyelenggaraan pekan batik	Jumlah UMKM yang mendapatkan fasilitas promosi produk unggulan melalui event Pekan Batik	UMKM	90	90	90

Sumber : Dindagkop dan UKM, 2020

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada Program Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Pendampingan Pengembangan Usaha UMKM

Kegiatan Pendampingan Pengembangan Usaha dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan Bintek Pendampingan Pengembangan UMKM dan Kaji Terap ke Rupa Rupi Handycraft Market di Bandung yang bertujuan untuk :

- mendorong peningkatan produktivitas dan mendorong lahirnya wirausaha-wirausaha baru.
- Penerapan nilai tambah pada produk dan meningkatkan wawasan tentang pengelolaan SDM dan pengembangan usahannya.
- Memberikan pendampingan kepada UMKM dalam memperluas jaringan pemasaran.
- Meningkatkan pendapatan pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Pekalongan.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Pekan Batik

Pelaksanaan kegiatan Pekan Batik Nusantara Tahun 2019 bertujuan untuk lebih menguatkan Branding Kota Pekalongan sebagai Kota Batik Dunia sekaligus mengembangkan pemasaran produk unggulan dari 90 UMKM yang difasilitasi sarana promosi melalui event Pekan Batik. Dan hasil dari kegiatan tersebut adalah :

- Meningkatkan promosi dan pemasaran batik sehingga berdampak langsung kepada para UKM yang terlibat pada kegiatan Pekan Batik Tahun 2019.
- Membangkitkan sektor riil yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan daya saing Kota Pekalongan.

Rangkaian acara Pekan Batik Nusantara Tahun 2019 sebagai berikut :

- Pameran Wisata Pekan Batik
- Pameran Rumah Kreatif Batik Pekalongan
- Festival Kampung Wisata Kuliner Nusantara
- Batik Bussiness Meeting
- Seminar Nasional Konsensi Eksistensi Batik melalui Regulasi Pematikan

- Gala Dinner dan Malam Final Lomba RancangB usana Batik
- Pekanlongan Batik Carnival
- Lomba Cipta Selendang Batik
- Workshop Regenerasi Batik
- Gelar Seni dan Budaya



Gambar 3.102 Dokumentasi Pekan Batik Tahun 2019

Sumber : Dindagkop dan UKM, 2020

2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 25.000.000,- dan realisasi Rp. 24.400.000,- (*unaudited*) melalui 1 (satu) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 1 indikator yang telah tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.191 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPd-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.191 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pengembangan wirausaha inovatif	Jumlah UMKM yang mendapatkan pembinaan pengembangan kewirausahaan inovatif	UMKM	20	20	20

Sumber : Dindagkop dan UKM, 2020

Pelaksanaan kegiatan pada Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah ditujukan untuk mencapai target indikator program yang telah ditetapkan dalam RKPd dan RPJMD. Realisasi pelaksanaan kegiatan pada Program

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengembangan Wirausaha Inovatif

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Wirausaha Inovatif bertujuan sebagai berikut:

- Mendorong masyarakat untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi produktif sesuai dengan arah pembangunan Kota Pekalongan.
- Meningkatkan kreatifitas produk-produk yang dijual dan memiliki daya saing.
- Terwujudnya wirausaha muda yang kreatif dan inovatif.

3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 520.000.000,- dan realisasi Rp. 496.532.879,- (*unaudited*) melalui 4 (empat) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 5 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 4 indikator tercapai dan 1 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.192 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.192 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi	Jumlah KSP/USP yang mendapatkan pembinaan, Pengawasan Pejabat Koperasi	koperasi	100	100	100
2	Penghargaan dan penilaian kesehatan koperasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan tingkat penilaian kesehatan Koperasi	koperasi	100	100	100
3	Pembinaan dan Pendampingan Koperasi	Jumlah Koperasi bermasalah yang mendapatkan Pendampingan	koperasi	1	1	1
		Jumlah koperasi tidak aktif yang dibubarkan	koperasi	37	37	32
4	Peningkatan kapasitas koperasi dan UKM (DAK)	Jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan peningkatan kapasitas	koperasi	132	132	132

Sumber : Dindagkop dan UKM, 2020

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi untuk meningkatkan pengelolaan koperasi yang kuat, sehat, mandiri dan tangguh sesuai dengan jati diri koperasi serta terwujudnya peningkatan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan.

b. Kegiatan Penghargaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi

Pelaksanaan kegiatan Penghargaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan KSP dan USP Koperasi serta KSPPS dan USPPS koperasi yang sehat dan mantap sesuai dengan jatidiri koperasi serta mewujudkan kegiatan simpan pinjam yang profesional, sehat, efektif dan efisien.

c. Pembinaan dan pendampingan koperasi

Pelaksanaan kegiatan ini dilatar belakangi adanya keprihatinan terhadap beberapa koperasi di Kota Pekalongan yang pernah menjadi ikon koperasi dan primadona usaha di Kota Pekalongan, namun dalam kenyataannya, kondisi pada saat ini justru berbanding terbalik dengan pada saat keemasannya.

Koperasi yang mendapatkan pendampingan adalah koperasi Wira Bina Usaha yang ada di kelurahan Bandengan. Dengan adanya musibah rob yang menimpa Kota Pekalongan, khususnya di wilayah Bandengan banyak dari anggota koperasi yang terdampak dari musibah rob, sehingga memperngaruhi perputaran bisnis koperasi yang mengakibatkan kondisi koperasi menjadi terganggu.

Indikator output kegiatan ini yaitu jumlah koperasi tidak aktif yang dibubarkan dengan target 37 koperasi, tetapi koperasi tidak aktif yang dibubarkan hanya sebanyak 35 koperasi. Hal ini disebabkan karena pada saat dilakukan verifikasi ulang oleh tim penyelesaian ternyata ada 5 koperasi tidak aktif yang siap untuk aktif kembali (dengan menyelenggarakan rapat anggota tahunan/ RAT).

d. Peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM (DAK)

Pelaksanaan kegiatan ini peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk peningkatan daya saing dan kelembagaan koperasi dan UMKM. Kegiatan kapasitas koperasi dan UMKM (DAK) terdiri dari :

- Pelatihan Pengelolaan Sektor Retail Koperasi
- Pelatihan kompetensi manajer koperasi
- Pelatihan Dewan Pengawas Syariah Koperasi
- Pelatihan Wirausaha pemula

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ini bertujuan untuk :

- Memberikan motivasi bagi para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya, sehingga mampu berdaya saing dalam era digital dan milenial.

- Memberikan pelatihan bagi para Dewan Pengawas Syariah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah / Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah koperasi dalam rangka memahami dan mengawasi konsep transaksi yang berdasarkan akad-akad syariah.
- Memberikan pelatihan bagi para Manajer Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah / Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah koperasi dalam meningkatkan Kompetensinya, sehingga pengelolaan koperasi dapat lebih menjamin kesejahteraan bagi para anggotanya.
- Memberikan pelatihan bagi para Pengurus / Pengawas / Pengelola koperasi dalam mengelola sektor ritel, sehingga tujuan koperasi dalam mensejahterakan anggotanya tidak hanya terfokus pada kegiatan simpan pinjam saja.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2019 diperuntukan untuk membiayai Kegiatan Pendamping Non PNS Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Kegiatan Pelatihan, dengan fokus pelatihan sebagai berikut :

- 1) Vokasional, Pelatihan yang mengarah pada pengolahan bahan baku lokal, permintaan pasar dan pengembangan kemampuan individual, dengan tujuan akhir menumbuhkan wirausaha baru / pemula.
- 2) Manajerial, Pelatihan yang bertujuan pada penataan manajerial usaha, termasuk didalamnya termasuk komputrisasi dan marketing online.
- 3) Kompetensi, Pelatihan yang ditujukan untuk mengukur kemampuan / kompetensi individual dalam pengelolaan usaha.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatas memberikan kontribusi yang positif terhadap pelaksanaan pengelolaan kegiatan koperasi, diantaranya:

- memberikan pemahaman dan motivasi kepada koperasi/pokmas/prakoperasi/LKM/UMKM tentang arti pentingnya berkoperasi sehingga mereka semakin baik dari aspek kelembagaan, usaha maupun organisasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada lembaga yang berbadan hukum koperasi;
- Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi dan tata kelola tata usaha yang baik;
- Mengembangkan dan fokus pada penguatan koperasi sektor ritel.
- Penciptaan lapangan kerja sektor koperasi dan penciptaan enterpreuner berbasis koperasi.
- Mendorong pemahaman koperasi tentang keuntungan bisnis ritel ditinjau dalam perspektif manajemen keuangan koperasi.
- Mendorong pemahaman koperasi tentang bisnis ritel dalam menghadapi trend pasar bebas.
- Memperkuat jejaring dalam pengelolaan bisnis ritel yang dilakukan oleh koperasi di wilayah Kota Pekalongan.

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Kurangnya kualitas, kapasitas dan kompetensi pengelola koperasi.
- Kurangnya kepedulian gerakan koperasi dalam mengembangkan pengelolaan usahanya di sektor ritel.
- Masih banyak koperasi yang belum melakukan inovasi di bidang teknologi informasi khususnya dalam penyajian laporan keuangan dan pelayanan kepada anggotanya.
- Kesulitan dari para pelaku UMKM dalam memperoleh modal
- Kurangnya kesadaran para pelaku usaha dalam mengurus Legalitas usahanya
- Jaringan usaha UMKM masih belum optimal (belum bermitra)
- Pengelolaan manajemen usaha masih sendiri
- Masih rendahnya penguasaan teknologi informasi bagi pengembangan UMKM

2. Solusi

- Menyelenggarakan kegiatan pelatihan (uji kompetensi) bagi Koperasi dan UMKM,
- Melakukan pendampingan UMKM dalam mengakses pembiayaan
- Melakukan pendampingan dalam kemitraan

3. Peluang

- Pengurus / pengawas/ pengelola koperasi yang belum memiliki Uji kompetensi di bidang perkoperasian.
- Adanya sentra-sentra atau komunitas UMKM.

3.2.2.12. Penanaman Modal

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Penanaman Modal di Kota Pekalongan dilaksanakan 2 (dua) program yakni Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi, Program Pelaksanaan Dan Pengendalian Penanaman Modal dan Program Pelayanan Perizinan yang terdistribusi dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Program, dengan realisasi sebanyak 1 (satu) indikator yang mencapai target dan 1 (satu) indikator belum mencapai target.

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.193 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Kepeminatan (Loi) Kerjasama kemitraan antara UMK (Usaha Mikro Kecil) dengan UMB (Usaha Menengah Besar)	75	Letter of Intens (LoI)	-	68

Sumber: DPMPTSP, 2020

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaiannya masih belum memenuhi target yang diharapkan karena kendala yaitu minat pengusaha yang diundang dalam kegiatan Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah (Business Forum) masih kurang, yaitu dari 75 UMK yang diundang untuk dipertemukan dengan Pengusaha Besar untuk Kerjasama (LoI) yang hadir 68 UMK.

2. Program Pelaksanaan Dan Pengendalian Penanaman Modal

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.194 Target dan Capaian Indikator
Program Pelaksanaan Dan Pengendalian Penanaman Modal**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Nilai investasi pertahun (dalam milyar rupiah)	232,80	milyar rupiah	1.663,71	3.294,76

Sumber: DPMPTSP, 2020

Realisasi yang meningkat cukup signifikan pada tahun 2019 karena beberapa usaha yang menginvestasikan modalnya cukup besar diantaranya adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.195 Perusahaan dengan Nilai Investasi terbesar
di Kota Pekalongan pada tahun 2019**

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	NILAI INVESTASI (Rp)
1	Koperasi Simpan Pinjam Jasa	Jl. Dr. Cipto No. 84 Pekalongan	1.372.466.048.125
2	Apotek Kraton	Jl. Dr wahidin No.64 Pekalongan	600.045.000.000
3	PTKarisma Inti Sejahtera	Jl. Gajah mada no.11A Pekalongan	200.300.000.000
4	PT Medika Loka Pekalongan	Jl. Jendral Sudirman No. 16 A Pekalongan	82.000.000.000
5	PT Dafam Mataram International	Jl. Urip Sumoharjo No. 53 Pekalongan	76.515.130.000
6	PT Esthy Indojava	Jl Gajah Mada No. 117 Pekalongan	51.158.820.750
7	Medika Anugerah Riyadi	Jalan Perintis Kemerdekaan No.3 Pekalongan	40.093.218.096
8	Pesonna Indonesia Jaya	Jl. Dr. Cipto No. 24 Kauman Pekalongan	36.500.950.000
9	PT Absah Internasional	Jl. WR Supratman Jatayu Residence No. A7-8 Pekalongan	24.000.000.000
10	Kemang Inti Persada	Jl. Ir Sutami No 2 Kalo Baros Pekalongan	20.000.000.000
11	PT Murni Adhi Dukuh Jaya	Jl Dr Sutomo No 149 A Pekalongan	18.491.837.331
12	PT Samudera Dockindo Prima	Komp. Perum Prasarana Perikanan Jl. Jlamprang Krapyak Lor 1 Pekalongan	17.000.000.000
13	PT Catur Boga Sukses	Jl. Tentara pelajar No. 64 Pekalongan	17.000.000.000
14	PT Mekar Jaya Xtrans Jaya	Jl. Kimangun Sarkoro Pekalongan	16.560.555.000
15	Karomah Holistic	Jl. Gajah Mada Barat 124 Pekalongan	15.507.502.950
16	Patriautama	Jl. Durian No. 689 Bina Griya Block C	14.297.000.000
17	Kspps Bmt Bahtera	Jl . dr Sutomo Komplek Mega Grosir MM Blok A.10 Pekalongan	12.962.969.949
18	Persekutuan Firma (Fa /	Jl. A. Yani no. 10 Pekalongan	12.700.000.000

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT PERUSAHAAN	NILAI INVESTASI (Rp)
	Venootschap Onder Firma) Cangkir		
19	Safir Syariah Hotel	Jl. Dr Cipto No 70 Poncol Pekalongan	12.502.384.999
22	Pt Perusahaan Dagang Dan Industri Ksatria Manunggal	Jl. Rajawali Timur No. 9 Pekalongan	11.400.000.000

Sumber: DPMPTSP, 2020

3. Program Pelayanan Perizinan

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.196 Target dan Capaian Indikator Program Pelayanan Perizinan

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Persentase Penyelesaian Perizinan sesuai Standar Pelayanan	93,00	Persen	-	85,45

Sumber: DPMPTSP, 2020

Dari tabel diatas diketahui bahwa capaiannya masih belum sesuai SOP waktu penyelesaian perizinan yaitu karena faktor di luar kewenangan DPMPTSP terkait kendala teknis penerbitan rekomendasi perizinan dan masalah teknis penerapan Aplikasi *One Stop Service* dari Pusat.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 238.770.000,- dan realisasi Rp. 234.970.000,- (*unaudited*) melalui 4 (empat) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 4 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 4 (empat) indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.197 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.197 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah	jumlah fasilitasi kerjasama penanaman modal	kali	1	1	1
2	Kajian kebijakan penanaman modal	jumlah peraturan penanaman modal tersusun	peraturan	2	2	2
3	Penyelenggaraan pameran investasi	Jumlah keikutsertaan promosi/pameran investasi	kali	3	3	3
4	Audit standar ISO 9000	Jumlah Audit ISO	kali	2	2	2

Sumber: DPMPTSP, 2020



Pekalongan Bussines Forum

Pameran Investas

Gambar 3.103 Promosi dan Kerjasama Investasi

Sumber : DPMPTSP, 2020

2. Program Pelaksanaan Dan Pengendalian Penanaman Modal

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 164.600.000,- dan realisasi Rp. 162.430.500,- (*unaudited*) melalui 3 (tiga) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 4 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 4 (empat) indikator tercapai .

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.198 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.198 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pelaksanaan Dan Pengendalian Penanaman Modal

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Klinik LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)	Jumlah perusahaan yang terfasilitasi dalam klinik/ pendampingan LKPM	perusahaan	65	65	65
2	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pebgawasan pelaksana penanaman modal	Jumlah lokasi (usaha) terpantau	lokasi	65	65	65
		jumlah peserta sosialisasi pemantauan, pembinaan dan pengawasan	perusahaan	65	65	65
3	Penyusunan profil inventasi	Jumlah Dokumen Profil investasi	dokumen	1	1	1

Sumber : DPMPTSP, 2020

3. Program Pelayanan Perizinan

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.078.900.000,- dan realisasi Rp. 1.020.086.928,- (*unaudited*) melalui 8 (delapan) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 8 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 8 (delapan) indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.199 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.199 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pelayanan Perizinan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Optimalisasi pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan	Jumlah laporan izin (sesuai SOP)	laporan	1	1	1
2	Aplikasi SIMPADU	Jumlah bulan Aplikasi SIMPADU terupdate	bulan	12	12	12
3	Pengelolaan Website OSS	Jumlah bulan pengelolaan website	bulan	12	12	12
4	Pengelolaan SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik)	Jumlah bulan layanan SPIPISE	bulan	12	12	12
5	Penyusunan indeks kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	dokumen	2	2	2
6	Fasilitasi pengaduan perijinan dan non perijinan	Persentase pengaduan layanan perizinan dan non perijinan yang terselesaikan	persen	80	80	80
7	Penyebarluasan penanaman modal dan perizinan	Jumlah Sosialisasi penanaman modal dan pelayanan perizinan	kali	12	12	12
8	Promosi kegiatan unggulan dan inovatif	Jumlah keikutsertaan pameran harteknas, KIP dan Karnaval batik	kali	3	3	3

Sumber : DPMPTSP, 2020



Gambar 3.104 Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Perizinan

Sumber : DPMPTSP, 2020

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Keterbatasan lahan untuk membuka usaha baru di Wilayah Kota Pekalongan.
- Minat UMK untuk dipertemukan dengan UMB dalam forum kerjasama strategis (Business Forum) masih kurang.
- kendala teknis penerbitan rekomendasi perizinan dan masalah teknis penerapan Aplikasi One Stop Service dari Pusat.

2. Solusi

- Mengoptimalkan lahan yang sudah ada untuk pengembangan investasi agar lebih berdaya guna dan punya nilai tambah dalam investasi.
- Mengefektifkan sosialisasi kepada pelaku usaha terutama dalam kegiatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah (Business Forum).
- Mengintensifkan koordinasi dengan OPD terkait tentang pelaksanaan SOP Pelayanan Perizinan dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam penerapan kebijakan baru tentang perizinan dan penanaman modal.

3. Peluang

- Semakin terbukanya peluang kerjasama antar daerah untuk pengelolaan potensi ekonomi strategis.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan penanaman modal.

3.2.2.13. Kepemudaan Dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinparbudpora Kota Pekalongan dalam beberapa program kegiatan yang secara umum mempunyai peran dan arti penting bagi proses pembangunan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan minat bakat dan potensi pemuda serta potensi daerah. Kegiatan olahraga diantaranya POPDA tingkat Kota, POPDA Tingkat Karesidenan, POPDA Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Pemberdayaan pemuda melalui peningkatan Sumber Daya Manusia dan profesionalisme pemuda menjadi satah satu konsentrasi bidang ini.

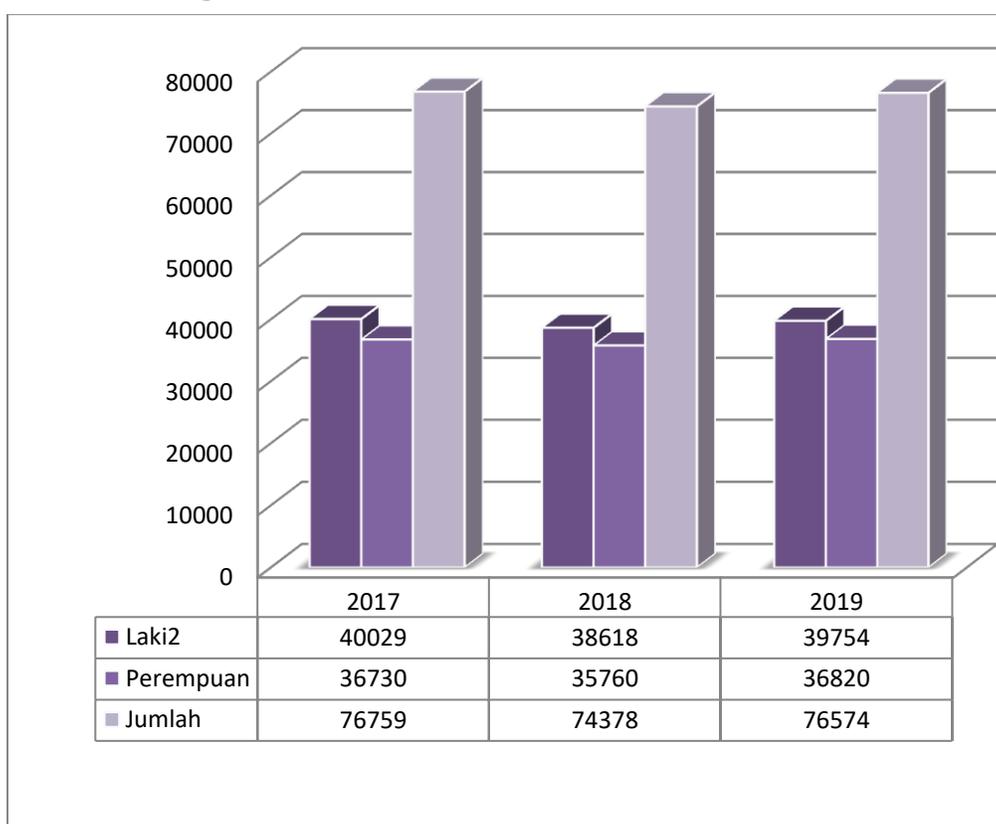
Demikian pula dengan peningkatan moral dan kebangsaan pemuda. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sebagai realisasi program, diantaranya melalui kepaskibraan, kepemudaan dan lain-lain.

Kepemudaan mempunyai misi sebagai berikut :

- Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda;
- Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega;
- Meningkatkan sinergitas dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta, dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan, kepramukaan serta pembinaan pengembangan.

Pada Tahun 2019 Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga mencatat jumlah Pemuda usia 16 – 30 tahun sebanyak Laki-laki 39.754 orang dan Perempuan 36.820 orang,

dari jumlah tersebut pemuda yang tidak bersekolah Laki-laki 1.015 orang, Perempuan 882 orang, tidak tamat SD Laki-laki 6.328 orang Perempuan 5.402 orang. Adapun yang tamat SD Laki-laki 11.104 orang, Perempuan 8.539 orang, tamat SMP Laki-laki 11.248 orang Perempuan 10.657 orang, tamat SMA Laki-laki 8.613 orang Perempuan 9.099 orang, tamat Diploma II Laki-laki 27 orang, perempuan 28 orang, tamat Akademi/D3 laki-laki 258 orang perempuan 569 orang, tamat S1 Laki-laki 1.128 orang Perempuan 1.603 orang, tamat S2 laki-laki 32 orang perempuan 41 orang dan tamat S3 Laki-laki 1 orang.



Gambar 3.105 Penduduk Jenjang Usia Pemuda (16-30 Tahun)

Sumber : Dinparbudpora, 2020

Alokasi anggaran untuk Urusan Kepemudaan dan Olahraga pada tahun 2019 sebesar Rp. 4.312.765.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.225.866.916,- atau 97,98% dari alokasi anggaran.

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan dilaksanakan 3 (tiga) program yakni Program Peningkatan Peran serta kepemudaan, Program Pembinaan dajin masyarakatan Olahraga dan Program Peningkatan Sarana prasarana olahraga yang terdistribusi dalam 5 indikator kinerja program dengan realisasi sebanyak 3 indikator yang mencapai target, 2 indikator belum mencapai target.

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.200 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Persentase anggota organisasi kepemudaan yang dibina	26,67	Persen	100	26,67
2	Penurunan kasus narkoba	19,05	Persen	-	-12,00

Sumber : Dinparbudpora, 2020

Dampak positif pelaksanaan Program peningkatan peran serta kepemudaan tersebut adalah organisasi pemuda yang ada di Kota Pekalongan bisa mendapatkan pembinaan dari Dinas Parbudpora khususnya bidang Kepemudaan dan Olahraga, adapun indikator penurunan kasus narkoba sudah dihapus dari program peningkatan peran serta kepemudaan.

2. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga

Program ini diukur dengan 3 (tiga) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.201 Target dan Capaian Indikator
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Prestasi olahraga tingkat provinsi (Medali)	21,00	Orang	29	22
2	Prestasi olahraga tingkat nasional (Medali)	3,00	Orang	0	1
3	Peningkatan event olahraga tk Provinsi dan Nasional	3,00	Event	0	1

Sumber : Dinparbudpora, 2020

Dampak positif pelaksanaan Program Pembinaan dan pemasarakatan Olahraga adalah terbinanya para siswa, pelatih dan cabang olahraga yang ada di Kota Pekalongan sehingga dapat meraih prestasi dan ketidak tercapaian indikator Program Pembinaan dan pemasarakatan Olahraga belum bisa meraih juara tingkat Nasional dikarenakan kurang sarpras penunjang. Target medali untuk tingkat nasional sebanyak 3 (tiga) medali emas masih terpenuhi 1 (satu) emas dari cabang olahraga Taekwondo, sedangkan untuk cabang olahraga lainnya belum bisa menyumbangkan medali. Hal ini dikarenakan perlunya peningkatan pelatihan dan pembinaan terhadap cabang – cabang olahraga dengan dilaksanakannya Pusat Pelatihan Olahraga Daerah (Rintisan PPLOPD).

Cabang Olahraga di Kota Pekalongan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 31 cabang olahraga namun belum seluruhnya terbina. Yang menjadi binaan Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan baru sebanyak 16 Cabang olahraga.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.202 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Persentase ketersediaan sarpras Olahraga sesuai jenis cabor	35,00	Persen	30	42,86

Sumber : Dinparbudpora, 2020

Dampak positif pelaksanaan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olah Raga tersebut adalah adanya pengadaan sarpras olahraga yang diadakan untuk sekolah.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 833.500.000,- dan realisasi Rp. 826.116.400,- (*unaudited*) melalui 8 (delapan) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 13 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 12 indikator tercapai dan 1 indikator tidak tercapai yaitu Bengkel Seni yang semula target 5 (lima) cabang Seni baru terpenuhi 3 (tiga) cabang seni yaitu; Seni Lukis, Seni Tari dan Seni Musik sedangkan 2 (dua) cabang seni tidak begitu diminati oleh peserta sehingga perlu sosialisasi pentingnya melestarikan budaya terutama dibidang seni. Untuk bidang seni yang kurang diminati peserta bengkel seni adalah Seni Karawitan dan Seni Macapat.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.203 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

**Tabel 3.203 Target dan Capaian Kinerja Output pada
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan**

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pemilihan Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor yang terpilih	orang	1	1	1
2	Pekan seni	Jumlah cabang seni yang dipertandingkan	cabang seni	5	5	6
3	Bengkel seni	Jumlah cabang seni yang dibintekkan	cabang seni	5	5	3
4	Kemah bakti pemuda	Jumlah pemuda yang mengikuti kemah bakti pemuda	orang	300	300	300
		Jumlah pemuda yang mendapat juara dalam kemah bakti pemuda	orang	1	1	1
5	Lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 km	Jumlah kejuaraan lomba wawasan wiyata mandala dan gerak jalan 28 Km	orang	1	1	1
6	Pembibitan dan pembinaan generasi muda	Jumlah generasi muda yang dibina	orang	200	0	200
		Jumlah peserta yang mengikuti sarasehan	orang	100	100	100

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		Jumlah regu SMP dan SMA yang mendapat juara TUB BB	regu	2	2	2
7	Upacara peringatan Haornas dan Hari sumpah pemuda	Jumlah Upacara yang dilaksanakan	upacara	2	2	2
		Jumlah Atlet yang dikirim	orang	0	0	0
		Jumlah peserta yang dikirim ke provinsi	orang	20	20	20
8	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan	Jumlah sisiwa yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan	orang	0	0	0
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	orang	150	150	150
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kepemimpinan	orang	60	60	60

Sumber : Dinparbudpora, 2020

Pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Peran Serta kepemudaan ditujukan untuk mencapai target indikator program yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD. Adapun Kegiatannya adalah sebagai berikut :

- a. Pekan Seni, berupa kegiatan Lomba seni ditingkat Kota Pekalongan tahun 2019. Pekan seni ini diikuti oleh seluruh SiswaSD, SMP, SMA sederajat di Kota Pekalongan dengan mempertandingkan untuk SD 6 cabang seni yaitu : Seni lukis, Seni Musik ansamble, seni tari kelompok, seni mocopat, seni geguritan dan seni karawitan.

Untuk SMP dan SMA sederajat 5 Cabang seni, yaitu: Seni lukis, Seni Musik ansamble, seni tari kelompok, seni mocopat, seni geguritan dengan : Jumlah peserta 2100 siswa dengan hasil kejuaraan masing-masing cabang seni Juara I s.d. Harapan III.



Gambar 3.106 Pekan Seni Pelajar

Sumber : Dinparbudpora, 2020

- b. Kemah bakti Pemuda berupa kegiatan kemah pemuda dilaksanakan pada tanggal 4 s/d 6 September 2019 dilapangan Bumirejo Kecamatan Pekalongan Barat dengan jumlah peserta

300 orang yang terdiri dari Organisasi Kepemudaan dan Pelajar SMA/SMK sederajat se Kota Pekalongan.

Kepemudaan dan Lomba TUB-BB yang dilaksanakan di bulan pebruari 2019 dengan peserta siswa SMP/MTs sederajat dan SMA/SMK/MA sederajat dengan peserta sejumlah 600 siswa atau 23 kelompok dengan hasil kejuaraan sebagai berikut :

- 1) Tingkat SMP sederajat, SMP Negeri 13 sebagai Juara 1, SMP Islam sebagai Juara II, SMP Negeri 1 sebagai Juara III, SMP Negeri 5 sebagai Juara harapan
 - 2) Tingkat SMA Sedrajat, SMA Negeri 1 sebagai Juara I, SMA Negeri 3 sebagai Juara II, SMK Negeri 2 sebagai Juara III, SMA Negeri 2 sebagai Juara Harapan.
 - 3) Selanjutnya untuk juara 1 Tingkat SMA sederajat mewakili Kota Pekalongan tingkat Eks Kaersidenan Pekalongan di Kabupaten Brebes
- c. Pembibitan dan Pembinaan Generasi muda, berupa kegiatan soialisasi dan Lomba TUB PBB dilaksanakan pada bulan Maret 2019 yang diikuti SMA/SMK Sederajat Kota Pekalongan dengan jumlah peserta 300 siswa atau 11 kelompok dengan hasil kejuaraan sebagai berikut : Juara I SMA N 3, Juara II SMA N 1, dan Juara III SMA N 2 Kota Pekalongan, selanjutnya Jura I Tingkat Kota mewakili tingkat Karesidenan dan belum mendapat kejuaraan (Peringkat 4)

2. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.221.100.000,- dan realisasi Rp. 1.159.755.000,- (*unaudited*) melalui 8 (delapan) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 12 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 10 indikator tercapai dan 2 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.204 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.204 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina	cabor	0	0	0
		Jumlah Atlet yang dibina dlm rangka persiapan POPDA Tk.Provinsi Jateng	Atlet	315	315	315
		Jumlah cabang olahraga pelajar yang dibina	cabor	16	16	16
2	Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah	Jumlah cabang olahraga prestasi di tingkat daerah yang terbina	cabor	13	13	13
3	Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota	Jumlah cabang olahraga pelajar yang terbina	cabor	21	21	16
		Jumlah cabang lomba yang dipertandingkan	lomba	21	21	16
4	Pengembangan olahraga rekreasi	Jumlah Cabor yang dikembangkan	cabor	5	5	5

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
5	Fasilitasi Olahraga Pelajar Tingkat Karesidenan/ Provinsi	Jumlah Cabang olahraga pelajar yang terbina	cabor	13	13	13
		Jumlah kontingen yang mengikuti kompetisi tk.Kares/provinsi	cabang	13	13	13
6	Pusat pelatihan olah raga daerah	Jumlah olahragawan yang terlatih	orang	0	0	0
		Jumlah olahragawan yang dilatih	orang	50	50	50
7	Kompetisi olahraga masyarakat	Jumlah cabang olahraga dalam kompetisi olahraga masyarakat	cabang	10	10	10
8	Penyelenggaraan kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan	Jumlah peserta yang mengikuti kompetisi olahraga dan seni tingkat kecamatan	orang	400	400	400
		Jumlah jenis lomba yang dikompetisikan	lomba	10	10	10

Sumber : Dinparbudpora, 2020

Pelaksanaan kegiatan pada program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga ditujukan untuk mencapai target indikator program yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD. Adapun kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan kompetisi olahraga pelajar tingkat kota, berupa kegiatan lomba 21 cabang olahraga dan terlaksana 18 cabang olahraga, tetapi dalam pelaksanaannya ditambah cabang olahraga Futsal dan catur. Walaupun kedua cabang olahraga tersebut tidak dipertandingkan di tingkat Provinsi, tapi karena diminati siswa banyak maka dengan tujuan untuk pembinaan sehingga pertandingan kedua cabang olahraga itu digelar di Popda Kota Pekalongan.
2. pusat pelatihan olahraga daerah berupa kegiatan pelatihan/Workshop bagi pelatih olahraga Difabel dengan peserta 50 orang dengan narasumber dari pengurus NPCI provinsi Jawa tengah
3. Pembinaan Cabang olahraga prestasi di tingkat daerah berupa kegiatan Coaching Clinic : Sepak Bola, senam dan pencak Silat, sedangkan kompetisi olahraga masyarakat berupa event pertandingan cabang olahraga antara lain ; Futsal, Catur, Lari 5 K, Atletik, Bola Volly, senam, Tenis meja dan Sepak bola.

Dampak positif pelaksanaan program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga tersebut adalah Para siswa, Guru Olah raga, dan pelatih mendapat pembinaan sehingga dapat memacu prestasi ke jenjang yang tingkat provinsi maupun Nasional, adapun ketidaktercapaian indikator program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga ini dikarenakan masih kurangnya sarpras olahraga.



Gambar 3.107 Dokumentasi Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga

Sumber : Dinparbudpora, 2020

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 2.258.165.000,- dan realisasi Rp. 2.239.995.516,- (*unaudited*) melalui 3 (tiga) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 4 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 4 indikator tercapai dan 0 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.205 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.205 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana olah raga	Jumlah sarpras olahraga yang direhab	unit/lokasi	9	9	9
2	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olah raga	Jumlah sarana prasarana olahraga yang terpelihara secara rutin/berkala	unit/lokasi	4	4	4
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah sarpras olahraga yang diadakan	unit	290	290	290
		Jumlah lapangan yang dilakukan pengembangan	lokasi	2	2	2

Sumber : Dinparbudpora, 2020

Pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga ditujukan untuk mencapai target indikator program yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD. Adapun Kegiatannya sebagai berikut :

- d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga, berupa pengadaan alat olahraga yang dihibahkan ke KONI Kota Pekalongan berupa : matras bela diri, sepatu tinju, lat pul down, sit up bench, samsak, snorkel, chalk, pelindung gigi, sabuk angkat besi, sabuk angkat berat dan selebihnya ada pembuatan jogging track lapangan Bumirejo.
- e. Pemeliharaan rutin berkala sarpras olahraga berupa perbaikan tribun Stadion Hoegeng, perbaikanGOR Jetayu.
- f. Rehabilitasi sedang/berat sarana prasarana olahraga berupa Rehab lapangan Podosugih, Pagar lapangan Sepak bola Leo Krapyak, peninggian lapangan Bumirejo.

Dampak positif pelaksanaan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga Sarana dan prasarana olah raga yang semula rusak atau sudah kurang baik dapat diperbaiki sehingga menjadi bermanfaat lagi.

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Belum tercapainya prestasi yang maksimal di bidang kepemudaan dan olahraga.

2. Solusi

Peningkatan pembinaan dan pelatihan di bidang kepemudaan dan olahraga dengan bekerja sama dengan Bidang kepemudaan (Organisasi kepemudaan dan OPD terkait) Bidang Olahraga (kelembagaan olahraga antara lain : KONI, FORMI , NPCI dan guru-guru olah raga di Kota Pekalongan).

3. Peluang

- a. Bidang kepemudaan
 - Meningkatkan pendidikan dan pelatihan dasar kepemudaan
 - Pemberdayaan pemuda di bidang kepeloporan
- b. Bidang Olahraga :
 - Mengadakan pelatihan-pelatihan pelatih olahraga
 - Pembentukan Pusat pelatihan olahraga daerah rintisan

3.2.2.14. Statistik

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Statistik di Kota Pekalongan dilaksanakan 1(satu) program yakni Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah yang terdistribusi dalam 1 indikator Kinerja Program, dengan indikator yang mencapai target realisasi.

1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.206 Target dan Capaian Indikator
Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Satuan	angka		
1	Persentase data statistik sektoral yang tersusun	100,00	Persen	-	100

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2020

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 270.500.000,- dan realisasi Rp. 217.160.999,- (*unaudited*) melalui 2 (dua) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 2 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 2 indikator tercapai dan 0 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.207 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.207 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pengolahan, updating dan analisis serta Statistik Daerah	Jumlah dokumen statistik	Semester	2	2	2
2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Satu Data Indonesia (SDI)	Tersedianya konten aplikasi website satu data se Indonesia	Konten	1	1	1

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2020

Sarana yang disediakan berupa aplikasi Pusaka (Pusat Data Terpadu Kota Batik) yang sampai saat ini dalam proses pengembangan. Dan banner Budaya Sadar Data guna mengingatkan kepada penyedia data untuk berkontribusi data terpadu di Dinas Kominfo khususnya urusan statistic.

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Kurangnya komitmen dan kesadaran akan pentingnya data bagi Petugas Pengelola Data di OPD dan atau lembaga/Instansi vertikal terkait. Sehingga proses pengumpulan dan pengolahan data kurang tepat waktu.

2. Solusi

- Penetapan SK Walikota tentang Petugas Pengelola Satu Data pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekalongan
- Rakor Pengelola Satu Data Terpadu Daerah

3. Peluang

- Fungsi pusat data (data center) di Kominfo.

3.2.2.15. Persandian

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Persandian di Kota Pekalongan dilaksanakan 1 (satu) program yakni Program Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan

informasi pemerintahan yang terdistribusi dalam 1 indikator Kinerja Program, dengan realisasi indikator yang tercapai target sebagaimana tabel berikut :

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.208 Target dan Capaian Indikator
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Satuan	angka		
1	Persentase arus informasi pemerintah daerah yang lancar, aman dan terjaga kerahasiaannya	100,00	persen	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2020

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan

Program Penyelenggaraan Persandian dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 323.000.000,- dan realisasi Rp. 306.726.399,- (*unaudited*) melalui 2 (dua) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 2 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 2 indikator tercapai dan 0 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.209 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

**Tabel 3.209 Target dan Capaian Kinerja Output pada
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan**

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pengelolaan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi	Jumlah bulan penyelenggaraan fungsi jaringan sandi dan telekomunikasi	Bulan	12	0	12
		Jumlah perangkat signal jumper yang diadakan	unit	-	1	1
		Jumlah sosialisasi keamanan informasi yang dilaksanakan	kali	-	2	1
2	Pengembangan sistem keamanan informasi	Jumlah bulan penyelenggaraan capacity building keamanan informasi	kalli	2	0	2
		Jumlah capacity building keamanan informasi yang diselenggarakan	kali	0	2	1
		Jumlah aset berupa komputer yang ditambahkan	unit	-	2	2

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		Jumlah aset berupa TV Monitor yang ditambahkan	unit	-	1	1

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2020

Seiring dengan perkembangan dunia maya yang setiap hari berkembang sehingga keamanan informasi pun harus ditingkatkan lewat media website internetsehat.Pekalongankota.go.id dan leaflet seperti berikut :

Leaflet Keamanan Informasi

Leaflet Lindungi diri Anda Ketika Online

Leaflet Postinganmu Harimaumu



Gambar 3.108 Dokumentasi Kegiatan Persandian

Sumber: Dinas Kominfo Kota Pekalongan, 2020

3.2.2.16. Kebudayaan

Selama tahun 2019 Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan khususnya di Bidang Kebudayaan mempunyai catatan beberapa data antara lain Sarana dan Prasarana seni dan budaya, pegiat seni dan budaya, pagelaran dan pengunjung.

Kota Pekalongan dengan latar belakang budaya yang beranekaragam memiliki banyak Cagar Budaya yang potensi menjadi obyek wisata. Demikian pula dengan upacara tradisional dan sanggar seni yang berdiri di Kota ini, memungkinkan optimalisasi pencapaian target untuk mewujudkan Kota Pekalongan sebagai kota tujuan wisata.

Kota Pekalongan telah mampu menyelenggarakan dan dipercaya sebagai tuan rumah untuk beberapa event berskala lokal maupun regional. Bidang Kebudayaan berusaha semaksimal mungkin menyelenggarakan tugas sesuai tujuan dan fungsi, dengan mengupayakan fasilitas dan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Kebudayaan di Kota Pekalongan dilaksanakan 1 (satu) program yakni Program Pengembangan dan Pengelolaan Kekayaan Budaya

yang terdistribusi dalam 4 indikator Kinerja Program dengan realisasi sebanyak 4 indikator yang mencapai target dan 0 indikator belum mencapai target.

1. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program ini diukur dengan 4 (empat) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.210 Target dan Capaian Indikator
Program Pengembangan Dan Pengelolaan Kekayaan Budaya**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Event kesenian dan kebudayaan yang disiapkan skala nasional	2,00	event	2	2
2	Event kesenian yang difasilitasi	7,00	event	13	21
3	Komunitas/sanggar kesenian yang difasilitasi	5,00	komunitas	6	100
4	Persentase pengunjung museum batik	4,81	persen	3,27	5,30

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2020

Dampak positif pelaksanaan program tersebut dalam pementasan seni dan budaya di Kota Pekalongan dapat terlaksana dengan tersedianya sarana pementasan. Sarana pementasan yang tersedia belum dapat memenuhi atau tidak sebanding dengan banyaknya pentas seni di Kota Pekalongan.

Kesenian budaya lokal dapat dilestarikan walaupun belum secara keseluruhan. Sedangkan ketercapaian indikator program poin 2 dan poin 3 pada prinsipnya event dan komunitas yang ada di Kota Pekalongan dapat terfasilitasi, akan tetapi dari tahun ketahun tidak sama jumlahnya (Fluktuatif). Keduanya melebihi target karena banyaknya permintaan dari pihak instansi/pemerintah/komunitas yang sifatnya mendadak dan untuk itu menyesuaikan anggaran yang ada agar semuanya dapat terfasilitasi. Untuk ketidaktercapaian indikator poin 4 dikarenakan kenaikan target terlalu tinggi tidak diimbangi dengan penambahan koleksi dan perubahan design interiornya pada ruang pameran, dibutuhkan kerjasama dengan sekolah berupa himbauan kunjungan ke museum.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Kekayaan Budaya

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.3.965.500.000,- dan realisasi Rp.3.655.646.473,- (*unaudited*) melalui 12 (duabelas) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 15 indikator. Sampai dengan akhir tahun 2019, 15 indikator tercapai dan 0 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.211 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.211 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Dan Pengelolaan Kekayaan Budaya

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Jumlah event adat budaya daerah yang dilestarikan dan diaktualisasikan	event	12	12	12
2	Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	Jumlah lomba dalam pemberian dukungan penghargaan dan kerjasama di bidang budaya	lomba	3	3	3
3	Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah kegiatan seni budaya yang terfasilitasi	kegiatan	2	2	2
4	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Jumlah event/kegiatan yang diselenggarakan dalam pengembangan kebudayaan dan pariwisata	event	6	6	9
5	Fasilitasi kerjasama pusaka budaya	Jumlah kegiatan yang terfasilitasi	kegiatan	1	1	1
6	Fasilitasi komunitas seni dan budaya	Jumlah komunitas seni budaya yang difasilitasi	komunitas	40	40	100
7	Pengelolaan museum batik	Jumlah bulan dalam pemeliharaan dan pengelolaan museum batik	bulan	12	12	12
		Jumlah AC yang diadakan	unit	11	11	11
		Jumlah ruangan yang didesain interiornya	unit	1	1	1
8	Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah	Jumlah sanggar seni rakyat yang terfasilitasi	kelompok	5	5	7
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	Jumlah dokumen monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya	dokumen	1	1	1
10	Inventarisasi Benda Cagar Budaya	Jumlah dokumen dalam kegiatan inventarisasi benda cagar budaya	dokumen	1	1	1
11	Dukungan festival/parade seni budaya daerah (festival Pekalongan tempo dulu)	Jumlah kegiatan dukungan festival/parade seni budaya daerah (Festival Pekalongan tempo dulu)	kegiatan	3	3	3
12	Pengelolaan museum (DAK)	Jumlah bulan dalam pengelolaan museum (DAK)	bulan	0	0	12

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		Jumlah kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan museum batik (DAK)	kegiatan	11	11	11

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2020

Pelaksanaan kegiatan pada program Pengembangan dan Pengelolaan Kekayaan Budaya ditujukan untuk mencapai target indikator program yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD. Berikut ini kegiatan yang strategis dan mendapat perhatian cukup besar.

- a. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah, berupa kegiatan pentas seni yang diselenggarakan di dalam maupun di luar kota, yaitu :
 - Pentas Seni Rangkaian Hari Jadi Kota Pekalongan Tahun 2019 mulai tanggal 27 Maret s/d 3 April 2019. Kegiatan tersebut meliputi Musrenbangwil, Istighotsah, Kirab Budaya Hari Jadi, dan Pentas Seni di setiap malamnya.
 - Karnaval Budaya APEKSI di Kota Semarang pada tanggal 3 Juli 2019, Lomba Rias Manten se Jawa Tengah di TMII Jakarta pada tanggal 25-26 Juli 2019, Parade Budaya Hari Jadi Propinsi Jawa Tengah di Kabupaten Wonogiri tanggal 25 Agustus 2019, Pentas Seni Pekan Inovasi tanggal 5-8 September 2019, serta Pentas Seni di TMII Jakarta tanggal 1 Desember 2019.
- b. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama dibidang budaya, dengan kegiatan berupa lomba Anekdot berbahasa Pekalongan, sebagai upaya melestarikan kebudayaan asli daerah Kota Pekalongan pada tanggal 6 April 2019, Lomba PGDK tanggal 3 April 2019, serta Lomba Volk Song Pelajar sebagai upaya untuk menumbuhkan kecintaan remaja masa kini dalam bidang seni pada tanggal 4 April 2019.
- c. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya, yaitu berupa lomba perahu hias tradisional pada tanggal 25 Oktober 2019 dan wayangan ruwatan sadranan nelayan pada tanggal 24 Oktober 2019.
- d. Pengembangan kebudayaan dan pariwisata, Pekchun yang merupakan sedekah laut etnis tionghoa di Kota Pekalongan dengan melarungkan sesaji berupa replika kapal dan kemudian dibakar pada tanggal 7 Juni 2019, Syawalan (Pembuatan Lopis Raksasa) di Krapyak tanggal 12 Juni 2019, Sadranan Nelayan pada tanggal 24 Oktober 2019 dengan melarung sesaji kepala kerbau dan pentas wayang kulit untuk mengawalinya. Pentas Seni Resepsi Hari Jadi yang mendatangkan artis Ebiet G Ade dari Jakarta pada tanggal 4 April 2019.
- e. Fasilitasi Komunitas seni dan budaya berupa kegiatan Dewan Kesenian dan Komunitas antara lain : Festival jl Blimbing yang merupakan festival tradisi etnis tionghoa setelah merayakan tahun baru imlek yang dilaksanakan pada bulan Februari 2019. Pekalongan Art Festival dilaksanakan pada bulan Juli 2019 yang dimeriahkan seluruh elemen komunitas di Kota Pekalongan. Pentas Seni artis band Zigas untuk memeriahkan kegiatan Pekan Batik Kota Pekalongan 2019.
- f. Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah yang kegiatannya berupa workshop atau pelatihan dialek khas Kota Pekalongan. Festival Kampung Budaya guna melestarikan kebudayaan Pekalongan yang telah lama hidup dan berkembang di Kota Pekalongan.

- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya, yaitu kegiatan memonitoring kesenian yang masih hidup di Kota Pekalongan melalui kelurahan-kelurahan yang ada.
- h. Inventarisasi Benda Cagar Budaya berupa kegiatan penetapan Museum Batik sebagai bangunan cagar budaya oleh Walikota.
- i. Dukungan festival/parade seni budaya daerah, dengan keluaran kegiatan berupa terselenggaranya Festival Sarung yang mendukung kegiatan Kirab Budaya Hari Jadi Kota Pekalongan yang jatuh pada tanggal 1 April 2019, Festival Jlamprang Culture 11 Juni 2019, Karnaval Kostum Batik dan Pentas Seni Budaya pada Kegiatan Pekan Batik Kota Pekalongan tahun 2019, serta Kegiatan Festival Marawis komunitas di Kota Pekalongan yang berguna untuk memfasilitasi komunitas dalam berkarya seni pada bulan November 2019.
- j. Fasilitasi Jaringan Kota Pusaka Indonesia yang tahun 2019 diselenggarakan di Kabupaten Karangasem Bali. Tim kesenian Kota Pekalongan menyajikan sebuah pertunjukan teater tari batik dengan judul The Ronggeng.



Gambar 3.109 Dokumentasi Pengembangan Dan Pengelolaan Kekayaan Budaya

Sumber : Dinparbudpora Kota Pekalongan, 2020

Permasalahan, Solusi dan Peluang

1. Permasalahan

- Secara umum semua kegiatan berjalan dengan baik, permasalahan yang dihadapi pelaksanaan kegiatan beruntun dan waktunya bersamaan, banyak usulan kegiatan diluar DPA yang harus dipenuhi baik dari komunitas, instansi maupun organisasi masyarakat.

2. Solusi

- Menggunakan dana yang tersedia walaupun dana terbatas agar supaya semua kegiatan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta terfasilitasinya komunitas dan organisasi masyarakat.

3. Peluang

- Dapat menyelenggarakan kegiatan dengan baik dan memberikan apresiasi pada masyarakat dengan mengoptimalkan potensi seni budaya baik komunitas maupun organisasi sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat seniman.

3.2.2.17. Perpustakaan

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Perpustakaan di Kota Pekalongan dilaksanakan 1 (satu) program yakni Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang terdistribusi dalam 2 (dua) indikator kinerja program, dengan realisasi sebanyak 2 (dua) indikator yang mencapai target.

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Program ini diukur dengan 2 (dua) indikator program dengan target dan ketercapaian sebagaimana tabel di bawah ini.

**Tabel 3.212 Target dan Capaian Indikator
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Satuan	Angka		
1	Rasio Pengunjung Perpustakaan per tahun (penduduk usia 5-60 thn)	26,00	Persen	32,10	36,21
2	Persentase perpustakaan kelurahan yang aktif	11,11	Persen	-	11,11

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2020

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 870.500.000,- dan realisasi Rp. 840.563.501,- (*unaudited*) melalui 8 (delapan) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 10 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 100 % indikator tercapai yaitu sejumlah 10 indikator.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.213 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

**Tabel 3.213 Target dan Capaian Kinerja Output
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan**

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca	Terselenggaranya Workshop dan Lomba bercerita, Sinopsis, Penulisan artikel	kegiatan	3	3	3
2	Pengembangan minat dan budaya baca	Layanan Perpustakaan Keliling, Pendampingan Kegiatan Literasi, Fasilitasi Bantuan Operasional	kegiatan	3	3	3
3	Pembinaan dan Stimulasi Perpustakaan di Daerah	Layanan Tambahan diluar jam kerja dan pembinaan perpustakaan	kegiatan	2	2	2
4	Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah	Pendampingan Perpustakaan binaan (Droping Koleksi, Promosi, Administrasi, pengelolaan), pelatihan admin ucs sekolah dan Pelatihan Teknis perpustakaan	kegiatan	6	6	6
		Jumlah kegiatan Pendampingan perpustakaan binaan (droping koleksi, promosi, administrasi, pengelolaan) pelatihan admin UCS, pelatihan teknis perpustakaan yang dilaksanakan	kegiatan	6	6	6
5	Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca	Terselenggaranya Pameran Buku dan Ayo Membaca	kegiatan	2	2	2
6	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah	Bertambahnya koleksi perpustakaan umum daerah	buku	0	0	0
		Jumlah buku yang diadakan	buku	2.000	2.000	2.468
7	Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan	Bertambahnya konten digital perpustakaan	konten	1.000	1.000	1.000
8	Pengembangan infrastruktur TIK perpustakaan	Tersedianya Pojok Online, Union Catalog System Katalog bersama kota Pekalongan	kegiatan	1	1	1

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2020



Gambar 3.110 Pameran Buku

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2020

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Dalam melaksanakan urusan perpustakaan masih dihadapkan pada beberapa hambatan antara lain:

- Kondisi sumber daya manusia secara kualitas (kualifikasi pendidikan perpustakaan) masih terbatas, dimana dari jumlah yang ada yaitu 3 (tiga) orang, hanya 1 (satu) orang yang memiliki kualifikasi ilmu perpustakaan dengan memperoleh tugas tambahan sebagai bendahara pengeluaran, sedangkan di luar OPD Dinarpus belum ada tenaga fungsional pustakawan.
- Belum maksimalnya pembinaan yang dilakukan oleh Dinarpus ke perpustakaan binaan antara lain perpustakaan masyarakat dan perpustakaan sekolah karena terbatas sumber daya yang ada.
- Budaya dan minat baca masyarakat yang masih perlu distimulasi dan ditingkatkan guna meningkatkan pengetahuan dan kualitas hidup masyarakat.
- Belum maksimalnya peran OPD untuk menyerahkan hasil karya cetak/karya rekam yang dihasilkan kepada Dinarpus guna diinformasikan dan dipublikasikan kepada masyarakat.
- Masih kurangnya alokasi anggaran yang memadai untuk pengembangan perpustakaan kelurahan, perpustakaan dan perpustakaan sekolah.

2. Solusi

Dalam menyikapi permasalahan urusan perpustakaan yang ada, upaya solusi yang dilakukan antara lain:

- Mengajukan usulan ke BKPPD guna pemenuhan tenaga fungsional pustakawan sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang ditetapkan oleh Perka Perpustnas RI.
- Pembinaan yang dilakukan oleh Dinarpus ke perpustakaan binaan antara lain perpustakaan masyarakat dan perpustakaan sekolah oleh tenaga kegiatan yang mempunyai latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan.

- Bekerjasama dengan sekolah terutama sekolah usia dini (TK/PAUD & SD) untuk melakukan kunjungan dan pengenalan perpustakaan.
- Menghimbau kepada OPD untuk menyerahkan hasil karya cetak/karya rekam yang dihasilkan kepada Dinarpus guna diinformasikan dan dipublikasikan kepada masyarakat.
- Bekerjasama dengan dinas pendidikan untuk mengawal upaya pengembangan perpustakaan sekolah melalui dana RAPBS dan pengembangan perpustakaan kelurahan serta masyarakat dengan OPD terkait

3. Peluang

- Informasi serta ilmu pengetahuan dapat diproduksi dan didistribusikan secara cepat melalui media online
- Penyebaran informasi lebih luas dan menjangkau ke daerah-daerah melalui perpustakaan digital
- Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diketahui secara up to date melalui informasi terkini
- Menstimulus pustakawan untuk meningkatkan kompetensi dirinya
- Sarana publikasi dan sosialisasi lebih beragam

3.2.2.18. Kearsipan

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Kearsipan di Kota Pekalongan dilaksanakan 2 (dua) program yakni Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan yang terdistribusi dalam 3 indikator Kinerja Program, dengan realisasi sebanyak 2 (dua) indikator yang mencapai target dan 1 (satu) indikator yang belum mencapai target.

1. Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.214 Target dan Capaian Indikator
Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase pembinaan kearsipan yang ditindaklanjuti	33,30	persen	-	33,30
2	Persentase jumlah OPD yang dilakukan audit	100,00	Persen	-	53,33

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2020

Persentase pembinaan kearsipan yang ditindaklanjuti, target 2019 33,30% sedangkan capaian sebanyak 22 SKPD dari 66 SKPD atau $22 \times 100 / 66 = 33,33\%$. Persentase jumlah OPD yang dilakukan audit, target 100% sedangkan capaiannya hanya 16 OPD yang dapat diaudit, $16 \times 100 / 30 = 53,33\%$

2. Program Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.215 Target dan Capaian Indikator
Program Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Arsip yang dilestarikan	9.000,00	Arsip	-	9.296

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2020

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 188.000.000,- dengan realisasi Rp. 160.942.000,- (*unaudited*) melalui 3 (tiga) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 4 indikator. Sampai dengan akhir 2019,3 (tiga) indikator tercapai dan 1 (satu) indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.216 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

**Tabel 3.216 Target dan Capaian Kinerja Output pada
Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan**

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data	Jumlah OPD yang dilaksanakan Audit Kearsipan	OPD	16	16	16
2	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Inhouse training	kegiatan	2	2	2
		Jumlah Pelaksanaan Pameran Kearsipan	kali	2	2	2
3	Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal	Penyusunan/Penerbitan Naskah sumber arsip	Buku	200	200	80

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2020

Pada program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan pada kegiatan Penelusuran Sejarah Lisan dan Kearifan Lokal dengan Indikator Output penerbitan Naskah Sumber Arsip ditarget 200 buku akan tetapi capaiannya hanya 80 buku.

Target penerbitan buku sejumlah 200 eksemplar tidak terpenuhi disebabkan adanya petunjuk dari Walikota selaku objek penulisan menghendaki buku dicetak dalam bentuk edisi lux/eksklusif pada hard cover sehingga yang semula anggaran untuk 200 buku hanya cukup untuk ongkos 80 buku saja.

2. Program Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 482.000.000,- dan realisasi 461.833.485,- (*unaudited*) melalui 3 (tiga) kegiatan, dengan 4 indikator output. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 3 (tiga) indikator tercapai dan 1 (satu) indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.217 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.217 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Jumlah berkas arsip yang dipelihara	Berkas	94.186	94.186	94.186
2	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah	Jumlah berkas arsip yang didata dan ditata	berkas	17.000	17.000	10.797
		Jumlah berkas arsip yang dimusnahkan	berkas	8.000	8.000	12.049
3	Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Jumlah berkas arsip vital yang diduplikasi	Berkas	20.000	20.000	25.240

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2020

Pada Program pengelolaan dan pelestarian Arsip pada Kegiatan pendataan dan penataan Dokumen/Arsip Daerah, pada Indikator Output jumlah berkas arsip yang didata dan ditata target 17000 berkas tetapi capaiannya hanya sebesar 10,797 berkas. Target pendataan dan penataan arsip sebanyak 17,-0 berkas tidak terpenuhi karena sebagian tenaga pendataan dan penataan harus melaksanakan pekerjaan lain disamping harus melakukan pendataan dan penataan, yaitu menyusun daftar inventaris arsip dan menyeleksi arsip kategori musnah yang harus diselesaikan dalam waktu yang bersamaan.

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Terbatasnya jumlah personil pelaksanaan audit ;
- Terbatasnya waktu yang tersedia; dan
- Materi audit yang rumit sehingga butuh waktu cukup banyak sementara masih banyak pekerjaan lain yang harus diselesaikan dalam waktu yang sama.

2. Solusi

- Menambah personil yang dibekali dengan materi audit untuk menambah jumlah pelaksana audit;
- Audit dimulai lebih awal sehingga cukup waktu yang tersedia.

3. Peluang

- Adanya landasan hukum
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun tentang Kearsipan;
- Perka ANRI Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan;
- Keputusan Kepala Arsip Nasional R.I. Nomor 53 Tahun tentang Instrumen Audit Kearsipan.
- Adanya komitmen pejabat pemerintah untuk memperbaiki tata kelola kearsipan;

- Adanya dukungan Anggaran.



Gambar 3.111 Penyerahan penghargaan dari ANRI

Sumber : Dinarpus Kota Pekalongan, 2020

3.2.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

3.2.3.1. Kelautan Dan Perikanan

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mendukung peningkatan produksi Perikanan di Kota Pekalongan dilaksanakan 3 (tiga) program yakni Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Program Pengembangan Agribisnis Budidaya Perikanan, Program Pengembangan Technopark Perikanan yang terdistribusi dalam 7 indikator Kinerja Program, dengan realisasi sebanyak 6 indikator yang mencapai target dan 1 indikator belum mencapai target.

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini diukur dengan 3 (tiga) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.218 Target dan Capaian Indikator Program Pengembangan Perikanan Tangkap

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap	2,00	persen	-4,70	13,23
2	Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI	2,00	Rp. Milyar	-4,70	13,23
3	Nelayan yang dibina	8,00	persen	11,14	11,83

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020

a. Peningkatan nilai produksi perikanan tangkap

Nilai produksi perikanan tangkap di TPI Kota Pekalongan menunjukkan angka yang fluktuatif. Hal ini bisa dilihat pada kurun waktu 2017 jumlah nilai produksi ikan tangkap sebesar Rp 164.608.434.000,- pada tahun 2018 menurun menjadi Rp 156.811.357.000,-. Namun demikian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi

Rp.177.561.710.000,- atau terjadi **peningkatan** nilai produksi perikanan tangkap sebesar Rp. 20,8 Milyar (13.23%) melebihi target Tahun 2019 sebesar 2%.

Tabel 3.219 Nilai Produksi Perikanan Tangkap di TPI Kota Pekalongan

Tahun	Produksi (kg)	Nilai Produksi (Rp)
2015	14.730.900	188.579.000.000
2016	15.641.111	209.626.606.000
2017	10.474.512	164.608.434.000
2018	10.980.029	156.811.357.000
2019	14.991.858	177.561.710.000

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020

b. Peningkatan Pendapatan Daerah bersumber dari TPI

Pada Tahun 2018 realisasi PAD sebesar 4.704.340.710,- dan Tahun 2019 realisasi sebesar Rp. 5.326.851.300,- mengalami peningkatan sebesar 13,23% melebihi target Tahun 2019 sebesar 2%. Peningkatan pendapatan daerah bersumber TPI dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.220 Realisasi PAD Bersumber dari TPI

Tahun	PAD
2015	5.621.298.630
2016	6.288.798.180
2017	4.938.253.020
2018	4.704.340.710
2019	5.326.851.300

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020

c. Nelayan yang dibina

Jumlah nelayan yang telah mempunyai kartu nelayan : 1.395 orang, yang dibina Tahun 2019 sejumlah 870 nelayan atau 11,83% lebih tinggi dari tahun 2018 sejumlah 778 nelayan. Pembinaan nelayan ini melalui kunjungan perorangan, kelompok, sosialisasi peraturan pemerintah, pelatihan SDM nelayan , bintek, akses permodalan perbankan (Bankebel), alih usaha nelayan pada musim paceklik (budidaya lele, nila, udang, diversifikasi pengolahan ikan bagi keluarga nelayan).

2. Program Pengembangan Agribisnis Budidaya Perikanan

Program ini diukur dengan 3 (tiga) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.221 Target dan Capaian Indikator Program Pengembangan Agribisnis Budidaya Perikanan

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Peningkatan produksi perikanan budidaya	5,00	persen	7,4	0,7

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian	Capaian
2	peningkatan konsumsi makan ikan	6,00	persen	18,7	NA
3	persentase pembudidaya yang dibina	30,00	persen	30	31,66

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020

a. Peningkatan produksi perikanan budidaya

Produksi perikanan budidaya Tahun 2019 mengalami peningkatan dari Tahun 2018 sebesar 1.745.200 Kg menjadi 1.757.460 Kg atau peningkatan sebesar 0,70%. Meskipun mengalami peningkatan produksi dari tahun sebelumnya, namun peningkatan tersebut relatif kecil dan dibawah target peningkatan tahun 2019 sebesar 5%. Peningkatan produksi (Kg) dan nilai produksi (Rp.) perikanan budidaya Kota Pekalongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.222 Realisasi Produksi Perikanan Budidaya

Tahun	Produksi (kg)	Nilai Produksi (Rp)
2016	1.502.000	26.213.120.000
2017	1.625.208	22.631.340.000
2018	1.745.200	27.028.518.000
2019	1.757.460	29.404.036.000

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020

b. Peningkatan konsumsi makan ikan

Angka konsumsi ikan di Kota Pekalongan Tahun 2019 belum dirilis oleh BPS. Angka konsumsi ikan di Kota Pekalongan Tahun 2018 sebesar 31,7 Kg / kapita. Tabel angka konsumsi ikan tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.223 Angka Konsumsi Ikan Kota Pekalongan

Tahun	Angka Konsumsi Ikan
2016	25,2
2017	26,7
2018	31,7
2019	NA

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020

c. Persentase pembudidaya yang dibina

Jumlah pembudidaya yang dibina sebanyak 265 orang, sedangkan jumlah pembudidaya sebanyak 837 orang. Jadi persentase pembudidaya yang bina sebanyak 265 dibagi 837 kali 100% atau 31,66%.

3. Program Pengembangan Technopark Perikanan

Program ini diukur dengan 3 (tiga) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.224 Target dan Capaian Indikator
Program Pengembangan Technopark Perikanan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Peningkatan produksi perikanan budidaya	5,00	persen	55	57

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020

Pada Tahun 2019 jumlah tenant ada 9 dan non tenant 13, sedangkan Tahun 2018 jumlah tenant 9 dan non tenant 5. Peningkatan tenant dan non tenant sebanyak 22 dikurang 14 tenan = 8 tenant atau 57%.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.787.400.000,- dan realisasi Rp. 2.715.465.021,- melalui 5 (lima) kegiatan dengan indikator output sebanyak 5 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 5 (lima) indikator tercapai dan - (nihil) indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.225 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

**Tabel 3.225 Target dan Capaian Kinerja Output pada
Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	Jumlah terbinanya KUB di Kota Pekalongan	Kelompok	30	30	30
2	Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Bulan Fasilitasi Sarana & Prasarana Pelelangan TPI untuk meningkatkan PAD	unit	12	12	12
		Jumlah bulan fasilitasi gaji karyawan TPI	orang	12	12	12
		Jumlah bulan sewa gedung dan pelataran TPI	bulan	12	12	12
3	Pemberdayaan Nelayan pada Musim Paceklik	Jumlah terlaksana Pelatihan Nelayan & Keluarga Nelayan	Kali	0	0	0
		Jumlah nelayan yang dilatih di musim paceklik	nelayan	30	30	30
4	Fasilitasi pendataan sarana dan prasarana statistik perikanan tangkap	Jumlah tersosialisasinya dan terevaluasinya data statistik pelaku usaha & pelaku utama perikanan tangkap	orang	40	40	40
		Jumlah buku statistik perikanan tangkap	buku	10	10	10

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
5	Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan	Jumlah kegiatan bersih pantai	kali	3	3	5

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020

Pada program ini terdapat kegiatan pengelolaan tempat pelelangan ikan yang memfasilitasi pengelolaan TPI Kota Pekalongan dalam rangka Penerimaan Asli Daerah bidang perikanan dan kelautan. Adapun fasilitasi berupa pemeliharaan dan peningkatan sarpras pelelangan TPI, fasilitasi gaji karyawan TPI, dan sewa gedung dan pelataran TPI selama 12 bulan.

Pekerjaan Pengelolaan TPI berupa pengadaan atap/*awning* untuk menjaga kualitas ikan dari kapal *frezzer* yang akan dilelang, tidak langsung terkena panas matahari langsung ; pengadaan timbangan kecil digital yang mana sarpras ini untuk meningkatkan pelayanan penimbangan ikan yang di lelang menjadi lebih cepat; pemeliharaan peralatan kantor ini untuk pemeliharaan peralatan/sarpras perkantoran agar tetap berfungsi optimal untuk pelayanan; pengadaan penyusunan Perwal Pemberdayaan Nelayan dan Pengelolaan dan Retribusi TPI untuk memfasilitasi penyusunan dasar hukum/aturan tentang pelayanan UPTD TPI, memfasilitasi adanya dasar hukum/aturan tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan.



Gambar 3.112 Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020

2. Program Pengembangan Agribisnis Budidaya Perikanan

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 375.000.000,- dan realisasi Rp. 324.020.000,- dengan 6 (enam) kegiatan dengan indikator output sebanyak 7 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 7 (tujuh) indikator tercapai seluruhnya.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.226 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.226 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Agribisnis Budidaya Perikanan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pengembangan bibit ikan unggul	jumlah bulan terfasilitasinya operasional BBI (balai	bulan	12	12	12

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		benih ikan) kota Pekalongan				
		Jumlah tersedianya benih ikan unggul	ekor	5.000	5.000	5.000
2	Lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan	jumlah peserta yang mengikuti lomba cipta olahan kudapan berbahan baku produk perikanan	orang	70	70	70
3	Fasilitasi Promosi Produksi Hasil Perikanan	Jumlah keikutsertaan pameran unggulan perikanan	event	1	1	1
4	Gerakan Gemar Makan Ikan	Jumlah pelaksanaan gemar makan ikan	kali	1	1	1
5	Pendampingan pada kelompok pembudidaya ikan	Jumlah percontohan budidaya ikan sistem penculture	unit	5	5	5
6	Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan	Jumlah kategori lomba pembudidaya ikan pokdakan air tawar, air payau, dan ikan hias	Kategori	3	3	4

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020

Dalam program ini dilaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya ikan, dengan output kegiatan ini adalah jumlah kategori lomba pembudidaya ikan pokdakan air tawar, air payau dan ikan hias. Kegiatan ini juga memfasilitasi lomba ditingkat provinsi baik untuk kategori pokdakan, dan poklahsar.

Hasil Juara tingkat Kota Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

Tingkat Kota Pekalongan

- Budidaya air payau
 - Juara I : Kelompok Sido Mulyo Kelurahan Degayu
 - Juara II : Kelompok Tani Makmur Kelurahan Bandengan
 - Juara III : Kelompok Muara Rejeki Kelurahan Kandang Panjang
- Budidaya air tawar
 - Juara I : Kelompok Mina Mandiri Sejahtera Kelurahan Kuripan Kertoharjo
 - Juara II : Kelompok Larasati Kelurahan Banyurip
 - Juara III : Kelompok Mina Usaha Kelurahan Setono
- Budidaya ikan hias
 - Juara I : Kelompok Betta Batik Kelurahan Pasirkraton kramat
 - Juara II : Kelompok Betta Setono Fish Kelurahan Setono
 - Juara III : Kelompok Krapyak Fish Community Kelurahan Krapyak
- Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
 - Juara I : Kelompok Ulam Mulyo kelurahan Krapyak
 - Juara II : Kelompok Binangkit Kelurahan Kandang Panjang
 - Juara III : Kelompok Berkah Samudera Kelurahan Panjang Wetan

Tingkat Provinsi Jawa Tengah

- Kategori Udang
Juara III : Pokdakan Sidomulyo Kelurahan Krapyak
- Kategori Ikan Hias
Juara II : Pokdakan Betta Batik Kelurahan Pasirkraton kramat
- Kategori Poklasar
Juara II : Poklasar Ulam Mulyo Kelurahan Krapyak



Gambar 3.113 Sertifikat Juara III Kategori Udang Pokdakan Sido Mulyo Krapyak

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020

3. Program Pengembangan Technopark Perikanan

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 935.700.000,- dan realisasi Rp. 882.233.793,- dengan 4 (empat) kegiatan dengan indikator output sebanyak 4 (empat) indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 4 (empat) indikator tercapai dan – (nihil) indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.227 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.227 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Technopark Perikanan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Fasilitasi Sarpras Technopark Perikanan (Bankeu)	Jumlah pembangunan Sarpras(IPAL, Paving) di Kawasan Technopark	Paket	2	2	2
		Jumlah pengadaan sarpras (mesin pengering pakan ikan) di kawasan technopark	unit	0	0	0

2	Pendidikan dan Pelatihan Budidaya Ikan	Jumlah peserta yang mengikuti Bintek Cara Belajar Ikan Baik (CBIB)/Cara Pembenihan Ikan Baik (CPIB)	Orang	160	160	160
3	Pengembangan Keterampilan Masyarakat Perikanan	jumlah pelatihan masyarakat perikanan (P2MBG & tenant TP)	kali pelatihan	2	2	2
4	Pengelolaan technopark perikanan	jumlah bulan terfasilitasinya gedung technopark perikanan kota Pekalongan	bulan	12	12	12

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020

Dalam program ini difasilitasi kegiatan dari bantuan keuangan provinsi yaitu kegiatan fasilitasi sarpras technopark perikanan dengan alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp 675.000.000,- dan realisasi anggaran adalah sebesar Rp 631.368.000,- atau 93,54 %. Adapun keluaran kegiatan ini adalah pembangunan IPAL dan Pavingisasi di kawasan technopark 2 paket (Instalasi IPAL, 2 unit dan Pavingisasi 2.136m²) yang mana IPAL ini untu mengelola pembuangan Limbah 10 kios kuliner ikan sentra kuliler dan 2 cold storage di kawasan Technopark Perikanan serta terfasilitasinya penataan di kawasan technopark.



Gambar 3.114 IPAL di Kawasan Technopark Perikanan Kota Pekalongan

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020



Gambar 3.115 Pavingisasi Gedung Tenant di Kawasan Technopark Perikanan Kota Pekalongan

Sumber: DKP Kota Pekalongan 2020

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Permasalahan pada program pengembangan agribisnis budidaya perikanan sebagai berikut :

- berkurangnya lahan karena terinterusi air laut.
- faktor cuaca yaitu kemarau yang panjang Bulan Juli – Desember.
- Minimnya pasokan air tawar di kawasan budidaya ikan
- Sungai yang tercemar air limbah sehingga sumber air susah untuk sarana budidaya
- Banyak pembudidaya yang beralih profesi.
- Banjir Bulan Januari .
- Bantuan program asuransi nelayan hanya diberikan kepada nelayan berukuran dibawah 10 GT sedangkan untuk kapal diatas 10 GT belum adanya program asuransi nelayan
- Daya serap ikan hasil pelelangan masih terbatas yaitu sekitar 40 ton perhari disebabkan karena bakol-bakol tidak mampu mencari pangsa pasar.
- Terbatasnya kapal-kapal pengangkut produksi ikan di laut yang memiliki pangkalan di pelabuhan Pekalongan
- Adanya musim Baratan dan Timuran yang menyebabkan nelayan tidak bisa berangkat melaut untuk mencari ikan

2. Solusi

Solusi yang telah dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan nilai produksi perikanan antara lain :

- Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai dan perbaikan infrastruktur.
- Pendampingan pemberdayaan kelompok perikanan.
- Menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait.
- Asuransi nelayan diatas 10 GT diusahakan oleh pemilik kapal/ pengusaha kapal atas fasilitasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan dan instansi terkait.
- Melakukan lelang sample dan mendatangkan bakol-bakol dari luar Kota
- Melakukan pendekatan pengusaha untuk membuat kapal pengangkut yang berpangkalan di Kota Pekalongan.
- Melakukan pembinaan/ pelatihan pada saat musim paceklik untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kepada nelayan ataupun keluarganya.

3. Peluang

- Banyak pembudidaya yang beralih membudidayakan ikan hias ;
- Masih tersedianya lahan untuk pembenihan ikan nila dan lele ;
- Tersedianya lahan untuk tambak udang dan jaringan listrik ;
- Ada sejumlah pembudidaya yang memanfaatkan lahannya untuk komoditas ikan yang tahan dengan air payau.
- Kawasan *Technopark* Perikanan.
- Tersedianya asuransi budidaya (bantuan & mandiri)

- Adanya Perda Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan sebagai dasar pembinaan nelayan
- Terdapatnya sarpras perikanan tangkap meliputi coldstorage, galangan dan dogging kapal, pabrik es, serta SPBU/ SPBN Nelayan
- Adanya Kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara
- Keterbukaan untuk melakukan usaha sampingan nelayan dan keluarganya.
- Adanya pelelangan ikan yang berasal dari mobil berpendingin

3.2.3.2. Pariwisata

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Pariwisata di Kota Pekalongan dilaksanakan 2 (dua) program yakni Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata yang terdistribusi dalam 3 indikator Kinerja Program dengan capaian, 3 indikator sudah tercapai dan 0 indikator tidak tercapai.

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.228 Target dan Capaian Indikator
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase destinasi pariwisata yang dipromosikan	25,00	Persen	25	25

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan 2020

Dampak positif pelaksanaan program tersebut adalah tercapainya jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Pekalongan mencapai 720.816 wisatawan baik dari wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara.

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.229 Target dan Capaian Indikator
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	persentase destinasi wisata yang berkembang	100,00	Persen	100	100
2	Persentase pelaku pariwisata yang terbina	1,55	Persen	1,41	1,55

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan 2020

Tercapainya indikator program ini karena ada bantuan DAK untuk obyek wisata di Pantai Slambaran. Sedangkan obyek wisata yang diperbaiki pada tahun 2019 sejumlah dua lokasi yaitu Pasir kencana dan Pekalongan Mangrove Park.

Dampak positif pelaksanaan program tersebut adalah kunjungan wisata di Kota Pekalongan mencapai 720.816 wisatawan.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp.474.260.000,- dan realisasi Rp. 452.204.545,- (*unaudited*) melalui 5 (lima) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 5 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 5 indikator tercapai dan 0 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.230 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.230 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	Jumlah bulan promosi pariwisata	bulan	12	12	12
2	Fasilitasi dukungan pemasaran obyek wisata	Jumlah kegiatan yang mendapat fasilitasi	kegiatan	7	7	7
3	Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	Jumlah pameran nasional dan regional terlaksana	pameran	3	3	3
4	Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata	Jumlah kegiatan yang terselenggara (pemilihan duta wisata dan pokdarwis) tk.Kota dan Provinsi	Kegiatan	1	1	1
5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah usaha wisata yang termonitor	jenis usaha pariwisata	8	8	8

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan 2020

Pelaksanaan kegiatan pada program Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata ditujukan untuk mencapai target indikator program yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD. Berikut Kegiatan yang strategis dan mendapat perhatian cukup besar

1. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan diluar negeri, kegiatan ini di laksanakan sebagai sarana promosi pariwisata, yaitu berupa Festival Musik Reggae Party (17 Februari 2019), pentas hiburan IdulFitri dan Syawalan Show (1 syawal), pengadaan pakaian kerja lapangan dan pembuatan buku Calendar Events 2019 dan leaflet potensi pariwisata dan budaya.
2. Fasilitas dukungan pemasaran obyek wisata, berupa dukungan kegiatan Kliwonan show di OW. Pasir Kencana yaitu pementasan musik dangdut yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dan dukungan kegiatan Lomba Festival Band dalam rangka memperingati Hari Aids Sedunia tanggal 1 Desember 2019 serta Fashion Show dalam rangka memriahkan Hari Jadi Kota Pekalongan ke 113.
3. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata, kegiatan ini dialokasikan untuk memfasilitasi pameran Borobudur Travel Mart and ExpoSemarang pada bulan

Oktober 2019 dan Pameran Cilacap Expo pada Juli 2019 dan Pameran Inovasi dan Kreativitas di Gor Jetayu pada bulan September 2019

4. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata, hasil dari kegiatan ini adalah Pemilihan duta wisata tingkat kota dan tingkat jawatengah, yang dilaksanakan di Boyolali.



Gambar 3.116 Dokumentasi Pengembangan Pemasaran pariwisata

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan 2020

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 4.069.746.000,- dan realisasi Rp. 3.798.452.714,- (*unaudited*) melalui 5 (lima) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 6 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 6 indikator tercapai dan 0 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.231 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.231 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata	Jumlah obyek wisata yang terpelihara secara rutin/berkala	lokasi	3	3	3

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
2	Fasilitasi Pusat Informasi Wisata / Tourist Information Center	Jumlah workshop promosi pariwisata bagi biro perjalanan yang terfasilitasi	kegiatan	1	1	1
		Jumlah bulan TIC mendapatkan fasilitasi	bulan	12	12	12
3	Pengembangan obyek wisata	Jumlah pekerjaan dalam pengembangan obyek wisata	pekerjaan	7	7	7
4	Peningkatan koordinasi dengan komunitas dan pelaku usaha pariwisata	Jumlah paket wisata yang terkoordinasikan stake holdernya	paket wisata	3	3	3
5	Pengembangan daya tarik wisata (DAK)	Jumlah pekerjaan dalam pengembangan daya tarik wisata	pekerjaan	3	3	3

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan 2020

Pelaksanaan kegiatan pada program Program Pengembangan Destinasi Pariwisata ditujukan untuk mencapai target indikator program yang telah ditetapkan dalam RKPD dan RPJMD. Berikut Kegiatan yang menonjol dan mendapat perhatian cukup besar

- a. Pemeliharaan rutin / berkala obyek wisata, dialokasikan untuk pengurangan sirtu di sekitar pintu masuk dan memperindah dinding panggung hiburan dengan lukisan mural obyek wisata Pasir Kencana, pengurangan Obyek wisata Pekalongan Mangrove Park dikerjakan di sekitaran Kios Kuliner, sedangkan di Pantai Slamaran disekitar Gazebo.
- b. Pengembangan di obyek Slamaran dialokasikan pada:
 - Penataan Lingkungan Sekitar Panggung Kesenian Obyek Wisata Pantai Slamaran (Pengurangan Dan Pavingisasi).
 - Pembuatan Pagar Sebelah Timur Obyek Wisata Pantai Slamaran
 - Penataan Lingkungan Pintu Masuk Obyek Wisata Pantai Slamaran
 - Pengembangan Obyek Wisata Pasir Kencana, dialokasikan untuk Pembuatan Taman, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelistrikan dan Penerangan sedangkan di Obyek Wisata Pekalongan Mangrove Park dialokasikan untuk Penataan Lingkungan Obyek Wisata
- c. Fasilitasi pusat informasi wisata / Tourist information Center, kegiatan ini digunakan untuk membeli perlengkapan kantor dan administrasi sebagai langkah awal terwujudnya Pusat Informasi Wisata, pelaksanaan Kegiatan workshop, Honor TIC dan BP2KP.
- d. Peningkatan koordinasi dengan komunitas dan pelaku usaha pariwisata digunakan untuk pembinaan dan penguatan kerjasama dengan pelaku pariwisata.
- e. Pengembangan daya tarik wisata (DAK)



Gambar 3.117 Dokumentasi Pengembangan Destinasi Wisata

Sumber: Dinparbudpora Kota Pekalongan 2020

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Letak Kota Pekalongan yang berada di pesisir pantai utara mempunyai potensi wisata pesisir yang dapat dikembangkan. Potensi wisata pesisir menjadi daya tarik visual bagi Kota Pekalongan yang dapat memberikan kontribusi positif dalam pembangunan ekonomi daerah. Sebagian potensi wisata yang ada di kota Pekalongan banyak berada di area pantai, seperti Pantai pasir kencana, Pekalongan mangrove park dan Pantai slamaran. Adapun juga museum batik yang terletak di pusat Kota Pekalongan, dimana terdapat koleksi berbagai macam batik.

Namun dalam perkembangannya timbul berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan kawasan pesisir Kota Pekalongan. Naiknya air laut yang menimbulkan terjadinya rob di sekitar kawasan wisata selalu menimbulkan dampak yang secara langsung akan mempengaruhi minat wisatawan yang akan berkunjung di obyek wisata yang berada di pesisir ini karena akses menuju tempat wisata tersebut tidak bisa dilalui.

Tak hanya itu, minim dan rusaknya infrastruktur juga mempengaruhi minat berkunjung wisatawan. Seperti keadaan toilet yang kurang memungkinkan serta tidak updatenya pengembangan obyek wisata di Kota Pekalongan tidak seperti di daerah lainnya. Minimnya ekspose destinasi wisata di ruang publik maupun sosial media yang kurang juga

berdampak pada sedikitnya wisatawan karena terbatasnya informasi tentang wisata di Kota Pekalongan.

2. Solusi

Berbagai upaya untuk meningkatkan minat wisatawan ke Kota Pekalongan telah direncanakan dan akan segera dikerjakan. Pembangunan infrastruktur akan dilakukan di berbagai obyek wisata tersebut. Salah satu rencana pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu pembangunan Taman Wisata Laut Kota Pekalongan di Obyek Wisata Pantai Pasir Kencana oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Rencana pembangunan obyek wisata Pantai Slamaran melalui anggaran Dana Alokasi Khusus Tahun 2020, yaitu pembangunan :

- Gedung Tourist Information Center (TIC)
- Kamar mandi dan atau/ Toilet
- Mushola
- Plaza Kuliner
- Pedestrian/Jalur Pejalan Kaki
- Viewing Deck/Menara Pandang
- Tempat Parkir

Untuk mengekspose potensi pariwisata, Dinparbudpora bersama berbagai komunitas (Duta wisata, Genpi, dll) bekerjasama mempromosikan wisata Pekalongan baik secara langsung maupun lewat sosial media.

3. Peluang

Dengan pembangunan serta promosi tersebut, berkembangnya pariwisata di Kota Pekalongan akan menarik wisatawan dan berkunjung ke Kota Pekalongan. Di lain sisi akses menuju kawasan pariwisata yang sering terjadi rob sudah ditanggulangi dinas terkait sehingga nantinya akan memudahkan akses ke obyek wisata Kota Pekalongan.

3.2.3.3. Pertanian

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Pertanian di Kota Pekalongan dilaksanakan 4 (empat) program yakni Program peningkatan produksi hasil peternakan, Program peningkatan kapasitas SDM pertanian, Program peningkatan produksi hasil pertanian, Program peningkatan pelayanan peternakan dan kesehatan hewan yang terdistribusi dalam 5 indikator Kinerja Program dengan realisasi sebanyak 1 indikator yang mencapai target, dan 4 indikator belum mencapai target..

1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program yaitu persentase kenaikan hasil produksi peternakan dengan target dan ketercapaian sebagaimana disebutkan dalam tabel dibawah ini. Program ini dikatakan berhasil dan memperoleh capaian 6,96% dari target sebesar 4,00%.

**Tabel 3.232 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase kenaikan hasil produksi peternakan	4,00	Persen	5,3	6,96%

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan 2020

Komoditas peternakan selama tahun 2019 menunjukkan perkembangan positif dibanding tahun tahun sebelumnya. Produksi Komoditas peternakan tahun 2019 sebesar 6.643.370 kg, atau naik 6,96% dari produksi tahun 2018 sebesar 6.015.960 kg. Peningkatan produksi ternak disebabkan faktor terkendalinya penyakit hewan menular dan juga karena masuknya komoditas seperti telur dan daging ayam dari luar kota ke pasar tradisional, serta meningkatnya populasi unggas hasil pelaksanaan program bantuan hibah Budidaya Ayam Buras bagi 7 KSTM Pondok Pesantren di Kota Pekalongan.



**Gambar 3.118 Bintek dan bantuan Hibah Budidaya Ayam Buras
Di Kelompok Tani Santri Milenial (KSTM)
7 Pondok Pesantren Kota Pekalongan**

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan 2020

2. Program Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program yaitu Persentase kenaikan kelas kelompok tani, dengan target dan ketercapaian sebagaimana tabel dibawah ini. Program telah dilaksanakan namun persentase kenaikan kelas kelompok tani belum sesuai target, yaitu baru 6 kelompok yang naik kelas dari 7 kelompok yang ditargetkan. Hal ini dikarenakan pada saat penilaian kenaikan kelas kelompok tani dengan menggunakan format penilaian dari pusat, masih ada 1 kelompok tani yang belum mampu mencapai batas nilai sesuai yang disyaratkan.



**Gambar 3.119 Penyerahan Serifikat Kelas Kelompok Tani
oleh Walikota Pekalongan**

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan 2020

**Tabel 3.233 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	25,00	Persen	-	21

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan 2020

3. Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program yaitu Persentase peningkatan produksi padi dengan target dan ketercapaian sebagaimana tabel di bawah ini. Adapun capaian program pada tahun 2019 tidak tercapai / -8% hal ini antara lain akibat cuaca/musim. Pada saat musim penghujan terdapat lahan yang terdampak banjir sehingga puso dan musim kemarau yang cukup Panjang menyebabkan pertumbuhan tanaman terhambat dan juga mundurnya masa tanam berikutnya.

**Tabel 3.234 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase peningkatan produksi padi	3,00	persen	-	-8%

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan 2020

4. Program Peningkatan Pelayanan Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.235 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Pelayanan Peternakan Dan Kesehatan Hewan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase Peningkatan Layanan Pemotongan Hewan di RPH	2,00	Persen	-	-34%
2	Kejadian Penyakit Hewan Menular Strategis	2.400,00	Kasus	-	0

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan 2020

Indikator program Persentase peningkatan layanan pemotongan hewan di RPH belum tercapai karena adanya peraturan tentang larangan pemotongan hewan betina produktif. Selain itu juga karena adanya tren di kalangan masyarakat Pekalongan bahwa konsumsi daging / pemotongan hewan khususnya sapi hanya meningkat pada saat hari besar nasional.

Indikator program kejadian penyakit hewan menular strategis, mentargetkan sebanyak 2.400 kasus hewan yang terlayani tanpa melihat adanya penyakit hewan menular, adapun capaian yang diperoleh adalah sebesar 0 kasus atau 100%. Hal ini disebabkan pada tahun 2019 Kota Pekalongan bisa mengendalikan dan tidak mengalami kejadian penyakit hewan menular strategis. Pelaksanaan dari program ini antara lain :

Tabel 3.236 Pelayanan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan :

NO	JENIS PELAYANAN	2017	2018	2019	SATUAN
I	PUSKESWAN :				
	1. Pelayanan aktif/ Pengobatan massal	2.446	2.836	2.771	Ekor
	2. Pelayanan pasif di puskesmas	743	1.488	1.307	Ekor
	3. Pelayanan semi pasif di lapangan	-	-	297	Ekor
	4. IB	100	100	100	Ekor
	5. PKB	20	20	50	Ekor
	6. Vaksinasi AI (avian influenza)	8.250	12.254	11.450	Ekor
	7. Vaksinasi Rabies	400	400	350	Ekor
	8. Vaksinasi Brucellosis	200	200	200	Ekor
	9. Desinfeksi	10	10	15	Kali
	10. Pembinaan Kelompok dan KSTM	0	0	32	Kali
	11. Pengambilan dan pemeriksaan sampel parasiter	200	200	200	Ekor
	12. Pengambilan dan Pemeriksaan darah	200	200	200	Ekor
	13. Pelayanan Kesmavet	21	21	26	Lokasi
	14. Pengawasan Obat Hewan	8	10	4	lokasi
	15. Pemeriksaan Hewan Qurban	4.249	3.931	4.061	Ekor
	16. PDSR / ACT / Respon cepat	48	48	48	Lokasi
	17. Autopsi Ternak AUTS	5	3	4	Ekor
	18. Koleksi Hewan Kesayangan	2	2	6	Jenis
II	RPH PANJANG WETAN				
	1. Sapi	2.607	2.241	2.209	Ekor
	2. Kambing	1.479	1.261	918	Ekor
	3. Domba	705	706	767	Ekor
III	RPH Kuripan Kidul				
	1. Sapi	3.691	2.670	1.865	Ekor
IV	RPU Kuripan				
	1. Ayam kampung	135.400	134.500	135.000	Ekor
	2. Ayam petelur	91.100	89.800	90.000	Ekor
	3. Ayam Broiler	188.700	189.200	189.000	Ekor
	4. Itik	55.000	53.800	54.000	Ekor

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan 2020

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 304.500.000,- dan realisasi Rp. 290.143.500,- melalui 6 (enam) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 12 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 11 indikator tercapai dan 1 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.237 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.237 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pengembangan agribisnis peternakan	jumlah demplot percontohan budidaya ternak yang menerapkan Good Farming Practice	unit	1	1	1
2	Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB)	jumlah bulan fasilitasi unit layanan inseminasi buatan	bulan	12	12	12
3	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	terlaksananya sosialisasi penyakit hewan menular	kali	0	0	0
		terlaksananya pengobatan ternak massal	kali	0	0	0
		Jumlah Pelaksanaan sosialisasi penyakit hewan menular	kali	1	1	1
		Jumlah Pelaksanaan pengobatan ternak masal	kali	2	2	2
4	Pencegahan dan penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh ternak	jumlah orang yang mengikuti pelatihan penyembelihan ternak aman, sehat, utuh dan halal	orang	90	40	50
		terlaksananya Sosialisasi kesehatan masyarakat veteriner	orang	0	0	0
		Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi kesehatan masyarakat veteriner	kali	1	1	1
5	Penyuluhan kualitas dan gizi pakan ternak	jumlah orang yang mengikuti pelatihan pengolahan pakan ternak	orang	50	50	50
		jumlah alat pengolahan pakan	unit	1	1	1
6	Pengelolaan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat	jumlah dokumen pemantauan harga pasar komoditas peternakan	dokumen	1	1	1

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan 2020

Kegiatan Pengembangan agribisnis peternakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 110.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 101.850.000,- atau capaian sebesar 92,59%. Keluaran dari kegiatan ini adalah terbangunnya 1 unit demplot percontohan budidaya ternak yang menerapkan *Good farming practice*.

Kegiatan Pengelolaan Unit Layanan Inseminasi Buatan (ULIB) dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 14.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.446.000,- atau capaian sebesar 99,63%. Keluaran dari kegiatan ini adalah berupa pengelolaan rutin fasilitasi unit layanan inseminasi buatan selama satu tahun. Pelaksanaan kegiatan ini antara lain :

- a. Kegiatan Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 85.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 84.700.000,- atau capaian sebesar 99,65%. Kegiatan ini mempunyai 4 indikator keluaran, dengan capaian fisik sebesar 100% dari target yang telah ditetapkan. Indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu pelaksanaan sosialisasi penyakit hewan menular dan pengobatan ternak massal tidak terlaksana, jumlah pelaksanaan sosialisasi penyakit hewan menular sebanyak 1 kali kegiatan, jumlah pelaksanaan pengobatan ternak massal dengan target 2 kali kegiatan dan mendapat capaian sebanyak 2 kali kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini antara lain sebagai berikut :



Gambar 3.120 Pengobatan Hewan Masal Di Lokasi Usaha Peternakan

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan 2020

- b. Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit yang disebabkan oleh ternak dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 55.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 54.232.000,- atau capaian sebesar 98,60%. Output kegiatan ini mempunyai 3 indikator, yaitu Jumlah orang yang mengikuti pelatihan penyembelihan ternak aman, sehat, utuh dan halal, dari target sebanyak 90 orang yang mengikuti pelatihan terlaksana sebanyak 50 orang. indikator terlaksananya sosialisasi kesehatan masyarakat veteriner, dan indikator jumlah pelaksanaan sosialisasi kesehatan masyarakat veteriner sebanyak 1 kali kegiatan. Dalam rangka penyediaan bahan pangan asal hewan yang aman, sehat utuh dan halal, DINPERPA secara rutin melaksanakan pemantauan kesehatan bahan pangan asal hewan yang beredar di wilayah Kota Pekalongan, serta pemeriksaan kesehatan hewan qurban se Kota Pekalongan saat perayaan hari Raya Idul Adha sebanyak 4.061 ekor.



Gambar 3.121 Pemantauan Kesehatan Hewan Qurban Saat Idul Adha Di Seluruh Wilayah Kota Pekalongan

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan 2020

Kegiatan Penyuluhan kualitas dan gizi pakan ternak dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 20.722.500,- atau capaian sebesar 82,89%. Kegiatan ini mempunyai 2 indikator output yaitu indikator jumlah orang yang mengikuti pelatihan pengolahan pakan ternak dari target 50 orang yang mengikuti terlaksana sebanyak 50 orang. Dan indikator jumlah alat pengolahan pakan dengan target sebanyak 1 unit terlaksana sebanyak 1 unit alat pengolahan pakan. Pelaksanaan kegiatan ini antara lain sebagai berikut :

- c. Kegiatan Pengelolaan informasi permintaan pasar atas hasil produksi peternakan masyarakat dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 14.193.000,- atau capaian sebesar 94,62%. Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah tersusunnya jumlah dokumen pemantauan harga pasar komoditas peternakan sebanyak 1 dokumen dari 1 dokumen yang ditargetkan. Bentuk pelaksanaan kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut :

2. Program Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 230.000.000,- dan realisasi Rp. 223.113.400,- melalui 3 (tiga) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 4 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, sebanyak 4 indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.238 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.238 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kapasitas SDM Pertanian

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Peningkatan kemampuan lembaga petani	terlaksananya penilaian kelas kelompok tani	kelompok	0	0	0
		Jumlah kelompok yang dinilai kelas kelompok tani	kelompok	25	25	28
2	Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan	jumlah dokumen program penyuluhan pertanian	dokumen	5	5	5
3	Fasilitasi UPJA Kota Pekalongan	jumlah bulan terfasilitasinya kelompok unit pengelolaan jasa alsintan	bulan	12	12	12

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2020

- a. Kegiatan Peningkatan kemampuan lembaga tani, dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 50.000.000,- atau capaian sebesar 100%. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim penilai melalui kunjungan ke 28 kelompok tani yang ada di Kota Pekalongan, hasil dari kegiatan tersebut terdapat 6 kelompok tani mengalami peningkatan kelas kemampuan.
- b. Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/ perkebunan, dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- dan realisasi keuangan sebesar Rp. 59.100.000,- atau capaian sebesar 98,50%. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui beberapa sub kegiatan yaitu : penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (tk

Kecamatan & tk Kota); Kunjungan pembinaan kepada kelompok tani oleh PPL, Mantri Tani dan unsur Bid. PTPH Dinperpa Kota Pekalongan serta pengadaan sarana prasarana penyuluhan pertanian.

- c. Kegiatan Fasilitasi UPJA Kota Pekalongan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 114.013.400,- atau capaian 95,01%. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk pendampingan terhadap kelompok Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) Kota Pekalongan, melalui fasilitasi pelatihan-pelatihan, maupun pengadaan sarana prasarana pendukung kegiatan UPJA.



Gambar 3.122 Pelatihan Operator Alsintan

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2020

3. Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 448.500.000,- dan realisasi Rp. 444.578.190,- melalui 6 (enam) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 6 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, semua indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.239 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.239 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna	tersedianya alat dan bahan kultur jaringan	paket	0	0	0
		Jumlah alat dan bahan kultur jaringan yang diadakan	paket	3	3	3
2	Peningkatan sarana jaringan irigasi (DAK)	Jumlah jaringan irigasi tersier yang dibangun	unit	1	1	1
3	Peningkatan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman	terlaksananya pelatihan pembuatan pestisida hayati	orang	0	0	0
		Jumlah Pelaksanaan pelatihan pembuatan pestisida hayati	kali	1	1	4

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
4	Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida	tersusunnya dokumen rencana definitif kebutuhan kelompok	dokumen	0	0	0
		Jumlah dokumen rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang disusun	dokumen	1	1	1
5	Pengembangan kebun bibit	terkelolanya kebun bibit	bulan	12	12	12
6	Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian	terlaksananya pelatihan penanganan pasca panen	orang	0	0	0
		Jumlah Pelaksanaan pelatihan penanganan pasca panen	kali	1	1	1

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2020

- a. Kegiatan Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan tepat guna dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 49.892.000,- atau capaian sebesar 99,78%. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui persiapan sarana operasional Lab Kultur Jaringan yang ada di Dinperpa Kota Pekalongan.
- b. Kegiatan Peningkatan sarana jaringan irigasi (DAK) dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 208.500.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 208.500.000,- atau capaian 100%. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan sistem Swakelola Pihak Ketiga yaitu Kelompok Tani Subur Makmur Soko Duwet yang menjadi sasaran kegiatan peningkatan sarana jaringan irigasi tersebut.



Gambar 3.123 Peningkatan Jaringan Irigasi DAK Pertanian Th 2019

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2020

- c. Kegiatan Peningkatan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.875.250,- atau capaian sebesar 99,69%. Kegiatan tersebut dilakukan melalui sub kegiatan pelatihan pembuatan pestisida nabati dan pupuk organik cair di 4 kelompok tani se Kota Pekalongan, juga pelaksanaan pengendalian hama dan organisme penyakit tanaman di lahan petani yang terdampak OPT, secara serempak.



Gambar 3.124 Pelatihan pembuatan Pestisida Nabati & POC di Kelompok Tani

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2020

- d. Kegiatan Pengendalian pemakaian pupuk dan pestisida dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 35.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 33.535.000,- atau capaian sebesar 95,81%. Kegiatan tersebut dilakukan melalui sub kegiatan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) di 28 kelompok tani se Kota Pekalongan, juga rapat-rapat persiapan masa tanam selama tahun 2019.
- e. Kegiatan Pengembangan kebun bibit dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 89.920.340,- dengan capaian 99,91%. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui sub kegiatan pengelolaan lahan percontohan di BPP dan lingkungan Dinperpa Kota Pekalongan, pemeliharaan alat dan mesin pertanian serta pengadaan sarana prasarana edukasi pertanian di lingkungan Dinperpa Kota Pekalongan.
- f. Kegiatan Penanganan pasca panen dan pengelolaan hasil pertanian dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 22.855.600,- atau capaian sebesar 91,42%. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petani dalam mengelola hasil pertanian, yaitu melalui diselenggarakannya pelatihan pengolahan hasil pertanian dan penanganan pasca panen dengan peserta kelompok tani dan kelompok wanita tani .

4. Program Peningkatan Pelayanan Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.996.778.000,- dan realisasi Rp. 1.983.585.700,- melalui 5 (lima) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 8 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, sebanyak 8 indikator tercapai.

Untuk menjaga kesehatan hewan dan mencegah penularan penyakit hewan di Kota Pekalongan telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak yang berupa pengobatan ternak dan pemberian obat cacing, vaksinasi, pencegahan dan monitoring penyakit zoonosis, serta pelayanan pemeriksaan dan pengobatan di Puskesmas. Ditahun 2019 sebanyak 9.198 ekor hewan telah mendapatkan pengobatan dan vaksinasi.



Gambar 3.125 Sosialisasi Zoonosis

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2020

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.240 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.240 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Pelayanan Peternakan Dan Kesehatan Hewan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Penyediaan dan perbaikan sarana peternakan	jumlah alat laboratorium kesehatan masyarakat veteriner	paket	1	1	1
2	Fasilitasi operasional RPH	jumlah bulan terfasilitasinya rumah potong hewan	bulan	12	12	12
3	Fasilitasi operasional puskesmas	jumlah bulan terfasilitasinya operasional puskesmas	bulan	12	12	12
4	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	terlaksananya sosialisasi larangan pemotongan betina produktif	orang	0	0	0
		jumlah bulan terlaksananya pemeriksaan antemortem - postmortem ternak potong	bulan	12	12	12
		Jumlah Pelaksanaan sosialisasi larangan pemotongan betina produktif	kali	1	1	1
5	Penyediaan dan perbaikan sarana prasarana peternakan (DAK)	Terbangunnya Rumah Potong Hewan	unit	0	-	0
		Jumlah RPH Ruminansia yang dibangun	unit	1	1	1

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2020

- a. Kegiatan Penyediaan dan perbaikan sarana peternakan dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.000.000,- atau capaian 100%. Indikator output dari kegiatan ini adalah jumlah alat laboratorium kesehatan masyarakat veteriner sebanyak 1 paket dari 1 paket yang telah ditargetkan.
- b. Kegiatan Fasilitasi operasional RPH dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 106.600.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 103.765.500,- atau capaian 97,34%. Indikator output adalah jumlah bulan terfasilitasinya rumah potong hewan selama 12 bulan. Bentuk kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut :
- c. Kegiatan Fasilitasi operasional puskesmas dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 40.000.000,- atau capaian sebesar 100%. Indikator output adalah Jumlah bulan terfasilitasinya operasional Puskesmas selama 12 bulan. Adapun bentuk kegiatan tersebut antara lain sebagai berikut :
- d. Kegiatan Pengawasan perdagangan ternak antar daerah dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 17.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 13.662.000,- atau capaian sebesar 80,36%. Kegiatan ini mempunyai 3 indikator output yaitu indikator terlaksananya sosialisasi larangan pemotongan hewan betina produktif, indikator jumlah bulan terlaksananya pemeriksaan antemortem – postmortem ternak potong selama 12 bulan, dan indikator jumlah pelaksanaan sosialisasi larangan pemotongan betina produktif sebanyak 1 kali kegiatan dari 1 kali kegiatan yang ditargetkan. Pelaksanaan dari kegiatan ini antara lain sebagai berikut :



Gambar 3.126 Pengawasan Berkala Bahan Pangan Asal Hewan Di Pasar Modern

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2020

- e. Kegiatan Penyediaan dan perbaikan sarana prasarana peternakan dilaksanakan dengan anggaran DAK sebesar Rp. 1.808.178.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.801.158.200,- atau capaian sebesar 99,61%. Indikator output dari kegiatan ini berupa Terbangunnya / Jumlah RPH Ruminansia yang dibangun sebanyak 1 unit. Selama Tahun 2019, untuk menyediakan daging yang sehat dan halal, DINPERPA melaksanakan pelayanan penyembelihan hewan sapi, kerbau, kambing dan domba di RPH Panjang dan RPH Kuripan sebanyak 5.762 ekor, dengan kontribusi PAD sebesar Rp. 90.007.500,- namun demikian Pelayanan RPH semakin menurun disebabkan karena sarpras RPH terkena dampak intrusi air laut (Rob) di wilayah panjang wetan. Oleh karena itu sebagai solusi pada tahun 2019 mulai dibangun RPH baru di daerah Kertoharjo menggunakan biaya dari APBD kota Pekalongan dan DAK Pertanian, akan diselesaikan secara bertahap sampai Tahun 2021. Pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :



Gambar 3.127 Pembangunan RPH Kertoharjo Tahap I

Sumber: Dinperpa Kota Pekalongan, 2020

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Sarpras Rumah potong Hewan yang tergenang air rob menyebabkan pelayanan penyediaan daging yang higienis terganggu
- Pemotongan betina produktif di RPH Kota Pekalongan masih cukup tinggi
- Menyempitnya lahan budidaya ternak di wilayah Kota Pekalongan
- Merebaknya isu penyakit hewan menular baru (New emerging Disease)
- Penjualan bahan pangan asal hewan yang kurang memenuhi syarat ASUH di pasar tradisional, terutama pasar darurat Banjarsari.
- Permintaan alih fungsi lahan pertanian yang relative tinggi
- Terdapat lahan pertanian yang terdampak rob, dengan kadar salinitas yang lebih tinggi dari normal
- Berkurangnya tenaga kerja di bidang pertanian
- Penggunaan kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi masih sangat kurang
- Keluhan petani terhadap pelayanan penyedia Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

2. Solusi

- Memindahkan Rumah Pemotongan Hewan ke tempat yang memenuhi syarat
- Membentuk tim pengendalian pemotongan betina produktif yang melibatkan instansi dan aparat terkait
- Melakukan intensifikasi usaha ternak dengan memanfaatkan teknologi berwawasan lingkungan
- Mencegah dan mengendalikan penyakit hewan menular strategis dengan konsep One Health, terpadu bersama instansi terkait kesehatan dan lembaga pendidikan
- Meningkatkan peran masyarakat dan aparaturnya dalam proses penyediaan bahan pangan asal hewan yang Aman sehat Utuh dan Halal
- Melakukan pencermatan kondisi lapangan dan hanya emmerikan rekomendasi AFL apabila lahan dimaksud peruntukan di luar non pertanian sesuai RTRW Kota Pekalongan

- Mengajukan bantuan bibit padi tahan salinitas tinggi ke Pemerintah Pusat sebagai upaya agar petani yang terdampak rob tetap bias melakukan usaha tani
- Terus melakukan sosialisasi manfaat teknologi pertanian dan pelatihan penggunaan alat dan mesin pertanian sebagai solusi berkurangnya trenaga kerja dibidang pertanian
- Mendorong semua petani untuk menggunakan Kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan di lapangan
- Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan Asuransi Usaha Tani (AUTP) di kota Pekalongan

3. Peluang

- Kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat untuk benih bersertifikat, khususnya untuk padi khusus dan padi bebas residu di Tahun 2020
- Dukungan dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan implementasi penggunaan kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi
- Animo masyarakat yang cukup tinggi untuk mengikuti edukasi pertanian sejak dini, dengan mengirimkan siswa PAUD/TK/SD ke Dinperpa Kota Pekalongan

3.2.3.4. Perdagangan

Aktivitas perekonomian di Kota Pekalongan yang didominasi oleh aktivitas perdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan, juga ditopang oleh keberadaan pasar rakyat dan toko modern. Sektor perdagangan dan koperasi sangat memberikan kontribusi secara agregat yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan. Hal ini terbuktidengan semakin meningkatnya aktivitas perdagangan produk unggulan Kota Pekalongan diantaranya batik, ikan, tenun, konveksi dan aneka kerajinan lainnya berkembang dengan penuh inovasi dan kreativitas. Upaya Pemerintah dalam memfasilitasi dan menguatkan aktivitas usaha UMKM tersebut memberikan manfaat bagi keberlangsungan dan kepastian usaha UMKM, sehingga aktivitas bisnis UMKM Kota Pekalongan tetap terjaga dan mampu memenuhi pasar lokal, regional, nasional dan internasional.

Di samping didominasi aktivitasperdagangan produk unggulan yaitu batik dan perikanan juga ditopang oleh keberadaanpasar rakyat dan toko modern. Adapun jenis pasar rakyat dan toko modern seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.241 Jenis Pasar dan Toko
di Kota Pekalongan Tahun 2015-2019**

Jenis Pasar / Toko	2015	2016	2017	2018	2019
Sentra Perdagangan Batik	3	3	3	3	3
Pasar Tradisional	11	11	11	11	11
Toko	247	247	247	650	650
Kios	1.524	1.652	1.685	1.685	1.685
Toko Modern					
- Minimarket	26	26	41	42	43
- Supermarket	2	2	2	3	3
- Department store	4	4	4	3	3
- Hypermarket	2	2	2	1	1
- Perkulakan	0	0	0	0	0

Penyelenggaraan pembangunan perdagangan mencakup perdagangan dalam negeri dan perdagangan antar negara (ekspor dan impor), serta penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kota Pekalongan cukup tinggi dan menunjukkan kenaikan secara signifikan.

Pada tahun 2015 nilai PDRB lapangan usaha perdagangan (atas dasar harga berlaku) Rp. 1,701 Triliun. Kondisi ini terus mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2018 menjadi sebesar 2,195 Triliun. Meskipun persentase kontribusi PDRB mengalami penurunan, namun dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kinerja sektor perdagangan dalam menunjang aktivitas perekonomian Kota Pekalongan. Perkembangan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.242 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB di Kota Pekalongan Tahun 2015-2018

No	Keterangan		2015	2016	2017	2018
1.	Atas Dasar Harga Berlaku	PDRB Total (Rp. Juta)	7.778.271,60	8.507.535,11	9.287.961,80	10.114.280
		PDRB Perdagangan (Rp. Juta)	1.701.212,30	1.847.835,-	2.019.945,16	2.195.300
		Kontribusi	21,87%	21,72%	21,75%	21,70%
2.	Atas Dasar Harga Konstan 2010	PDRB Total (Rp. Juta)	6.367.272,96	6.367.272,96	6.706.278,70	7.087.920
		PDRB Perdagangan (Rp. Juta)	1.342.161,54	1.407.425,41	1.487.771,72	1.570.070
		Kontribusi	21,08%	22,10%	22,18%	22,15%

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2020

Perkembangan ekspor bersih perdagangan terlihat dari kinerja peningkatan nilai ekspor perdagangan di Kota Pekalongan. Ekspor Kota Pekalongan cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2015 sebesar 17,340 Juta US\$, pada Tahun 2016 naik menjadi sebesar 19,081 Juta US\$. Akan tetapi mengalami penurunan di Tahun 2017 menjadi sebesar 17,883 Juta US\$. Tahun 2019 nilai ekspor kembali mengalami peningkatan dengan nilai sebesar 22,926 Juta US\$.

Tabel 3.243 Perkembangan Nilai Ekspor Kota Pekalongan Tahun 2015-2019

No.	TAHUN	QUANTITY/JUMLAH (Kg)	NILAI EKSPOR (US\$)
1.	2015	5.748.148,69	17.340.060,75
2.	2016	6.248.973,95	19.081.547,65
3.	2017	5.425.565,84	17.683.268,64
4.	2018	11.151.902,46	19.656.698,05
5.	2019	8.920.790,56	22.926.399,79

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2020

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Perdagangan di Kota Pekalongan dilaksanakan 5 (lima) program yakni Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan, Program Pengembangan Ekspor, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan, Program Pengembangan Pasar Tradisional yang terdistribusi dalam 8 Indikator Kinerja Program, dengan realisasi sebanyak 7 indikator yang mencapai target dan 1 indikator belum mencapai target.

1. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.244 Target dan Capaian Indikator
Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang	95,00	Persen	93,89	58,19
2	persentase peningkatan obyek sasaran pengawasan barang beredar	90,43	Persen	100	100

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, 2019

Dampak dari pelaksanaan Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan memberikan pelayanan tera dan tera ulang UTTP yang dipergunakan untuk kepentingan perdagangan dan industri yang bertujuan untuk memastikan kebenaran dari UTTP yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Metrologi Legal. Serta berdampak pada peningkatan pemantauan dan pengawasan barang beredar yang dilakukan secara rutin dipasar-pasar tradisional, modern, minimarket, supermarket, berdampak pada bahan yang diperdagangkan menjadi lebih aman, bebas dari bahan berbahaya.

Target indikator Peningkatan jumlah UTTP yang ditera ulang tidak tercapai, disebabkan karena :

- Adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, dimana terdapat beberapa alat wajib tera dimasukkan ke dalam kategori kalibrasi dan itu bukan termasuk salah satu tupoksi dari UPTD Metrologi Legal.
- Animo dan partisipasi wajib tera/pedagang di pasar-pasar rakyat untuk melakukan tera/tera ulang mengalami penurunan dan tingkat kesadaran wajib tera ulang mengalami penurunan;

2. Program Pengembangan Ekspor

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.245 Target dan Capaian Indikator
Program Pengembangan Ekspor**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Ekspertir di Kota Pekalongan	16	pelaku usaha	19	21

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, 2019

Dampak pelaksanaan Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor adalah peningkatan UMKM eksportir baru di Kota Pekalongan yang memahami tata cara ekspor yang benar, peningkatan volume dan nilai ekspor perdagangan Tahun 2019 sebesar 22,926 Juta US\$ dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2018 sebesar 19,656 Juta US\$ atau naik sebesar 16,63 %.

3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini diukur dengan 3 (tiga) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.246 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**

No.	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Satuan		
1	Pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi melalui even pameran	12,00	UMKM	14	16
2	Pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi Pekalongan Batik Night Market	60,00	UMKM	60	60
3	Pelaku usaha yang difasilitasi sarana promosi melalui E-Marketplace	70,00	UMKM	70	70

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, 2019

Pelaksanaan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha perdagangan antara lain yaitu :

- Pengembangan akses pemasaran bagi produk UMKM dengan adanya peningkatan fasilitas dan sarana promosi perdagangan baik melalui even pameran nasional maupun melalui media promosi Teknologi Informasi atau E-Marketplace.
- Pelaku usaha / UMKM dapat memasarkan produknya ke daerah dan bahkan sampai ke Luar Negeri yaitu pada pameran TEI (Trade Expo Indonesia), ada beberapa Negara yang tertarik dengan produk UKM Kota Pekalongan terutama batik dan melakukan transaksi / ekspor sehingga dapat meningkatkan ekspor di Kota Pekalongan.
- Peningkatan promosi dan pemasaran bagi produk unggulan batik melalui peningkatan sarana dan prsarana Pekalongan Batik Night Market di Grosir Batik Setono, dan Pasar Grosir Gamer.

4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.247 Target dan Capaian Indikator
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	kawasan tertib PK5	7	lokasi	7	7

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, 2019

Pelaksanaan Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan memberikan dampak positif bagi pembinaan dan penguatan kelembagaan serta penataan kawasan pedagang kakilima (PK5) dikawasa-kawasan strategis di Kota Pekalongan.

5. Program Pengembangan Pasar Tradisional

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.248 Target dan Capaian Indikator Program Pengembangan Pasar Tradisional

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase pemenuhan persyaratan teknis SNI Pasar Rakyat	26,57	Persen	-	26,57

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM, 2019

Pelaksanaan Program Pengembangan Pasar Tradisional memberikan dampak positif bagi pengembangan usaha perdagangan antara lain yaitu :

- Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi dibidang perdagangan, yaitu peningkatan sarana distribusi perdagangan Pasar Tradisional antara lain Pembangunan Pusat Kuliner dan Fashion Sugihwaras, Pembangunan Pasar Senggol Baru di Kuripan, serta peningkatan dan pemeliharaan sarana prasarana bangunan pasar di Kota Pekalongan.
- Peningkatan sarana dan prasarana pasar untuk memenuhi persyaratan teknis SNI Pasar Rakyat, yaitu Pasar Podosugih yang ditargetkan di tahun 2021.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 401.000.000,- dan realisasi Rp. 394.487.500,- (*unaudited*) melalui 2 (dua) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 2 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 1 indikator tercapai dan 1 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.249 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.249 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	Jumlah Kepokmas yang akan dipantau harga dan distribusinya di pasar rakyat dan toko swalayan	obyek	85	85	85
2	Tera/tera ulang Peralatan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Jumlah wajib tera ulang yang akan mengikuti sosialisasi sidang tera ulang	UTTP	6.298	6.298	3.665

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2020

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Perlindungan Konsumen dan pengamanan Perdagangan adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dengan obyek pemantauan meliputi : pasar tradisional/rakyat dan

pasar modern, toko kelontong, mini market, super market, warung sembako, kios makanan minuman, distributor dan pengecer pupuk bersubsidi, SPBU, Agen, pangkalan dan pengecer LPG 3 kg, serta toko besi dan bangunan.

Pengawasan dilakukan bekerjasama dengan dinas terkait meliputi :

- BPPOM Semarang, Pertamina Semarang, Dinas Kesehatan Kota Pekalongan
- Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pekalongan, Bagian Humas Setda Kota Pekalongan, Polres Kota Pekalongan, Satpol PP Kota Pekalongan dan Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan.
- Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kota Pekalongan.



Gambar 3.128 Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2020

Tujuan dari kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa adalah sebagai berikut :

- Pengawasan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat sebagai salah satu upaya pengawasan pasokan, distribusi, ketersediaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat telah dilaksanakan secara rutin terhadap komoditi yang beredar di Kota Pekalongan dengan data terlampir
- Pengawasan barang bersubsidi dilakukan sebagai upaya menjaga kelangsungan distribusi sesuai aturan yang berlaku.

Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa dilaksanakan dengan APBD Kota Pekalongan pagu anggaran sebesar Rp 113.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 110.370.000,- (97,67%). Ketidaktercapaian indikator output telah dijelaskan dalam capaian program.

b. Kegiatan Tera/Tera Ulang Peralatan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

Kegiatan Tera/Tera Ulang Peralatan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bagi pedagang pasar berupa sosialisasi pelaksanaan sidang tera ulang dengan narasumber dari Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan RI, Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional II Yogyakarta, MUI Kota Pekalongan.

Sosialisasi diikuti oleh perwakilan pemilik UTTP dan perwakilan instansi terkait sebanyak 200 peserta, terdiri dari : Perwakilan pedagang pasar rakyat, Perwakilan toko

swalayan, Perwakilan toko-toko pemilik alat UTTP, Perwakilan Apotik, SPBU se Kota Pekalongan, Perwakilan Agen dan Pangkalan Gas, dan Perwakilan Rumah Sakit.

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi tera/tera ulang dan UTTP pedagang pasar memberikan manfaat sebagai berikut :

- Kesadaran para pelaku usaha pemilik alat UTTP untuk melaksanakan tera ulang.
- Perlindungan konsumen dan pelaku usaha dalam hal tertib ukur alat UTTP.

Kegiatan fasilitasi tera/tera ulang dan UTTP pedagang pasar dilaksanakan dengan APBD Kota Pekalongan pagu anggaran sebesar Rp 288.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 284.117.500,- (98,65%).



Gambar 3.129 Tera/Tera Ulang Peralatan Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2020

2. Program Pengembangan Ekspor

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 200.000.000,- dan realisasi Rp. 182.035.500,- (*unaudited*) melalui 2 (satu) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 2 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 2 indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.250 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.250 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Ekspor

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor	Jumlah UMKM yang mengikuti pelatihan ekspor	UMKM	30	30	30
2	Pendampingan calon eksportir	Jumlah UMKM yang mengikuti pendampingan calon eksportir	orang	30	30	30

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2020

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Pelatihan dan bimbingan regulasi bisnis Internasional dan fasilitasi pameran produk ekspor.

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Regulasi Bisnis Internasional dan Fasilitasi Pameran Produk Ekspor bertujuan untuk :

- UMKM di Kota Pekalongan bisa melakukan ekspor secara mandiri tidak melalui agen.
- Membentuk calon-calon eksportir baru di Kota Pekalongan
- Mensosialisasikan tatacara atau prosedur ekspor impor yang benar
- Meningkatkan jumlah barang dan volume ekspor dari Kota Pekalongan

Dengan output dari kegiatan ini adalah 30 UMKM produk batik, *handycraft* dan makanan olahan, yang dilatih menjadi eksportir dengan narasumber dari praktisi yang ditunjuk oleh Dirjen PPEI - Kementerian Perdagangan RI.

Pelaksanaan Kegiatan pelatihan ini yaitu mencakup kesiapan ekspor, penentuan pasar potensial, strategi produk ekspor, latihan penentuan pasar dan produk potensial, strategi distribusi ekspor, strategi harga ekspor, latihan penentuan harga ekspor (studi kasus), strategi promosi untuk mencari pembeli, rencana pemasaran ekspor, latihan membuat rencana pemasaran ekspor (studi kasus ke negara tertentu).

Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Regulasi Bisnis Internasional dan Fasilitasi Pameran Produk Ekspordilaksanakan dengan APBD Kota Pekalongan pagu anggaran sebesar Rp 150.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 135.498.000,- (90,33%).



Gambar 3.130 Pelatihan dan Bimbingan Regulasi Bisnis Internasional dan Fasilitasi Pameran Produk Ekspor

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2020

- b. Kegiatan Pendampingan Calon Eksportir

Kegiatan Pendampingan Eksportir dan Calon Eksportir pada Dinas Perdagangan, Kopererasi dan UKM Kota Pekalongan di maksudkan adalah sebagai tindak lanjut dari Pelatihan Ekspor yang dilaksanakan sebelumnya yang bekerjasama dengan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan RI.

UKM yang telah mendapatkan pelatihan sebelumnya tersebut tidak berhenti disitu saja, dalam kegiatan pendampingan tersebut sekaligus untuk evaluasi dan mencari kendala-kendala dan permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Ukm dalam melaksanakan ekspor. Para narasumber/ Praktisi pendamping (eksportir nasional) maupun dari Akademisi dari BBPPEI Jakarta yang mana memonitoring sampai dimana UKM Pekalongan setelah mendapatkan Pelatihan tersebut dan kendala kendala apa saja yang menghambat dalam melaksanakan Ekspor.

Kegiatan Pendampingan Calon Ekspordilaksanakan dengan APBD Kota Pekalongan pagu anggaran sebesar Rp 50.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 46.537.500,- (93,08%).



Gambar 3.131 Pendampingan Calon Eksportir

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2020

3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 507.000.000,- dan realisasi Rp. 497.995.000,- (*unaudited*) melalui 3 (tiga) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 3 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 3 indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.251 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.251 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi	Jumlah UMKM yang mengikuti penyelenggaraan promosi produk unggulan daerah	UMKM	14	14	16
2	Pengelolaan sistem informasi manajemen perdagangan	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi promosi produk melalui E-Marketplace	UMKM	30	30	30

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
3	Penyelenggaraan batik night market	Jumlah UMKM yang difasilitasi Pekalongan Batik Night Market	UMKM	60	60	60

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2020

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi

Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi, dengan maksud dan tujuan adalah :

- Memfasilitasi pemasaran UKM Produk Unggulan Daerah Kota Pekalongan;
- Mempromosikan potensi Kota Pekalongan sebagai sentra produksi batik terbesar skala nasional;
- Meningkatkan wawasan para pengusaha produk unggulan daerah dalam pengembangan pasar lokal yang masih besar potensinya;
- Mempromosikan branding Kota Pekalongan sebagai World's City of Batik.

Output Kegiatan Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi adalah 14 UMKM, dengan realisasi yang tercapai adalah 16 UMKM yang terbagi dalam 4 event pameran sebagai berikut :

- Pameran Harkopnas Expo di Purwokerto, jumlah UMKM yang difasilitasi sebanyak 3 UMKM, yaitu : Batik Idaman, HR Craft dan Batik Zulfa.
- Pameran Indonesia City Expo (APEKSI) di Kota Semarang, jumlah UMKM yang difasilitasi 3 UMKM, yaitu : Batik Ayuni, Racik Kelir Craft dan UD Hasil Tiga Mulia.
- Pameran TMII Expo jumlah UMKM yang difasilitasi sebanyak 2 UMKM, yaitu : Likrik Craft dan Batik Mas Kencana
- Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) di BSD City Tangerang, jumlah UMKM yang difasilitasi 5 UMKM, yaitu : Batik Wawa, Batik Asti, Batik Nulaba, HP Art dan Batik Andin.
- Jember Fashion Carnival (JFC) International Exhibition jumlah UMKM yang difasilitasi 3 UMKM, yaitu : Batik Murtis, Batik Xoxa Kalungguh dan Ulfa Craft.

Kegiatan Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi, dilaksanakan dengan APBD Kota Pekalongan pagu anggaran sebesar Rp 200.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 194.881.000,- (97,44%).



Gambar 3.132 Penguatan Pasar Dalam Negeri Melalui Penyelenggaraan Promosi

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2020

b. Kegiatan Penyelenggaraan Batik Night Market

Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Batik Night Market Tahun 2019 menghasilkan manfaat sebagai berikut :

- Meningkatkan pemasaran batik di sentra – sentra batik yang ada di Kota Pekalongan juga dapat di lakukan pada malam hari bagi peminat batik yang berkunjung di Kota Pekalongan.
- Meningkatkan omset penjualan batik di Pasar Grosir batik Setono dan Pasar Grosir Batik Gamer.
- Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana di pasar Grosir Setono untuk menarik dan memikat pembeli pada malam hari.



Gambar 3.133 Penyelenggaraan Batik Night Market

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2020

c. Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perdagangan

Bentuk Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perdagangan adalah memfasilitasi promosi produk UMKM di Kota Pekalongan melalui jaringan pemasaran melalui teknologi informasi yaitu E-Marketplace.

Output kegiatan ini adalah jumlah UMKM yang difasilitasi promosi produk melalui E-Marketplace dengan target 30 UMKM dan realisasi 30 UMKM.



Gambar 3.134 Fasilitasi Promosi Produk UMKM Melalui E-Marketplace

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2020

4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 193.000.000,- dan realisasi Rp. 57.685.000,- (*unaudited*) melalui 1 (satu) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 2 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 1 indikator tercapai dan 1 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.252 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.252 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Kegiatan pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	Jumlah pedagang kakilima yang mendapatkan pembinaan penataan PK5	pk5	120	120	120
		Jumlah sosialisasi pedagang eks pasar banjarsari yang diselenggarakan	kali	4	4	0

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2020

Indikator output kegiatan Jumlah sosialisasi pedagang eks pasar banjarsari yang diselenggarakan yang ditargetkan 4 kali, tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan rencana relokasi Pembangunan Pasar Banjarsari ke Kelurahan Tirto tidak mendapatkan persetujuan dari DPRD Kota Pekalongan.

5. Program Pengembangan Pasar Tradisional

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 30.916.450.000,- dan realisasi Rp. 10.706.036.824,- (*unaudited*) melalui 9 (sembilan) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 10 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 9 indikator tercapai dan 1

indikator tidak tercapai yaitu Jumlah bangunan pasar yang dibangun (Bantuan Provinsi). Hal itu disebabkan pembangunan pasar banjarsari tidak bisa dilaksanakan karena lelang pembongkaran aset belum selesai dilaksanakan, selain itu juga karena masih ada status lahan dengan PT.DISC yang belum *clear and clean*.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.253 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPd-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.253 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Pasar Tradisional

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Penyediaan jasa kebersihan dan keamanan pasar	Jasa kebersihan, keamanan dan petugas pengelola pasar se Kota Pekalongan	org/bulan	79	79	79
2	Pengelolaan persampahan di lingkungan pasar tradisional	Jumlah alat pengangkut sampah di pasar	unit	2	2	2
3	Pembangunan pasar (DAK)	Jumlah pasar pusat kuliner dan fashion yang dibangun	unit	1	1	1
4	Peningkatan sarana dan prasarana pasar	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dibangun	Pasar	3	3	3
5	Intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi pasar	Jumlah petugas retribusi dalam peningkatan pendapatan daerah	orang	120	120	120
6	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	Jumlah petugas kebersihan pasar, petugas retribusi pasar dan pengelola pasar yang difasilitasi pakaian kerja lapangan	orang	157	157	157
7	Pemeliharaan bangunan pasar-pasar se-kota	Jumlah sarana dan prasarana pasar yang dilakukan pemeliharaan	Pasar	11	11	12
8	Pembangunan pasar (Bantuan Provinsi)	Jumlah bangunan pasar yang dibangun	Pasar	1	1	0
9	Pembangunan pasar	Jumlah bangunan pasar yang dibangun	Pasar	2	2	2
		Jumlah kajian yang disusun	dokumen	1	-	1
		Jumlah dokumen kajian yang disusun	dokumen	-	1	0

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2020

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Pengembangan Pasar Tradisional adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembangunan Pasar (DAK)

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pasar (DAK) adalah peningkatan dan pembangunan kios dan los Pasar Senggol Baru di Kuripan, untuk merelokasi pedagang di Pasar Sugihwaras. Output kegiatan ini adalah pembangunan Pasar Senggol Baru yang terdiri dari Blok A sebanyak 46 kios dengan dana DAK dan Blok B sebanyak 44 kios, menggunakan APBD Kota Pekalongan.



Gambar 3.135 Pembangunan Senggol Baru di Kuripan

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2020

Kegiatan Pembangunan Pasar Senggol Baru di Kuripan dilaksanakan dengan pagu anggaran Rp 2.800.000.000,- yang terdiri dari dana DAK senilai Rp 1.477.385.000,- dan APBD Kota Pekalongan senilai Rp 1.322.615.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.666.330.797,- (95,23%).

b. Kegiatan Pembangunan Pasar

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pasar ini adalah untuk pelaksanaan pembangunan Pusat Kuliner dan Fashion Sugihwaras dengan bangunan lantai 2 dengan jumlah kios sebanyak 123 kios yang terdiri dari 47 kios kuliner dan 76 kios fashion dan untuk Pembangunan Pasar Senggol Baru di Kuripan Blok C dengan jumlah kios sebanyak 66 kios dengan total pagu anggaran Rp 8.400.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.620.564.368,- atau sebesar 90,72%.



Gambar 3.136 Pembangunan Pusat Kuliner dan Fashion Sugihwaras

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2020

c. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pasar

Pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pasar adalah pengadaan 2 unit kendaraan roda tiga pengangkut sampah di pasar. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pasar, dilaksanakan dengan APBD Kota Pekalongan pagu anggaran sebesar Rp 814.150.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 794.342.500,- (97,57%).



Gambar 3.137 Pembangunan Shelter Parkir Dan Pavingisasi Pasar Podosugih

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2020



Gambar 3.138 Pembangunan Kios Untuk Sepeda dan Pavingisasi Pasar Sayun Baru

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2020

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan persampahan di lingkungan pasar tradisional adalah pengadaan 2 unit kendaraan roda tiga pengangkut sampah di pasar. Kegiatan Pengelolaan Persampahan di lingkungan Pasar Tradisional, dilaksanakan dengan APBD Kota Pekalongan pagu anggaran sebesar Rp 94.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 69.800.000,- (74,26%).



Gambar 3.139 Pengadaan Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Sampah Di Pasar Tradisional

Sumber: Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan, 2020

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- Dengan kegiatan pelatihan ekspor UMKM di Kota Pekalongan bisa mengetahui prosedur dan tatacara ekspor dan pengembangan pemasaran dan keuntungan ekspor secara mandiri. Dengan adanya kegiatan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) bagi UMKM yang memiliki keterbatasan modal usaha ada fasilitas kemudahan dari BPD Jateng dan bank lain.
- UMKM diberikan pemahaman pentingnya pemasaran ke luar negeri agar produknya dapat dikenal di Negara lain, salah satunya dengan mengikuti pelatihan ekspor, dan juga untuk meningkatkan pendapatan bagi UMKM tersebut.
- Kegiatan Sosialisasi Batik Night Market, Para Pedagang Pasar Grosir Setono-Gamer agar membuka tokonya hingga malam hari, sehingga masyarakat terutama daerah lain bisa berbelanja di malam hari. Dari pantauannya beberapa pedagang bahwa pada malam hari terutama weekend. Konsumen/pembeli batik banyak yang datang terutama dari luar kota Pekalongan. Perda telah memfasilitasi papan informasi adanya Batik Night Market.
- Pengoptimalan hari kalender khusus pekerjaan konstruksi pembangunan sarana dan prasarana pasar, penjadwalan ulang pelaksanaan dilapangan serta movev setiap hari dan minggu secara intensif sehingga supaya mutu dan kualitas tetap terjaga.

2. Solusi

- Dengan adanya pelatihan ekspor di Kota Pekalongan UKM dapat memasarkan produknya ke berbagai negara, para narasumber dari BBPPEI Kemendag menginformasikan peluang-peluang produk Kota Pekalongan yang diminati oleh negara lain, sehingga dapat meningkatkan pendapatan UKM.
- UKM yang kesulitan modal bisa memanfaatkan pinjaman dari BPD Jateng sehingga dapat menambah modalnya.
- Dengan data ekspor dari UKM bisa diketahui negara mana saja yang tertarik produk Kota Pekalongan sehingga dapat dikembangkan pemasarannya.
- Pemasaran produk/komoditi UKM tidak hanya dilokal saja tetapi dengan adanya pelatihan dan promosi-promosi UKM bisa berkembang sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.

- Dengan adanya exit toll, pedagang Grosir Setono, Gamer tidak perlu ragu-ragu untuk membuka tokonya dimalam hari, pada malam hari para konsumen/pembeli dari luar daerah banyak yang datang untuk berbelanja terutama pada hari libur.
- Setelah melalui koordinasi dengan stakeholder terkait dan mediasi melalui paguyuban maka hambatan permasalahan dapat diatasi sehingga pedagang mau direlokasi.

3. Peluang

- Dengan adanya pelatihan ekspor di Kota Pekalongan UKM dapat memasarkan produknya ke berbagai negara, para narasumber dari BBPPEI Kemendag menginformasikan peluang-peluang produk Kota Pekalongan yang diminati oleh negara lain, sehingga dapat meningkatkan pendapatan UKM
- UKM yang kesulitan modal bisa memanfaatkan pinjaman dari BPD Jateng sehingga dapat menambah modalnya.
- Dengan data ekspor dari UKM bisa diketahui negara mana saja yang tertarik produk Kota Pekalongan sehingga dapat dikembangkan pemasarannya.
- Pemasaran produk/komoditi UKM tidak hanya dilokal saja tetapi dengan adanya pelatihan dan promosi-promosi UKM bisa berkembang sehingga dapat meningkatkan penghasilannya.
- Dengan adanya exit toll, pedagang Grosir Setono, Gamer tidak perlu ragu-ragu untuk membuka tokonya dimalam hari, pada malam hari para konsumen/pembeli dari luar daerah banyak yang datang untuk berbelanja terutama pada hari libur.
- Setelah melalui koordinasi dengan stakeholder terkait dan mediasi melalui paguyuban maka hambatan permasalahan dapat diatasi sehingga pedagang mau direlokasi.

3.2.3.5. Perindustrian

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Perindustrian di Kota Pekalongan dilaksanakan 3 (tiga) program yakni Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Penataan Struktur Industri, Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri yang terdistribusi dalam 4 indikator Kinerja Program, dengan realisasi sebanyak 3 indikator yang mencapai target dan 1 indikator belum mencapai target.

1. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.254 Target dan Capaian Indikator
Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Pelaku IKM Batik Baru	10,00	IKM	10	10
2	Persentase IKM dalam LIK	100,00	Persen	0	0

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2020

Untuk capaian Indikator Program Pelaku IKM Batik Baru dengan formulasi Penambahan 10 IKM Baru setiap tahun, indikator ini mempunyai target sebesar 10 IKM dan telah tercapai melebihi target sebesar 10 IKM atau 100%. Adapun angka perolehan 10 IKM

batik baru ini diperoleh dari hasil pembinaan, pelatihan dan pemantauan secara berkala yang dilaksanakan oleh bidang Industri dengan melalui beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan baik pada tahun lalu atau tahun berjalan.

Untuk capaian Indikator Program Persentase IKM dalam LIK dengan formulasi Jumlah penempatan IKM dalam LIK yang sudah terbangun, indikator ini mempunyai target 100% dan belum bisa tercapai 100%. Hal ini disebabkan karena IKM-IKM yang direncanakan akan direlokasi belum bisa dilaksanakan/dipindahkan karena ada beberapa persyaratan yang belum bisa terpenuhi, tahapan yang baru dilaksanakan adalah baru sosialisasi dan negosiasi tahap awal.

2. Program Penataan Struktur Industri

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.255 Target dan Capaian Indikator Program Penataan Struktur Industri

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Produk Hukum Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah	1	produk	-	1

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2020

Untuk capaian Indikator Program Produk Hukum Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah dengan formulasi Perda Rencana Induk Pembangunan Industri Daerah yang tersusun, indikator ini mempunyai target 1 Perda (Peraturan Daerah) dan tercapai 100%. Penyusunan Perda ini telah dilaksanakan dengan melibatkan beberapa pihak yang terkait dan dengan menggunakan jasa konsultan dalam hal ini bekerja sama dengan unsur perguruan tinggi yaitu Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.

3. Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.256 Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Peningkatan Jumlah IKM Terlatih Peningkatan SDM Teknologi Industri	45,00	SDM	40	45

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2020

Untuk capaian Indikator Program Peningkatan Jumlah IKM Terlatih Peningkatan SDM Teknologi Industri dengan formulasi Jumlah IKM yang memperoleh pengetahuan teknologi industri, indikator ini mempunyai target 45 IKM dan tercapai 100%. Capaian indikator ini dapat tercapai diperoleh dari beberapa kegiatan antara lain berupa sosialisasi, pelatihan-pelatihan dan pembinaan-pembinaan serta monitoring yang dilakukan kepada para IKM secara periodik dan berkala.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.285.000.000,- dan realisasi Rp. 2.207.275.000,- (*unaudited*) melalui 4 (empat) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 6 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 6 indikator telah tercapai target.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.257 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.257 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pengembangan Proses Produksi Bersih	Jumlah IKM batik di Kota Pekalongan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan produksi bersih	IKM	30	30	30
2	Sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HKI, fasilitasi HKI dan merk	orang	40	40	40
3	Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Konveksi Batik	Jumlah IKM konveksi batik yang mengikuti pelatihan pengembangan produk	IKM	30	30	30
4	Pembangunan kluster di lingkungan industri kecil (LIK) (Bantuan Provinsi)	Terbangunnya sentra Lingkungan Industri Kecil (LIK)	blok	0	13	13
		Jumlah sentra LIK yang dibangun	blok	10	10	10
		Jumlah fasilitas umum yang dibangun	unit	3	3	3

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2020

Untuk capaian kinerja dari kegiatan Pengembangan Proses Produksi Bersih dengan Indikator outputnya Jumlah IKM batik di Kota Pekalongan yang mengikuti pelatihan dan pengembangan produksi bersih, kegiatan ini mempunyai target 30 IKM dan telah tercapai 100%. Kegiatan ini berbentuk sosialisasi mengenai penanganan limbah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Produksi bersih untuk mengurangi timbulnya limbah yang memerlukan biaya besar jika dilakukan pengolahan, karena limbah dan emisi merupakan hasil yang tidak diinginkan dari kegiatan industri.

Untuk capaian kinerja dari kegiatan Sosialisasi dan fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dengan Indikator outputnya Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi HKI, fasilitasi HKI dan merk, kegiatan ini mempunyai target 40 orang dan telah tercapai 100%. Kegiatan ini berupa

sosialisasi dan fasilitasi yang berkaitan dengan HAKI dan Merk bagi IKM-IKM yang belum memilikinya.

Untuk capaian kinerja dari kegiatan Penguatan Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Industri Tembakau Melalui Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk Konveksi Batik dengan Indikator outputnya Jumlah IKM konveksi batik yang mengikuti pelatihan pengembangan produk, kegiatan ini mempunyai target 30 IKM dan telah tercapai 100%. Kegiatan ini berupa sosialisasi dan pelatihan menjahit (konveksi) batik dan desain untuk IKM pemula, yang diharapkan dapat membantu meningkatkan hasil produksi yang berimbas pada peningkatan pendapatan bagi para IKM batik.

Untuk capaian kinerja dari kegiatan Pembangunan kluster di lingkungan industri kecil (LIK) dengan Indikator outputnya Terbangunnya sentra Lingkungan Industri Kecil (LIK), kegiatan ini mempunyai target 13 blok, dan tercapai 100%. Yang terdiri dari 10 unit bangunan LIK dan 3 unit bangunan untuk fasilitas umum.

2. Program Penataan Struktur Industri

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 158.000.000,- dan realisasi Rp. 151.227.500,- (*unaudited*) melalui 2 (dua) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 2 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 2 indikator tersebut telah tercapai 100%.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.258 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

**Tabel 3.258 Target dan Capaian Kinerja Output
Program Penataan Struktur Industri**

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pendataan Mesin Perusahaan Produksi Hasil Tembakau (cukai)	Jumlah industri tembakau yang terdata	industri	1	1	1
2	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah (RIPINDA)	Tersusunnya dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Daerah Kota Pekalongan	dokumen	1	1	1

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2020

Untuk capaian kinerja dari kegiatan Pendataan Mesin Perusahaan Produksi Hasil Tembakau dengan Indikator outputnya Jumlah industri tembakau yang terdata, kegiatan ini mempunyai target 1 industri dan telah tercapai 100%. Kegiatan ini berupa pendataan dan pembinaan bagi pengusaha dalam hal ini diambil sampel dari PT. Urip Sugiharto (Mitra Sampurna) serta pedagang-pedagang VAPE dan Tembakau racion di wilayah Kota Pekalongan.

Untuk capaian kinerja dari kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah (RIPINDA) dengan Indikator outputnya Tersusunnya dokumen Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Daerah Kota Pekalongan, kegiatan ini mempunyai target 1 dokumen dan telah tercapai 100%. Dalam penyusunan Perda RIPINDA ini telah melibatkan

beberapa pihak yang terkait dan menggunakan jasa konsultan dalam hal ini bekerja sama dengan unsur Perguruan Tinggi yaitu Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.

3. Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 107.500.000,- dan realisasi Rp. 105.193.500,- (*unaudited*) melalui 3 (tiga) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 3 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 3 indikator tersebut tercapai 100%.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.259 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.259 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan SDM Pelatihan Teknologi Industri

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Produk Manufaktur	Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi dan uji kompetensi sertifikasi profesi	IKM	30	30	30
2	Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi Industri Kecil Menengah (IKM)	Jumlah IKM ekonomi kreatif patchwork di Kota Pekalongan yang mengikuti pelatihan pengembangan produk	IKM	20	20	20
3	Fasilitasi sertifikasi produk dan proses produksi	Jumlah IKM makanan dan minuman yang difasilitasi perijinan PIRT dan sertifikat halal	IKM	30	30	30

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2020

Untuk capaian kinerja dari kegiatan Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Produk Manufaktur dengan Indikator outputnya Jumlah IKM yang mengikuti sosialisasi dan uji kompetensi sertifikasi profesi, kegiatan ini mempunyai 30 IKM dan telah tercapai 100%. Kegiatan ini berupa sosialisasi dan uji kompetensi sertifikasi profesi yang ditujukan untuk para IKM Batik hanya khusus untuk pelatihan Batik sehingga diharapkan akan meningkatkan kompetensinya dibidang membatik.

Untuk capaian kinerja dari kegiatan Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi Industri Kecil Menengah (IKM) dengan Indikator outputnya Jumlah IKM ekonomi kreatif patchwork di Kota Pekalongan yang mengikuti pelatihan pengembangan produk, kegiatan ini mempunyai 20 IKM dan telah tercapai 100%. Kegiatan ini berupa pelatihan pembuatan tas dari kain perca yang diikuti oleh 20 IKM dari 4 kecamatan di wilayah Kota Pekalongan.

Untuk capaian kinerja dari kegiatan Fasilitasi sertifikasi produk dan proses produksi dengan Indikator outputnya Jumlah IKM makanan dan minuman yang difasilitasi perijinan PIRT dan sertifikat halal, kegiatan ini mempunyai 30 IKM dan telah tercapai 100%. Kegiatan ini berupa sosialisasi dan sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat halal dan PIRT. Dengan perincian peserta PIRT sebanyak 26 IKM dan peserta halal sebanyak 4 IKM.



Gambar 3.140 Dokumentasi Kegiatan Pembangunan LIK

Sumber: Dinperinaker Kota Pekalongan, 2020

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

- Kesadaran para pelaku usaha masih kurang dalam hal pentingnya HAKI dan Green Industri yang berwawasan lingkungan.
- Terbatasnya lahan untuk Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dalam rangka pembinaan industri untuk naik kelas dari industri kecil menjadi sedang atau besar.
- Bahan baku industri sebagian besar masih import.
- Dampak Rob masih cukup dirasakan oleh para pelaku usaha di wilayah-wilayah terdampak dan cukup mengganggu aktifitas usaha/ industri.

- Keterlambatan lelang menjadikan kegiatan tidak selesai tepat waktu.
- Pelaku IKM terlambat mengumpulkan data sehingga kegiatan HKI tidak sesuai dengan rencana.
- Dana yang kurang menjadikan kegiatan tidak sepenuhnya bisa memaksimalkan target sasaran terutama pada kegiatan updating data IKM dan pelatihan.
- Sarana prasarana kantor belum maksimal, perlu ditambah komputer / Laptop untuk melaksanakan kegiatan administrasi.

2. Solusi dan Peluang

- Tersedianya anggaran untuk pembinaan industri.
- Pengaturan/ regulasi telah disiapkan dan ada guna mendukung berjalannya sektor industri.
- Banyak tumbuh industri diberbagai sektor yang bisa dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
- Predikat Kota Pekalongan sebagai Kota Batik dan Kota Kreatif dunia bisa menjadi daya ungkit untuk lebih menggiatkan tumbuh kembangnya industri-industri kreatif potensial lainnya.
- Dalam melaksanakan kegiatan di bidang industri, SDM dari IKM sangat membantu pelaksanaan kegiatan baik pelatihan, workshop, sertifikasi maupun kegiatan pendukung lainnya.
- Sarana prasarana di bidang industri sangat mendukung kegiatan seperti gedung pertemuan, kursi dan meja.

3.2.4. Penunjang Urusan Pemerintahan

3.2.4.1. Perencanaan Pembangunan

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Perencanaan di Kota Pekalongan dilaksanakan 5 (lima) Program yaitu Program Pengembangan Data/Informasi, Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, Program Perencanaan Infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Program Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial Dan Budaya. Dari 5 (lima) program pada urusan perencanaan pembangunan, terdapat 6 (enam) indikator Kinerja Program di tahun 2019, dengan realisasi sebanyak 5 (lima) indikator yang mencapai target dan 1 (satu) indikator tidak mencapai target.

Indikator yang tidak tercapai adalah Indikator Program Perencanaan Infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat dan Permukiman dengan target 100% dan tercapai 89%. Penyebab ketidaktercapaian pada program Perencanaan Infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat dan Permukiman yaitu terjadi gagal lelang pada kegiatan Penyusunan Masterplan Drainase, dan diusulkan kembali pada tahun 2020.

1. Program Pengembangan Data/Informasi

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.260 Target dan Capaian Indikator
Program Pengembangan Data/Informasi**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	persentase pemanfaatan data/informasi dalam perencanaan	100,00	Persen	-	112,72

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2020

Indikator Persentase Ketersediaan Data dan Indikator Single Database Daerah merupakan indikator kinerja program sampai dengan tahun 2018. Sedangkan mulai tahun 2019, indikator kinerja program disesuaikan menjadi Persentase Pemanfaatan Data/Informasi Dalam Perencanaan. Indikator program ini tercapai melebihi target yang sudah direncanakan, target 100% tercapai 112,72%. Indikator ini dihitung dengan formulasi jumlah kelompok data dalam e-database yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan sejumlah 195, dibandingkan dengan seluruh kelompok data dalam e-database sejumlah 173, dikalikan 100%.

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah diukur dengan 8 (delapan) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.261 Target dan Capaian Indikator
Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Penyusunan dokumen perencanaan Tahunan Tepat Waktu	100,00	Persen	-	100
2	Penyusunan Dokumen Evaluasi Triwulanan Tepat Waktu	100,00	Persen	-	100

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2020

Indikator Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah, Jumlah dokumen Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, Persentase jumlah program RKPD yang sesuai dengan program RPJMD, dan Kesesuaian program prioritas dengan isu strategis dan analisis permasalahan, merupakan indikator kinerja program sampai dengan tahun 2018. Sedangkan mulai tahun 2019, indikator kinerja program disesuaikan menjadi Penyusunan dokumen perencanaan Tahunan Tepat Waktu, dan Penyusunan Dokumen Evaluasi Triwulanan Tepat Waktu. Kedua indikator pada tahun 2019 tersebut tercapai 100%.

Penyusunan dokumen perencanaan Tahunan Tepat Waktu didapat dari penyusunan dokumen RKPD 2020, KUA-PPAS 2020, Perubahan RKPD 2019, KUPA-PPAS Perubahan APBD 2019, dan Rancangan Awal RKPD 2021, dimana dokumen-dokumen tersebut dapat disusun tepat waktu.

Penyusunan Dokumen Evaluasi Triwulanan Tepat Waktu didapat dari penyusunan dokumen Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2018, serta Evaluasi RKPD Triwulan I, II, dan III tahun 2019. Dokumen-dokumen tersebut juga dapat disusun tepat waktu.

3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.262 Target dan Capaian Indikator
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase Ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi	100,00	Persen	-	100

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2020

Indikator Persentase Ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi merupakan indikator baru yang digunakan mulai tahun 2019 sehingga tidak ada nilai capaian pada tahun 2018. Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang ekonomi didapat dari kegiatan-kegiatan di subbidang ekonomi dan menghasilkan dokumen-dokumen antara lain roadmap ekonomi kreatif, laporan koordinasi bidang ekonomi dan dokumen laporan pengembangan ekonomi lokal.

4. Program Perencanaan Infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.263 Target dan Capaian Indikator
Program Perencanaan Infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat
Dan Kawasan Permukiman**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat dan kawasan permukiman	100,00	Persen	-	89

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2020

Program Perencanaan Infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan program baru di tahun 2019, sehingga tidak ada capaian di tahun 2018. Untuk tahun 2019 indikator dari program ini yaitu Persentase ketersediaan dokumen perencanaan bidang infrastruktur wilayah, perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan target 9 (sembilan) dokumen, tercapai 8 (delapan) dokumen diantaranya dokumen RTBL (2 dokumen), Laporan kegiatan BKPRD, laporan kegiatan fasilitasi AMPL, laporan Koordinasi Sarana dan Prasarana, dokumen RP2KPKP, sedangkan dokumen yang tidak tercapai adalah dokumen masterplan drainase.

5. Program Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial Dan Budaya

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.264 Target dan Capaian Indikator
Program Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial Dan Budaya**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Pemsosbud	100,00	Persen	-	100

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2020

Program Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya merupakan program baru yang digunakan mulai tahun 2019, dengan indikator kinerja program yaitu Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Bidang Pemsosbud. Program ini menargetkan 8 (delapan) dokumen yang kesemuanya tercapai 100% diantaranya dokumen SDG's (1 dokumen), LP2KD dan Laporan TKPK (2 dokumen), laporan kegiatan KBP 4 tema (1 dokumen), laporan kegiatan PPRG (1 dokumen), laporan kegiatan PPRA (1 dokumen), laporan kegiatan Koordinasi Pemerintahan sosial dan budaya (1 dokumen), serta laporan kegiatan PMG (1 dokumen).

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Data/Informasi

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 86.000.000,- (delapan puluh enam juta) dengan realisasi sebesar Rp. 78.670.000,- (*unaudited*) melalui 2 (dua) kegiatan dengan indikator output sebanyak 2 (dua) indikator. Sampai dengan akhir tahun 2019, semua indikator output dapat dicapai dengan baik.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.265 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.265 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Data/Informasi

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen profil data PD	dokumen	1	1	1
2	Pendampingan pengembangan sistem informasi pembangunan daerah	Laporan kegiatan pengembangan sistim informasi pembangunan daerah	laporan	1	1	1

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2020

- a. Pertama, Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengkoordinasian dan forum data Kota Pekalongan, dengan menyusun dan sinkronisasi serta validasi data profil perangkat daerah, sehingga kesahihan atas data dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini memiliki indikator Jumlah dokumen profil data perangkat daerah. Indikator tersebut tercapai tepat waktu di tahun 2019.



**Gambar 3.141 Kegiatan Sosialisasi Juknis
Penyusunan Profil Perangkat Daerah**

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2020

- b. Kedua, Kegiatan Pendampingan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan atas bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah *yaitu* kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sub kegiatan Pendampingan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Kegiatan ini memiliki indikator output Laporan kegiatan pengembangan sistem informasi pembangunan daerah, yang tercapai tepat waktu di tahun 2019.

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.903.000.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 1.860.907.051,- (*unaudited*) melalui 7 (tujuh) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 7 (tujuh) indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, ketujuh indikator tersebut dapat tercapai dan tidak ada indikator yang tidak tercapai. Ketercapaian untuk kegiatan Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi, target outputnya sebanyak 4 (empat) dokumen, namun tercapai 5 (lima) dokumen. Keempat dokumen yang dijadikan target antara lain Laporan DAK Triwulan IV tahun 2018, Laporan DAK Triwulan I, II, III tahun 2019, serta penambahan 1 (satu) dokumen yang diminta oleh Provinsi *yaitu* Laporan DAK Triwulan IV sampai dengan bulan November 2019.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.266 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

**Tabel 3.266 Target dan Capaian Kinerja Output pada
Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Penyusunan rancangan RPJMD	Dokumen rancangan teknokratis RPJMD 2022-2026	dokumen	1	0	0
		Jumlah dokumen background study RPJMD yang disusun	dokumen	-	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
2	Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi	Laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK)	dokumen	4	4	5
3	Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Pekalongan	dokumen	3	3	3
4	Penyusunan KUA-PPAS APBD	Jumlah dokumen KUA PPAS Perubahan APBD 2019 dan KUA PPAS APBD 2020	dokumen	2	2	2
5	Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD	Laporan Evaluasi RKPD	dokumen	4	4	4
6	Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah jenis Buku LKPJ Walikota Pekalongan	dokumen	1	1	1
7	Pendampingan peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Perda perencanaan pembangunan daerah yang disusun	Perda	1	0	0
		Jumlah raperda perencanaan pembangunan daerah yang disusun	Raperda	0	1	1

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2020

- a. Pertama, Kegiatan Penyusunan Rancangan RPJMD yang dilaksanakan dalam rangka penyusunan RPJMD Kota Pekalongan tahun 2022-2026. Dokumen yang dihasilkan pada kegiatan ini adalah dokumen *background study* RPJMD Kota Pekalongan tahun 2022-2026. Indikator output kegiatan yang tercantum pada RKPD tahun 2019 belum sesuai dengan capaian indikator output yang diharapkan, sehingga pada perubahan APBD tahun 2019 indikator tersebut disesuaikan yang semula adalah Dokumen rancangan teknokratis RPJMD 2022-2026 menjadi Jumlah dokumen background study RPJMD yang disusun.



Gambar 3.142 Kegiatan Pembekalan Penyusunan Background Study RPJMD

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2020

- b. Kedua, Kegiatan Koordinasi perencanaan dan pelaporan dana APBN dan APBD Provinsi. Sebagai koordinator perencanaan dan pelaporan, Bappeda memiliki kewajiban untuk merencanakan dan melaporkan hasil pelaksanaan yang bersumber dana APBN dan APBD Provinsi. Dokumen yang dihasilkan adalah Laporan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBN (DAK) yang terdiri dari 5 (lima) dokumen yaitu, laporan DAK Triwulan IV Th 2018, Triwulan I, II, III dan IV (sampai dengan bulan November) tahun 2019.
- c. Ketiga, Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Sesuai dengan alur perencanaan, RKPD disusun pada tahun n-1, perubahan RKPD pada tahun berjalan dan Rancangan Awal RKPD disusun pada tahun n-2. Kegiatan ini menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kota Pekalongan sebanyak 3 (tiga) dokumen, diantaranya dokumen RKPD Tahun 2020, Perubahan RKPD Tahun 2019, dan Rancangan awal RKPD Tahun 2021.



Gambar 3.143 Kegiatan Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kota

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2020

- d. Keempat, kegiatan Penyusunan KUA-PPAS APBD. Kewajiban penyusunan kebijakan umum APBD merupakan amanat undang-undang, termasuk menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD. Untuk itu, Bappeda selaku organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan melaksanakan penyusunan KUA-PPAS APBD. Kegiatan ini menghasilkan 2 (dua) dokumen yaitu KUA PPAS Perubahan APBD 2019 dan KUA PPAS APBD 2020.
- e. Kelima, kegiatan Monitoring program kegiatan dan evaluasi RKPD, dokumen yang dihasilkan adalah dokumen Evaluasi RKPD Triwulan IV Tahun 2018, Evaluasi RKPD Triwulan I, II, III Tahun 2019.



Gambar 3.144 Kegiatan Desk Evaluasi RKPD Tahun 2019

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2020

- f. Keenam, kegiatan Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ). Kegiatan ini disusun berdasarkan amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 bahwa salah kewajiban kepala daerah adalah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Kegiatan ini menghasilkan 1 (satu) dokumen yaitu dokumen LKPJ tahun 2018.
- g. Ketujuh, kegiatan Pendampingan peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan atas bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah yaitu kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sub kegiatan peningkatan kapasitas perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan ini menghasilkan 1 (satu) dokumen yaitu raperda perencanaan pembangunan daerah.
- h. Indikator output kegiatan yang tercantum pada RKPD tahun 2019 belum sesuai dengan capaian indikator output yang diharapkan, sehingga pada perubahan APBD tahun 2019 indikator tersebut disesuaikan yang semula adalah Jumlah Perda perencanaan pembangunan daerah yang disusun menjadi Jumlah Raperda perencanaan pembangunan daerah yang disusun. Namun demikian raperda tersebut belum dapat diajukan dikarenakan masih menunggu revisi Permendagri No. 86 Tahun 2017 yang menjadi pedoman dalam penyusunan raperda tersebut.

3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.207.465.000,- (*unaudited*) melalui 4 (empat) kegiatan dengan indikator output sebanyak 4 (empat) indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, keempat indikator tersebut dapat tercapai dan tidak ada indikator yang tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.267 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.267 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	dokumen	1	1	1
		Dokumen roadmap ekonomi kreatif yang disusun	dokumen	1	1	1
2	Fasilitasi FEDEP (Bantuan Provinsi)	Jumlah lembaga yang terfasilitasi yang terlibat dalam pembangunan Kota Pekalongan	lembaga	1	1	1
3	Fasilitasi Pengembangan Teknopark	Jumlah rakor dan sosialisasi pengembangan technopark yang terfasilitasi	kali	8	8	8

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
4	Pendampingan pengembangan ekonomi lokal	Laporan kegiatan pengembangan ekonomi lokal (PEL)	laporan	1	1	1

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2020

- a. Pertama, kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi, kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan kegiatan ekonomi dengan pihak pusat dan daerah, mewujudkan kelancaran pembangunan ekonomi daerah, serta mengefektifkan koordinasi yang dilakukan antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat. Salah satu capaian program perencanaan pembangunan ekonomi adalah disusunnya dokumen roadmap ekonomi kreatif untuk mendukung pariwisata di Kota Pekalongan.



Gambar 3.145 Rapat dan FGD Ekonomi Kreatif

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2020

- b. Kedua, kegiatan Fasilitasi Pengembangan Teknopark, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan keberadaan, fungsi dan layanan teknopark kepada masyarakat dan memberi dukungan data dan administrasi Tim Pengembangan Teknopark dalam mengkoordinasikan langkah-langkah sistematis guna merumuskan, merencanakan, menetapkan, melaksanakan langkah-langkah Pengembangan Teknopark, memonitor/mengevaluasi dan melaporkan hasil Pengembangan Teknopark, baik secara berkala maupun pada waktu-waktu tertentu.
- c. Ketiga, kegiatan Pendampingan Pengembangan Ekonomi Lokal. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan atas bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah yaitu kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sub kegiatan Pengembangan Ekonomi Lokal. Kegiatan ini menghasilkan 1 (satu) output yaitu laporan kegiatan pengembangan ekonomi lokal.
- 4. Program Perencanaan Infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.355.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan realisasi sebesar

Rp. 808.002.750,- (*unaudited*) melalui 6 (enam) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 8 (delapan) indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, sebanyak 7 (tujuh) indikator tercapai dan 1 (satu) indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.268 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.268 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Perencanaan Infrastruktur Wilayah, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)	Jumlah dokumen RTBL Kota Pekalongan	dokumen	2	2	2
2	Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah)	Jumlah dokumen/laporan BKPRD Kota Pekalongan	dokumen	1	1	1
3	Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan)	Jumlah dokumen rekomendasi/laporan AMPL Kota Pekalongan	dokumen	1	1	1
		Dokumen SSK	dokumen	1	1	1
4	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana	dokumen	1	1	1
		Dokumen evaluasi smart city Kota Pekalongan	dokumen	1	1	1
5	Penyusunan masterplan drainase	Jumlah dokumen masterplan drainase yang tersusun	dokumen	1	1	0
6	Koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Dokumen kegiatan koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman (RP2KPKP)	dokumen	1	1	1

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2020

- a. Pertama, kegiatan Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). Kegiatan ini dilaksanakan karena, sebagai sebuah kota, Kota Pekalongan memiliki perubahan, perkembangan dan pertumbuhan kota yang menuntut penyediaan ruang, sarana dan prasarana baru, sehingga sebagai implikasinya terjadi perubahan dan pertumbuhan bangunan, sehingga perlu penataan rencana tata bangunan dan lingkungan. Indikator output dari kegiatan ini adalah jumlah dokumen RTBL Kota Pekalongan, dengan target sebanyak 2 (dua) dokumen dan keduanya tercapai tepat waktu. Untuk tahun 2019, dihasilkan dokumen RTBL Koridor Jalan Urip Sumoharj, Koridor Jalan Gatot Subroto, dan Koridor Jalan Pelita II Kota Pekalongan. Yang kedua, RTBL Koridor Jalan WR Supratman, Koridor Jalan Pantai Sari, Koridor Jalan Samudra dan Kawasan Teknopark Perikanan Kota Pekalongan.

- b. Kedua, kegiatan Fasilitasi BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka perencanaan dan pengkoordinasian terkait penataan ruang daerah agar berjalan secara baik, sehingga diperlukan fasilitasi badan koordinasi penataan ruang daerah. Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah dokumen/laporan BKPRD Kota Pekalongan sebanyak 1 (satu) dokumen. Indikator tersebut tercapai secara tepat waktu.



Gambar 3.146 Kegiatan Rapat BKPRD Tahun 2019

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2020

- c. Ketiga, kegiatan Fasilitasi Kelembagaan AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan). Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menunjang kesehatan masyarakat dalam hal sanitasi serta penyehatan lingkungan, yang memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak dan stake holder terkait. Kegiatan ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu Jumlah dokumen rekomendasi/laporan AMPL Kota Pekalongan, dan dokumen SSK (Strategi Sanitasi Kota). Dokumen-dokumen tersebut tercapai tepat waktu di tahun 2019.
- d. Keempat, kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarana dan Prasarana. Dalam rangka perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana, pekerjaan umum, tata ruang dan perumahan rakyat perlu dikoordinasikan dengan efektif antar stakeholder terkait. Kegiatan ini memiliki 2 (dua) indikator yaitu Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sarana dan prasarana, dan Dokumen evaluasi smart city Kota Pekalongan. Kesemua dokumen ini tercapai tepat waktu di tahun 2019.



Gambar 3.147 Koordinasi Bidang Sarpras

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2020

- e. Kelima, kegiatan Penyusunan Masterplan Drainase. Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun Masterplan Drainase Kota Pekalongan yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam satuan wilayah drainase untuk mengatasi permasalahan banjir dan genangan yang terjadi di Kota Pekalongan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini tidak tercapai tepat waktu, karena adanya kendala pada proses lelang. Kegiatan ini akan diadakan kembali pada tahun 2020.
- f. Keenam, kegiatan Koordinasi Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kegiatan ini memiliki indikator Dokumen kegiatan koordinasi peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman (RP2KPKP), dengan target 1 (satu) dokumen dan tercapai tepat waktu di tahun 2019.

5. Program Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial Dan Budaya

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 370.400.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 365.695.000,- (*unaudited*) melalui 7 (tujuh) kegiatan dengan indikator output sebanyak 7 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, sebanyak 7 (tujuh) indikator tercapai dan tidak ada indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.269 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.269 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Perencanaan Bidang Pemerintahan, Sosial Dan Budaya

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Fasilitasi kelompok bangun perkotaan	Jumlah dokumen rekomendasi KBP Kota Pekalongan	dokumen	1	1	1
2	Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran responsif Gender Kota Pekalongan	dokumen	1	1	1
3	Fasilitasi perencanaan dan penganggaran responsif anak	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Responsif Anak Kota Pekalongan	dokumen	1	1	1
4	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang Pemsosbud	dokumen	1	1	1
5	Pendampingan penanggulangan masalah gizi	Laporan kegiatan penanggulangan masalah gizi (PMG)	laporan	1	1	1
6	Pendampingan koordinasi tujuan pembangunan berkelanjutan/ SDGs	Laporan kegiatan TPB/SDGs Kota Pekalongan	laporan	1	1	1

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2020

- a. Pertama, kegiatan Komunitas Bangun Perkotaan, merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai isu-isu strategis yang terjadi di masyarakat melalui diskusi tematik yang diadakan sebanyak 4 (empat) kali pada tahun 2019.



Gambar 3.148 Kegiatan KBP tahun 2019

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2020

- b. Kedua, kegiatan Fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender. Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pendampingan dalam penyusunan analisis gender dengan metode GAP (*Gender Analysis Pathway*) yang menjadi satu kesatuan dengan dokumen Renja OPD dan GBS (*Gender Budgeting Statement*) yang menjadi satu kesatuan dengan dokumen RKA OPD.
- c. Ketiga, kegiatan Fasilitasi perencanaan dan penganggaran responsif anak. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan OPD dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsive anak. Serta untuk melakukan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsive anak. Pada kegiatan ini semua OPD diharapkan untuk menyusun Dokumen *Child Right Budget Statement* (CBS) minimal untuk 1 (satu) kegiatan yang strategis.



Gambar 3.149 Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Anak (PPRA)

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2020

- d. Keempat, kegiatan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, sosial dan budaya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan di Kota Pekalongan melalui koordinasi-koordinasi dengan OPD terkait bidang pemerintahan, sosial dan budaya.



Gambar 3.150 Pembahasan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB Dalam Rangka Koordinasi Pemerintahan Bidang Pemerintahan, Sosial Dan Budaya

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2020

- e. Kelima, kegiatan Pendampingan Penanggulangan Masalah Gizi, menfokuskan di peningkatan gizi masyarakat Kota Pekalongan, diantaranya pencegahan stunting atau keterlambatan tumbuh kembang anak yang pencegahannya diperlukan sosialisasi ke masyarakat yaitu dengan mengkonsumsi garam yang beryodium. Kegiatan ini merupakan kegiatan pendampingan atas bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah yaitu kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan sub kegiatan Penanggulangan Masalah Gizi. Kegiatan ini menghasilkan 1 (satu) output laporan kegiatan Pendampingan Penanggulangan Masalah Gizi.



Gambar 3.151 Bimtek Uji Kandungan Yodium pada Garam Konsumsi sebagai salah satu kegiatan yang menunjang Penanggulangan Masalah Gizi

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2020

- f. Keenam, kegiatan Pendampingan Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs. Kegiatan ini juga merupakan pendampingan atas bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah. Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs merupakan komitmen global dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat menggantikan *Millenium Development Goals* (MDGs). Kegiatan ini menghasilkan 1 (satu) output laporan kegiatan Pendampingan Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs.



Gambar 3.152 Kegiatan SDG's tahun 2019

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2020

- g. Ketujuh, kegiatan Pendampingan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Kegiatan ini juga merupakan pendampingan atas bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi masalah kemiskinan yang ada di Kota Pekalongan. Indikator output yang dicapai adalah 1 (satu) laporan kegiatan Pendampingan Pendampingan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.



Gambar 3.153 Penanggulangan Kemiskinan tahun 2019

Sumber: Bappeda Kota Pekalongan, 2020

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Kegiatan Masterplan Drainase. Kegiatan ini tidak tercapai dikarenakan terjadi gagal lelang. Salah satu syarat yang dibutuhkan untuk proses lelang yaitu minimal terdapat 3 (tiga) penyedia yang mendaftar, namun dalam prosesnya hanya 2 (dua) penyedia yang memenuhi syarat sehingga lelang harus diulang. Pada saat lelang ulang, waktu pelaksanaan pekerjaan diperkirakan melebihi batas waktu tahun anggaran berjalan atau apabila dipaksakan maka kualitas hasil pekerjaan tidak akan memenuhi standar ditetapkan.

2. Solusi

Kegiatan Masterplan Drainase. Dengan adanya gagal lelang maka penyusunan masterplan drainase diusulkan kembali pada tahun anggaran 2020, dan rencananya proses lelang akan dilaksanakan lebih awal yaitu pada triwulan I tahun 2020.

3. Peluang

Dengan dilakukannya proses lelang yang akan dilaksanakan lebih awal diharapkan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan target waktu dan kualifikasi pekerjaan yang ditetapkan.

3.2.4.2. Keuangan

Penyelenggaraan fungsi Pemerintahan Daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada Daerah. Dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah, semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah dan menjadi sumber keuangan Daerah.

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya Nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Pada Tahun 2018, Urusan keuangan ini kewenangan utamanya terdapat pada Badan Keuangan Daerah dan dibantu oleh 3 Perangkat Daerah lainnya, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Perda Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pekalongan, Perda Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual, nilai historis, realistis, periodisitas, konsisten, pengungkapan lengkap dan

penyajian wajar. Optimalisasi pengelolaan aset daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan dan pendayagunaan aset daerah untuk mendukung peningkatan PAD. Untuk itu dilakukan optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan aset daerah, up dating data pengadaan dan mutasi, pengamanan aset, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD), inventarisasi BMD, penyelesaian kasus/sengketa aset, pembinaan pengendalian dan pengawasan BMD serta penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Perubahan Barang Milik Daerah (DKPBMD). Dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan belum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini yang diterima adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Kondisi ini menuntut kerja bersama segenap elemen Pemerintah Kota Pekalongan agar dapat memperoleh Opini WTP pada Tahun berikutnya. Upaya ini membuahkan hasil pada Tahun 2015 dan 2016 dimana secara berturut-turut Pemerintah Kota Pekalongan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Keuangan di Kota Pekalongan dilaksanakan 6 (enam) program yakni Program Peningkatan Pendapatan Daerah, Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah, Program Penyusunan APBD Dan Pengelolaan Hibah Bansos, Program Pengelolaan Akuntansi Dan Pelaporan, Program Penagihan Dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah, Program Pengelolaan Perbendaharaan Dan Kas Daerah, yang terdistribusi dalam 11 (sebelas) indikator Kinerja Program dengan realisasi sebanyak 9 indikator yang mencapai target, dan 2 indikator belum mencapai target.

1. Program Peningkatan Pendapatan Daerah

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.270 Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Pendapatan Daerah

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase Peningkatan potensi pendapatan	4,00	Persen	-	4,90%

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kota Pekalongan, 2020

2. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

Program ini diukur dengan 3 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.271 Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	persentase kepemilikan sertifikat tanah pemkot	61,50	persen	-	62,07
2	Persentase OPD yang menyelesaikan Laporan Aset Tetap	100,00	persen	-	100
3	Persentase OPD yang menyelesaikan laporan Persediaan	100,00	persen	-	100

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kota Pekalongan, 2020

3. Program Penyusunan APBD Dan Pengelolaan Hibah Bansos

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.272 Target dan Capaian Indikator
Program Penyusunan APBD Dan Pengelolaan Hibah Bansos**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Ketersediaan Perda dan Perwal APBD yang tepat waktu	100,00	persen	-	100
2	Persentase Penyaluran Hibah dan Bansos	100,00	persen	-	100

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kota Pekalongan, 2020

4. Program Pengelolaan Akuntansi Dan Pelaporan

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.273 Target dan Capaian Indikator
Program Pengelolaan Akuntansi Dan Pelaporan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase OPD yang menerapkan pelaporan keuangan berbasis SAP	100,00	persen	-	100

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kota Pekalongan, 2020

5. Program Penagihan Dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.274 Target dan Capaian Indikator
Program Penagihan Dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak	100,00	persen	-	1,09
2	Persentase Pencapaian Target Pendapatan Retribusi	100,00	persen	-	27,71

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kota Pekalongan, 2020

6. Program Pengelolaan Perbendaharaan Dan Kas Daerah

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.275 Target dan Capaian Indikator
Program Pengelolaan Perbendaharaan Dan Kas Daerah**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	Sat		
1	Persentase Penerbitan SP2D atas pengajuan SPM dari OPD	100,00	persen	-	100
2	Persentase Pencairan SP2D atas penerbitan SP2D	100,00	persen	-	100

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kota Pekalongan, 2020

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Pendapatan Daerah

Program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 2.031.900.000,- dan realisasi Rp. 1.985.761.740,- (*unaudited*) melalui 7 (tujuh) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 19 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 18 indikator tercapai dan 1 indikator belum tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.276 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.276 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Pendapatan Daerah

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah WP/ WR yang terlayani	WP/WR	2.500	2.500	3.500
2	Penetapan pajak dan retribusi daerah	Jumlah SPT, SKPD/SKRD yang dibuat	lembar	15.000	15.000	19.026
3	Pemutakhiran data PBB	Jumlah Objek Pajak PBB yang termutakhirkan	data	30.000	30.000	31.640
		Jumlah Peta Digital PBB yang termutakhirkan	peta	13	13	13
		Jumlah Buku SK Walikota NJOP PBB 2019	buku	4	4	4
		Jumlah Buku DHKP PBB 2019	buku	54	54	53
		Jumlah Permohonan Pelayanan PBB yang terproses dan selesai	pelayanan	2.000	2.000	2.570
		Jumlah Objek Khusus PBB yang dinilai secara individu	op	10	10	10
4	Tertib administrasi dan optimalisasi penerimaan pendapatan daerah	Jumlah laporan realisasi pendapatan daerah yang disusun	laporan	12	12	12
		Jumlah dokumen perencanaan pendapatan daerah	dokumen	2	2	2
		Jumlah pelaksanaan rakor bidang pendapatan	kali	6	6	6
5	Pengembangan SIM pendapatan daerah	Jumlah Sistem Informasi yang dikembangkan	buah	1	1	1
		Jumlah RAM server yang diadakan	unit	2	2	2
		Jumlah Sistem Informasi yang dimaintenance	SIM	6	6	6

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		Jumlah Server yang dimaintenance	server	4	4	4
		Jumlah Infrastruktur Jaringan Komputer yang dimaintenance	jaringan	1	1	1
6	Penerbitan dan penyampaian SPPT PBB	Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan disampaikan	lembar	88.000	88.000	90.793
7	Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah	Jumlah Objek Pajak dan Retribusi yang Terdata	objek	2.500	2.500	2.500
		Jumlah Buku Daftar Objek Pajak	buku	10	10	10

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kota Pekalongan, 2020

2. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 3.263.773.000,- dan realisasi Rp. 2.811.882.940,- (*unaudited*) melalui 10 (sepuluh) kegiatan dengan jumlah indikator output sebanyak 15 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 14 indikator tercapai dan 1 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.277 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.277 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Penyusunan standar satuan harga	Jumlah dokumen standar harga yang disusun	dok	2	2	2
2	Penyusunan daftar kebutuhan barang daerah	Jumlah buku daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang daerah	buku	2	2	2
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung / aset daerah lainnya	Jumlah gedung/aset daerah lainnya yang terpelihara secara rutin / berkala	Gedung /unit	3	3	3
4	Fasilitasi peningkatan status hukum atas tanah aset daerah	Jumlah sertifikat tanah	bidang	30	30	30
		Jumlah Papan Nama Aset	bidang	55	55	55
		Jumlah Patok batas tanah	buah	600	600	600
		Jumlah Inventarisasi tanah milik Pemkot Pekalongan	bidang	900	900	150
5	Fasilitasi operasional lelang tanah eks bengkok	Jumlah pelaksanaan lelang garapan tanah eks bengkok	kali	5	5	5
6	Peningkatan manajemen aset/barang daerah	Jumlah OPD yang didampingi dalam	unit	27	27	27

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		pengelolaan barang daerah dan persediaan				
		Jumlah unit kerja yang didampingi dalam pengelolaan barang daerah dan persediaan	unit	36	36	36
		Jumlah laporan /data pengelolaan BMD	bh	67	67	67
7	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	Jumlah jenis BMD yang akan dihapus	jenis	3	3	4
8	Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah	Jumlah kendaraan dinas / operasional roda 4 yang diadakan	unit	3	5	3
9	Rehabilitasi sedang/berat gedung/aset daerah lainnya	Jumlah gedung / aset daerah lainnya yang terehabilitasi sedang / berat	unit	1	1	1
10	Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah	Jumlah mobil jabatan yang direhab	unit	3	3	1

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kota Pekalongan, 2020

Pada program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah terdapat 3 kegiatan yang tidak mencapai target yaitu Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Status Hukum Atas Tanah Aset Daerah, Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah, dan Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah. Untuk kegiatan Fasilitasi Peningkatan Status Hukum Atas Tanah Aset Daerah tidak dapat mencapai target untuk indikator Jumlah Inventarisasi tanah milik Pemkot Pekalongan yang ditarget 900 bidang hanya teralisasi 150 bidang karena kegiatan ini merupakan kegiatan kerjasama dengan BPN. Untuk tahun 2019 sudah tidak ada kerjasama sehingga kegiatan ini tidak berjalan.

Sedangkan kegiatan Rehabilitasi sedang/berat mobil aset daerah dengan target output 3 unit hanya terealisasi 1 unit. Tidak tercapainya kegiatan ini karena anggaran yang tersedia merupakan cadangan rehabilitasi mobil jabatan se-Kota. Pada tahun 2019 hanya 1 mobil jabatan yang perlu direhab (anggaran perbaikan sudah ada di masing-masing OPD). Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional Roda 4 aset daerah, pada awal penyusunan perubahan Rencana Kerja 2019 untuk 3 unit kemudian berkembang menjadi 5 unit pada Rencana Kerja Anggaran tetapi setelah TAPD kaji kembali yang menjadi prioritas hanya 3 unit saja. Kerena kurang cermatnya PPTK sehingga outputnya masih tercatat 5 unit padahal pada rincian anggaran pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran hanya teralokasikan untuk 3 unit saja.

3. Program Penyusunan APBD Dan Pengelolaan Hibah Bansos

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.192.300.000,- dan realisasi Rp. 1.171.401.675,- (*unaudited*) melalui 6 (enam) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 10 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, semua indikator sebanyak 10 indikator tercapai semua.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.278 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.278 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Penyusunan APBD Dan Pengelolaan Hibah Bansos

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Penyusunan Raperda tentang APBD dan Raperwal tentang penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perwal APBD	dokumen	2	2	2
		Jumlah bahan sidang Raperda dan Raperwal APBD	dokumen	4	4	4
2	Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	dokumen	2	2	2
		Jumlah bahan sidang Perda dan Perwal Perubahan APBD Kota Pekalongan yang disusun	dokumen	4	4	4
3	Fasilitasi Pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial	bulan	12	12	12
4	Penataan Dokumentasi Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah publikasi/ sosialisasi dan pendokumentasian arsip keuangan daerah	kali	2	2	2
5	Asistensi Penyusunan RKA Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Jumlah asistensi RKA PD/Unit Kerja yang dilaksanakan	PD/Unit Kerja	67	67	67
6	Fasilitasi Peningkatan Koordinasi Perencanaan Anggaran	Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan anggaran dan penyusunan raperwal/perwal di Kota Pekalongan	kali	12	12	12
		Jumlah koordinasi perencanaan anggaran	kali	0	0	0
		Jumlah koordinasi perencanaan anggaran yang dilaksanakan	kali	6	6	6

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kota Pekalongan, 2020

4. Program Pengelolaan Akuntansi Dan Pelaporan

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 896.600.000,- dan realisasi Rp. 860.956.208,- (*unaudited*) melalui 5 (lima) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 13 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, hanya sebanyak 10 indikator tercapai. Hal ini terjadi karena pada kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah mengalami perubahan indikator output sebanyak 4 indikator. Sehingga bisa dikatakan semua

target output semua kegiatan pada program Pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan mencapai target semua.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.279 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.279 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengelolaan Akuntansi Dan Pelaporan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah pelaporan prognosis realisasi anggaran yang disusun	laporan	14	14	14
2	Analisis dan evaluasi laporan keuangan daerah	Buku Analisa Laporan Keuangan 5 Tahun	Buku	1	1	2
3	Pendampingan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah bulan pelaksanaan pengelolaan keuda yang transparan dan akuntabel	bulan	0	-	0
		Jumlah kegiatan orientasi yang dilaksanakan	kali	0	1	0
		Jumlah pengelolaan keuda yang transparan dan akuntabel yang dilaksanakan	kali	-	12	12
		jumlah pelaksanaan rekonsiliasi laporan hutang/piutang OPD dalam 1 tahun	kali	2	12	0
		Jumlah pelaksanaan study orientasi untuk meningkatkan wawasan pengelolaan keuangan dan wujud apresiasi diperolehnya WTP dalam 1 tahun	kali	1	1	1
		Jumlah workshop/sosialisasi pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	kali	1	-	1
		Jumlah pengelolaan keuda yang transparan dan akuntabel yang dilaksanakan	kali	69	69	69
		Jumlah pelaksanaan study orientasi untuk meningkatkan wawasan pengelolaan keuangan dan wujud apresiasi diperolehnya WTP dalam 1 tahun	kali	1	1	1
4	Pengendalian penyusunan laporan keuangan konsolidasi	Laporan LO dan LRA OPD	Laporan	14	14	14
		Laporan Rekap SKRD/SKPD Pengelola Pendapatan	Laporan	2	2	2
		Laporan Keuangan konsolidasi Semesteran	Buku	1	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		Jumlah pemberian reward untuk bendahara	kali	2	2	2
5	Penyusunan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Raperwal tentang Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Jumlah dokumen Perda dan Perwal LKD yang disusun	dokumen	14	14	14

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kota Pekalongan, 2020

5. Program Penagihan Dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.355.000.000,- dan realisasi Rp. 1.036.302.000,- (*unaudited*) melalui 6 (enam) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 11 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 10 indikator tercapai dan 1 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.280 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.280 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Penagihan Dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Penagihan pajak dan retribusi daerah	Surat Tagihan yang Terbayar	Persen	54	54	54,1
2	Pengembangan dan penyuluhan pajak dan retribusi daerah	Jumlah WP/WR yang mengikuti sosialisasi	WP/WR	300	300	300
3	Monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah	bulan	0	0	0
		Jumlah monitoring dan evaluasi pajak dan retribusi daerah yang dilaksanakan	kali	50	50	50
4	Verifikasi BPHTB	Jumlah SSPD BPHTB yang diverifikasi	SSPD BPHTB	1.500	1.500	1.870
		Jumlah dokumen zona nilai pasar yang disusun	dokumen	1	1	1
5	Pemeriksaan pajak daerah	Terperiksanya Wajib Pajak dan Retribusi Daerah	Lembar	0	0	0
		Wajib pajak dan retribusi daerah yang diperiksa	WP/WR	22	22	22
		Jumlah server yang diadakan	unit	1	0	1
		Jumlah tapping box yang diadakan	unit	13	0	0

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
6	Gebyar Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang menerima penghargaan	wp	15	15	13

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kota Pekalongan, 2020

Dari 6 kegiatan pada Program Penagihan Dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah terdapat 2 kegiatan yang tidak dapat mencapai target. Untuk kegiatan Pemeriksaan pajak daerah dengan indikator Jumlah tapping box yang diadakan dengan target 13 unit tidak teralisasi. Hal ini karena Pengadaan alat perekam data transaksi tapping box senilai Rp196.675.000,- tidak direalisasikan karena ada warning dari KPK-RI kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah untuk tidak melaksanakan pengadaan tersebut karena pada Tahun 2019 alat tersebut akan difasilitasi oleh Bank Jateng selaku Bank Daerah. Realisasi fasilitasi tapping box dari Bank Jateng untuk Pemkot Pekalongan pada tahun 2019 berjumlah 45 unit yang akan dipasang pada WP objek pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir dan untuk kegiatan Gebyar Pajak Daerah dengan indikator jumlah wajib pajak yang menerima penghargaan dengan target 15 WP teralisasi 13 WP karena terdapat 2 nominasi yang tidak diberikan yaitu kategori khusus

6. Program Pengelolaan Perbendaharaan Dan Kas Daerah

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 731.650.000,- dan realisasi Rp. 667.353.500,- (*unaudited*) melalui 9 (sembilan) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 10 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 9 indikator tercapai dan 1 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.281 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.281 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengelolaan Perbendaharaan Dan Kas Daerah

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	Jumlah sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah yang disusun	sisdur	1	1	1
2	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah	bulan	0	0	0
		Jumlah monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	kali	12	12	12
3	Fasilitasi MP TP-TGR	Jumlah bulan pelaksanaan rapat-rapat MP TP-TGR	bulan	0	0	0
		Jumlah rapat-rapat MP TP-TGR yang dilaksanakan	kali	0	12	0
		Jumlah laporan kerugian	laporan	12	12	12

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		daerah di MP TP-TGR yang disusun				
4	Fasilitasi pelaporan DAK	Jumlah bulan pelaksanaan pelaporan DAK	bulan	0	0	0
		Jumlah laporan DAK per bidang	laporan/ bidang	0	2	2
		Jumlah pelaksanaan penyusunan laporan DAK	kali	12	12	12
		Jumlah pelaporan DAK yang dilaksanakan	Kali	-	12	0
5	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	Jumlah pejabat penatausahaan dan atau pengelola keuangan yang meningkat pengetahuannya tentang pengelolaan keuangan daerah	orang	300	300	287
6	Penyusunan dan Pelaporan SPT Masa tahunan PPh Ps 21 PNS	Jumlah entri bukti potong PPh Ps 21 gaji PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan dan laporan masa tahunan PPh 21 gaji PNS Kota Pekalongan	data	3.200	3.200	3.223
7	Fasilitasi pengelolaan administrasi gaji	Jumlah PNS Kota Pekalongan yang diterbitkan daftar gajinya	orang	3.200	3.200	3.200
8	Pengendalian dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan Keuangan SKPKD	Jumlah dokumen SPJ PD/Unit Kerja yang diverifikasi dan dicetak	PD/Unit Kerja	67	67	67
9	Pendampingan transaksi non tunai	Jumlah Pelaksanaan Desk/Rekon/Pelatihan Pelaksanaan Non Tunai	kali	4	4	4

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kota Pekalongan, 2020

Pada program Pengelolaan Perbendaharaan Dan Kas Daerah, kegiatan Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator Jumlah pejabat penatausahaan dan atau pengelola keuangan yang meningkat pengetahuannya tentang pengelolaan tidak mencapai target, dengan target 300 orang terealisasi 287. Hal ini karena jumlah undangan tersebar untuk 300 tetapi yang hadir 287. Untuk kegiatan Fasilitasi MP TP-TGR terdapat pergantian indikator output yang semula Jumlah rapat-rapat MP TP-TGR yang dilaksanakan diganti menjadi Jumlah laporan kerugian daerah di MP TP-TGR yang disusun. Sehingga untuk kegiatan Fasilitasi MP TP-TGR pencapaian outputnya tetap tercapai.

Prestasi BKD Kota Pekalongan (Pencapaian Target IKU PD dan IKU Kota)

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kota Pekalongan keempat kali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.



Gambar 3.154 Pencapaian LKD Wajar Tanpa Perkecualian

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kota Pekalongan, 2020

Faktor pendukung diperolehnya Opini WTP :

- Komitmen dari semua elemen dari kepala kepala daerah hingga staf penyusun LK OPD.
- Adanya Reward dan punishment yang tegas
- Adanya rekonsiliasi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang dilaksanakan tiap 3 (tiga) bulan sekali ;
- Sosialisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah kepada pejabat penatausahaan keuangan daerah;
- Adanya asistensi penyusunan RKA APBD yang melibatkan unsur perencanaan dalam rangka sinkronisasi perencanaan anggaran.

Sedangkan **tantangan** yang dihadapi dalam perolehan opini WTP antara lain :

- Penyusunan LKD tidak tepat waktu
- Kualitas laporan belum sesuai standart
- SIMKEU belum memadai
- Server SIMBADA down
- SDM kurang mencukupi dan kurang kompeten
- Data Laporan Neraca Aset Tetap yang terlambat dikirim oleh OPD

Untuk menghadapi tantangan tersebut, hal-hal yang telah dilakukan antara lain :

- Penyusunan LKD tepat waktu
- Kualitas laporan sesuai standart
- SIMKEU dan SIMBADA tidak ada kendala dan memadai
- SDM yang kompeten
- Data Laporan Neraca Aset Tetap OPD dikirim tepat waktu



Gambar 3.155 Dokumentasi Kegiatan Badan Keuangan Daerah

Sumber: Badan Keuangan Daerah, Kota Pekalongan, 2020

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

Faktor penghambat tidak teralisasinya target retribusi daerah antara lain :

- Belum adanya SIM Pendapatan untuk retribusi yang terintegrasi untuk semua jenis retribusi.
- Pungutan retribusi masih belum sepenuhnya non tunai.
- Target Retribusi Pelayanan TPI tidak terealisasi karena adanya pendangkalan muara sehingga kapal besar tidak dapat bersandar di TPI Kota Pekalongan dan adanya penurunan kualitas ikan.
- Target Retribusi Pelayanan Pasar tidak terealisasi karena pasar banjarsari yang terkebar masih menempati pasar darurat di Lapangan Sorogeneng sehingga tidak dipungut retribusi, adanya proyek pembangunan pasar Sugihwaras baru yang berdampak pada aktivitas pedagang yang belum direlokasi.
- Target Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum tidak terealisasi karena ada one prestasi pada pengelolaan Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum pada beberapa titik yang di kelola pihak ketiga hanya bayar 3 bulan. Mulai September 2019 tidak lagi dikelolakan ke Pihak Ke 3.
- Target Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak terealisasi karena ada beberapa alat yang mengalami kerusakan sehingga mengganggu pelayanan yang berdampak pada penurunan pendapatan.
- Target Retribusi Retribusi Tempat Rekreasi dan OR tidak realisasi karena beberapa objek wisata pantai yang terendam banjir rob, minimnya sarana dan prasarana yang ada pada objek wisata, tidak bertambahnya koleksi pada musim batik.
- Target Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan tidak tercapai karena ada beberapa wajib retribusi yang pengelolaan sampahnya tidak lewat Dinas Lingkungan Hidup.
- Target Retribusi/ Penyediaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus tidak terealisasi karena karena pelayanan sedot kakus, baru aktif baru di bulam Maret 2019, Kendaraan Sedot Tinja yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup daya sedotnya kecil hanya bisa sedot dengan ukuran 1-2 Meter².
- Target Retribusi pemakaian kekayaan daerah / sewa ruangan / bangunan / gedung pertemuan tidak terealisasi karena Gedung wanita yang sebelumnya disewakan untuk kepentingan umum, saat ini tidak disewakan karena akan digunakan sebagai Kantor Imigrasi.

2. Solusi

Untuk meningkatkan capaian kinerja Program Pengelolaan Akuntansi & Pelaporan dan Program Peningkatan Pengelolaan Aset maka di masa yang akan datang direkomendasikan perbaikannya antara lain :

- Pemeliharaan dan Pengembangan SIMKEU dan SIMBADA (Upgrade kapasitas memory, server, adanya pengaturan bandwidth yang lebih ketat)
- Melakukan rekonsiliasi laporan keuangan OPD lebih awal serta dilakukan pendampingan
- Menyelenggarakan BIMTEK penyusunan laporan keuangan untuk bendahara
- Menambah jumlah SDM dan dilakukan diklat penatausahaan Aset Daerah

- Melaksanakan rekon Barang Daerah OPD lebih awal serta dilakukan pendampingan
- Program Penagihan dan Pemeriksaan Kewajiban Pajak Daerah untuk indikator Persentase Pencapaian Target Pendapatan Pajak dengan target 100% terealisasi 108,93%. Sedangkan untuk indikator Persentase Pencapaian Target Pendapatan Retribusi dengan target 100,00 persen terealisasi 92,11%.

3. Peluang

Faktor pendukung teralisasi Pendapatan Pajak :

- Peningkatan kualitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan
- Peningkatan basis data, penyusunan data potensi/pemutakhiran data dan peningkatan koordinasi sinergis antar PD penghasil.
- Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan daerah;
- Peningkatan pelayanan dengan penerapan e-SPT dan penambahan fungsi pembayaran pada masing-masing payment point di kecamatan dan kantor kas
- Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (Simpatda) dan pemasangan alat perekam data transaksi para wajib pajak (tapping box atau sejenisnya).
- Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya melalui sosialisasi dan pemberian reward and punishment
- Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
- Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan Data objek dan subjek pajak yang valid.

3.2.4.3. Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kota Pekalongan dilaksanakan 4 (empat) program yakni Program Penataan Dan Pengembangan Aparatur, Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur, Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian, Program Pelayanan Informasi Kepegawaian yang terdistribusi dalam 6 indikator Kinerja Program, dengan realisasi sebanyak 4 indikator yang mencapai target dan 2 indikator belum mencapai target.

1. Program Penataan Dan Pengembangan Aparatur

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.282 Target dan Capaian Indikator Program Penataan Dan Pengembangan Aparatur

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase Kesesuaian Kompetensi dengan Jabatan	72,00	Persen	-	81,05
2	Persentase PNS berkembang karier	42,00	persen	-	36,96

Sumber: BKPPD, Kota Pekalongan, 2020

Indikator Program Penataan dan Pengembangan Aparatur Yang tidak tercapai adalah Persentase PNS berkembang karier hal ini disebabkan oleh adanya perubahan SOTK sesuai dengan Peraturan Walikota No. 76 tanggal 6 Nopember 2019 tentang Perubahan SOTK pada Sekretariat Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 86 tanggal 23 Desember 2019 tentang Perubahan SOTK pada Kecamatan dan Kelurahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.283 Perubahan SOTK Pada Setda dan Kecamatan

NO	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1	Sekretariat Daerah semula 9 bagian 27 Sub Bagian	Menjadi 8 Bagian 20 Sub Bagian
2	Kecamatan semula 16 Kepala Seksi	Menjadi 8 Kepala Seksi
3	Kelurahan semula 81 Kepala Seksi	Menjadi 54 Kepala Seksi

Sumber: BKPPD, Kota Pekalongan, 2020

Sehingga dengan adanya perubahan nomeklator SOTK , maka pejabat yang menduduki jabatan tersebut harus dikukuhkan kembali dalam nama jabatan yang baru.

2. Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Program ini diukur dengan 2 (dua) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.284 Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase PNS yang memiliki Kompetensi	26,00	Persen	-	27,95
2	Persentase PNS tugas belajar dan ijin belajar	28,83	persen	-	0,62

Sumber: BKPPD, Kota Pekalongan, 2020

Indikator Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Yang tidak tercapai adalah Persentase PNS tugas belajar dan ijin belajar hal ini disebabkan oleh Quota dari Perguruan Tinggi yang melaksanakan Tugas Belajar bagi PNS Sangat Terbatas yang linier sesuai dengan Pendidikan dan Terdapat Perguruan Tinggi Yang Tidak Memenuhi Syarat untuk PNS yang mengikuti ijin belajar karena termasuk dalam pendidikan kelas jauh

3. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.285 Target dan Capaian Indikator Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Tingkat kepuasan PNS terhadap administrasi kepegawaian	23,00	Persen	-	23

Sumber: BKPPD, Kota Pekalongan, 2020

4. Program Pelayanan Informasi Kepegawaian

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

Tabel 3.286 Target dan Capaian Indikator Program Pelayanan Informasi Kepegawaian

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase Ketersediaan data PNS	100,00	Persen	-	100

Sumber: BKPPD, Kota Pekalongan, 2020

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Penataan Dan Pengembangan Aparatur

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 1.293.710.000,- dan realisasi Rp. 737.521.100,- (*unaudited*) melalui 7 (tujuh) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 9 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 4 indikator tercapai dan 3 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.287 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.287 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Penataan Dan Pengembangan Aparatur

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pengisian pengembangan kapasitas ASN melalui kerjasama dengan perguruan tinggi	Jumlah praja/taruna yang mengikuti pendidikan kedinasan	orang	11	11	11
		Jumlah ASN mengikuti pendidikan kedinasan	orang	4	0	0
2	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	Jumlah PNS yang ditata guna pembinaan karir	orang	100	100	100
3	Seleksi penerimaan calon PNS	Jumlah CASN yang lulus seleksi	orang	150	150	251
4	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah Bagi PNS	Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas (38 orang) dan ujian penyesuaian ijasah (30 orang)	orang	68	68	26
5	Koordinasi Penyelesaian Bidang Kepegawaian	Koordinasi Penyelesaian Pelantikan Pejabat Struktural dan fungsional	orang	100	150	240
6	Seleksi jabatan ASN	Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi	orang	13	13	24

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
7	Penyusunan talent pool jabatan	Jumlah PNS yang ikut tes kompetensi	orang	86	40	40
		Jumlah dokumen kajian yang disusun	dokumen	1	1	1

Sumber: BKPPD, Kota Pekalongan, 2020

- a. Output Program Penataan dan Pengembangan Aparatur yang tidak tercapai yaitu Jumlah ASN Mengikuti Pendidikan kedinasan target 4 orang capaian 0 hal ini disebabkan oleh Kurang minatnya PNS untuk melanjutkan Pendidikan ke Jenjang yang lebih tinggi dan Faktor peran domestiknya PNS untuk melanjutkan Pendidikan ke Jenjang yang lebih tinggi
- b. Output Program Penataan dan Pengembangan Aparatur yang tidak tercapai yaitu Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas (38 orang) dan ujian penyesuaian ijasah (30 orang) Target 68 orang capaian 26 orang hal ini disebabkan oleh Jumlah PNS yang diusulkan untuk mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian yang diusulkan tidak memenuhi syarat
- c. Output Program Penataan dan Pengembangan Aparatur yang tidak tercapai yaitu Jumlah PNS yang ikut tes kompetensi Target 86 orang capaian 40 orang hal ini disebabkan oleh Biaya kontribusi untuk pelaksanaan Tes Assemen pada Perubahan Anggaran Tahun 2019 di geser untuk biaya tes kesehatan dan psikologi bagi Pejabat yang lulus seleksi Jabatan Tinggi Pratama, karena pada penetapan belum dianggarkan untuk biaya tes kesehatan dan psikologi, sehingga mengurangi jumlah peserta yang mengikuti tes kompetensi .



Gambar 3.156 Pelaksanaan Tes Assesment Bagi Eselon III

Sumber: BKPPD, Kota Pekalongan, 2020

- d. Output Program Penataan dan Pengembangan Aparatur yang melebihi target yaitu Koordinasi Penyelesaian Pelantikan Pejabat Struktural dan fungsional hal ini disebabkan oleh adanya perubahan SOTK pada Sekretariat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, maka dengan adanya perubahan nomenklatur SOTK, pejabat yang menduduki jabatan tersebut harus dikukuhkan kembali dalam nama jabatan yang baru.



Gambar 3.157 Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Dan Pengawas Dilingkungan Merintah Kota Pekalongan

Sumber: BKPPD, Kota Pekalongan, 2020

- e. Output Program Penataan dan Pengembangan Aparatur yang melebihi target yaitu Jumlah pejabat pimpinan tinggi pratama yang lulus seleksi target 13 orang capaian 24 orang hal ini disebabkan oleh perubahan rekening belanja yang semula rekening belanja untuk biaya seleksi jabatan Tinggi Pratama, tes kesehatan dan psikologi dirubah/digeser ke Honor Tim Panitia Seleksi sehingga ada efisensi untuk menambah peserta yang ikut tes seleksi Jabatan Tinggi Pratama

2. Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 4.303.970.000,- dan realisasi Rp. 4.145.982.400 (*unaudited*) melalui 8 (delapan) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 8 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 7 indikator tercapai dan 1 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.288 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.288 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti diklat prajabatan	orang	251	251	251
2	Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS Daerah	Jumlah Pejabat eselon II, III dan IV yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk.II,Tk.III,Tk.IV	orang	8	8	8
3	Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan	Jumlah kepala sekolah yang ditingkatkan kompetensi manajerialnya	orang	40	40	34
4	Pelatihan TOT Batik untuk guru	Jumlah guru yang mengikuti pelatihan TOT batik	orang	80	80	80
5	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan kompetensi tenaga pendidik	orang	60	60	60
6	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	Jumlah PNS yang menerima beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas	orang	2	1	2
7	Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	orang	233	336	336
8	Penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional	orang	100	166	166

Sumber: BKPPD, Kota Pekalongan, 2020

- a. Output Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur yang tidak mencapai target yaitu Jumlah kepala sekolah yang ditingkatkan kompetensi manajerialnya target 40 orang capaian 34 orang hal ini disebabkan oleh adanya Kepala Sekolah yang merangkap jabatan sebagai Kepala Sekolah pada satu sekolah yang sama, sehingga jumlah Kepala Sekolah yang mengikuti diklat hanya 34 orang.
- b. Output Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur yang capaian melebihi target yaitu Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional target 233 orang capaian 336 orang hal ini disebabkan oleh dalam Merencanakan Anggaran untuk Pengiriman Diklat teknis dan fungsional Bagi PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan terdapat 2 rekening belanja Transport dan Akomodasi dan Biaya Kontribusi. Untuk biaya kontribusi yang direncanakan untuk diklat 20 orang, penyelenggara Diklat tidak ada biaya kontribusi, sehingga ada efisiensi kontribusi yang dialihkan ke Transport dan Akomodasi guna pengiriman peserta diklat yang lain.



Gambar 3.158 Penyelenggaraan Diklat Dana Kelurahan

Sumber: BKPPD, Kota Pekalongan, 2020

3. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 340.630.000,- dan realisasi Rp. 295.417.500,- (*unaudited*) melalui 6 (enam) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 6 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 4 indikator tercapai dan 2 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.289 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.289 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pendataan dan penataan dokumen kepegawaian	Jumlah data yang disinkronkan/diupdate	data	3.120	3.120	3.120
2	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	Jumlah administrasi kenaikan pangkat PNS yang terselesaikan	orang	600	600	461
3	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	Jumlah PNS yang mendapat penghargaan satya lancana karya satya bagi PNS 100 orang	orang	100	100	84
4	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah pegawai yang mendapat pembinaan dalam penanganan kasus-kasus kepegawaian	orang	2	2	3
5	General Check-Up bagi PNS	Jumlah PNS yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan	orang	336	336	343

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		(65 general check up dan 20 uzur jasmani)				
6	Sosialisasi Perundang-Undangan di Bidang Kepegawaian	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi perundang-undangan dibidang kepegawaian	orang	35	35	35

Sumber: BKPPD, Kota Pekalongan, 2020

- a. Out Put Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang tidak mencapai target yaitu Jumlah administrasi kenaikan pangkat PNS yang terselesaikan target 600 orang capaian 461 orang hal ini disebabkan oleh OPD dalam mengusulkan kenaikan pangkat, setelah dikoreksi oleh BKN banyak terdapat yang Tidak Memenuhi Syarat untuk kenaikan pangkat karena berkas belum lengkap yang sering terjadi usulan kenaikan pangkat guru harus melampirkan PAK, PAK belum dilampiran sehingga usulan kenaikan pangkat ikut pada periode tahun berikutnya.
- b. Output Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang tidak mencapai target yaitu Jumlah PNS yang mendapat penghargaan satya lancana karya satya bagi PNS target 100 orang capaian 84 orang hal ini disebabkan oleh Usulan Satya Lancana karya Satya ke Sekretariat Negara sebanyak 100 orang yang turun 84 orang sehingga capaian dari kegiatan ini hanya 84 orang.



Gambar 3.159 Penganugerahan Satya Lancana Karya Satya Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2019

Sumber: BKPPD, Kota Pekalongan, 2020

- c. Out Put Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Melebihi target yaitu Jumlah PNS yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan (316 general check up dan 20 uzur jasmani) target 336 orang capaian 343 orang hal ini disebabkan oleh Pemeriksaan kesehatan (general check up) bagi yang uzur jasmani lebih dari 20 orang.

4. Program Pelayanan Informasi Kepegawaian

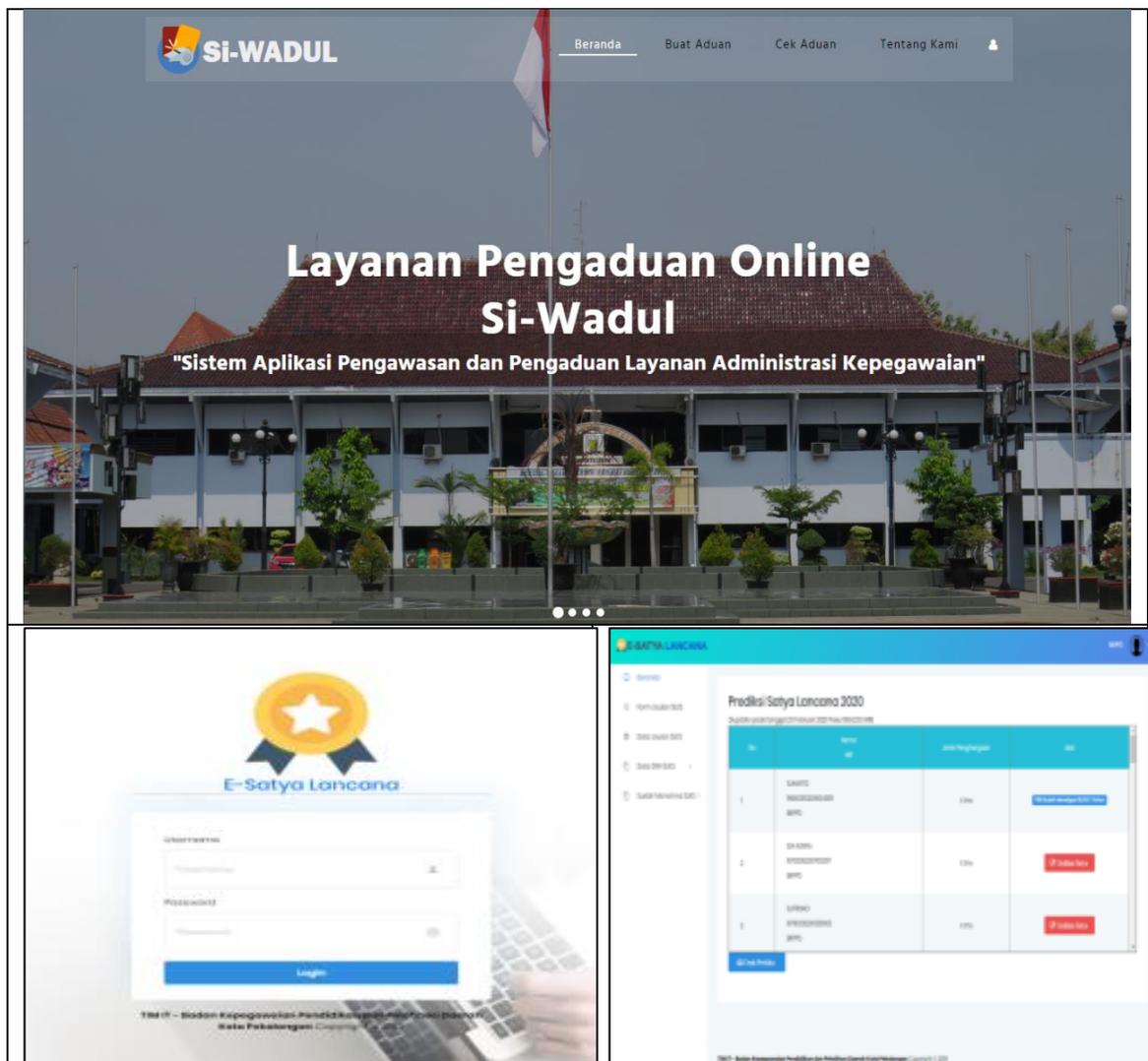
Secara umum program ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran Rp. 65.000.000,- dan realisasi Rp. 59.700.000,- (*unaudited*) melalui 1 (satu) kegiatan, dengan indikator output sebanyak 1 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, indikator telah tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.290 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.290 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pelayanan Informasi Kepegawaian

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah pembuatan aplikasi dibidang kepegawaian	Aplikasi	2	2	2

Sumber: BKPPD, Kota Pekalongan, 2020



Gambar 3.160 SIM Pengawasan dan Pengaduan Layanan Administrasi Kepegawaian

Sumber: BKPPD, Kota Pekalongan, 2020

Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan

- PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan belum memahami pentingnya mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk meningkatkan karier

2. Solusi

- Memberi motivasi kepada PNS agar meningkatkan pendidikan ke Jenjang yang lebih tinggi untuk meningkatkan karier

3. Peluang

- Mengikutsertakan PNS dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan untuk mengikuti daiklat dan tugas belajar

3.2.4.4. Penelitian Dan Pengembangan

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan dalam urusan Penelitian dan Pengembangan di Kota Pekalongan dilaksanakan 2 (dua) program yakni Program Pengkajian Dan Penelitian dan Program Pengembangan Iptek Dan Inovasi Daerah yang terdistribusi dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Program, dimana semua indikator mencapai target.

1. Program Pengkajian dan Penelitian

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.291 Target dan Capaian Indikator
Program Pengkajian dan Penelitian**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD	50,00	Persen	-	82

Sumber: Bappeda, Kota Pekalongan, 2020

Indikator jumlah pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan - kebijakan merupakan indikator kinerja program sampai dengan tahun 2018. Sedangkan mulai tahun 2019, indikator kinerja program disesuaikan menjadi persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD. Indikator ini mencapai hasil diatas target yang seharusnya 50% tercapai 82%. Dari 11 (sebelas) penelitian terdapat 9 (sembilan) penelitian yang memiliki kesesuaian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD.

2. Program Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah

Program ini diukur dengan 1 (satu) Indikator program dengan target dan ketercapaian sebagai berikut :

**Tabel 3.292 Target dan Capaian Indikator
Program Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase PD yang difasilitasi dalam inovasi daerah	95,00	Persen	-	100

Sumber: Bappeda, Kota Pekalongan, 2020

Indikator peningkatan jumlah teknopreneur merupakan indikator kinerja program sampai dengan tahun 2018. Sedangkan mulai tahun 2019, indikator kinerja program disesuaikan menjadi persentase PD yang difasilitasi dalam inovasi daerah. Indikator ini mencapai hasil diatas target yang seharusnya 95% tercapai 100%. Perangkat daerah termasuk didalamnya 27 (dua puluh tujuh) kelurahan dan 31 (tiga puluh satu) OPD seluruhnya mengikuti Pameran Inovasi dan Kreatifitas Kota Pekalongan tahun 2019.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Pengkajian dan Penelitian

Program ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah melalui 4 kegiatan dengan total anggaran Rp. 830.000.000,- dan realisasi Rp. 656.601.604,- (*unaudited*) dengan indikator output sebanyak 8 (delapan) indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, semua indikator dapat mencapai target. Terdapat indikator yang capaiannya melebihi target yang ditentukan yaitu kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan dengan indikator Jumlah FGD/workshop pengabdian masyarakat dan target 4 (empat) FGD tercapai sebanyak 6 (enam) FGD

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.293 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

**Tabel 3.293 Target dan Capaian Kinerja Output pada
Program Pengkajian dan Penelitian**

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan	Jumlah jurnal litbang yang tersusun dan dipublikasikan	jurnal	1	1	1
2	Riset unggulan daerah	Jumlah riset unggulan yang terfasilitasi	riset	5	5	5
3	Fasilitasi Dewan Riset Daerah dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan	Jumlah kajian dan rekomendasi dewan riset daerah yang tersusun	kajian	2	2	2
		Jumlah FGD/workshop pengabdian masyarakat	kali	4	4	6
4	Fasilitasi Riset Bersama dan Jaringan Penelitian Pengembangan Kota Pekalongan	Pusat pelayanan yang dapat memberikan pelayanan rekomendasi izin riset dan informasi kelitbangan	pusat layanan	1	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		Aplikasi kelitbangan yang dapat dikembangkan	aplikasi	1	1	1
		Jumlah FGD/Workshop kelitbangan	kali	5	5	5
		Jumlah kajian yang tersusun	kajian	2	2	4

Sumber: Bappeda, Kota Pekalongan, 2020

- a. Pertama, kegiatan Penyusunan Jurnal Penelitian dan Pengembangan. Kegiatan ini merupakan laporan penelitian atau penelaahan terhadap karya-karya ilmiah yang ditulis oleh para pakar dalam bidang persoalan yang dipelajari. Penyusunan jurnal ditugaskan kepada tim penyusun sebagai wahana untuk menyusun dan mendokumentasikan laporan penelitian dalam bentuk jurnal yang dapat dibaca sebagai referensi dalam pendukung pengambilan keputusan. Indikator yang ditargetkan adalah jumlah jurnal litbang yang tersusun dan dipublikasikan. Pada kegiatan ini dihasilkan 1 (satu) jurnal yang terdiri dari 2 (dua) volume, volume 1 (satu) terbit pada bulan Juli dan volume 2 (dua) pada bulan Desember 2019.
- b. Kedua, kegiatan Riset Unggulan Daerah. Kegiatan ini diadakan dalam rangka pengembangan potensi daerah Kota Pekalongan yang memerlukan adanya inovasi-inovasi melalui riset/penelitian unggulan. Indikator kegiatan ini adalah jumlah Riset Unggulan Daerah yang terfasilitasi, dimana pada tahun ini tercapai sebanyak 5 (lima) riset sesuai dengan target. Kelima riset tersebut adalah :
 - Model Akselerasi Pencapaian Open Defecation Free (ODF) Kota Pekalongan melalui Penguatan Kelurahan (Sebuah Strategi Percepatan Pembangunan Kesehatan Berbasis Masyarakat);
 - Kampung Batik Digital Berbasis Virtual Tour sebagai Wadah Promosi Batik Kota Pekalongan di Era Industri 4.0
 - Dampak Pembangunan Jalan Tol terhadap Faktor Sosial, Ekonomi dan Lingkungan di Pasar Grosir Setono
 - Penggunaan Kembali Limbah Cair Batik Menjadi Air Bersih Menggunakan Metode Teknologi Membran
 - Adopsi Inovasi Media Komunikasi-Informasi-Edukasi (KIE) untuk Menguatkan Industri Kreatif Kota Pekalongan di Era Industri 4.0
- c. Ketiga, kegiatan Fasilitasi Dewan Riset Daerah dan Pengabdian Masyarakat Berbasis Pemberdayaan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensinergikan perencanaan, penelitian dan pengembangan antara akademisi, birokrasi dan lembaga kelitbangan, serta masyarakat untuk mengimplementasikan IPTEK dalam pemecahan permasalahan di masyarakat. Indikator dari kegiatan ini adalah Jumlah kajian dan rekomendasi dewan riset daerah yang tersusun dengan target 2 (dua) kajian, dan Jumlah FGD/workshop pengabdian masyarakat dengan target 4 (empat) kali FGD/Workshop. Pada tahun 2019, tercapai 2 (dua) kajian yaitu Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan Exit Jalan Tol, dan Strategi Penurunan Angka Pengangguran. Untuk FGD/Workshop Pengabdian Masyarakat tercapai melebihi target yaitu 6 (enam) FGD/Workshop.

- d. Keempat, kegiatan Fasilitasi Riset Bersama dan Jaringan Penelitian Pengembangan Kota Pekalongan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya pengambilan keputusan dan kebijakan publik berbasis fakta dan bukti ilmiah yaitu dengan memperluas mitra kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan. Pada beberapa indikator yang ditargetkan terdapat indikator yang melebihi target yaitu Jumlah kajian yang tersusun dengan target 2 (dua) kajian, dihasilkan 4 (empat) kajian, diantaranya :
- Megono Kaleng Kuliner Tradisional Kota Pekalongan;
 - Studi Konsep Pengembangan Pekalongan Baru;
 - Road Map Percepatan Pengembangan Pariwisata Kota Pekalongan;
 - Penelitian Analisis Investasi Penyertaan Modal Perumda Tirtayasa



Gambar 3.161 Workshop Fasilitasi Riset bersama dan Jaringan Penelitian Pengembangan Kota Pekalongan

Sumber: Bappeda, Kota Pekalongan, 2020

2. Program Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 710.100.000,- (tujuh ratus sepuluh juta seratus ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 642.862.250,- (*unaudited*), dengan indikator output sebanyak 4 (empat) indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, semua indikator telah tercapai.

- a. Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.294 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.294 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengembangan Iptek dan Inovasi Daerah

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
1	Fasilitasi Pengembangan Inovasi dan Kreatifitas Daerah	Jumlah keikutsertaan pameran produk inovasi	event	1	1	1
		Jumlah pemenang krenova yang terseleksi	pemenang	5	5	5
		Jumlah event pamaeran	event	1	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		inovasi dan kreatifitas pembangunan Kota Pekalongan				
		Jumlah FGD/rakor/workshop tim koordinasi penguatan sistem inovasi daerah yang terfasilitasi	kali	5	5	5

Sumber: Bappeda, Kota Pekalongan, 2020

- b. Kegiatan Inovasi dan Kreatifitas Daerah merupakan kegiatan yang diadakan dalam rangka pengembangan kreatifitas dan kemampuan inovasi masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing masyarakat. Untuk memotivasi pengembangan teknologi dan pencapaian, serta membangkitkan kepedulian masyarakat. Kegiatan ini memiliki 4 (empat) indikator yang kesemuanya tercapai pada tahun 2019.



Gambar 3.162 Pameran Inovasi dan Pelatihan Inovasi Kewirausahaan

Sumber: Bappeda, Kota Pekalongan, 2020

Tabel 3.295 Pemenang dan Judul Inovasi Krenova Tahun 2019

No.	Nama Pengusul	Inovasi yang diusulkan
1	M. Khoirul Lutfi	"Shoot!" Kaos Anti Radiasi dan Kaos Augmented Reality
2	Aji Putranto	Membuat Strain Baru Ikan Hias Guppy dan Cupang Sendiri yang Berkualitas Ekspor
3	Anaf Uliany,dkk	Pengolahan Limbah Cair Sistem Koagulasi dan Biosand Berbasis Home Industri
4	Khusnawan, ST	Alat Pembersih Biji Milet untuk Pakan Burung
5	Rochiman	Art & Furniture Limbah Ranting Pohon

Sumber: Bappeda, Kota Pekalongan, 2020

Pada urusan penelitian dan pengembangan, pada tahun 2019 ini Kota Pekalongan meraih penghargaan yaitu peringkat III kategori Inovasi pada Anugerah Indeks Daya Saing Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 3.163 Penghargaan Pada Anugerah IDSD Tingkat Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Bappeda, Kota Pekalongan, 2020

3.2.4.5. Fungsi Lain

Pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan khususnya pada fungsi lain, dilaksanakan oleh lintas perangkat daerah, antara lain bagian-bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat dan Kecamatan.

Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan Kota Pekalongan pada urusan Fungsi Lainnya dilaksanakan dalam 23 program, yakni Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan, Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai (DBHCHT), Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Hukum, Program Penataan Ketatalaksanaan, Kelembagaan Dan Pendayagunaan Aparatur, Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian, Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian, Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan Dan Sosial Kemasyarakatan, Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan, Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media Dan Keprotokoleran, Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah, Program Pelayanan Penyusunan Dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Program Pengawasan Internal Terhadap Penyelenggaraan Tupoksi Pd Dan Kasus Pengaduan, Program Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Program Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Dan Pengawasan Reformasi Birokrasi, Program Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme Dan Layanan APIP, Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan APF, Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Di Wilayah Utara, Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Di Wilayah Selatan, Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Di Wilayah Barat dan Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Di Wilayah Timur. Capaian realisasi kinerja program ini terdistribusi dalam 36 (tiga puluh enam) indikator Kinerja Program, dengan realisasi sebanyak 28 indikator yang mencapai target, 5 indikator belum mencapai target dan 3 belum ada capaiannya (NA).

Realisasi Indikator Kinerja Program Fungsi lainnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan

Program ini dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Pekalongan. Capaian program ini diukur dengan 1 Indikator program, yaitu Nilai LPPD. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.296 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
1	Persentase efektivitas kerjasama daerah	100	persen	-	145%
2	Persentase realisasi patok batas wilayah	33	persen	-	12,97%
3	Nilai LPPD	3,04	Indeks	3,21	NA

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda, Kota Pekalongan, 2020

Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan kualitas Administrasi Pemerintahan yang ditetapkan ada 3 (tiga) program, 2 (dua) tercapai dan 1 (satu) tidak tercapai. Ketercapaian program pada indikator persentase efektivitas kerjasama daerah melebihi target yang telah ditetapkan karena dilaporkan secara kontinyu oleh OPD yang melaksanakan kerjasama pada Bagian Pemerintahan, sehingga data kerjasama yang ada terus update.

Adapun Indikator Program yang tidak tercapai di karenakan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun dalam renja program dan kegiatan tidak sesuai dengan kenyataan pada saat pelaksanaan kegiatan pemasangan patok batas wilayah, harga material dan mobilisasi mengalami kenaikan. Sedangkan ukuran patok batas wilayah menyesuaikan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Untuk nilai LPPD belum dapat disajikan karena nilai LPPD dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada bulan April bertepatan dengan Hari Otonomi Daerah.

2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan. Capaian program ini diukur dengan 1 Indikator program, yaitu Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.297 Target dan Capaian Indikator
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
Bagian Hukum					
1	Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif	100,00	persen	105,55	155,56

Sumber: Bagian Hukum Setda, Kota Pekalongan, 2020

Di Tahun 2019 Target Program Penataan Peraturan Perundang-undangan adalah Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari Eksekutif 100 % (9 Perda) dengan Capaian 15 Perda maka Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari Eksekutif nilai capaiannya sebesar 155,56% dengan perhitungan 15 Perda / 9 Perda x 100 %.

3. Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai (DBHCHT)

Program ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan. Capaian program ini diukur dengan 1 Indikator program, yaitu Persentase Raperda menjadi Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.298 Target dan Capaian Indikator
Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai (DBHCHT)**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
Bagian Hukum					
1	Ketentuan Cukai yang telah disosialisasikan	100,00	persen	100	100

Sumber: Bagian Hukum Setda, Kota Pekalongan, 2020

4. Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Hukum

Program ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan. Capaian program ini diukur dengan 1 Indikator program, yaitu Persentase pengaduan masyarakat bidang hukum yang tertangani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.299 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Hukum**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
Bagian Hukum					
1	Persentase pengaduan masyarakat bidang hukum yang tertangani	72,00	persen	100	100

Sumber: Bagian Hukum Setda, Kota Pekalongan, 2020

5. Program Penataan Ketatalaksanaan, Kelembagaan Dan Pendayagunaan Aparatur

Program ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan. Capaian program ini diukur dengan 1 Indikator program, yaitu Rata-rata nilai persepsi kinerja unit pelayanan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.300 Target dan Capaian Indikator
Program Penataan Ketatalaksanaan, Kelembagaan Dan Pendayagunaan Aparatur**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
Bagian Organisasi					
1	Rata-rata nilai persepsi kinerja unit pelayanan	80,00	indeks	76,67	82,21
2	Persentase PD yang melaksanakan evaluasi kelembagaan	6,5	%	-	87,5

Sumber: *Bagian Organisasi Setda, Kota Pekalongan, 2020*

a. Rata-rata nilai persepsi kinerja unit pelayanan

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2016, maka dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam penerapannya, untuk menilai kualitas pelayanan publik dilakukan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan secara berkala minimal satu tahun sekali. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mengetahui kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam melakukan penilaian kepuasan masyarakat, terdapat 9 (sembilan) unsur penilaian antara lain: persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetisi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana prasarana dan penanganan pengaduan.

Dari hasil penilaian Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh 66 (enam puluh enam) SKPD, 7 (tujuh) OPD merasa sangat puas atau sangat baik, 55 (lima puluh lima) OPD rata-rata masyarakat merasa puas atau baik dengan pelayanan Pemerintah Kota Pekalongan sedangkan 6 (enam) OPD mendapat hasil kurang puas atau kurang baik. Dari hasil tersebut maka nilai SKM Kota Pekalongan 82,21 dengan kategori Baik. Hasil tersebut diharapkan Pemerintah Kota Pekalongan ke depan akan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

b. Persentase PD yang melaksanakan evaluasi kelembagaan

Adanya aturan dari Pemerintah Pusat yang telah diamanatkan dalam Permendagri No. 99 Tahun 2018 dan Permenpan No. 20 Tahun 2018 tentang Evaluasi Kelembagaan sesuai dengan urusan masing-masing.

Adanya apresiasi yang tinggi dari Perangkat Daerah atas kebijakan pusat terkait evaluasi kelembagaan sehingga banyak perangkat daerah mengajukan perubahan kelembagaan yang disesuaikan dengan kewenangan dan urusan masing-masing. Adanya regulasi dari pusat terkait perubahan nomenklatur pada perangkat daerah tertentu sehingga pemerintah daerah harus segera melakukan penyesuaian kelembagaan.

Dari jumlah OPD dilingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sebanyak 31 OPD yang telah melaksanakan evaluasi kelembagaan sebanyak 8 OPD. Kedelapan OPD tersebut adalah Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; Dinas Kelautan dan Perikanan; dan Sekretariat Dewan.

Namun dari kedelapan OPD yang melaksanakan evaluasi kelembagaan hanya 7 OPD yang disetujui yaitu Dinas Kesehatan; Dinas Pendidikan; Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; serta Dinas Kelautan dan Perikanan. Sedangkan Sekretariat Dewan tidak disetujui karena apabila ingin melakukan perubahan SOTK maka harus merubah cascading, dan apabila ingin ditindaklanjuti maka harus menunggu penyusunan RPJMD yang baru.

6. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan. Capaian program ini diukur dengan 1 Indikator program, yaitu Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Evaluasi AKIP Kota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.301 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
Bagian Organisasi					
1	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada Evaluasi AKIP Kota	12,00	NA	10,46	NA

Sumber: Bagian Organisasi Setda, Kota Pekalongan, 2020

Dari data sebagaimana tercantum di atas, dapat dilihat bahwa nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2019 mengalami kenaikan 0,63 poin dari tahun 2018 dengan nilai 10,46 menjadi 11,09.

Laporan Kinerja pada tingkat Pemerintah Daerah dan beberapa OPD telah menyajikan analisis pencapaian kinerja yang berorientasi hasil, perbandingan data kinerja yang memadai selama tahun berjalan dan tahun sebelumnya, serta informasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Namun di tingkat OPD, kualitas pelaporan informasi kinerja pada beberapa OPD masih perlu ditingkatkan, termasuk pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan OPD sebagai *feedback* dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja.

Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka perbaikan antara lain sebagai berikut:

- Masing-masing OPD sudah membuat perencanaan strategis yang perumusan tujuan dan sasaran lebih berorientasi pada hasil, relevan dan terukur;
- Menetapkan ukuran keberhasilan atas kondisi yang ingin diwujudkan dalam jangka menengah dalam rangka meningkatkan kualitas pertanggungjawaban jangka menengah Pemerintah Kota Pekalongan dan OPD;
- Menjabarkan lebih lanjut sasaran strategis dan indikator kinerja mulai dari tingkat Pemerintah Daerah sampai indikator kinerja individu sesuai tugas dan fungsi sehingga tercipta manajemen kinerja pemerintahan yang berorientasi hasil;

Mengintegrasikan aplikasi e-LAKIP dengan aplikasi SIMRAL (Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan).

7. Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian

Program ini dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan. Capaian program ini diukur dengan 1 Indikator program, yaitu Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.302 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
Bagian Perekonomian					
1	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	100,00	Persen	100	100
2	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	1	sektor	1	2

Sumber: Bagian Perekonomian Setda, Kota Pekalongan, 2020

Pengembangan sektor ekonomi kreatif Kota Pekalongan dengan pembentukan lembaga ekonomi kreatif serta pengembangan 7 sektor ekonomi kreatif yaitu kerajinan, desain, fashion, musik, seni pertunjukan, kuliner serta televisi dan radio. Dari tujuh ke sektor sudah tercapai lima sektor yaitu kerajinan, fashion, seni pertunjukan, televisi & radio dan pada tahun 2019 sektor kuliner dan musik.

8. Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian

Program ini dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian Setda Kota Pekalongan. Capaian program ini diukur dengan 1 Indikator program, yaitu Persentase kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, Perusda, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan pelaksanaannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.303 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
Bagian Perekonomian					
1	Persentase kegiatan strategis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi-UKM, Perusda, Pertanian, Perikanan, Kelautan, Ketahanan pangan yang dikoordinasikan pelaksanaannya	100,00	persen	100	100

Sumber: Bagian Perekonomian Setda, Kota Pekalongan, 2020

9. Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan

Program ini dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Pengendalian Pembangunan Setda Kota Pekalongan. Capaian program ini diukur dengan 1 Indikator

program, yaitu Persentase kegiatan yang dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.304 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang
Administrasi Pembangunan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Pengendalian Pembangunan					
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan	100,00	persen	-	99,57
2	Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	100,00	persen		95,29 %
3	Persentase OPD tertib pelaporan pelaksanaan APBD	100,00	persen		100 %

Sumber: Bagian PBJ dan Dalbang Setda, Kota Pekalongan, 2020

Program ini dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Adminitrasi Pembangunan Setda Kota Pekalongan terkait dengan kewenangan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. Indikator ini diukur berdasarkan jumlah kegiatan se Kota Pekalongan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2019. Pada Tahun 2019 terdapat 2.073 kegiatan dan telah terlaksana sebanyak 2.064 kegiatan, sehingga ada 9 kegiatan yang tidak dilaksanakan karena perencanaan penyusunan anggaran yang kurang matang, Sumber Daya Manusia yang kurang dalam melaksanakan kegiatan, dan ada sisa dari anggaran pemeliharaan pekerjaan fisik konstruksi yang tidak dilakukan pencairan karena masih dalam masa pemeliharaan.

Adapun terkait indikator persentase keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa yang belum dapat mencapai target 100 %, mengingat dari total Paket yang ditenderkan sejumlah 85 paket, sedangkan realisasi pengadaan adalah 81 paket. Hal ini disebabkan 4 (empat) paket terkait, Pembuatan DED Zona IV TPA Degayu (Revitalisasi Tempat Pengolahan Sampah), Biaya Konsultasi AMDAL Pasar Banjarsari (Pengembangan data dan informasi lingkungan), Pembangunan Menara Pandang Viewing Deck Obyek Wisata Pusat Informasi Mangrove (PIM), Jasa Konsultasi Penyusunan Masterplan Drainase Kota Pekalongan (Kegiatan Penyusunan Masterplan Drainase) tidak dapat dilaksanakan (gagal lelang) disebabkan oleh jumlah penawaran yang masuk tidak memenuhi kriteria dan waktu pelaksanaan tidak mencukupi. 10.

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan Dan Sosial Kemasyarakatan

Program ini dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Pekalongan. Capaian program ini diukur dengan 1 Indikator program, yaitu Persentase kegiatan yang dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.305 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan Dan Sosial Kemasyarakatan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
Bagian Kesejahteraan Rakyat					
1	Persentase penyelenggara pendidikan keagamaan yang mendapatkan sertifikat/ syahadah	90,00	Persen	97,79	99,07

Sumber: Data Guru TPQ & MADIN Penerima Bantuan Transport TA.2018 & TA.2019 pada Bagian Kesra Setda Kota Pekalongan 2020.

Berdasarkan tabel di atas tampak adanya peningkatan capaian pada Tahun Anggaran 2019 pada program peningkatan kapasitas lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Peningkatan tersebut dimotori oleh meningkatnya jumlah tenaga pengajar TPQ & MADIN yang mempunyai sertifikat syahadah sehingga memenuhi persyaratan untuk dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kota Pekalongan.

Berdasarkan data, jumlah tenaga pengajar TPQ & MADIN yang ada di Kota Pekalongan adalah sebanyak 2.497 orang (sumber: Data Tenaga Pengajar TPQ & MADIN Kota Pekalongan Tahun 2019, Kemenag Kota Pekalongan). Tahun 2018, sebanyak 2.442 orang (97,79%) guru TPQ & MADIN di Kota Pekalongan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kota Pekalongan berupa syahadah dan bantuan transport. Jumlah tersebut meningkat di Tahun 2019, yaitu sebanyak 2.474 orang atau sebesar 99,07%.



Gambar 3.164 Pembinaan Kepada Para Tenaga Pengajar TPQ dan MADIN se-Kota Pekalongan.

Sumber: Bagian Kesra Setda, Kota Pekalongan, 2020

11. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan

Program ini dilaksanakan oleh Bagian Umum Setda Kota Pekalongan. Capaian program ini diukur dengan 1 Indikator program, yaitu Persentase medical general check up. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.306 Target dan Capaian Indikator Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
Bagian Umum					
1	Persentase medical general check up	75,00	persen	0	0

Sumber: Bagian Umum Setda, Kota Pekalongan, 2020

Realisasi indikator belum mencapai target dikarenakan belum adanya jadwal rencana pemeriksaan *medical general check up* serta tingginya mobilitas Kepala Daerah dan Wakil Daerah.

12. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media Dan Keprotokoleran

Program ini dilaksanakan oleh Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kota Pekalongan. Capaian program ini diukur dengan 1 Indikator program, yaitu Persentase kerjasama informasi dengan mas media yang efektif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.307 Target dan Capaian Indikator
Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media Dan Keprotokoleran**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
Bagian Hubungan Masyarakat					
1	Persentase kerjasama informasi dengan mas media yang efektif	100,00	persen	97,79	94,84

Sumber: Bagian Protokol dan Kompim Setda, Kota Pekalongan, 2020

Dalam Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dan Keprotokolan capaian pada tahun 2019 yaitu 94,84% sedangkan Target pada tahun 2019 yaitu 100%, hal ini berarti dalam program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dan Keprotokolan pada tahun 2019 belum mencapai target, dikarenakan dalam kegiatan fasilitasi kehumasan pada pelaksanaan press tour mengalami perubahan, pada rencana awal kegiatan press tour dilakukan dengan menggunakan kereta api tetapi pada saat pelaksanaan kegiatan dengan menyewa Bus.

13. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Pekalongan. Capaian program ini diukur dengan 1 Indikator program, yaitu persentase perda inisiatif yang diterbitkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.308 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
Sekretariat DPRD					
1	persentase perda inisiatif yang diterbitkan	100,00	persen	-	100

Sumber: Set DPRD, Kota Pekalongan, 2020

Berdasarkan Keputusan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Pekalongan Nomor 01/BAPEMPERDA/DPRD/VI/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan No 07/BAPEMPERDA/DPRD/XI/2018 Tentang Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019. Ditetapkan sebagai berikut :

Rancangan Peraturan Daerah Usulan DPRD Kota Pekalongan :

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Drainase Perkotaan ;
- Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) ;

d. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter ;

Rancangan Peraturan Daerah Usulan Walikota Pekalongan :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat (lanjutan pembahasan tahun 2018)
- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 (kumulatif terbuka) ;
- c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 (kumulatif terbuka)
- d. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020 (kumulatif terbuka)
- e. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan (tindak lanjut dari peraturan lebih tinggi) ;
- f. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (tindak lanjut dari peraturan lebih tinggi) ;
- g. Rancangan Peraturan Daerah tentang PT Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa (Perseroda) ;
- h. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (lanjutan pembahasan tahun 2017) ;
- i. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Perindustrian Daerah.

Usulan Rancangan Peraturan Daerah dari DPRD sebanyak 4 (empat) Raperda semua masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Usulan Rancangan Peraturan Daerah dari Walikota sebanyak 12 (dua belas) Raperda semua masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda)

14. Program Pelayanan Penyusunan Dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kota Pekalongan. Capaian program ini diukur dengan 1 Indikator program, yaitu Persentase Perda inisiatif yang ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.309 Target dan Capaian Indikator
Program Pelayanan Penyusunan Dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
Sekretariat DPRD					
1	Persentase Perda inisiatif yang ditetapkan	100,00	persen	83,00	25,00

Sumber: Set DPRD, Kota Pekalongan, 2020

Dalam pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tidak semua usulan Raperda menjadi Peraturan Daerah (PERDA). Dari 4 (empat) Raperda usulan DPRD, terdapat 3 Raperda yang tidak menjadi Perda :

- a. Rancangan Peraturan tentang Sistem Drainase Perkotaan. Raperda tersebut tidak dibahas karena kekosongan waktu menjelang dan pasca pemilihan anggota Legislatif ;
- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Raperda tersebut tidak dibahas karena kekosongan waktu menjelang dan pasca pemilihan anggota Legislatif ;
- c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter. Raperda tersebut tidak dibahas karena kekosongan waktu menjelang dan pasca pemilihan anggota Legislatif.

15. Program Pengawasan Internal Terhadap Penyelenggaraan Tupoksi PD Dan Kasus Pengaduan

Program ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan. Capaian program ini diukur dengan 2 Indikator program, yaitu Persentase Capaian Target Pengawasan Internal pada Wilayah Irbanwil I, Persentase Capaian Target Pengawasan Internal pada Wilayah Irbanwil II. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.310 Target dan Capaian Indikator
Program Pengawasan Internal Terhadap Penyelenggaraan
Tupoksi PD dan Kasus Pengaduan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
Inspektorat					
1	Persentase Capaian Target Pengawasan Internal pada Wilayah Irbanwil I	100,00	persen	-	100,00
2	Persentase Capaian Target Pengawasan Internal pada Wilayah Irbanwil II	100,00	persen	-	100,00

Sumber: Inspektorat Kota Pekalongan, 2020

Program Pengawasan Internal Terhadap Penyelenggaraan Tupoksi PD Dan Kasus Pengaduan merupakan bagian dari proses manajemen pemerintahan yang juga merupakan urusan wajib bagi pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pengawasan internal di daerah yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Pengawasan internal ini sangat dibutuhkan untuk mendukung tercapainya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah. Dari indikator 3 program tersebut, seluruhnya dapat tercapai 100% sesuai dengan target.

Dampak Program Pengawasan Internal Terhadap Penyelenggaraan Tupoksi PD Dan Kasus Pengaduan, yaitu saran yang disampaikan kepada pimpinan Perangkat Daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain dapat mengoptimalkan pencapaian target-target yang ditetapkan serta membantu proses akuntabilitas dan peningkatan kualitas pengelolaan laporan keuangan Pemerintah Kota Pekalongan, yang ditunjukkan dengan tren opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

16. Program Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Program ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan. Capaian program ini diukur dengan 1 Indikator program, yaitu Persentase OPD yang menyelenggarakan SPIP level berkembang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.311 Target dan Capaian Indikator
Program Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
Inspektorat					
1	Persentase OPD yang menyelenggarakan SPIP level berkembang	61,29	persen	51,61	61,29

Sumber: Inspektorat Kota Pekalongan, 2020

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah, dilaksanakan Program Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui pelaksanaan pembinaan dan pemantauan secara terus-menerus implementasi penyelenggaraan SPIP pada setiap aktivitas dan unit organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, atas lima komponen pengendalian yang integral meliputi : lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, serta pemantauan pengendalian. Pada Program Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), indikator tersebut dapat tercapai sesuai target yaitu 61,29%, dengan jumlah OPD yang telah menyelenggarakan SPIP level berkembang sebanyak 19 OPD dari 31 OPD yang difasilitasi / evaluasi penyelenggaraan SPIP.

Pencapaian target indikator kinerja Tingkat Maturitas implementasi SPIP pada Level 3 dengan skor 3,022, atau pada tingkat maturitas “terdefinisi”, menunjukkan Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik serta semakin efektifnya pelaksanaan rancangan pengendalian intern yang ada di masing-masing SKPD dan rancangan pengendalian intern di Pemerintah Kota Pekalongan.



Gambar 3.165 Penghargaan SPIP Level 3

Sumber: Inspektorat Kota Pekalongan, 2020

Capaian target sasaran strategis Tingkat Maturitas implementasi SPIP Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2019 tercapai sebesar 110% atau kategori Sangat Baik, diukur dari

capaian Indikator Kinerja Utama “Level Maturitas SPIP” yaitu dengan membandingkan target yang ingin dicapai yaitu Level 3 Dengan Catatan (DC) dengan score 2,5 dan berdasarkan hasil *Qualitas Assurance* (QA) BPKP yang menjamin hasil Penilaian Mandiri (Self Asesment) oleh APIP Inspektorat Kota Pekalongan dengan nilai 3,02 atau level Maturitas SPIP Level 3 Penuh.

Dampak dengan dilaksanakan Program Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adanya pembangunan Infrastruktur SPIP yang perlu dimiliki atau perbaikan infrastruktur SPIP yang ada berdasarkan hasil pemetaan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

17. Program Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Dan Pengawasan Reformasi Birokrasi

Program ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan. Capaian program ini diukur dengan 2 Indikator program, yaitu Persentase penyelesaian kasus-kasus / pengaduan masyarakat dan Persentase OPD dengan hasil evaluasi pembangunan ZI minimal B. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.312 Target dan Capaian Indikator
Program Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Dan Pengawasan Reformasi Birokrasi**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
Inspektorat					
1	Persentase penyelesaian kasus-kasus / pengaduan masyarakat	100,00	persen	100,00	100,00
2	Persentase OPD dengan hasil evaluasi pembangunan ZI minimal B	48,39	persen	32,26	54,84

Sumber: Inspektorat Kota Pekalongan, 2020

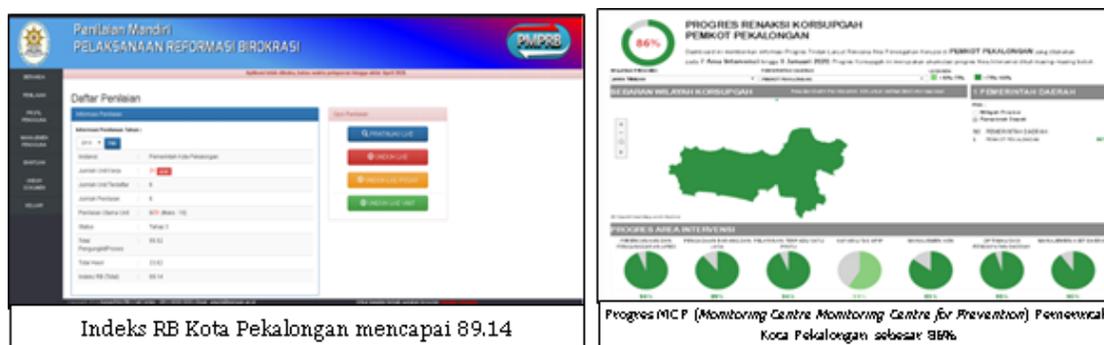
Program Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Dan Pengawasan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk membangun budaya anti korupsi kepada seluruh pegawai serta mendorong dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, melalui beberapa kegiatan yang dilakukan secara terintegrasi, sebagai upaya pencegahan korupsi secara bertahap dan berkelanjutan untuk membangun budaya anti korupsi yang tidak dapat diperoleh secara instan dalam satu atau dua kali penyelenggaraan.

Pada Program Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Dan Pengawasan Reformasi Birokrasi, indikator tersebut melampaui target yaitu Persentase OPD dengan hasil evaluasi pembangunan ZI minimal B 54,84% dari target 48,39%, dengan jumlah OPD yang hasil evaluasi pembangunan ZI minimal B sebanyak 17 OPD dari 31 OPD yang difasilitasi / evaluasi. Capaian kinerja yang sangat baik karena adanya Komitmen Pemerintah Kota Pekalongan dan peran APIP Inspektorat dalam mengawal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui beberapa kegiatan : Asistensi / evaluasi pembangunan zona integritas dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Koordinasi pelaporan harta kekayaan dan pajak-pajak pribadi ASN, Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif dan Fasilitasi satgas saber pungli. Capaian kinerja yang sangat baik ini antara lain disebabkan adanya transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah, komitmen seluruh ASN untuk segera menyelesaikan kasus juga rendahnya tingkat pengaduan masyarakat yang berpotensi pengawasan oleh APIP

maupun APH. Kondisi tersebut menunjukkan keberhasilan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang digunakan sebagai instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara mandiri (*self-assessment*). Hasil penilaian atas fakta objektif terhadap setiap program dalam komponen pengungkit (proses) dan sasaran reformasi birokrasi Pemerintah Kota Pekalongan diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKP, agar dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Dampak dari pelaksanaan program, Hasil Penilaian dan Evaluasi atas PMPRB on-line tahun 2019 dengan hasil penilaian Indeks RB Kota Pekalongan mencapai 89.14, Hasil Akhir Penilaian Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah Tahun 2019, Pemerintah Kota Pekalongan sebagai Pemenang Terbaik II Kategori Efektifitas dan Efisiensi Manajemen Pemerintahan dengan Nilai 39 (Sangat Baik), Hasil Verifikasi KPK Tahun 2019 atas Progres MCP (*Monitoring Centre Monitoring Centre for Prevention*) Pemerintah Kota Pekalongan sebesar 86% (Ranking 11 Tingkat Provinsi Jawa Tengah).



Gambar 3.166 Indeks Reformasi Birokrasi

Sumber: Inspektorat Kota Pekalongan, 2020

18. Program Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme Dan Layanan APIP

Program ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan. Capaian program ini diukur dengan 1 Indikator program, yaitu Persentase Capaian target pemenuhan infrastruktur KPA-Kapabilitas APIP. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.313 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme Dan Layanan APIP**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
Inspektorat					
1	Persentase Capaian target pemenuhan infrastruktur KPA-Kapabilitas APIP	60,00	persen	51,66	64,24

Sumber: Inspektorat Kota Pekalongan, 2020

Hasil pengukuran indikator kinerja Program Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme Dan Layanan APIP yaitu Persentase Capaian target pemenuhan infrastruktur KPA-Kapabilitas

APIP pada tahun 2019 sebesar 64,24 % atau telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 60%. Capaian kinerja yang sangat baik ini sesuai dengan kinerja nyata yang dilakukan APIP Inspektorat dengan memenuhi 97 infrastruktur KPA dari 151 infrastruktur Kapabilitas APIP Tahun 2019, antara lain APIP Kota Pekalongan telah memiliki dokumen Renstra, PKPT, dan SOP tindak lanjut pengawasan, serta telah melakukan pengawasan dengan menerapkan Manajemen Berbasis Risiko (Risiko Audit). Selain itu, BPKP senantiasa memberikan dukungan, bantuan teknis dalam membangun/menyusun infrastruktur yang harus dibangun dan dipenuhi Inspektorat Kota Pekalongan untuk mencapai tahapan target peningkatan kapabilitas APIP level 5.

Dampak dari terlampauinya Target Persentase Capaian target pemenuhan infrastruktur KPA-Kapabilitas APIP, yaitu hasil Quality Assurance (QA) BPKP Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Pekalongan pada tahun 2019 telah berhasil mencapai Level Kapabilitas APIP level 3 dari 5 level kapabilitas APIP. Tercapainya target kapabilitas APIP Level 3 tersebut, merupakan keberhasilan upaya terstruktur Pemerintah Kota Pekalongan untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP Inspektorat Kota Pekalongan agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif.



Gambar 3.167 Indeks Reform Kapabilitas APIP Level 3

Sumber: Inspektorat Kota Pekalongan, 2020

19. Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF

Program ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan. Capaian program ini diukur dengan 1 Indikator program, yaitu Persentase penyelesaian TLHP APF. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.314 Target dan Capaian Indikator
Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
Inspektorat					
1	Persentase penyelesaian TLHP APF	85,00	persen	87,41	89,61

Sumber: Inspektorat Kota Pekalongan, 2020

Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF merupakan bentuk koordinasi, konsolidasi, verifikasi dan evaluasi pelaksanaan hasil pengawasan dan/atau

pemeriksaan. Program tersebut didukung kegiatan : Pemantauan dan pengendalian Tindak lanjut hasil temuan pengawasan, Pemutakhiran data dan informasi pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Pengembangan Simwas) dan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan.

Indikator Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF yaitu Persentase penyelesaian TLHP APF dengan target kinerja 85,00% dan capaian kinerja sebesar 89,61 yang diukur dari laporan hasil pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) APF, progress penyelesaian TLRHP sejak tahun 2005 sampai dengan semester II tahun 2019 dengan jumlah temuan sebanyak 256 dengan 597 rekomendasi dan telah selesai ditindak lanjuti sebanyak 507 rekomendasi atau 89,61%. Selain itu juga karena meningkatnya kepatuhan OPD dalam menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal maupun pemeriksaan internal yang menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

20. Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Masyarakat Di Wilayah Utara

Program ini dilaksanakan oleh Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Capaian program ini diukur dengan 3 Indikator program, yaitu Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Utara, Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Utara dan Tingkat kinerja bidang pembinaan masyarakat Wilayah Utara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.315 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan
Masyarakat Di Wilayah Utara**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
Kecamatan Pekalongan Utara					
1	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Utara	100,00	persen	-	100
2	Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Utara	100,00	persen	-	100
3	Tingkat kinerja bidang pembinaan masyarakat Wilayah Utara	100,00	persen	-	100

Sumber: Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, 2020

Ketiga indikator program peningkatan kinerja pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat tidak tercapai di tahun 2018 karena ketiga indikator program diatas baru dilaksanakan ditahun 2019 sesuai dengan perubahan RPJMD 2016 – 2018.

21. Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Masyarakat Di Wilayah Selatan

Program ini dilaksanakan oleh Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan. Capaian program ini diukur dengan 3 Indikator program, yaitu Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Selatan, Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Selatan dan Tingkat kinerja bidang pembinaan masyarakat Wilayah Selatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.316 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan
Kemasyarakatan Di Wilayah Selatan**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
Kecamatan Pekalongan Selatan					
1	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Selatan	100,00	persen	-	100,00
2	Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Selatan	100,00	persen	-	100,00
3	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Selatan	100,00	persen	-	100,00

Sumber: Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, 2020

22. Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Di Wilayah Barat

Program ini dilaksanakan oleh Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan. Capaian program ini diukur dengan 3 Indikator program, yaitu Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Barat, Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Barat dan Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.317 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan
Kemasyarakatan Di Wilayah Barat**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
Kecamatan Pekalongan Barat					
1	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Barat	100,00	persen	-	100,00
2	Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Barat	100,00	persen	-	100,00
3	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Barat	100,00	persen	-	100,00

Sumber: Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, 2020

Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan, dan Pembinaan Kemasyarakatan di Wilayah Barat, bahwa program ini baru dilaksanakan pada tahun 2019, sesuai perubahan RPJMD 2016-2021, sehingga belum ada data capaian tahun 2018.

23. Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Di Wilayah Timur

Program ini dilaksanakan oleh Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Capaian program ini diukur dengan 3 Indikator program, yaitu Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Timur, Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Timur dan Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Timur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.318 Target dan Capaian Indikator
Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan
Kemasyarakatan Di Wilayah Timur**

No	Indikator Program	Target 2019		Capaian 2018	Capaian 2019
		Angka	satuan		
Kecamatan Pekalongan Timur					
1	Tingkat kinerja bidang pemerintahan Wilayah Timur	100,00	persen	-	100,00
2	Tingkat kinerja bidang pembangunan Wilayah Timur	100,00	persen	-	100,00
3	Tingkat kinerja bidang pembinaan kemasyarakatan Wilayah Timur	100,00	persen	-	100,00

Sumber: Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, 2020

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan

Program ini dilaksanakan dalam 9 (sembilan) kegiatan, total anggaran program ini sebesar Rp. 803.500.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 722.312.500,- (*unaudited*) dengan indikator output sebanyak 11 (sebelas) indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 10 (sepuluh) indikator tercapai dan 1 (satu) indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.319 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

**Tabel 3.319 Target dan Capaian Kinerja Output pada
Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintahan**

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Bagian Tata Pemerintahan						
1	Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)	Jumlah kegiatan sepeda K3 dalam rangka penyerapan aspirasi dan go green	kegiatan	33	33	33
2	Lomba K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)	Jumlah kegiatan Lomba K3 RT Tahun 2019	kegiatan	3	3	4
3	Fasilitasi kerjasama daerah	Jumlah Kerjasama antara Pemerinttah Kota dengan Pihak lain	Kerjasama	20	20	29
4	Koordinasi bidang pemerintahan	Rakor dan Sosialisasi Bidang Pemerintahan Kecamatan Kelurahan	kegiatan	14	14	12
		Jumlah kegiatan pembinaan pelaksanaan dana kelurahan yang dilaksanakan	kali	5	5	5
		Jumlah survey efektivitas pelaksanaan dana kelurahan yang dilaksanakan	Kelurahan	27	27	27

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
5	Pembinaan Administrasi Kelurahan	Jumlah Pembinaan Administrasi Kelurahan	Kelurahan	27	27	27
6	Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi	Jumlah Unsur Rupabumi yang diperbaharui di Kota Pekalongan	Unsur	4	4	4
7	Koordinasi pengadaan tanah	Jumlah dokumen penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum	dokumen	1	1	1
8	Pemasangan Patok Batas Wilayah	Jumlah Patok Tapal Batas Wilayah yang Terpasang	buah	100	100	55
9	Evaluasi penyusunan dokumen capaian standar pelayanan minimal (spm)	Lapuan Evaluasi Capaian SPM	dokumen	1	1	1

Sumber: Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, 2020

Penjelasan kegiatan yang tidak tercapai kinerjanya :

- a. Kegiatan Lomba K3 indikator output melebihi target kinerja di karenakan adanya penambahan kegiatan lomba di pertengahan tahun berjalan yaitu lomba lampu hias sehingga tidak masuk dalam renja 2019.
- b. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah Indikator Output melebihi target kinerja yang telah ditetapkan karena tingkat kesadaran dari OPD-OPD yang melaksanakan kegiatan kerjasama dengan pihak lain rutin dilaporkan pada Bagian Pemerintahan, sehingga data selalu tersaji.

Penjelasan kegiatan yang tidak tercapai kinerjanya :

- a. Koordinasi bidang pemerintahan indikator output tidak terpenuhi target dikarenakan jumlah rakor sosialisasi bidang pemerintahan kecamatan kelurahan bersifat tentative menunggu arahan Walikota.
- b. Kegiatan Pemasangan Patok Batas Wilayah indikator output jumlah Patok Tapal Batas Wilayah yang terpasang tidak terpenuhi target di karenakan rencana anggaran biaya pembuatan patok yang disusun tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pelaksana atau pemborong.

2. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program ini dilaksanakan dalam 6 (enam) kegiatan, total anggaran program ini sebesar Rp. 210.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 207.750.000,- (*unaudited*) dengan indikator output sebanyak 12 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 12 indikator tercapai dan tidak ada indikator yang tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.320 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

**Tabel 3.320 Target dan Capaian Kinerja Output
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan**

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Bagian Hukum						
1	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Produk Hukum Daerah yang tersusun	Perda	9	9	15
2	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	kali	2	2	2
		Jumlah aparatur pemerintah dan warga/masyarakat yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	100	100	100
3	Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah	Jumlah kajian Peraturan Perundang-undangan daerah	produk hukum	6	6	6
4	Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah Sosialisasi/FGD Kegiatan Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Kota Peduli HAM	kali	1	1	1
		Jumlah peserta yang mengikuti FGD RANHAM	orang	20	20	30
		Jumlah laporan RANHAM/Kota Peduli HAM di Kota Pekalongan yang tersusun	buku	4	4	4
5	Fasilitasi Peningkatan kesadaran hukum masyarakat	Jumlah Peserta Sosialisasi Kadarkum dan Lomba Kadarkum di Lingkungan Kota Pekalongan	orang	1440	1440	1640
6	Pembinaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum	Jumlah buku seri perundang-undangan RI dan buku perundang-undangan yang dibeli	buku	11	11	14
		Jumlah terintegrasinya website JDIIH Kota Pekalongan dengan JDHIN di BPHN	website	0	0	0

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		Jumlah website yang diintegrasikan	website	1	1	1
		Jumlah sosialisasi JDIIH Kota Pekalongan yang dilaksanakan	kali	1	1	1

Sumber: Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan, 2020

Kegiatan legalisasi rancangan peraturan perundang-undangan dalam bentuk pembuatan produk hukum Kota Pekalongan (Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Nota Kesepakatan dan produk hukum terkait lainnya). Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan melakukan koordinasi dengan instansi/dinas terkait dalam menyusun produk – produk hukum yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta disesuaikan karakteristik daerah Kota Pekalongan.

Tabel 3.321 Daftar Peraturan Daerah Kota Pekalongan Tahun 2019

No. Urut	Nomor Perda/ Tahun	Ditetapkan Tanggal	T e n t a n g	SKPD
1	1	18-Feb-19	Pengelolaan Barang Milik Daerah	BKD, Inspektorat
2	2	18-Feb-19	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bank Pekalongan	BKD, Bag. Perekonomian
3	3	18-Feb-19	Pengelolaan Satu Data Terpadu Daerah	Dinkominfo, Bappeda
4	4	18-Feb-19	Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan	Dinperpa
5	5	18-Feb-19	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Ketertiban Umum	DPUPR, Satpol PP
6	6	1-Apr-19	Penyelenggaraan pelayanan publik	DPMPTSP dan Organisasi
7	7	1-Apr-19	Ketersediaan bahan baku batik	DINDAKOP
8	8	1-Apr-19	Penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga	DPMPPA
9	9	22-Apr-19	Retribusi izin mendirikan bangunan	DPUPR
10	10	31-Jul-19	Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017	BKD
11	11	16-Aug-19	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	DINDAKOP
12	12	16-Aug-19	Penyelenggaraan Kearsipan	DINARPUS
13	13	16-Aug-19	Penyelenggaraan Perlindungan Anak	DPMPPA
14	14	9-Sep-19	Perubahan APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019	BKD
15	15	31-Dec-19	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2020	BKD

Pada Tahun 2019 rancangan perda atas usulan DPRD Kota dan Prakarsa sebanyak 4 raperda dan usulan Walikota sebanyak 12 raperda. Berdasarkan Keputusan DPRD Kota Pekalongan Nomor 09/DPRD/VI/2019 tentang Penetapan Perubahan Program Legislasi Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019, ditetapkan raperda sebagai berikut:

Rancangan Peraturan Daerah Usulan DPRD Kota Pekalongan :

- a. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
- b. Raperda tentang Sistem Drainase Perkotaan;
- c. Raperda tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK);
- d. Raperda tentang Pendidikan Karakter.

Rancangan Peraturan Daerah Usulan Walikota Pekalongan :

- a. Raperda tentang Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat (lanjutan Pembahasan Tahun 2018);
- b. Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018;
- c. Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019;
- d. Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2020;
- e. Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan (tindak lanjut dari peraturan yang lebih tinggi);
- f. Raperda tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
- g. Raperda tentang PT Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa (Perseroda);
- h. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (lanjutan pembahasan tahun 2017);
- i. Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- j. Raperda tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- k. Raperda tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- l. Raperda tentang Rencana Induk Perindustrian Daerah.

Adapun Raperda yang sampai dengan akhir Tahun 2019 belum ditetapkan dikarenakan masih dalam proses di Provinsi Jawa adalah Raperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Pekalongan Tahun 2019-2039 (RPIK).

Selain Raperda diatas, ada juga beberapa Raperda yang ditunda, ditarik, atau diperpanjang waktunya, antara lain :

- a. Raperda tentang PT. Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa (Perseroda);

- b. Raperda tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sosialisasi peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh tim dari Pemerintah Kota Pekalongan. Realisasi capaian kegiatan ini adalah 100% dalam wujud keluaran rapat sosialisasi sebanyak 2 kali. Sosialisasi peraturan perundangan dilaksanakan pada tanggal 10 April 2019 membahas Perda No.3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satu Data Daerah dan tanggal 21 Oktober 2019 membahas Perwal No.64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tahun Anggaran 2019.



Gambar 3.168 Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan

Sumber: Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan, 2020

Kegiatan Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru dengan target 6 produk hukum dan terealisasi 6 produk hukum. Kajian peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

- Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
- Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah;
- Peraturan Walikota Nomor 20A Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Bentuk dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
- Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Selanjutnya kegiatan dalam Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Azasi Manusia (RANHAM) bertujuan agar seluruh masyarakat Kota Pekalongan mendapatkan 10 (sepuluh) hak dasar sebagai manusia atau yang disebut Hak Azasi Manusia. Pada Tahun 2019, Pemerintah Kota Pekalongan mendapat penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai Kota Peduli HAM. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Pekalongan dalam melaksanakan kegiatan yang menyangkut tentang keadilan dibidang hukum patut dipertahankan bahkan ditingkatkan.

- b. Kegiatan pembinaan dan pengembangan jaringan Dokumentasi Hukum dilakukan dalam bentuk proses penyebaran informasi peraturan perundang-undangan terutama yang dihasilkan Pemerintah Kota Pekalongan sehingga pemahaman tentang Peraturan Perundang-undangan bagi aparatur pemerintahan dan masyarakat dapat optimal. Keluaran kegiatan ini adalah informasi peraturan perundang-undangan yang dapat dilihat melalui *website jdih.Pekalongankota.go.id* dan Pada Tahun 2019 dilaksanakan Sosialisasi JDIH Tingkat Kota Pekalongan/Pembinaan. Pada Tahun 2019, *website jdih.Pekalongankota.go.id* sudah terintegrasi dengan
- c. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kesadaran hukum dilaksanakan sebanyak 28 kali di Kelurahan se Kota Pekalongan, 2 Kali Sosialisasi Kadarkum Tingkat Kota dan Lomba Cerdas Cermat dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2019. Sosialisasi Kadarkum dan Lomba Cerdas Cermat Kadarkum dilaksanakan supaya Meningkatkan pemahaman/ kesadaran masyarakat thd produk hukum.

3. Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai (DBHCHT)

Program ini dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan, total anggaran program ini sebesar Rp. 737.220.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 709.100.000,- (*unaudited*) dengan indikator output sebanyak 1 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 1 indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.322 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

**Tabel 3.322 Target dan Capaian Kinerja Output
Program Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai (DBHCHT)**

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Bagian Hukum						
1	Sosialisasi Perundang-undangan di Bidang Cukai (DBHCHT)	Jumlah masyarakat yang diberikan penyuluhan/sosialisasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai	orang	500	500	500

Sumber: Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan, 2020

Sosialisasi Bidang Cukai dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan daerah/provinsi terbaru kepada aparatur pemerintah, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat pelaku usaha di bidang tembakau/rokok dan masyarakat umum Kota Pekalongan dilaksanakan dengan siaran Radio RKB, di Batik TV dan di kelurahan – kelurahan se Kota Pekalongan. Narasumber sosialisasi dari instansi/dinas terkait, antara lain Bagian Hukum, Kejaksaan, dan Satpol PP. Sosialisasi cukai tersebut berdampak pada menurunnya angka pelanggaran terhadap penjualan rokok ilegal. Hal ini terbukti semakin berkurangnya temuan rokok ilegal dalam operasi yang dilakukan Satpol PP dan dinas teknis lainnya.



Gambar 3.169 Sosialisasi Cukai Melalui Berbagai Media

Sumber: Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan, 2020

4. Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Hukum

Program ini dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan, total anggaran program ini sebesar Rp. 340.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 218.150.000,- (*unaudited*) dengan indikator output sebanyak 3 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 3 indikator tercapai dan tidak ada indikator yang tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.323 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.323 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Penanganan Pengaduan Masyarakat Bidang Hukum

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Bagian Hukum						
1	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang tertangani	kali	10	10	10
		Jumlah Perkara hukum masyarakat miskin yang terselesaikan	perkara	10	10	10

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
2	Pelayanan Advokasi dan Bantuan Hukum	Jumlah bulan pelayanan advokasi dan bantuan hukum dilingkungan Pemerintah Pekalongan yang tertangani	bulan	12	12	12

Sumber: Bagian Hukum Setda Kota Pekalongan, 2020

5. Program Penataan Ketatalaksanaan, Kelembagaan Dan Pendayagunaan Aparatur

Program ini dilaksanakan dalam 10 (sepuluh) kegiatan, total anggaran program ini sebesar Rp. 737.220.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 709.100.000,- (*unaudited*) dengan indikator output sebanyak 15 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 13 indikator telah tercapai dan 2 indikator belum tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.324 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.324 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Penataan Ketatalaksanaan, Kelembagaan Dan Pendayagunaan Aparatur

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Bagian Organisasi						
1	Percepatan Pemerintah Kota Pekalongan Menuju SMM ISO 9001:2015	Jumlah OPD yang memiliki sertifikat ISO 9001-2015	OPD	1	1	1
2	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)	PD yang menyusun SOP	PD	3	3	3
		PD yang terfasilitasi Penyusunan SP	PD	8	8	8
		Tersusunnya Perwal Standar Pelayanan	dokumen	1	1	1
		Tersusunnya Perwal Survey Kepuasan Masyarakat	dokumen	1	1	1
3	Survey Kepuasan Masyarakat	Nilai Persepsi Kinerja Unit Pelayanan	indeks	77	77	82,21
4	Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi	Jumlah Dokumen Evaluasi Roadmap RB	dokumen	1	1	1
5	Fasilitasi Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik	Proposal	10	10	10
6	Pengembangan Budaya Kerja	Jumlah Dokumen Program Pengembangan Budaya Kerja Aparatur	dokumen	1	1	1
7	Evaluasi, Penyusunan dan Penataan Kelembagaan Daerah	jumlah dokumen evaluasi kelembagaan yang tersusun	dokumen	1	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
8	Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	Jumlah dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja	dokumen	2	2	2
9	Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi	Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki potensi menjadi wilayah bebas dari Korupsi	PD	2	2	6
		jumlah sosialisasi dan pencaangan Zona Integritas	Kali	1	1	1
10	Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	jumlah dokumen aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang disusun	dokumen	0	0	0
		Jumlah Unit Kerja yang Mengikuti Sosialisasi Zona Integritas	Unit Kerja	0	-	0

Sumber: Inspektorat Kota Pekalongan, 2020

a. Percepatan Pemerintah Kota Pekalongan Menuju SMM ISO 9001:2015

Penerapan Sistem Manajemen Mutu diharapkan dapat meningkatkan kinerja para ASN sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat maupun mutu pelayanan publik di OPD dan juga bisa memperkuat daya saing OPD dimasa yang akan datang. Komitmen dan penerapan SMM ISO 9001:2015 yang berkesinambungan diharapkan juga bisa memperbaiki mindset setiap ASN dalam memperbaiki dan menjaga kualitas mutu pelayanan publik. Pada Tahun 2019 Bagian Organisasi memfasilitasi 1 OPD yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintah, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. Setiap OPD/unit kerja dari level tertinggi sampai level terendah wajib menyusun SOP. Dampak positif penyusunan SOP tersebut antara lain dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhanserta mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.

Target yang ditentukan pada tahun 2019 adalah 3 OPD yang menyusun SOP yaitu Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sedangkan OPD yang terfasilitasi penyusunan SP yaitu Kecamatan Pekalongan Timur (beserta seluruh kelurahan).

c. Survey Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas

pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Adapun dampak positifnya Pemerintah Kota Pekalongan dapat mengetahui:

- Penilaian dan persepsi masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik di masing-masing SKPD;
- Aspirasi masyarakat sebagai bahan tindak lanjut upaya nyata perbaikan kualitas pelayanan publik.

Tabel 3.325 Daftar Persepsi Penilaian Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Kota Pekalongan Tahun 2019

NO	OPD	NILAI	KATEGORI
1	Satuan Polisi Pamong Praja	93,01	Sangat Baik
2	Bagian Rumah Tangga Setda	92,22	Sangat Baik
3	Kelurahan Pasirkratonkramat	91,96	Sangat Baik
4	Bagian Hubungan Masyarakat Setda	90,74	Sangat Baik
5	Bagian Organisasi	89,91	Sangat Baik
6	Badan Keuangan Daerah	89,07	Sangat Baik
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	88,77	Sangat Baik
8	Dinas Perternakan dan Pangan	88,19	Baik
9	Dinas Perhubungan	88,19	Baik
10	Kelurahan Pringrejo	88,14	Baik
11	Kecamatan Pekalongan Selatan	87,94	Baik
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	87,90	Baik
13	Kelurahan Kuripan Kertoharjo	87,90	Baik
14	Kelurahan Kandang Panjang	87,87	Baik
15	Kelurahan Panjang Wetan	87,31	Baik
16	Kecamatan Pekalongan Utara	87,27	Baik
17	Kelurahan Kali Baros	86,95	Baik
18	Kelurahan Klego	86,93	Baik
19	Bagian Umum Setda	86,55	Baik
20	Kelurahan Medono	86,50	Baik
21	Kelurahan Krapyak	85,61	Baik
22	Kelurahan Noyontaansari	85,60	Baik
23	Bagian Hukum	85,42	Baik
24	Kelurahan Kuripan Yosorejo	85,30	Baik
25	BAPPEDA	85,28	Baik
26	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	85,22	Baik
27	Kecamatan Pekalongan Barat	84,92	Baik
28	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	84,87	Baik
29	Dinas Komunikasi dan Informasi	84,68	Baik
30	Bagian PBJ dan PP	84,24	Baik
31	Kelurahan Jenggot	84,03	Baik
32	Bagian Perekonomian	83,71	Baik

NO	OPD	NILAI	KATEGORI
33	Bagian Tata Pemerintahan Setda	83,62	Baik
34	Kelurahan Sokoduwet	83,50	Baik
35	Kelurahan Banyurip	83,41	Baik
36	Kelurahan Panjang Baru	83,28	Baik
37	Kecamatan Pekalongan Timur	83,22	Baik
38	Kelurahan Degayu	83,11	Baik
39	Dinas Pendidikan	83,01	Baik
40	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	82,88	Baik
41	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	82,66	Baik
42	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	82,24	Baik
43	Kelurahan Gamer	82,20	Baik
44	Dinas Kesehatan	82,13	Baik
45	Kelurahan Bandengan	81,79	Baik
46	Sekretariat DPRD	81,76	Baik
47	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	81,34	Baik
48	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80,99	Baik
49	Kelurahan Podosugih	80,76	Baik
50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	80,56	Baik
51	Kelurahan Sapuro Kebulen	80,22	Baik
52	Kelurahan Tirto	79,76	Baik
53	Dinas Lingkungan Hidup	79,48	Baik
54	RSUD Bendan	79,15	Baik
55	Inspektorat	79,07	Baik
56	Bagian Kesejahteraan Rakyat	78,97	Baik
57	Kelurahan Bendan Kergon	78,50	Baik
58	Kelurahan Padukuhan Kraton	78,47	Baik
59	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	78,34	Baik
60	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	78,26	Baik
61	Kelurahan Buaran Kradenan	77,62	Baik
62	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	76,67	Baik
63	Kelurahan Poncol	76,46	Kurang Baik
64	Dinas Kelautan dan Perikanan	73,24	Kurang Baik
65	Kelurahan Setono	71,95	Kurang Baik
66	Kelurahan Kauman	71,10	Kurang Baik
	Rata-rata SKM Kota Pekalongan	82,21	Baik

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2020

Dari table diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk tahun 2019 kualitas pelayanan publik Kota Pekalongan lebih baik karena melebihi dari target yang ditetapkan.

d. Fasilitasi Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib memiliki inovasi di bidang pelayanan publik dan mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik di tingkat Nasional. Dampak positif dari kompetisi inovasi pelayanan publik ini adalah untuk mewujudkan birokrat dan birokrasi yang memberikan pelayanan prima.

Target yang ditentukan di tahun 2019 adalah 10 (sepuluh) OPD yang mengikuti kompetisi inovasi pelayanan publik yaitu: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, BPBD, Dinkominfo, Kecamatan Pekalongan Utara, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinsos P2KB, DPMPTSP, BKPPD, RSUD.

e. Penetapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Karena adanya kebijakan dari pusat (Kementrian PAN dan RB) bahwa untuk penilaian Reformasi Birokrasi minimal ada 6 (enam) OPD sample, sehingga Pemerintah Kota Pekalongan mengeluarkan kebijakan bahwa OPD pilot project Reformasi Birokrasi sekaligus menjadi lokasi fokus pembangunan Zona Integritas.

6. Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Program ini dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan, total anggaran program ini sebesar Rp. 157.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 148.720.000,- (*unaudited*) dengan indikator output sebanyak 3 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 3 indikator telah tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.326 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.326 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Bagian Organisasi						
1	Peningkatan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Triwulanan OPD yang diinput dengan tepat waktu	laporan	4	4	4
		Jumlah OPD yang mengirimkan laporan capaian kinerja	OPD	31	31	31
2	Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Pekalongan	Jumlah dokumen LKj IP Kota Pekalongan yang disusun	dokumen	1	1	1

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2020

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Pekalongan memperoleh nilai **72,59** atau predikat **BB**. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang **sangat baik**.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019
1	Perencanaan Kinerja	30	24,42	24,53
2	Pengukuran Kinerja	25	17,07	17,54
3	Pelaporan Kinerja	15	10,46	11,09
4	Evaluasi Kinerja	10	7,24	7,29
5	Capaian Kinerja	20	11,69	12,14
Nilai Hasil Evaluasi		100	70,88	72,59
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Pekalongan, 2020

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan terkait kebijakan SAKIP.
- Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi.
- Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah.

7. Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Perekonomian

Program ini dilaksanakan dalam 8 (delapan) kegiatan, total anggaran program ini sebesar Rp. 435.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 430.335.000,- (*unaudited*) dengan indikator output sebanyak 8 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 7 (tujuh) indikator telah tercapai dan 1 (satu) indikator belum tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.327 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

**Tabel 3.327 Target dan Capaian Kinerja Output
Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Bidang Perekonomian**

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Bagian Perekonomian						
1	Koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi	Jumlah debitur potensial penerima KUR yang terdata dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP)	Debitur	901	901	6.206

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
2	Fasilitasi Dekranasda	Peningkatan jumlah IKM Batik	IKM	901	901	1.001
3	Aktivasi dan publikasi Branding kota	Jumlah event kegiatan Aktivasi dan Publikasi Branding yang terselenggara	Event	2	2	2
4	Fasilitasi kegiatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau	Jumlah OPD termonitor dalam pengelolaan DBH CHT	OPD	4	4	4
5	Koordinasi pengendalian inflasi daerah	Persentase tingkat laju inflasi terkendali	+/-%	4	4	2,72
6	Optimalisasi kinerja perusahaan daerah	Persentase kenaikan PAD Perusda	persen	5	5	3,80
7	Pembinaan dan pengawasan lembaga keuangan mikro	Jumlah Calon LKM terfasilitasi	LKM	37	37	37
8	Penguatan kelembagaan ekonomi kreatif	Jumlah sektor ekonomi kreatif yang terkoordinir	Sektor	1	1	2

Sumber: Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Pekalongan, 2020

Dari kegiatan koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan koperasi target jumlah calon debitur potensial yang terdata SIKP sebanyak 901 UKM dan teralesasi 6.206 debitur potensial penerima KUR pada lembaga keuangan penyedia. Dari jumlah debitur yang terdata dalam SIKP tersebut jumlah realisasi akad sebesar Rp. 104.416.615.050,- dengan rata-rata per debitur sebesar Rp.16.825107,-;



Gambar 3.170 Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat, SIKP Kredit Ultra Mikro (UMi)

Sumber: Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Pekalongan, 2020

Selain fasilitasi pemanfaatan KUR untuk UKM, Pemerintah Kota Pekalongan juga mengikutisertakan dalam berbagai pameran dan event produk unggulan daerah kerajinan baik tingkat regional maupun nasional. Pada Tahun 2019, UKM yang difasilitasi 1.001 UKM dalam berbagai event antara lain : Pameran Pesona Produk Kriya, Pameran Jateng Fair, Pameran Trade Expo Indonesia dan Pameran Pekan Batik Nusantara dan event kerajinan lainnya. Dekranasda Kota Pekalongan memfasilitasi UKM potensial dalam berbagai lomba kerajinan, pelatihan kerajinan, workshop kerajinan dan kegiatan lainnya.

Kegiatan pada jumlah event aktivasi dan publikasi branding kota dengan target 2 event, yaitu Pameran Pojok Branding pada Pekan Batik Nasional dan Pameran Inovasi dan Kreatifitas Pemerintah.



Gambar 3.171 Pameran Pojok Branding

Sumber: Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Pekalongan, 2020

Pengembangan sektor ekonomi kreatif Kota Pekalongan dengan pembentukan lembaga ekonomi kreatif serta pengembangan 7 sektor ekonomi kreatif yaitu kerajinan, desain, fashion, musik, seni pertunjukan, kuliner serta televisi dan radio. Dari tujuh ke sektor sudah tercapai lima sektor yaitu kerajinan, fashion, seni pertunjukan, televisi & radio dan pada tahun 2019 sektor kuliner.

Indikator kinerja pada kegiatan optimalisasi kinerja perusahaan daerah dengan target 5% dari kenaikan PAD perusahaan daerah hanya tercapai 3,80% karena perusahaan daerah diantaranya target Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan tidak tercapai karena terdapat beberapa force mayor (dampak pembangunan infrastruktur di Kota Pekalongan dan biaya investasi jaringan yang belum teranggarkan), saat ini tarif belum ada peningkatan sedangkan biaya pajak dan listrik cukup tinggi). Perusahaan Daerah BKK Pekalongan Utara konsolidasi menjadi PT BKK Jawa Tengah. Kontibilitas /kredit dengan kategori diragukan dan macet dibiayai tanpa memperhitungkan agunan sehingga perusahaan rugi dan tidak dapat memberikan deviden sampai dengan 2 tahun kedepan.

8. Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian

Program ini dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan, total anggaran program ini sebesar Rp. 30.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 0,- (*unaudited*) dengan indikator output sebanyak 2 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 2 (dua) indikator telah tercapai dan tidak ada indikator yang tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.328 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.328 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Bagian perekonomian						
1	Koordinasi pengawasan barang bersubsidi	Jumlah Objek Termonitor Penyedia Barang Bersubsidi	Objek	11	11	11
2	Penyelenggaraan pasar murah	Jumlah Pasar Murah Terlaksana	Lokasi	28	28	28

Sumber: Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Pekalongan, 2020

- a. Kegiatan koordinasi pengawasan barang bersubsidi dilaksanakan berkaitan dengan subsidi pada masyarakat adalah koordinasi, monitoring dan evaluasi peredaran pupuk dan pestisida bersubsidi serta LPG 3 kg. Monitoring dilakukan di 7 objek, meliputi agen dan pengecer serta pengguna pupuk dan pestisida bersubsidi. Disamping itu monitoring juga dilakukan di 4 objek berupa agen, pangkalan dan pengecer LPG 3 kg guna mengantisipasi penyalahgunaan dan pengendalian subsidi LPG 3 kg. Selain itu Pemerintah Kota Pekalongan melakukan operasi pasar LPG 3 kg dengan bekerjasama dengan Pertamina guna mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga di masyarakat.
- b. Kegiatan penyelenggaraan pasar murah pada Tahun 2019 dilaksanakan di 28 lokasi, yaitu 27 lokasi kelurahan pada bulan Ramadhan dan 1 lokasi pada acara sadranan nelayan dan sedekah laut di kawasan PPNP. Dalam pelaksanaan pasar murah Pemerintah kota memberikan subsidi kepada masyarakat berupa 11.300 paket sembako, terdiri dari 10.800 paket sembako di 27 lokasi kelurahan dan 500 paket sembako pada acara sadranan dan sedekah laut. Tiap paket sembako terdiri dari beras 5 kg, gula pasir 2 kg serta 1 liter minyak goreng. Mekanisme pemberian subsidi paket sembako tersebut berupa sharing harga yang bekerja sama dengan Perum Bulog Subdivre VI Pekalongan. Pasar murah yang dilaksanakan pada bulan ramadhan selain untuk membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat juga sebagai salah satu kegiatan pengendalian harga atau inflasi yang terjadi selama ramadhan dan Idul Fitri.



Gambar 3.172 Kegiatan Pasar Murah di 27 Kelurahan

Sumber: Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Pekalongan, 2020

9. Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan

Program ini dilaksanakan dalam 4 (empat) kegiatan, total anggaran program ini sebesar Rp. 1.733.967.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 1.572.409.900,- (*unaudited*) dengan indikator

output sebanyak 4 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 3 (tiga) indikator tidak tercapai dan 1 (satu) indikator tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.329 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPd-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.329 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Administrasi Pembangunan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Dan Pengendalian Pembangunan						
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan	Jumlah rakor pengendalian pelaksanaan kegiatan	kali	6	6	5
2	Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan	Jumlah pengadaan barang/jasa yang difasilitasi ULP	pekerjaan	100	100	85
3	Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan	Jumlah pengadaan melalui sistem LPSE	pekerjaan	100	100	384
4	Pengendalian pelaksanaan pembangunan	Jumlah pelaksanaan pekerjaan fisik yang terlaksana 100 %	pekerjaan	100	100	66

Sumber: Bagian PBJ dan Minbang Setda Kota Pekalongan, 2020

Program ini dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan Setda Kota Pekalongan melalui 4 (empat) kegiatan antara lain :

a. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana untuk memonitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD agar pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dapat terlaksana sesuai target yang telah direncanakan sekaligus bisa memberikan masukan atau solusi apabila terjadi permasalahan atau hambatan – hambatan dalam proses pelaksanaan.

b. Fasilitasi Unit Layanan Pengadaan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi atau pendampingan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh OPD agar sesuai dengan peraturan perundangan – undangan, dan sebagai sarana untuk mensosialisasikan dan mendukung apabila ada regulasi atau system baru terkait proses pengadaan barang/jasa.

Tahun 2019 ini belum memenuhi target 100 pekerjaan dikarenakan jumlah pekerjaan yang ditenderkan hanya ada 85 paket pekerjaan meliputi pengadaan barang, pekerjaan jasa konstruksi, jasa konsultansi dan jasa lainnya. Namun ada 4 paket pekerjaan yang gagal tender dikarenakan pada saat proses evaluasi tender tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan evaluasi penawaran, dan waktu pelaksanaan pekerjaan yang sudah tidak mencukupi apabila tender tetap dilanjutkan proses pengadaannya. Sehingga hanya ada 81 paket pekerjaan yang berhasil difasilitasi oleh Unit Layanan Pengadaan..

c. Fasilitasi Pengelolaan LPSE Kota Pekalongan.

Pada kegiatan ini sudah memenuhi target 100 pekerjaan dikarenakan jumlah pekerjaan yang berhasil difasilitasi LPSE maupun ULP adalah 85 paket pekerjaan yang ditenderkan dan 299 paket pekerjaan non tender (E-PL). Pelaksanaan tender untuk pekerjaan pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya anggaran diatas 200 juta dan untuk pekerjaan jasa konsultasi anggaran diatas 100 juta, sedangkan pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya yang nilainya dibawah 200 juta dan pengadaan konsultasi dibawah 100 juta dilaksanakan dengan E-Pengadaan Langsung melalui SPSE Versi 4.3.

d. Pengendalian pelaksanaan pembangunan

Kegiatan ini belum memenuhi target dari 100 pekerjaan yang direncanakan sebelumnya dikarenakan pekerjaan konstruksi fisik yang ditenderkan hanya terdapat 66 pekerjaan pada Tahun 2019.

10. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan Dan Sosial Kemasyarakatan

Program ini dilaksanakan dalam 16 (enam belas) kegiatan, total anggaran program ini sebesar Rp. 11.330.870.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 10.625.689.612,- dengan indikator output sebanyak 16 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 14 indikator telah tercapai dan 2 indikator belum tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.330 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

**Tabel 3.330 Target dan Capaian Kinerja Output
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Keagamaan Dan Sosial Kemasyarakatan**

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Bagian Kesejahteraan Rakyat						
1	Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji	Jumlah kegiatan pemberangkatan dan pemulangan haji	kali	2	2	2
2	Fasilitasi penyelenggaraan festival anak sholeh	Jumlah pelaksanaan kegiatan festival Anak Sholeh	kali	1	1	1
3	Fasilitasi penyelenggaraan MTQ dan STQ pelajar/umum tingkat kota/bakorlin	Jumlah pelaksanaan kegiatan MTQ/STQ/MHQ Pelajar/Umum Tingkat Kota/Bakorlin	kegiatan	1	1	1
4	Penugasan TKHD	Jumlah penugasan dan pemberangkatan TKHD dan TPHD	orang	1	1	1
5	Fasilitasi Jaminan Asuransi Takmir Masjid dan Musholla	Jumlah Takmir Masjid/ Musholla yang mendapat jaminan asuransi	orang	4.201	4.201	4.201
6	Fasilitasi Peningkatan	Jumlah guru TPQ/MADIN yang terbina dan	orang	2.474	2.474	2.474

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
	Pendidikan Keagamaan	mendapat bantuan transport				
7	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Keagamaan	Jumlah Takmir Masjid/ Musholla dan Lebe memandikan jenazah yang terbina dan mendapat bantuan transport	orang	2.880	2.880	2.880
8	Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)	Jumlah pelaksanaan kegiatan Hari Besar Islam, Forum Komunikasi Pemuka Agama, Pendataan TPQ/Madin dan Tamir Masjid/ Musholla, peringatan Hari Jadi Kota Pekalongan, Pelatihan Memandikan Jenazah, Peringatan Hari Santri, Peringatan Hari Ibu dan Hari Kartini	kegiatan	15	15	15
9	Fasilitasi Pemberian Bantuan Sosial kepada Masyarakat	Jumlah Panti Asuhan/ Yayasan/Ponpes yang mrndapat bantuan beras	PA/Yayasan /Ponpes	25	25	25
10	Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah kegiatan peringatan Hari Anak Nasional (HAN)	kegiatan	1	1	1
11	Pelatihan metodologi pengajaran dan pendidikan agama	Jumlah Kegiatan Pelatihan Metodologi Pembelajaran Agama Islam	kegiatan	1	1	0
12	Peningkatan Pembelajaran Madrasah Diniyah	Jumlah kegiatan Bimtek Kepala/Guru Madin	kegiatan	1	1	1
13	Peningkatan Pembelajaran BTQ	Jumlah kegiatan Bimtek Guru TPQ	kegiatan	1	1	1
14	Peningkatan Kualitas Pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)	Jumlah pelaksanaan Kegiatan Rakor Tim Pembina UKS	Kali	1	1	0
15	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Jumlah penyelenggaraan senam aerobik	kali	55	55	55
16	Fasilitasi penyelenggaraan porseni pondok pesantren	Jumlah penyelenggaraan kegiatan PORSENI Pondok Pesantren	kegiatan	1	1	1

Sumber: Bagian Kesra Setda Kota Pekalongan, 2020

Mencermati table di atas, setidaknya ada 2 (dua) poin informasi yang dapat disampaikan. Pertama, sebanyak 14 (empat belas) kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target capaian masing-masing di tahun anggaran 2019. Kegiatan tersebut antara lain, pemberangkatan & pemulangan jamaah haji Kota Pekalongan, sebanyak 373 orang, yang dilaksanakan pada bulan Juli dan September 2019. Penugasan Tim Kesehatan Haji Daerah

(TKHD) dan Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) Kota Pekalongan, sebanyak 3 (tiga) orang; Fasilitas bantuan uang transport bagi tenaga pengajar TPQ dan MADIN sebanyak 2.474 orang, dan akan terus bertambah di tahun-tahun berikutnya; Fasilitas bantuan transport bagi pengurus/ takmir masjid & mushola sebanyak 2.880 orang; Fasilitas asuransi jiwa bagi seluruh takmir masjid, takmir mushola dan petugas lebe non-pns sebanyak 4201 orang; serta, bantuan sosial berupa beras bagi 25 lembaga panti asuhan dan yayasan sosial di Kota Pekalongan yang menampung masyarakat kategori miskin.

Kedua, ada 2 (dua) kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun anggaran 2019, karena satu dan lain hal, yaitu Kegiatan pelatihan metodologi pengajaran pendidikan agama dan Peningkatan Kualitas Pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah).

Kegiatan pelatihan metodologi pengajaran pendidikan agama telah rutin dilaksanakan sejak tahun 2014 hingga 2018, dan masih dianggarkan untuk tahun 2019. Bekerja sama dengan lembaga STAIN Kota Pekalongan, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan membekali para guru agama Islam di Kota Pekalongan dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA dengan metode-metode pengajaran yang update sesuai perkembangan jaman. Kegiatan pelatihan metodologi ini telah dilaksanakan selama 5 (lima) tahun berturut-turut.

Setelah diadakan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pelatihan metodologi tersebut, diketahui bahwa seluruh guru agama Islam di Kota Pekalongan telah mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Karena dirasa cukup, maka di tahun anggaran 2019, kegiatan pelatihan metodologi pengajaran pendidikan agama tidak perlu dilaksanakan; dan melalui RKA Perubahan 2019, anggaran untuk kegiatan tersebut disetujui untuk dinihilkan.

Anggaran untuk kegiatan Peningkatan Kualitas Pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) pada tahun anggaran 2019 diputuskan untuk di-nihilkan. Pasalnya, kegiatan Peningkatan Kualitas Pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) sejatinya adalah kegiatan rapat koordinatif Tim UKS tingkat Kota Pekalongan yang dilaksanakan satu tahun sekali. Kebutuhan riilnya hanya belanja makan-minum peserta saja, sehingga kegiatan Peningkatan Kualitas Pembina UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) tersebut tidak membutuhkan anggaran yang berdiri sendiri.

11. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan

Program ini dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan, total anggaran program ini sebesar Rp. 11.330.870.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 10.625.689.612,- (*unaudited*) dengan indikator output sebanyak 1 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 1 indikator tersebut belum tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.331 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

**Tabel 3.331 Target dan Capaian Kinerja Output
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pimpinan**

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Bagian Umum						
1	Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan dan	bulan	12	12	0

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian
	Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	perawatan kesehatan				

Sumber: Bagian Umum Setda Kota Pekalongan, 2020

Realisasi indikator belum mencapai target dikarenakan belum adanya jadwal rencana pemeriksaan medical general check up serta tingginya mobilitas Kepala Daerah dan Wakil Daerah.

12. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media Dan Keprotokoleran

Program ini dilaksanakan dalam 5 (lima) kegiatan, total anggaran program ini sebesar Rp. 1.897.316.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 1.797.636.500,- dengan indikator output sebanyak 15 indikator indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 15 indikator telah tercapai, 0 indikator belum tercapai dan 1 indikator melebihi target.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.332 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.332 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media Dan Keprotokoleran

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Bagian Hubungan Masyarakat						
1	Fasilitasi Keprotokolan	jumlah bulan penyelenggaraan keprotokolan dalam kegiatan kedinasan	bulan	12	0	0
		jumlah buku saku alamat pejabat yang dicetak	buku	0	150	150
		jumlah plakat yang dicetak	buah	0	130	150
		jumlah belanja tropi/piala	set	0	30	30
		jumlah kegiatan keprotokolan yang dilaksanakan	kegiatan	0	1.068	973
2	Fasilitasi Kehumasan	Jumlah Bulan Pendokumentasian Kegiatan KDH dan Wa. KDH	bulan	0	0	0
		Jumlah Kliping Berita yang Tersusun	lembar	0	0	0
		Jumlah analis media yang tersusun	naskah	0	0	0
		Jumlah Analisis Media yang disusun	naskah	0	792	403
		Jumlah kegiatan press tour yang diselenggarakan	kali	0	1	1
3	Penerbitan buku kehumasan	Jumlah Majalah Warta Kota Batik yang Tercetak	majalah	0	0	0
		Jumlah Booklet Profil Kota Pekalongan yang tercetak	eksemplar	0	0	0

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		Jumlah Majalah Warta Kota Batik yang dicetak	majalah	7500	7500	7.500
		Jumlah Booklet Profil Kota Pekalongan yang dicetak	eksemplar	4000	4000	4000
4	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Jumlah Publikasi ILPPD dalam Satu Tahun	kali	1	1	1
5	Kerjasama Informasi dan Mass Media	Jumlah Bulan Advertorial yang Termuat di Media Massa Nasional/ Regional	bulan	0	0	0
		Jumlah Liputan FGD Press Conference yang Terselenggara	kali	0	0	0
		Jumlah Naskah Sambutan yang Tersusun	naskah	0	0	0
		Jumlah Liputan FGD Press Conference yang diselenggarakan	kali	2	2	4
		Jumlah Naskah Sambutan yang disusun	naskah	600	600	620
		Jumlah advertorial yang dimuat di media massa	kali	450	450	450

Sumber: Bagian Protokol dan Kompim Setda Kota Pekalongan, 2020

Dalam kegiatan keprotokolkan capaian di tahun 2019 tidak mencapai target dikarenakan banyak kegiatan dari SKPD/OPD yang dilaksanakan di akhir tahun sehingga kegiatan menumpuk di akhir tahun, selain hal tersebut seringkali adanya permintaan bantuan keprotokolkan yang mendadak.

Sedangkan untuk kegiatan Kerjasama informasi dan Mass Media, Permintaan Sambutan melebihi target dikarenakan banyak permintaan sambutan dari SKPD/OPD, kegiatan ini didasari oleh surat dari SKPD/OPD sehingga jumlah sambutan yang dibuat juga tergantung dari usulan setiap SKPD/OPD, tetapi permintaan sambutan sering tidak disertai dengan pointer atau materi yang bisa mengakibatkan kekeliruan atau kesalahan data pada saat pembuatan sambutan.

Salah satu Program yang terdapat di Bagian Humas adalah Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media dan Keprotokolkan, Adapun tujuan dari Program ini adalah untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam Program ini terdapat 5 (Lima) Kegiatan diantaranya adalah Kegiatan Fasilitasi Keprotokolkan, Fasilitasi Kehumasan, Penerbitan Buku Kehumasan, Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta Kerjasama Informasi dan Mass Media.

- a. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolkan merupakan kegiatan yang sangat vital, selain untuk mendukung kelancaran kegiatan kedinasan juga dapat mempresentasikan citra positif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat maupun kepada instansi lain.
- b. Kegiatan Fasilitasi Kehumasan merupakan salah satu kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan tupoksi dari Bagian humas, dimana dalam kegiatan ini terdapat 2 kegiatan yaitu analisis media dan press tour, kegiatan analisis media bertujuan untuk mengkaji dan

menelaah berita yang menjadi isu di masyarakat sebagai bahan atas pengambilan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sedangkan pelaksanaan Press Tour untuk membina hubungan baik dan bersinergi serta terintegrasi antara Pemerintah Daerah dengan Media Lokal maupun Nasional.

- c. Kegiatan Penerbitan Buku Kehumasan adalah Kegiatan yang dilakukan untuk mempublikasikan program, kegiatan, dan capaian kinerja dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memberikan masukan atas kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- d. Kegiatan Penyebarluasan Informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan salah satu bentuk usaha Pemerintah Daerah dalam memberikan transparansi informasi pelayanan publik kepada masyarakat serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dari pemerintah daerah.
- e. Kerjasama Informasi dan Mass Media merupakan kegiatan yang strategis untuk meningkatkan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan melalui kerjasama dengan media massa baik cetak maupun elektronik dalam bentuk advertorial dengan mengangkat issue actual berdasarkan visi misi Pemerintahan Daerah, selain itu agar dinamika pembangunan dan perkembangan Kota Pekalongan beserta potensinya dapat terekspose sebagai bahan publikasi, promosi dan informasi.

13. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program ini dilaksanakan dalam 10 (sepuluh) kegiatan, total anggaran program ini sebesar Rp. 18.078.263.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 15.802.551.107,- (*unaudited*) dengan indikator output sebanyak 12 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 10 (sepuluh) indikator telah tercapai dan 2 (dua) indikator belum tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.333 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.333 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Sekretariat DPRD						
1	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	Tersedianya produk hukum daerah	kali	7	7	7
2	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	jumlah fasilitasi alat kelengkapan dewan (Pimpinan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Kehormatan)	orang/kali	423	423	423

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
3	Rapat-rapat paripurna	Jumlah penyediaan rapat-rapat paripurna	kali	36	36	29
4	Reses anggota DPRD	Jumlah fasilitas kegiatan reses di daerah wilayah pemilihan DPRD	kali	2	2	3
5	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Jumlah fasilitas Pendalaman tugas, Adeksi, Orientasi tugas Pimpinan dan Anggota DPRD	kali	0	0	0
		Jumlah fasilitas pendalaman tugas, orientasi tugas Pimpinan dan Anggota DPRD	kali	7	7	7
6	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah produk hukum yang disosialisasikan	Perda	18	18	3
7	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	Jumlah fasilitas kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah	orang/kali	575	575	575
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah legislatif	Jumlah fasilitas rapat konsultasi dan koordinasi ke luar daerah Legislatif	orang/kali	345	345	345
9	Pemeliharaan dan Perawatan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah pelaksanaan perawatan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	kali	0	0	0
		Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi perawatan kesehatan	orang	30	30	30
10	Publikasi kinerja Lembaga Legislatif	Jumlah Publikasi/ informasi kegiatan DPRD melalui media cetak	kali	68	68	68

Sumber: Set DPRD Kota Pekalongan, 2020



<p>Dokumentasi RAPAT PARIPURNA DPRD Kota Pekalongan</p>	
<p>Dokumentasi Sidak Anggota DPRD ke Dinas Terkait (TPI Kota Pekalongan)</p>	
<p>Dokumentasi Rapat Kerja DPRD Kota Pekalongan dengan OPD (Rapat Alat Kelengkapan DPRD)</p>	
<p>Dokumentasi Bimbingan Teknis dan Pendampingan dengan LPM Untag Semarang</p>	
<p>Dokumentasi Komunikasi Pimpinan</p>	

Gambar 3.173 Dokumentasi Kegiatan DPRD

Sumber: Set DPRD Kota Pekalongan, 2020

Kegiatan yang tidak terpenuhi target :

a. Kegiatan Rapat-rapat Paripurna

Kegiatan ini pada prinsipnya tercapai target indikatornya, karena rapat-rapat Paripurna digabung dalam 1 (satu) acara/kegiatan. Sehingga secara penyerapan anggaran telah efisiensi dan selama 2 (dua) bulan tidak ada acara Paripurna dikarenakan belum terbentuk Alat Kelengkapan Dewan ;

b. Pembahasan Raperda dan Sosialisasi tidak tercapai targetnya, dari Raperda yang diajukan dalam Propemperda 2019 sebanyak 16 Raperda yang terdiri dari 12 (dua belas) Raperda yang diajukan Walikota dan 4 (empat) Raperda yang diajukan DPRD, yang menjadi Perda hanya 7 (tujuh) Perda. 6 (enam) Perda yang diajukan Walikota dan 1 (satu) Perda yang diajukan DPRD. Sehingga berpengaruh juga terhadap kegiatan Sosialisasi

14. Program Pelayanan Penyusunan Dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program ini dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan, total anggaran program ini sebesar Rp. 5.830.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 3.687.553.288,- (*unaudited*) dengan indikator output sebanyak 1 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 1 (satu) indikator belum tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.334 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.334 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pelayanan Penyusunan Dan Penataan Peraturan Perundang-Undangan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Sekretariat DPRD						
1	Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah produk hukum yang ditetapkan	Raperda	18	18	7

Sumber: Set DPRD Kota Pekalongan, 2020

Dalam pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tidak semua usulan Raperda menjadi Peraturan Daerah (PERDA). Dari 4 (empat) Raperda usulan DPRD, terdapat 3 Raperda yang tidak menjadi Perda :

- a. Rancangan Peraturan tentang Sistem Drainase Perkotaan. Raperda tersebut tidak dibahas karena kekosongan waktu menjelang dan pasca pemilihan anggota Legislatif ;
- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). Raperda tersebut tidak dibahas karena kekosongan waktu menjelang dan pasca pemilihan anggota Legislatif ;
- c. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter. Raperda tersebut tidak dibahas karena kekosongan waktu menjelang dan pasca pemilihan anggota Legislatif ;

Dari 12 (dua belas) Raperda usulan Walikota, terdapat 6 (enam) Raperda yang tidak menjadi Perda

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Gotong Royong Masyarakat (lanjutan pembahasan tahun 2018). Raperda tersebut dipending dulu karena menunggu regulasi ;
- b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan (tindak lanjut dari peraturan lebih tinggi). Raperda tersebut tidak dibahas karena kekosongan waktu menjelang dan pasca pemilihan anggota Legislatif ;
- c. Rancangan Peraturan Daerah tentang PT Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa (Perseroda). Raperda tersebut tidak dibahas karena belum diajukan oleh eksekutif untuk dibahas ;
- d. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota pekaalanga Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029 (lanjutan pembahasan tahun 2017). Raperda tersebut dipending dulu karena menunggu rekomendasi dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Negara ;
- e. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Raperda tersebut tidak dibahas karena belum diajukan oleh eksekutif untuk dibahas ;
- f. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Raperda tersebut dipending dulu karena akan dihitung kembali.

Dari 16 (enam belas) yang ditetapkan dalam Propemperda yang menjadi Perda hanya 7 Perda, yang terdiri dari 1 (satu) Raperda usulan DPRD dan 6 (enam) Perda usulan Walikota. Sehingga target yang tercapai hanya 43%.

15. Program Pengawasan Internal Terhadap Penyelenggaraan Tupoksi PD Dan Kasus Pengaduan

Program ini dilaksanakan dalam 6 (enam) kegiatan, total anggaran program ini sebesar Rp. 786.490.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 692.051.900,- (*unaudited*) dengan indikator output sebanyak 12 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 12 indikator telah tercapai..

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.335 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.335 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pengawasan Internal Terhadap Penyelenggaraan Tupoksi PD Dan Kasus Pengaduan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Inspektorat						
1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala (pengawasan keuangan dan	Jumlah LHP yang terbit pd Irbanwil I	Laporan	22	22	22

No	Kegiatan kinerja)	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		Jumlah LHP yang terbit pd Irbanwil II	Laporan	23	23	23
2	Penanganan kasus dan aduan masyarakat	Jumlah LHP Riksus yang terbit pd Irbanwil I	Laporan	3	3	3
		Jumlah LHP Riksus yang terbit pd Irbanwil II	Laporan	3	3	2
3	Review Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah Beserta Perubahannya	Jumlah LHR yang terbit pd Irbanwil I	Laporan	48	48	24
		Jumlah LHR yang terbit pd Irbanwil II	Laporan	48	48	24
4	Monitoring dan evaluasi atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah	Jumlah LHM/LHE yang terbit pd Irbanwil I	Laporan	14	14	17
		Jumlah LHM/LHE yang terbit pd Irbanwil II	Laporan	14	14	18
5	Review Laporan Keuangan dan Laporan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemerintah Daerah	Jumlah LHR yang terbit pd Irbanwil I	Laporan	17	17	18
		Jumlah LHR yang terbit pd Irbanwil II	Laporan	17	17	18
6	Penyusunan Program Kerja dan Kebijakan / Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen regulasi / kebijakan Pengawasan / PKPT	Dokumen	4	4	3
		Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Asistensi/Sosialisasi Bidang Pengawasan.	Laporan	2	2	2

Sumber: Inspektorat Kota Pekalongan, 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan 12 (dua belas) indikator kinerja dari 6 (enam) kegiatan yang mendukung Program Pengawasan Internal Terhadap Penyelenggaraan Tupoksi PD Dan Kasus Pengaduan Tahun 2019 terdapat perubahan target kinerja dalam perubahan APBD yang menyesuaikan alokasi/ketersediaan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan. Hasil pengukuran capaian kinerja total dari 12 indikator kinerja sebesar 106% atau kategori Sangat Baik. Adapun capaian target masing-masing indikator, sebagai berikut :

- a. Sebanyak 9 (sembilan) indikator kinerja (75%) capaian kinerjanya sesuai target atau mencapai 100%.
- b. Sebanyak 2 (satu) indikator kinerja (16,7%) yang capaian kinerjanya melebihi/melampaui target, yaitu :
 - Indikator Jumlah LHR yang terbit pd Irbanwil I, dengan capaian kinerja 106% atau sangat baik, penjelasan atas capaian kinerja yang melampaui target karena dilaksanakan pengawasan diluar PKPT sesuai surat edaran menteri dalam negeri nomor 50/781/B.1/IJ tanggal 24 Agustus 2016, meliputi Laporan Hasil Reviu (LHR)penyusunan dokumen RKPD dan perubahan RKPD, rencana kerja Perangkat Daerah dan Perubahan rencana kerja Perangkat Daerah, KUA,-PPAS, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan RKA-SKPD dan Perubahan RKA-SKPD

- Indikator Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Asistensi/Sosialisasi Bidang Pengawasan yang disusun, dengan capaian kinerja 200%, penjelasan atas capaian kinerja yang melampaui target karena dilaksanakan kegiatan sosialisasi penanganan benturan kepentingan yang telah disusun tahun 2019.
- c. Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja (8,3%) yang capaian kinerjanya tidak mencapai target 100%, yaitu indikator jumlah LHP Riksus yang terbit pd Irbanwil II, karena jumlah kasus/pengaduan yang diterima pada tahun 2019 hanya 2 kasus. Namun apabila membandingkan persentase kasus yang dapat diselesaikan bahwa dari 2 kasus/aduan yang diterima yang telah selesai ditindaklanjuti dengan 2 pemeriksaan kasus, maka dapat kinerja penyelesaian kasus/aduan tercapai 100%.



Gambar Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Sumber: Inspektorat Kota Pekalongan, 2020

16. Program Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Program ini dilaksanakan dalam 1 (satu) kegiatan, total anggaran program ini sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 46.973.000,- (*unaudited*) dengan indikator output sebanyak 2 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 2 indikator telah tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.336 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.336 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Inspektorat						
1	Implementasi sistem pengawasan internal pemerintah	Jumlah Lap Penilaian Mandiri Implementasi SPIP	Laporan	1	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian
		Jumlah Laporan Kegiatan Asistensi/Bimtek /workshop/FGD Penyusunan Infrastruktur SPIP	Laporan	2	2	2

Sumber: Inspektorat Kota Pekalongan, 2020

Berdasarkan table diatas, dapat disimpulkan hasil pengukuran capaian kinerja 2 (dua) indikator kinerja kegiatan Implementasi sistem pengawasan internal pemerintah yang mendukung Program Pembangunan Dan Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2019 sebesar 100% atau kategori Sangat Baik, dengan penjelasan :

- Indikator kinerja kegiatan Implementasi Sistem Pengawasan Internal Pemerintah yaitu Jumlah Lap Penilaian Mandiri Implementasi SPIP dengan target 1 laporan telah tercapai pada tahun 2019 dengan dilaksanakan penilaian mandiri pada 17 OPD yang difasilitasi dan dievaluasi Implementasi SPIP, dengan membandingkan target dan realisasi maka capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan.
- Indikator kinerja Jumlah Laporan Kegiatan Asistensi/Bimtek/workshop/FGD Penyusunan Infrastruktur SPIP dengan target sebanyak 2 laporan, dengan realisasi sebanyak 2 laporan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019, yaitu Bimtek Penyusunan RTP SPIP yang diikuti oleh 2 Anggota Satgas OPD di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, dan kegiatan Pelatihan Penilaian Mandiri (Self Assessment) Maturitas Penyelenggaraan SPIP yang diikuti oleh 1 orang Asesor dari 21 OPD. Penilaian tingkat capaian kinerja termasuk dalam kategori sangat baik.

17. Program Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Dan Pengawasan Reformasi Birokrasi

Program ini dilaksanakan dalam 4 (empat) kegiatan, total anggaran program ini sebesar Rp. 343.400.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 299.873.860,- (*unaudited*) dengan indikator output sebanyak 7 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 6 indikator telah tercapai dan 1 indikator tidak tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.337 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.337 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Dan Pengawasan Reformasi Birokrasi

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Inspektorat						
1	Asistensi / evaluasi pembangunan zona integritas dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	Jumlah LHE Pembangunan Integretis OPD	Laporan	15	15	17
		Jumlah Laporan Hasil PMPRB Online & Lap Hasil Evaluasi Penilaian RB	Laporan	2	2	2

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
2	Koordinasi pelaporan harta kekayaan dan pajak-pajak pribadi ASN	Jumlah dokumen LHKASN	Dokumen	2.500	2.500	2.915
		Jumlah dokumen LP2P ASN	Dokumen	2.500	2.500	2.372
3	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Jumlah laporan monev implemmentasi/pelaporan aksi PPK	Laporan	4	4	4
		Jumlah Dokumen Rencana Aksi Korsupgah PPK KPK	Dokumen	1	1	1
4	Fasilitasi satgas saber pungli	Jumlah Laporan kegiatan Tim Saber Pungli/UPP Kota Pekalongan	Laporan	4	4	4

Sumber: Inspektorat Kota Pekalongan, 2020

Hasil pengukuran atas capaian kinerja 2 (dua) indikator output 4 (empat) kegiatan yang mendukung Program Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Dan Pengawasan Reformasi Birokrasi Tahun 2019, dengan total capaian kinerja sebesar 103,5% atau kategori Sangat Baik. Adapun rincian capaian yaitu 5 indikator tercapai (100%) sedangkan 1 indikator melampaui target (117%) dan 1 indikator tidak tercapai (95%), dengan penjelasan :

- a. Indikator kinerja kegiatan Koordinasi pelaporan harta kekayaan dan pajak-pajak pribadi ASN yaitu Jumlah dokumen LHKASN dengan realisasi 2.915 (116,60%) atau melampaui target, karena semakin meningkatnya kesadaran dan keseriusan dari seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan untuk menyampaikan dokumen LHKASN dengan benar dan tepat waktu, sedangkan indikator jumlah dokumen LP2P yang disampaikan ASN tidak mencapai target atau hanya sebanyak 2.372 (94,88%), hal ini disebabkan sebagian ASN wajib LP2P yang mengagap tidak perlu menyampaikan dokumen LP2P karena sudah melaporkan LHKASN atau LHKPN.
- b. Upaya untuk mewujudkan target kinerja indikator output 4 (empat) kegiatan yang mendukung Program Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Dan Pengawasan Reformasi Birokrasi Tahun 2019, antara lain :
 - Melaksanakan pembinaan pada 31 OPD dan evaluasi pembangunan intergritas menuju wilayah bebas korupsi pada 6 (enam) OPD yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, RSUD Bendan, Kec. Pekalongan Barat, dan Puskesmas Sokorejo Kota Pekalongan. secara intensif serta menyelenggarakan Diklat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Bagi 17 OPD selama 3 hari di Salatiga untuk pemenuhan dokumen implementasi pembangunan ZI serta melakukan penilaian dan mengusulkan OPD sebagai pilot project, dan telah dilakukan evaluasi oleh Menpan RB pada 4 OPD yang memenuhi syarat mendapatkan WBK, yaitu : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, RSUD Bendan, Kec. Pekalongan Barat.
 - Menyelenggarakan Workshop/Penandatanganan Komitmen Pengendalian Gratifikasi, Melaksanakan Survey Integritas Organisasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online dengan melibatkan asesor penilai mandiri dari

masing-masing OPD melakukan Penilaian dan Evaluasi atas PMPRB on-line tahun 2019 dengan hasil penilaian Indeks RB Kota Pekalongan mencapai 89,14.

- Melakukan koordinasi dengan Tim Korsup Pencegahan KPK dalam *update progress* / pemenuhan target *Monitoring Centre for Prevention (MCP)* Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, dengan hasil progres MCP (*Monitoring Centre for Prevention*) Pemda Kota Pekalongan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar 86% (Ranking 11 Tingkat Provinsi Jawa Tengah).
- Fasilitas bagi Satgas Saber Pungli dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana yang berada di Pemerintah Kota Pekalongan agar Satgas Saber Pungli Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien.

18. Program Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme Dan Layanan APIP

Program ini dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan, total anggaran program ini sebesar Rp. 105.625.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 100.671.000,- (*unaudited*) dengan indikator output sebanyak 2 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 2 indikator telah tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.338 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.338 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme Dan Layanan APIP

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Inspektorat						
1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah Laporan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri	Laporan	5	5	5
2	Penyusunan Infrastruktur Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Laporan	1	1	1

Sumber: Inspektorat Kota Pekalongan, 2020

Hasil pengukuran atas capaian kinerja 2 (dua) indikator output pada 2 (dua) kegiatan yang mendukung Program Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme Dan Layanan APIP Tahun 2019, dengan total capaian kinerja sebesar 100% atau kategori Sangat Baik. Adapun rinci capaian kinerja output sebagai berikut :

- a. Indikator jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Pendidikan/Pelatihan Pengawasan dengan target sebanyak 5 laporan dan terealisasi 5 kegiatan PKS yang diikuti oleh seluruh APIP Inspektorat, sehingga diperoleh capaian kinerja kegiatan sebesar 100%.
- b. Indikator jumlah Laporan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP dengan target sebanyak 1 laporan dan terealisasi 1 laporan, diperoleh capaian kinerja kegiatan sebesar 100%.
- c. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target, antara lain dengan menyelenggarakan kegiatan Workshop/Pelatihan/Bintek Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, meningkatkan Kapabilitas APIP Inspektorat dan kualitas layanan antara lain

Penyusunan Infrastruktur Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP, konsultasi-konsultasi teknis auditing dan implementasi peraturan, serta *transfer of knowledge*.

19. Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APF

Program ini dilaksanakan dalam 3 (tiga) kegiatan, total anggaran program ini sebesar Rp. 193.756.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 159.491.000,- (*unaudited*) dengan indikator output sebanyak 3 indikator. Sampai dengan akhir Tahun 2019, 3 indikator telah tercapai.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.339 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.339 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan AP

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Inspektorat						
1	Pemantauan dan pengendalian Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan TLHP	Laporan	12	12	12
2	Pemutakhiran data dan informasi pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Pengembangan Simwas)	Jumlah laporan ikhtisar hasil pemeriksaan	Laporan	2	2	2
3	Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Jumlah Laporan Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah	Laporan	1	1	1

Sumber: Inspektorat Kota Pekalongan, 2020

Hasil pengukuran atas capaian kinerja 3 (tiga) indikator output pada 3 (tiga) kegiatan yang mendukung Program Peningkatan Kapasitas, Profesionalisme Dan Layanan APIP Tahun 2019, dengan total capaian kinerja sebesar 100% atau kategori Sangat Baik. Upaya yang dilakukan untuk mencapai target antara lain dengan menyelenggarakan kegiatan :

- a. Pembahasan temuan dan rekomendasi serta penyusunan action plan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan BPK RI.
- b. Monitoring pelaksanaan dan asistensi pemenuhan dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK RI/BPKP/Itprov/Itkot.
- c. Pemutakhiran data dan informasi pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan (Pengembangan Simwas).
- d. Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) temuan hasil pengawasan Internal dan eksternal, sesuai dengan amanat Undang-undang.

Dampak pelaksanaan kegiatan yaitu meningkatkan kinerja dan mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan dan berdasarkan laporan hasil pemantauan telah ditindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI sejak tahun 2005 sampai dengan semester II tahun 2019 sebanyak 256 temuan dengan 597 rekomendasi. Dari jumlah tersebut telah selesai ditindak lanjuti sebanyak 524 rekomendasi atau 89,61%, dan Progres penyelesaian TLRHP Inspektorat Provinsi Jateng 98%.

20. Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Di Wilayah Utara

Program ini dilaksanakan dalam 85 (delapan puluh lima) kegiatan, total anggaran program ini sebesar Rp. 3.357.157.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 3.207.382.453,- (*unaudited*) dengan indikator output sebanyak 104 indikator.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.340 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.340 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Di Wilayah Utara

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Kecamatan Pekalongan Utara						
1	Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah Pekalongan utara	Jumlah Patroli Trantib	kali	48	48	48
2	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Rapat Koordinasi/ Kegiatan Catur Pilar	kali	3	3	3
3	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan	kegiatan	50	50	50
4	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Dokumen Perencanaan Kecamatan (Musrenbang Kec)	dokumen	1	1	1
5	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Jumlah pengguna perpustakaan/pemustaka di taman baca kecamatan	orang	120	120	0
6	Pembinaan Administrasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dimonitoring dan dievaluasi tertib adminstrasi	kelurahan	7	7	7
Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan taman baca tidak tercapai dari target 120 orang, yang disebabkan kurangnya minat baca warga. Kecamatan Pekalongan Utara untuk selanjutnya akan lebih mengenalkan taman baca kepada warga masyarakat.						
Kelurahan Kandang Panjang						
7	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terfasilitasinya bantuan transport RT/RW dengan lancar dalam 1 tahun	bulan	12	12	12
8	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan	kegiatan	1	1	1
9	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan	Terfasilitasinya kegiatan Musrenbangkel tingkat kelurahan dalam 1 tahun	kegiatan	1	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
	kebijakan layanan publik					
10	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan	1	1	1	1
11	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan	1	1	1	1
12	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Terfasilitasinya penambahan buku Perpustakaan	bulan	12	12	12
12	Fasilitasi telecenter	Tercapainya	bulan	12	12	0
14	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi jalan yang diaspal	lokasi	1	1	1
		Jumlah lokasi jalan yang dipaving	lokasi	1	1	1
15	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi PHBS yang diselenggarakan	kali	1	1	1
16	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah sosialisasi Wawasan Kebangsaan dan Bahaya Narkoba yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah Pelatihan Penataan Lingkungan yang diselenggarakan	kali	1	1	1
17	Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan sablon yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah pelatihan handycraft yang diselenggarakan	kali	1	1	1
18	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	forum	1	1	1
<p>a. Untuk indikator output jumlah ketua RT/RW yang difasilitasi tidak tercapai karena satuan indikator yang seharusnya jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi sebanyak 78 orang/bulan.</p> <p>b. Indikator Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan, tercapai, namun indikator yang seharusnya yaitu Jumlah Fasilitasi Kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan 1 kegiatan.</p> <p>c. Indikator Terfasilitasinya kegiatan Musrenbangkel tingkat kelurahan dalam 1 tahun tercapai, namun indikator yang seharusnya yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Kelurahan (Dokumen Musrenbangkel).</p> <p>d. Indikator Terfasilitasinya kegiatan BBGRM di Kelurahan tercapai, namun indikator yang seharusnya</p>						

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019	
			satuan	RKPD	APBD		
	yaitu Jumlah Kegiatan Kerja Bakti yang dilaksanakan BBGRM di Kelurahan.						
e.	Indikator Terfasilitasinya kegiatan FKSS kelurahan tercapai, namun indikator yang seharusnya yaitu Jumlah Kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat (FKSS) di Kelurahan.						
f.	Terfasilitasinya penambahan buku Perpustakaan tercapai, namun indikator yang seharusnya yaitu Jumlah pengguna perpustakaan/Pemustaka ditaman Baca Kelurahan.						
g.	Untuk indikator Jumlah telecenter yang difasilitasi di kelurahan Kandang Panjang dengan satuan bulan tidak tercapai, karena indikator yang seharusnya, Jumlah telecenter yang difasilitasi sebanyak 7 telecenter. Indikator ini tidak tercapai disebabkan computer unit yang ada di titik-titik telecenter perlu adanya perbaikan.						
							
Kelurahan Panjang wetan							
19	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi	Orang/ Bulan	1116	1116	1116	
20	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan	kegiatan	12	12	2	
21	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Dokumen Perencanaan Kelurahan (Dokumen Musrenbangkel)	Dokumen	1	1	1	
22	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Kegiatan Kerja Bakti yang dilaksanakan BBGRM di Kelurahan	kegiatan	1	1	1	
23	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat (FKSS) di Kelurahan	Kali kegiatan	2	2	2	
24	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Jumlah pengguna perpustakaan/Pemustaka ditaman Baca Kelurahan	orang	120	120	120	

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
25	Fasilitasi telecenter	Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan	Telecenter	7	7	2
26	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi jalan yang dipaving	lokasi	1	1	1
		Jumlah lokasi jalan yang dicor	lokasi	2	2	2
27	Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan menjahit yang diselenggarakan	kali	1	1	1
28	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	forum	1	1	1

- a. Untuk indikator Jumlah bulan dalam kegiatan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan Panjang Wetan, tidak tercapai karena indikator seharusnya adalah Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan yang difasilitasi, dengan satuan kegiatan, telah dilaksanakan 2 kegiatan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan.
- b. Untuk indikator output Jumlah telecenter yang difasilitasi tidak tercapai, karena hanya ada 2 titik telecenter dalam kondisi aktif dan baik, sedangkan 5 telecenter lain perlu adanya perbaikan.



Kelurahan Degayu

29	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terfasilitasinya kegiatan lembaga kemasyarakatan di kelurahan	bulan	12	12	12
30	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan di kelurahan	bulan	12	12	12

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
31	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	kebutuhan pengembangan Terpenuhinya kebutuhan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik	bulan	12	12	12
32	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Terfasilitasinya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	bulan	12	12	12
33	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Memenuhi kebutuhan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat	bulan	12	12	12
34	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Terfasilitasinya penyelenggaraan perpustakaan di kelurahan	bulan	12	12	12
35	Fasilitasi telecenter	Tercukupinya kebutuhan Fasilitas Telecenter	bulan	12	12	1
36	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi jalan yang dicor	lokasi	3	3	3
37	Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan menjahit yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah pelatihan tata boga yang diselenggarakan	kali	1	1	1
38	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	forum	1	1	1
<p>a. Indikator output Terfasilitasinya kegiatan lembaga kemasyarakatan di kelurahan tercapai, namun indikator yang seharusnya yaitu Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 48 org/bulan.</p> <p>b. Indikator output Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan, tercapai, namun indikator yang seharusnya yaitu Jumlah Fasilitasi Kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan 1 kegiatan.</p> <p>c. Indikator output kebutuhan pengembangan Terpenuhinya kebutuhan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan pelayanan publik tercapai, namun indikator yang seharusnya yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Kelurahan (Dokumen Musrenbangkel 1 dokumen.</p> <p>d. Indikator output Terfasilitasinya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tercapai, namun indikator yang seharusnya yaitu Jumlah Kegiatan Kerja Bakti yang dilaksanakan BBGRM di Kelurahan 1 kegiatan.</p> <p>e. Indikator output Memenuhi kebutuhan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat tercapai, namun indikator yang seharusnya yaitu Jumlah Kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat (FKSS) di</p>						

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
<p>Kelurahan 1 kegiatan.</p> <p>f. Indikator output Terfasilitasinya penyelenggaraan perpustakaan di kelurahan tercapai, namun indikator yang seharusnya yaitu Jumlah pengguna perpustakaan/Pemustaka ditaman Baca Kelurahan 12 orang.</p> <p>g. Untuk indikator Tercukupinya kebutuhan Fasilitas Telecenter dengan satuan bulan, tidak tercapai, karena indikator yang seharusnya, Jumlah telecenter yang difasilitasi sebanyak 6 telecenter perlu adanya perbaikan.</p>						
						
Kelurahan Bandengan						
39	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terfasilitasinya bantuan transport RT dan RW dalam satu tahun dengan lancar	bulan	12	12	12
40	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan dalam satu tahun	bulan	12	12	12
41	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Dokumen Musrenbang	Dokumen	1	1	1
42	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong	kegiatan	2	2	2
43	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	kegiatan	3	3	3
44	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan	kegiatan	1	1	1
45	Fasilitasi telecenter	Jumlah telecenter yang terfasilitasi oleh kelurahan	Telecenter	3	3	3

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
46	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	jumlah lokasi jaringan air bersih yang dilakukan pemeliharaan	lokasi	1	1	0
47	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah Jalan Lingkungan yang ditingkatkan	Ruas Jalan	1	1	1
48	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah MCK umum yang dilakukan pemeliharaan	unit	4	4	4
		Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Balita	paket	1	1	1
		Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu Lansia	paket	1	1	1
49	Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan tata rias yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah pelatihan pengolahan ikan yang diselenggarakan	kali	2	2	2
50	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	forum	1	1	1
<p>a. Indikator output Terfasilitasinya bantuan transport RT dan RW dalam satu tahun dengan lancar, namun indikator yang seharusnya yaitu Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 33 orang.</p> <p>b. Indikator output Terfasilitasinya kegiatan kemasyarakatan dalam satu tahun, tercapai, namun indikator yang seharusnya yaitu Jumlah Fasilitasi Kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan 13 kegiatan.</p> <p>c. Indikator output Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan tercapai, namun indikator yang seharusnya yaitu Jumlah pengguna perpustakaan/Pemustaka ditaman Baca Kelurahan 120 orang.</p> <p>d. Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan) dengan indikator output jumlah lokasi jaringan air bersih yang dilakukan pemeliharaan tidak tercapai dari target 1lokasi, yang disebabkan Pemeliharaan jaringan air bersih berupa kegiatan pengangkatan mesin pompa lama, pemasangan mesin pompa baru, serta pemeliharaan jaringan air bersih. Dengan pengadaan melalui pihak ketiga melalui penunjukan langsung penyedia oleh PPKom.Kegiatan yang sudah dilaksanakan adalah perencanaan dan penunjukan pihak ketiga dengan SPK yang ditandatangani oleh PPKom. sampai dengan pengangkatan mesin lama. Namun pada saat akan dipasang mesin pompa yang baru, pipa lama yang berada dibawah tanah menyempit tidak dapat dimasukkan mesin pompa baru dan</p>						

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
<p>anggaran yang ada tidak mencukupi untuk dilakukan pengeboran lebih dalam lagi. Agar pompa baru dapat dimasukkan ke dalam sumur yaitu dengan mengebor sumur di titik yang sama dengan anggaran yang lebih besar, sehingga diusulkan kembali pada tahun anggaran tahun 2020.</p>						
						
Kelurahan Panjang Baru						
51	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah ketua RT RW kali bulan yang di fasilitasi	Orang/ Bulan	840	840	840
52	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di kelurahan	kegiatan	2	2	1
53	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah dokumen perencanaan Kelurahan (Musrenbangkel)	Dokumen	1	1	1
54	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kegiatan kerja bhakti yang dilaksanakan BBGRM di Kelurahan	kegiatan	1	1	2
55	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Jumlah kegiatan fasilitasi fkss kelurahan	kali kegiatan	2	2	2
56	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Jumlah pengguna perpustakaan di taman baca kelurahan	orang	120	120	92
57	Fasilitasi telecenter	Jumlah telecenter yang di fasilitasi kelurahan	telecentre	6	6	0
58	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi saluran yang diperbaiki	lokasi	3	3	3
		Jumlah poskamling yang dibangun	unit	1	1	1
59	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan	Jumlah lokasi jalan yang dicor	lokasi	2	2	2

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
	pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi jalan yang dipaving	lokasi	2	2	2
60	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	jumlah sosialisasi NAPZA yang diselenggarakan	kali	2	2	2
61	Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan tata boga yang diselenggarakan	kali	1	1	1
62	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	forum	1	1	1

a. Untuk indikator Tercukupinya kebutuhan Fasilitas Telecenter dengan satuan bulan, tidak tercapai, karena indikator yang seharusnya, Jumlah telecenter yang difasilitasi sebanyak 6 telecenter perlu adanya perbaikan.



Kelurahan Krapyak

63	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terlaksananya koordinasi antara Kelurahan dan RT/RW	bulan	12	12	1416 org/kl
64	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Tercapainya koordinasi dengan masyarakatan	bulan	12	12	1 keg

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
65	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	bulan	12	12	1 dok
66	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Memberi semangat pada masyarakat untuk melakukan kegiatan gotong royong	bulan	12	12	1 keg
67	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Rapat rapat koordinasi dengan masyarakat RT/RW dan Tokoh masyarakat	bulan	12	12	2 keg
68	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Terfasilitasinya penambahan buku perpustakaan	bulan	12	12	120 org
69	Fasilitasi telecenter	meningkatkan pelayanan kegiatan kemasyarakatan	bulan	12	12	12
70	Fasilitasi kegiatan keagamaan	Terlaksananya kegiatan keagamaan kemasyaraakaan	bulan	12	12	1 keg
71	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi jalan yang dicor	lokasi	2	2	2
72	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan komputer yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah penyuluhan bahaya narkoba yang diselenggarakan	kali	1	1	1
73	Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan hantaran yang diselenggarakan	kali	1	1	1
74	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	forum	1	1	1
<p>a. Untuk indikator output Terlaksananya koordinasi antara Kelurahan dan RT/RW tercapai, namun indikator yang seharusnya yaitu jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi 1.416 orang .</p> <p>b. Indikator Tercapainya koordinasi dengan masyarakat tidak tercapai, karena karena indikator seharusnya adalah Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan yang difasilitasi, dengan satuan kegiatan,</p>						

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
	telah dilaksanakan 1 kegiatan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan.					
	c. Indikator meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik dengan target 12 bulan tidak tercapai, karena indikator yang seharusnya yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Kelurahan (Dokumen Musrenbangkel) dengan satuan dokumen, telah dilaksanakan dengan output 1 dokumen musrenbangkel.					
	d. Indikator output Memberi semangat pada masyarakat untuk melakukan kegiatan gotong royong dengan target 12 bulan tidak tercapai, karena indikator yang seharusnya yaitu Jumlah Kegiatan Kerja Bakti yang dilaksanakan BBGRM di Kelurahan telah dilaksanakan 1 kegiatan kerja bakti.					
	e. Indikator output Rapat rapat koordinasi dengan masyarakat RT/ RW dan Tokoh masyarakat tidak tercapai dari target satuan bulan, karena indikator yang seharusnya yaitu Jumlah Kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat (FKSS) di Kelurahan telah dilaksanakan 1 kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat (FKSS).					
	f. Terfasilitasinya penambahan buku Perpustakaan tercapai, namun indikator yang seharusnya yaitu Jumlah pengguna perpustakaan/Pemustaka ditaman Baca Kelurahan.					
	g. Indikator output meningkatkan pelayanan kegiatan kemasyarakatan dari target satuan bulan tercapai, namun indikator yang seharusnya Jumlah telecenter yang difasilitasi sebanyak 10 telecenter tidak tercapai karena ada 2 titik telecenter yang perlu adanya perbaikan.					
						
Kelurahan Padukuhan Kraton						
75	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah ketua RT dan RW yang difasilitasi	org/bulan	1.116	1.116	1116
76	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan kemasyarakatan yang difasilitasi	kegiatan	2	2	2
77	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah dokumen musrenbangkel dan kecamatan	Dokumen	1	1	1
78	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kegiatan BBGRM yang difasilitasi	RT/RW	10	10	10
79	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Jumlah kegiatan fasilitasi FKSS	kegiatan	1	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
80	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Jumlah pengguna perpustakaan di pojok baca kelurahan	orang	8	8	24
81	Fasilitasi telecenter	Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan	Telecenter	11	11	0
82	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi jalan yang diaspal	lokasi	1	1	1
		jumlah lokasi jalan yang dicor	lokasi	1	1	1
83	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah sosialisasi KDRT yang diselenggarakan	kali	1	1	1
84	Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan menjahit yang diselenggarakan	kali	1	1	1
85	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan utara (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	forum	1	1	1
a. Kegiatan Fasilitasi dengan indikator Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan tidak tercapai dari target 11 telecenter, yang disebabkan computer unit di 11 telecenter tersebut dalam kondisi rusak, sehingga warga tidak dapat memanfaatkan telecenter tersebut						
						

Sumber: Kecamatan Pekalongan Utara, 2020

21. Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Masyarakat Di Wilayah Selatan

Program ini dilaksanakan dalam 87 (delapan puluh tujuh) kegiatan, total anggaran program ini sebesar Rp. 3.447.733.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 3.293.180.598,- (*unaudited*) dengan indikator output sebanyak 136 indikator.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.341 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.341 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Masyarakat Di Wilayah Selatan

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Kecamatan Pekalongan Selatan						
1	Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah Pekalongan selatan	Jumlah patroli trantib selama 1 tahun	kali	48	48	48
2	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah rapat koordinasi Catur Pilar / Tim Pembina Kelurahan yang terfasilitasi	kali	2	2	2
3	Fasilitasi Kegiatan Masyarakat	Jumlah kegiatan masyarakat yang terfasilitasi	kegiatan	5	5	5
4	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan yang terfasilitasi	kali	2	2	2
5	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Jumlah pengguna perpustakaan/pemustaka a di Taman Baca Kecamatan	Orang	120	120	0
6	Pembinaan Administrasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dimonitor dan dievaluasi tertib administrasi	Kelurahan	6	6	6
Untuk indikator output jumlah pengguna perpustakaan / pemustaka di taman baca kecamatan sebanyak 120 orang tidak tercapai karena pembelian buku perpustakaan menunggu adanya perubahan anggaran sehingga pembelian buku perpustakaan terrealisasi pada triwulan 4, hal tersebut yang menyebabkan output tidak tercapai.						

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
						
						

Kelurahan Jenggot

7	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi	Bulan	660	660	660
8	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan	kegiatan	0	0	0
		Jumlah Kegiatan Fasilitasi kemasyarakatan yang dilaksanakan	kegiatan	3	3	3
9	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Dokumen Murenbang	Dokumen	1	1	1
10	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong masyarakat	kegiatan	1	1	1
11	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat	kegiatan	2	2	2
12	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Jumlah pengguna perpustakaan(Pemustaka a) di taman baca kelurahan	Orang	600	600	600

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
13	Fasilitasi telecenter	Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan	Telecenter	5	5	5
14	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah pengadaan gerobak sampah	unit	4	4	4
		Jumlah pengadaan mesin potong rumput	unit	4	4	4
		Jumlah pengadaan alat pemadam kebakaran	buah	8	8	8
		Jumlah lokasi penambahan jaringan air bersih	lokasi	2	2	2
		Jumlah lokasi saluran air yang diperbaiki	lokasi	1	1	1
15	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi jalan yang dipaving	lokasi	3	3	3
16	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Lansia	paket	1	1	1
		Jumlah MCK umum yang direhab	unit	1	1	1
17	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah pengadaan Alat Terbang Genduk	paket	1	1	1
		Jumlah Pengadaan Seragam Penabuh Terbang Genduk	buah	25	25	25
		Jumlah Pengadaan Alat Permainan Edukatif	paket	1	1	1
		Jumlah Pengadaan Buku Bacaan	paket	11	11	1
18	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah sosialisasi persampahan yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah sosialisasi PHBS yang diselenggarakan	kali	2	2	2
19	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah sosialisasi bahaya narkoba yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah sosialisasi KDRT yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah pelatihan setir mobil yang diselenggarakan	kali	1	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
20	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	forum	1	1	1



Perbaikan/Rehab MCK Umum Lt.2
 LOKASI: RT.01 RW.10 dan Pembangunan Jalan Paving 263,3 m2
 LOKASI: RT.01 RW.05

Kelurahan Buaran Kradenan

21	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi	orang bulan	744	744	744
22	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan	kali/ kegiatan	1	1	1
23	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah dokumen perencanaan (Musrenbangkel)	dokumen	1	1	1
24	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong	kegiatan	2	2	2
25	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat	kegiatan	1	1	1
26	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) di pojok Baca Kelurahan	Orang	120	120	120
27	Fasilitasi telecenter	Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan	telecenter	7	7	4
28	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan	Jumlah Pengadaan tempat Sampah	unit	418	418	418

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
	pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah Pengadaan Papan pengumuman	unit	62	62	62
		Jumlah Pengadaan Papan RT & RW	unit	62	62	62
29	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah sosialisasi persampahan yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah sosialisasi PHBS yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah balita yang diberi PMT	balita	5.400	5.400	5.400
		Jumlah lansia yang diberikan obat	Orang	20	20	20
		Jumlah lansia yang diberikan PMT	Orang	600	600	600
30	Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan sablon yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah pelatihan menjahit yang diselenggarakan	kali	1	1	1
31	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	forum	1	1	1
a. Untuk fasilitasi telecenter dengan indikator output jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan tidak tercapai dari 7 telecenter hanya 4 yang terfasilitasi hal tersebut dikaerakan 3 telecenter dalam kondisi rusak.						
						
Pembuatan Papan RT dan RW dan Pembuatan tempat sampah sebanyak 418 unit						
Kelurahan Kuripan Kertoharjo						
32	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi	orang bulan	444	444	444

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
33	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan fasilitasi Kemasyarakatan	kegiatan	2	2	2
34	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah dokumen Musrenbang	dokumen	1	1	1
35	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong	kegiatan	1	1	1
36	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat	kegiatan	2	2	2
37	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Jumlah pengguna perpustakaan(Pemustaka a) di Pojok Baca Kelurahan	Orang	240	240	240
38	Fasilitasi telecenter	Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan	telecenter	84	84	8
39	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi pembuatan saluran pipa	lokasi	4	4	2
		Jumlah lokasi pembuatan senderan	lokasi	1	1	1
		Jumlah lokasi pengadaan penerangan jalan	lokasi	2	2	1
40	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi jalan yang dipaving	lokasi	2	2	2
41	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah pengadaan timbangan bayi	buah	10	10	10
		Jumlah pengadaan matras kelas ibu hamil	buah	10	10	10
42	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan penyuluhan PHBS yang diselenggarakan	kali	2	2	2
43	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan komputer yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah kegiatan penyuluhan bahaya narkoba yang	kali	2	2	2

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		diselenggarakan				
44	Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan tata boga yang diselenggarakan	kali	1	1	1
45	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	forum	1	1	0

- Untuk kegiatan Fasilitasi telecenter dengan indikator output jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan ada kekeliruan dalam penulisan pada target output tertulis 84 seharusnya 8 telecenter artinya tercapai sesuai dengan target.
- Untuk indikator output jumlah lokasi pembuatan saluran pipa targetnya ada 4 lokasi di Gg. 11, 16, 17 dan 19 namun untuk Gg. 16 dan 17 yang semula warga sepakat dibuat saluran pada akhirnya menolak sehingga melaksanakan pekerjaannya hanya di 2 lokasi yaitu Gg. 11 dan 19 saja yang merupakan penggabungan dari 4 lokasi menjadi 2 lokasi saja namun volume tercapai.
- Untuk indikator jumlah lokasi pengadaan penerangan yang targetnya 2 lokasi yaitu di Gg. 7 RT. 2/6 dan RT. 2/9 namun ketika akan dilaksanakan ternyata yang RT. 2/6 merupakan lokasi yang dikerjakan dengan dana POKIR sehingga untuk dana kelurahan dilaksanakan di RT. 2/9 tetapi volumenya merupakan penggabungan 2 lokasi tersebut menjadi 1 lokasi saja.
- Untuk indikator jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk targetnya 1 namun tidak tercapai karena di kelurahan tersebut telah ada forum yang serupa/telah dibentuk)



Pelatihan komputer bagi warga Kelurahan Kuripan Kertoharjo dan Pengadaan/pemasangan penerangan jalan di RT 02/09 Kelurahan Kuripan Kertoharjo

Kuripan Yosorejo						
46	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Ketua RT - RW kali Bulan yang Fasilitasi	orang bulan	720	720	720
47	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan dikelurahan	Kali kegiatan	1	1	1
48	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam	Jumlah Dokumen Perencanaan	Dokumen	1	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
	perumusan program dan kebijakan layanan publik	Pembangunan Musrenbangkel				
49	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Kegiatan Kerja Bhakti yang dilaksanakan Pada Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	kegiatan	1	1	1
50	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat	Kali kegiatan	1	1	1
51	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Jumlah Pengguna Perpustakaan/ Pemustaka di Taman Baca Kelurahan	Orang	120	120	170
52	Fasilitasi telecenter	Terfasilitasinya Kegiatan Telecenter RW dan RW Net	Bulan	12	12	0
		Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan	Telecenter	7	7	5
53	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi saluran yang dibangun	lokasi	1	1	0
		Jumlah lokasi saluran yang dipasang plat deker	lokasi	1	1	1
		Jumlah lokasi jalan yang dipaving	lokasi	1	1	1
55	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana PAUD	paket	2	2	2
56	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan penyuluhan PHBS yang diselenggarakan	kali	1	1	1
57	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan komputer yang diselenggarakan	kali	1	1	1
58	Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan tata boga yang diselenggarakan	kali	1	1	1
59	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan	Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang	kali	1	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
	kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	diselenggarakan				
		Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	forum	1	1	1
<p>a. Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan taman baca dengan 120 orang namun capaian mencapai 170 orang hal tersebut dikarenakan minat baca masyarakat tinggi.</p> <p>b. Kegiatan Fasilitasi telecenter indikator outputnya terfasilitasinya kegiatan telecenter tidak tercapai, hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan pada satuannya yaitu bulan seharusnya telecenter dan tertulis 12 bulan seharusnya 7 telecenter dan capaiannya hanya 5 telecenter dikarenakan 2 telecenter dalam keadaan rusak.</p> <p>c. Untuk Indikator output Jumlah lokasi saluran yang dibangun ada 1 lokasi tidak tercapai karena lokasi yang direncanakan semula telah dilaksanakan dengan dana pikir sehingga untuk pindah lokasi tidak memungkinkan karena waktu yang sangat mendesak .</p>						
						
Pengaspalan Jalan di RW 11 RT. 1, 2, 3 dan 4 dan Pemasangan platdeker sepanjang 49 m di RT. 1. / RW. 10						
Kelurahan Soko Duwet						
60	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Ketua RT / RW x bulan yang difasilitasi	orang x bulan	600	600	600
61	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kemasyarakatan di Kelurahan	kegiatan	2	2	2
62	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Dokumen Perencanaan Kelurahan {Dokumen Musrenbangkel}	Dokumen	1	1	1
63	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kegiatan Kerja Bakti dalam rangka BBGRM di Kelurahan	kegiatan	1	1	1
64	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Jumlah kegiatan FKSS di Kelurahan	kegiatan	3	3	3
65	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Jumlah Pengguna Perpustakaan di Taman Baca Kelurahan	Orang	240	240	200
66	Fasilitasi telecenter	Terlaksananya sarana telecenter RW Net dan Kelurahan	bulan	12	12	0

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		Jumlah telecenter yang terfasilitasi oleh kelurahan	telecenter	6	6	3
67	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi pembuatan saluran drainase	lokasi	1	1	1
		Jumlah pengadaan tempat sampah	unit	120	120	120
68	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi jalan yang dicor	lokasi	2	2	2
		Jumlah Lokasi jalan yang diaspal	lokasi	1	1	1
69	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah pengadaan alat tensi kesehatan	unit	13	13	13
		Jumlah pengadaan timbangan bayi	unit	12	12	12
70	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah PAUD yang direhab	unit	1	1	1
71	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan setir mobil yang diselenggarakan	kali	1	1	1
72	Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan tata boga yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah pelatihan wirausaha yang diselenggarakan	kali	1	1	1
73	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	forum	1	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
a.	Kegiatan Fasilitasi telecenter indikator outputnya terfasilitasinya kegiatan telecenter tidak tercapai, hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan pada satuannya yaitu bulan seharusnya telecenter dan tertulis 12 bulan seharusnya 6 telecenter dan capaiannya hanya 3 telecenter dikarenakan 3 telecenter dalam keadaan rusak.					
						
RT 03 RW 03, dan Perbaikan Jalan dengan Cor Beton RT 03 RW 04						
Kelurahan Banyurip						
74	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang di fasilitasi	Orang/ bulan	2376	2376	2376
75	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan	kegiatan	1	1	1
76	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah dokumen perencanaan musrenbangkel	dokumen	1	1	1
77	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong	kegiatan	1	1	1
78	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Jumlah kegiatan Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	kegiatan	1	1	1
79	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) di pojok baca kelurahan	Orang	600	600	200
80	Fasilitasi telecenter	Jumlah bulan fasilitasi telecenter oleh kelurahan	bulan	7	7	5
81	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi saluran yang diperbaiki	lokasi	1	1	1
		Jumlah pengadaan mesin potong rumput	unit	5	5	5
		Jumlah lokasi pembuatan saluran drainase	lokasi	1	1	0
		Jumlah pengadaan gerobak sampah	unit	9	9	9
		Jumlah pengadaan APAR	unit	10	10	10

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
82	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi jalan yang diaspal	lokasi	1	1	1
83	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Posbindu	paket	1	1	1
		Jumlah pengadaan meja FKSS	unit	2	2	2
		Jumlah pengadaan kursi FKSS	unit	2	2	2
84	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah pengadaan alat permainan PAUD	unit	4	4	4
		Jumlah gedung PAUD yang direhab	unit	1	1	0
		Pembangunan atap parkir kelurahan (diganti karena tanah PAUD milik PJKA)	unit	0	0	1
85	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan penyuluhan KB yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah kegiatan penyuluhan peningkatan gizi balita yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah kegiatan penyuluhan kader Posyandu yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah kegiatan penyuluhan HIV yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah kegiatan penyuluhan PHBS yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah bansos susu balita	dus	70	70	70
		Jumlah bansos susu sumilkel	dus	48	48	30
		Jumlah pelatihan menjahit yang diselenggarakan	kali	1	1	1
86	Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan tata boga yang diselenggarakan	kali	1	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
87	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan selatan (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	forum	1	1	0

- Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan taman baca dengan indikator output jumlah pengguna perpustakaan (pemustaka) dipojok baca kelurahan tidak tercapai target 600 orang hanya tercapai 200 orang hal tersebut dikarenakan kurangnya minat baca masyarakat sekitar.
- Untuk Indikator output jumlah fasilitasi telecenter oleh kelurahan dengan target satuan 7 bulan tidak tercapai hal tersebut karena satuan seharusnya adalah 7 telecenter dan hanya tercapai 5 telecenter hal tersebut dikarenakan 2 telecenter rusak.
- Untuk dana kelurahan dengan indikator output jumlah lokasi pembuatan saluran drainase tidak tercapai atau tidak terlaksana dikarenakan ketidaksesuaian perencanaan teknis pembangunan dan anggaran. Untuk Indikator output jumlah gedung PAUD yang direhab tidak tercapai dikarenakan dialihkan ke pembuatan atap parkir hal tersebut dikarenakan tanah yang ada bangunan PAUD nya adalah milik PJKA.
- Untuk Indikator bantuan sus sumikel targetnya 48 dos tidak tercapai / hanya tercapai 30 dos hal tersebut dikarenakan harga susu yang dimaksud harganya naik.
- Untuk Indikator jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk dengan target 1 forum tidak tercapai (0) hal tersebut dikarena pada kelurahan Banyurip telah memiliki forum dimaksud.



Perbaikan saluran/drainase dari U20 menjadi U30 dan pemasangan platdeker Di Gang 4 dan Pengaspalan jalan seluas 303,75 m di RT. 3. RW 2

Sumber:Kecamatan Pekalongan Selatan, 2020

22. Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Di Wilayah Barat

Program ini dilaksanakan dalam 98 (Sembilan puluh delapan) kegiatan, total anggaran program ini sebesar Rp. 3.487.807.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 3.352.128.874,- (*unaudited*) dengan indikator output sebanyak 136 indikator.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.342 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.342 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Masyarakat Di Wilayah Barat

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Kecamatan Pekalongan Barat						
1	Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah Pekalongan barat	Jumlah Patroli Trantib	kali	0	-	0
		Jumlah patroli trantib yang dilaksanakan	kali	48	48	48
		Jumlah lomba K3 yang dilaksanakan	kali	1	1	1
		Jumlah kegiatan pembinaan Linmas yang dilaksanakan	kali	1	1	1
		Jumlah kegiatan piket posko bencana alam yang dilaksanakan	kali	2	2	2
2	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah rapat koordinasi catur pilar	kegiatan	3	3	3
3	Fasilitasi Kegiatan Masyarakat	Jumlah fasilitasi kegiatan masyarakat di Kecamatan (Senam, Pengajian, Jalan Sehat)	kegiatan	48	48	48
4	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah dokumen perencanaan Kecamatan (Musrenbangkec)	dokumen	1	1	1
5	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Jumlah pengguna perpustakaan/ pemustaka di taman baca kecamatan	orang	120	120	120
6	Pembinaan Administrasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dimonitoring	Kelurahan	7	7	7
<p>a. Kegiatan Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah untuk indikator jumlah patroli trantib yang dilaksanakan targetnya di apbd menjadi 0(nol)kali, sedangkan indikator jumlah patroli trantib yang dilaksanakan target seharusnya 48 kali dan tercapai semua sebanyak 48 kali.</p>						
						
Musrenbang tingkat Kecamatan Pekalongan Barat						

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Kelurahan Medono						
7	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi	orang/bulan	1104	1104	1104
8	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan	kali/kegiatan	3	3	3
9	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel)	dokumen	1	1	1
10	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kerja bhakti yang dilaksanakan pada bulan bhakti gotong royong	kegiatan	1	1	1
11	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Jumlah kegiatan fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat	kali/kegiatan	2	2	2
12	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Jumlah pengguna perpustakaan(pemustaka) di perpustakaan kelurahan	orang	360	360	360
13	Fasilitasi telecenter	Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan	Telecenter	8	8	8
14	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi jalan yang diaspal	lokasi	3	3	4
		Jumlah lokasi jalan yang dipaving	lokasi	4	4	3
15	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah MCK umum yang direhab	unit	1	1	1
		Jumlah pengadaan sarpras Posbindu	paket	1	1	1
		Jumlah gedung Posyandu yang diperbaiki	unit	1	1	1
16	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas kader BKB, BKR, BKL yang diselenggarakan	kali	3	3	3
		Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas KIM yang diselenggarakan	kali	4	4	4
		Jumlah pelatihan kader kesehatan masyarakat yang diselenggarakan	kali	2	2	2
		Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus FKSS dan Kader Kesehatan yang diselenggarakan	kali	1	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		Jumlah senam bersama yang diselenggarakan	kali	32	32	32
		Jumlah kegiatan kerja bakti lingkungan yang dilaksanakan	kali	9	9	9
17	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi bahaya narkoba yang diselenggarakan	kali	0	0	1
18	Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kewirausahaan yang diselenggarakan	kali	4	4	4
19	Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas LKK yang diselenggarakan	kali	4	4	4
		Jumlah lomba PKK yang diselenggarakan	kali	2	2	2
20	Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/ Ketertiban Kelurahan yang dilaksanakan	kali	8	8	8
		Jumlah kegiatan patroli wilayah yang dilaksanakan	kali	36	36	36
21	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	forum	1	1	0
<p>a. Kegiatan di kelurahan Medono, indikator kinerja tercapai semua sesuai dengan target yang direncanakan. Kegiatan yang bersumber dari DAU tambahan untuk kelurahan Medono dapat dilaksanakan, baik fisik sarpras kelurahan maupun pemberdayaan masyarakat. Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan) dengan indikator Jumlah lokasi jalan yang diaspal 4 lokasi yaitu salah satunya di Jl. RT.01 RW. 11 yaitu :</p>						

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
						
	Sosialisasi Hidroponik		Pengaspalan Jalan RT.01 RW 11			
Kelurahan Podosugih						
22	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi	orang/bulan	600	600	600
23	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan di Kelurahan	kegiatan	2	2	2
24	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel)	dokumen	1	1	1
25	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada BBGRM di Kelurahan	kegiatan	1	1	1
26	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat	kegiatan	1	1	1
27	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Jumlah pengguna perpustakaan (Pemustaka) dipojok baca kelurahan	orang	480	480	0
28	Fasilitasi telecenter	Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan	telecenter	6	6	0
29	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah pengadaan gerobak sampah	unit	10	10	10
		Jumlah lokasi saluran air yang dibangun/diperbaiki	lokasi	4	4	4
30	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi jalan yang diaspal	lokasi	2	2	2
31	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah	Jumlah kegiatan sosialisasi bahaya radikalisme yang diselenggarakan	kali	2	2	2

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
	Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi KDRT yang diselenggarakan	kali	2	2	2
32	Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan handycraft yang diselenggarakan	kali	2	2	2
33	Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas KelembagaanLKK	kali	3	3	3
34	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	forum	1	1	1
<p>a. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Taman Baca dengan indikator jumlah pengguna perpustakaan dengan target 480 orang, sampai akhir tahun anggaran 2019 capaiannya sebesar 0(nol) orang. Hal ini disebabkan koleksi buku yang ada kurang beragam dan relatif sudah lama, sehingga masyarakat kurang minat berkunjung ke pojok baca kelurahan</p> <p>b. Kegiatan fasilitasi telecenter, dengan indikator jumlah telecenter yang difasilitasi dengan target 6 telecenter, sampai akhir tahun anggaran 2019 ketercapainnya 0(nol) telecenter. Disebabkan telecenter sudah mandiri dalam operasionalnya, sehingga beban biaya hosting dan biaya internet tidak dibiayai dalam kegiatan ini.</p> <p>c. Kegiatan Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan) dengan indikator output Jumlah lokasi jalan yang diaspal 2 lokasi yaitu salah satunya di Jl. RT.07 RW. 01 :</p>						
						
Perbaikan Jalan Aspal di RT. 07 RW. 01						
Kelurahan Tirto						
35	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi	org/bln	636	636	636

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
36	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan	kegiatan	5	5	5
37	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	jumlah dokumen Perencanaan Kelurahan (Dokumen Musrenbangkel)	dokumen	1	1	1
38	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	jumlah kegiatan kerjabakti dalam rangka BBGRM di Kelurahan	kegiatan	1	1	1
39	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat	kegiatan	2	2	2
40	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Jumlah pengguna perpustakaan(Pemustaka) di taman baca kelurahan	orang	480	480	480
41	Fasilitasi telecenter	Jumlah Telecenter yang difasiti oleh kelurahan	telecenter	6	6	6
42	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi jalan yang diaspal	lokasi	2	2	2
		Jumlah lokasi jalan yang dipaving	lokasi	4	4	4
43	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah MCK umum yang diperbaiki	unit	1	1	1
44	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi bahaya narkoba yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah kegiatan sosialisasi KDRT yang diselenggarakan	kali	1	1	1
45	Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan Sosialisasi/Workshop Kewirausahaan yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah pelatihan menjahit yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah pelatihan tata boga yang diselenggarakan	kali	1	1	1
46	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya	Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan	kali	1	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
	wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	forum	1	1	1
a. Kegiatan di Kelurahan Tirto indikator kinerja output tercapai 100%. Kegiatan bersumber dari dana DAU tambahan kelurahan yang dilaksanakan di Kelurahan Tirto ada 12 kegiatan dan salah satunya kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan Barat dengan output jumlah lokasi jalan yang diaspal ada 2 lokasi, salah satunya di Jalan RT. 03 RW. 02 Kel. Tirto.						
						
Pengaspalan jalan RT 03 RW 02			Pelatihan Menjahit			
Kelurahan Sapuro Kebulen						
47	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi	orang/bulan	912	912	912
48	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan	kegiatan	3	3	3
49	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Dokumen Perencanaan Kelurahan (Musrenbangkel)	dokumen	1	1	1
50	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong	kegiatan	1	1	1
51	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	kegiatan	2	2	2
52	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Jumlah Pengguna perpustakaan / pemustaka di taman baca Kelurahan	orang	360	360	360
53	Fasilitasi telecenter	Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan	telecenter	16	16	16
54	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi jalan yang diaspal	lokasi	7	7	7
55	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan	Jumlah kegiatan sosialisasi ASI eksklusif yang	kali	1	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
	masyarakat wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	diselenggarakan				
		Jumlah kegiatan sosialisasi bina keluarga lansia yang diselenggarakan	kali	1	1	1
56	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi bahaya narkoba yang diselenggarakan	kali	1	1	1
57	Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan hantaran yang diselenggarakan	kali	1	1	1
58	Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan RT/RW yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah pelatihan Dasawisma yang diselenggarakan	kali	1	1	1
59	Pengelolaan kegiatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan pembinaan Linmas yang diselenggarakan	kali	1	1	1
60	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	forum	1	1	1

- a. Kegiatan di Kelurahan Sapuro Kebulen indikator kinerja output tercapai 100%. Kegiatan bersumber dari dana DAU tambahan kelurahan yang dilaksanakan di Kelurahan Sapuro Kebulen ada 14 kegiatan dan salah satunya kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan Barat dengan output jumlah lokasi jalan yang diaspal ada 7 lokasi, salah satunya di Jalan RT. 01 RW. 03 Kel. Sapuro Kebulen.



Foto 100% RT.01 RW.03

Pengaspalan Jalan RT.01 RW 03



Pembinaan Linmas

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Kelurahan Benda kergon						
61	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi	Org/bl	1.416	1.416	1.416
62	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan Fasilitasi Kemasyarakatan di Kelurahan	kali/ kegiatan	2	2	2
63	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah dokumen perencanaan Kelurahan (dokumen musrenbangkel)	dokumen	1	1	1
64	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan BBGRM di Kelurahan	kegiatan	1	1	1
65	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat	Kali kegiatan	2	2	2
66	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Jumlah pengguna perpustakaan(pemustaka) di taman baca kelurahan	bh	120	120	120
67	Fasilitasi telecenter	Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan	Telecenter	10	10	10
68	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi jalan yang dipaving	lokasi	1	1	1
		Jumlah lokasi jalan yang diaspal	lokasi	4	4	4
69	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan Sosialisasi PHBS yang diselenggarakan	kali	1	1	1
70	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah sosialisasi bahaya narkoba yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan	kali	1	1	1
71	Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan kerajinan yang diselenggarakan	kali	1	1	1
72	Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan Penguatan Kelembagaan LKK yang diselenggarakan	kali	1	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
73	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	Forum	-	1	1
<p>a. Kegiatan di Kelurahan Bendan kergon indikator kinerja output tercapai 100%. Kegiatan bersumber dari dana DAU tambahan kelurahan yang dilaksanakan di Kelurahan Bendan kergon ada 13 kegiatan dan salah satunya kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan Barat dengan output jumlah lokasi jalan yang diaspal ada 4 lokasi dan salah satu lokasi berada di di RT.03 RW. V.</p> <p>b. Pembuatan jalan aspal RT.03 RW.V, volume 532,80 m2 dilaksanakan menggunakan Dana Kelurahan Tahun 2019 dengan anggaran Rp.58.490.000,-. Pengerjaannya dilaksanakan secara swakelola type IV dengan melibatkan kelompok masyarakat. Implementasi sistem ini untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.</p> <p>c. Pelaksana pekerjaan memasang papan informasi proyek di lokasi kegiatan. Papan proyek itu memuat nama kegiatan, pekerjaan, besaran anggaran, sumber dana, lamanya pengerjaan, dan pelaksana pekerjaan. Pemasangan papan proyek merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik kepada masyarakat.</p> <p>d. Sosialisasi Bahaya Narkoba Kegiatan Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan barat dengan indikator ouput jumlah sosialisasi bahaya narkoba yang diselenggarakan ada 1 kali.</p> <p>e. Dalam rangka mencegah serta menekan maraknya peredaran serta pemakai narkoba, Kelurahan Bendan Kergon menggelar Sosialisasi Bahaya Narkoba pada Selasa malam, 6 Agustus 2019 bertempat Gedung Diklat BKPPD Kota Pekalongan.</p> <p>f. Acara tersebut mengundang narasumber dari Satnarkoba Polres Kota Pekalongan, Kesbangpol, Kecamatan dan Gertak (Gerakan Taruna Anti Narkoba) dan dihadiri oleh 150 orang peserta dari warga masyarakat Kelurahan Bendan Kergon, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Polsek Pekalongan Barat. Sosialisasi dilaksanakan guna menekan peredaran narkoba serta pemakaian, di kalangan generasi muda yang bebas dari narkoba.</p> <p>g. Satnarkoba Polres Pekalongan Kota selaku narasumber diwakili oleh Bapak Bambang, dalam paparannya sangat mengapresiasi kegiatan ini, yang dilaksanakan oleh Kelurahan Bendan Kergon, secara bersama-sama mengantisipasi serta mencegah maraknya peredaran dan pemakain narkoba di kalangan masyarakat. Melalui penyuluhan sedini mungkin berharap bisa mengantisipasi hal tersebut, untuk menekan dan menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.</p>						
						

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
						
Kelurahan Pasirkratonkramat						
74	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi	orang/bulan	1332	1332	1332
75	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan	kali/kegiatan	2	2	2
76	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah dokumen Musrenbang Kelurahan	dokumen	1	1	1
77	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan pada BBGRM di Kelurahan	kegiatan	1	1	6
78	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Jumlah kegiatan fasilitasi FKSS	kali/kegiatan	2	2	2
79	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Jumlah pengguna perpustakaan(Pemustaka) di pojok baca Kelurahan	orang	720	720	720
80	Fasilitasi telecenter	Jumlah telecenter yang difasilitasi Kelurahan	telecenter	12	12	12
81	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah pengadaan tempat sampah	unit	0	0	0
		Jumlah tempat sampah yang dibuat	unit	500	500	500
82	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi Peninggian jalan dengan cor beton	lokasi	3	3	3
83	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah	Jumlah kegiatan Sosialisasi Reproduksi Remaja yang diselenggarakan	kali	1	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
	Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan Penyuluhan BKR dan BKB yang diselenggarakan	kali	1	1	1
84	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan setir mobil yang diselenggarakan	kali	1	1	1
85	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	forum	1	1	0

- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan) indikator Jumlah pengadaan tempat sampah sebanyak 0 unit di sesuaikan menjadi Jumlah tempat sampah yang dibuat sebanyak 500 unit.
- b. Kegiatan bersumber dari dana DAU tambahan kelurahan yang dilaksanakan di Kelurahan Pasirkraton kramat ada 12 kegiatan dan salah satunya kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan Barat dengan output jumlah tempat sampah yang dibuat ada 500 unit dan kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan barat dengan output jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan ada 1 kali.



Pengadaan Tong Sampah dan Penguatansiagaan Bencana

Kelurahan Pringrejo

86	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi	orang/ bulan	1368	1368	1368
87	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan di kelurahan	kali/ kegiatan	10	10	10
88	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (dokumen musrenbangkel)	dokumen	1	1	1
89	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kegiatan kerja bakti BBGRM yang	kegiatan	1	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		dilaksanakan di kelurahan				
90	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Jumlah kegiatan fasilitasi FKSS	kali/ kegiatan	2	2	2
91	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Jumlah pengguna perpustakaan/pemustaka di taman baca kelurahan	orang	120	120	120
92	Fasilitasi telecenter	Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan	telecenter	15	15	15
93	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi jalan yang dicor	lokasi	2	2	2
		Jumlah lokasi jalan yang diaspal	lokasi	1	1	2
94	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah pengadaan rak buku	buah	1		1
		Jumlah pengadaan karpet	meter	25	25	25
		Jumlah pengadaan meja baca	buah	6	6	6
		Jumlah pengadaan kipas angin	unit	2	2	2
		Jumlah pengadaan buku bacaan	buah	34	34	34
95	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi PHBS yang diselenggarakan	kali	3	3	3
		Jumlah kegiatan sosialisasi BKB yang diselenggarakan	kali	12	12	12
96	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi bahaya narkoba dan radikalisme yang diselenggarakan	kali	3	3	3
		Jumlah pelatihan setir mobil yang dilaksanakan	kali	1	1	1
97	Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan tata boga yang diselenggarakan	kali	1	1	1
98	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan barat (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	forum	1	1	0
	a. Kegiatan bersumber dari dana DAU tambahan kelurahan yang dilaksanakan di Kelurahan Pringrejo ada 13 kegiatan dan salah satunya kegiatan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan Barat					

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
	dengan output jumlah lokasi jalan yang diaspal ada 1 lokasi					
	b. kegiatan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan barat dengan output jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan ada 1 kali.					
						
	Pengaspalan Jalan	Sosialisasi tanggap bencana				

Sumber: Kecamatan Pekalongan Barat, 2020

23. Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Di Wilayah Timur

Program ini dilaksanakan dalam 97 (Sembilan puluh tujuh) kegiatan, total anggaran program ini sebesar Rp. 3.326.367.000,- dan realisasinya sebesar Rp. 3.236.819.817,- (*unaudited*) dengan indikator output sebanyak 143 indikator.

Indikator kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.343 dan realisasi anggaran disajikan terpisah dalam Lampiran II Persandingan Target dan Capaian Indikator Kinerja dan Keuangan Antara Perubahan RKPD-APBD Perubahan dan Realisasi (s.d 31 Desember 2019).

Tabel 3.343 Target dan Capaian Kinerja Output pada Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan, Pembangunan Dan Pembinaan Kemasyarakatan Di Wilayah Timur

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
Kecamatan Pekalongan Timur						
1	Pengendalian keamanan dan kenyamanan wilayah Pekalongan timur	Jumlah Patroli Trantib	kali	48	48	48
2	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Kegiatan catur pilar	Kegiatan	2	2	2
3	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan	Kegiatan	0	0	0
		Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan yang dilaksanakan	Kegiatan	54	54	54
4	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan	Jumlah dokumen musrenbang kecamatan	dokumen	1	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
	kebijakan layanan publik					
5	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Jumlah pengguna perpustakaan/pemustaka di taman baca di Kecamatan	orang	120	120	120
6	Pembinaan Administrasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dibina	kelurahan	7	7	7

a. Kegiatan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan Publik berupa Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan Pekalongan Timur dalam rangka menjangkau usulan prioritas program kegiatan dari masyarakat, dengan alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp. 25.000.00



Kelurahan Kauman

7	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi	orang	126	126	126
8	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan	Kegiatan	0	0	0
		Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan yang dilaksanakan	Kegiatan	2	2	2
9	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah dokumen perencanaan kelurahan (Musrenbangkel)	dokumen	1	1	1
10	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong	Kegiatan	1	1	1
11	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Kegiatan	1	1	1
12	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Jumlah pengguna perpustakaan/pemustaka di taman baca kelurahan	orang	30	30	30

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
13	Fasilitasi telecenter	Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan	telecenter	0	0	0
		Jumlah telecenter yang difasilitasi web hosting oleh kelurahan	telecenter	14	14	14
		Jumlah telecenter yang difasilitasi akses internet oleh kelurahan	telecenter	18	18	18
14	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi jalan yang dicor	lokasi	1	1	1
		Jumlah lokasi jalan yang dipaving	lokasi	1	1	1
15	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah MCK umum yang direhab	unit	2	2	2
		Jumlah pengadaan sarpras Posbindu	paket	1	1	1
		Jumlah pengadaan tiang timbangan Posyandu	buah	18	18	18
16	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah pengadaan alat permainan edukatif (APE)	paket	1	1	1
		Jumlah gedung PAUD yang dibangun	unit	1	1	1
17	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan komputer yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi GN AKSA yang diselenggarakan	kali	2	2	2
18	Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan Penguatan Kapasitas RT RW yang diselenggarakan	kali	2	2	2
19	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	forum	1	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
		 				
Perbaikan Jalan Paving Kegiatan Perbaikan MCK Umum Lokasi: RT. 07 RW. 10 Lokasi : RT. 02 RW. 07						
Kelurahan Poncol						
20	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi	orang/bulan	936	936	936
21	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan	kali/kegiatan	1	1	1
22	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah dokumen perencanaan Kelurahan (dokumen musrenbang)	dokumen	1	1	1
23	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kegiatan kerja bakti pada BBGRM Kelurahan	Kegiatan	0	0	0
		Jumlah kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan pada BBGRM Kelurahan	Kegiatan	6	6	6
24	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Jumlah bulan terfasilitasinya forum kelurahan siaga sehat	bulan	12	12	12
25	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Jumlah pengguna perpustakaan/pemustaka di taman baca	org/tahun	120	120	120
26	Fasilitasi telecenter	Jumlah telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan	telecenter	6	6	6
27	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah	Jumlah lokasi saluran air yang dibangun	lokasi	1	1	1
		Jumlah lokasi pembangunan plat deker	lokasi	0	0	0

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
	Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi saluran air yang diperbaiki	lokasi	1	1	1
		Jumlah pengadaan mesin potong rumput	unit	2	2	4
		Jumlah pengadaan tempat sampah	unit	0	0	0
		Jumlah Gerobak Sampah yang diadakan	unit	6		6
		Jumlah lokasi pengerukan sungai	lokasi	1	1	1
		Jumlah tempat sampah yang diadakan	Unit	-	6	0
28	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah jembatan yang dipondasi	jembatan	1	1	1
		Jumlah lokasi jalan yang diaspal	lokasi	1	1	1
29	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan komputer yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah kegiatan Sosialisasi GN-AKSA yang diselenggarakan	kali	2	2	0
		Jumlah kegiatan Sosialisasi Anti radikalisme yang diselenggarakan	kali	2	2	1
30	Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas RT/RW yang diselenggarakan	kali	3	3	1
31	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	forum	1	1	1

Keterangan :

- a. Untuk Kelurahan Poncol ada beberapa indikator yang mengalami perubahan, dikarenakan adanya dinamika masyarakat dalam pelaksanaannya di lapangan, akan tetapi masih dalam batas kewajaran dan dapat diterima dan dilaksanakan, selanjutnya untuk kegiatan pengadaan mesin potong rumput justru dapat melebihi dari target awal yaitu 4 unit dari target semula 2 unit
- b. Untuk indikator Jumlah kegiatan Sosialisasi GN-AKSA yang diselenggarakan, tidak tercapai, karena sebenarnya telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 1 kali dengan waktu selama 2 hari
- c. Untuk indikator jumlah kegiatan Sosialisasi Anti radikalisme yang diselenggarakan, tidak tercapai, karena sebenarnya telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 1 kali kegiatan dengan waktu

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
<p>pelaksanaan selama 2 hari</p> <p>d. Untuk indikator jumlah kegiatan peningkatan kapasitas RT/RW yang diselenggarakan tidak tercapai, dikarenakan kegiatan peningkatan kapasitas RT/RW tersebut telah dilaksanakan selama sekali dalam waktu selama 3 hari.</p>						
			<p>Pengerukan Saluran MD Balong Barat</p>			
Kelurahan Klego						
32	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah Ketua RT / RW kali bulan yang difasilitasi	orang/bulan	744	744	744
33	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan yang dilaksanakan	Kegiatan	3	3	3
		Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di Kelurahan	Kegiatan	0		0
34	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah dokumen Musrenbangkel	dokumen	1	1	1
35	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan pada bulan bakti gotong royong	Kegiatan	1	1	1
36	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Jumlah kegiatan fasilitasi forum Kelurahan Siaga Sehat	Kegiatan	1	1	1
37	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Jumlah pengguna perpustakaan(Pemustaka) di taman baca kelurahan	orang	120	120	120
38	Fasilitasi telecenter	Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh kelurahan	Telecenter	10	10	3
39	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan	Jumlah pengadaan alat penyedot air alkon	unit	5	5	5

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
	pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah pengadaan kendaraan pengangkut sampah	unit	1	1	1
		Jumlah lokasi pembangunan plat deker	lokasi	1	1	1
		Jumlah lokasi saluran yang dibangun	lokasi	3	3	3
40	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah MCK umum yang diperbaiki	unit	4	4	4
41	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah sosialisasi penanganan sampah yang diselenggarakan	kali	1	1	1
42	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan setir mobil yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah kegiatan sosialisasi GN AKSA yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah kegiatan sosialisasi kenakalan remaja yang diselenggarakan	kali	1	1	1
43	Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan tata rias yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah pelatihan menjahit yang diselenggarakan	kali	1	1	1
44	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	forum	1	1	1
		Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan	kali	1	1	1
a. Kegiatan Fasilitasi Telecenter di Kelurahan Klego tidak tercapai indikator output nya, dari target 10 telecenter yang harus difasilitasi, namun realisasinya hanya 3 telecenter saja, karena 7 telecenter lainnya dalam kondisi tidak aktif.						

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
						
Pembuatan Saluran MD 50 dan Plat Deker, RW. 05						
Kelurahan Gamer						
45	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah ketua RT/RW dikali bulan yang difasilitasi	orang/ bulan	468	468	498
46	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di kelurahan	kali/ kegiatan	1	1	1
47	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah Dokumen Perencanaan Kelurahan (Dokumen Musrenbang)	dokumen	1	1	1
48	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Kegiatan Kerja Bakti yang dilaksanakan	Kegiatan	-	6	6
		Jumlah kegiatan kerja bakti pada bulan bakti gotong royong	kali/ kegiatan	1	0	0
49	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Jumlah kegiatan fasilitasi FKSS Kelurahan	kali/ kegiatan	1	1	1
50	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Jumlah pengguna Perpustakaan /Pemustaka di Taman Baca	orang/ tahun	120	120	120
51	Fasilitasi telecenter	Jumlah Telecenter yang difasilitasi oleh Kelurahan	telecenter	6	6	6
52	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)		0			1
53	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan	Jumlah lokasi jalan yang diaspal	lokasi	1	1	1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
	prasarana transportasi wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)					
54	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan komputer yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah pelatihan setir mobil yang diselenggarakan	kali	1	1	1
55	Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan menjahit yang diselenggarakan	kali	1	1	1
56	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	forum	1	1	0
		Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan	kali	1	1	1
<p>a. Kegiatan Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, terdapat perubahan target indikator yang semula hanya 1 kali kegiatan kerja bakti dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000, namun karena dalam perubahan anggaran mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000 akhirnya kegiatan kerja bakti yang dilaksanakan sebanyak 6 kali kegiatan.</p> <p>b. Untuk kegiatan Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan Timur (Dana kelurahan) untuk target pelaksanaan kegiatannya tercapai, namun pada target indikator pembentuk forum siap siaga bencana tidak tercapai, karena memang forum belum berhasil terbentuk karena waktu yang tidak mencukupi sehingga belum terjadi kesepakatan kepengurusan forum.</p>						
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div> <p style="text-align: center;">Pengaspalan Jalan Lokasi : RT. 1, 2, 3 RW. 08</p>						
Kelurahan Noyontaansari						
57	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Jumlah RT/RW yang difasilitasi	bulan	12	12	0

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
58	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah bulan dalam kegiatan jalan sehat di Kelurahan Noyontaansari	bulan	12	12	0
59	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Jumlah bulan kegiatan musrenbangkel guna perumusan program-program dan kegiatan SKPD	bulan	12	12	0
		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	dokumen	1	1	1
		Jumlah dokumen musrenbangkel dan kecamatan	dokumen	31	31	1
		Kesesuaian program prioritas dengan isu strategis dan analisis permasalahan	persen	100	100	0
60	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan	1	1	1
61	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Jumlah kegiatan Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Kegiatan	2	2	2
62	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Jumlah peminjam perpustakaan/pemustaka di taman baca kelurahan	orang	120	120	120
63	Fasilitasi telecenter	Jumlah bulan pembayaran web hosting dan sewa bandwidth di kelurahan	bulan	12	12	12
64	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah tempat sampah yang diadakan	unit	39	39	39
		Jumlah gerobak sampah yang diadakan	unit	6	6	6
65	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi jalan yang diaspal	lokasi	4	4	3
66	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan wilayah Pekalongan timur	Jumlah MCK umum yang diperbaiki	unit	1	1	0

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
	(Dana Kelurahan)					
67	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Sarana dan prasarana PAUD	unit	100	100	1
68	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan Sosialisasi PHBS yang diselenggarakan	kali	1	1	1
69	Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan hantaran yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah pelatihan menjahit yang diselenggarakan	kali	1	1	1
70	Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan Peningkatan Kapasitas LKK yang diselenggarakan	kali	1	1	1
71	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	forum	1	1	0
		Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan	kali	1	1	1
<p>a. Untuk indikator output jumlah ketua RT/RW yang difasilitasi tidak tercapai karena satuan indikator yang seharusnya jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi sebanyak 888 orang/bulan.</p> <p>b. Untuk indikator Jumlah bulan dalam kegiatan jalan sehat di Kelurahan Noyontaansari, tidak tercapai karena indikator seharusnya adalah Jumlah kegiatan fasilitasi kemasyarakatan yang difasilitasi, dengan satuan kegiatan, telah dilaksanakan 1 kegiatan fasilitasi kegiatan kemasyarakatan berupa jalan sehat.</p> <p>c. Untuk indikator output Jumlah bulan kegiatan musrenbangkel guna perumusan program-program dan kegiatan SKPD tidak tercapai, karena indikator seharusnya Jumlah dokumen Musrenbangkel yang disusun, dengan satuan dokumen</p> <p>d. Untuk indikator Jumlah bulan pembayaran web hosting dan sewa bandwidth di kelurahan dengan satuan bulan, tidak tercapai, karena indikator yang seharusnya, Jumlah telecenter yang difasilitasi sebanyak 6 telecenter</p> <p>e. Untuk kegiatan pengaspalan jalan target semula 4 lokasi tapi realisasinya 3 lokasi, bukan karena tidak tercapai target outputnya tetapi adanya perubahan target disesuaikan dengan anggaran.</p> <p>f. Untuk kegiatan perbaikan MCK umum tidak ada alokasi anggarannya sehingga target output tidak tercapai</p> <p>g. Untuk kegiatan perbaikan sarana dan prasarana PAUD target indikator sebesar 100 unit hanya tidak tercapai, karena target seharusnya adalah 1 unit PAUD.</p> <p>h. Untuk kegiatan pembentukan forum pengurangan resiko bencana target indikator tidak tercapai karena waktu pembentukan yang tidak mencukupi sehingga tidak terjadi kesepakatan dalam</p>						

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
pembentukan forum						
						
Pengaspalan Jalan Lokasi : Landungsari Gang 1						
Kelurahan Setono						
72	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	Terpenuhinya honorarium ketua rt/rw sebanyak 92	bulan	12	12	1.104
73	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	Terselenggaranya kegiatan jalan senam massal kel.setono	bulan	12	12	1 kegiatan
74	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	Terselenggaranya kegiatan Musrengbangkel	bulan	12	12	1 dokumen
75	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Terpenuhinya 1 kegiatan bulan bakti gotong royong	bulan	12	12	1 kegiatan
76	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Fasilitasi kegiatan FKSS	bulan	12	12	1 kegiatan
77	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	Terfasilitasinya penambahan buku bacaan sebanyak 30	bulan	12	12	120 orang
78	Fasilitasi telecenter	Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bendwith	bulan	12	12	9 telecenter
79	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan timur (Dana	Jumlah pengadaan tempat sampah	unit	300	300	300

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
	Kelurahan)					
80	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi jalan yang diaspal	lokasi	4	4	4
81	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah senam yang diselenggarakan	kali	27	27	27
		Jumlah kegiatan sosialisasi KB dan imunisasi	kali	1	1	1
82	Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah kegiatan sosialisasi kesusilaan dan Krakter Building yang diselenggarakan	kali	2	2	1
83	Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah pelatihan tata boga yang diselenggarakan	kali	1	1	1
84	Pengelolaan kegiatan lembaga kemasyarakatan wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan administrasi RT/RW yang diselenggarakan	kali	1	1	1
85	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	forum	1	1	1
		Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan	kali	2	2	1

- Untuk indikator Terpenuhinya honorarium ketua rt/rw sebanyak 92 tidak tercapai, karena indikator yang seharusnya adalah jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi sebanyak 1.104 orang.
- Untuk indikator Terselenggaranya kegiatan jalan senam massal kel.setono dengan satuan bulan, tidak tercapai karena indikator seharusnya adalah Jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan, dengan satuan indikator kegiatan, dengan target 1 kegiatan
- Untuk indikator Terselenggaranya kegiatan Musrenbangkel dengan satuan bulan dengan target 12 bulan, tidak tercapai, karena indikator seharusnya adalah Jumlah dokumen musrenbangkel yang disusun, dengan satuan 1 dokumen.
- Untuk indikator output terpenuhinya 1 kegiatan bulan bakti gotong royong dengan satuan bulan dan target 12, tidak tercapai karena indikator seharusnya adalah jumlah kegiatan gotong royong yang difasilitasi dengan satuan target 1 kegiatan
- Untuk indikator Fasilitasi kegiatan FKSS dengan satuan bulan dan target 12, tidak tercapai, karena indikator yang seharusnya adalah jumlah fasilitasi kelurahan siaga sehat, dengan satuan target 1

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
	kegiatan					
f.	Untuk indikator Terfasilitasinya penambahan buku bacaan sebanyak 30, dengan target satuan 12 bulan, tidak tercapai, dikarenakan indikator yang seharusnya adalah jumlah pengunjung/pemustaka taman baca dengan target 120 orang					
g.	Untuk indikator Terfasilitasinya pembayaran web hosting dan sewa bendwith dengan target satuan 12 bulan, tidak tercapai, karena indikator yang seharusnya adalah jumlah telecenter yang difasilitasi, sebanyak 9 telecenter					
h.	Untuk indikator Jumlah kegiatan sosialisasi kesusilaan dan Karakter Building yang diselenggarakan dengan satuan 2 kali, tidak tercapai dikarenakan target seharusnya 1 kali, walaupun dilaksanakan selama 2 hari.					
i.	Untuk indikator jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan dengan target 2 kali tidak tercapai, karena target seharusnya 1 kali, meskipun dilaksanakan selama 2 hari					



Perbaikan Jalan Aspal Kali Kampung

Kelurahan Kali Baros

86	Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan	jumlah ketua RT/RW kali bulan yang difasilitasi	org/bulan	540	540	540
87	Fasilitasi Kegiatan Kemasyarakatan	jumlah fasilitasi kegiatan kemasyarakatan di kelurahan	Kegiatan	1	1	1
88	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik	jumlah dokumen perencanaan kelurahan (musrenbangkel)	dokumen	1	1	1
89	Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	jumlah kegiatan kerja bhakti yang dilaksanakan pada BBGRM kelurahan	Kegiatan	1	1	1
90	Fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	jumlah kegiatan fasilitasi forum kelurahan siaga sehat	Kegiatan	1	1	1
91	Fasilitasi penyelenggaraan taman baca	jumlah pengguna perpustakaan di taman baca kelurahan	orang	120	120	120

No	Kegiatan	Indikator Output	Target 2019			Capaian 2019
			satuan	RKPD	APBD	
92	Fasilitasi telecenter	jumlah telecenter yang di fasilitasi	telecenter	7	7	7
93	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah pengadaan APAR	unit	2	2	2
		Jumlah pengadaan tempat sampah	unit	90	90	900
		Jumlah lokasi saluran air yang diperbaiki	lokasi	2	2	2
94	Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah lokasi jalan yang diaspal	lokasi	3	3	1
		Jumlah jembatan yang dibangun	jembatan	2	2	2
95	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah senam yang diselenggarakan	kali	30	30	30
96	Pengelolaan kegiatan pengembangan UMKM wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah pelatihan menjahit yang diselenggarakan	kali	1	1	1
		Jumlah pelatihan tata boga yang diselenggarakan	kali	1	1	1
97	Penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa lainnya wilayah Pekalongan timur (Dana Kelurahan)	Jumlah forum pengurangan resiko bencana yang dibentuk	forum	1	1	1
		Jumlah kegiatan sosialisasi pengurangan resiko bencana yang diselenggarakan	kali	1	1	1
a. Untuk Kegiatan Dana Kelurahan berupa Pengaspalan Jalan, target semula 3 lokasi namun realisasinya hanya 1 lokasi, bukan karena target tidak tercapai, karena adanya perubahan target dengan menyesuaikan jumlah anggaran.						
						
Pembuatan Jembatan Tembus -- Pembuatan Jembatan Kecil						

Sumber: Kecamatan Pekalongan Timur. 2020

Permasalahan, Solusi dan Peluang

1. Permasalahan

a) Fungsi Pelayanan Legislasi

- Karena adanya pemilihan legislatif yang dilaksanakan pada bulan April 2019, baik pra atau pasca pemilihan, sangat berpengaruh pada kegiatan-kegiatan DPRD.

b) Fungsi Pelayanan Bidang Hukum

- Masih banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk ke bagian hukum dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pelanggaran hukum
- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pelanggaran hukum
- Ketepatan jenis produk hukum daerah yang dibentuk sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi atau setingkat
- Perencanaan, penyusunan dan materi produk hukum daerah yang belum sesuai dengan kebutuhan
- Produk hukum yang sudah ditetapkan belum diketahui secara luas oleh ASN dan masyarakat
- Produk hukum bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi manakala peraturan yang mendasari mengalami perubahan sehingga belum memenuhi aspek legalitas
- Kurangnya sarana dan prasarana untuk pemenuhan HAM
- Masih banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat
- Belum Optimalnya pengelolaan JDIIH di Kota Pekalongan

c) Fungsi Pelayanan Bidang Ekonomi

- Target Perumda Tirtayasa tidak tercapai karena terdapat beberapa force mayor (dampak pembangunan infrastruktur di Kota Pekalongan dan biaya investasi jaringan yang belum teranggarkan).
- Tarif belum ada peningkatan sedangkan biaya pajak dan listrik cukup besar.

d) Fungsi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

- Perencanaan penganggaran dalam proses pengadaan barang/jasa kurang matang;
- Persiapan waktu pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa tidak terencanakan dengan baik.
- Peraturan-peraturan yang menjadi pedoman/dasar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa baru diterbitkan dan kebijakan penggunaan aplikasi SPSE juga baru disosialisasikan.
- Pengetahuan dan pengalaman yang kurang dalam menyesuaikan dengan regulasi dan sistem yang terbaru terkait proses pengadaan barang/jasa

e) Fungsi Pelayanan Bidang Kesejahteraan Rakyat

Permasalahan paling dominan dalam program peningkatan kapasitas lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan adalah minimnya kuota anggaran fasilitasi bantuan transport untuk tenaga pengajar TPQ & MADIN. Dari tahun ke tahun, berdasarkan kegiatan pendataan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat, jumlah lembaga TPQ dan MADIN yang ada di Kota Pekalongan semakin bertumbuh; demikian juga jumlah santri yang mengenyam

pendidikan keagamaan di lembaga tersebut, yang tentunya berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah tenaga pengajar yang dibutuhkan.

f) Fungsi Pelayanan Bidang Umum

- Mobilitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta keluarga yang tinggi sehingga tidak sempat melaksanakan medical general check up.
- Beberapa penyakit yang memerlukan perawatan medis tertentu telah ditanggung oleh BPJS sehingga anggaran tidak terealisasi.
- Tidak ada petugas khusus untuk konsultasi secara berkala dengan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta keluarga mengenai keluhan kesehatan yang dialami.

g) Fungsi Pelayanan Bidang Pengawasan

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2019 dalam rangka pencapaian target kinerja dan anggaran beberapa kegiatan dalam mewujudkan pencapaian target kinerja, sebagai berikut :

- Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam mewujudkan Sasaran dengan indiktaor kinerja Level kapabilitas APIP memerlukan dukungan personil dan anggaran untuk peningkatan keterampilan auditor yang ada saat ini berupa auditor dengan keterampilan teknis khusus seperti teknik sipil, arsitektur dan akuntansi, serta sarana prasarana yang tersedia dikaitkan dengan tugas pengawasan yang begitu kompleks terutama untuk pengawasan bidang keuangan.
- Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan PD belum optimal. Pelaksanaan Pengawasan Internal (Waskat) oleh para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah belum sepenuhnya melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi secara berkala dan terdokumentasi, karena masih ada yang menganggap bahwa tugas melakukan pengawasan merupakan tugas dan urusan aparat pengawas fungsional.
- OPD yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada enam area perubahan yang ditetapkan dengan Predikat WBK karena Hasil survey persepsi korupsinya masih dibawah standar.
- Masih adanya tunggakan-tunggakan temuan hasil pemeriksaan dan jumlah tuntutan ganti rugi yang tindak lanjutnya tidak dapat dituntaskan/sulit untuk diselesaikan karena temuan uang dibayar secara angsur, menyangkut pihak ketiga, kesulitan menghubungi yang bersangkutan dan/ sudah meninggal.

h) Fungsi Pelayanan Pemerintahan

- Kurang Antusiasnya peserta Sarasehan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan)
- Kendala Kegiatan Fasilitasi Kerjasama daerah adalah ego daerah dimana semangat otonomi daerah masih dipandang sempit dan kedaerahan.
- Bagian Pemerintahan selaku Tim Kerjasama Daerah (TKSD) seringkali tidak dilibatkan dalam pembahasan pelaksanaan kerjasama baik antar daerah maupun dengan pihak swasta.
- Koordinasi bidang pemerintahan yang dihadapi adalah menyatukannya persepsi dalam mewujudkan good goverment dan clean goverment agar sinergitas antar pimpinan dan lembaga yang ada di Kota Pekalongan bisa saling menciptakan iklim yang kondusif.

- Pembinaan Administrasi Kelurahan kendala yang dihadapi dan yang terjadi di lapangan adalah minimnya jumlah sumberdaya manusia yang ada di Kelurahan sehingga beban kerja yang timbul dari hal tersebut tidak maksimalnya pelayanan umum pada masyarakat.
- Pelaksanaan pengadministrasian baik untuk pelayanan ataupun permintaan data seringkali terjadi keterlambatan dikarenakannya hanya bertumpu pada satu atau dua orang saja di Kantor Kelurahan.
- Minimnya tingkat pendidikan yang menjadikan pemahaman dalam penyelesaian permasalahan ataupun mengejawantahkan suatu kebijakan kadang kala sering mendapatkan kritikan dari masyarakat.
- Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi dengan memperhatikan Perpres Nomor 112 Tahun 2006 beserta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 telah cukup jelas diatur bagaimana seharusnya proses penamaan unsur rupabumi, bagaimana prinsip dan kaidah yang harus dilakukan. Namun, pada kenyataannya masih banyak dijumpai pemberian nama yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Sebagai contoh, dalam penggunaan nama rupabumi yang menggunakan bahasa asing, khususnya dalam penamaan perumahan yang diberikan oleh pengembang perumahan.
- Dalam Koordinasi pengadaan tanah ada pemasalahan yang mendasar yaitu : Sengketa Tanah, Konflik Tanah, dan Perkara Tanah.
- Pemasangan Patok Batas Wilayah mengalami permasalahan diantaranya : penolakan dari warga yang wilayahnya akan dipasang patok penanda batas wilayah, belum adanya kata sepakat di tingkatan pemerintahan kabupaten dengan adanya pengurangan luas area di wilayah kabupaten Pekalongan padahal di tingkat desa tidak ada permasalahan, kurangnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan pemasangan patok batas wilayah.

i) Fungsi Pelayanan Kewilayahan

- Kurangnya minat baca warga masyarakat di taman baca kecamatan. Hal ini disebabkan koleksi buku yang ada kurang beragam dan relatif sudah lama, sehingga masyarakat kurang minat berkunjung ke pojok baca kelurahan
- Kurang adanya anggaran untuk fasilitasi forum anak yang dapat mendorong terciptanya iklim yang kondusif tidak dapat terselenggara, serta menyebabkan forum anak kesulitan dalam menyalurkan dan mengembangkan bakat dan minat untuk berprestai maupun berapresiasi
- Perlunya perbaikan unit komputer di telecenter kelurahan serta pengaktifan kembali telecenter-telecenter di kelurahan sehingga bisa dimanfaatkan kembali oleh warga.
- Kegiatan Dana Kelurahan ada kegiatan yang lokasi kegiatannya sudah direncanakan dengan dana kelurahan namun pada saat akan pelaksanaan pekerjaan ternyata lokasi tersebut dilaksanakan dengan dana pokir.
- Juklak dan Juknis dana kelurahan tidak jelas dalam pelaksanaannya sehingga perlu waktu yang banyak untuk menyelesaikan satu pekerjaan.
- Proses Regulasi dan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dengan dana kelurahan masih belum tersistem dengan baik.

2. Solusi

a) Fungsi Pelayanan Legislasi

- Pada tahun mendatang akan dikukan upaya agar program yang ditetapkan dalam Rencana Kerja DPRD dapat diaplikasikan ke dalam agenda Badan Musyawarah, sehingga akan meminimalisir ketidaktercapaian target

b) Fungsi Pelayanan Bidang Hukum

- Optimalisasi penanganan pengaduan masyarakat
- Optimalisasi pemberian bantuan hukum masyarakat miskin di Kota Pekalongan
- Optimalisasi pelayanan advokasi dan Bantuan hukum di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
- Optimalisasi Pelaksanaan Produk Hukum Daerah
- Optimalkan pelaksanaan Sosialisasi di Bidang Cukai kepada Masyarakat
- Optimalisasi Website JDIH Kota Pekalongan

c) Fungsi Pelayanan Bidang Ekonomi

- Peningkatan kualitas manajemen dan teknis pada Perumda Tirtayasa Kota Pekalongan.

d) Fungsi Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa

- Perencanaan pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan sebelum tahun pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan melakukan analisa – analisa kebutuhan agar pelaksanaan bisa berjalan sesuai target dan melibatkan pihak – pihak yang terkait.
- Melakukan analisa waktu sebagai upaya untuk percepatan proses pengadaan barang/jasa, agar terlaksana dengan baik, tepat waktu dan tepat guna.
- Peningkatan kompetensi ASN pada bidang pengadaan barang/jasa dengan mengirimkan personil untuk mengikuti bimbingan teknis/pendidikan dan pelatihan pengadaan barang/jasa.
- Peningkatan akses biznet dari 60 mbps menjadi 140 mbps, sehingga dapat meningkatkan kecepatan layanan internet sistem server LPSE.

e) Fungsi Pelayanan Bidang Kesejahteraan Rakyat

- Perbaikan perencanaan penganggaran program peningkatan kapasitas lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan dengan mempertimbangkan kondisi data riil terkait jumlah pengajar.

f) Fungsi Pelayanan Bidang Umum

- Melakukan konsultasi dengan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah beserta keluarga untuk waktu dan tempat pelaksanaan medical general check up
- Membuat jadwal pelaksanaan medical general check up dan melakukan pemeriksaan secara berkala
- Mengingat waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan medical general check up beberapa waktu sebelum pelaksanaan

g) Fungsi Pelayanan Bidang Pengawasan

- Pengawasan intern dengan melakukan kegiatan evaluasi terpisah atas penyelenggaraan SPIP di SKPD, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektifitas sistem pengendalian intern.
- Perlu ada pemahaman dan pembudayaan bahwa pimpinan satuan kerja perangkat daerah mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan Pengawasan Melekat (Waskat). Waskat harus lebih diutamakan sedangkan pengawasan eksternal menjadi penunjang waskat, serta dengan memberikan dukungan anggaran yang dialokasi pada setiap OPD guna tersusunnya Rencana Tindak Perbaikan (RTP) atas penilaian risiko yang dilakukan.
- Perlu strategi dengan menerapkan manajemen kinerja berupa Budaya Kerja, Efektifitas Kinerja, Efisiensi Anggaran, Sumber Daya Manusia, Tatalaksana, dan Organisasi.
- Perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas, serta memperbaiki kualitas hasil survey dengan meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik.
- Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan perlu lebih diintensifkan melalui monitoring penyelesaian temuan secara berkala dan berkesinambungan ke entitas pemeriksaan (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Bersamaan dengan itu OPD juga supaya lebih responsif terhadap temuan-temuan hasil pemeriksaan aparat pemeriksa internal maupun eksternal.
- Secara bertahap perlu penyediaan sarana prasarana dan sumber daya aparatur yang memadai dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang sudah ada sekarang melalui diklat dan sebagainya.

h) Fungsi Pelayanan Pemerintahan

- Walikota atau Sekda lebih memberikan penekanan pada Kepala OPD untuk rutin mengikuti sepeda K3 yang telah terjadwal.
- Sosialisasi Lurah tentang kegiatan sarasehan K3 secara lebih luas.
- Dukungan dari semua stekholder dalam menyampaikan data kerjasama yang telah dilakukan dengan pihak lain kepada Bagian Pemerintahan agar dapat dilihat efektifitas atau tidaknya kerjasama tersebut.
- Walikota dalam hal ini selaku Kepala Daerah agar menekankan pentingnya berinovasi dengan lebih intens melakukan kerjasama antar daerah ataupun dengan pihak swasta.
- Lebih mengintensifkan sarana komunikasi pimpinan daerah dengan menambah kegiatan-kegiatan yang bersifat pemberdayaan potensi sumber daya manusia.
- Perlu ditingkatkan penguatan sumber daya manusia pada Kelurahan lewat bintek dan pelatihan-pelatihan yang kontinyu agar lebih berkualitas dalam melaksanakan pelayanan publik.
- Pemberian nama unsur rupabumi perlu disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat secara sistematis agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan.
- Pemberian nama rupabumi menggunakan nama asing agak sulit dibendung dan masyarakat pun menganggap pemberian nama asing tersebut masih bisa diterima. Untuk mengatasi pemberian nama rupabumi menggunakan bahasa asing, barangkali perlu dicarikan jalan tengah yaitu nama rupabumi yang berbahasa asing tersebut sebaiknya ditulis dalam bunyi aksen Indonesia.

- Dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penamaan unsur rupabumi perlu ada sanksi, baik sanksi administratif, sanksi denda atau sanksi pidana. Pemberian sanksi ini bertujuan agar tercipta tertib administrasi dalam penamaan unsur rupa bumi.
- Mengingat peranan tanah dalam kehidupan masyarakat sangat strategis, perumusan dan pelaksanaan program *land reform* membutuhkan pendekatan multi disiplin dan lintas sektor, serta persiapan sangat matang dan seksama dengan mempertimbangkan berbagai implikasinya yang sangat luas. Sejumlah agenda penting harus dibenahi terlebih dahulu antara lain: sistem administrasi pertanahan, pengembangan konsep untuk deliniasi wilayah program *land reform*, perumusan konsep dan penentuan tolok ukur untuk identifikasi calon penerima tanah *land reform* maupun yang tanahnya akan didistribusikan, serta dasar perhitungan dalam penentuan kompensasi maupun pembiayaan *land reform* yang harus ditanggung oleh pemerintah maupun calon penerima tanah.
- Lebih mengintensifkan komunikasi dengan daerah perbatasan dalam hal ini Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.

i) Fungsi Pelayanan Kewilayahan

- Perlunya inovasi-inovasi dalam mengenalkan taman baca kecamatan serta menambah koleksi buku bacaan.
- Perbaikan dan pemeliharaan komputer telecenter serta pengaktifan kembali telecenter yang mangkrak.
- Diadakan perbaikan dan kontrol yang lebih intensif sehingga jika ada kerusakan-kerusakan kecil bisa segera teratasi dan diperbaiki agar tidak sampai rusak total/rusak berat sehingga bisa dimanfaatkan bersama warga sekitar.
- Meningkatkan koordinasi dan mencari informasi yang akurat dengan instansi-instansi terkait agar tidak terjadi tumpang tindih.
- Peningkatan kualitas manajemen dan mekanisme pertanggungjawaban kegiatan yang bersumber pada dana kelurahan.

3. Peluang

a) Fungsi Pelayanan Bidang Hukum

- Mengoptimalkan Website JDIH dengan penyempurnaan Website JDIH
- Meningkatkan pelayanan publik, dalam rangka menyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi
- Mengoptimalkan pemahaman dan pelaksanaan produk hukum daerah pada aparaturnya pemerintah dan masyarakat
- Melakukan pengkajian agar produk hukum daerah yang terbentuk sesuai kebutuhan

b) Fungsi Pelayanan Bidang Ekonomi

- Pengkajian ekonomi terkait peningkatan kualitas manajemen dan teknis di Perumda Tirtayasa Pekalongan.

c) Fungsi Pelayanan Bidang Kesejahteraan Rakyat

- Bertumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan keagamaan non formal di kalangan masyarakat sudah semestinya dipandang sebagai upaya strategis dalam meningkatkan

pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama, dari generasi ke generasi, sebagai modal dan pegangan hidup masyarakat Kota Pekalongan.

d) Fungsi Pelayanan Bidang Umum

- Koordinasi dengan RSUD untuk pelaksanaan kegiatan *medical general check up* serta memberikan penjelasan secara rinci mengenai pemeriksaan apa saja yang diperlukan, persiapan, durasi pelaksanaan serta waktu yang tepat untuk melakukan *medical general check up*.

e) Fungsi Pelayanan Bidang Pengawasan

- Perkembangan sistem teknologi dan informasi yang semakin canggih sehingga dapat mengoptimalkan tugas pengawasan. Tersedianya sarana, prasarana, dana yang memadai, dan peluang pengembangan layanan berbasis teknologi informasi.
- Munculnya mandat penguatan peran Inspektorat, dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu penguatan peran tersebut telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 3 ayat (1) huruf e dan f berbunyi koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.
- Telah dilakukan reviu terhadap Rencana Strategis dan melaksanakan tindak lanjut hasil reviu dengan penetapan indikator tujuan dan sasaran, perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama, menyelaraskan program dan kegiatan dengan tujuan dan sasaran dalam Renstra maupun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD.
- Tersedianya aplikasi SIMRAL berbasis web yang menunjang kegiatan pengelolaan data kinerja dan kegiatan monitoring / evaluasi dan pelaporan pencapaian target (kinerja) secara berkala.
- Adanya dukungan dan kerjasama yang baik antar APIP dan institusi pengawasan internal dan eksternal (Inspektorat Provinsi, BPKP dan BPK) yang berdampak terhadap peningkatan mutu pengawasan. Peluang-peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara baik guna meningkatkan kualitas layanan Inspektorat antara lain dengan membuat kesepahaman bersama dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap OPD serta dalam bentuk konsultasi-konsultasi teknis auditing dan implementasi peraturan, serta knowledge transfer dalam pelaksanaan kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah OPD dan pelaksanaan audit operasional terhadap BUMD/OPD serta melakukan pemeriksaan bersama (join audit) atas permintaan dan kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan.
- Selain itu, BPKP selaku Pembina Penyelenggaraan SPIP senantiasa memberikan dukungan auditor, bantuan teknis lainnya dan Quality Assurance dalam tahapan pencapaian target peningkatan kapabilitas APIP level 3 dan maturitas penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sampai ke level 3, serta memberi kesempatan bagi aparatur Inspektorat Kota Pekalongan agar dapat meningkatkan kemampuannya melalui pendidikan Jabatan Fungsional Auditor (JFA).

f) Fungsi Pelayanan Bidang Pemerintahan

- Antusiasme Masyarakat cukup tinggi untuk mengikuti lomba yang diselenggarakan oleh Pemkot Pekalongan.
- Kota Pekalongan yang mendeklarasikan sebagai kota jasa bisa lebih berbicara di tingkat nasional maupun internasional agar dapat menjadi ikoniknya Jawa Tengah sehingga pihak-pihak dari luar dapat berinvestasi lebih besar di Kota Pekalongan dalam berbagai sektor.
- Penguatan peran Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dapat dilakukan dalam hal inisiasi, penyusunan sistem/mekanisme insentif, dan diseminasi *best practices* untuk mendorong peningkatan kerjasama antar daerah.
- Selama ini sudah banyak model pengembangan ekonomi kewilayahan yang berbasis pada kerjasama antar daerah. Model-model ini dapat dihidupkan kembali atau bahkan dimodifikasi untuk sektor-sektor lain.

g) Fungsi Pelayanan Bidang Kewilayahan

- Adanya Dana Kelurahan dapat menjadi peluang peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya masyarakat apabila perencanaan dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara baik.

3.2.5. Pendukung Operasional Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan PD terdapat 5 (lima) program yang bersifat pendukung operasional PD dilaksanakan kegiatan

1. Program Administrasi Perkantoran

Target indikator program ini pada Tahun 2018 yaitu persentase pelaksanaan surat-menyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, serta rapat koordinasi dan konsultasi sebesar 100%. Program administrasi perkantoran dan seluruh kegiatan ini terdapat pada setiap Perangkat Daerah total anggaran program ini sebesar Rp.59.493.963.000,- dan realisasinya sebesar Rp.55.418.004.629,-. Namun demikian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang alokasi anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang cukup besar, yakni sebesar Rp15.303.852.000,-. Kegiatan ini merupakan kegiatan penyediaan penerangan jalan umum.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Fokus kegiatan adalah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan, peralatan dan perlengkapan gedung kantor dalam rangka mendukung target indikator Tahun 2018 yaitu persentase pelaksanaan pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, pengadaan dan pemeliharaan peralatan kantor dan rumah tangga sebesar 100%. Total anggaran pada program ini adalah sebesar Rp. 42.700.791.000,- dan realisasi Rp. 38.369.475.837,-. Pada Tahun 2018 terdapat 8 (delapan) urusan yang melaksanakan kegiatan strategis dalam Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, antara lain :

- a. Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yakni pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala gedung /asset daerah lainnya khususnya untuk pemeliharaan dan perawatan perbaikan 3 (tiga) Rusunawa (Panjang Baru, Slamaran, Kuripan Yosorejo)

- b. Urusan Sosial di Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yakni pada Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor yakni Pembangunan Gedung Santun Lansia di Jl HOS Cokroaminoto, yang diperuntukkan bagi 20 orang lansia terlantar.
- c. Urusan Lingkungan Hidup di Dinas Lingkungan Hidup, yakni pada Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor yakni Pembangunan Gedung Kantor, Tempat Parkir, Laboratorium, bangunan tempat jaga.
- d. Fungsi Keuangan di Badan Keuangan Daerah, yakni pada kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 sebanyak 5 (lima)
- e. Fungsi Lain di Sekretariat Daerah yakni pada
 - Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional terlaksana dengan memelihara sejumlah 77 unit kendaraan dinas dan operasional.
 - Kegiatan pembangunan gedung kantor terlaksana dengan terbangunnya 1 (satu) unit kanopi yang terbentang diantara gedung Sekretariat Daerah sebelah barat menghubungkan ke gedung Badan Keuangan Daerah sehingga dapat menunjang kelancaran birokrasi.
 - kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan dilaksanakan pada 3 (tiga) unit lokasi rumah jabatan, yaitu Rumah Jabatan Walikota, Rumah Jabatan Wakil Walikota serta Rumah Jabatan Sekretariat Daerah yang berlokasi di Jalan Bahagia Kota Pekalongan..
 - kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas dilaksanakan pada 2 (dua) unit lokasi rumah jabatan, yaitu Guest House/Wisma Tamu dan Eks Mess DPRD yang berlokasi di Jalan Bahagia Kota Pekalongan.
- f. Fungsi Lain di Sekretariat DPRD yakni pada kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor sekretariat DPRD.
- g. Fungsi lain di 4 (empat) kecamatan di Kota Pekalongan

Kecamatan Pekalongan Utara

1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

a) Pembangunan Gedung Telecenter RW di Kandang Panjang

Pembangunan Gedung Telecenter RW di Kandang Panjang berlokasi di Perumahan Palapa RW VIII Kelurahan Panjang Wetan. Proses Pembangunan Telecenter ini melibatkan Tim KKN dari Fakultas Teknik Sipil Universitas 17 Agustus Semarang dan Swadaya Masyarakat.

b) Pengurugan Halaman MI Sudirman Panjang Wetan

Pengurugan Halaman MI Soedirman Panjang Wetan, yakni kegiatan pengurugan sirtu dan pembuatan saluran air untuk antisipasi datangnya musim hujan sehingga mempermudah proses belajar mengajar dan kegiatan siswa.

2) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

a) Rehabilitasi Aula Kelurahan Panjang Baru

Kegiatan Rehab Aula Kelurahan Panjang Baru untuk Kegiatan Kelurahan Panjang Baru, LKK dan Masyarakat.

b) Rehabilitasi Gedung Kantor Kelurahan Padukuhan Kraton

Kegiatan Rehab Gedung Kelurahan Padukuhan Kraton untuk meningkatkan kinerja aparat Kelurahan Padukuhan Kraton dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kecamatan Pekalongan Selatan

1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor di Kecamatan Pekalongan Selatan melingkupi 4 pekerjaan antara lain :

- a) Pembangunan gedung kantor Kecamatan Pekalongan Selatan
- b) Finishing aula Kelurahan Buaran Kradenan
- c) Pembuatan Taman Kecamatan Pekalongan Selatan
- d) Pembuatan tempat parkir

Kecamatan Pekalongan Timur

1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

- a) Pembangunan Gedung Kelurahan Klego
- b) Pavingisasi halaman kelurahan Kalibaros
- c) DED kantor kecamatan Pekalongan timur
- d) Pengurugan, Peninggian dan Penetrasi Jalan depan kantor kelurahan setono
- e) Pembuatan Pintu Gerbang Kelurahan Kalibaros

2) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas

- a) Rehab rumah dinas camat
- b) Penyusunan DE gedung serba guna Noyontaan Sari

Kecamatan Pekalongan Barat

1) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor

- a) Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor berupa pembangunan Gapuro Tapal Batas Kelurahan Pringrejo di wilayah eks Bumirejo dengan Wilayah Desa Samborejo Kabupaten Pekalongan yang terletak di jalan K.H Ahmad Dahlan Kelurahan Pringrejo
- b) Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas berupa pembangunan Rumah Dinas Lurah Podosugih terletak di Jl. Kurinci (Depan Kantor Lurah Podosugih)



Foto Kegiatan Pengurugan MI Soedirman



Finishing Rehab Gedung Kelurahan Padukuhan Kraton



Gedung Kantor Kecamatan Pekalongan Selatan yang representatif



Tempat Parkir Karyawan dan Tamu yang nyaman Kec. Pekalongan Selatan



Taman Kecamatan Pekalongan Selatan yang asri



Gedung aula Kelurahan Buaran Kradenan



Pekerjaan Pavingisasi Halaman Kantor Kelurahan Kalibaras.



Gapuro Kelurahan Pringrejo



Rumah Dinas Lurah Podosugih



Bangunan Laboratorium DLH



Bangunan Utama Gedung Kantor DLH



Bangunan Tempat Jaga Kantor DLH



Gambar 3.174 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator yang diukur melalui program ini adalah persentase kehadiran aparatur sebesar 80%. Kegiatan yang masuk dalam program ini antara lain penyediaan pakaian dinas dan kelengkapannya, yang menunjukkan kedisiplinan aparatur dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Total anggaran program ini sebesar Rp. 829.800.000,- dan realisasi Rp. 454.265.450,, program ini dilaksanakan di 11 OPD, antara lain: Satpol PP, BPBD, Dinhub, DPMPTSP, Dinarpus, Bagian Umum Setda, Sekretariat DPRD dan di 4 (empat) Kecamatan di Kota Pekalongan.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini berisi 3 (kegiatan) kegiatan Bimbingan Mental Fisik Dan Disiplin Aparatur, Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Skpd dan Fasilitasi Staf Ahli. Anggaran total program ini Rp. 378.070.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 335.785.500,-. Program ini dilaksanakan di 7 OPD, antara lain: BPBD, Dinsos P2KB, Dinperinaker, Dinhub, Bagg Umum Setda, Sekretariat DPRD dan Inspektorat.

5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan dalam program ini salah satunya adalah penyusunan RKA, LAKIP dan laporan-laporan keuangan Perangkat Daerah dalam rangka mendukung target indikator Tahun 2018 yaitu persentase ketersediaan Capaian Laporan Kinerja sebesar 100%. Total anggaran pada program ini adalah Rp. 2.926.120.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.649.369.234,-. Program ini berada seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dengan alokasi anggaran yang ditetapkan sesuai kebutuhan masing-masing.

6. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat (PPPM)

Fokus kegiatan adalah penyediaan jasa tenaga kontrak Perangkat Daerah dalam rangka mendukung target indikator Tahun 2019 yaitu pengaduan yang diterima sebesar 0%. Total anggaran program ini sebesar Rp. 7.995.101.000,- dan realisasi sebesar Rp. 7.685.416.160,-. Program ini berada di 32 OPD(seluruh OPD, tidak termasuk kelurahan).

3.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN 2018

Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan selaku pembahas laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 melalui Surat Keputusan No : 01 / BA / DPRD / IV/ 2019 telah memberikan 9 (Sembilan) rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dalam perencanaan dan penganggaran pada Tahun Anggaran selanjutnya. Atas rekomendasi tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a) *Pendekatan program yang orientasinya penanggulangan kemiskinan untuk disempurnakan, diharapkan tahun berikutnya penurunan angka kemiskinan lebih progresif capaiannya.*

Angka kemiskinan Kota Pekalongan hingga tahun 2019 terus mengalami penurunan hingga mencapai 6,6% dan berada jauh dibawah rata-rata angka kemiskinan Jawa Tengah yang berada pada angka 10,58%, tetapi penurunan angka kemiskinan relatif melambat, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya tingkat keparahan yang tinggi, masih tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Pekalongan, kondisi alam di wilayah Pekalongan bagian utara yang terdampak rob/pasang air laut sejak sekitar sepuluh tahun yang lalu tentu sangat berpengaruh terhadap pengeluaran masyarakat dalam pemenuhan tempat tinggal dan sanitasi yang layak.

Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Pekalongan diantaranya adalah:

- a. Pengurangan beban pengeluaran penduduk miskin melalui program keluarga harapan (bantuan pendidikan, jaminan kesehatan, bantuan sembako, bantuan untuk ibu hamil, anak usia dini, lansia, dan disabilitas berat), santunan kematian, penanganan warga terdampak bencana, rehabilitasi rumah tidak layak huni dan bantuan rumah roboh bagi warga tidak mampu serta perbaikan sanitasi dan ketercukupan air bersih.
 - b. Program peningkatan keterampilan dan perluasan kerja bagi pencari kerja melalui pelatihan keterampilan baik yang dilakukan di Balai Latihan Kerja maupun di perangkat daerah lainnya, serta fasilitasi pemagangan dan bursa kerja (Job Fair) dalam rangka peningkatan pendapatan penduduk miskin.
 - c. Penguatan penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan dari berbagai sektor pembangunan. Disamping itu, dilakukan juga verifikasi dan validasi secara berkala sesuai dengan fasilitasi dan pendampingan dari Kementerian Sosial RI.
 - d. Pengurangan kawasan kumuh untuk memberikan kenyamanan dalam bekerja dan berusaha sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga.
- b) *Terkait tingkat pengangguran terbuka yang mengalami peningkatan untuk disertakan kelengkapan data untuk setiap jenis pengangguran terbuka sebagai dasar perbaikan kebijakan ekonomi daerah di tahun berikutnya.*

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Pekalongan pada tahun 2018 sebesar 6,13% dan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 5,77%. Angka tersebut dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik melalui survei rumah tangga di Kota Pekalongan dengan menggunakan metode *sampling*, sehingga tidak dapat menunjukkan detail pengangguran sesuai dengan sektor usaha. Untuk itu sebagai upaya solusi untuk mengetahui seberapa besar jumlah pengangguran di Kota

Pekalongan adalah dengan menyajikan data sektoral yang ada di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yaitu Data Pencari Kerja dan Data Pengangguran *by name by adress*.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekalongan melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan sektor-sektor yang paling dominan dalam pertumbuhan ekonomi dengan asumsi bahwa sektor-sektor tersebut banyak menyerap tenaga kerja sesuai dengan potensi Kota Pekalongan, diantaranya :

- 1) Program pelatihan keterampilan bagi pencari kerja, baik yang dilakukan di Balai Latihan Kerja, Lembaga Pelatihan Kerja Swasta maupun pelatihan ekonomi produktif yang dilakukan di beberapa Perangkat Daerah seperti Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM maupun di Kelurahan-Kelurahan dengan menggunakan Dana Kelurahan.
- 2) *On the Job Training* dan Pemagangan di dunia usaha (dunia industri) yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- 3) Pembentukan Forum Komunikasi Jejaring Pelatihan dan Pemagangan Dengan Industri Daerah Kota Pekalongan yang beranggotakan perusahaan-perusahaan dan Asosiasi Pengusaha yang ada di Kota Pekalongan sebagai upaya untuk memberikan media bagi dunia industri dan dunia usaha dalam memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah untuk menekan tingkat pengangguran terbuka.

Penyelenggaraan *Job Fair* sebagai media untuk menghubungkan pencari kerja dengan dunia usaha/industri baik yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja maupun yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi dan Bursa Kerja Khusus di beberapa SMK..

- c) *Terkait kinerja keuangan daerah dengan meningkatkan jumlah SILPA di Tahun 2018 dibanding tahun 2017 maka diperlukan : (a) Melakukan koordinasi secara rutin dengan lintas OPD; (b) Evaluasi kinerja berdasarkan capaian misi daerah direkomendasikan agar capaian Tahun 2019 sesuai target dalam tahun ke-4 RPJMD Tahun 2016-2021, maka program dan kegiatan pada RKPD serta pendanaan APBD perubahan Tahun 2019 sebagai tahun ke-4 RPJMD diprioritaskan/diarahkan untuk percepatan pencapaian indikator kinerja pada sasaran yang sampai dengan tahun 2018 belum memenuhi target; (c) Perencanaan dan penganggaran kegiatan serta pelaksanaan APBD untuk melakukan upaya mendorong penyerapan sesuai rencana melalui monitoring dan evaluasi per triwulan serta penerapan bentuk punishment bagi OPD yang tingkat penyerapan masih rendah (d) Program kegiatan harus dievaluasi secara terus menerus, untuk program kegiatan yang jelas tidak bermanfaat harus dihentikan dan yang bermanfaat harus dilanjutkan.*

SiLPA Tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan SiLPA Tahun 2017 antara lain disebabkan oleh adanya gaji dan tunjangan CPNS yang sudah dianggarkan pada Tahun 2018, tetapi tidak dapat direalisasikan karena mundurnya jadwal pengadaan CPNS.

Terkait dengan tingginya SiLPA pada Tahun 2018 maka sesuai dengan rekomendasi DPRD telah dilakukan upaya-upaya:

1) Melakukan koordinasi secara rutin dengan lintas OPD.

Pemerintah Kota Pekalongan sudah secara rutin melaksanakan koordinasi secara rutin dengan lintas OPD. Bentuk koordinasi tersebut antara lain :

- Rapat koordinasi penyerapan dan pelaporan Dana DAK, Bantuan Keuangan serta Dana Kelurahan (DAU Tambahan) yang dilakukan minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- Melaksanakan Rakorpok yang dilaksanakan oleh Bagian PBJ dan Dalbang setiap triwulan, bahkan pada akhir tahun dilaksanakan sampai 2 (dua) kali dalam sebulan. Rakorpok dipimpin oleh Walikota/Wakil Walikota dan dihadiri oleh semua Kepala OPD.
- Melaksanakan pemantauan atau peninjauan lapangan atas kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD bersangkutan.

2) Evaluasi kinerja berdasarkan capaian misi daerah direkomendasikan agar capaian Tahun 2019 sesuai target dalam tahun ke-4 RPJMD Tahun 2016-2021, maka program dan kegiatan pada RKPD serta pendanaan APBD perubahan Tahun 2019 sebagai tahun ke-4 RPJMD diprioritaskan/diarahkan untuk percepatan pencapaian indikator kinerja pada sasaran yang sampai dengan tahun 2018 belum memenuhi target;

Pemerintah Kota Pekalongan sudah secara rutin melaksanakan koordinasi secara rutin dengan lintas OPD. Bentuk koordinasi tersebut antara lain :

- Evaluasi RKPD setiap Triwulan
- Evaluasi SAKIP setiap Triwulan

3) Perencanaan dan penganggaran kegiatan serta pelaksanaan APBD untuk melakukan upaya mendorong penyerapan sesuai rencana melalui monitoring dan evaluasi per triwulan serta penerapan bentuk *punishment* bagi OPD yang tingkat penyerapan masih rendah.

Punishment yang diterapkan bagi OPD yang tingkat penyerapan masih rendah diberikan teguran pada saat rakorpok, terutama bagi 5 (lima) OPD dengan capaian terendah.

4) Program kegiatan harus dievaluasi secara terus menerus, untuk program kegiatan yang jelas tidak bermanfaat harus dihentikan dan yang bermanfaat harus dilanjutkan

Pada tahun 2019 telah dilakukan efisiensi terhadap perencanaan kegiatan di OPD tahun anggaran 2020 yang bersifat rutinitas dan kurang bermanfaat.

d) *Terkait single database Kota Pekalongan: (a) Validasi data kependudukan perlu disusun secara terpadu sehingga tersusun data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan; (b) Single database tahun 2019 Kota Pekalongan masih menginduk BPS, kedepan harus memperhatikan data sektoral dan data BPS.*

Terkait dengan data kependudukan yang *valid*, pada tahun 2020 BPS melakukan sensus penduduk *online*. Tujuan dilaksanakannya sensus penduduk 2020 adalah menyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menuju Satu Data Kependudukan Indonesia, serta menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk (fertilitas, mortalitas, dan migrasi) serta karakteristik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator SDGs. Harapannya pasca dilaksanakannya sensus maka data kependudukan lebih *valid* dan dapat dipertanggung jawabkan.

Terkait single database Kota Pekalongan, dapat dijelaskan bahwa :

1. Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Pekalongan telah menetapkan Perda No.3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Satu Data Terpadu Daerah (SDTD).
2. Dinkominfo selaku walidata telah melakukan pencermatan terhadap Perda No. 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan SDTD dan Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, sehingga diperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan, penyelenggara, tata kelola SDTD serta regulasi turunan yang diperlukan.
3. Dinkominfo mengembangkan aplikasi PUSAKA (Pusat Data Terpadu Kota Batik) sebagai media publikasi SDTD
4. Dinkominfo telah meminta data kepada OPD selaku produsen data untuk selanjutnya dilakukan input beberapa data sektoral OPD dalam aplikasi PUSAKA yang dapat diakses dengan alamat web: pusaka.Pekalongankota.go.id. Data sektoral dalam aplikasi tersebut mengacu format Kota Pekalongan Dalam Angka dan belum mempunyai format yang standar.

Beberapa tahapan kegiatan lanjutan tahun 2019 hingga 2020 dalam implementasi satu data adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Peraturan Walikota tentang Penyelenggara dan Penyelenggaraan SDTD.
 - 2) Penyusunan SK Walikota tentang Tim Penyelenggara SDTD dan SK Walikota tentang Forum/Sekretariat Forum SDTD
 - 3) Analisis kebutuhan data dan menyusun format data dengan mengkompilasi kebutuhan data untuk keperluan Profil OPD, Daerah Dalam Angka, Prioritas Data Provinsi dan Prioritas Data Pusat.
 - 4) Forum Satu Data
 - 5) Pengembangan aplikasi PUSAKA sesuai dengan kebutuhan data.
- e) *Penanganan sampah dan limbah cair menjadi prioritas dalam pembahasan RAPBD tahun 2020 dan RAPBD perubahan tahun 2019. Penanganan limbah tidak hanya sebatas MoU tetapi dibuat Rancangan Tindak Lanjut dan Implementasi yang jelas mulai dari perencanaan dan target pelaksanaan serta dilaporkan secara berkala kepada DPRD.*

Penanganan Sampah pada pembahasan RAPBD 2019, telah menjadi prioritas pembahasan. Alokasi anggaran pengelolaan sampah pada perubahan anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 8.375.291.000,- dari penetapan Rp. 7.838.165.000. Peningkatan alokasi anggaran tsb untuk penambahan SDM angkutan sampah, pengadaan tong sampah ; penambahan sarana prasarana kebersihan kota dan pembuatan perahu untk operasional Tim Jogo Kali untuk pengambilan sampah sampah yang dibuang ke sungai Loji oleh masyarakat.

Penanganan sampah pada pembahasan RAPBD 2020, juga telah menjadi prioritas dengan penambahan sarana prasarana pengelolaan sampah untuk masyarakat yang bermukim disekitar bantaran sungai Loji; *Tipping Fee* untuk pembakaran sampah di TPA, peningkatan anggaran fasilitasi komunitas peduli lingkungan dan kenaikan upah para tenaga angkut dan pengelola sampah dan kebersihan. Alokasi anggaran pengelolaan Sampah tahun 2020 sebesar Rp. 8.295.282.000,-

Selain dana yang dialokasikan pada DLH, pada tahun 2020 juga dianggarkan pada Dindagkop-UMKM untuk penanganan sampah pasar, Kecamatan untuk operasionalisasi K3 dan Kelurahan

melalui Dana Kelurahan guna membantu optimalisasi penanganan sampah, antara lain dengan pengadaan viar hidrolis untuk setiap kelurahan.

Upaya penanganan Limbah Cair dengan fokus penanganan pencemaran di semua sungai yang melintasi Kota Pekalongan (Sungai Loji, Banger, Meduri, Breml dan saluran Irigasi Asem Binatur) dengan langkah sebagai berikut :

- 1) Pengawasan terhadap kegiatan /usaha yang berpotensi menghasilkan limbah didorong untuk memiliki Izin Lingkungan, karena di dalam Izin Lingkungan termuat kewajiban pemilik kegiatan/ usaha untuk mengolah limbahnya dengan membuat IPAL (Instalasi Pengolah Limbah). Pengawasan ini juga secara periodik bekerjasama dengan DLHK Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Memberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan dalam UU nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan LH) kepada pemilik kegiatan /usaha yang sudah memiliki Izin Lingkungan namun tidak mentaati ketentuan dalam pengolahan limbah.
- 3) Sosialisasi, Edukasi, bintek kepada para pengelola IPAL setiap tahun baik di tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan.
- 4) Pengelolaan dan pemeliharaan 4 (empat) IPAL Comunal (Banyurip, Jenggol, Pringlangu dan Kauman)
- 5) MoU dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang untuk bersinergi penanganan pencemaran sungai, mengingat pencemaran sungai di Kota Pekalongan juga terimbas dari limbah kiriman daerah hulu dari Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. MoU ini sudah ditandatangani 3 (tiga) kepala Daerah, namun PKS (Perjanjian Kerjasama) antara DLH Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan belum dapat disepakati.

Terkait MoU dan PKS tersebut saat ini telah difasilitasi dari DLH Provinsi Jawa Tengah dengan mengundang rapat koordinasi bersama antara pemerintah Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Rapat koordinasi dihadiri oleh Biro Hukum dan Biro Kerjasama antar Daerah dari jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dengan hasil sebagai berikut :

- 1) MoU penanganan limbah cair harus diperbarui dengan melibatkan Gubernur Provinsi Jawa Tengah, sehingga MoU ditandatangani oleh 3 Kabupaten /Kota dan Gubernur Jawa Tengah, mengingat sungai yang tercemar melintasi wilayah antar kab/Kota.
- 2) Dalam waktu 3 (tiga) bulan, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang harus melaksanakan identifikasi sumber pencemar.
- 3) Dalam waktu 3 (tiga) bulan masing - masing Kabupaten /Kota dimohon menyusun rencana kerja yang akan dimuat dalam PKS.
- 4) Rencana Kerja tersebut harus sudah melalui pembahasan TTKSD (Tim Koordinasi Kerjasama antar Daerah) masing - masing kabupaten Kota.
- 5) Rencana Kerja dan data identifikasi sumber pencemar akan dirapat koordinasikan antara kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang dengan Fasilitasi DLHK Provinsi Jawa Tengah.
- 6) Dengan ditandatanganinya MoU penanganan limbah cair /pencemaran sungai oleh Gubernur bersama dengan 3 (tiga) Kepala Daerah tersebut, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

wajib memfasilitasi program/kegiatan yang mendukung pengendalian pencemaran di 3 (tiga) kabupaten /Kota.

- f) *Penanganan kasus narkoba di Kota Pekalongan untuk memperhatikan dan memprioritaskan program dan penanggulangan pencegahan bahaya narkoba serta melibatkan BNN.*

Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan berbagai upaya pencegahan bahaya narkoba melalui Program Walikota *Goes to School*, Sosialisasi bahaya narkoba dengan dana kelurahan, sosialisasi dan tes urine.

Mengingat bahaya narkoba yang sangat luar biasa, Pemerintah Kota Pekalongan terus gencar menggaungkan tentang bahaya narkoba di kalangan pelajar dari tingkat SMP hingga SMA baik negeri dan swasta, dalam apel Walikota *Goes to School*.

Walikota Pekalongan, selaku pembina apel menyampaikan kepada generasi muda bahaya narkoba dan obat-obatan berbahaya (narkoba), dan merupakan salah satu musuh terbesar generasi muda. Kegiatan Walikota *Goes to School* yang terus digalakkan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pelajar akan bahaya narkoba yang dapat membawa dampak buruk bagi masa depan generasi muda. Selama tahun 2019 kegiatan *Goes To School* telah dilakukan pada lokus-lokus sebagaimana ditunjukkan Tabel berikut.

Tabel 3.344 Lokasi Walikota Goes To School Tahun 2019

No	Tanggal	Lokasi	Undangan selain Unsur Pemkot Pekalongan
1	28-Jan-19	SMAN 2 Pekalongan	Duta Anti Narkoba Kota Pekalongan
2	11-Feb-2019	SMAN 4 Pekalongan	Duta Anti Narkoba Kota Pekalongan
3	18-Feb-19	SMKN 1 Pekalongan	Duta Anti Narkoba Kota Pekalongan
4	04-Mar-19	SMPN 13 Pekalongan	Duta Anti Narkoba Kota Pekalongan
5	22-Jul-19	SMPN 5 Pekalongan	Duta Anti Narkoba Kota Pekalongan
6	05-Agt-19	SMPN 6 Pekalongan	Duta Anti Narkoba Kota Pekalongan
7	19-Agt-19	SMPN 10 Pekalongan	Duta Anti Narkoba Kota Pekalongan
8	26-Agt-19	SMA ISLAM Pekalongan	Duta Anti Narkoba Kota Pekalongan
9	02-Sep-19	SMK Muhammadiyah Pekalongan	1. Kapolsek Pekalongan Barat 2. Danramil Pekalongan Barat. 3. Duta Anti Narkoba Pekalongan
10	16-Sep-19	SMPN 15 Pekalongan	1. Kapolsek Pekalongan Barat 2. Danramil Pekalongan Barat 3. Ketua Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) Kota Pekalongan 4. Duta Anti Narkoba Pekalongan
11	30-Sep-19	SMK Syafi'I Akrom Kota Pekalongan	1. Kapolsek Pekalongan Selatan 2. Danramil Pekalongan Selatan 3. Ketua Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) Kota Pekalongan 4. Duta Anti Narkoba Pekalongan
12	07-Okt-19	SMA Hasyim Asy'ari Kota Pekalongan	1. Kapolsek Pekalongan Timur 2. Danramil Pekalongan Timur 3. Ketua IPWL Kota Pekalongan 4. Duta Anti Narkoba Kota Pekalongan

No	Tanggal	Lokasi	Undangan selain Unsur Pemkot Pekalongan
13	14-Okt-19	SMAN 2 Kota Pekalongan	1. Kapolsek Pekalongan Utara 2. Danramil Pekalongan Utara 3. Ketua IPWL Kota Pekalongan 4. Duta Anti Narkoba Kota Pekalongan
14	21-Okt-19	SMA Al - Irsyad Kota Pekalongan	1. Kapolsek Pekalongan Timur 2. Danramil Pekalongan Timur 3. Ketua IPWL Kota Pekalongan 4. Duta Anti Narkoba Kota Pekalongan
15	04-Nov-19	SMA Santo Bernadus Kota Pekalongan	1. Kapolsek Pekalongan Utara 2. Danramil Pekalongan Timur 3. Ketua IPWL Kota Pekalongan 4. Duta Anti Narkoba Kota Pekalongan

Sosialisasi bahaya narkoba pada tahun 2019 juga dilaksanakan dengan dana kelurahan yang dikelola oleh Kelurahan. Beberapa kelurahan yang melaksanakan sosialisasi adalah : Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kelurahan Sapuro Kebulen, Kelurahan Tirto, Kelurahan Medono, Kelurahan Krapyak, Kelurahan Panjang Baru dan Kelurahan Kandang Panjang.

Memperhatikan tingginya kasus narkoba di Kota Pekalongan, Pemerintah Kota Pekalongan sudah mengusulkan dan menyiapkan persyaratan pembentukan BNK. Namun demikian berdasarkan evaluasi dan penilaian dari BNN Pusat belum memenuhi skor yang dipersyaratkan.

Pemerintah Kota Pekalongan telah memprioritaskan program dalam pencegahan bahaya kasus narkoba melalui :

- a) Melibatkan BNN Kabupaten Batang dalam kegiatan sosialisasi dan koordinasi penanganan kasus narkoba.
- b) Tahun 2019 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan telah melaksanakan Penyuluhan pencegahan kasus narkoba antara lain melalui kegiatan :
 - 1) Sosialisasi / penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba di sekolah- sekolah SMP/MTS/SMA/MA/SMK di Kota Pekalongan.
 - 2) Tes urine
 - 3) Lomba poster anti narkoba
 - 4) Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi satgas pelajar anti narkoba.
 - 5) Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi masyarakat di 8 kelurahan
 - 6) Sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba bagi mahasiswa
 - 7) Sosialisasi narkoba bagi ormas perempuan
- c) Tahun 2020 telah direncanakan penyusunan Raperda tentang pencegahan kasus narkoba.
- g) *Pemerintah Kota Pekalongan dalam mengoptimalkan PAD agar memperhatikan sistem dan targetnya, dengan menambah wajib pajak yang selama ini belum terkena pajak.*

Dalam rangka optimalisasi PAD, Pemerintah Kota Pekalongan telah melakukan berbagai upaya diantaranya;

- 1) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak
 - 2) Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah;
 - 3) Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah / simpatda untuk semua objek pajak daerah
 - 4) Peningkatan pelayanan dengan penerapan e-SPT dan penambahan fungsi pembayaran pada masing-masing *payment point* di kecamatan dan kantor kas
 - 5) Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan Sistem Informasi Pendapatan Daerah (Simpatda) dan pemasangan alat perekam data transaksi para wajib pajak (*tapping box* atau sejenisnya).
 - 6) Pemberian *Reward dan Punishment*
 - a. Pemberian *Reward*, seperti :
 - Penganugerahan Walikota Pekalongan Regional Tax Award setiap tahunnya diberikan kepada WP pembayar pajak daerah tertaat, terbesar, kooperatif didalam pemeriksaan pajak daerah dll.
 - Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum Jatuh Tempo Pembayaran.
 - Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan.
 - Pemberian doorprize/souvenir untuk Wajib Pajak yang taat pada event- event yang digelar oleh Pemkot Pekalongan, seperti Pameran Keterbukaan Informasi Publik dan Pekan Inovasi Daerah.
 - b. Pemberian *Punishment*, berupa :
 - Pemberian sanksi denda bagi WP yang terlambat bayar
 - Pemeriksaan pajak dengan melibatkan aparat penegak hukum (kepolisian dan kejaksanaan).
 - 7) Mengevaluasi dan meninjau kembali Perda-perda yang terkait dengan Pajak Daerah sesuai dengan kondisi dan perubahan peraturan perundangan Data objek dan subjek pajak yang *valid*
- h) *Penanganan rob di Kota Pekalongan untuk dilakukan kembali evaluasi program dan perencanaan yang bersinergi dengan OPD terkait, tidak hanya dengan DPU saja, serta memberikan laporan progres secara berkala dikirim ke DPRD.*

Penanganan rob di Kota Pekalongan telah dilakukan evaluasi program meliputi Program pengendalian banjir dan program pemeliharaan dan rehabilitasi drainase. Adapun kegiatan dalam rangka pelaksanaan program tersebut meliputi

1) Pengadaan dan Pemasangan Pompa

Pengadaan pompa baru untuk mengatasi genangan banjir di permukiman, meliputi : pompa Tirto Meduri, pompa Sutan syahrir, pompa Pasir Kraton Kramat, pompa panjang Baru, dan pompa Klego.

2) Pembangunan Kolam retensi

Pembangunan kolam retensi di Kelurahan Krapyak dan kelurahan Pasirkratonkramat dilakukan untuk menampung air dari *catchment area* sehingga penyedotan air bisa lebih optimal.

3) Perbaikan dan pemeliharaan jaringan drainase

Perbaikan dilakukan terhadap drainase yang fungsinya kurang optimal dalam mengalirkan air meliputi :

- Pembangunan saluran belakang Lembaga Masyarakat Panjang Wetan
- Peninggian saluran Jalan AMD Kramatsari
- Rehab saluran belakang Kecamatan Pekalongan Utara
- Normalisasi saluran Asem Binatur dan lapangan Mataram
- Normalisasi saluran Podo Timur
- Normalisasi saluran Asem Binatur ke hilir
- Normalisasi saluran irigasi Baros
- Kurasan saluran Bangunan Podo Timur 5 (BPT5) sampai jembatan Pasar Banyurip

4) Pembangunan Tanggul Rob

Pembangunan tanggul rob dilakukan untuk mencegah air laut masuk ke permukiman. Tanggul rob sudah dibangun sepanjang 1,8 km berada di Kelurahan Kandang Panjang dan Bandengan. Di sisi selatan tanggul dibuat *long storage* yang berfungsi untuk menampung air dari permukiman yang kemudian dipompa untuk dibuang ke Sungai Bremlu.

5) Rehabilitasi dan peninggian tanggul pengaman pantai

Tanggul pengaman pantai berfungsi untuk mencegah air laut limpas ke daratan/permukiman. Beberapa tanggul yang telah ada mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan perbaikan/rehabilitasi yaitu meliputi tanggul pengaman pantai yang masuk wilayah Kelurahan Kandang Panjang dan Kelurahan Bandengan. Sementara itu ada tanggul yang karena tinggi muka air laut yang terus meningkat menyebabkan air laut limpas ke daratan sehingga perlu penambahan ketinggian seperti tanggul Jalan Samudra.

i) Sesuai PP No. 13 Tahun 2019 rekomendasi LKPJ agar digunakan sebagai masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya

Penyusunan LKPJ Walikota Tahun 2019 telah mengacu pada substansi PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Di dalam Pasal 18 dijelaskan bahwa format LKPJ ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Oleh karena itu LKPJ Walikota Pekalongan Tahun 2019 disusun dengan sistematis dan substansi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri RI Nomor 700/479/OTDA tanggal 22 Januari 2020 tentang Format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Rekomendasi LKPJ Tahun 2018 telah digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2019 dan RKPD Tahun 2020.

BAB IV. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

4.1. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sehingga Pemerintahan Daerah tidak hanya menyelenggarakan apa yang menjadi urusan daerah, tapi juga melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang dilakukan dengan menganut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Tugas Pembantuan merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan. Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh yang menugasi. Pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Pemerintah kepada instansi vertikal di daerah didanai melalui anggaran kementerian/lembaga. Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dan pelaksanaan penugasan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Pemerintah dapat memberikan tugas pembantuan kepada pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa/kelurahan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan Pemerintah melalui Kementerian negara/Lembaga kepada Kepala Daerah yang pendanaannya disesuaikan dengan penugasan yang diberikan yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur bahwa urusan pemerintahan terbagi menjadi tiga bagian. Yaitu urusan absolut, urusan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan pemerintahan tersebut terpilah menjadi urusan yang menjadi kewenangan pusat dan kewenangan daerah dengan menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Asas desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, dan kewenangan dari desentralisasi sangat

berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat kemudian menjadi milik daerah. Menurut asas dekonsentrasi, terjadi pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu (untuk urusan pemerintah absolute), atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum di wilayahnya.

Tujuan asas Tugas pembantuan adalah untuk lebih mempercepat pencapaian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah serta untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum baik di lingkup daerah maupun secara agregat di tingkat nasional, karena rentang kendalanya lebih pendek. Secara pendanaan, Tugas pembantuan dapat dibiayai oleh APBN maupun APBD. Dimana Tugas Pembantuan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jika pemberi penugasan adalah pemerintah pusat, namun jika pemberi penugasan adalah pemerintah daerah provinsi maka pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. Pola pertanggungjawaban dalam Tugas Pembantuan ini pada prinsipnya adalah penerima tugas pembantuan harus bertanggungjawab kepada pemberi penugasan, namun pada kondisi dimana Tugas Pembantuan berasal dari Pemerintah kepada Bupati/Walikota, maka selain Bupati/Wali kota bertanggungjawab kepada pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga, juga harus melaporkan kepada Gubernur selaku wakil dari pemerintah pusat di daerah. Pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 juga disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Dan sampai dengan saat ini Peraturan Pemerintah dimaksud belum tersusun, sehingga pelaksanaannya masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Saat ini Kementerian/Lembaga sebagai Pengguna Anggaran lebih selektif dalam memberikan penugasan kepada pemerintah daerah. Sehingga jika pada tahun-tahun sebelumnya banyak terjadi tumpang tindih urusan dalam Tugas Pembantuan, maka mulai tahun 2016 terjadi perubahan mekanisme dari Tugas Pembantuan beralih pada Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun DAK Non Fisik.

Pada Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kota Pekalongan tidak memperoleh alokasi dana Tugas Pembantuan, tetapi ada beberapa kegiatan yang dialokasikan di Kota Pekalongan bersumber dari Pemerintah Pusat (APBN) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (APBD Provinsi Jawa Tengah) melalui perangkat daerah yang ada di Pemerintah Kota Pekalongan.

4.1.1. Dinas Pendidikan

Pada tahun anggaran 2019, Dinas Pendidikan Kota Pekalongan telah menerima beberapa program kegiatan yang bersumber dari APBN, baik yang terkait dengan peningkatan kompetensi pembelajaran maupun penyelenggaraan pendidikan keluarga. Dalam rangka untuk memperkuat kemitraan antara keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat (Tri Pusat Pendidikan) dalam membangun ekosistem pendidikan yang menumbuh kembangkan karakter dan budaya prestasi peserta didik telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga bagi 342 orang yang terdiri dari unsur PAUD, TK, SMP, RA, Organisasi Mitra (Pengawas Madrasah, Himpaudi, IGTKI, IGRA) dan Bintek Pembinaan Pendidikan keluarga bagi 50 orang yang terdiri dari unsur Kepala Sekolah SD, SMP, TK, KB, PKBM, Penilik PNF, Pengawas Sekolah, organisasi mitra, dan Dinas Pendidikan.

Dan untuk meningkatkan kompetensi siswa melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills*), pada tahun 2019 telah dialokasikan kegiatan

Diklat Peningkatan Kompetensi Pembelajaran bagi 473 orang guru (SD dan SMP) melalui dana APBN. Secara rinci kegiatan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kegiatan yang Bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	PAGU (Rp)	KELUARAN	SUMBER ANGGARAN
1	Dinas Pendidikan	Bintek Pembinaan Pendidikan keluarga	147.680.000,-	Bintek bagi 50 orang yang terdiri dari unsur Kepala Sekolah SD, SMP, TK, KB, PKBM, Penilik PNF, Pengawas Sekolah, organisasi mitra, dan Dinas Pendidikan	APBN
2	Dinas Pendidikan	Sosialisasi Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga	137.676.000,-	Sosialisasi bagi 342 orang yang terdiri dari unsur PAUD, TK, SMP, RA, Organisasi Mitra (Pengawas Madrasah, Himpaudi, IGTKI, IGRA)	APBN
3	Dinas Pendidikan	Diklat Peningkatan Kompetensi Pembelajaran	712.929.000,-	Diklat bagi 473 orang (Guru SD dan SMP)	APBN
4	Dinas Pendidikan	Bantuan Pemberian Makanan Sehat	90.000.000,-	Pemberian Makanan Sehat Kepada 6 Lembaga	APBN

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2020



Gambar 4.1 Dokumentasi Diklat Pengembangan Profesi Guru

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2020



Gambar 4.2 Dokumentasi Sosialisasi Pendidikan Keluarga

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, 2020

4.1.2. Dinperinaker

Dalam upaya meningkatkan keterampilan pencari kerja di Kota Pekalongan, Dinperinaker juga memperoleh alokasi anggaran Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) yang bersumber dari APBN melalui DIPA BBPLK Semarang dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3,65 M untuk 832 peserta. Pelatihan yang diselenggarakan adalah:

- a. Mekanik sepeda motor dengan 4 angkatan @ 16 orang peserta.
- b. Juru Las SMAW dengan 4 angkatan @ 16 orang peserta.
- c. Instalasi penerangan dengan 3 angkatan @16 orang peserta.
- d. Teknisi AC hanya 1 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang peserta.
- e. Instalasi Tenaga hanya 1 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang peserta.
- f. *Practical Office* dengan 5 angkatan @16 orang peserta.
- g. Desain Grafis dengan 3 angkatan @16 orang peserta.
- h. Administrasi Perkantoran hanya 1 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang peserta.
- i. Menjahit sebanyak 9 angkatan @16 orang peserta.
- j. Processing Hasil Pertanian sebanyak 6 angkatan @16 orang peserta dimana 2 angkatan dilaksanakan melalui skema Mobile Training Unit di Kelurahan Pringrejo dan Kelurahan Tirta
- k. Kecantikan kulit dengan 2 angkatan @16 orang peserta
- l. Kecantikan Rambut hanya 1 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 16 orang peserta.
- m. Tata Rias Kecantikan dengan 2 angkatan @16 orang peserta
- n. Mekanik Mobil dengan 2 angkatan @16 orang peserta
- o. Operator Mesin Bubut dengan 3 angkatan @16 orang peserta
- p. Teknisi HP dengan 2 angkatan @16 orang peserta
- q. *Skill for future* (pelatihan dalam upaya *up skilling* dan *re skilling* bagi pekerja yang akan alih keterampilan karena imbas PHK) 3 angkatan @ 16 orang peserta.

Secara rinci kegiatan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Dinperinaker adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kegiatan yang Bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	PAGU (Rp)	KELUARAN	SUMBER ANGGARAN
1	Dinperinaker	Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK)	3.856.902.400,-	Terfasilitasinya peatihan keterampilan bagi 832 pencari kerja di Kota Pekalongan	APBN

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Pekalongan, 2020



Pelatihan Desain Grafis di BLK

Pelatihan Las di BLK

Pelatihan Listrik di BLK

Pelatihan Mekanik Mobil di BLK



Pelatihan Mekanik Motor di BLK



Pelatihan Menjahit di BLK



Pelatihan Tata Rias di BLK



Pelatihan Membuat Roti di BLK



Pelatihan Op.r Mesin Bubut di BLK



Pelatihan Practice Office di BLK



Gambar 4.3 Dokumentasi Pelatihan di BLK

Sumber : Dinperinaker Kota Pekalongan, 2020

4.1.3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kembali memperoleh alokasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program Kotaku merupakan upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam upaya untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, Program Kotaku melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, serta kawasan dan kabupaten/kota. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.

Program ini diawali dengan pelaksanaan pendataan kondisi awal (baseline) 7 Indikator Kumuh di kelurahan dengan melibatkan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM). Data tersebut diintegrasikan antara dokumen perencanaan masyarakat dan dokumen perencanaan kota untuk menentukan kegiatan prioritas mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru, yang nantinya akan dilaksanakan, baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain, yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota.

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala guna memastikan ketepatan kualitas dan sasaran kegiatan, sehingga dapat membantu percepatan penanganan permukiman kumuh. Kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat akan dilakukan bersama tahapan kegiatan. Termasuk mendorong perubahan perilaku dalam pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar permukiman.

Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2019 kembali memperoleh alokasi program Kotaku yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pananganan Banjir/Rob, berupa pembangunan tanggul pengendali banjir di Kelurahan Bandengan, Krapyak dan Kelurahan Tirto dengan anggaran sebesar Rp. 1,3 M.
- b. Kegiatan Peningkatan kualitas Drainase, berupa pekerjaan drainase lingkungan, plat dekker dan gorong-gorong di Kelurahan Bandengan, Krapyak, Panjang Baru, Padukuhan Kraton, Panjang Wetan, Poncol dan Kelurahan Tirto dengan anggaran sebesar Rp. 3,86 M.
- c. Kegiatan Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan, berupa pekerjaan jalan beton, paving dan aspal di Kelurahan Panjang Baru, Padukuhan Kraton, Bandengan, Krapyak, Panjang Wetan, Poncol dan Kelurahan Tirto dengan anggaran sebesar Rp. 4.24 M.
- d. Kegiatan Peningkatan Sarana Air Bersih, berupa pekerjaan Pembangunan Tower Air Bersih dan Jaringan Perpipaan di Kelurahan Padukuhan Kraton dengan anggaran sebesar Rp. 232,6 juta.
- e. Kegiatan Peningkatan Sarana Sanitasi, berupa Pembangunan dan MCK Komunal di Kelurahan Padukuhan Kraton dengan anggaran sebesar Rp. 231,45 juta dan di Kelurahan Panjang Baru dengan anggaran 27,7 juta.
- f. Kegiatan Peningkatan Sarana Persampahan, berupa Pengadaan Gerobak Sampah di Kelurahan Padukuhan Kraton dengan anggaran sebesar Rp. 60 juta dan di Kelurahan Panjang Baru dengan anggaran 26 juta.

Secara rinci kegiatan Program KOTAKU Tahun Anggaran 2019 melalui Satker pada Dinperkim adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Kegiatan yang Bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	PAGU (Rp)	KELUARAN	SUMBER ANGGARAN
1	Dinperkim	Penanganan Banjir / Rob melalui Program KOTAKU	1.203.830.000,-	Terbangunnya tanggul pengendali banjir di Kelurahan Bandengan, Krapyak dan Kelurahan Tirto	APBN
2	Dinperkim	Peningkatan Kualitas Drainase	3.856.902.400,-	Terbangunnya drainase lingkungan, plat dekker dan gorong-gorong di Kelurahan Bandengan, Krapyak, Panjang Baru, Padukuhan Kraton, Panjang Wetan, Poncol dan Kelurahan Tirto	APBN
3	Dinperkim	Peningkatan Kualitas Jalan Lingkungan	4.238.328.200,-	Terbangunnya Jalan Beton, Paving dan Aspal di Kelurahan Panjang Baru, Padukuhan Kraton, Bandengan dan Kelurahan Krapyak	APBN
4	Dinperkim	Peningkatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	349.182.900,-	1. Terbangunnya tower air bersih dan jaringan perpipaan di Kelurahan Padukuhan Kraton. 2. Terbangunnya MCK Komunal	APBN

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	PAGU (Rp)	KELUARAN	SUMBER ANGGARAN
				di di Kelurahan Padukuhan Kraton dan Panjang Baru.	
5	Dinperkim	Peningkatan Sarana Persampahan	86.000.000,-	Tersedianya gerobak sampah di Kelurahan Padukuhan Kraton dan Panjang Baru	APBN

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan, 2020



Gambar 4.4 Dokumentasi Pembangunan Tanggul Pengendali Banjir melalui Program KOTAKU

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan, 2020



Gambar 4.5 Dokumentasi Pembangunan Jembatan, Plat deker dalam rangka Peningkatan Kualitas Drainase

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan, 2020



Gambar 4.6 Dokumentasi Pembangunan Jalan Beton dalam rangka Peningkatan Jalan Lingkungan

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan, 2020



Gambar 4.7 Pembangunan MCK

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan, 2020



Gambar 4.8 Dokumentasi Sarana Air Bersih dalam rangka Peningkatan Sarana Air Bersih dan Sanitasi

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan, 2020



Gambar 4.9 Dokumentasi Pengadaan Gerobak Sampah

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekalongan, 2020

4.1.4. Dinas Kesehatan

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kota Pekalongan, pada tahun 2019 Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Kesehatan Kota Pekalongan telah memperoleh

beberapa program kegiatan yang bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah. Program kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan kesehatan secara umum yaitu meningkatkan derajat kesehatan dengan indikator meningkatnya sumber daya manusia, meningkatnya kualitas hidup masyarakat, memperpanjang umur harapan hidup, meningkatnya kesejahteraan keluarga dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Kegiatan pemutakhiran data DMK kesehatan bertujuan untuk mendata dan membuat profil SDM kesehatan di fasilitas kesehatan, data pendidikan, registrasi dan perijinan. Kemudian adanya dokumen laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program JKN sebagai hasil keluaran dari program penguatan pelaksanaan jaminan kesehatan. Dilaksanakannya skrining kesehatan di 6 kelurahan dengan peserta sebanyak 6000 orang yang merupakan bagian dari kegiatan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular (Posbindu PTM). Kegiatan Intensif Case Fanding (ICF) bertujuan untuk pengobatan secara dini dan menghindari penemuan cacat kusta tingkat III. Dengan dilaksanakannya Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Kunjungan Neonatus dan Kunjungan Nifas di Kota Pekalongan diharapkan Meningkatkan cakupan kunjungan neonatus (KN) di Kota Pekalongan 100%; Meningkatkan cakupan kunjungan nifas (KF) di Kota Pekalongan 100%; dan Meningkatnya kapasitas petugas dalam pelaksanaan KN/KF. Pertemuan Konsolidasi RAD PG dalam Penanggulangan Stunting di Kota Pekalongan dengan tujuan diperolehnya pemahaman oleh petugas lintas program dan lintas sektor tentang stunting, penyebab, pencegahan dan penanggulangannya. Orientasi Pemberian Makanan Bayi dan Anak dan Pemantauan Pertumbuhan Balita di Kota Pekalongan bertujuan adanya pemahaman dari peserta tentang Kebijakan Program Perbaikan Gizi dan Pelayanan Gizi di Puskesmas; Konsep Dasar Proses PMBA yang berbasis masyarakat. Kegiatan Orientasi Surveilans dan Pemutakhiran Data Tingkat Kota di Kota Pekalongan dengan keluaran Penemuan kasus AFP mencapai target; Penanggulangan kasus potensial KLB tertangani < 24 jam; Menurunnya kasus potensial KLB (hepatitis, diare, typhoid); Meningkatnya surveilans epidemiologi ke Rumah Sakit dan Puskesmas.

Secara rinci kegiatan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Kegiatan yang Bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	PAGU (Rp)	KELUARAN	SUMBER ANGGARAN
1	Dinas Kesehatan	Pemutakhiran Data SMDK Kesehatan	18.420.000,-	1. Data SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan, data pendidikan, registrasi dan perijinan. 2. Pembuatan profil SDM Kesehatan	APBN
2	Dinas Kesehatan	Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional	43.650.000,-	Adanya dokumen laporan pelaksanaan Monev Program JKN Bulanan; Adanya laporan rapat koordinasi; adanya hasil monev ke FKTP BPJS Kesehatan	APBN
3	Dinas Kesehatan	Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM)	79.365.000,-	Terlaksananya deteksi dini (skrining kesehatan) di 6 Kelurahan (Setono, Kalibaros, Gamer, Noyontaansari, Kauman) sebanyak 6.000 orang	APBN

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	PAGU (Rp)	KELUARAN	SUMBER ANGGARAN
4	Dinas Kesehatan	ICF (Intensif Case Fanding)	72.750.000,-	1. Pengobatan secara dini 2. Menghindari penemuan cacat kusta tingkat III	APBN
5	Dinas Kesehatan	Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Kunjungan Neonatus dan Kunjungan Nifas di Kota Pekalongan	10.800.000,-	Meningkatnya cakupan kunjungan neonatus (KN) di Kota Pekalongan 100%; Meningkatnya cakupan kunjungan nifas (KF) di Kota Pekalongan 100%; Meningkatnya kapasitas petugas dalam pelaksanaan KN/KF	APBN
6	Dinas Kesehatan	Pertemuan Penguatan 5 NG di Kota Pekalongan	9.551.000,-	Kab/Kota yang melakukan pelayanan ibu bersalin sesuai standar minimal sebesar 95% dan persentase Kab/Kota yang melakukan pelayanan Ibu hamil sesuai standar minimal sebesar 95%	APBN
7	Dinas Kesehatan	Pertemuan Konsolidasi RAD PG dalam Penanggulangan Stunting di Kota Pekalongan	9.050.000,-	Diperolehnya pemahaman oleh petugas lintas program dan lintas sektor tentang stunting, penyebab, pencegahan dan penanggulangannya	APBN
8	Dinas Kesehatan	Orientasi Pemberian Makanan Bayi dan Anak dan Pemantauan Pertumbuhan Balita di Kota Pekalongan	44.280.000,-	Adanya pemahaman dari peserta tentang Kebijakan Program Perbaikan Gizi dan Pelayanan Gizi di Puskesmas; Konsep Dasar Proses PMBA yang berbasis masyarakat.	APBN
9	Dinas Kesehatan	Orientasi Surveilans dan Pemutakhiran Data Tingkat Kota di Kota Pekalongan	24.630.000,-	Penemuan kasus AFP mencapai target; Penanggulangan kasus potensial KLB tertangani < 24 jam; Menurunnya kasus potensial KLB (hepatitis, diare, typhoid); Meningkatnya surveilans epidemiologi ke Rumah Sakit dan Puskesmas	APBN
10	Dinas Kesehatan	Fasilitasi Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja (UKK)	7.750.000,-	Terbentuknya Pos Upaya Kesehatan Kerja	APBN
11	Dinas Kesehatan	Fasilitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Sehat	8.450.000,-	Meningkatnya kualitas higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan	APBN
12	Dinas Kesehatan	Pengukuran Kebugaran pada Calon Jamaah Haji	7.820.000,-	Hasil pengukuran kebugaran dan analisa hasil test kebugaran CJH	APBN

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	PAGU (Rp)	KELUARAN	SUMBER ANGGARAN
13	Dinas Kesehatan	Pertemuan Peningkatan Lingkungan Sehat	10.800.000,-	Meningkatnya koordinasi Penanggulangan Penyakit Berbasis Lingkungan/KLB pada saat dan pasca bencana	APBN
14	Dinas Kesehatan	Fasilitasi Limbah Rumah Tangga	1.800.000,-	Meningkatnya pemahaman pengelolaan limbah rumah tangga	APBN
15	Dinas Kesehatan	Fasilitasi Sampah Rumah Tangga	1.096.000,-	Komposter skala rumah tangga	APBN

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020



Gambar 4.10 Dokumentasi Pembentukan Pos Upaya Kesehatan Kerja

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, 2020

4.1.5. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam upaya pengendalian penduduk dan keluarga berencana, Pemerintah Kota Pekalongan memperoleh alokasi program kegiatan dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah. Beberapa kegiatan yang bersumber dari APBN/APBD Provinsi diantaranya adalah Program Keluarga Harapan bagi 8.265 Keluarga Penerima Manfaat, Bantuan Pangan Non Tunai bagi 8.063 Keluarga Penerima Manfaat senilai Rp. 110.000,-/bulan dalam bentuk non tunai guna mengurangi beban pengeluaran KPM, fasilitasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) guna memberikan media bagi masyarakat melalui sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun Kota dan non-pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat kurang mampu.

Selain itu ada beberapa kegiatan terkait urusan Keluarga Berencana yang dilaksanakan Dinsos P2KB, diantaranya adalah Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk guna penyusunan profil grand design Kota Pekalongan, terlayannya 229 peserta KB MKJP dan tercapainya target PPM PB MKJP, tersosialisainya tata cara pengelolaan PPKS, terbinanya Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Lansia, 4 kelompok UPPKS, dan terfasilitasinya operasional 4 kelompok PIK Remaja di Kota Pekalongan serta terfasilitasinya kegiatan BKR di kampung KB.

Secara rinci kegiatan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Kegiatan yang Bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	PAGU (Rp)	KELUARAN	SUMBER ANGGARAN
1	DINSOS P2KB	Program Keluarga Harapan (PKH)	16.960.625.000	Tersalurkannya Bantuan Sosial PKH kepada 8.264 Keluarga Penerima Manfaat	APBN
2	DINSOS P2KB	Bantuan Pangan Non Tunai	10.643.160.000	Tersalurkannya Bantuan Pangan Non Tunai kepada 8.063 Keluarga Penerima Manfaat	APBN
2	DINSOS P2KB	Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)	307.000.000	Terlayaninya aduan permasalahan kemiskinan dan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	APBN
3	DINSOS P2KB	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	12.825.000	1. Tercetaknya profil grand design kota Pekalongan. 2. Data inventarisasi isu strategis kabupaten / kota. 3. Terbentuknya sekolah siaga kependudukan di SMPN 1 Pekalongan.	APBN
4	DINSOS P2KB	Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan	52.164.100	1. Terlayaninya 229 peserta KB MKJP dan tercapainya target PPM PB MKJP. 2. Terlayaninya akseptor yang telah habis masa pakai IMPLANT. 3. Tersosialisasinya program kespro di kelompok-kelompok kegiatan. 4. Terfasilitasinya TJM di tingkat kabupaten / kota.	APBN
5	DINSOS P2KB	Pembinaan dan Pembangunan Keluarga di Seluruh Tingkat Wilayah	5.100.000	1. Tersosialisasinya tata cara pengelolaan PPKS di tingkat kabupaten / kota. 2. Terbinanya 4 kelompok BKB. 3. Terbinanya 4 kelompok BKL. 4. Terfasilitasinya pameran gelar dagang UPPKS dalam rangka HARGANAS Tingkat Provinsi. 5. Terbinanya 4 kelompok UPPKS di kabupaten / kota.	APBN

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA KEGIATAN	PAGU (Rp)	KELUARAN	SUMBER ANGGARAN
6	DINSOS P2KB	Penggerakan Stakeholder mitra Kerja Serta Perubahan Sikap dan perilaku Masyarakat berdasarkan data dan Informasi yang berbasis IT dalam program KKBPK	82.689.500	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terfasilitasinya pertemuan kelompok kerja advokasi. 2. Terfasilitasinya operasional pendayagunaan MUPEN. 3. Tersedianya data keluarga melalui aplikasi SIGA. 4. Tersedianya data statistic rutin (dalap dan pelkon) program KKBPK. 5. Terupdatingnya data PK sampai dengan tingkat kelurahan. 6. Tersedianya data rutin secara berkualitas. 	APBN
7	DISOS P2KB	Penguatan peran PIK Remaja dan BKD dalam edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai calon Ibu	24.995.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terfasilitasinya operasional 4 kelompok PIK Remaja. 2. Terfasilitasinya kegiatan pikir di kampung KB. 3. Terfasilitasinya kegiatan PIK Remaja dengan mitra kerja. 4. Terfasilitasinya dan terbinanya 46 kelompok BKR. 5. Terfasilitasinya kegiatan BKR di kampung KB. 	APBN

Sumber: Dinsos P2KB, 2020

4.1.6. Dinas Pertanian dan Pangan

Pada Tahun 2019, selain melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan, Dinas Pertanian dan Pangan juga melaksanakan program/ kegiatan (Tugas Pembantuan) yang anggaran bersumber dari APBN sebanyak 1 program/ kegiatan dan APBD Propinsi Jawa Tengah sebanyak 2 program/ kegiatan.

Program/ Kegiatan yang bersumber dari APBN adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, Kegiatan Pemberdayaan pekarangan pangan, dengan anggaran sebesar Rp. 710.000.000,- (Tujuh ratus sepuluh juta rupiah). Keluaran dari kegiatan ini adalah terbentuknya 10 kelompok kawasan rumah pangan lestari (KRPL) baru dan berkelanjutan 4 KRPL lama. Adapun outcome dari kegiatan tersebut adalah terlaksananya pemberdayaan kelompok wanita tani dalam memberdayakan pekarangan di 14 kelurahan.

Program/ Kegiatan yang bersumber dari APBD Propinsi Jawa Tengah adalah Program Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan pengenalan konsumsi pangan B2SA, Kegiatan Optimalisasi pemanfaatan pekarangan. Bantuan tersebut dalam bentuk barang pengolahan pangan. Keluaran dari kegiatan ini adalah Terlaksananya kegiatan pemanfaatan pekarangan dan KRPL, dengan outcome Tersedianya sarana produksi olahan pangan pada 1 kelompok KRPL.

Program/ kegiatan lainnya yang bersumber dari APBD Propinsi Jawa Tengah adalah Pengembangan pemantauan dan analisis ketersediaan pangan. Bantuan dalam bentuk beras 540 kg. Keluaran dari kegiatan tersebut adalah Terlaksananya bantuan bahan pangan yang mengalami PUSO (gagal panen). Adapun outcome kegiatan ini adalah Tersedianya bahan pangan untuk 54 KK.



Gambar 4.11 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Beras

Sumber: Dinsos P2KB, 2020

4.2. TUGAS PEMBANTUAN YANG DIBERIKAN

Pada Tahun Anggaran 2019, Kota Pekalongan tidak memberikan tugas pembantuan kepada kecamatan maupun kelurahan di Kota Pekalongan.

BAB V. PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. Berbagai keberhasilan pembangunan tersebut telah dicapai dalam mewujudkan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan daerah, walaupun diraih dengan mengalami berbagai tantangan dan hambatan. Prestasi dan capaian yang telah diraih merupakan hasil kerja keras bersama antara pemerintah eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Namun harus diakui bahwa selain keberhasilan yang telah dicapai, juga terdapat beberapa hal yang belum berhasil dan masih terdapat permasalahan yang menjadi keprihatinan bersama. Pemerintah Kota Pekalongan memandang kekurangan keberhasilan tersebut sebagai cambuk untuk bekerja lebih keras lagi di waktu-waktu yang akan datang.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pekalongan Tahun 2019 pada dasarnya merupakan evaluasi atas penyelenggaraan urusan pemerintahan selama 1 tahun guna mewujudkan visi dan misi RPJMD yang menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD. Hasil evaluasi tersebut bersifat menyeluruh, mulai dari tingkat Kota sampai dengan tingkat Organisasi Perangkat Daerah. Pencapaian target kinerja pada tahun 2019 akan menjadi masukan, baik dalam pengendalian penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun 2019 maupun dalam penyusunan RKPD Kota Pekalongan Tahun 2021.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pekalongan Tahun 2019 ini juga telah menindaklanjuti rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pekalongan Tahun 2018. Hal ini terutama dapat terlihat dalam penyusunan sub Bab 3.3 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2018 dan sub Bab I.2 tentang Visi Misi yang telah melaporkan ketercapaian kinerja indikator sasaran tahun berjalan dalam upaya pencapaian Visi Misi Walikota Pekalongan. Selain itu, dalam Bab III tentang Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah telah dilakukan upaya pengukuran terhadap indikator kinerja program dan kegiatan pada setiap urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Diharapkan bahwa LKPJ Tahun 2019 ini dapat memenuhi ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/479/OTDA perihal Format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), sehingga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi.

Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam mengemban amanat menyelenggarakan urusan pemerintahan guna mewujudkan Kota Pekalongan yang lebih sejahtera, mandiri, dan berbudaya berdasarkan nilai-nilai religiusitas.

Pekalongan, 23 Maret 2020
Walikota Pekalongan,

HM. SAELANY MACHFUDZ, SE